PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI
BARITO SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TANGGAL 7 JULI

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
BARITO SELATAN
TAHUN 2024







BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
JALAN PAHLAWAN KM. 06 TELP. (0525)21015 - FAX (0525) 21504 BUNTOK

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 disusun secara konkrit, sistematis dan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta mengacu pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah Untuk Periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan, yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta mengacu pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari 7 (tujuh) BAB dengan susunan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :
a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Tahun 2024;
b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2024;
c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2024; dan
d. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam kegiatan pembangunan Tahun 2024 yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2024.

(2) Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dalam merumuskan program prioritas pembangunan Tahun 2024.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam hal RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Daerah akan menggunakan Program dan Kegiatan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahNya, sehingga kita mampu menyusun dokumen perencanaan tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pedoman utama perencanaan teknis operasional bagi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD. Oleh karena itu, kedudukan dan peran Rencana Kerja Pemerintah Daerah sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun kedepan.

Dengan demikian, maka diharapkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi rencana program serta kegiatan hingga pelaksanaannya sebagaimana yang telah dituangkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 ini kami ucapkan terimakasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Buntok, 7 Juli 2023.
Pj. BUPATI BARITO SELATAN

DEDDY WINARWAN

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	**i**
DAFTAR ISI	**ii**
DAFTAR TABEL	**iv**
DAFTAR GAMBAR	**ix**
BAB I Pendahuluan	**I-1**
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	**II-1**
2.1 Gambaran Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-29
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-53
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-84
2.5 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022	II-93
2.6 Sustainable Development Goals (SDGs)	II-201
2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-202
2.8 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-210
2.9 Dukungan Untuk Ibukota Negara (IKN) Baru	II-237
2.10 Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024	II-239
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah	**III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-26
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	**IV-1**
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-4

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah **V-1**

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah **VI-1**

BAB VII Penutup **VII-1**

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan	II-2
Tabel 2.2.	Jarak dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Di Kabupaten Barito Selatan	II-4
Tabel 2.3.	Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten Barito Selatan	II-5
Tabel 2.4.	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan	II-5
Tabel 2.5.	Jenis Tanah di Kabupaten Barito Selatan	II-8
Tabel 2.6.	Rata-rata Suhu dan Kelembahan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan	II-10
Tabel 2.7.	Rata-rata Tekanan Udara,Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan	II-10
Tabel 2.8.	Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan	II-11
Tabel 2.9.	Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Barito Selatan	II-11
Tabel 2.10.	Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Barito Selatan	II-13
Tabel 2.11.	Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	II-15
Tabel 2.12.	Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan	II-15
Tabel 2.13.	Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman	II-16
Tabel 2.14.	Potensi Pengembangan Kawasan Industri	II-16
Tabel 2.15.	Potensi Pengembangan Kawasan Wisata	II-17
Tabel 2.16.	Potensi Pariwisata di Kabupaten Barito Selatan	II-17
Tabel 2.17	Potensi Kawasan Hutan	II-18
Tabel 2.18	Kawasan Lindung di Kabupaten Barito Selatan	II-18
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupten Barito Selatan	II-22
Tabel 2.20	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan	II-23
Tabel 2.21	Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan	II-23
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Barito Selatan	II-24
Tabel 2.23	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin	II-25
Tabel 2.24	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Status Pekerjaan	II-28

Tabel 2.25	Produk Domesik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan	II-29
Tabel 2.26	Produk Domesik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan	II-30
Tabel 2.27	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan	II-32
Tabel 2.28	Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan	II-33
Tabel 2.29	Capaian Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah	II-36
Tabel 2.30	PDRB Perkapita Kabupaten Barito Selatan	II-39
Tabel 2.31	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatan	II-43
Tabel 2.32	Capaian IPM Kabupaten Barito Selatan	II-47
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Bidang Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan	II-50
Tabel 2.34	Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan	II-52
Tabel 2.35	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Barito Selatan	II-54
Tabel 2.36	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Barito Selatan	II-55
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Barito Selatan	II-56
Tabel 2.38	Jumlah dan Rasio Guru/Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan	II-57
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	II-57
Tabel 2.40	Matriks Indikator Kinerja Urusan bidang pendidikan kabupaten Barito Selatan	II-58
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	II-59
Tabel 2.42	Capaian SPM Bidang Kesehatan	II-59
Tabel 2.43	Capaian Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	II-63
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan	II-64
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan	II-65
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan	II-65
Tabel 2.47	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Selatan	II-66
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja kabupaten barito selatan	II-67
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	II-67
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Barito Selatan	II-68

Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	II-68
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	II-69
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	II-69
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	II-70
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	II-71
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	II-72
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	II-72
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	II-73
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan	II-73
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Barito Selatan	II-74
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Barito Selatan	II-74
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Barito Selatan	II-74
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	II-75
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	II-75
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Selatan	II-76
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	II-76
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	II-77
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Barito Selatan	II-78
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	II-78
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Barito Selatan	II-79
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	II-79
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	II-80
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan	II-81
Tabel 2.74	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Barito Selatan	II-81
Tabel 2.75	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan	II-82

Tabel 2.76	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Barito Selatan	II-83
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewa Kabupaten Barito Selatan	II-83
Tabel 2.78	Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/ Bulan Kabupaten Barito Selatan	II-85
Tabel 2.79	It, Ib dan NTP Gabungan Provinsi Kalimantan Tengah	II-87
Tabel 2.80	Produktivitas Daerah Kabupaten Barito Selatan	II-89
Tabel 2.81	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana di Kabupaten Barito Selatan	II-91
Tabel 2.82	Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan	II-92
Tabel 2.83	Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Non Produktif terhadap Penduduk Usia Produktif Kabupaten Barito Selatan	II-93
Tabel 2.84	Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan	II-102
Tabel 2.85	Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Barito Selatan	II-104
Tabel 2.86	Tujuan dan Indikator Kinerja SDGs Kabupaten Barito Selatan	II-201
Tabel 2.87	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Kabupaten Barito Selatan	II-205
Tabel 3.1	Produk Domestik Bruno Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan	III-24
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha(persen)	III-25
Tabel 3.3	Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024	III-36
Tabel 3.4	Prakiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024	III-43
Tabel 3.5	Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan	III-45
Tabel 3.6	Proyeksi/Target Struktur APBD Tahun Anggaran 2024	III-45
Tabel 3.7	Rincian Pagu Belanja per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024	III-47
Tabel 3.8	Rekapitulasi Belanja per Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024	III-58
Tabel 4.1	Hubungan dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-17
Tabel 4.2	Daftar Inovasi di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023	IV-21
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan	V-5
Tabel 5.2	Rekap Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	V-6
Tabel 5.3	Rekap Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Sesuai Perangkat Daerah Tujuan	V-7
Tabel 5.4	Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	V-8

Tabel 5.5	Usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	V-9
Tabel 5.6	Usulan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	V-10
Tabel 6.1	Capaian Indikator Makro Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2022 dan Target Tahun 2024	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026	VI-3
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026	VI-4

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-6
Gambar 2.1	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Barito Selatan	II-3
Gambar 2.2	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Selatan	II-4
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barito Selatan	II-6
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kabupaten Barito Selatan	II-9
Gambar 2.5	Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Barito Selatan	II-12
Gambar 2.6	Tipe Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan	II-13
Gambar 2.7	Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan	II-14
Gambar 2.8	Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Selatan 2014-2034	II-20
Gambar 2.9	Proporsi Penduduk di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022	II-21
Gambar 2.10	Piramida Penduduk Kabupaten Barito Selatan	II-24
Gambar 2.11	Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Barito Selatan	II-26
Gambar 2.12	Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	II-27
Gambar 2.13	Proporsi Tingkat Pendidikan Angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan	II-28
Gambar 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah (Persen)	II-33
Gambar 2.15	Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan	II-35
Gambar 2.16	Struktur Perekonomian Regional Kalimantan Tengah	II-37
Gambar 2.17	Perkembangan PDRB per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Barito Selatan	II-38
Gambar 2.18	Perkembangan angka inflasi Kalimantan Tengah (%)	II-40
Gambar 2.19	Perkembangan inflasi dua kota Harga Konsumen	II-41
Gambar 2.20	Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya dan Kota Sampit Terhadap Inflasi di Tingkat Nasional	II-42
Gambar 2.21	Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan	II-43
Gambar 2.22	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah	II-44
Gambar 2.23	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan	II-45
Gambar 2.24	Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan	II-46
Gambar 2.25	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan tengah	II-48
Gambar 2.26	IPM Kabupaten Barito Selatan	II-48
Gambar 2.27	Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Melek Hurup Kabupaten Barito Selatan	II-50
Gambar 2.28	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah	II-51

Gambar 2.29	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk di Kabupaten Barito Selatan	II-52
Gambar 2.30	Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan	II-53
Gambar 2.31	Produksi Perkebunan Kabupaten Barito Selatan	II-77
Gambar 2.32	Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita/ Bulan Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah	II-86
Gambar 2.33	Nilai Tukar Petani Per Sub Sektor Gabungan di Provinsi Kalimantan Tengah	II-88
Gambar 2.34	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten barito Selatan	II-94
Gambar 2.35	Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan	II-95
Gambar 2.36	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Selatan	II-96
Gambar 2.37	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan	II-97
Gambar 2.38	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Selatan	II-98
Gambar 2.39	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Barito Selatan	II-99
Gambar 2.40	Gini Rasio Kabupaten Barito Selatan	II-100
Gambar 2.41	Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)	II-201
Gambar 3.1	Geopolitical Risk (GPR) Index	III-2
Gambar 3.2	World Uncertainty Index	III-3
Gambar 3.3	Perkembangan Harga Komoditas Energi	III-3
Gambar 3.4	Perkembangan Harga Komoditas Pangan	III-4
Gambar 3.5	Perkembangan Harga Komoditas Logam	III-4
Gambar 3.6	Inflasi Beberapa Negara	III-5
Gambar 3.7	Inflasi Gap Vs Suku Bunga Rill	III-5
Gambar 3.8	Kebijakan Suku Bunga Bank Sentral Global	III-6
Gambar 3.9	Perkembangan Kasus Covid-19 di China, Li Keqiang Index dan Indikator ekonomi China	III-6
Gambar 3.10	PMI Manufaktur Beberapa Negara	III-7
Gambar 3.11	Kinerja PMI Manufaktur Global Desember 2022	III-7
Gambar 3.12	Probabilitas Resesi beberapa Negara	III-8
Gambar 3.13	Probabilitas Resesi beberapa Negara	III-9
Gambar 3.14	Pertumbuhan Ekonomi indonesia Triwulan (Persen)	III-9
Gambar 3.15	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahunan (Persen)	III-10
Gambar 3.16	Perkembangan Indikator ekonomi indonesia	III-11
Gambar 3.17	Penerimaan dan Pengeluaran APBN	III-13
Gambar 3.18	Rasio Utang Luar Negeri	III-13
Gambar 3.19	Inflasi Berdasarkan Komponen	III-14
Gambar 3.20	Inflasi dan Target Inflasi	III-14
Gambar 3.21	Pertumbuhan Komponen Ekspor	III-15
Gambar 3.22	Pertumbuhan Komponen Impor	III-15

Gambar 3.23	10 Komoditas Non Migas dengan share terbesar pada tahun 2022	III-16
Gambar 3.24	Neraca Perdagangan Indonesia	III-16
Gambar 3.25	Perubahan Nilai Tukar Rupiah (YTD)	III-17
Gambar 3.26	Cadangan Devisa	III-17
Gambar 3.27	UST10Y dan SUN 10Y	III-18
Gambar 3.28	IHSG dan DJIA	III-18
Gambar 3.29	Aliran Modal Asing Indonesia	III-19
Gambar 3.30	Pertumbuhan Ekonomi Kal-Teng (%YoY)	III-19
Gambar 3.31	Faktor Pendorong Ekonomi Kal-Teng 2022	III-20
Gambar 3.32	Inflasi Kal-Teng	III-20
Gambar 3.33	Pertumbuhan Ekonomi Kal-Teng	III-21
Gambar 3.34	Outlook Kal-Teng 2023	III-21
Gambar 3.35	Outlook Kal-Teng 2024	III-22
Gambar 3.36	Proyeksi Inflasi Kal-Teng	III-23
Gambar 3.37	Laju Pertumbuhan Ekonomi Barito Selatan	III-24
Gambar 4.1	Tema Pembangunan 2023-2026	IV-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja pemeintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renca Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

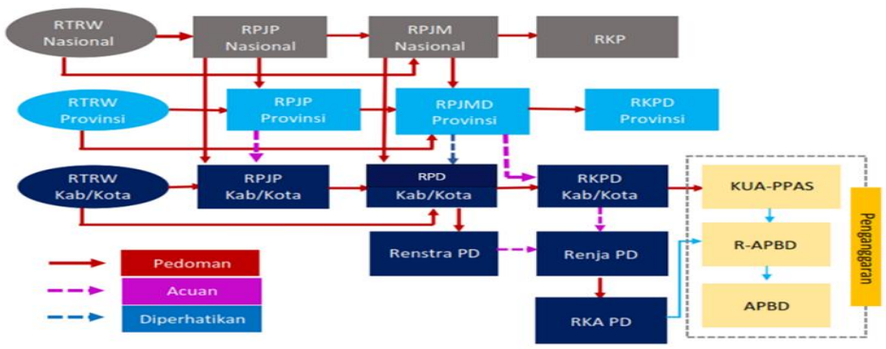
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota disusun berpedoman RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Awal RKPD Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Prioritas Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD.

Oleh sebab itu, dokumen RKPD yang disusun oleh Kabupaten/kota mempunyai hubungan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik terhadap dokumen perencanaan pada Kabupaten/kota itu sendiri, maupun terhadap dokumen perencanaan Provinsi serta mengacu kepada dokumen perencanaan pemerintah pusat, agar terciptanya keselarasan dan sinkronisasi program prioritas antar Nasional dan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD disusun dengan menjaga keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi dengan berbagai dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah, yang ditunjukkan oleh kebijakan, program, dan kegiatan yang tidak saling bertentangan namun selaras satu sama lain. Untuk jelasnya secara skematis hubungan antar dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1. pada halaman selanjutnya berikut ini:

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber : Permendagri 86/2017, diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan ke dalam RKA PD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 dan Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan dengan:

1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan rencana kegiatan pemerintah provinsi, dalam hal pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana kegiatan operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
3. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2024 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah.
4. Memberikan arah bagi stakeholder dalam pembangunan daerah serta merumuskan dan menyusun perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan daerah Tahun 2024.
5. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

6. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah, serta Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah.
7. Sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penentuan kegiatan prioritas.
8. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggran Sementara (PPAS), serta RAPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
9. Merupakan media konsultasi publik dan segenap *stakeholders* daerah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program/ kegiatan daerah serta sebagai bahan rekomendasi/ kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Pasal 79 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengisyaratkan bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dan disajikan dengan Sistematika paling sedikit memuat :

a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah:
c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
g. Penutup.

Selanjutnya Sistematika tersebut diatas, disusun per BAB, sehingga terdiri dari 7 (tujuh) BAB, dengan ringkasan sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, menjelaskan (1) Latar Belakang, yang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD; (2) Dasar Hukum Penyusunan RKPD; (3) Hubungan antar Dokumen; (4) Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD; (5) Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : **Gambaran Umum Kondisi Daerah,** memuat (1) Kondisi Umum Kondisi Daerah; (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD dan 3) Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : **Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah,** memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi; dan (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,** memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan; dan (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.

BAB V : **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,** mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan yang disusun dan yang nantinya akan menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, disertai dengan pendanaan berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI : **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,** Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI : **Penutup**

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada bagian ini akan menyajikan dan menjelaskan sejarah pembentukan Kabupaten Barito Selatan secara singkat yang kemudian dilanjutkan dengan uraian data mengenai gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Barito Selatan yang meliputi aspek geografi dan demografi serta berbagai aspek indikator kinerja penyelenggaraan daerah.

Secara historis, Kabupaten Barito Selatan didirikan pada tanggal 21 September 1959, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, yang merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi dalam suatu wilayah Kabupaten. Pada saat awal dibentuk, Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.266.400 hektar.

Pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan kemudian dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur.

2.1.1. Aspek Letak, Kondisi Geografis, Karakteristik Lokasi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Setelah pemekaran seperti yang telah diuraikan di atas, wilayah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 6 (enam) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Jenamas, dan Kecamatan Dusun Hilir, dengan luas wilayah menjadi 883.000 hektar.

Berikut ini tabel sebaran Desa/Kelurahan, Luas Wilayah dan Proporsinya menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan:

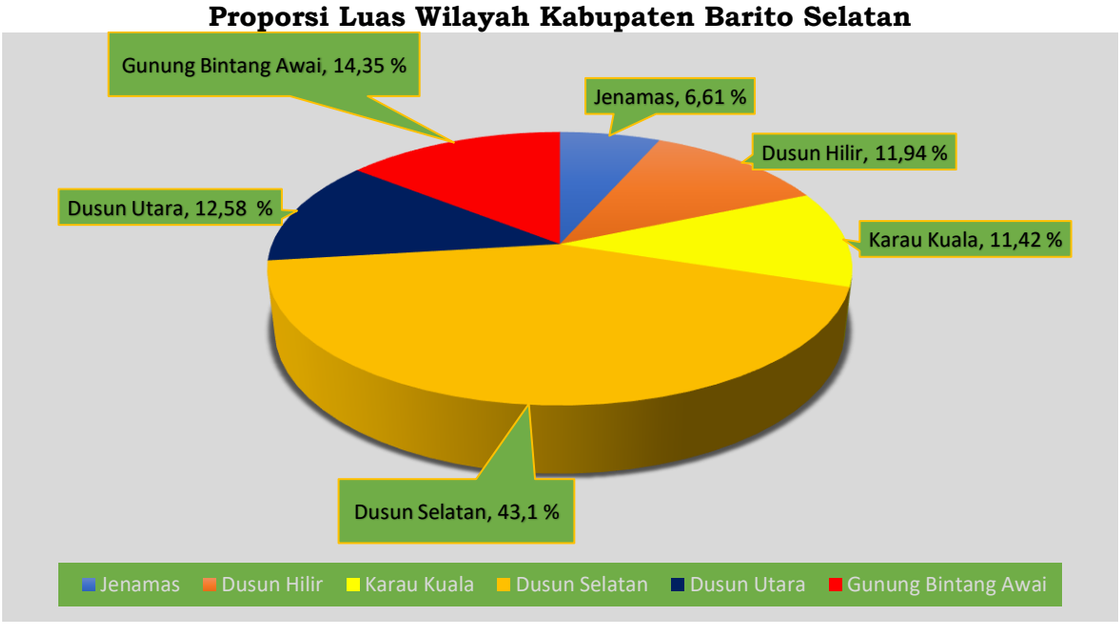
Tabel 2. 1
Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Jenamas	Rantau Kujang	4	1	70.800	9,43
2.	Dusun Hilir	Mengkatip	9	1	206.500	19,52
3.	Karau Kuala	Bangkuang	10	1	109.900	11,75
4.	Dusun Selatan	Buntok	24	3	119.600	16,14
5.	Dusun Utara	Pendang	18	1	182.900	18,12
6.	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	21	-	193.300	25,04
Barito Selatan			**86**	**7**	**883.000**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, wilayah Kabupaten Barito Selatan mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 1˚15’35,625” LS dan 114˚35’48,600” BT - 115˚36’35,700 BT, dengan luas Kabupaten Barito Selatan yaitu 883.000 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu) hektar. Dengan rincian luas Wilayah Kecamatan Jenamas 70.800 hektar, Kecamatan Dusun Hilir 206.500 hektar, Kecamatan Karau Kuala 109.900 hektar, Kecamatan Dusun Selatan 119.600 hektar, Dusun Utara 183.900 hektar dan Kecamatan Gunung Bintang Awai 193.300 hektar. Proporsi luas wilayah Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada gambar di berikut ini.

Gambar 2. 1
Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Selanjutnya, secara administratif, Kabupaten Barito Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Barito Utara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas
- Sebelah Barat : Kabupaten Kapuas.
- Sebelah Timur : Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

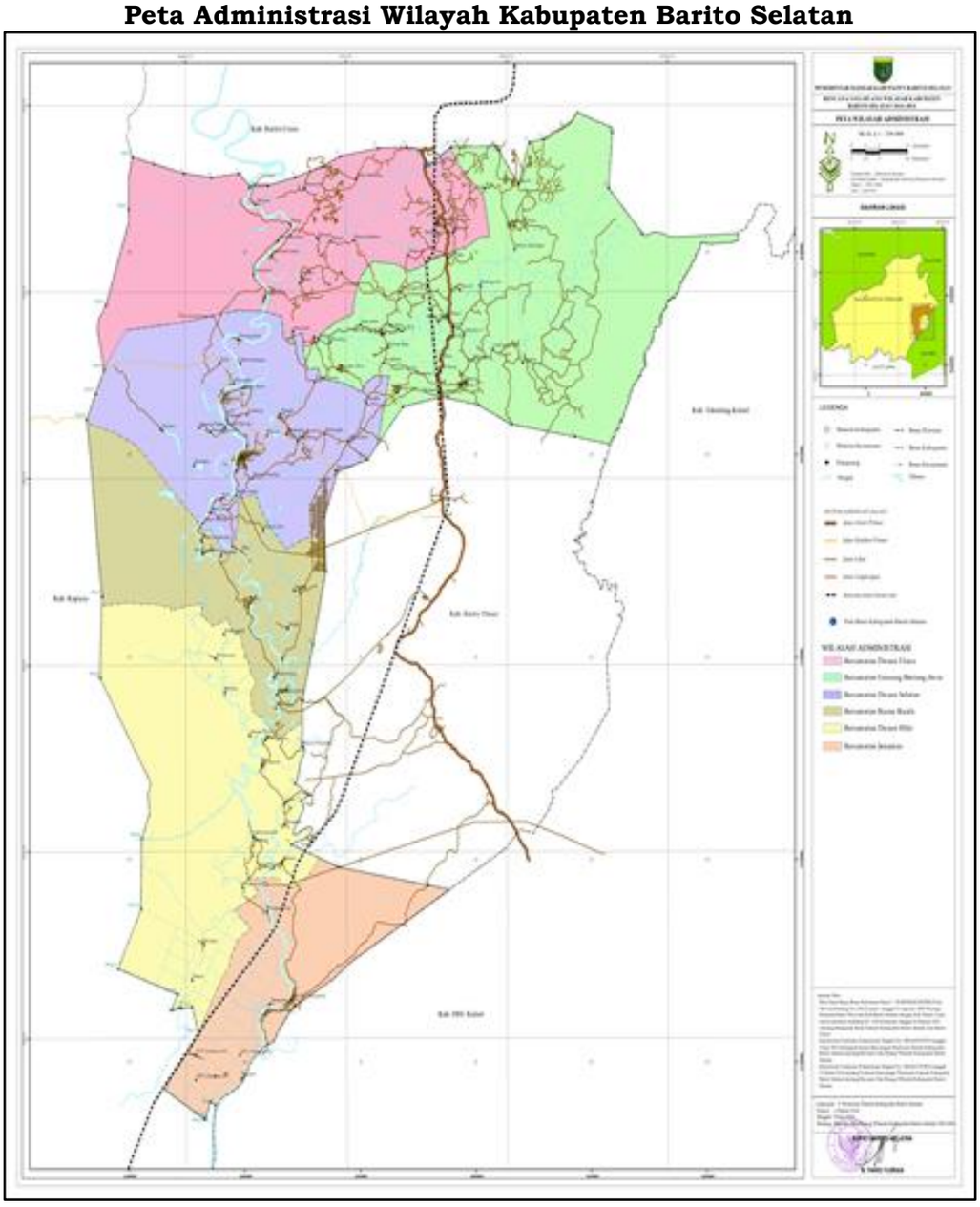
Secara geografis, Kabupaten Barito Selatan terletak membujur di sepanjang Sungai Barito dengan letak astronomis di antara 1°20′LS- 2°35′LS dan 114°-115° BT. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah, dengan panjang 900 km dan rata-rata kedalaman 8 m melewati lima dari enam kecamatan yang ada. Panjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang khusus melintasi Wilayah Administrasi Barito Selatan sekitar 233,64 km yang berpotensi bagi perikanan budidaya dan tangkap, daerah (inti) konservasi, juga bisnis agrowisata. Adapun jarak antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak (km)
1.	Jenamas	Rantau Kujang	132
2.	Dusun Hilir	Mengkatip	99
3.	Karau Kuala	Bangkuang	57
4.	Dusun Selatan	Buntok	1
5.	Dusun Utara	Pendang	41
6.	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	42

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Gambar 2. 2
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Selatan



Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014

2.1.1.3. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah dengan kemiringan lahan berkisar antara 0-40 persen. Kemiringan lahan 15-40 persen berada di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai yang merupakan daerah perbukitan. Pada bagian tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai sampai miring, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara.

Bagian utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Sejalan dengan fisiografi wilayah, pada areal yang bertopografi bergunung berada pada daerah-daerah di kawasan atas, sebaliknya pada areal bertopografi rendah berada pada daerah-daerah di kawasan bawah, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3
Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten Barito Selatan

No.	Kemiringan Lahan	Luas (Ha)
1	0 - 2%	555.747
2	2 - 15%	199.075
3	15 - 40%	107.195
4	>40%	20.983
Jumlah		**883.000**

Sumber : RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Selanjutnya, terkait dengan ketinggian wilayah yang ada di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Gunung Bintang Awai merupakan wilayah dengan ketinggian tertinggi yakni sebesar 55 meter di atas permukaan laut (mdpl). Untuk wilayah dengan ketinggian terendah ada di Kecamatan Jenamas yakni sebesar 27 meter di atas permukaan laut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

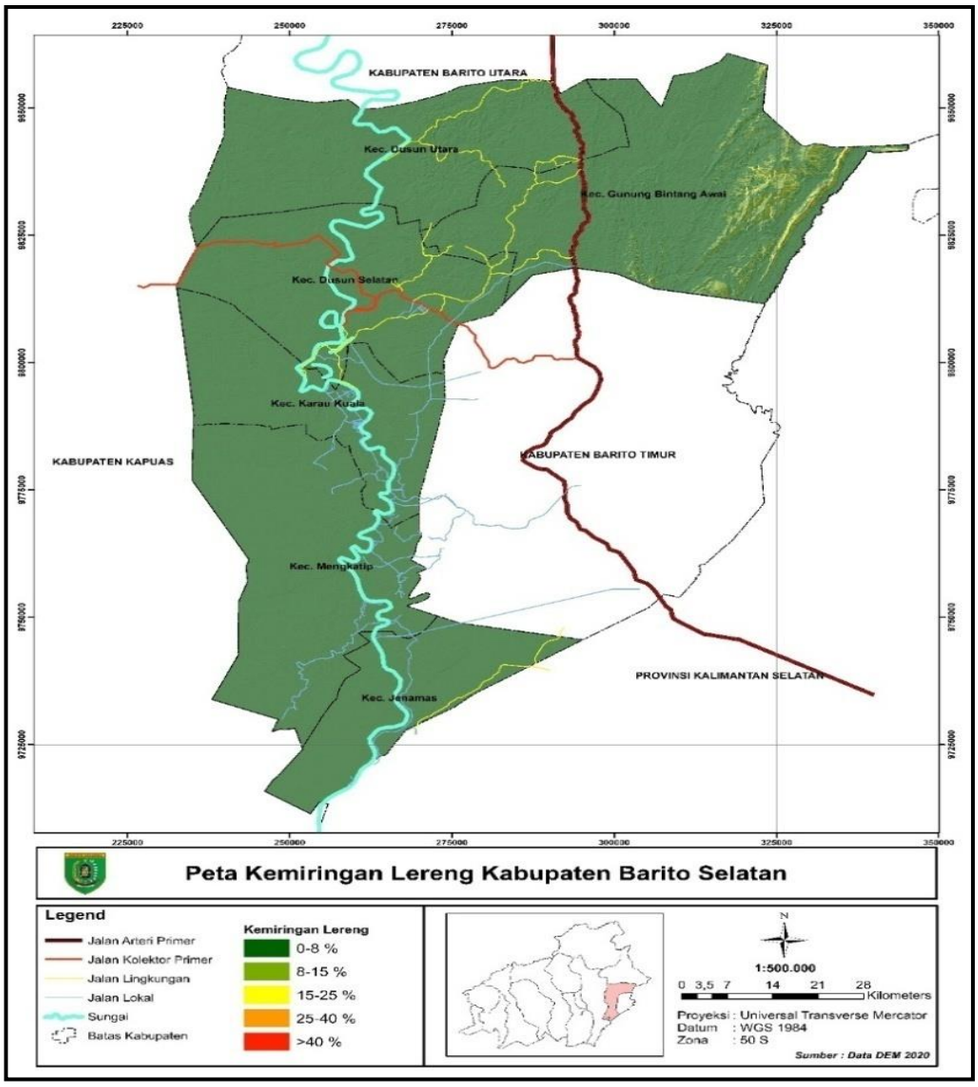
Tabel 2. 4
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi(m)
1	Jenamas	Rantau Kujang	27
2	Dusun Hilir	Mengkatip	31
3	Karau Kuala	Bengkuang	33
4	Dusun Selatan	Buntok	35
5	Dusun Utara	Pendang	38
6	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	55

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Berdasarkan data pada tabel 2.3 dan 2.4, kemiringan lahan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. 3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Data DEM Tahun 2020, diolah

2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Barito Selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Informasinya untuk pengembangan wilayah meliputi potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung dan kerawanan fisik. Berdasarkan formasi batuannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuannya terdiri dari: Aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan bergambut; Batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu, terdapat Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material

vulkanik; Batuan beku; Batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara; Batuan metamorf. Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- Aluvial, dijumpai di sepanjang kiri kanan jalur aliran sungai Barito, mulai dari bagian Selatan sampai ke Utara sungai Barito. Tanah endapan sungai ini merupakan suatu tanggul sungai dataran banjir, terbentuk dari bahan induk liat dan pasir. Lapisan-lapisan tanahnya terlihat jelas bentuk wilayah datar, warna coklat tua sampai coklat kekuningan, tekstur agak halus, drainase agak terlambat dan reaksi tanah masam. Lebih masuk dari tepi sungai daerahnya lebih rendah dan sering tergenang, sehingga dijumpai tanah aluvial hidromorfik kelabu yang memanjang disamping tanah aluvial, bersolum dalam, terbentuk wama kelabu tekstur halus sampai agak kasar, drainase terhambat dan reaksi tanah masam. Setelah aluvial hidromorfik terdapat tanah *gley* yang berasosiasi dengan endapan tanah organik yang telah mengalami pelapukan lanjut. Tanah yang terbentuk dikenal sebagai tanah *gley* humus. Tanah ini sering berasosiasi dengan organosol sehingga disebut tanah kompleks organosol - *gley* humus, mempunyai solum dalam, warna gelap, tekstur dari halus sampai sedang, drainase terhambat dan rekasi tanah masam.
- Regosol, dijumpai menyebar dibagian tengah kabupaten Barito Selatan. Tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.
- Padsolik, merupakan jenis tanah yang cukup luas di jumpai menyebar di tengah sampai hulu sungai. Tanah ini telah mengalami perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk wilayahnya berombak samapai agak berbukit, warna tanah coklat sampai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase baik dan reakasi tanah masam. Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum dangkal dan berbatu, membentang di puncak

perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 meter keadaan medan yang terjal dan curah hujan tinggi menyebabkan erosi yang cukup berat sehingga terjadilah tanah dangkal berbatu.

- Organosol, merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat disebelah Barat sungai Barito mulai dari selatan hingga ke bagian Utara Kabupaten Barito Selatan. Ketebalan gambut umumnya dalam (90 cm) terdapat pada bentuk wilayah datar dan di daerah cekungan, warna merah kehitaman sampai coklat tua, drainase sangat terhambat, reaksi tanah sangat masam.
- Podsolik, terletak menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kwarsa) pada bentuk wilayah berombak dan agak berombak, warna coklat tua kemerahan sampai kuning pucat, tekstur sedang, drainase agak terhambat dan reakasi masa.
- Podsol, terletak di hulu Kabupaten Barito Selatan serta sebelah Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergelombang, mempunyai tektur yang halus, berwarna kecoklatan.
- Regosol, tanah tersebut terletak di Utara bagian tengah dari kabupaten Barito selatan, yaitu kecamatan Dusun Utara.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah dan penyebarannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5
Jenis Tanah di Kabupaten Barito Selatan

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Aluvial	263.151,5	41,5
2.	Organosol	131.892,8	20,8
3.	Podsolik	71.019,2	11,2
4.	Podsol	48.925,7	7,7
5.	Litosol	39.948,3	6,3
6.	Kambisol	27.266,3	4,3
7.	Regosol	52.630,3	8,2

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan, 2009

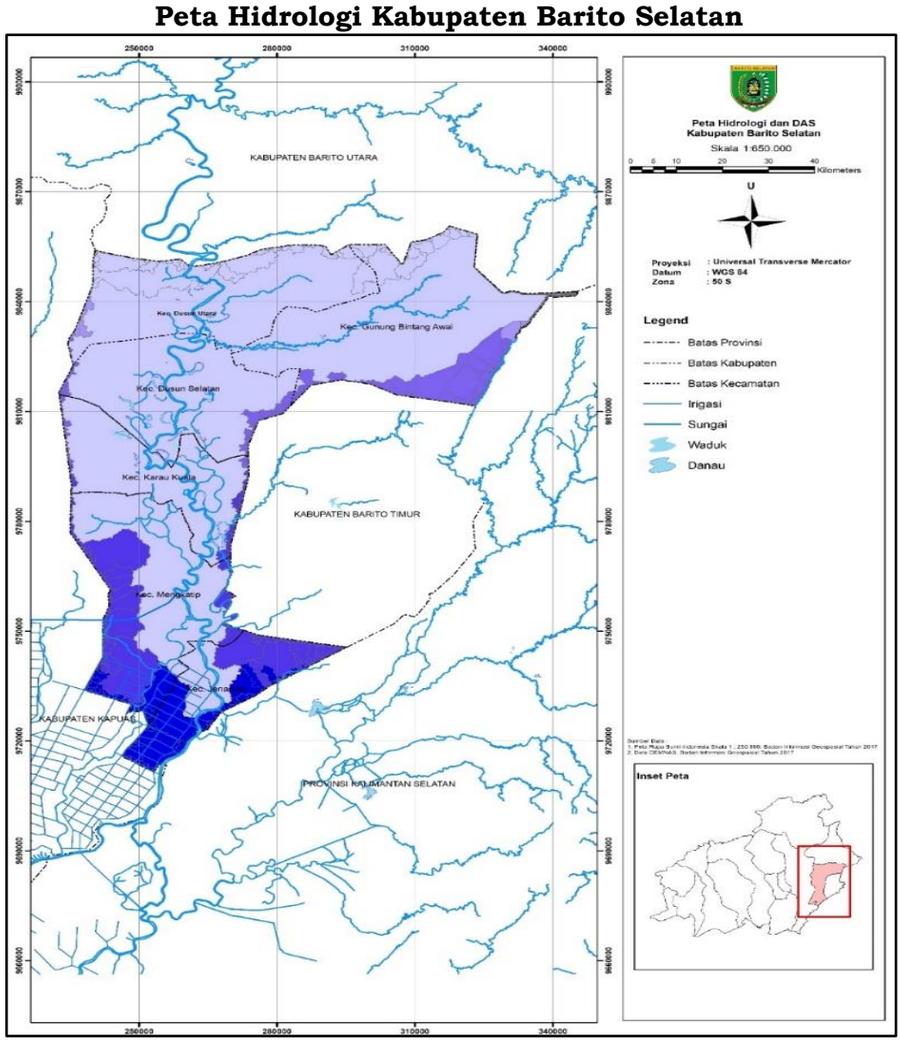
2.1.1.5. Hidrologi

Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai *verval* yang rendah hingga ke sektor tengah maka jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh, khususnya pada musim kemarau.

Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat hingga ke bagian tengah; pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Wilayah lebih hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan *verval* tinggi bahkan beriam.

Dengan demikian, kawasan hulu sangat berpotensi bagi pembangkit listrik tenaga air disamping sebagai sumber air mineral. Kawasan berawa disektor tengah dan pesisir berfungsi retensi saat kelebihan air musim penghujan. Dengan satu sungai besar (Sungai Barito) dan banyak sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Barito Selatan. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8m merupakan sungai terpanjang di Barito Selatan. Peta hidrologi Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 4
Peta Hidrologi Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Peta RBI skala 1 : 250.000 dan Data Demnas 2017, diolah

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Barito Selatan merupakan wilayah yang beriklimtropis sehingga sangat dipengaruhi oleh perubahan angin yangmelewatinya. Selain itu unsur-unsur iklim lainnya seperti suhu, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, penyinaran matahari dan curah hujan ikut mempengaruhi kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi klimatologi di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2. 6
Rata-rata Suhu dan kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan

No.	Bulan	Suhu(⁰C)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
1	Januari	34,3	22,0	27,7	100,0	56,0	83,5
2	Pebruari	34,6	20,8	27,9	99,0	51,0	81,4
3	Maret	35,1	22,0	28,2	99,0	55,0	81,4
4	April	35,2	22,0	28,2	100,0	53,0	82,1
5	M e i	35,3	22,5	28,8	99,0	51,0	81,5
6	J u n i	35,0	22,4	28,2	99,0	53,0	81,7
7	J u l i	34,6	22,6	28,1	100,0	53,0	82,1
8	Agustus	34,8	22,0	28,1	100,0	50,0	81,5
9	September	34,6	22,0	28,1	100,0	52,0	81,2
10	Oktober	34,2	22,8	28,1	100,0	55,0	82,6
11	Nopember	34,2	22,5	28,4	99,0	47,0	81,5
12	Desember	34,2	22,1	28,5	99,0	43,0	80,0

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2023

Tabel 2. 7
Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan

No.	Bulan	Tekanan Udara (mb)			Kecepatan Angin (Knots)	Arah Terbanyak	Penyinaran Matahari (%)
		Maks	Min	Rata-rata			
1	Januari	1 011,0	1 001,2	1 006,8	13,0	Calm	3,9
2	Pebruari	1 011,3	1 000,4	1 006,1	11,0	Calm	3,8
3	Maret	1 011,1	1 000,0	1 005,8	11,0	Calm	4,5
4	April	1 011,4	1 000,5	1 005,8	9,0	Calm	5,5
5	M e i	1 010,6	1 000,7	1 005,7	8,0	Calm	5,2
6	J u n i	1 009,8	1 001,5	1 006,0	9,0	Calm	4,9
7	J u l i	1 010,2	1 001,8	1 005,9	7,0	Calm	4,2
8	Agustus	1 010,6	1 002,2	1 006,1	9,0	Calm	4,2
9	September	1 012,2	1 000,6	1 006,9	9,0	Calm	3,7
10	Oktober	1 011,3	1 001,5	1 006,4	11,0	Calm	4,0
11	Nopember	1 011,0	1 001,7	1 006,2	10,0	Calm	4,1
12	Desember	1 010,9	1 000,0	1 005,3	10,0	Calm	3,9

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2023

Tabel 2. 8
Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan

No.	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
1	Januari	20	267,6
2	Pebruari	16	331,6
3	Maret	23	370,7
4	April	20	396,1
5	M e i	19	319,3
6	J u n i	12	237,1
7	J u l i	16	314,0
8	Agustus	17	106,0
9	September	13	186,4
10	Oktober	23	311,1
11	Nopember	23	267,6
12	Desember	14	246,6

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan penataan ruang, dengan adanya tatanan penggunaan lahan maka penataan ruang akan semakin terkendali dan teratur. Kondisi dimana terjadi ketida sesuaian lahan dengan kemampuan tanah juga dapat mempengaruhi penataan ruang. Penggunaan lahan merupakan dasar penentuan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang pada hakekatnya merupakan gabungan antara aktivitas masyarakat dengan tingkat teknologi, jenis usaha, serta jumlah manusia.

Kabupaten Barito Selatan berdasarkan luas kawasan hutan dan perairan mempunyai luas 702.009,9 Hektar yang terbagi dalam beberapa kawasan, yaitu hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, dan hutan produksi (Hutan produksi terbatas,tetap dan dapat dikonversi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 9
Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Barito Selatan

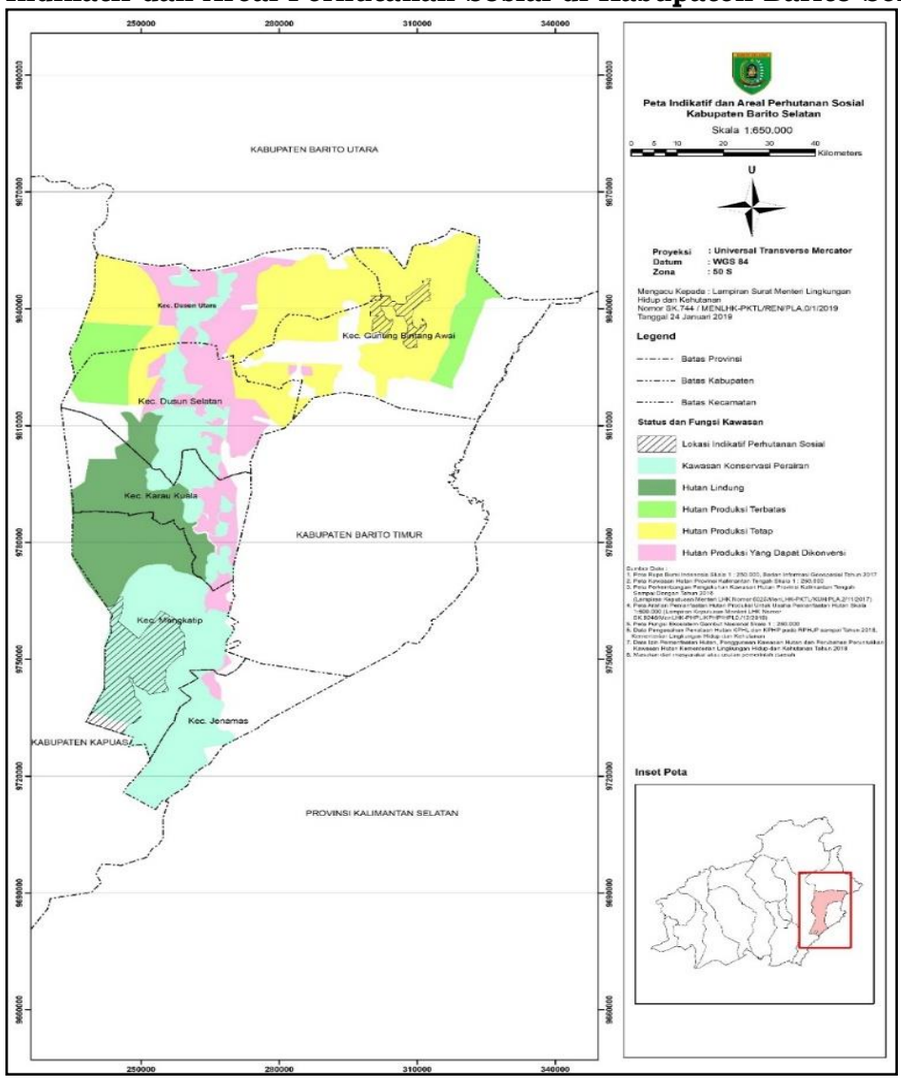
No.	Kawasan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	86,637
2	Suaka Alam dan Pelastarian Alam	76,941
3	Hutan Produksi	
	a. Hutan Produksi Terbatas	42,287
	b. Hutan Produksi Tetap	177,324
	c. Dapat dikonversi	62,454

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Sementara itu apabila mengacu kepada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 Tangal 24 Januari 2019 terkait dengan area perhutanan sosial provinsi Kalimantan

Tengah untuk Kabupaten Barito Selatan memiliki status dan fungsi kawasan yang terdiri dari hutan lindung yang berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Mangkatip dan Kecamatan Karau Kuala serta Kecamatan Dusun Selatan, hutan produksi terbatas yang berada di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Dusun Selatan. Sementara untuk Hutan produksi tetap berada di wilayah Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan serta Kecamatan Gunung Bintang Awai serta hutan produksi yang dapat dikonversi tersebar di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Mengkatip dan Kecamatan Jenamas. Terkait dengan status dan fungsi kawasan bisa dilihat pada gambar 2.5 berikut ini.

Gambar 2. 5
Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019, diolah

Produksi kayu hutan menurut jenis produksi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10
Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi
di Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2011-2015

Tahun	Kayu Bulat (m^3)	Kayu Gergajian (m^3)	Kayu Lapis
2011	5.217, 64	905,79	-
2012	7.411,73	267,19	-
2013	888,83	583,38	-
2014	1.706, 20	774,01	-
2015	2.161,51	121,61	-

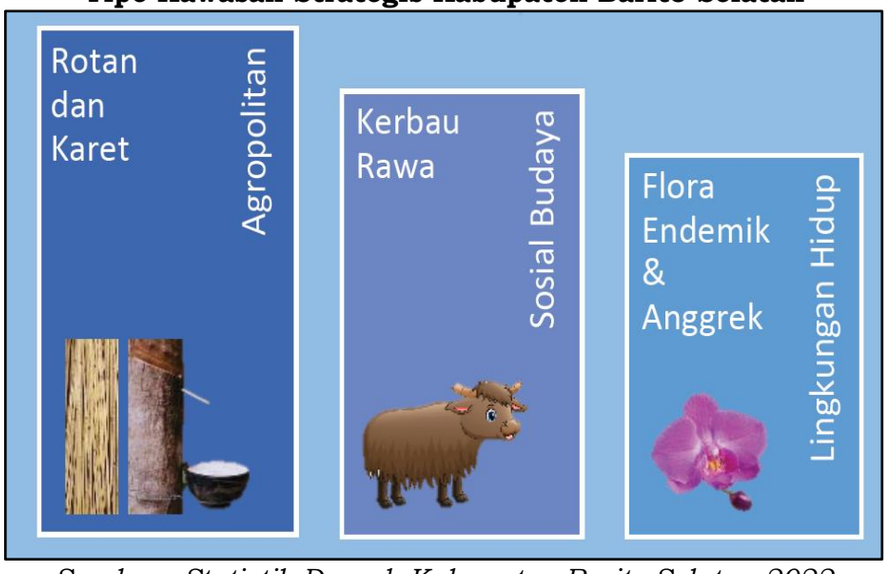
Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Strategis

Pengembangan wilayah merupakan strategi dalam memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas wilayah serta kemajuan dari wilayah itu sendiri. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, terdapat tiga tipe kawasan strategis Seperti yang ada pada gambar 2.6 di bawah ini.

Gambar 2. 6
Tipe Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan

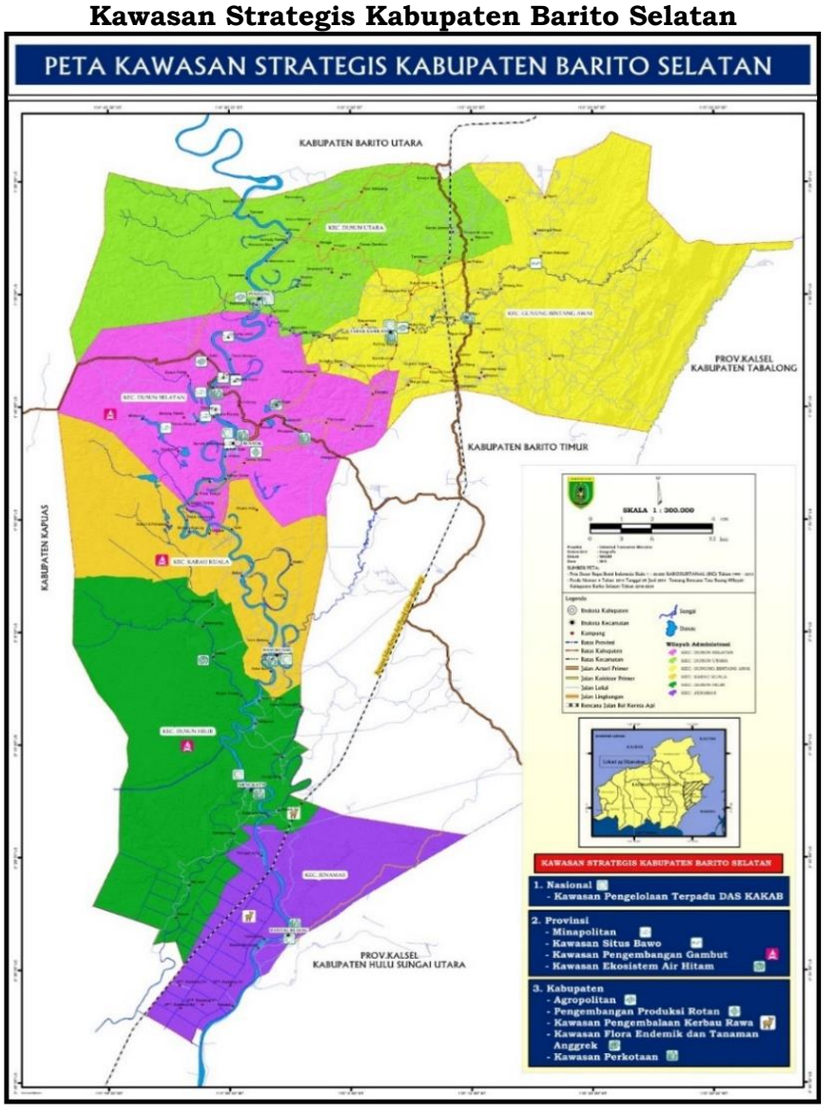


Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2022

Berdasarkan gambar 2.6, kawasan strategis Kabupaten Barito Selatan terbagi melalui tiga sudut pandang yakni sebagai berikut :

1. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi yakni Kawasan agropolitan berbasis utama pada sektor kehutanan (rotan) dan perkebunan (karet) di Kawasan Pendang dan Tabak kanilan, dengan pusat pengembangan produksi dan pengumpul rotan di Buntok dan Mangkatip.
2. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, yakni kawasan strategis Penggembalaan Kerbau Rawa di Tampulang, Rangga Ilung, dan Kalanis.
3. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Barito Selatan meliputi kawasan flora endemik dantaman anggrek di Malawen. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdapat di Desa Bintang Ara (Malungai Dalam) yaitu di Situs Gunung Bawo.

Gambar 2. 7
Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan



Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034

2. Kawasan Pertanian

Untuk kawasan pertaniansub tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan lahan kering dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Barito Selatan.

Apabila dikaitkan dengan ketersediaan air untuk irigasi, dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Barito Selatan yang sesuai untuk dikembangkan sebagai pertanian lahan basah adalah wilayah yang berada di dekat aliran sungai, selain itu, keberadaan danau-danau alami bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengairan agar lahan pertanian yang ada menjadi lebih produktif. Terkait dengan potensi kawasan pertanian di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 2. 11
Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Barito Selatan

No	Jenis Pengembangan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan peruntukkan tanaman pangan	Seluruh kecamatan	7.105.38
2.	Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat	1. Kec. Dusun Utara 2. Kec. Gunung Bintang Awai 3. Kec. Dusun Selatan, 4. Kec. Karau Kuala 5. Kec. Dusun Hilir 6. Kec. Jenamas	7.481,65
3.	Kawasan peruntukkan perkebunan besar	Seluruh kecamatan	64.808,12
4.	Kawasan peruntukkan peternakan	1. Kec. Jenamas 2. Kec. Dusun Hilir	10.151,18
5.	Kawasan peruntukkan perikanan	Di sungai dan danau setiap kecamatan	745,62

Sumber Materi Teknis RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

3. Kawasan Pertambangan

Potensi galian/bahan tambang yang ada di Kabupaten Barito Selatan yang dapat dioptimalkan adalah batu bara dan bahan galian yang berasal dari permukaan tanah dan bukan logam. Untuk batu bara sendiri, diperkirakan tersimpan potensi kurang lebih 250 juta ton (terduga)/60 juta ton (terukur). wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan dengan peruntukkan pertambangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 12
Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan

No	Jenis Pengembangan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Peruntukkan Pertambangan Batu Bara	Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara	93.400,43

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

4. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Barito Selatan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan jenis pengembangan yakni kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 13
Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pengembangan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan permukiman perdesaan	Seluruh kecamatan	24.655,45
2.	Kawasan permukiman perkotaan	Di arahkan di Desa Sababilah, Mangaris dan Sanggu Kec. Dusun Selatan	1.500,20
3.	Kawasan permukiman perkotaan	Kota Buntok	3.831,46

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

5. Kawasan Industri

Potensi pengembangan Kawasan industri di Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi kawasan industri besar, kawasan industri sedang dan kawasan industri rumah tangga. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 14
Potensi Pengembangan Kawasan Industri

No	Jenis Pengembangan	Jenis dan Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan peruntukkan industri besar	1) Kawasan industri karet di Kec. Dusun Selatan, 2) Kawasan Industri CPO di Kec. Dusun Utara 3) Kawasan industri pencampuran batu bara di sepanjang Sungai Barito Kec. Dusun Utara, Kec. Dusun Selatan, Kec. Karau Kuala dan Kec. Dusun Hilir	2.120,35
2.	Kawasan peruntukkan industri sedang	1) Kawasan industri rotan di Kec.Dusun Hilir, Kec. Dusun Utara dan Kec. Dusun Selatan 2) Kawasan industri kayu di Kec. Gunung Bintang Awai 3) Kawasan industri pengolahan bahan konstruksi dan jalan di Kec. Dusun Selatan	
3.	Kawasan peruntukkan industri rumah tangga	1) Kawasan industri anyaman rotan dan purun di Kec. Karau Kuala, Kec. Jenamas, Kec. Dusun Hilir dan Kec. Dusun Selatan 2) Kawasan industri penganekaragaman pangan di Kec. Dusun Selatan dan Kec. Gunung Bintang Awai	

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

6. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Adapun terkait dengan lokasi dari masing-masing potensi wisata bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 15
Potensi Pengembangan Kawasan Wisata

No	Jenis Pengembangan	Jenis dan Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan peruntukkan wisata alam	1) Wisata jelajah goa di Desa Bintang Ara dan Desa Bipak Kali 2) Wisata air terjun Senango di Desa Bintang Ara	50,80
2.	Kawasan peruntukkan wisata budaya	1) Wisata situs Gunung Bawo di Desa Bintang Ara	
3.	Kawasan wisata buatan	1) Wisata kuliner di Desa Pamait	

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

Sementara itu, potensi pariwisata lainnya yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan yang potensial untuk dikembangkan apabila mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh BPS antara lain sebagai berikut :

Tabel 2. 16
Potensi Pariwisata di Kabupaten Barito Selatan

No	Objek Wisata	Lokasi
1.	Air Terjun Senango	Desa Bintang Ara, Gunung Bintang Awai
2.	Ekosistem Air Hitam	Kelurahan Mengkatip, Dusun Hilir
3.	Tugu Christian Simbar	Desa Madara, Dusun Selatan
4.	Danau Desa Madara	Desa Madara, Dusun Selatan
5.	Danau Sababilah	Desa Sababilah, Dusun Selatan
6.	Dam Uang	Desa Muka Haji, Gunung Bintang Awai
7.	Goa Liang Lempang	Desa Palurejo, Gunung Bintang Awai
8.	Danau Sanggu-Malawen	Desa Sanggu, Dusun Selatan
9.	Danau Bundar	Desa Bundar, Dusun Utara
10.	Danau Ganting	Desa Danau Ganting, Dusun Selatan
11.	Kampung Terapung Bambaler	Desa Baru, Dusun Selatan
12.	Goa Liang Santangan	Desa Sei Paken, Gunung Bintang Awai
13.	Kawasan Kerbau Rawa	Desa Tampulang, Jenamas
14.	Danau Sadar	Desa Danau Sadar, Dusun Selatan
15.	Kawasan Adat Suku Bawo	Desa Bintang Ara, Gunung Bintang Awai
16.	Banyu Habang	Desa Sanggu, Dusun Selatan
17.	Waterboom Nagoya	Desa Sanggu, Dusun Selatan
18.	Betang Nan Sarunai	Desa Sanggu, Dusun Selatan
19.	Rawen (Rawa Wendu)	Desa Sanggu, Dusun Selatan

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2020

7. Kawasan Hutan

Potensi kawasan hutan di Kabupaten Barito Selatan secara lengkap bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17
Potensi Kawasan Hutan

No	Jenis Pengembangan	Jenis dan Lokasi	Luas (Ha)
1.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1) Kec. Gunung Bintang Awai 2) Kec. Dusun Utara 3) Kec. Dusun Selatan	85.070,30
2.	Hutan Produksi Tetap (HP)	1) Kec. Dusun Utara 2) Kec. Gunung Bintang Awai 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Karau Kuala	203.445,40
3.	Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK)	1) Kec. Dusun Selatan 2) Kec. Karau Kuala 3) Kec. Dusun Hilir 4) Kec. Jenamas	93.378,90
4.	Kawasan peruntukkan hutan rakyat/hutan hak	1) Kec. Gunung Bintang Awai 2) Kec. Dusun Selatan	1) 288,02 2) 280,12
5.	Kawasan areal penggunaan lain	1) Kec. Dusun Utara 2) Kec. Gunung Bintang Awai 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Karau Kuala 5) Kec. Dusun Hilir 6) Kec. Jenamas	54.428,25

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

8. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan alokasi ruang di Kabupaten Barito Selatan dengan peruntukkan sebagai kawasan lindung adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 18
Kawasan Lindung di Kabupaten Barito Selatan

No	Jenis Kawasan Lindung	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan hutan lindung	1) Kec. Dusun Hilir 2) Kec. Karau Kuala 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Gunung Bintang Awai	67.566,60
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan resapan air)	1) Kec. Dusun Utara 2) Kec. Gunung Bintang Awai 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Karau Kuala 5) Kec. Dusun Hilir	2.789,30
3.	Kawasan Perlindungan setempat		

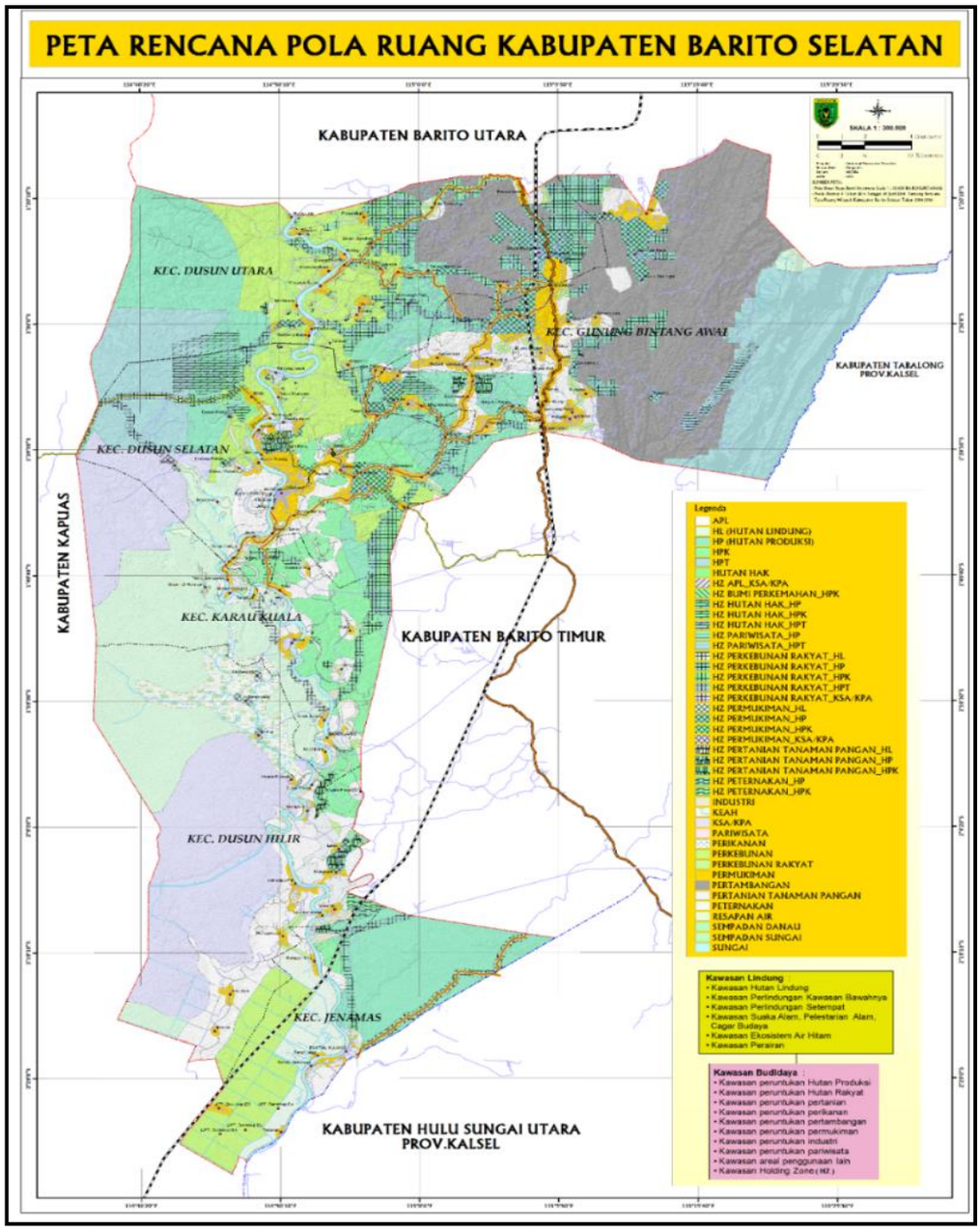
No	Jenis Kawasan Lindung	Lokasi	Luas (Ha)
a.	Kawasan Sempadan Sungai dengan ketentuan yakni : 1. Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter 2. Perlindungan terhadap anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50 meter 3. Pada sungai besar dan anak sungai yang melawati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter	1) Di sepanjang Sungai Barito	2.904,53
b.	Kawasan sempadan danau/waduk	1) Danau Bambaler 2) Danau Madara 3) Danau Karen 4) Danau Maguru 5) Danau Buntal 6) Danau Buritkumpai 7) Danau Kararen 8) Danau Raya 9) Danau Bundar 10) Danau Mangkirai 11) Danau Ganting 12) Danau Palui 13) Danau Malawen 14) Danau Jutuh 15) Danau Sadar 16) Danau Hampalam 17) Danau Sabur 18) Danau Lambuhang 19) Danau Jaman 20) Danau Letek 21) Danau Muaradanau 22) Danau Pamarahan 23) Danau Bahalang 24) Danau Surapanji 25) Danau Rakutan 26) Danau Kalahien 27) Danau Mutar 28) Danau Sanggu 29) Danau Limut 30) Danau Sababilah 31) Danau Masura 32) Danau Baleleng 33) Danau Jayo 34) Danau Mantarem 35) Danau Pulut 36) Danau Telang	Luasnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
c.	Kawasan Suaka Alam	Habitat Orang Utan 1) Madara 2) Batilap 3) Muara Puning	76.829,50

No	Jenis Kawasan Lindung	Lokasi	Luas (Ha)
d.	Kawasan Ekosistem Air Hitam	Kawasan hutan rawa yang gambutnya sangat tebal sehingga perairan disekitarnya berwarna hitam	13.719,02
e.	Kawasan Perairan	Sungai Barito beserta cabang-cabang sungainya yang tersebar di seluruh kecamatan	15.607,30

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

Adapun terkait dengan visualisasi dari potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Barito Selatan (rencana pola ruang) bisa dilihat pada gambar 2.8 berikut ini.

Gambar 2. 8
Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Selatan 2014-2034



Sumber : Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Barito Selatan terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu:

a. Wilayah rawan bencana longsor tebing sungai, yang meliputi sepanjang aliran Sungai Barito dan Sungai Ayuh.
b. Wilayah rawan bencana longsor, rockfall dan landslide, yang meliputi Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara.
c. Wilayah rawan bencana banjir, yang meliputi meliputi seluruh kecamatan yang berada di sepanjang aliran Sungai Barito, Sungai Mangkatip dan Sungai Ayuh.

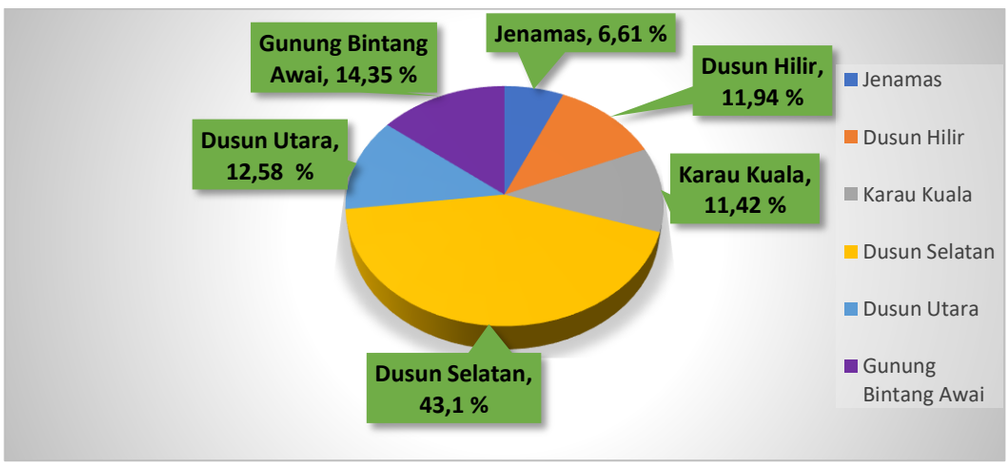
2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Jumlah Penduduk dan Perkembangan Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Barito Selatan berjumlah 131.997 jiwa, dengan rincian Kecamatan Jenamas 8.723 jiwa, Kecamatan Dusun Hilir 15.759 jiwa, Kecamatan Karau Kuala 15.079 jiwa, Kecamatan Dusun Selatan 56.887 jiwa, Kecamatan Dusun Utara 16.601 jiwa dan Kecamatan Gunung Bintang Awai 18.948 jiwa.

Proporsi penduduk terbesar ada di Kecamatan Dusun Selatan yakni sebesar 43.10 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Jenamas yang berada pada angka 6,61 persen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 9
Proporsi Penduduk di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023, diolah

Selanjutnya, terkait dengan pertumbuhan penduduk, angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah sebesar 0,37 persen, Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Karau Kuala adalah kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018. Pada tahun 2018 tercatat, penduduk di Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah sebesar 19.962 jiwa, sedangkan untuk Kecamatan Karau Kuala adalah sebesar 15.942 jiwa. Pada tahun 2022, tercatat jumlah penduduk di Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah sebesar 18.948 jiwa dan Kecamatan Karau Kuala tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 15.079 Jiwa yang berarti mengalami penurunan jumlah penduduk sejak tahun 2018 sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 19
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2021 - 2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Jenamas	9.332	9.047	8700	8.719	8.723	0,09
2.	Dusun Hilir	16.594	16.272	15.700	15.753	15.759	0,08
3.	Karau Kuala	15.942	15.832	15.000	15.067	15.079	0,13
4.	Dusun Selatan	56.996	57.825	56.200	56.575	56.887	0,66
5.	Dusun Utara	16.910	17.776	16.500	16.599	16.601	0,05
6.	Gunung Bintang Awai	19.962	19.515	18.800	18.893	18.948	0,36
BARITO SELATAN		**134.543**	**135.736**	**131.000**	**131.606**	**131.997**	**0,37**

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023, diolah

2.1.2.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 secara keseluruhan mencapai 19 jiwa/km^2, sedangkan untuk kepadatan penduduk di 6 kecamatan cukup bervariasi yakni untuk kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Dusun Selatan dengan angka sebesar 50 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan angka sebesar 11 jiwa/km^2.

Tabel 2. 20
Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	JumlahPenduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km²)
1.	Jenamas	8.723	708	13
2.	Dusun Hilir	15.759	2.065	12
3.	Karau Kuala	15.079	1.099	18
4.	Dusun Selatan	56.887	1.829	50
5.	Dusun Utara	16.601	1.196	13
6.	Gunung Bintang Awai	18.948	1.933	11
BARITO SELATAN		131.997	8.830	19

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023, diolah

2.1.2.3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk laki-laki pada umumnya lebih banyak dibanding perempuan di berbagai kelompok umur kecuali untuk kelompok umur 65-70, 70-74 dan 75+, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

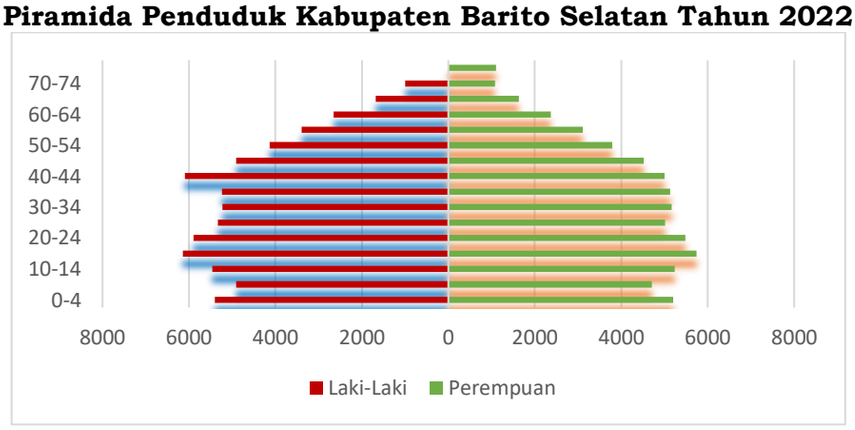
No	Kelompok Umur	2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	5.406	5.161	10.567
2.	5 – 9	4.912	4.635	9.547
3.	10 – 14	5.463	5.123	10.586
4.	15 – 19	6.141	5.652	11.793
5.	20 – 24	5.891	5.417	11.308
6.	25 – 29	5.330	4.996	10.326
7.	30 – 34	5.230	5.125	10.355
8.	35 – 39	5.241	5.160	10.401
9.	40 – 44	5.182	5.028	10.210
10.	45 – 49	4.904	4.596	9.500
11.	50 – 54	4.133	3.909	8.042
12.	55 – 59	3.393	3.211	6.604
13.	60 – 64	2.658	2.502	5.160
14.	65 – 70	1.685	1.714	3.399
15.	70 – 74	1.000	1.135	2.135
16.	75+	8.98	1.166	2.064
Jumlah		**67.467**	**64.530**	**131.997**

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Dilihat dari tabel di atas, Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh kelompok umur yang termasuk ke dalam usia produktif. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk terus berinovasi guna

memanfaatkan bonus demografi yang ada melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Piramida kependudukan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 10
Piramida Penduduk Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023, diolah

2.1.2.4. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk usia kerja yang merupakan refleksi dari pertumbuhan penduduk, secara keseluruhan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja disuatu daerah. Dengan kata lain bahwa keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tabel 2. 22
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Angkatan Kerja (Total)	44.989	24.928	69.917
Bekerja	43.400	24.049	67.449
Pengangguran	1.589	879	2.468
Bukan Angkatan Kerja	8.914	27.125	36.039
Sekolah	4.113	3.317	7.430
Mengurus Rumah Tangga	1.974	22.205	24.024
Lainnya	2.827	1.758	4.585
Jumlah			**105.956**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			**66%**
Tingkat Pengangguran			**3,53%**

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022, mencapai 69.917 jiwa. Diantaranya

jumlah Bekerja sebesar 67.449, sedangkan jumlah pengangguran sebesar 2.468. Hal ini berarti penduduk usia produktif yang pada 2022 termasuk golongan bukan angkatan kerja (bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan yang tidak aktif secara ekonomi) sudah beralih ke dalam angkatan kerja.

Adapun untuk tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 sebesar 66 persen. Angka TPAK bisa menjadi indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menganalisa capaian hasil pembangunan yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi angka TPAK, bisa dikatakan bahwa semakin besar pula keberhasilan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Barito Selatan.

Terkait dengan Status Pekerjaan di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022, jumlah penduduk dengan status sebagai Buruh/karyawan/pegawai lebih mendominasi yakni sebesar 22.748 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil adalah dengan status Pekerjaan Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar yakni sebesar 658 jiwa. Data lebih jelas ada pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 23
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2022

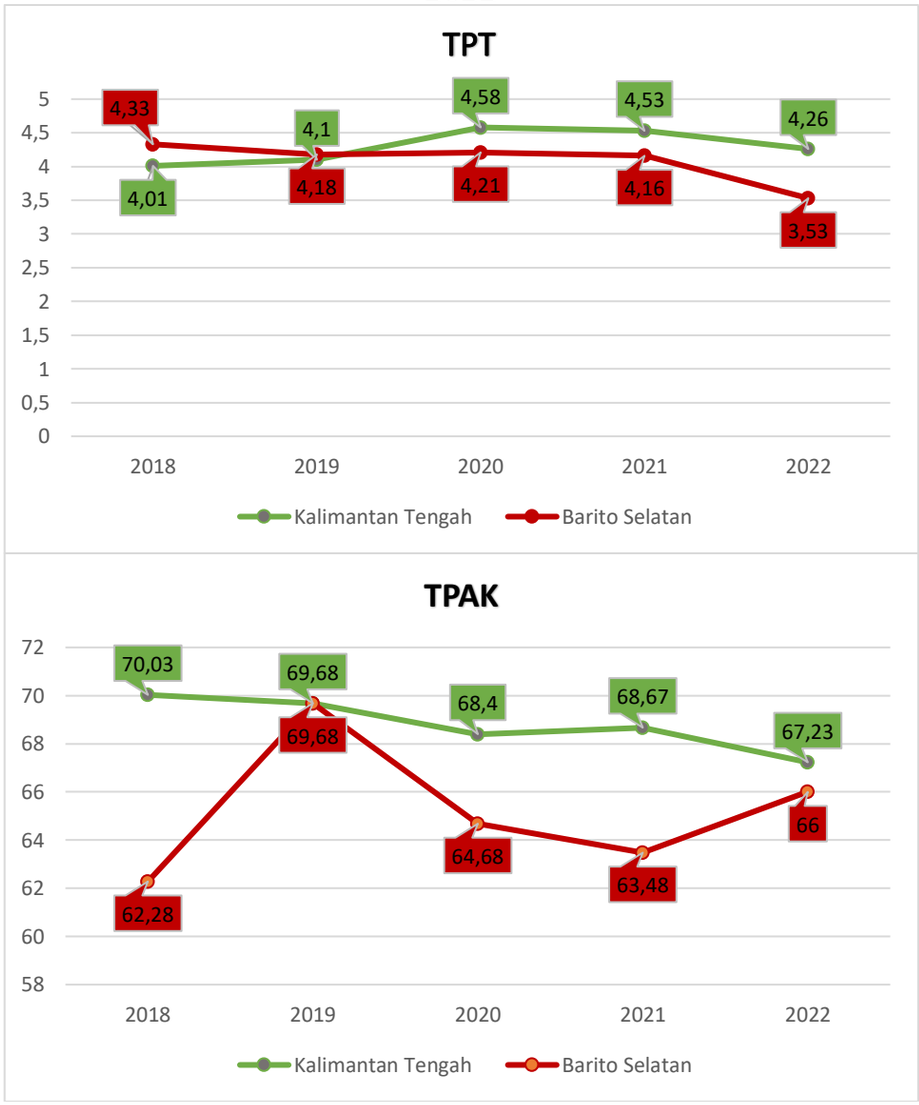
Status Pekerjaan	Jenis Kelamin		
	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	18.079	8.783	26.862
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	4.174	1.513	5.687
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	568	90	658
Buruh/karyawan/pegawai	15.291	7.457	22.748
Pekerja Bebas	4.051	594	4.645
Pekerja keluarga/tak dibayar	1.237	5.612	6.849
Jumlah/Total	**43.400**	**24.049**	**67.449**

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di

Kabupaten Barito Selatan juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, TPT di Kabupaten Barito Selatan menyentuh angka 4,33 persen yang selanjutnya mampu ditekan sehingga mengalami penurunan di tahun 2019 ke angka 4,18 persen. Pada tahun 2020, angka TPT kembali mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi, yakni menyentuh angka 4,21 persen. Pada tahun 2021, angka TPT kembali ditekan, yakni menyentuh angka 4,16 persen dan pada tahun 2022 angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barito Selatan mampu ditekan sehingga menyentuh angka sebesar 3,53 persen. Dinamika perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini.

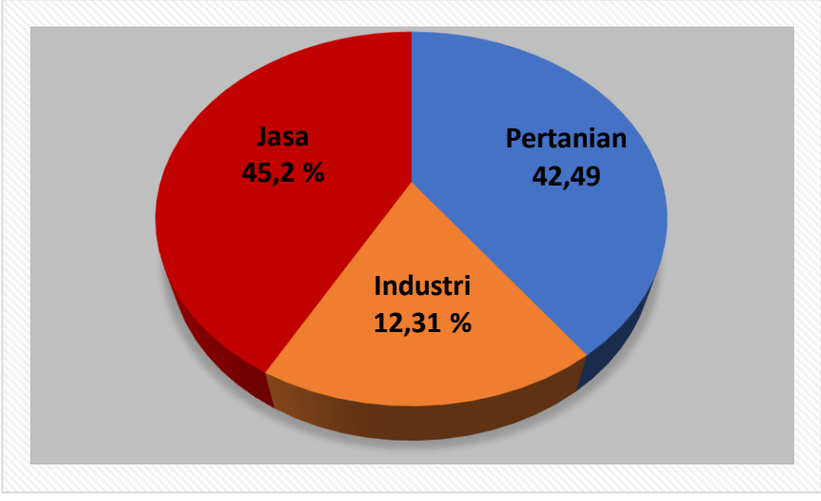
Gambar 2. 11
Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Provinsi dan Kabupaten Dalam Angka dari beberapa edisi, diolah

Apabila mengacu kepada jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2022, di Kabupaten Barito Selatan secara berturut-turut didominasi oleh penduduk yang bekerja pada sektor jasa yakni sebesar 45,2 persen, sektor pertanian sebesar 42,49 persen dan sektor industri sebesar 12,31 persen. Besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor jasa menyiratkan bahwa Kabupaten Barito Selatan adalah wilayah yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor tersier yakni sektor penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi. Terkait proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 12
Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023, diolah

Keterangan :
1. *Jasa : Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.*
2. *Pertanian : Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan*
3. *Industri : Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Konstruksi*

Terkait dengan status pekerjaan mengacu kepada angka hasil Sakernas tahun 2022, jumlah penduduk yang berstatus sebagai Berusaha Sendiri lebih mendominasi dibandingkan dengan status pekerjaan lain yakni sebesar 39,83 persen dimana kondisi ini sedikit berbeda apabila dibandingkan tahun 2018 yang didominasi oleh penduduk yang Buruh/Karywaan/Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran perubahan status pekerjaan di Kabupaten Barito Selatan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

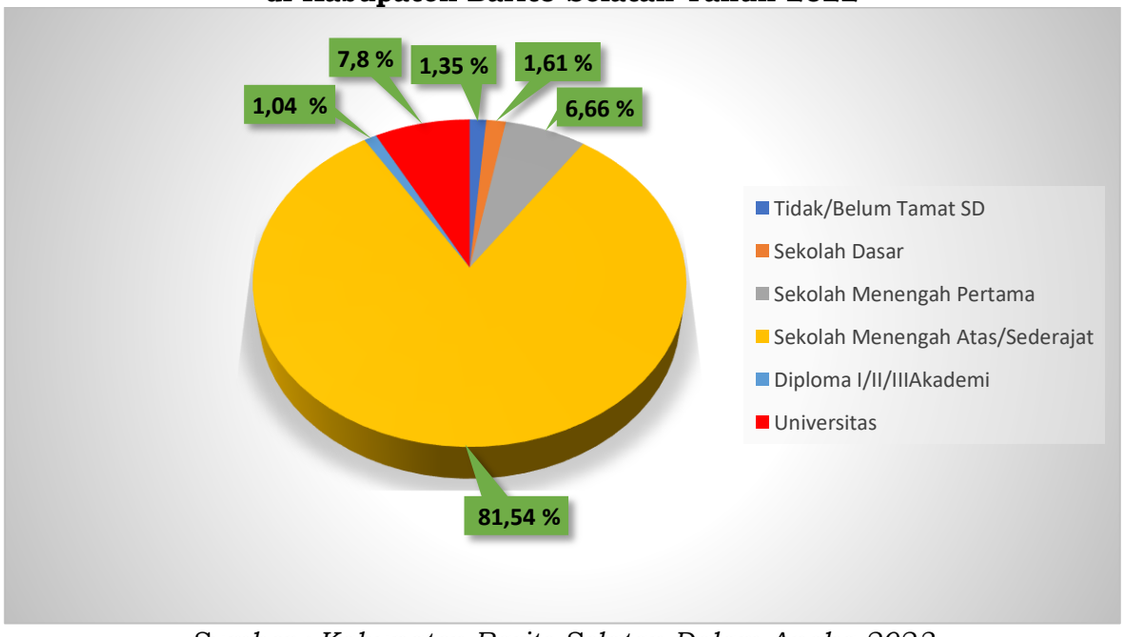
Tabel 2. 24
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Pekerjaan, 2018-2022

Status Pekerjaan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Berusaha sendiri	35,25	29,25	31,6	27,23	39,83
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	9,49	9,86	9,4	7,6	8,43
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,33	2,00	0,9	1,3	0,98
Buruh/karyawan/pegawai	36,88	44,18	38,9	41,25	33,73
Pekerja Bebas	8,64	5,18	11,2	5	6,88
Pekerja keluarga/tidak bayar	6,41	9,53	8	8,7	10,15

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Proporsi tingkat pencari kerja menurut pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh lulusan SMA sebesar 81,54%, kemudian Universitas sebesar 7,8%, SMP sebesar 6,66%, SD sebesar 1,61%, Tidak/belum tamat sebesar 1,35%, dan DI/III/III/Akademi sebesar 1,04%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 13
Proporsi Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan baik migas maupun non migas termasuk turunannya seperti pertumbuhan ekonomi maupun struktur ekonominya. Selain itu, indikator lain yang juga dapat memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah laju inflasi, PDRB per kapita, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks gini (*gini ratio*).

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengatahui dinamika ekonomi di suatu wilayah, dapat diketahui melalui data produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah (*value added)* yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu wilayah. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku memperhitungkan unsur perubahan harga (inflasi) sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan faktor inflasi.

Pada tahun 2022, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Selatan mencapai angka 8.131,63 miliar yang mana terjadi pertumbuhan ekonomi. dimana sepanjang tahun 2020 terjadi fenomena penyebaran virus *covid-19* yang pengaruhnya berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya perekonomian. PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2018-2022 secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 25
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1083,7	1 173,04	1 207,21	1 212,79	1 305,08
2	Pertambangan dan Penggalian	1154,5	1 151,95	837,04	1 056,50	2 123,60
3	Industri Pengolahan	348,0	365,38	372,63	390,48	433,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,0	3,48	3,84	4,13	4,33

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,4	10,11	10,71	11,80	12,78
6	Konstruksi	392,1	435,81	400,49	364,92	395,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	469,4	512,70	539,61	548,93	578,40
8	Transportasi dan Pergudangan	721,6	763,64	773,24	751,61	833,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	124,7	136,97	136,05	140,64	151,57
10	Informasi dan Komunikasi	74,0	82,42	99,92	107,77	112,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	279,1	300,94	340,01	364,84	374,11
12	Real Estat	139,8	155,84	166,34	174,57	179,52
13	Jasa Perusahaan	1,1	1,21	1,14	1,09	1,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	408,6	455,56	503,34	536,42	535,14
15	Jasa Pendidikan	450,1	497,49	527,35	584,84	623,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	162,1	184,24	228,07	302,75	335,31
17	Jasa Lainnya	126,1	138,38	130,93	127,08	132,73
PDRB Kabupaten Barito Selatan		**5.946,4**	**6369,13**	**6277,92**	**6681,13**	**8131,63**

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

**) angka sementara **) angka sangat sementara*

Sementara itu, untuk PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2018) pada tahun 2022 mencapai angka 4.602,95 miliar yang mana angka ini naik lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 4.331,03 miliar. Secara rinci, PDRB berdasarkan lapangan usaha menurut harga konstan tahun 2018-2022 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 26
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	736,8	770,24	782,94	770,02	803,77
2	Pertambangan dan Penggalian	1 015,3	1 072,08	905,15	959,63	1 087,95
3	Industri Pengolahan	231,7	239,63	237,88	241,27	258,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,1	2,24	2,46	2,61	2,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,2	5,84	6,11	6,55	6,80
6	Konstruksi	259,3	277,72	246,88	218,67	232,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	321,5	338,45	343,99	348,12	357,15
8	Transportasi dan Pergudangan	483,7	483,35	465,52	448,90	486,04

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	77,9	82,33	81,23	82,61	86,78
10	Informasi dan Komunikasi	60,5	65,52	77,12	83,27	85,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	177,7	185,97	201,69	211,74	212,29
12	Real Estat	84,8	89,26	91,25	91,28	92,05
13	Jasa Perusahaan	0,7	0,72	0,66	0,61	0,61
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	252,4	270,81	283,50	298,02	292,49
15	Jasa Pendidikan	267,1	285,04	297,50	309,81	318,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106,5	116,20	141,03	186,64	206,59
17	Jasa Lainnya	77,6	81,73	75,71	71,28	72,17
PDRB Kabupaten Barito Selatan		**4 160,9**	**4367,13**	**4240,61**	**4331,03**	**4602,95**

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2023

) angka sementara* *) angka sangat sementara*

2.2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk menuju keadaan yang lebih baik. Laju pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan persentase pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan dua basis yakni atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan riil dari masing-masing sektor.

Terkait pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan atau pertumbuhan riil di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2019-2022 secara umum cenderung fluaktuatif. Pada tahun 2022, kategori lapangan usaha yang mangalami pertumbuhan tertinggi dan berkontribusi besar dalam angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan yakni Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,37%. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2019-2022 untuk setiap lapangan usaha bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 27
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan (Persen), 2019-2022

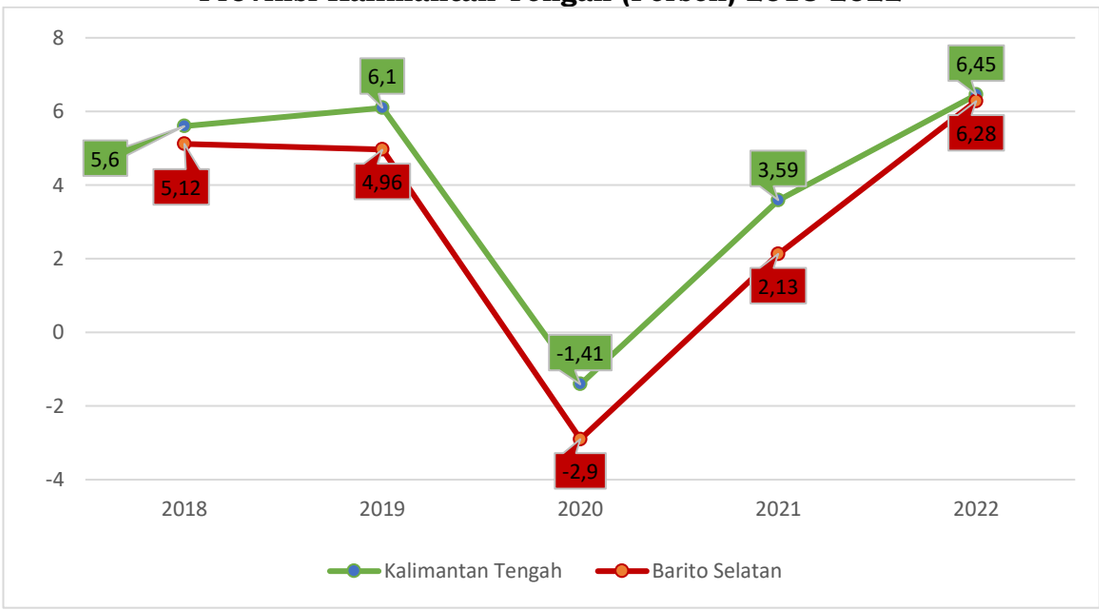
No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,54	1,65	-1,65	4,38
2	Pertambangan dan Penggalian	5,59	-15,57	6,02	13,37
3	Industri Pengolahan	3,42	-0,73	1,43	7,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,57	9,58	6,04	0,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,52	4,60	7,26	3,81
6	Konstruksi	7,09	-11,10	-11,43	6,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,29	1,64	1,20	2,59
8	Transportasi dan Pergudangan	-0,08	-3,69	-3,57	8,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,71	-1,34	1,70	5,05
10	Informasi dan Komunikasi	8,26	17,69	7,99	3,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,65	8,45	4,99	0,26
12	Real Estat	5,31	2,23	0,03	0,85
13	Jasa Perusahaan	6,69	-7,66	-7,89	0,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,28	4,69	5,12	-1,86
15	Jasa Pendidikan	6,71	4,37	4,14	2,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,02	21,37	32,34	10,69
17	Jasa Lainnya	5,32	-7,36	-5,86	1,25
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK		**4,96**	**-2,90**	**2,13**	**6,28**

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023, diolah

) angka sementara* *) angka sangat sementara*

Adapun terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan dari tahun 2018-2022 cenderung Fluktuatif. Dimana penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan paling besar terjadi pada tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi sebesar -2,90. Hal ini semua merupakan dampak dari wabah Covid-19 yang melanda Indonesia. Terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan terhadap Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 14
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah (Persen) 2018-2022



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka dari Beberapa Edisi, diolah

2.2.4. Struktur Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Struktur ekonomi wilayah dapat digambarkan melalui distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku karena menggunakan nilai PDRB pada tahun tertentu yang dipengaruhi oleh dinamika inflasi menurut sub sektor lapangan usaha terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Struktur ekonomi juga dapat mengetahui peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah. Analisis ini juga sebagai identifikasi awal sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, analisis proses dan tahap transformasi struktural, serta menunjukkan tingkat industrialisasi suatu wilayah. Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 28
Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022

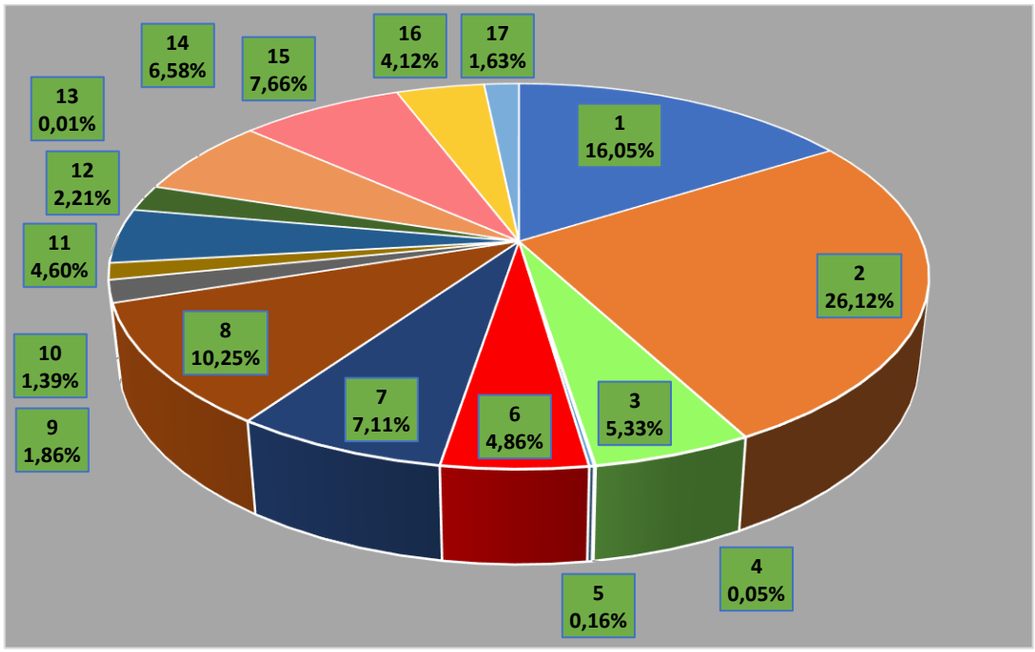
No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,22	18,42	19,23	18,15	16,05
2	Pertambangan dan Penggalian	19,42	18,09	13,33	15,81	26,12
3	Industri Pengolahan	5,85	5,74	5,94	5,84	5,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,16	0,17	0,18	0,16
6	Konstruksi	6,59	6,84	6,38	5,46	4,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,89	8,05	8,60	8,22	7,11
8	Transportasi dan Pergudangan	12,14	11,99	12,32	11,25	10,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,10	2,15	2,17	2,11	1,86
10	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,29	1,59	1,61	1,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,69	4,72	5,42	5,46	4,60
12	Real Estat	2,35	2,45	2,65	2,61	2,21
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,87	7,15	8,02	8,03	6,58
15	Jasa Pendidikan	7,57	7,81	8,40	8,75	7,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,73	2,89	3,63	4,53	4,12
17	Jasa Lainnya	2,12	2,17	2,09	1,90	1,63
PDRB Kabupaten Barito Selatan		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi kabupaten Barito Selatan dalam periode 2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2018 tercatat kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 18,22 persen dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedikit menjadi 18,42 persen dan di tahun berikutnya 2020 naik signifikan ke angka 19,23 persen akan tetapi mengalami penurun di tahun 2021 menjadi 18,15 persen dan ditahun 2022 turun signifikan ke angka 16,05 persen. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya tren pertambangan sehingga Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang awalnya tumpuan pertama menjadi tumpuan kedua digantikan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 26,12 persen ditahun 2022 dan menjadi tumpuan ekonomi kabupaten barito selatan.

Gambar 2. 15
Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Keterangan

1. Pertanian, kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Kontruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Adminitrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 didominasi oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang persentase kontribusinya secara berturut-turut adalah sebesar 26,12 persen dan 16,05 persen. Kedua kategori lapangan usaha ini termasuk ke dalam sektor primer yang outputnya merupakan bahan mentah dan memiliki nilai tambah relatif rendah.

Adapun untuk sektor tersier (sektor yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa), kategori lapangan usaha yang berkontribusi relatif besar dalam pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan adalalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang berkontribusi sebesar 10,25 persen. Selanjutnya terkait dengan kategori lapangan usaha industri pengolahan, berkontribusi sebesar 5,33 persen dalam agregasi PDRB Kabupaten Barito Selatan sehingga apabila mengacu kepada UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization)* dalam Muta'ali (2015), Kabupaten Barito Selatan masih belum memasuki proses industrialisasi karena kontribusi di sektor industri pengolahan belum mencapai 10 persen.

Selanjutnya, terkait dengan struktur perekonomian regional Kalimantan Tengah. Struktur perekonomian regional memiliki manfaat untuk melihat peran perekonomian antar sub-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini merupakan kabupaten-kabupaten yang secara administratif tergabung di dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan kata lain, struktur perekonomian regional digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian membandingkan kontribusi tersebut terhadap kabupaten lainnya. Berikut kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 29
Capaian Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten	Capaian Kontribusi PDRB Regional Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah (Persen)				
	2018	2019	2020	2021*	2022*
Barito Selatan	4,29	4,23	4,13	3,94	4,08

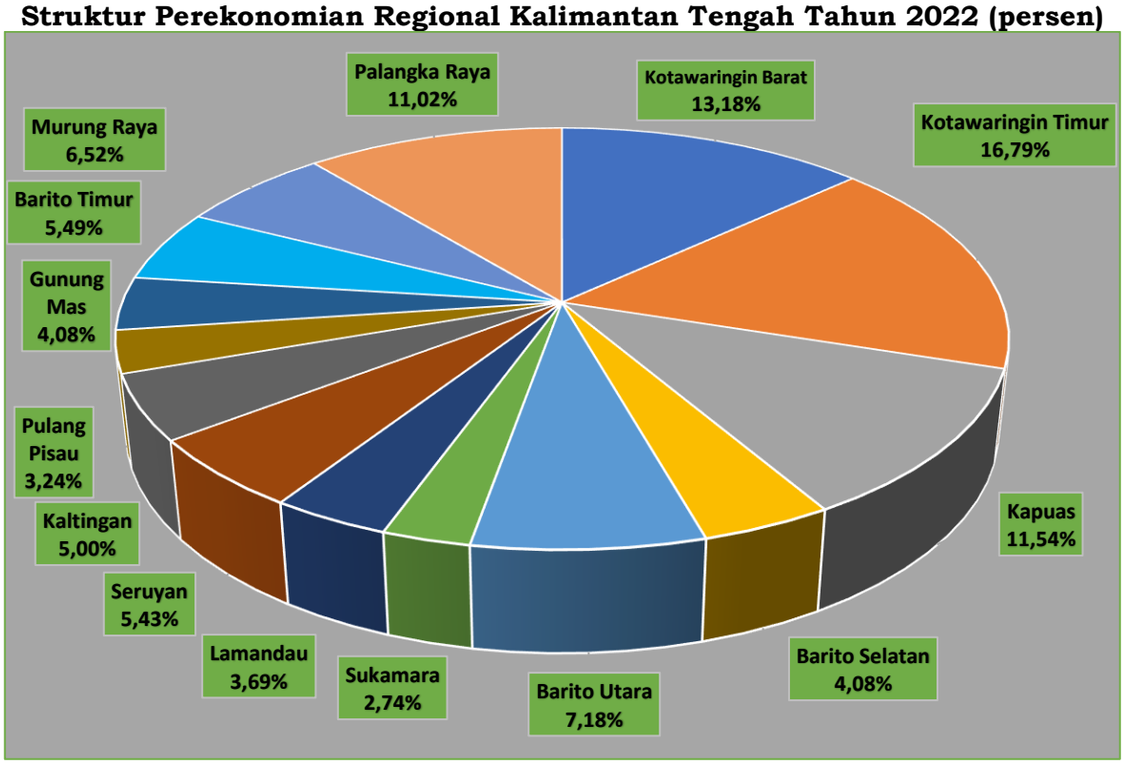
Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023, diolah

**) angka sementara **) angka sangat sementara*

Berdasarkan tabel di atas, bisa dikatakan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB regional Provinsi Kalimantan Tengah relatif kecil. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Barito Selatan berkontribusi di kisaran angka 3,9 - 4,3 persen dalam agregasi perekonomian regional provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan.

Adapun untuk tahun 2022, kontribusi sebesar 4,08 persen terhadap struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah, berikut diagram yang menunjukkan struktur perekonomian regional Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 .

Gambar 2. 16
Struktur Perekonomian Regional Kalimantan Tengah Tahun 2022 (persen)



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023, diolah

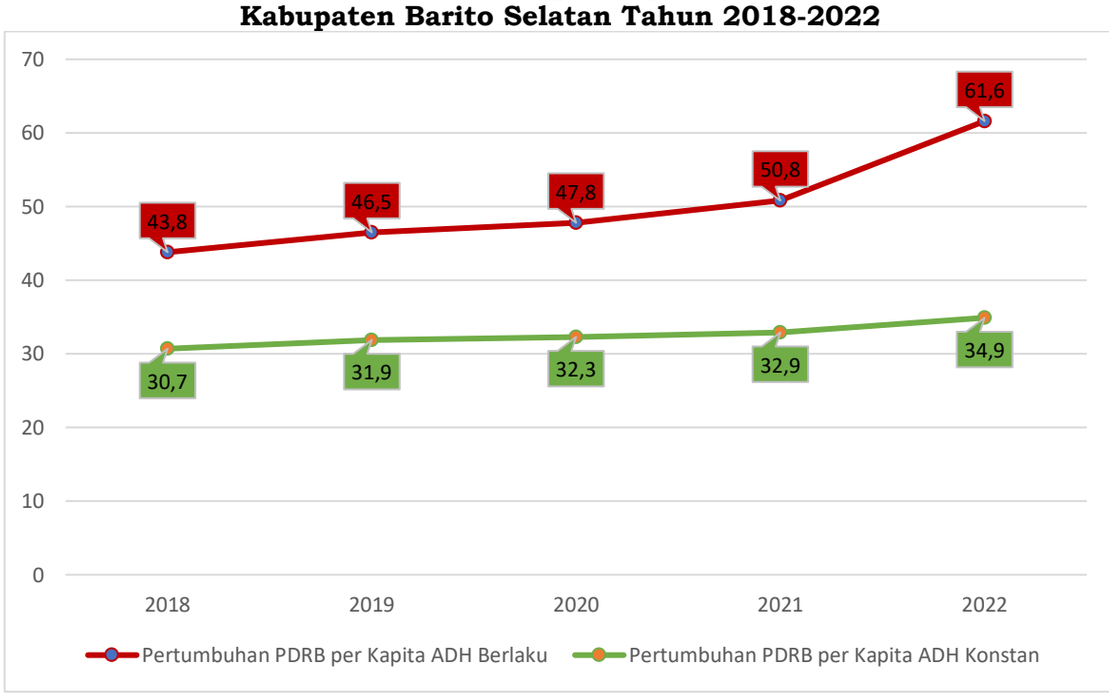
Berdasarkan diagram di atas, Kabupaten Barito Selatan berada pada peringkat 10 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bisa dikatakan, kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam struktur perekonomian regional relatif kecil apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang telah lama berdiri di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kondisi ini penting untuk menjadi perhatian dalam upaya merumuskan kebijakan yang berdampak baik secara langsung dan tidak langsung untuk mendorong perkembangan perekonomian makro di Kabupaten Barito Selatan.

2.2.5. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk

berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Tren perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.17
Perkembangan PDRB per Kapita (juta rupiah)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dari Beberapa Edisi, diolah

Peningkatan secara riil PDRB per kapita Barito Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 43,8 juta Rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 61,6 juta Rupiah. Selanjutnya, terkait PDRB per kapita atas dasar harga konstan, juga relatif mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu 2018-2022. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 30
PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
PDRB ADH Berlaku (milyar rupiah)	5.946,4	6.369,13	6.277,92	6.681,13	8.131,63
Jumlah Penduduk	135,74	136,3	131,1	131,6	131,9
PDRB per Kapita (juta rupiah)	-	-	-	-	-
Pertumbuhan PDRB per KapitaADH Berlaku	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB ADH Konstan (milyar rupiah)	4.160,9	4.367,13	4.240,61	4.331,03	4.602,95
Jumlah Penduduk	135,74	136,3	131,1	131,6	131,9
PDRB per Kapita (juta rupiah)	-	-	-	-	
Pertumbuhan PDRB per KapitaADH Konstan	5,12	4,96	-2,90	2,13	6,28

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, diolah dari beberapa edisi

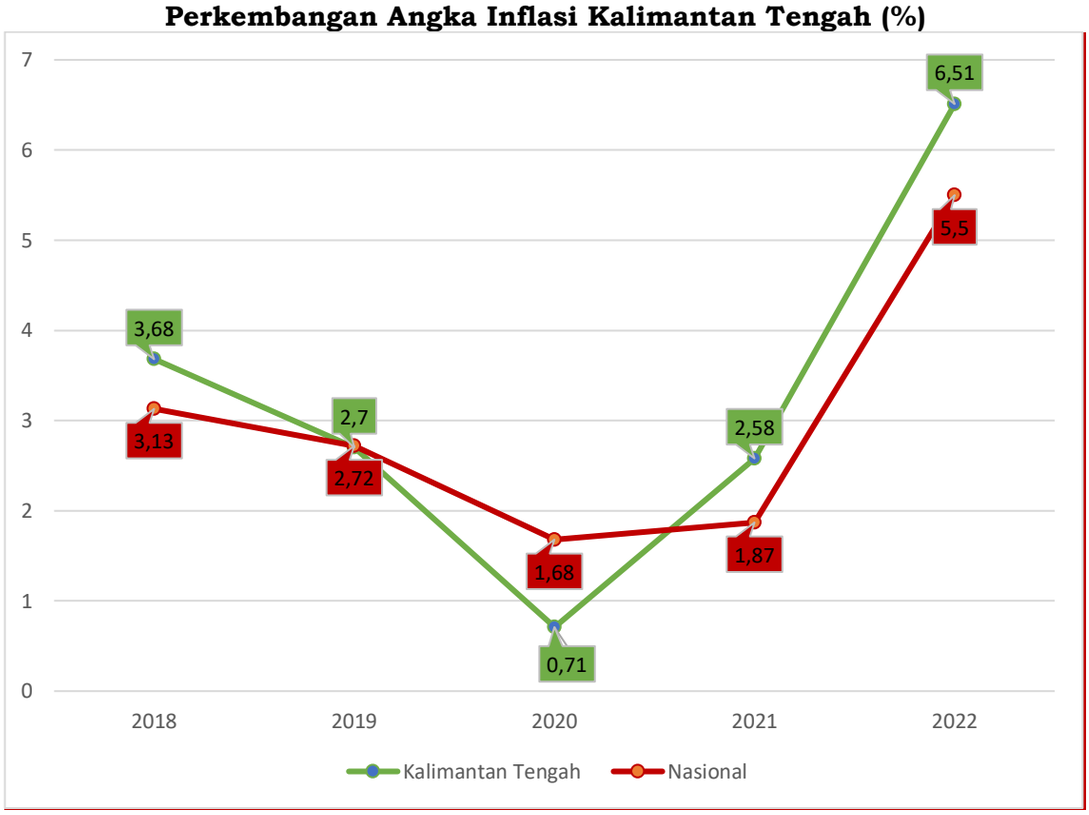
Berdasarkan tabel di atas, meskipun PDRB per kapita Kabupaten Barito Selatan relatif cukup besar, tidak serta merta menjadi suatu kesimpulan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Selatan berada pada tingkat kesejahteraan tinggi mengingat masih tetap terdapat disparitas pendapatan di Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan angka Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Berlaku cenderung stabil berada pada angka 100,00 dari tahun 2018-2022.

2.2.6. Laju Inflasi

Laju merupakan angka indikator yang menunjukkan kenaikan harga umum secara terus menerus dalam periode tertentu, sedangkan deflasi menunjukan terjadi penurunan harga barang-barang dan jasa secara umum. Untuk angka Inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen. Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan angka inflasi, diwakilkan oleh dua kota yakni Kota Palangka raya dan Kota Sampit yang menjadi tolak ukur perhitungan angka inflasi umum Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait laju inflasi tahunan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 , laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah berada di atas laju inlfasi nasional dengan angka 3,68 persen dan di tahun selanjutnya laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah berturut-turut turun dibawah laju inflasi Nasional dengan angka 2,7 persen di tahun 2019 dan 0,71 persen di tahun 2020

Akan tetapi , laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah kembali naik di atas laju inflasi nasional dengan angka 2,58 persen tahun 2021 dan 6,51 persen di tahun 2022, Berikut perkembangan angka inflasi umum untuk Provinsi Kalimantan Tengah. dari tahun 2018-2022.

Gambar 2. 18
Perkembangan Angka Inflasi Kalimantan Tengah (%)

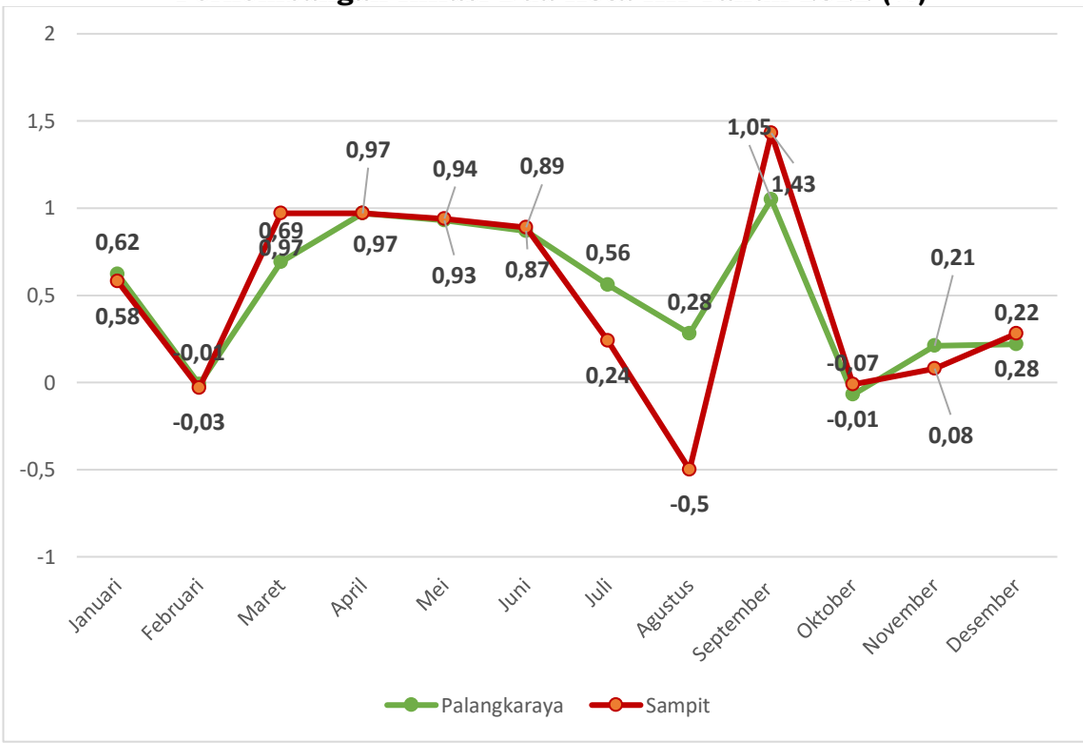


Sumber : Indeks Harga Konsumen Provinsi Kalimantan Tengah, diolah dari beberapa edisi

Sementara itu, jika melihat pola inflasi bulanan pada tahun 2022, inflasi Kota Palangka Raya dan Kota Sampit menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan disertai Dua kali lonjakan inflasi. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan pasar, terkait dengan perayaan hari keagamaan hingga akhir tahun. Inflasi Kota Palangka Raya cukup tinggi terjadi pada Mei sebesar (0,93 persen) yang bertepatan hari Raya Idul Fitri dan pada September sebesar (1,05 persen) sedangkan untuk Kota Sampit Inflasi cukup tinggi terjadi pada Maret dan april sebesar (0,97persen) dan juga pada September sebesar (1,43 persen) hal ini terjadi karena adanya kenaikan indeks kelompok,kelompok perumahan air,listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok makanan minuman dan tembakau. Siklus harga musiman ini relatif selalu terjadi setiap tahun.

Selain mengalami fluktuasi inflasi, selama tahun 2022 Kota Palangka Raya dan Kota Sampit juga diwarnai deflasi Terkait laju inflasi dan deflasi dua kota (Palangkaraya dan Sampit) bisa dilihat pada gambar berikut ini.

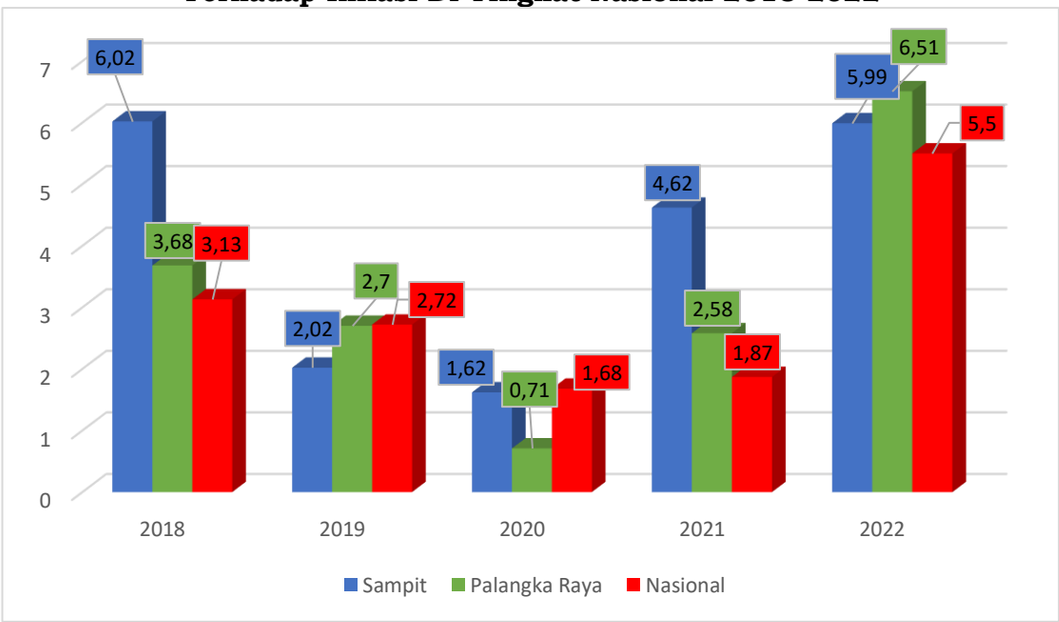
Gambar 2. 19
Perkembangan Inflasi Dua Kota HK Tahun 2022 (%)



Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Palangka Raya dan Sampit, 2023

Secara umum, apabila melihat pola inflasi tahunan selama 2018-2022, inflasi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, tingkat inflasi di dua kota tersebut cenderung berada di bawah inflasi pada tingkat nasional (1,68 persen) yang mana juga merupakan angka terendah selama 5 tahun terakhir. Terdapat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan didorong oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi. Lonjakan tingkat permintaan barang dan jasa menyebabkan jumlah pasokan tidak mampu mencukupi kebutuhan di pasar konsumen. Hal ini tentu berdampak pada harga yang merangkak naik pada waktu yang sama.

Gambar 2. 20
Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Dan Kota Sampit Terhadap Inflasi Di Tingkat Nasional 2018-2022



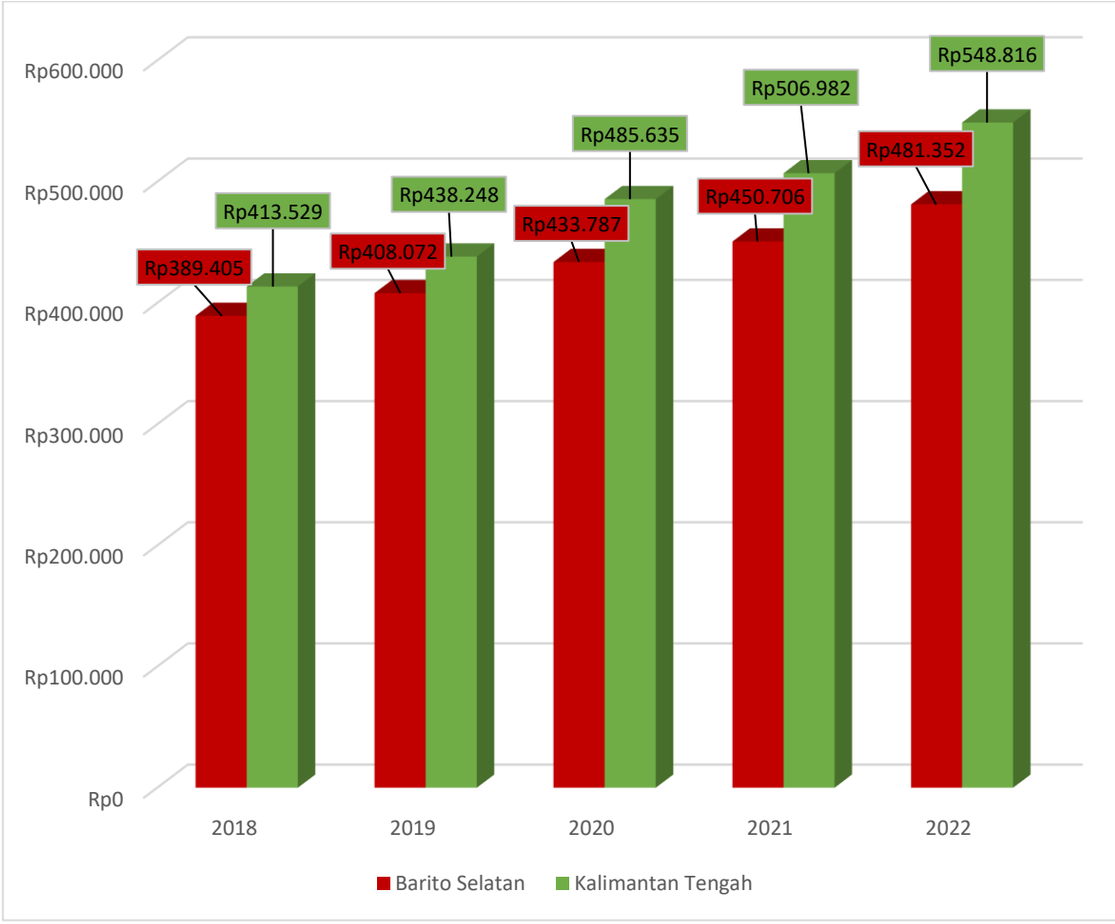
Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Palangka Raya dan Kota Sampit, Beberapa edisi diolah

2.2.7. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.21, garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat dimana pada tahun 2022, garis kemiskinan berada pada angka Rp. 481.352 per kapita per bulan meskipun peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan pada periode tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyentuh angka Rp.548.816 di tahun 2022. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan penduduk miskin.

Gambar 2.21
Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan 2018-2022



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023, diolah

Selanjutnya terkait dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung Meningkat dimana pada tahun 2018 tercatat jumlah penduduk miskin sebesar 6,16 persen , dan pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin naik menjadi sebesar 6,83 persen. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam upaya pengentasan kemiskinan masih belum bisa dikatakan optimal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

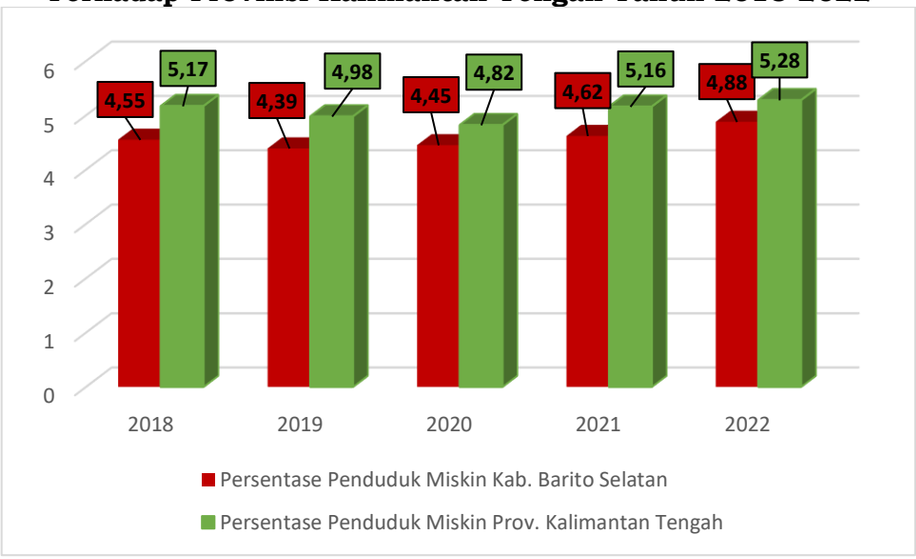
Tabel 2. 31
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Barito Selatan 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	6,16	5,99	6,12	6,42	6,83
Persentase Penduduk Miskin	4,55	4,39	4,45	4,62	4,88

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Kemudian jika membandingkan dengan Provinsi kalimantan Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2022, persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 4,88 persen yang mana jauh lebih kecil dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 5,28 persen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 22
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022



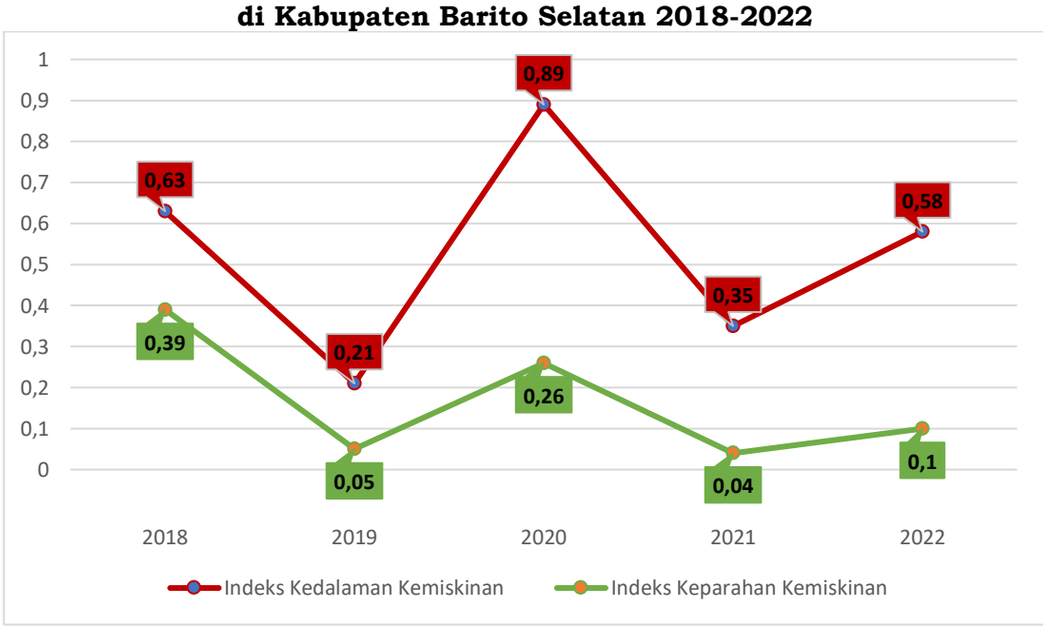
Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023, diolah

Persoalan kemiskinan bukan hanya terkait dengan jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index)* dan tingkat keparahan (*poverty severity)* dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap)* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan pada periode 2018 sampai dengan 2022 cenderung fluktuatif di mana dari tahun 2018 ke tahun 2019 sempat mengalami sedikit penurunan dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan ke angka 0,89 dan kembali turun ke angka 0,35 pada tahun 2021 dan kembali naik pada tahun 2022 ke angka 0,58 . Pada tahun 2022, indeks kedalaman

kemiskinan berada pada angka 0,58. Angka Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2022 mengindikasikan arah kebijakan penanganan kemiskinan sudah berada di jalur yang tepat atau dengan kata lain rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Barito Selatan semakin menjauh dari garis kemiskinan.

Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan, juga cenderung fluktuatif di mana pada tahun 2018 hingga tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan yakni 0,09 yang kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan ke angka 0,05. Pada tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan kembali naik ke angka 0,26 dan pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan kembali turun ke angka 0,04 dan tahun berikutya 2022 indeks keparahan kemiskinan naik ke angka 0,1. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2020 disebabkan oleh fenomena penyebaran virus *covid*-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian baik ditingkat makro hingga ke tingkat mikro. Perkembangan indeks Kedalaman Kemiskinan dan indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 2. 23
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan 2018-2022



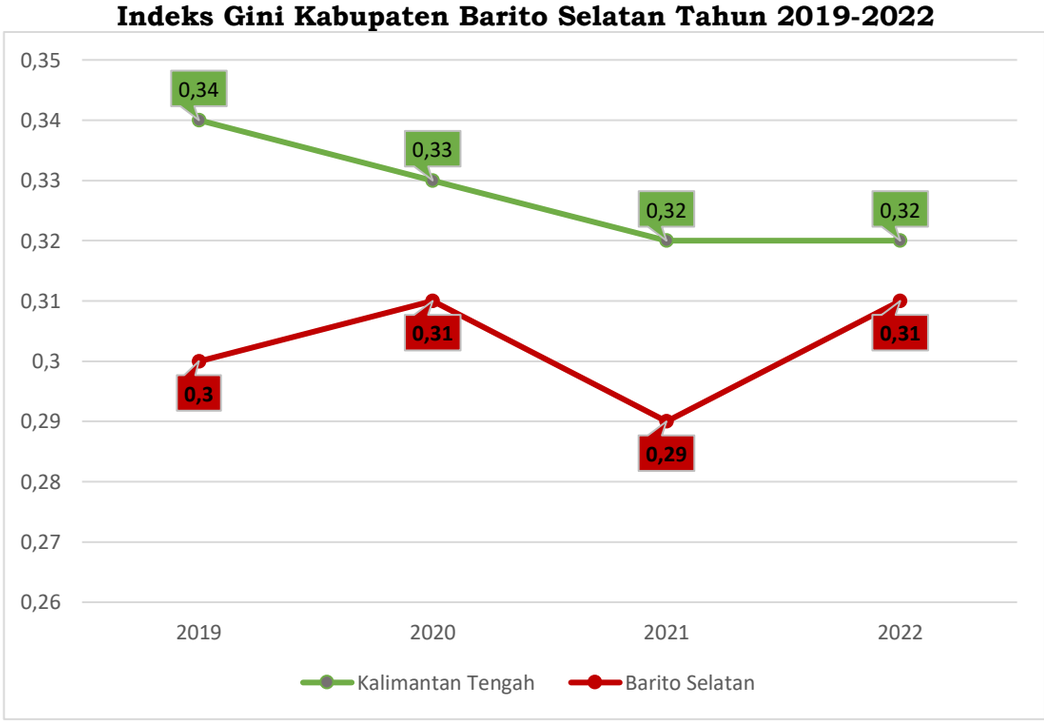
Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023, diolah

2.2.8. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal.

Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah "rasio gini" dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Angka rasio gini Kabupaten barito Selatan pada tahun 2022 adalah 0,32 yang berarti termasuk ke dalam kategori **ketimpangan pendapatan moderat/sedang**. Angka ini sedikit lebih tinggi dari angka rasio gini Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 0,31. Berikut ini gambaran perkembangan rasio gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019-2022 terhadap Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan indeks gini di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 24
Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019-2022



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

2.2.9.Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olahraga. Dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun.

2.2.10. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumberdaya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Terkait dengan tren perkembangan IPM, Kabupaten Barito Selatan memiliki tren perkembangan yang relatif baik. Hal ini bisa dilihat dari terus meningkatnya angka IPM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dimana pada tahun 2017, nilai IPM kabupaten Barito Selatan berada pada kisaran angka 69,73 dan pada tahun 2022 terus naik positif di angka 71,01 atau berada pada status IPM tinggi. Bisa dikatakan peningkatan IPM di Kabupaten Barito Selatan yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen pembentuknya, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian. Terkait perkembangan IPM di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini.

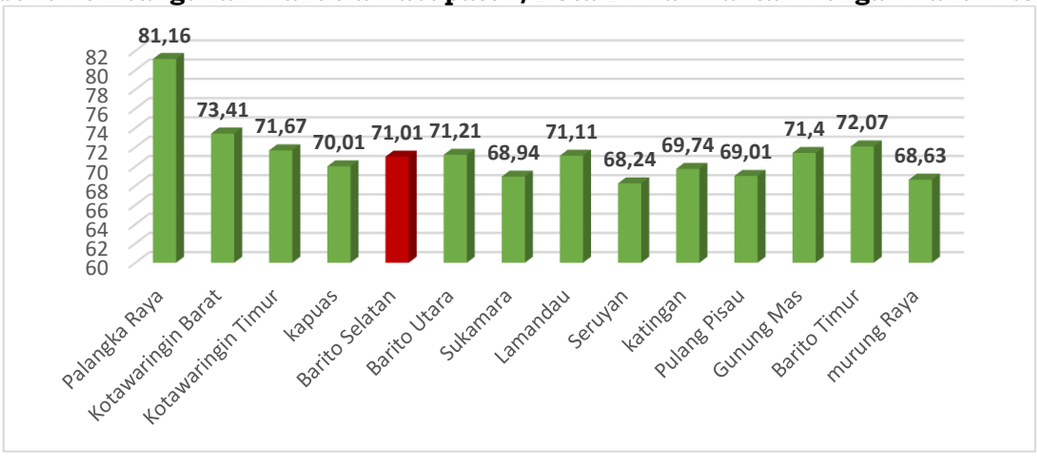
Tabel 2. 33
Capaian IPM Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia	69,73	70,10	70,22	70,54	71,01

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Barito Selatan dalam angka 2023

Di tahun 2022, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.25, IPM kabupaten Barito Selatan berada di urutan 8 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah. Adapun kabupaten/kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Palangka Raya yakni sebesar 81,16 serta Kabupaten Seruyan dengan nilai IPM sebesar 68,24 sebagai kabupaten dengan nilai IPM terendah.

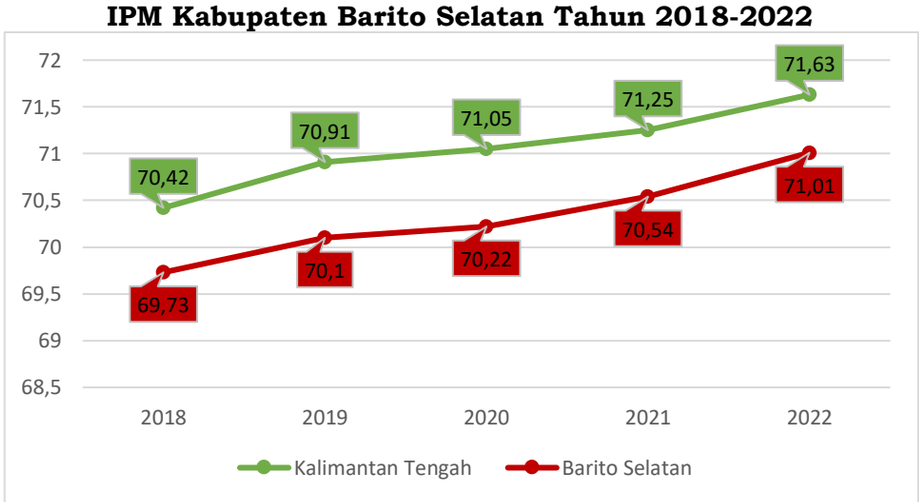
Gambar 2. 25
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah Tahun 2022



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2023

Jika dibandingkan dengan perkembangan nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah, tren perkembangan IPM Kabupaten Barito Selatan masih cenderung berada di bawah tren perkembangan Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 26
IPM Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2023

2.2.11. Aspek Pendidikan

Keberhasilan pembangunan pada aspek pendidikan dapat diukur menggunakan indikator antara lain **Angka Melek Huruf (AMH)**, **Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)** dan **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**. Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk: *a)* mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan, dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD; *b)* menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta *c)* menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. AMH diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Sementara Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator selanjutnya adalah rata-rata lama sekolah (RLS) yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal serta merupakan salah satu dari tiga komponen IPM. Rata-rata lama sekolah sendiri memiliki pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan. Berikut capaian indikator kinerja untuk pembangunan pada aspek pendidikan di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017-2022.

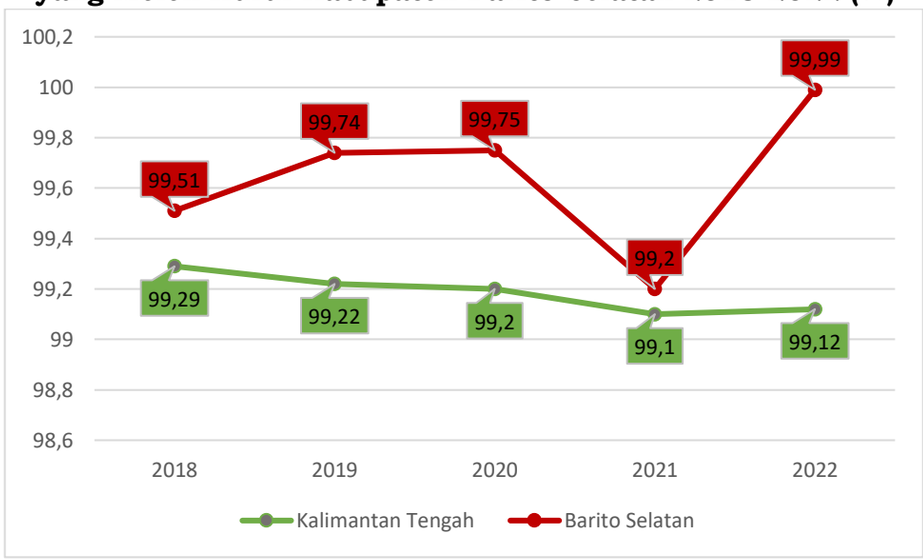
Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Bidang Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Melek Huruf	99,27	99,51	99,74	99,75	99,20	99,99
Angka Harapan Lama Sekolah	12,31	12,53	12,54	12,55	12,66	12,67
Rata-Rata Lama Sekolah	8,67	8,69	8,71	8,82	8,95	9,01

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2023, Diolah

Capaian angka melek huruf (AMH) di Kabupaten Barito Selatan cenderung bergerak naik dari tahun 2017 hingga tahun 2022 di mana pada tahun 2017, AMH berada pada angka 99,27 persen dan pada tahun 2020 berada pada angka 99,75 persen. Pada tahun 2021 AMH sempat mengalami penurunan, yakni berada pada angka 99,20 persen dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan lagi pada angka 99,99 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, angka AMH Kabupaten Barito Selatan berada di atas angka AMH Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dalam kurun waktu 2018-2022 (gambar 2.27). Angka melek huruf perlu menjadi perhatian dari Pemerintah dalam sebagai bagian dari penilaian kualitas SDM di Kabupaten Barito Selatan, agar ke depannya bisa semakin bergerak ke arah yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

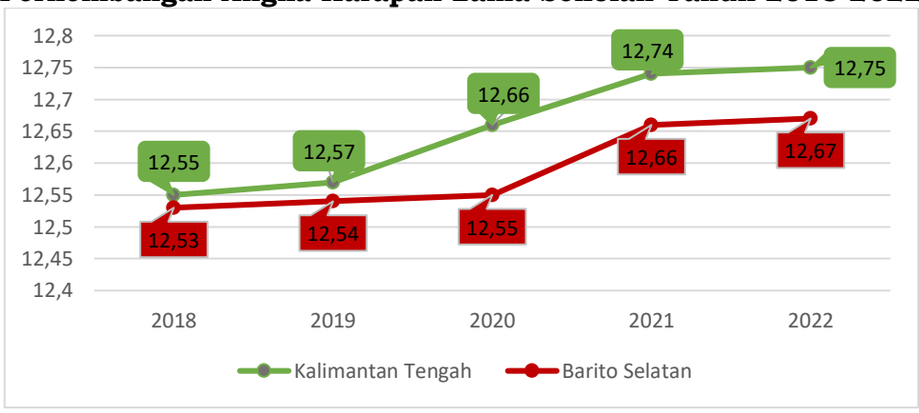
Gambar 2. 27
Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf Kabupaten Barito Selatan 2018-2022 (%)



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka dari bererapa edisi, diolah

Adapun untuk Capaian Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, capaian AHLS berada pada angka 12,53 yang kemudian pada tahun 2022 berada pada angka 12,67. Apabila dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Tengah, tren perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 2018-2022 masih berada di bawah tren perkembangan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 28
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022

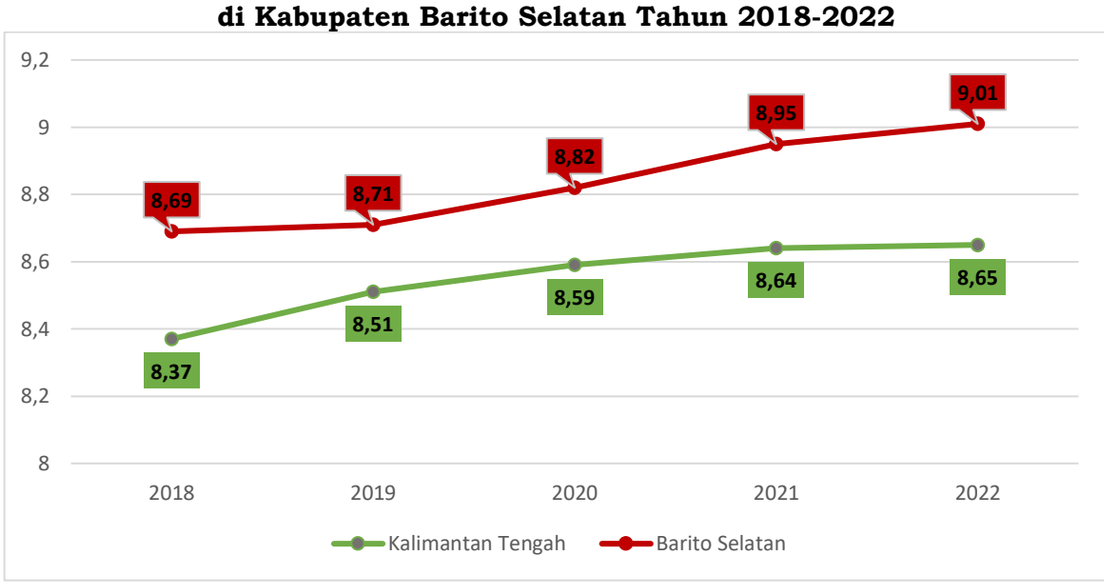


Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023, diolah

Selanjutnya terkait dengan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Barito Selatan. Sampai tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Barito Selatan telah mencapai 9,01 tahun atau setara dengan SMP kelas VIII/IX. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pendidikan tertinggi yang ditamatkan secara umum adalah pendidikan SD/Sederajat atau dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Barito Selatan masih relatif cukup rendah, meskipun melampaui tren rata-rata lama sekolah di tingkat Provinsi kalimantan Tengah. Kondisi ini bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat lintas sektor seperti tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya dan faktor dari internal peserta didik itu sendiri. Namun yang patut diapresiasi adalah terkait komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan melalui tren rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan. Terkait dengan perkembangan rata-rata lama sekolah dari tahun 2018 sampai tahun 2022 di Kabupaten Barito Selatan terhadap Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 29
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023

2.2.12. Kesehatan

Capaian di bidang kesehatan Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2018-2022. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari tren kenaikan angka harapan hidup Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 mencapai 67,48 tahun, yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2022 akan memiliki peluang hidup hingga 67 tahun. Berikut data lengkapnya terkait dengan angka harapan hidup di Kabupaten Barito Selatan.

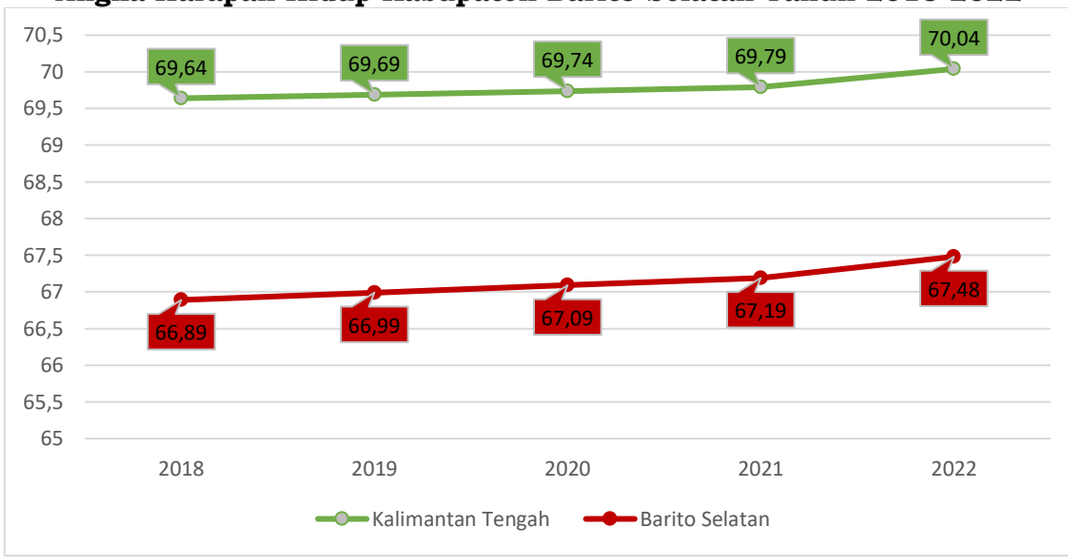
Tabel 2. 35
Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	66,89	66,99	67,09	67,19	67,48

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2023

Secara umum, tren kenaikan angka harapan hidup di Kabupaten Barito Selatan pada 2018-2022 berada dibawah angka harapan hidup tingkat Provinsi Kalimantan Tengah . Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 30
Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2023

2.2.13. Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu: (1)untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (2)mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1.Fokus Layanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

2.3.1.1.Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya serta untuk menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang

pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Berikut angka partisipasi kasar di Kabupaten Barito Selatan untuk tiap jenjang pendidikannya.

Tabel 2. 36
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Barito Selatan (%)

Indikator Capaian	2018	2019	2020	2021	2022
APK SD/MI	104,81	112,31	110,42	112,22	111,43
APK SMP/MTs	116,52	105,92	104,10	102,52	95,16
APK SMA/SMK/MA	71,00	82,86	85,53	85,77	87,56

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka dari bererapa edisi, diolah

Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Barito Selatan tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2018 tercatat 104,81 persen dan mengalami peningkatan ditahun 2019 ke angka 112,31 persen. Namun tahun 2020 mengalami penurunan ke angka 110,42 persen. di tahun 2021 naik kembali ke angka 112,22 persen dan terjadi penurun kembali ditahun 2022 ke angka 111,43 persen. Capaian APK SD/MI ini ini harus tetap dipertahankan pada ≥ 100 persen. Hal ini menggambarkan optimalnya daya serap SD/MI terhadap penduduk usia SD/MI sehingga dapat dipastikan bahwa kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan semakin terbuka lebar.

Untuk jenjang SMP/MTs, APK cenderung menurun dimana pada tahun 2018 tercatat APK Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 104,81 persen dan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami penurunan ke angka 95,16 persen. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu untuk kembali berupaya dalam hal meningkatkan APK untuk jenjang SMP/MTs agar kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan di jenjang tersebut kembali terbuka mengingat akan pentingnya pendidikan guna mencerdaskan generasi muda dan kewajiban dalam menempuh pendidikan 12 tahun melalui optimalisasi sistem pendidikan tingkat menengah pertama baik melalui optimalisasi terhadap kuantitas (peningkatan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk) serta kualitas pendidikan (peningkatan rasio guru terhadap murid secara merata). Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA cenderung positif dari tahun 2018 sampai dengan 2022 Capaian APK SMA/SMK/MA ini harus tetap dipertahankan.

2.Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu target dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau lazimnya disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. APS adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Semakin tinggi nilai APS berarti Semakin besar jumlah penduduk yang masih mengenyam pendidikan pada suatu jenjang tertentu.

Terkait perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022 untuk kelompok umur 7-12 tahun , terjadi penurunan pada tahun 2020, tercatat APS kelompok umur 7-12 tahun berada pada angka 86,15 persen dan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 kembali naik menjadi 100 persen secara berturut-turut. Selanjutnya, untuk kelompok umur 13-15 tahun angka partisipasi sekolah cenderung fluktuatif di mana sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022 terjadi penurunan dan kenaikan APS hal ini bisa di lihat pada tabel 2.37 dibawah ini.

Tabel 2. 37
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	Capaian Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Barito Selatan (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (7-12 Tahun)	100	100	86,15	100	100
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (13-15 Tahun)	95,60	89,80	98,71	87,42	100

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka dari bererapa edisi, diolah

3.Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah

yang berkesesuaian. Berikut perkembangan APM di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2018-2022.

Tabel 2. 38
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Barito Selatan				
	2018	2019	2020	2021	2022
APM SD/MI	99,22	99,10	98,82	98,80	99,69
APM SMP/MTs	93,85	92,08	92,03	91,98	91,67
APK SMA/SMK/MA	57,17	56,63	56,53	57,94	60,50

Sumber : Barito Selatan dalam angka dari beberapa edisi, diolah

Secara umum, APM Kabupaten Barito Selatan untuk jenjang SD/MI dalam lima tahun terakhir berada pada kategori sangat baik di mana dari tahun 2018-2022 terus konsisten berada pada kisaran angka hampir 100 persen, demikian pula untuk APM jenjang SMP/MTS yang cenderung Konsisten di kisaran angka 90-an persen. Sedangkan untk jenjang APK SMA/SMK/MA perlu adanya perhatian khusus agar APM terus naik Konsisten agar terus naik.

4.Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru pada suatu jenjang sekolah terhadap jumlah murid yang berguna untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar atau untuk melihat mutu pengajaran di dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai rasio berarti semakin tinggi beban kerja sehingga semakin berkurang tingkat pengawasan, perhatian dan pembimbingan dari guru terhadap muridnya.

Rasio guru/murid di Kabupaten Barito Selatan terdiri dari dua indikator yaitu rasio guru/murid terhadap murid pendidikan menengah yakni untuk pendidikan tingkat sekolah dasar dan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama dan rasio guru/murid terhadap murid pendidikan menengah untuk pendidikan tingkat menengah atas. Dari tahun 2017-2022 untuk setiap jenjang pendidikan seperti yang disebutkan di atas bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 39
Jumlah dan Rasio Guru/Murid Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Rasio Guru/Murid Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	1:8	1:10	1:8	1:8	1:8	1:8
Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:11	1:13	1:11	1:11	1:10	1:10

Sumber: Disdik Kab. Barito Selatan

Berdasarkan tabel di atas, bisa diketahui bahwa rasio guru/murid cenderung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2017-2022. Untuk rasio guru/murid terhadap Sekolah Pendidikan Dasar tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1:10. Adapun tingkat rasio guru/murid terhadap pendidikan Menengah memiliki rasio tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1:13. Untuk indikator kinerja lain urusan pendidikan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partasipasi Kasar	104,18	99,26	104,77	106,45	0	103,3
Angka Partisipasi Murni	84,67	81,59	88,32	87,38	0	95,68
Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,09	90,08	98,38	87,75	98,32	99,69
Angka Partispasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	70,04	66,45	70,27	58,23	89,52	91,67
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	94,17	100	100	96,98	98,8	99,69
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	62,21	92,42	84,11	86,97	96,64	95,93
Angka Putus Sekolah						
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,16	0,12	0,07	0,28	0	0,52
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,25	0,74	0,3	0,39	0,00	1,82
Angka Kelulusan						
Angka Kelulusan SD/MI	-	-	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTs	-	-	100	100	100	100
Angka Melanjutkan						
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	74,64	81,16	78,19	85,46	92,72	62,44
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	63,25	-	-	96,11	-	-
Fasilitas Pendidikan						

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	1:84	1:81	1:83	1:80	0,00	1:99
Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:8	1:10	1:8	1:8	1:8	1:8
Penduduk yang berusia > 15 Tahun yang melek huruf	99,46	99,8	99,74	99,75	99	99,42
Guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV	68,5%	72,93%	85,70%	92,57%	0,0	78,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan

Tabel 2. 41
Matriks Indikator Kinerja Urusan bidang pendidikan Kabupaten Barito Selatan

No	Indikator Kinerja Urusan	Capaian 2022
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	83,92
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,52
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	8,63
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	51,64
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	39,95
6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	60,38
7	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	52,07
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	41,67
9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	47,87
10	Indeks Iklim Keamanan SD	81,41
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	87,82
12	Indeks Inklusivitas SD	76,95
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	81,92
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	83,82
15	Indeks Inklusivitas SMP	84,05

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan

2.3.1.2.Urusan Kesehatan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerjaantara lain : Angka Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks), Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks), Rasio Posyando per satuan balita, Rasio Puskesmas per satuan penduduk, Rasio Pustu per satuan penduduk,Rasio rasio rumah sakit per satuan penduduk,Rasio

rasio rumah sakit per satuan penduduk, Rasio Dokter per satuan penduduk, Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dan Cakupan Pelayanan Nifas.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	1	2,6	2,6	0	3,89	2
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,76	99,75	99,93	99,93	99,9	99,8
Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks)	195	1	0	251	399,29	200
Rasio Posyandu per Satuan Balita	80	80	80	80	80	80
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	10	10	10	10	10	10
Rasio Pustu per satuan penduduk	6	10	10	6	6	6
Rasio Dokter per satuan penduduk	19,5	18,6	20,1	42,2	42,6	42,6
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	0,03	0,03	0,01	0,031	0,019	100%
Cakupan Pelayanan Nifas	64,1%	63,6%	82%	82%	62%	78%

Sumber: Dinas kesehatan Kab. Barito Selatan

Tabel 2. 43
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2021 :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian (2020)	Capaian (2021)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan Kesehatan	100%	70%	87%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	74%	86%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	85%	87%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	44%	47%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian (2020)	Capaian (2021)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	13%	45%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Usia Produktif	Jumlah warga Negara Usia Produktif yang mendatkan layanan Kesehatan	100%	23 %	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Usia Lanjut	Jumlah warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	21%	18%
8	Pelayanan Kesehatan hipertensi	Penderita Hipertensi	Jumlah warga Negara Penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	13%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes meilitus	Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah warga Negara dengan penderita Diabetes mielitus yang terlayani .	100%	22%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Penderita ODGJ	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	88%	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tubercolosis	Orang Terduga TBC	Jumlah warga negara penderita Tubercolosis yang terlayani kesehatan	100%	18%	30 %
12	Pelayanan Kesehatan dengan orang teresiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Imuno defesiensi Virus)	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Imuno defesiensi Virus)	100%	57%	50,21 %

Sumber: Dinas kesehatan Kab. Barito Selatan

Berdasarkan Capaian Sebelumnya Tahun 2020 nilai capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebesar 44% sedangkan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 capaianya sebesar 76% artinya dari penilaian indikator tersebut prosentasenya mengalami Peningkatan sehingga memerlukan formula yang inovatif agar tetap mencapai target dan Meningkatkan fokus pada setiap kegiatan yang belum tercapai. Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1) Pelayanan Ibu Hamil nilai capaian 87 % belum terpenuhi karena kondisi pandemi pelayanan posyandu terbatas dan ibu hamil takut datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, rencana tindak lanjut pelayanan dilaksanakan dengan menerapkan standar protokol kesehatan dilanjutkan layanan konsultasi atau penyuluhan kesehatan menggunakan jaringan komonikasi virtual zoom meting dan washap group.
2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 86 % belum tercapai oleh karena tidak mksimal melakukan kegiatan PONED karena kondisi pandemi, tindak lanjut yang dilaksakan penguatan PONED dilakukan virtual, Pelayanan mematuhi standar protokol kesehatan dan jejaring komunikasi melalui washap.
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 87 % belum tercapai oleh karena pandemi Covid-19, tindak lanjutnya atas permasalahan tersebut kegiatan pelayanan pada kondisi sangat dibutuhkan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan kemudian komunikasi edukasi secara kontineu mengunakan jejaring wasap.
4) Pelayanan Kesehatan Balita capaian SPM 47 % disebabkan oleh karena banyak ibu yang takut datang ke fasilitas kesehatan untuk pemantuan tumbuh kembang balitanya sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan tidak berjalan maximal , kemudian sebagai tindak lanjut dilakukan komunikasi edukasi informasi mengunakan fasiltas telepon seluler dan dilaksanakan kunjungan berkala menerapkan standar protokol kesehatan untuk mengurangi pemaparan wabah.

5) Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar capaian SPM 45 % oleh karena beberapa sekolah menjalankan model during dalam pembelajaran dan sebagain pada masa zona kuning hijau tatap muka selang seling atas keadaan pandemi tersebut berdampak pada nilai capaianya, sebagai tindak lanjutnya melakukan konfirmasi koordinasi janji ketemu dengan panitia sekolah untuk kegiatan layanan kesehatan.
6) Pelayanan Kesehatan Usia lanjut capain SPM 18 % belum tercapai disebabkan oleh kondisi lansia sangat memungkingkan risiko penularan wabah lebih rentan sehingga aktifitas keluar rumah sebagain besar dibatasi oleh keluarganya sehingga sebagai tindak lanjut Tim SPM melakukan koordinasi , konfirmasi untuk pelayanan terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan.
7) Pelayanan Kesehatan terduga TBC nilai capain SPM 30 %, belum mencapai target, hal ini dikarenakan beberapa sebab diantaranya ialah Waktu pengobatan TB yang relatif lama (6 – 8 bulan) menjadi penyebab penderita TB sulit sembuh karena pasien TB berhenti berobat (drop) setelah merasa sehat meski proses pengobatan belum selesai. Selain itu, masalah TB diperberat dengan adanya peningkatan infeksi HIV/AIDS yang berkembang cepat dan munculnya permasalahan TB-MDR (Multi Drugs Resistant/kebal terhadap bermacam obat). Masalah lain adalah adanya penderita TB laten, dimana penderita tidak sakit namun akibat daya tahan tubuh menurun, penyakit TB akan muncul. sebagai tindak lanjut gayung bersambut fasilitas kesehatan sudah mempersiapkan standar pemeriksaan dan pengobatan yang adekuat disamping itu pula apabila sudah postif TB petugas membangun komunikasi via whatsapp group
8) Pelayanan Kesehatan dengan orang teresiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Imuno defesiensi Virus) dengan nilai capaian 50,21% belum tercapai hal ini disebabkan karena Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan HIV , masih terdapat stigma dan diskriminasi masyarakat tentang HIV, Solusi yang bisa dilakukan diantaranya ialah Melakukan Sosialisai secara berkala, Kerja sama

lintas sektor, Meningkatkan pemberian informasi tentang deteksi dini HIV dan bahaya Penularan HIV.

2.3.1.3.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam), Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor, Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Persentase penduduk berakses air minum, Rasio areal kawasan kumuh, Rasio tempat pemakaman umum per desa/kelurahan, Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, dan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB.

Tabel 2. 44
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito SelatanTahun

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	59,24	54,05	46,73	62,64	65,79	358,97
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	59,24	54,05	46,73	62,64	65,79	36,87
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	0,078	0,0936	0,1092	0,1092	1,125	0,72
Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	5,79	5,16	4,93	4,64	4,53	0

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rumah tinggal bersanitasi	36,00	52,18	4,10	50,48	64,73	64,73
Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,28
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	7,00	7,00	7,00	7,00	86,58	50
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	0	0	0,76	0,76	1,13	100
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	28,12	28,12	28,12	35,15	42,18	34,49
Rasio Jaringan Irigasi	0.11	0.11	34,00	35,29	39,71	35,94
Persentase penduduk berakses air minum	55,71	40,35	23,32	23,96	50,35	50,35
Rasio areal kawasan kumuh	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	12,07	12,07	12,73	20,48	25,31	4176,15

Sumber: Dinas PUPR Kab. Barito Selatan

2.3.1.4.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur dengan indikator: Jumlah Rumah layak huni.

Tabel 2. 45
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan

No.	Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah rumah layak huni	778	1.252	2.050	2.185	2.245	96

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Barito Selatan

2.3.1.5.Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diukur dengan indikator:Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dan Persentase Penegakan PERDA.

Tabel 2. 46
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100%	100%	100%	100%	100%	70%
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	75%
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	20,71%	20,71%	20,71%	20,71%	78,00%	80%
Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	100%	90%	82,60%	73%	80%
Persentase Penegakan PERDA	75%	76%	75%	77%	79%	85%

Sumber : Satpol PP damkar Kab. Barito Selatan

2.3.1.6. Urusan Sosial

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Sosial diukur dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari tahun 2017 tercapai hanya 75%, 2018 hanya tercapai 80% sedangkan tahun 2019,2020,2021 tercapai 100%.

Tabel 2. 47
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Sosial					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	75%	80%	100%	100%	100%	100%

Sumber : DinsosPMD Kab. Barito Selatan

2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Dari keseluruhan penduduk Barito Selatan Tahun 2022 terdapat 67.449 jiwa yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Berdasarkan Komposisi angkatan kerja menurut lapangan pekerjaan di Barito Selatan didominasi oleh penduduk di sektor Jasa dengan jumlah 30.489 jiwa dan di urutan kedua diisi oleh sektor pertanian dengan jumlah 28.655 jiwa, di urutan ketiga di isi oleh sektor industri dengan jumlah 8.305 jiwa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 48
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian			
	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	20.553	8.102	28.655
2	Industri			
	Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Konstruksi	7.210	1.095	8.305
3	Jasa			
	Perdaganagan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	15.637	14.852	30.489
Jumlah		**43.400**	**24.049**	**67.449**

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2023, diolah

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Tenaga Kerja diukur dengan indikator : Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, Besaran kasusyang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah dan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.

Tabel 2. 49
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2022

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	5	6	2	4	11	8
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	3	6	0	4	5	-
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	2	0	0	0	0	-
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30	30	20	15	0	30

Sumber : Disnaketrans Kab. Barito Selatan

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator : Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah, Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatihdi dalam unit pelayanan terpadu, dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Tabel 2. 50
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan

Indikator Capaian	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	-	34,73%	34,73%	24,14%	-	14,01%
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	-	36%	36%	40%	-	40%
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	-	45,93%	45,93%	31,30%	-	86%
Rasio KDRT	-	0,14	0,14	0,14	-	2
Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	34,59%	34,59%	54,38%	-	36%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	-	100%	100%	100%	-	1

Sumber : DP3KBP3A Kab. Barito Selatan

2.3.2.3. Pangan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pangan diukur dengan indikator : Penguatan Cadangan Pangan, Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan di daerah, Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat, Penanganan Daerah Kerawanan Pangan, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital, dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

Tabel 2. 51
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penguatan Cadangan Pangan	68,91	77,00	5,02	5,02	50,00	47,31
Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan di daerah	80,56	93,06	97,22	97,22	106,38	100
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	96,00	153,06	95,83	95,83	106,38	100
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat	94,60	92,90	93,80	92,9	84,08	94,11
Penanganan Daerah Kerawanan Pangan	34,80	39,29	50,00	50,00	54,69	80
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital	98,10	88,87	115,73	108,62	115,55	155,17
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	59,00	82,22	87,88	87,88	133,33	133,33

Sumber: DKP3 Kab. Barito Selatan

2.3.2.4. Pertanahan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat.

Tabel 2. 52
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2022

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase luas lahan bersertifikat	0,0020	1,233	1,389	2,597	1,017	2,075

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Barito Selatan

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota, Jumlah Titik Pantau Kualitas Lingkungan, dan Jumlah Perusahaan Yang Diawasi dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) per tahun.

Tabel 2. 53
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	-	74,40	72,37	72,64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur dengan indikator : Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Cakupan penerbitan akta kelahiran.

Tabel 2. 54
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Tahun 2018					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Penduduk ber- KTP per Satuan Penduduk	4.593	94,36%	98,41%	99,20%	99,98%	-
Rasio bayi berakte kelahiran	4.309	83%	92,68%	93,78%	95,39%	-
Rasio pasangan berakte nikah	372	31,04%	34,36%	40,53%	80,06%	-

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%	100%	-
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	4.593	93,04%	97,47%	99,17%	99,98%	-
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	4.309	55,89%	89,36%	93,26%	95,03%	-

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Barito Selatan

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur dengan indikator : Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Persentase LSM aktif, Persentase LPM Berprestasi, Persentase PKK aktif, Persentase Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. 55
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	60%	70%	70%	75%	65%	100%
Persentase LSM Aktif	42%	42%	43%	40%	45%	50%
Persentase LPM berprestasi	65%	75%	80%	80%	65%	1%
Persentasi PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	80%	100%
Persentase Posyandu Aktif	26,2%	26,2%	26,2%	93%	30%	100%
swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	45%	50%	50%	70%	80%	0
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	45%	50%	50%	80%	80%	0

Sumber : DINSOSPMD Kab. Barito Selatan

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur dengan indikator : Rata-rata jumlah anak per keluarga, Ratio Akseptor KB, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB, Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB,

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) berKB, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan, Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri, Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan, dan Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa.

Tabel 2. 56
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ratio Akseptor KB	-	0,78	0,78	0,72	-	75
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	-	78,00%	78,00%	72%	-	75,27
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	-	2,18	2,18	2,18	-	1,83
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	-	12,85	12,85	11,67	-	16,18
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	NA	NA	13,35%	-	10,86
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	86,93	86,93	79,53	-	84,6
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	90,00	90,00	88,06	-	82,9
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	75,80	75,80	75,27	-	74,91
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	76,21	76,21	66,67	-	100
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) yang ber-KB mandiri	-	50,00	50,00	76,72	-	77,25
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	-	93%	93%	93%	-	1
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	-	1	1	1	-	1

Sumber : DP3KBP3A Kab. Barito Selatan

2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perhubungan diukur dengan indikator : Jumlah arus penumpang angkutan umum, Rasio ijin trayek,Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan

Sungai/Udara/Terminal Bis, Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit), Pemasangan Rambu Sungai (Unit), Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, dan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum.

Tabel 2. 57
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah arus penumpang angkutan umum	75%	85%	90%	0%	8.328	1936
Rasio ijin trayek	1.325 Orang	1.235 Orang	1.120 Orang	310 Orang	25	0.000066
Jumlah uji kir angkutan umum	5.300 Orang	4.000 Orang	6.000 Orang	1.250 Orang	561 Unit	91 Unit
Jumlah pelabuhan Sungai /Udara/Terminal Bis	54%	-	-	7%	8	9
Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	70%	-	3%	3%	-	111 Unit
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	300 Buah	240	240	320	-	185
Jumlah orang/barang yang bersangkutan angkutan umum	250	-	-	10	43.040	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan

2.3.2.10.Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Komunikasi dan Informatika diukur dengan indikator Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dan Proporsi rumah tangga dengan akses internet.

Tabel 2. 58
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	-	76,33%	76,33%	85,00%	92,60%	87,38 %
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	31,70%	31,70%	65,00%	73,20%	68,12%

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Barito Selatan

2.3.2.11.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah diukur dengan indikator : Persentase koperasi aktif, Persentase UKM non BPR/LKM aktif, Persentase BPR/LKM aktif dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil.

Tabel 2. 59
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2022

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase koperasi aktif	207	209	37	42	11	55
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	-	-	-
Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	-	-	-
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100%	100	100	8.859	2.801	2.560

Sumber : Dinas Perdagangan dan UMKM Kab. Barito Selatan

2.3.2.12.Urusan Penanaman Modal

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

Tabel 2. 60
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	28	28	28	14	38	44
PMDN dalam Miliar Rupiah	476	428.655.150.000	26.730,1	26.730,1	-	183.465.800.000
PMA dalam US $ Ribu	1,215	1.423.156.350.000	10.987,7	10.987,7	-	176.068.500.000

Sumber : DPMPTSP Kab. Barito Selatan

2.3.2.13.Urusan Statistik

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Statistik diukur dengan indikator Buku ”kabupaten dalam angka” dan Buku ”PDRB”.

Tabel 2. 61
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Buku ”kabupaten dalam angka”	1	1	1	1	1	-
Buku ”PDRB”	1	1	1	1	1	-

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Barito Selatan

2.3.2.14.Urusan Persandian

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Persandian diukur dengan indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

Tabel 2. 62
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	-	-	30,00%	60%	60%	0%

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Barito Selatan

2.3.2.15.Urusan Perpustakaan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perpustakaan diukur dengan indikator : Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah, Rasio perpustakaan persatuan penduduk, Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun, Jumlah koleksi judul buku perpustakaan dan Jumlah pustakawan,tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.

Tabel 2. 63
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	6.820	7.801	5.500	7.818	2.495	3.386
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah	32.767	31.412	31.412	31.412	33.718	33.718
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,56%	0,59%	0,59%	0,62%	0,65%	0,65%

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	568,33	650,08	458,33	651,50	207,92	282,17
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	28.757	28.080	28.080	28.080	16.860	16.973
Jumlah pustakawan,tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	8	10	12	14	16	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barito Selatan

2.3.2.16. Urusan Kearsipan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kearsipan diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Tabel 2. 64
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	3%	20%	40%	57%	60%	100%
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	1	2	2	3	3

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barito Selatan

2.3.3. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Kebudayaan

Capaian Kinerja Urusan Pilihan pada Urusan Kebudayaan diukur dengan indikator Jumlah grup kesenian/sanggar seni.

Tabel 2. 65
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah grup kesenian/sanggar seni (buah)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Disporaparbud Kab. Barito Selatan

2.3.3.2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga diukur dengan indikator Persentase organisasi pemuda yang aktif.

Tabel 2. 66
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase organisasi pemuda yang aktif	98%	98%	98%	98%	60%	-

Sumber : Disporaparbud Kab. Barito Selatan

2.3.3.3. Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan. Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan pariwisata diukur dengan indikator Kunjungan wisata.

Tabel 2. 67
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kunjungan wisata Mancanegara	0%	0%	0,08%	0%	-	-
Kunjungan wisata Lokal/Nusantara	49,85%	24,18%	30,25%	26,02%	8.432	-

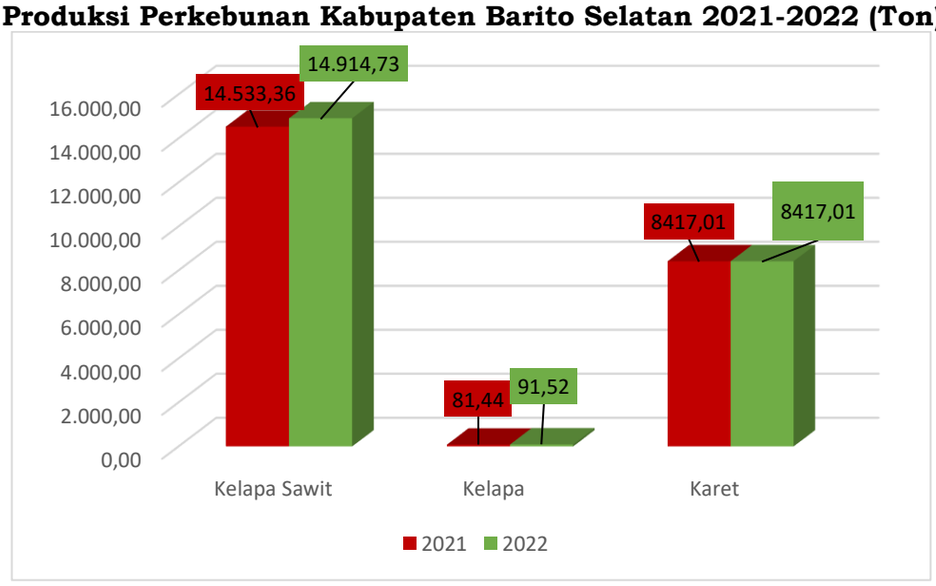
Sumber : Disporaparbud Kab. Barito Selatan

2.3.3.4. Urusan Pertanian

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap devisa maupun lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Barito Selatan. Pada

tahun 2022 luas panen padi sawah adalah 2.070 Ha dengan produktivitas sebesar 3.093 ton/Ha. Secara keseluruhan produksi padi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 adalah sebesar 6401,61 ton. Sementara itu, untuk sektor perkebunan dan kehutanan masih menjadi komoditas utama Kabupaten Barito Selatan dengan luas kebun pada tahun 2022 adalah 33.146 Ha dan produksi 8.290,76 ton dengan rincian luas areal tanam masing-masing adalah perkebunan karet sebesar 33.115 Ha, Kelapa Sawit 4.974,97, Ha dan kelapa sebesar 528,66 Ha. Untuk lebih jelasnya terkait dengan produksi sektor perkebunan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 31
Produksi Perkebunan Kabupaten Barito Selatan 2021-2022 (Ton)



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2023

Dari sektor peternakan dan perikanan, ternak babi hingga tahun 2022 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 13.812 ekor, sedangkan untuk jenis unggas, ayam pedaging merupakan jenis ternak terbanyak populasinya yaitu 544.080 ekor.

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pertanian diukur dengan indikator Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB.

Tabel 2. 68
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2022

Indikator	Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-	2,02	1,90	1,90	1.593,07	6381,21

Indikator	Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	-	-	7,09	7,09	8.328,87	5.250

Sumber : DKP3 Kab. Barito Selatan

2.3.3.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diukur dengan indikator Persentase rumah tangga pengguna listrik dan 9 Desa yang belum teraliri listrik (Data Terlampir) .

Tabel 2. 69
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rumah tangga pengguna listrik Desa	-	-	-	-	92,49	-
Persentase rumah tangga pengguna listrik RT	-	-	-	-	90,32	-

Sumber : Dinas ESDM (Data per 1 Januari 2023)

2.3.3.6. Urusan Perdagangan

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 - 2022 diukur dengan indikator Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.

Tabel 2. 70
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2022

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	2000	3037	3037	3.037	599	100

Sumber : Dinas Perdagangan dan UMKM Kab. Barito Selatan

2.3.3.7. Urusan Perindustrian

Sektor industri pengolahan di Barito Selatan hanya mencakup sub sektor industri non migas karena di kabupaten ini tidak terdapat industri migas. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dipengaruhi oleh

pertumbuhan sektor pertanian, dikarenakan industri di Kabupaten Barito Selatan masih merupakan industri berbasis sumber daya alam atau industri yang menggunakan output sektor pertanian sebagai bahan baku, seperti karet, kayu, dan hasil pertanian lainnya. Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perindustrian diukur dengan indikator Cakupan bina kelompok pengrajin.

Tabel 2. 71
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok pengrajin	716	638	754	644	650	716

Sumber : Dinas Perdagangan dan UMKM Kab. Barito Selatan

2.3.3.8. Transmigrasi

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Transmigrasi diukur dengan indikator Persentase transmigran swakarsa.

Tabel 2. 72
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase transmigran swakarsa	-	-	-	-	-	-

Sumber : Disnaketrans Kab. Barito Selatan

2.3.3.9. Kelautan dan Perikanan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kelautan dan Perikanan diukur dengan indikator : Produksi perikanan, Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpk), Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org), Produksi Hasil Budidaya Ikan, Kolam Ikan, Keramba dan KJA, Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari, Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk), Jumlah Penanganan Kasus Ilegal Fishing (Kasus), Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali), Usaha Pengelolaan, Nilai tukar nelayan, Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber Daya Perikanan (Reservaat (Danau), Restocking (Ekor), Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje).

Tabel 2. 73
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi perikanan	15.518,88	14.777,20	-	-	6.697,00	7831
Konsumsi Ikan	41,16	42,00	42,13	44,40	41,50	41,65
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	-	-	-	-	524,00	70
Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan yang dibina (Klpk)	38	48	30	-	22,00	30
Jumlah Petugas yang Mengikuti Diklat Teknis (Org)	7	5	-	-	-	1
Produksi Hasil Budidaya Ikan	-	-	-	-	8.943,36	7545,13
Kolam Ikan	2.617,33	1.853,48	1.989,64	2.027,23	1.991,06	1570,8
Keramba dan KJA	6.142,41	6.570,71	6.603,18	6.739,40	6.952,30	5974,36
- Jumlah Pokmaswas yang dibina (Klpk)	21	32	35	35,00	5	46
-Jumlah Penanganan Kasus Ilegal Fishing (Kasus)	-	-	4	4	1	-
-Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali)	7	2	2	2 Kali	-	12
Usaha Pengelolaan	140	145	135	135,00	140,00	142,00
Nilai Tukar Nelayan	105,20	106,00	-	0%	-	-
- Reservat (Danau)	-	6,00	6,00	6,00	8	-
- Restocing (Ekor)	-	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000	-
- Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje (Buah)	-	60,00	30,00	30,00	-	-

Sumber : DKP3 Kab. Barito Selatan

2.3.4. Penunjang Urusan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator : Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA dan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.

Tabel 2. 74
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Urusan Perencanaan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yangtelah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	89,58 %	82,50 %	106,67%	93,07%	81,39%	14,04

Sumber : Bappeda Kab. Barito Selatan

2.3.4.2.Keuangan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Keuangan diukur dengan indikator : Opini BPK terhadap laporan keuangan, Persentase SILPA, Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana, Persentase belanja pendidikan (20%), Persentase belanja kesehatan (10%), Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Bagi hasil kabupaten/kota dan desa, dan Penetapan APBD.

Tabel 2. 75
Capaian Kinerja Urusan KeuanganKabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses
Persentase SILPA	-	9,36%	7,53%	8,53%	8,53%	-
Persentase SILPA terhadap APBD	-	9,36%	7,53%	8,94%	5,06%	0,0846
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	-	9,36%	7,53%	2,80%	3,20%	0,1492
Persentase belanja pendidikan (20%)	-	27,55 %	26,25%	24%	25%	0,2651
Persentase belanja kesehatan (10%)	-	10,56 %	15,98%	17,41 %	13,20%	0,1286

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	-	55/46	55/45	56/44	56/45	54,29/ 39,79
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	-	529.246. 100,00	2.042.972 .538,00	1.240.95 2.900,00	11.307.26 5,00	1.700. 837.86 4
Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan

2.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diukur dengan indikator : Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dan Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

Tabel 2. 76
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan PelatihanKabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-	4 Bulan	4 Bulan	-	-	0 Bulan
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	88%	64%	82%	83,33%	-	0,19%
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40%	0%	73%	0%	-	60,4%
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah	27 Orang	28 Orang	25 Orang	30 Orang	28 Orang	27 Orang
Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah	126 Orang	123 Orang	129 Orang	134 Orang	134 Orang	128 Orang

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2207 Orang	2194 Orang	2193 Orang	1940 Orang	1915 Orang	2023 Orang

Sumber : BKPSDM Kab. Barito Selatan

2.3.4.4. Pengawasan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pengawasan diukur dengan indikator : Persentase tindak lanjut temuan, Persentase pelanggaran pegawai dan Jumlah temuan BPK.

Tabel 2. 77
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase tindak lanjut temuan	74,25%	72,96%	72,01%	71,62%	76,62%	74,44%
Persentase pelanggaran pegawai	15%	20%	10%	25%	5%	0%
Jumlah temuan BPK	23	20	17	12	9	3

2.3.4.5. Sekretariat Dewan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Sekretariat Dewan diukur dengan indikator : Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Tabel 2. 78
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	8 Raperda	9 Raperda	5 Raperda	9 Raperda	3 Raperda	1 Program
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing *(*competitiveness*)* merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus iklim investasi.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita adalah pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan oleh satu penduduk dalam rumah tangga untuk dikonsumsi baik komoditas makanan maupun bukan makanan selama sebulan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh

pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Untuk rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat di tabel berikut ini,

Tabel 2. 79
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Bulan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Tahun	Makanan (Rp)	Non Makanan (Rp)	Total (Rp)	Persentase Pengeluaran Makanan	Persentase Pengeluaran Non Makanan
2017	589.290	433.763	1.134.979	57,60	42,40
2018	567.545	456.417	1.023.962	55,43	44,57
2019	564.978	475.749	1.040.727	54,29	45,71
2020	641.874	542.339	1.184.213	54,20	45,80
2021	665.081	570.887	1.235.969	53,81	46,18
2022	750.914	556.635	1.307.549	57,43	42,57

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Dari Beberapa Edisi, diolah

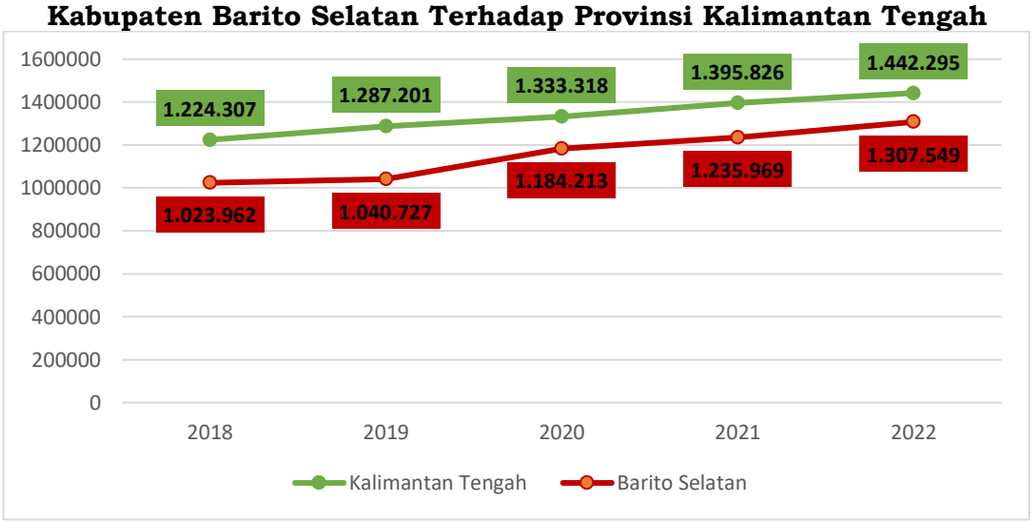
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa. Rata-rata per kapita total pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.134.979 dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi sebesar Rp.1.023.962, Pada tahun selanjutnya Rata-rata per kapita total pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung naik kembali dan pada tahun 2022 menyentuh angka sebesar Rp.1.307.549. Untuk proporsi rata-rata pengeluaran konsumsi, dari tahun 2017 hingga tahun 2022 masih didominasi oleh rata-rata pengeluaran konsumsi makanan.

Meskipun begitu, selama beberapa tahun terakhir persentase tersebut mulai bergeser ke arah pengeluaran non makanan yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Barito Selatan terus membaik karena pengeluaran untuk kebutuhan primer

(makanan) sedikit demi sedikit bergeser ke pengeluaran kebutuhan sekunder dan tersier.

Jika dibandingkan dengan rata-rata total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2018 ke tahun 2022, rata-rata total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Barito Selatan masih cenderung berada di bawah rata-rata total pengeluaran konsumsi rumah tangga Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 32
Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita/Bulan Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka
Dari Beberapa Edisi, diolah

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani dan Produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani. Jika nilai NTP > 100 maka petani mengalami surplus, jika nilai NTP = 100 petani mengalami impas serta NTP < 100 petani mengami defisit. Adapun untuk NTP Gabungan Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 80
It, Ib & NTP Gabungan Provinsi Kalimantan Tengah 2022

Bulan	It*	Ib**	NTP***
Januari	117,00	109,09	107,25
Februari	117,80	109,29	107,79
Maret	118,39	109,82	107,81
April	119,24	110,99	107,43
Mei	121,47	111,50	108,94
Juni	125,90	112,90	111,52
Juli	124,26	113,21	109,75
Agustus	122,29	112,90	108,32
September	121,56	113,79	106,83
Oktober	121,33	114,49	105,97
November	121,48	115,08	105,56
Desember	122,41	115,66	105,84

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023

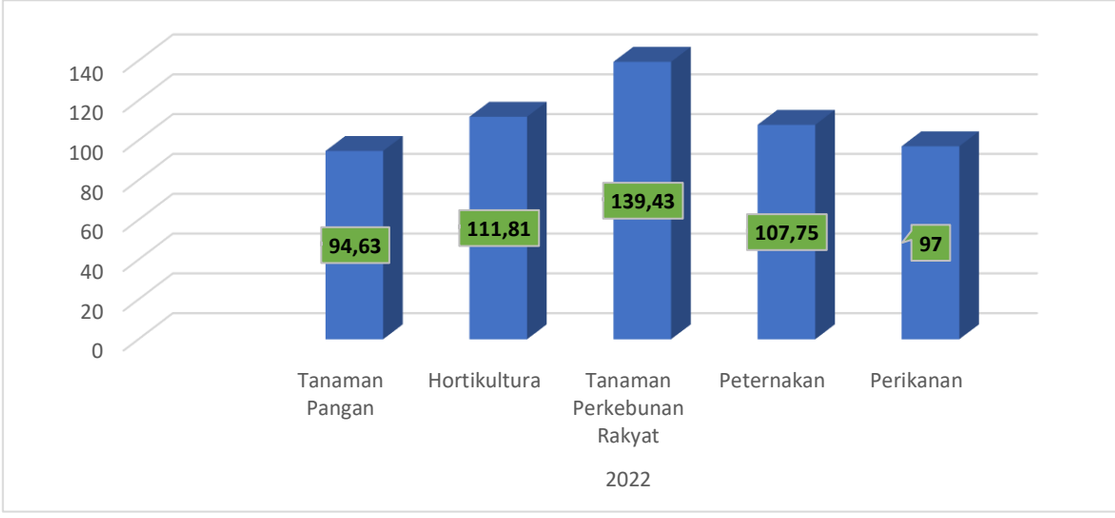
*)It : Indeks harga yang diterima petani **) Ib : Indeks harga yang dibayar petani
***) Nilai Tukar Petani

Teruntuk Indeks harga yang diterima (It), Indeks harga yang dibayar (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Barito Selatan terdapat kendala. Adapun yang menjadi kendala adalah tidak tersedianya data di Perangkat Daerah terkait maupun buku stastik kabupaten sehingga data yang ditampilkan merupakan data gabungan provinsi Kalimantan tengah. Mengacu kepada tabel di atas nilai It, Ib, dan NTP Januari - Desember nilai NTP selalu > 100 bisa dikatakan bahwa kondisi ini para petani mengalami Surplus. Angka ini perlu dipertahankan bersama para *stakeholder* untuk selalu meningkatan efisiensi dan produktifitas di bidang pertanian mengingat sampai saat ini, sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbesar serta juga merupakan sektor lapangan usaha yang masuk ke dalam tiga besar dalam berkontribusi membentuk PDRB Provinsi Kalimantan Tengah.

Bila ditelaah lebih lanjut terkait Nilai Tukar Petani (NTP) untuk setiap sub sektor Gabungan Provinsi kalimantan Tengah tahun 2022, sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat memiliki NTP tertinggi dengan nilai 139,43. NTP tertinggi kedua adalah sub sektor hortikultura dengan angka sebesar 111,81 dan di urutan ketiga ada sub sektor Peternakan dengan nilai angka sebesar 107,75, Ketiga sub sektor inilah yang menjadi sub sektor andalan Provinsi Kalimantan Tengah untuk sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya

terkait dengan perbandingan setiap sub sektor di tahun 2022 bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 33
Nilai Tukar Petani Per Sub Sektor Gabungan di Provinsi Kalimantan Tengah 2022



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023

2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang memiliki manfaat untuk menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja di ke-tujuh belas sektor tersebut.

Adapun yang menjadi kendala dalam perhitungan produktivitas total daerah di Kabupaten Barito Selatan adalah terkait dengan format data yang tersedia, di mana ada perbedaan antara format data lapangan pekerjaan utama yang terdiri dari 9 sektor terhadap data PDRB yang memuat 17 sektor atau lapangan usaha sehingga harus dilakukan penyesuaian. Berikut capaian produktivitas total daerah di Kabupaten Barito Selatan tahun 2020-2022.

Tabel 2. 81
Produktivitas Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020

Lapangan Pekerjaan Utama	Capaian 2020		
	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB ADHB (milyar)	Produktivitas (juta/thn)
Pertanian: (Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan)	26.694	1.207,21	4.522.402,04
Industri: (Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, gas dan air minum, Konstruksi)	11.417	1.624,71	14.230.621
Jasa: (Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi , Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Jasa Pendidikan, Jasa Lainnya)	25.886	3.446	13.312.215,1
Jumlah	**63.997**	**6.277,92**	**32.065.238,1**

Produktivitas Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021

Lapangan Pekerjaan Utama	Capaian 2021		
	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB ADHB (milyar)	Produktivitas (Juta/Tahun)
Pertanian: (Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan)	24.790	1212,79	4.892.254,94
Industri: (Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, gas dan air minum, Konstruksi)	12.482	1.827,83	14.643.727
Jasa: (Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi , Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Jasa Pendidikan, Jasa Lainnya)	26.404	3.640,51	13.787.721,6
Jumlah	**63.676**	**6.681,13**	**33.323.703,5**

Produktivitas Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

Lapangan Pekerjaan Utama	Capaian 2022		
	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB ADHB (milyar)	Produktivitas (Juta/Tahun)
Pertanian: (Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan)	28.655	1.305,08	4.554.458,21
Industri: (Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, gas dan air minum, Konstruksi)	8.305	2.969,23	35.752.317,9

Jasa: (Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi , Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Jasa Pendidikan, Jasa Lainnya)	30.489	3.857,32	12.651.513,7
Jumlah	**67.449**	**8.131,63**	**52.958.289,8**

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Dari Beberapa Edisi, diolah

Mengacu kepada tabel di atas, lapangan pekerjaan utama yang memiliki produktivitas relatif rendah apabila melihat perbandingan nilai PDRB yang dihasilkan terhadap jumlah tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yang nilai produktivitasnya pada tahun 2022 hanya berada pada angka 4.522.402,04 per tahun atau sekitar 376.866 per bulan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor ini mengingat sebagian dari masyarakat Kabupaten Barito Selatan bekerja di sektor tersebut dengan mengembangkan industri hulu hilir di sektor pertanian untuk memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian. Adapun sektor dengan produktivitas tertinggi adalah sektor Industri meliputi (Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, gas dan air minum, Konstruksi) yang memiliki produktivitas sebesar Rp. 2.969.230.000 per tahun atau sebesar Rp. 247.435.833 per bulan.

2.4.2. Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupu internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan dan konsistensi investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan ekonomi.

2.4.2.1. Kriminalitas

Angka kriminalitas di suatu wilayah akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi sehingga tinggi atau rendahnya angka kriminalitas akan mempengaruhi kondusivitas investasi. Angka kriminalitas di Kabupaten Barito Selatan cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2017 hingga tahun 2022 terjadi kenaikan angka dan penurunan Angka kriminalitas. Kasus pencurian mendominasi angka kriminalitas di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2018 yang terbagi menjadi 12 kasus pencurian berat (curat), 2 kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan 8 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencurian, salah satunya adalah desakan ekonomi sehingga kondisi ini patut menjadi perhatian pemerintah dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan untuk menekan angka tindak pidana pencurian. Jumlah tindak pidana berdasarkan jenis tindak pidana di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 82
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana di Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	Jumlah	93	107	91	117	101	114
Jumlah Penduduk	Jumlah	134.543	135.736	136.796	131.100	131.606	131.997
Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Kasus Tertangani /10.000 penduduk	6,9	7,8	6,5	8,9	7,6	8,6

Sumber : Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2023, diolah

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang akan menentukan arah tujuan pembangunan. Sebagai pondasi pelaksana pembangunan, setiap individu menjadi penentu dalam setiap aktivitas pembangunan melalu partisipasinya salah satunya dalam hal kualitas angkatan kerja mengingat semakin tinggi kualitas angkatan kerja maka produktivitas akan semakin meningkat yang pada akhirnya dengan produktivitas yang tinggi akan berkontribusi kepada peningkatan perekonomian suatu wilayah.

Di kabupaten Barito Selatan, salah satu pendekatan untuk melihat seberapa besar kualitas tenaga kerja adalah melalui tingkat pendidikan angkatan kerja yang mana dari tahun ke tahun, peningkatan kualitas pendidikan angkatan kerja harus terus mengalami perbaikan. Pada tahun 2020, tingkat pendidikan angkatan kerja untuk lulusan perguruan tinggi hanya berada pada kisaran 16, 32 persen dari total angkatan kerja dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan ke angka 16,58 persen. Pada tahun 2022 tingkat Pendidikan Angkatan kerja untuk lulusan perguruan tinggi turun ke angka 12,4 persen dari total Angkatan kerja. Terkait tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020-2022 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 83
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Capaian					
	2020		2021		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Dasar	21.964	32,88	4.336	6,53	22.944	32,80
Sekolah Menengah Pertama	15.595	23,34	31.546	47,48	15.865	22,70
Sekolah Menengah Atas	18.349	27,46	19.543	29,41	22.445	32,10
Perguruan TInggi	10.904	16,32	11.014	16,58	8.663	12,4
Jumlah	**66.812**	**100,0**	**66.439**	**100,0**	**69.917**	**100,0**

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka dari berbagai edisi, diolah

2.4.3.2. Tingkat Ketergantungan (*Depedency Ratio)*

Konsep tingkat ketergantungan adalah untuk mengetahui seberapa besar beban tanggungan penduduk yang berada di usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk di usia tidak produktif (< 15 tahun dan > 64 tahun). Untuk Kabupaten Barito Selatan, tingkat ketergantungan dari tahun 2017–2022 cenderung menurun yakni pada tahun 2017, rasio ketergantungan berada pada angka 47 dan pada tahun 2022 berada pada angka 40 yang berarti setiap 100 orang yang berada didalam kategori usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah di tengah melimpahnya penduduk kabupaten Barito Selatan yang berusia produktif agar tetap bisa mengakomodir ketersediaan lapangan pekerjaan agar SDM yang dimiliki tidak bocor ke luar daerah. Untuk lebih jelasnya,

terkait rasio tingkat ketergantungan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 84
Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Non Produktif Terhadap Penduduk Usia Produktif Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Capaian					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk < 15 Tahun	38.098	37.901	37.649	31.700	31.174	30.700
Jumlah Penduduk > 64 Tahun	5.014	5.217	5.448	6.900	7.244	7.598
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	43.112	43.118	43.097	38.600	38.418	38.298
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun (usia produktif)	91.431	92.618	93.699	92.600	93.188	93.699
Rasio Ketergantungan / 100 Penduduk	**47**	**47**	**46**	**41**	**41**	**40**

Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Dari Beberapa Edisi, diolah

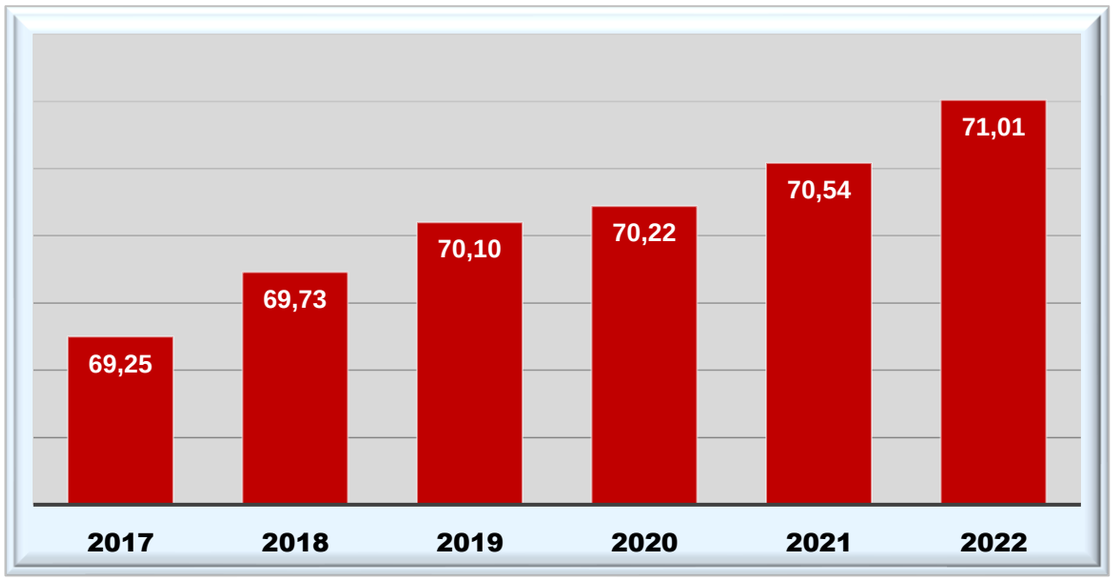
2.5 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

2.5.1 Evaluasi Perkembangan Indikator Kinerja Makro

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Secara umum gambaran capaian Indikator kinerja makro Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2022 adalah berikut ini.

2.5.1.1 indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan juga salah satu indikator target pembangunan pemerintah serta menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen IPM yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita menjadi indikator dalam penghitungan Dana Insetif Daerah (DID).



Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

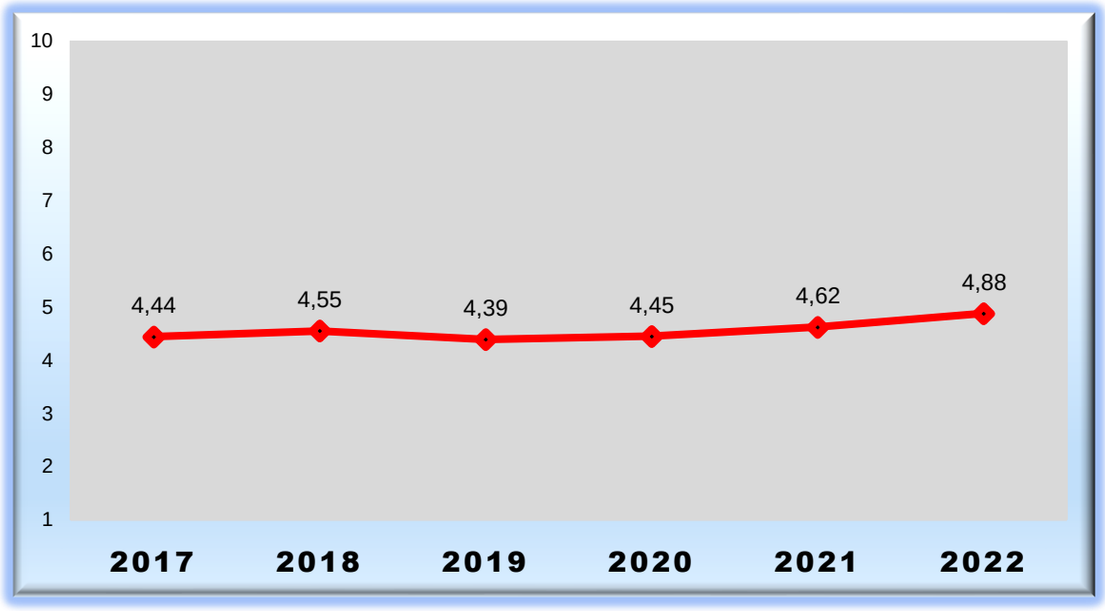
Gambar 2. 34
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017 – 2022

IPM Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2017-2022 mengalami perkembangan dari 69,25 tahun terus meningkat menjadi 71,1 tahun. Pada tahun 2021 status pembangunan Kabupaten Barito Selatan berada pada status Tinggi. Kabupaten Barito Selatan termasuk dalam kategori pertumbuhan IPM tertinggi dari tahun 2020-2021 yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 0,46% berada pada peringkat 1 (satu). Perkembangan ini secara umum menunjukkan kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Barito Selatan yang didorong oleh dimensi pengetahuan.

2.5.1.2 Angka Kemiskinan

Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia sangat beragam, terdapat cukup banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor penyebab kemiskinan tersebut dapat berupa pertumbuhan ekonomi, produktifitas tenaga kerja, tingkat upah, jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), inflasi, jumlah anggota rumah tangga, fasilitas kesehatan, konsumsi rumah tangga, sumber air bersih, transportasi, kepemilikan aset lahan pertanian, pendidikan dan jumlah

tahun bersekolah seluruh anggota keluarga, akses permodalan, dan lokasi wilayah tempat tinggal penduduk dengan pusat pertumbuhan ekonomi.



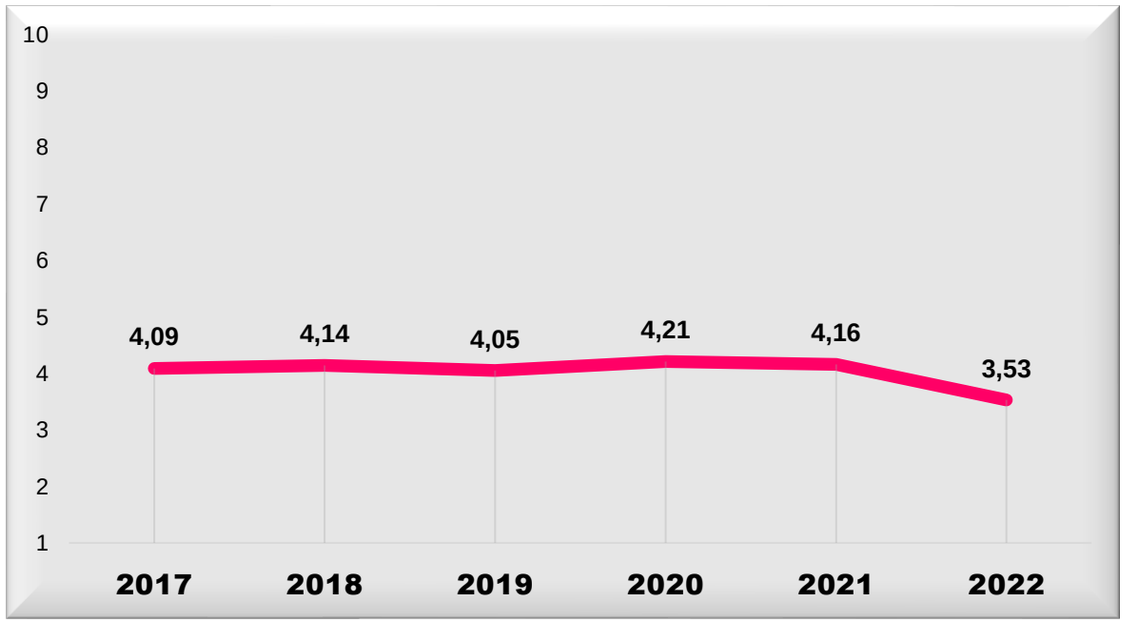
Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

Gambar 2. 35
Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017 – 2022

Secara umum, perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan cenderung mengalami peningkatan. Angka kemiskinan tahun 2017 dari 4,44% mengalami kenaikan menjadi 4,55% pada tahun 2018. Selanjutnya tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,39% kemudian terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir menjadi 4,45% pada tahun 2020 hingga 4,88% pada tahun 2022.

2.5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka mencerminkan jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk pengangguran.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

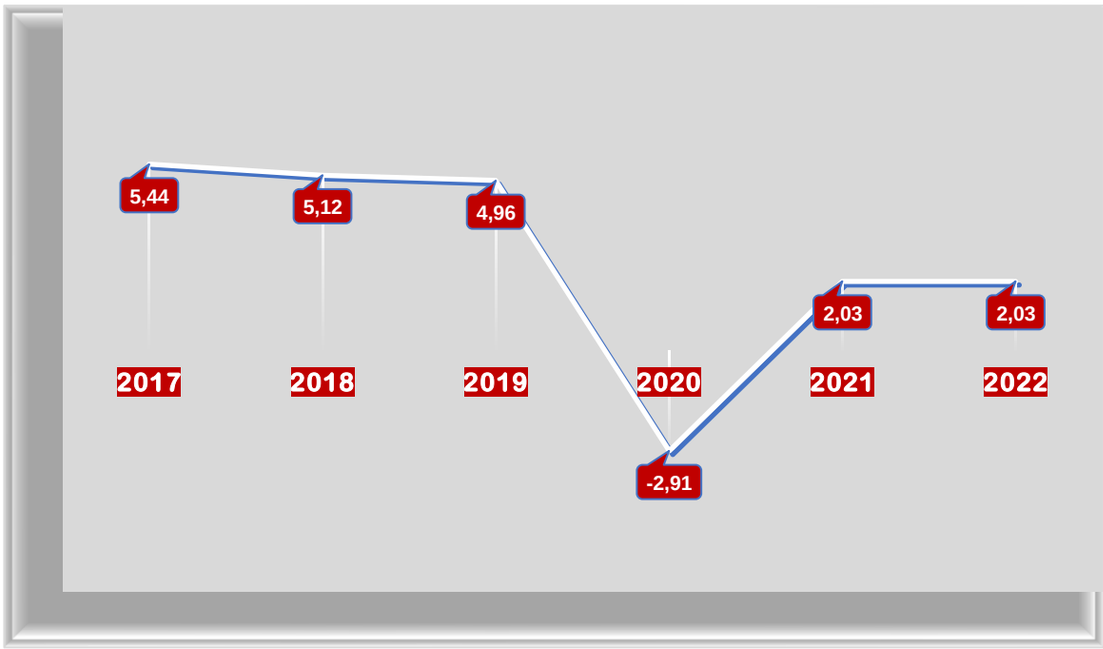
Gambar 2. 36
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017 – 2022

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2017 – 2022 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka berada pada nilai 4,09% selanjutnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 4,14% kemudian mengalami penurunan menjadi 4,05% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan menjadi 4,21% diduga akibat dampak pandemi Covid-19 selanjutnya pada tahun 2021 seiring dengan penanganan pandemi oleh pemerintah tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,05 poin menjadi 4,16%. Pada tahun 2022 terus mengalami penurunan menjadi 3,53% seiring dengan mulai berkurangnya dampak dari Covid-19.

2.5.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan dalam 5 (lima) tahun cenderung mengalami penurunan. Dari tahun 2017 – 2019 laju pertumbuhan ekonomi semakin melambat dari 5,44% hingga menjadi 4,96%. Pada Tahun 2020 penurunan drastis karena dampak pandemi Covid-19 sehingga laju pertumbuhan ekonomi melambat menjadi -2,91%.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan ekonomi nasional untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pada tahun 2021 dan 2022 di tengah kondisi pandemi terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 2,03%.

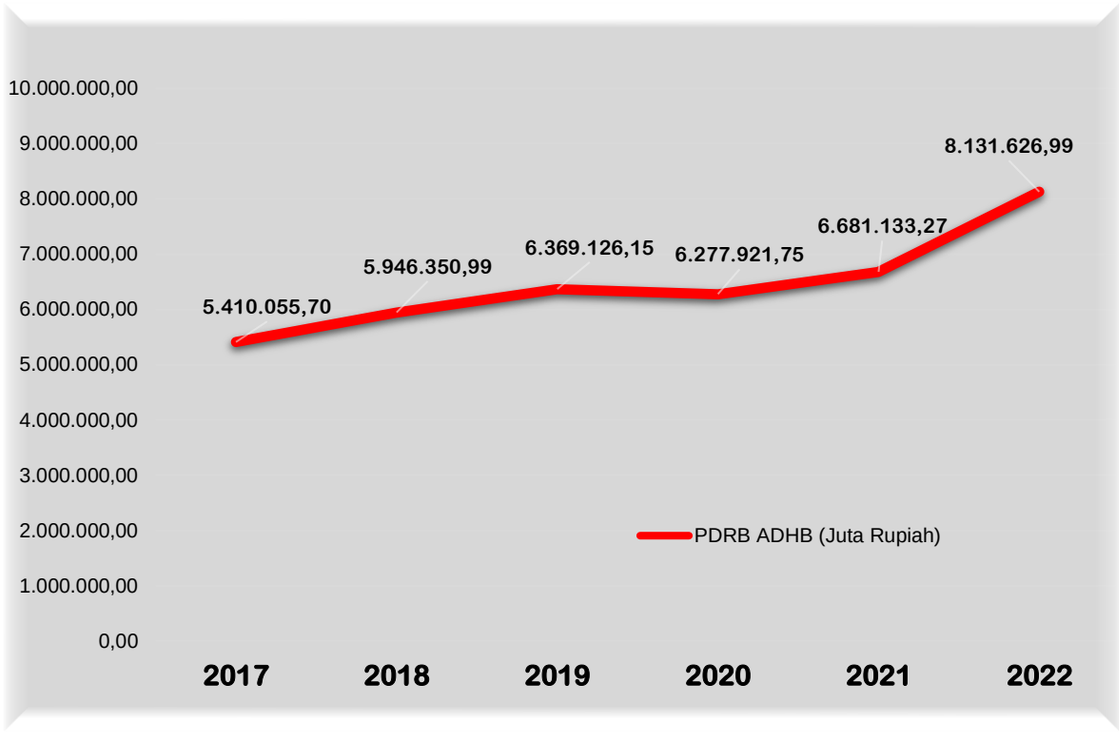


Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

Gambar 2. 37
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017-2022

2.5.1.5 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.



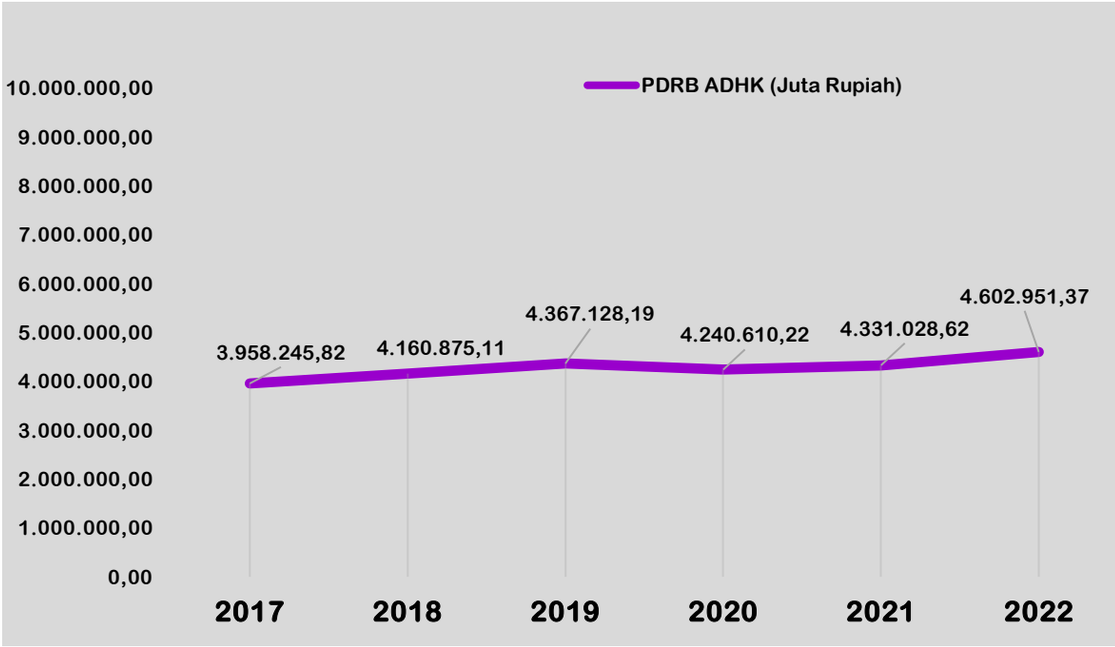
Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

Gambar 2. 38
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Barito Selatan selama periode tahun 2017 – 2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya, peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan harga dan perubahan volume dari

5.410.055,70 hingga mencapai 6.369.126,15. Selanjutnya pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan akibat Covid-19 menjadi 6.277.921,75 dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 6.681.133,27. Capaian tahun 2022 terus mengalami trend kenaikan semakin tinggi menjadi 8.131.626,99.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2017 – 2019 dari nilai 3.958.245,82 hingga meningkat menjadi 4.367.128,19. PDRB ADHK menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil yang terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. PDRB ADHK Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4.240.610,22 akibat pandemi Covid-19 selanjutnya tahun 2021 meningkat menjadi 4.331.028,62 dan tahun 2022 terus mengalami kenaikan menjadi 4.602.951,37.

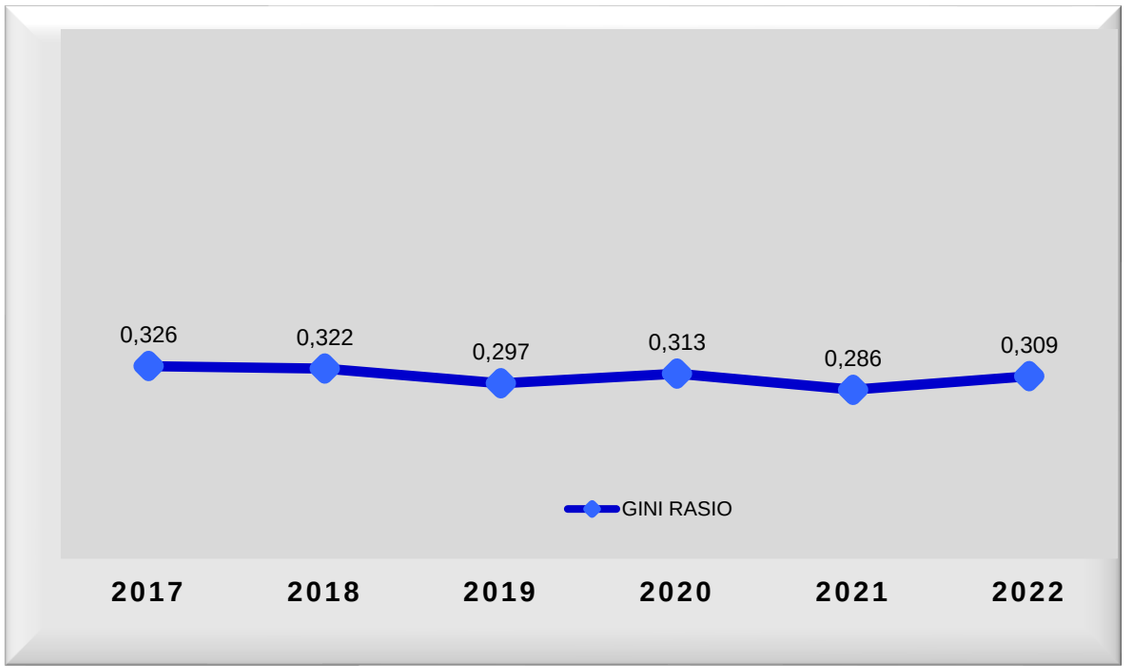


Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

Gambar 2. 39
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

2.5.1.6 Gini Rasio

Gini rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai gini rasio berkisar antara 0 hingga 1, jika nilai gini rasio semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini rasio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan gini rasio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Selatan

Gambar 2. 40
Gini Rasio Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017 – 2022

Gini rasio Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017 – 2019 mengalami penurunan dari 0,326 menjadi 0,297. Selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,313 dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 0,28. Gini rasio tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 0,309.

2.5.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 berdasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan regulasi sebagai berikut :

1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Adapun perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 diatur dalam regulasi sebagai berikut :

1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan pagu anggaran murni tahun 2022 yaitu Rp. 1.019.710.164.746,00 mengalami kenaikan sebesasr Rp. 74.016.488.061,00 sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.093.726.652.807,00. Capaian realisasi belanja sebesar Rp. 978.131.426.694,11 atau 89,43%. Rincian realisasi Belanja Daerah per Perangkat Daerah se Kabupaten Barito Selatan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 85
Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU MURNI	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	DINAS PENDIDIKAN	266.629.208.962,00	287.097.255.330,00	255.652.998.677,00
2	DINAS KESEHATAN	176.401.218.322,00	183.140.304.281,00	158.127.100.160,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	141.365.407.300,00	145.077.755.487,00	137.782.477.797,11
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7.205.653.441,00	7.998.283.122,00	7.803.508.358,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.716.378.259,00	9.945.037.466,00	9.747.627.068,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.477.394.797,00	4.217.474.063,00	4.092.271.880,00
7	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	66.883.136.038,00	78.195.185.756,00	77.631.318.106,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.138.175.456,00	4.452.411.069,00	4.401.182.139,00
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.163.185.486,00	7.451.082.251,00	6.979.731.105,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	25.433.382.214,00	26.760.325.520,00	25.955.730.090,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.380.830.000,00	10.076.042.989,00	9.888.725.631,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.618.346.057,00	5.035.249.648,00	4.781.396.462,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	11.431.321.912,00	11.838.800.549,00	11.034.660.125,00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.762.294.890,00	6.246.635.715,00	6.124.583.137,00
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	6.839.380.086,00	8.816.802.817,00	8.705.272.749,00

Sumber Data : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU MURNI	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.920.324.774,00	6.016.324.774,00	5.079.311.527,00
17	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.458.474.363,00	8.511.998.422,00	8.276.742.752,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.535.751.942,00	5.744.481.078,00	3.513.673.009,00
19	SEKRETARIAT DAERAH	29.239.698.774,00	40.113.299.992,00	39.532.126.439,00
20	SEKRETARIAT DPRD	29.237.222.541,00	32.592.765.708,00	32.283.509.393,00
21	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.200.126.876,00	8.798.891.136,00	8.440.990.646,00
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	146.608.901.214,00	150.389.695.155,00	109.785.391.264,00
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.110.912.705,00	6.697.192.560,00	6.470.104.689,00
24	INSPEKTORAT	7.600.975.736,00	8.262.635.152,00	7.619.771.470,00
25	KECAMATAN DUSUN HILIR	3.003.472.615,00	3.074.480.093,00	2.326.380.224,00
26	KECAMATAN DUSUN SELATAN	7.412.369.407,00	6.653.552.068,00	6.412.297.301,00
27	KECAMATAN DUSUN UTARA	3.598.921.097,00	3.834.918.726,00	3.646.074.426,00
28	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	3.320.580.760,00	3.096.753.668,00	2.880.095.439,00
29	KECAMATAN JENAMAS	3.156.453.951,00	3.297.674.039,00	3.136.056.633,00
30	KECAMATAN KARAU KUALA	3.397.171.253,00	3.448.789.032,00	3.217.208.511,00
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.463.493.518,00	6.844.555.141,00	6.803.109.487,00
TOTAL		**1.019.710.164.746,00**	**1.093.726.652.807,00**	**978.131.426.694,11**

Sumber Data : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2022

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/kota mencakup Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota. Evaluasi hasil RKPD memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran.

Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2022. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana kegiatan dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; realisasi penyerapan dana program; dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 terdiri dari 176 program, 464 kegiatan dan 1196 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah. Secara terperinci evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 pada tabel berikut :

Tabel 2. 86
Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2022
Keadaan s/d TW IV 2022

Kabupaten : Barito Selatan — **FORMULIR (5)**

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K		
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*11*			*12*			*13*			*14 = 7 +13*			*15 = 14 / 6 x100%*			*16*
1							**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																																		
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																	**DINAS PENDIDIKAN**
		1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																																
		1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																
		1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		60	Bulan	404.547.000	48	Bulan	323.637.600	12	Bulan	80.909.400	3	Bulan	30.888.400												3	Bulan	30.888.400	51	Bulan	354.526.000	85	%	87,64	
		1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60	Bulan	199.672.500	48	Bulan	159.738.000	12	Bulan	39.934.500	3	Bulan	20.000.000												3	Bulan	20.000.000	51	Bulan	179.738.000	85	%	90,02	
		1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																
		1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		60	Bulan	1.052.598.529.633	48	Bulan	769.303.398.803	12	Bulan	198.294.131.642	3	Bulan	29.717.956.217												3	Bulan	29.717.956.217	51	Bulan	799.021.355.020	85	%	75,91	
		1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																																
		1	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		60	Bulan	2.094.365.000	48	Bulan	1.675.492.000	12	Bulan	418.873.000	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	1.675.492.000	85	%	80,00	
		1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																
		1	01	01	2.03	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		60	Bulan	1.051.740.000	48	Bulan	841.392.000	12	Bulan	210.348.000	3	Bulan	3.268.000												3	Bulan	3.268.000	51	Bulan	844.660.000	85	%	80,31	
		1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																
		1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		60	Bulan	100.865.000	48	Bulan	80.692.000	12	Bulan	20.173.000	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	80.692.000	85	%	80,00	
		1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60	Bulan	999.455.000	48	Bulan	799.564.000	12	Bulan	199.891.000	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	799.564.000	85	%	80,00	
		1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		60	Bulan	156.249.600	48	Bulan	124.999.680	12	Bulan	31.249.920	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	124.999.680	85	%	80,00	
		1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		60	Bulan	250.000.000	48	Bulan	200.000.000	12	Bulan	50.000.000	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	200.000.000	85	%	80,00	
		1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60	Bulan	2.192.700.000	48	Bulan	1.754.160.000	12	Bulan	438.540.000	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	1.754.160.000	85	%	80,00	
		1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		60	Bulan	149.920.000	48	Bulan	119.936.000	12	Bulan	29.984.000	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	119.936.000	85	%	80,00	
		1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																
		1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5	Paket	1.242.112.250		Paket	993.689.800	1	Paket	248.422.450			-														-			993.689.800	0		80,00	
		1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																
		1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		60	Bulan	49.980.000	48	Bulan	39.984.000	12	Bulan	9.996.000	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	39.984.000	85	%	80,00	
		1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60	Bulan	1.250.336.600	48	Bulan	1.000.269.280	12	Bulan	250.067.320	3	Bulan	20.798.000												3	Bulan	20.798.000	51	Bulan	1.021.067.280	85	%	81,66	
		1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		60	Bulan	7.404.600.000	48	Bulan	5.923.680.000	12	Bulan	1.480.920.000	3	Bulan	144.700.000												3	Bulan	144.700.000	51	Bulan	6.068.380.000	85	%	81,95	
		1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																
		1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		60	Bulan	130.772.500	48	Bulan	104.618.000	12	Bulan	26.154.500	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	104.618.000	85	%	80,00	
		1	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		60	Bulan	19.085.000	48	Bulan	15.268.000	12	Bulan	3.817.000	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	15.268.000	85	%	80,00	
		1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		60	Bulan	100.000.000	48	Bulan	80.000.000	12	Bulan	20.000.000	3	Bulan	-												3	Bulan	-	51	Bulan	80.000.000	85	%	80,00	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		60	Bulan	216.487.500	48	Bulan	173.190.000	12	Bulan	43.297.500	3	Bulan	-										3	Bulan	-	51	Bulan	173.190.000	85	%	80,00	
		1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**																																	
		1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**																																	
		1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		5	Paket	7.500.000.000	4	Paket	6.000.000.000	1	Paket	1.500.000.000			-											-			6.000.000.000	0		80,00	
		1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		20	Ruang	4.458.720.000	16	Ruang	3.566.976.000	4	Ruang	891.744.000			-											-			3.566.976.000	0		80,00	
		1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		20	Ruang	4.400.000.000	16	Ruang	3.520.000.000	4	Ruang	880.000.000			-											-			3.520.000.000	0		80,00	
		1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		110	Ruang/Unit	20.570.215.000	88	Ruang/Unit	16.456.172.000	22	Ruang/Unit	4.114.043.000			-											-			16.456.172.000	0		80,00	
		1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		75	Ruang	11.020.020.000	60	Ruang	8.816.016.000	15	Ruang	2.204.004.000			-											-			8.816.016.000	0		80,00	
		1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		45	Ruang	3.488.305.000	36	Ruang	2.790.644.000	9	Ruang	697.661.000			-											-			2.790.644.000	0		80,00	
		1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		10	Ruang	1.276.730.000	8	Ruang	1.021.384.000	2	Ruang	255.346.000			-											-			1.021.384.000	0		80,00	
		1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		5	Paket	32.475.000.000	4	Paket	25.980.000.000	1	Paket	6.495.000.000			-											-			25.980.000.000	0		80,00	
		1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		2.500	Siswa	1.088.499.700	2.000	Siswa	870.799.760	500	Siswa	217.699.940			-											-			870.799.760	0		80,00	
		1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		60	Bulan	2.701.904.800	48	Bulan	2.161.523.840	12	Bulan	540.380.960	3	Bulan	-										3	Bulan	-	51	Bulan	2.161.523.840	85	%	80,00	
		1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		20	Kegiatan	249.998.200	16	Kegiatan	199.998.560	4	Kegiatan	49.999.640			-											-			199.998.560	0		80,00	
		1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		3.150	Guru	11.461.448.500	2.520	Guru	9.169.158.800	630	Guru	2.292.289.700			-											-			9.169.158.800	0		80,00	
		1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		6.590	Orang	1.611.392.250	5.272	Orang	1.289.113.800	1.318	Orang	322.278.450			-											-			1.289.113.800	0		80,00	
		1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		810	Sekolah	66.794.070.000	648	Sekolah	53.435.256.000	162	Sekolah	13.358.814.000			-											-			53.435.256.000	0		80,00	
		1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		60	Bulan	249.999.800	48	Bulan	199.999.840	12	Bulan	49.999.960	3	Bulan	-										3	Bulan	-	51	Bulan	199.999.840	85	%	80,00	
		1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**																																	
		1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		50	Ruang	9.500.000.000	40	Ruang	7.600.000.000	10	Ruang	1.900.000.000			-											-			7.600.000.000	0		80,00	
		1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		5	Paket	1.500.000.000	4	Paket	1.200.000.000	1	Paket	300.000.000			-											-			1.200.000.000	0		80,00	
		1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		5	Paket	1.600.000.000	4	Paket	1.280.000.000	1	Paket	320.000.000			-											-			1.280.000.000	0		80,00	
		1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		5	Paket	1.750.000.000	4	Paket	1.400.000.000	1	Paket	350.000.000			-											-			1.400.000.000	0		80,00	
		1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		120	Unit/Ruang	49.194.880.000	96	Unit/Ruang	39.355.904.000	24	Unit/Ruang	9.838.976.000			-											-			39.355.904.000	0		80,00	
		1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		60	Bulan	1.615.475.000	48	Bulan	1.292.380.000	12	Bulan	323.095.000	3	Bulan	16.404.940										3	Bulan	16.404.940	51	Bulan	1.308.784.940	85	%	81,02	
		1	01	02	2.02	34	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		40	Paket	1.026.200.000	32	Paket	820.960.000	8	Paket	205.240.000			-											-			820.960.000	0		80,00	
		1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		60	Bulan	249.985.000	48	Bulan	199.988.000	12	Bulan	49.997.000	3	Bulan	-										3	Bulan	-	51	Bulan	199.988.000	85	%	80,00	
		1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		-	Orang	824.525.000	-	Orang	659.620.000	-	Orang	164.905.000			-											-			659.620.000	#DIV/0!		80,00	
		1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.955	Orang	7.041.270.000	1.564	Orang	5.633.016.000	391	Orang	1.408.254.000			-											-			5.633.016.000	0		80,00	
		1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		25	Kegiatan	482.488.900	20	Kegiatan	385.991.120	5	Kegiatan	96.497.780			-											-			385.991.120	0		80,00	
		1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		60	Bulan	1.345.057.000	48	Bulan	1.076.045.600	12	Bulan	269.011.400	3	Bulan	63.636.000										3	Bulan	63.636.000	51	Bulan	1.139.681.600	85	%	84,73	
		1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		310	Sekolah	32.029.830.000	248	Sekolah	25.623.864.000	62	Sekolah	6.405.966.000			-											-			25.623.864.000	0		80,00	
		1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		60	Bulan	424.955.000	48	Bulan	339.964.000	12	Bulan	84.991.000	3	Bulan	-										3	Bulan	-	51	Bulan	339.964.000	85	%	80,00	
		1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**																																	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		35	Ruang	2.751.565.000	28	Ruang	2.201.252.000	7	Ruang	550.313.000			-												-			2.201.252.000	0		80,00	
		1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		90	Ruang	11.281.905.000	72	Ruang	9.025.524.000	18	Ruang	2.256.381.000			-												-			9.025.524.000	0		80,00	
		1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		75	Paket	2.163.265.000	60	Paket	1.730.612.000	15	Paket	432.653.000			-												-			1.730.612.000	0		80,00	
		1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		5	Kegiatan	74.950.000	4	Kegiatan	59.960.000	1	Kegiatan	14.990.000			-												-			59.960.000	0		80,00	
		1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		3.030	Orang	10.916.000.000	2.424	Orang	8.732.800.000	606	Orang	2.183.200.000			1.600.000												1.600.000			8.734.400.000	0		80,01	
		1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		15	Kegiatan	585.250.000	12	Kegiatan	468.200.000	3	Kegiatan	117.050.000			3.275.000												3.275.000			471.475.000	0		80,56	
		1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		-	0	857.695.000	-	0	686.156.000	-	0	171.539.000			19.148.000												19.148.000			705.304.000	#DIV/0!		82,23	
		1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		60	Bulan	10.361.400.000	48	Bulan	8.289.120.000	12	Bulan	2.072.280.000	3	Bulan	-										3	Bulan	-	51	Bulan	8.289.120.000	85	%	80,00	
		1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**																																	
		1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		20	Lembaga	150.000.000	16	Lembaga	120.000.000	4	Lembaga	30.000.000			-												-			120.000.000	0		80,00	
		1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		60	Bulan	195.000.000	48	Bulan	156.000.000	12	Bulan	39.000.000	3	Bulan	-										3	Bulan	-	51	Bulan	156.000.000	85	%	80,00	
		1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		60	Bulan	5.969.850.000	48	Bulan	4.775.880.000	12	Bulan	1.193.970.000	3	Bulan	-										3	Bulan	-	51	Bulan	4.775.880.000	85	%	80,00	
		1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**																																	
		1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**																																	
		1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		60	Bulan	125.000.000	48	Bulan	100.000.000	12	Bulan	25.000.000	3	Bulan	-										3	Bulan	-	51	Bulan	100.000.000	85	%	80,00	
		1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**																																	
		1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**																																	
		1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		60	Bulan	299.649.500	48	Bulan	239.719.600	12	Bulan	59.929.900	3	Bulan	-										3	Bulan	-	51	Bulan	239.719.600	85	%	80,00	
							TOTAL				**1.394.273.916.233**			**1.042.643.708.083**			**266.629.208.962**			**30.041.674.557**												**30.041.674.557**			**1.072.685.382.640**				
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																																**DINAS KESEHATAN**
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	358.210.330	4	Dokumen	261.396.258	1	Dokumen	179.105.165	0,27178	Dokumen	48.677.000	0,00	Dokumen	-	0,09122	Dokumen	16.338.000	0,632	Dokumen	113.154.000	0,99477	Dokumen	178.169.000	4,9947731	Dokumen	439.565.258	99,8955	Dokumen	122,71	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV										
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	179.964.000	12	Laporan	132.460.000	3	Laporan	89.982.000	0	Laporan		0,28	Laporan	25.177.600	0,18895	Laporan	17.002.200	3	Laporan	38.348.400	3,47	Laporan	80.528.200	15,468758	Laporan	212.988.200	103,125	Laporan	118,35	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	130.000.000	4	Laporan	133.544.694	1	Laporan	65.000.000	0	Laporan		0,44	Laporan	28.835.800	0,42246	Laporan	27.460.000	1	Laporan	4.500.000	1,87	Laporan	60.795.800	5,8660892	Laporan	194.340.494	117,322	Laporan	149,49	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0		-			0								-			-			-										
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3315	Orang/Bulan	133.039.483.108	2652	Orang/Bulan	105.324.928.468	663	Orang/Bulan	66.642.378.180	663	Orang/Bulan	7.592.586.150	663,00	Orang/Bulan	10.456.309.409	663	Orang/Bulan	28.926.126.496	663	Orang/Bulan	12.852.553.676	2652	Orang/ Bulan	59.827.575.731	5304	Orang/ Bulan	165.152.504.199	160	Orang/Bulan	124,14	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	20.781.120.000	4	Dokumen	20.129.897.418	1	Dokumen	10.671.746.667	0,15387	Dokumen	1.642.080.000	0,32	Dokumen	3.417.476.667	0,19497	Dokumen	2.080.720.000	1	Dokumen	3.395.692.600	1,67	Dokumen	10.535.969.267	5,6690823	Dokumen	30.665.866.685	113,382	Dokumen	147,57	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	99.748.000	4	Dokumen	93.919.100	1	Dokumen	49.874.000	0	Dokumen		0,40	Dokumen	20.000.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	29.824.000	1,40	Dokumen	49.824.000	5,4010105	Dokumen	143.743.100	108,02	Dokumen	144,11	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dokumen	59.983.000	4	Dokumen	496.868.000	1	Dokumen	29.991.500	0	Dokumen		0,50	Dokumen	15.000.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	13.353.500	1,50	Dokumen	28.353.500	5,5001417	Dokumen	525.221.500	110,003	Dokumen	875,62	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	105.398.000	4	Dokumen	70.778.698	1	Dokumen	52.999.284	0	Dokumen		0,57	Dokumen	30.000.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	22.948.887	1,57	Dokumen	52.948.887	5,5660454	Dokumen	123.727.585	111,321	Dokumen	117,39	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0		-														-			-										
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	149.999.840	4	Laporan	169.828.000	1	Laporan	74.999.920	0	Laporan		0,64	Laporan	48.289.900	0	Laporan	-	1	Laporan	26.705.200	1,64	Laporan	74.995.100	5,643866	Laporan	244.823.100	112,877	Laporan	163,22	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0		-														-			-										
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dokumen	89.966.000	4	Dokumen	103.712.000	1	Dokumen	44.983.000	0,52907	Dokumen	23.799.200	0,20	Dokumen	9.221.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	11.925.000	1,73	Dokumen	44.945.200	5,7340595	Dokumen	148.657.200	114,681	Dokumen	165,24	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	50.640.000	16	Orang	48.000.000	4	Orang	25.320.000	0	Orang		0,00	Orang	-	0	Orang	-	4	Orang	24.820.000	4	Orang	24.820.000	20	Orang	72.820.000	100	Orang	143,80	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0		-			0											-			-										
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	13.912.800	4	Paket	13.910.400	1	Paket	6.956.400	0	Paket		0,36	Paket	2.500.000	0	Paket	-	1	Paket	4.456.400	1,36	Paket	6.956.400	5,3593813	Paket	20.866.800	107,188	Paket	149,98	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	139.936.800	4	Paket	60.000.000	1	Paket	69.968.400	0,70672	Paket	49.448.100	0,00	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	20.410.500	1,70672	Paket	69.858.600	5,7067205	Paket	129.858.600	114,134	Paket	92,80	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	59.998.000	4	Paket	60.000.000	1	Paket	29.999.000	0,46368	Paket	13.910.000	0,00	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	16.089.000	1,46368	Paket	29.999.000	5,4636821	Paket	89.999.000	109,274	Paket	150,00	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	Dokumen	9.996.000	40	Dokumen	9.200.000	10	Dokumen	4.998.000	0,36014	Dokumen	1.800.000	0,00	Dokumen	-	0	Dokumen	-	10	Dokumen	2.950.000	10,3601	Dokumen	4.750.000	50,360144	Dokumen	13.950.000	100,72	Dokumen	139,56	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	59.980.000	48	Laporan	40.000.000	12	Laporan	29.990.000	0,24258	Laporan	7.275.000	0,00	Laporan	-	0	Laporan	-	12	Laporan	22.688.000	12,2426	Laporan	29.963.000	60,242581	Laporan	69.963.000	100,404	Laporan	116,64	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	Laporan	481.488.000	100	Laporan	0	25	Laporan	240.744.000	0,11334	Laporan	27.285.000	0,30	Laporan	72.816.600	0	Laporan	-	25	Laporan	140.641.408	25,42	Laporan	240.743.008	125,4158	Laporan	240.743.008	100,333	Laporan	50,00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		-			0												-			-										
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	11.904.000	4	Laporan	11.760.000	1	Laporan	5.952.000	0,39516	Laporan	2.352.000	0,00	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	3.600.000	1,39516	Laporan	5.952.000	5,3951613	Laporan	17.712.000	107,903	Laporan	148,79	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	589.997.154	48	Laporan	411.034.424	12	Laporan	224.027.626	0,19318	Laporan	43.278.336	0,08	Laporan	17.119.667	0	Laporan	-	12	Laporan	122.425.760	12,27	Laporan	182.823.763	60,269601	Laporan	593.858.187	100,449	Laporan	100,65	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Paket	12.000.000	4	Paket	-	1	Paket	11.440.000	0,35402	Paket	4.050.000	0,00	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	7.390.000	1,35402	Paket	11.440.000	5,354021	Paket	11.440.000	107,08	Paket	95,33	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		-			0												-			-										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	20.000.000	4	Unit	19.992.000	1	Unit	10.000.000	0	Unit		1,00	Unit	10.000.000	0	Unit	-	1	Unit	(20.000)	2	Unit	9.980.000	6	Unit	29.972.000	120	Unit	149,86	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	Unit	40.032.000	96	Unit	0	24	Unit	31.373.334	0	Unit		6,00	Unit	5.000.000	0	Unit	-	24	Unit	24.724.000	30	Unit	29.724.000	126	Unit	29.724.000	105	Unit	74,25	
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	1	Unit	30.000.000		Unit				30.000.000										1	Unit	30.000.000	1	Unit	30.000.000	1	Unit	30.000.000	100	Unit	100,00	
			Peningkatan Pelayanan BLUD		0		-			0												-			-										
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	10	Unit Kerja	74.700.558.920	8	Unit Kerja	70.633.631.733	2	Unit Kerja	37.350.279.460	2	Unit Kerja	14.477.335.605	2,00	Unit Kerja	15.635.988.061	0,04417	Unit Kerja	1.649.867.741	2	Unit Kerja	5.385.890.960	6,04417	Unit Kerja	37.149.082.367	14,044173	Unit Kerja	107.782.714.100	140,442	Unit Kerja	144,29	
					0																-			-										
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		0																-			-										
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0																-			-										
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5	Unit	6.119.232.000	4	Unit	29.445.811.812	1	Unit	6.059.616.000	0	Unit		0,00	Unit	-	0,19879	Unit	1.204.617.210	1	Unit	4.013.916.648	1,19879	Unit	5.218.533.858	5,1987943	Unit	34.664.345.670	103,976	Unit	566,48	
			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	25	Unit	13.558.102.101	20	Unit	20.074.819.588	5	Unit	10.786.957.000	0	Unit		0,00	Unit	-	0,18924	Unit	2.041.325.250	5	Unit	8.449.329.750	5,18924	Unit	10.490.655.000	25,18924	Unit	30.565.474.588	100,757	Unit	225,44	
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5	Unit	935.999.500	4	Unit	77.520.000	1	Unit	467.999.750	0	Unit		0,00	Unit	2.000.000	0,35053	Unit	164.048.000	1	Unit	289.631.500	1,35	Unit	455.679.500	5,3548036	Unit	533.199.500	107,096	Unit	56,97	
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Tenaga PPDS yang Di Sediakan	20	Orang	7.459.997.620	16	Orang	88.209.000	4	Orang	3.729.998.810	3	Orang		3,00	Orang	620.613.962	3	Orang	-	4	Orang	924.681.552	13	Orang	1.545.295.514	29	Orang	1.633.504.514	145	Orang	21,90	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana yang direhab	4	Unit	1.209.236.000						1.209.236.000										4	Unit	1.207.503.682	4,00	Unit	1.207.503.682	4	Unit	1.207.503.682	100	Unit	99,86	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5	Unit	7.606.000.000	4	Unit	568.472.000	1	Unit	3.803.000.000	0	Unit		0,00	Unit	-	0	Unit	-	1	Unit	3.654.109.957	1	Unit	3.654.109.957	5	Unit	4.222.581.957	100	Unit	55,52	
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5	Unit	2.292.960.000	4	Unit	64.049.856	1	Unit	1.146.480.000	0	Unit		0,00	Unit	-	0	Unit	-	1	Unit	1.107.365.600	1	Unit	1.107.365.600	5	Unit	1.171.415.456	100	Unit	51,09	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30	Unit	1.716.502.000	24	Unit	2.000.000.000	6	Unit	858.251.000	0	Unit		0,00	Unit	-	0	Unit	-	6	Unit	858.184.000	6	Unit	858.184.000	30	Unit	2.858.184.000	100	Unit	166,51	
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat, BMHP dan Vaksin yang Disediakan	5	Paket	6.123.872.000	4	Paket	4.729.217.456	1	Paket	3.061.936.000	0	Paket		0,00	Paket	-	0,10859	Paket	332.500.500	1	Paket	2.374.455.122	1,10859	Paket	2.706.955.622	5,1085916	Paket	7.436.173.078	102,172	Paket	121,43	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0		-														-			-										
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11955	Orang	129.986.400	9564	Orang	1.440.974.500	2391	Orang	64.993.200	0	Orang		597,75	Orang	5.012.000	0	Orang	7.101.600	2391	Orang	51.693.241	2988,75	Orang	63.806.841	12552,75	Orang	1.504.781.341	105	Orang	1157,65	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11415	Orang	517.490.000	9132	Orang	2.571.952.850	2283	Orang	258.745.000	0	Orang		570,75	Orang	116.600.000	0	Orang	-	1704	Orang	76.450.000	2274,75	Orang	193.050.000	11406,75	Orang	2.765.002.850	99,9277	Orang	534,31	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55670	Orang	134.815.200	44536	Orang	90.486.000	11134	Orang	67.407.600	0,2349	Orang	15.833.900	2783,50	Orang	8.191.100	0,05872	Orang	3.415.700	11134	Orang	39.906.900	13917,8	Orang	67.347.600	58453,794	Orang	157.833.600	105,001	Orang	117,07	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13260	Orang	79.916.000	10608	Orang	197.400.000	2652	Orang	60.146.000	0	Orang		663,00	Orang	10.396.000	0	Orang	4.296.000	2287	Orang	37.187.000	2950	Orang	51.879.000	13558	Orang	249.279.000	102,247	Orang	311,93	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63200	Orang	50.000.000	50560	Orang	46.452.000	12640	Orang	25.000.000	0,8332	Orang	20.830.000	3160,00	Orang	-	0,2083	Orang	-	12640	Orang	4.166.000	15801	Orang	24.996.000	66361,042	Orang	71.448.000	105,002	Orang	142,90	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2285	Orang	39.921.480	1828	Orang	266.120.000	457	Orang	19.960.740	0,63775	Orang	12.730.000	114,25	Orang	-	0,15944	Orang	-	457	Orang	7.158.740	572,047	Orang	19.888.740	2400,0472	Orang	286.008.740	105,035	Orang	716,43	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16630	Orang	130.346.880	13304	Orang	92.343.078	3326	Orang	65.173.440	0	Orang		831,50	Orang	26.167.440	0	Orang	784.000	2236	Orang	33.426.957	3067,5	Orang	60.378.397	16371,5	Orang	152.721.475	98,4456	Orang	117,17	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	5	Dokumen	167.757.980	4	Dokumen	3.312.707.944	1	Dokumen	83.878.990	0,04922	Dokumen	4.128.340	0,12	Dokumen	10.309.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	67.113.000	1,17	Dokumen	81.550.340	5,1721211	Dokumen	3.394.258.284	103,442	Dokumen	2023,31	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	Dokumen	5.172.848.810	4	Dokumen	4.473.641.864	1	Dokumen	3.543.118.000	0,01373	Dokumen	48.644.000	0,08	Dokumen	288.059.863	0,10626	Dokumen	376.506.250	1	Dokumen	1.384.983.300	1,20	Dokumen	2.098.193.413	5,2012945	Dokumen	6.571.835.277	104,026	Dokumen	127,04	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dokumen	570.000.000	4	Dokumen	1.173.131.000	1	Dokumen	370.000.000	0,1079	Dokumen	39.923.000	0,16	Dokumen	60.563.000	-0,10938	Dokumen	(40.470.000)	1	Dokumen	277.590.000	1,16	Dokumen	337.606.000	5,1622054	Dokumen	1.510.737.000	103,244	Dokumen	265,04	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	Dokumen	90.000.000	4	Dokumen	1.108.011.800	1	Dokumen	45.000.000	0,43711	Dokumen	19.670.000	0,00	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	19.700.000	1,43711	Dokumen	39.370.000	5,4371111	Dokumen	1.147.381.800	108,742	Dokumen	1274,87	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dokumen	80.088.000	4	Dokumen	155.423.188	1	Dokumen	40.044.000	0,24558	Dokumen	9.834.000	0,44	Dokumen	17.474.000	-0,24558	Dokumen	(9.834.000)	1	Dokumen	21.360.465	1,44	Dokumen	38.834.465	5,43637	Dokumen	194.257.653	108,727	Dokumen	242,56	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25	Orang	89.999.200	20	Orang	75.370.050	5	Orang	44.999.600	0	Orang		1,00	Orang	18.920.000	0	Orang	-	5	Orang	22.999.600	6	Orang	41.919.600	26	Orang	117.289.650	104	Orang	130,32	
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5	Dokumen	70.000.000	4	Dokumen	69.912.800	1	Dokumen	35.000.000	0,26571	Dokumen	9.299.845	0,47	Dokumen	16.507.397	0	Dokumen	-	1	Dokumen	9.131.200	1,74	Dokumen	34.938.442	5,7373498	Dokumen	104.851.242	114,747	Dokumen	149,79	
			Pengelolaan Upaya Penguranagan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Penguranagan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	5	Dokumen	8.828.618.000	4	Dokumen	1.707.474.318	1	Dokumen	4.414.309.000	0	Dokumen		0,16	Dokumen	694.643.250	0,1353	Dokumen	597.244.500	1	Dokumen	1.170.969.000	1,29	Dokumen	2.462.856.750	5,2926591	Dokumen	4.170.331.068	105,853	Dokumen	47,24	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	Dokumen	355.321.900	4	Dokumen	3.410.023.046	1	Dokumen	177.660.950	0	Dokumen		0,42	Dokumen	75.337.050	0	Dokumen	-	1	Dokumen	91.554.847	1,42	Dokumen	166.891.897	5,4240496	Dokumen	3.576.914.943	108,481	Dokumen	1006,67	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5	Dokumen	10.039.830.000	4	Dokumen	20.915.753.400	1	Dokumen	10.019.915.000	0,15267	Dokumen	1.529.696.600	0,11	Dokumen	1.108.371.600	0,10738	Dokumen	1.075.975.900	1	Dokumen	1.582.231.800	1,37	Dokumen	5.296.275.900	5,3706662	Dokumen	26.212.029.300	107,413	Dokumen	261,08	
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5	Dokumen	4.358.190.340	4	Dokumen	158.198.000	1	Dokumen	2.178.995.170	0,04356	Dokumen	94.926.000	0,07	Dokumen	154.819.040	0,12023	Dokumen	261.980.350	1	Dokumen	1.089.182.750	1,23	Dokumen	1.600.908.140	5,2348447	Dokumen	1.759.106.140	104,697	Dokumen	40,36	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5	Dokumen	23.123.946.130	4	Dokumen	11.975.601.942	1	Dokumen	10.547.258.297	0	Dokumen		0,13	Dokumen	1.359.081.094	0,01385	Dokumen	146.060.106	1	Dokumen	5.039.934.295	1,14	Dokumen	6.545.075.495	5,1427045	Dokumen	18.520.677.437	102,854	Dokumen	80,09	
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Dokumen	669.999.592	4	Dokumen	0	1	Dokumen	334.999.796	0	Dokumen		0,10	Dokumen	35.000.000	-0,02144	Dokumen	(7.182.136)	1	Dokumen	281.499.182	1,08	Dokumen	309.317.046	5,0830385	Dokumen	309.317.046	101,661	Dokumen	46,17	
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15	Unit	1.623.280.000	12	Unit	202.750.000	3	Unit	811.640.000	0	Unit	19.947.400	0,00	Unit	-	0	Unit	-	0	Puskesmas	-	0	Unit	19.947.400	12	Unit	222.697.400	80	Unit	13,72	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		0																	-			-											
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	15	Unit	40.000.000	12	Unit	132.608.000	3	Unit	20.000.000	0	Unit		1,00	Unit	2.952.000	0	Unit	-	3	Unit	17.047.400	4	Unit	19.999.400	16	Unit	152.607.400	106,667	Unit	381,52	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	15	Unit	1.769.500.000	12	Unit	2.515.832.340	3	Unit	952.771.172	0	Unit	10.012.000	1,00	Unit	37.071.800	0	Unit	-	3	Unit	829.064.900	4	Unit	876.148.700	16	Unit	3.391.981.040	106,667	Unit	191,69	
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	15	Unit	50.000.000	12	Unit	54.090.400	3	Unit	25.000.000	3	Unit	24.997.800	3,00	Unit	-	3	Unit	-	3	Unit	-	12	Unit	24.997.800	24	Unit	79.088.200	160	Unit	158,18	
					0															-			-											
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		0															-			-											
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		0															-			-											
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	240	Orang	2.474.000.000	192	Orang	2.438.137.378	48	Orang	1.237.000.000	48	Orang	206.684.200	48,00	Orang	410.643.000	48	Orang	203.374.000	48	Orang	412.273.600	192	Orang	1.232.974.800	384	Orang	3.671.112.178	160	Orang	148,39	
					0															-			-											
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		0															-			-											
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		0															-			-											

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I			II			III			IV																		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 8 x100%			16
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5	Dokumen	39.999.520	4	Dokumen	57.144.000	1	Dokumen	19.999.760	0	Dokumen		0,00	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	13.671.760	1	Dokumen	13.671.760	5	Dokumen	70.815.760	100	Dokumen	177,04	
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		0		-			0								-	#DIV/0!		-			-										
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5	Dokumen	375.969.720	4	Dokumen	246.134.000	1	Dokumen	187.984.860	0	Dokumen		0,00	Dokumen	-	0,27057	Dokumen	50.863.000	1	Dokumen	31.668.000	1,27057	Dokumen	82.531.000	5,2705697	Dokumen	328.665.000	105,411	Dokumen	87,42	
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		0															-			-										
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	75	Unit	271.221.680	60	Unit	90.727.600	15	Unit	135.610.840	0	Unit		0,00	Unit	-	0,10363	Unit	14.053.840	15	Unit	78.674.000	15,1036	Unit	92.727.840	75,103634	Unit	183.455.440	100,138	Unit	67,64	
					0															-			-										
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		0															-			-										
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0															-			-										
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	Dokumen	246.560.000	4	Dokumen	139.762.000	1	Dokumen	158.092.000	0	Dokumen		0,00	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	128.625.468	1	Dokumen	128.625.468	5	Dokumen	268.387.468	100	Dokumen	108,85	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0															-			-										
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5	Dokumen	120.000.000	4	Dokumen	114.034.000	1	Dokumen	60.000.000	0,09373	Dokumen	5.624.000	0,16	Dokumen	9.744.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	41.652.000	1,26	Dokumen	57.020.000	5,2561333	Dokumen	171.054.000	105,123	Dokumen	142,55	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0															-			-										
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	Dokumen	80.036.740	4	Dokumen	39.808.000	1	Dokumen	40.018.370	0,24884	Dokumen	9.958.000	0,02	Dokumen	703.120	0	Dokumen	-	1	Dokumen	28.231.250	1,27	Dokumen	38.892.370	5,2664057	Dokumen	78.700.370	105,328	Dokumen	98,33	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV											
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
					178.850		340.025.860.745	143.076		314.544.966.403	35.769		183.140.304.281	726		26.016.615.476			34.882.914.420			39.144.174.507			58.083.395.757			158.127.100.160			472.672.066.563	0,00		139,0	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						**34.112.484.436,00**			**11.321.111.561,00**			**2.022.683.891,00**			**3.013.206.511**			**2.934.579.709**			3.026.111.187			**10.996.581.298**			**45.109.065.734,00**				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**153.493.500,00**			**280.000.000,00**			**56.072.500,00**			**49.106.600**			**48.794.200**			7.110.000			**161.083.300**			**314.576.800,00**				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Tahun	900.000.000,00	1	Tahun	98.493.500,00	1	Tahun	180.000.000		Tahun	33.682.500,00		Tahun	12.106.600		Tahun	27.544.200	1	Tahun	-	1,0	Tahun	73.333.300	1	Tahun	171.826.800,00	1	Tahun		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reasilisasi Kinerja SKPD	1	Tahun	344.063.500,00	1	Tahun	55.000.000,00	1	Tahun	50.000.000		Tahun	13.390.000,00		Tahun	28.000.000		Tahun	5.000.000	1	Tahun	3.610.000	1,0	Tahun	50.000.000	1	Tahun	105.000.000,00	1	Tahun	30,52	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Tahun	250.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	50.000.000		Tahun	9.000.000,00		Tahun	9.000.000		Tahun	16.250.000	1	Tahun	3.500.000	1,0	Tahun	37.750.000	1	Tahun	37.750.000,00	1	Tahun		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						**7.365.331.789,00**			**7.876.835.439,00**			**1.241.837.053,00**			**2.420.429.117**			**2.134.738.415**			1.989.036.216			**7.786.040.801**			**15.151.372.590,00**				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	4.326.708.320,00	1	Tahun	7.201.386.789,00	1	Tahun	7.271.335.439,00		Tahun	1.095.194.553,00		Tahun	2.271.358.417		Tahun	2.025.242.315	1	Tahun	1.805.495.316	1,0	Tahun	7.197.290.601	1	Tahun	14.398.677.390,00	1	Tahun	332,79	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Tahun	2.298.250.000,00	1	Tahun	103.946.000,00	1	Tahun	459.650.000,00		Tahun	130.582.500,00		Tahun	101.314.700		Tahun	97.596.100	1	Tahun	122.506.900	1,0	Tahun	452.000.200	1	Tahun	555.946.200,00	1	Tahun		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Tahun	729.250.000,00	1	Tahun	59.999.000,00	1	Tahun	145.850.000,00		Tahun	16.060.000,00		Tahun	47.756.000		Tahun	11.900.000	1	Tahun	61.034.000	1,0	Tahun	136.750.000	1	Tahun	196.749.000,00	1	Tahun		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						**62.107.800,00**			**100.000.000,00**			**11.000.000,00**			**44.790.000**			**23.220.000**			20.769.500			**99.779.500**			**161.887.300,00**				
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Tahun	500.000.000,00	1	Tahun	62.107.800,00	1	Tahun	100.000.000,00		Tahun	11.000.000,00		Tahun	44.790.000		Tahun	23.220.000	1	Tahun	20.769.500	1,0	Tahun	99.779.500	1	Tahun	161.887.300,00	1	Tahun		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**8.850.000,00**			**230.000.000,00**			**5.510.000,00**			**-**			**159.970.000**			-			**165.480.000**			**174.330.000,00**				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Tahun	183.012.500,00	1	Tahun	8.850.000,00	1	Tahun			Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	-	1,0	Tahun		1	Tahun	8.850.000,00	1	Tahun	4,84	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Tahun	800.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	160.000.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	159.970.000	1	Tahun	-	1,0	Tahun	159.970.000	1	Tahun	159.970.000,00	1	Tahun		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Tahun	350.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	70.000.000,00		Tahun	5.510.000,00		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	-	1,0	Tahun	5.510.000	1	Tahun	5.510.000,00	1	Tahun		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						**568.424.782,00**			**699.257.048,00**			**121.139.250,00**			**136.151.805**			**146.286.415**			294.801.304			**698.378.774**			**1.266.803.556,00**				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Tahun	100.000.000,00	1	Tahun	14.688.000,00	1	Tahun	20.000.000,00		Tahun	4.209.000,00		Tahun	4.185.800		Tahun	7.304.400	1	Tahun	4.282.400	1,0	Tahun	19.981.600	1	Tahun	34.669.600,00	1	Tahun		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Tahun	350.000.000,00	1	Tahun	59.251.500,00	1	Tahun	70.000.000,00		Tahun	14.898.250,00		Tahun	14.912.250		Tahun	14.788.300	1	Tahun	24.921.700	1,0	Tahun	69.520.500	1	Tahun	128.772.000,00	1	Tahun		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	Tahun	75.000.000,00	1	Tahun	14.090.000,00	1	Tahun	15.000.000,00		Tahun	3.799.000,00		Tahun	3.549.000		Tahun	3.674.000	1	Tahun	3.668.000	1,0	Tahun	14.690.000	1	Tahun	28.780.000,00	1	Tahun		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	Tahun	1.105.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	221.000.000,00		Tahun	43.240.000,00		Tahun	37.880.000		Tahun	61.710.000	1	Tahun	78.170.000	1,0	Tahun	221.000.000	1	Tahun	221.000.000,00	1	Tahun		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Tahun	266.285.240,00	1	Tahun	42.385.750,00	1	Tahun	53.257.048,00		Tahun	10.407.000,00		Tahun	10.950.000		Tahun	10.950.000	1	Tahun	20.950.000	1,0	Tahun	53.257.000	1	Tahun	95.642.750,00	1	Tahun		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Tahun	-	1	Tahun	193.200.000,00	1	Tahun			Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	-	1,0	Tahun		1	Tahun	193.200.000,00	1	Tahun		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Tahun	1.500.000.000,00	1	Tahun	234.809.532,00	1	Tahun	300.000.000,00		Tahun	44.586.000,00		Tahun	64.674.755		Tahun	47.859.715	1	Tahun	142.809.204	1,0	Tahun	299.929.674	1	Tahun	534.739.206,00	1	Tahun		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Tahun	417.268.500,00	1	Tahun	10.000.000,00	1	Tahun	20.000.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	20.000.000	1,0	Tahun	20.000.000	1	Tahun	30.000.000,00	1	Tahun	7,19	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**15.335.466.600,00**						-			-			-			-						15.335.466.600,00				
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Tahun	-	1	Tahun	14.629.850.000,00	1	Tahun			Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	-	1,0	Tahun		1	Tahun	14.629.850.000,00	1	Tahun		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Tahun	-	1	Tahun	705.616.600,00	1	Tahun			Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	-	1,0	Tahun		1	Tahun	705.616.600,00	1	Tahun		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV													
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**1.189.719.065,00**			**1.785.019.074,00**			**564.299.838,00**			**341.454.739**			**303.709.429**			531.231.167			**1.740.695.173**			**2.930.414.238,00**				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1	Tahun	25.000.000,00	1	Tahun	4.049.860,00	1	Tahun	5.000.000,00		Tahun	1.036.000,00		Tahun	1.036.000		Tahun	1.036.000	1	Tahun	1.844.000	1,0	Tahun	4.952.000	1	Tahun	9.001.860,00	1	Tahun		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun	3.353.564.375,00	1	Tahun	378.271.705,00	1	Tahun	670.712.875,00		Tahun	378.381.438,00		Tahun	65.272.439		Tahun	113.041.929	1	Tahun	77.406.168	1,0	Tahun	634.101.974	1	Tahun	1.012.373.679,00	1	Tahun		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Tahun	857.750.000,00	1	Tahun	80.000.000,00	1	Tahun	171.550.000,00		Tahun	29.205.000,00		Tahun	10.452.500		Tahun	2.640.000	1	Tahun	129.252.500	1,0	Tahun	171.550.000	1	Tahun	251.550.000,00	1	Tahun		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Tahun	292.820.000,00	1	Tahun	727.397.500,00	1	Tahun	937.756.199,00		Tahun	155.677.400,00		Tahun	264.693.800		Tahun	186.991.500	1	Tahun	322.728.499	1,0	Tahun	930.091.199	1	Tahun	1.657.488.699,00	1	Tahun	566,04	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**9.121.670.300,00**			**350.000.000,00**			**22.825.250,00**			**21.274.250**			**117.861.250**			183.163.000			**345.123.750**			**9.466.794.050,00**				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Tahun	875.000.000,00	1	Tahun	114.187.300,00	1	Tahun	175.000.000,00		Tahun	22.825.250,00		Tahun	21.274.250		Tahun	37.049.250	1	Tahun	88.975.000	1,0	Tahun	170.123.750	1	Tahun	284.311.050,00	1	Tahun		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1	Tahun	625.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	125.000.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	34.812.000	1	Tahun	90.188.000	1,0	Tahun	125.000.000	1	Tahun	125.000.000,00	1	Tahun		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Tahun	250.000.000,00	1	Tahun	9.007.483.000,00	1	Tahun	50.000.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	46.000.000	1	Tahun	4.000.000	1,0	Tahun	50.000.000	1	Tahun	9.057.483.000,00	1	Tahun		
			Penataan Oroganisasi							**307.420.600,00**			-			-			-			-			-						307.420.600,00				
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Tahun	-	1	Tahun	307.420.600,00	1	Tahun			Tahun			Tahun	-		Tahun		1	Tahun	-	1,0	Tahun		1	Tahun	307.420.600,00	1	Tahun		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							**10.682.707.445,00**			**13.519.741.000,00**			**76.298.600,00**			**2.992.790.431**			**3.431.830.907**			6.250.835.080			**12.751.755.018**			**23.434.462.463,00**				
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							**1.373.433.095,00**			**3.693.300.000,00**			**76.298.600,00**			**1.033.877.750**			**1.275.709.400**			1.298.275.610			**3.684.161.360**			**5.057.594.455,00**				
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Terlaksananya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1	Tahun	366.025.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	199.600.000,00		Tahun	-		Tahun	99.900.000		Tahun	-	1	Tahun	99.700.000	1,0	Tahun	199.600.000	1	Tahun	199.600.000,00	1	Tahun	54,53	
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1	Tahun	3.780.000.000,00	1	Tahun	484.500.000,00	1	Tahun	756.000.000,00		Tahun	-		Tahun	233.863.150		Tahun	-	1	Tahun	522.136.850	1,0	Tahun	756.000.000	1	Tahun	1.240.500.000,00	1	Tahun		
			Normalisasi/ Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	1	Tahun	219.615.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	1.893.500.000,00		Tahun	-		Tahun	535.810.000		Tahun	1.088.250.000	1	Tahun	269.095.000	1,0	Tahun	1.893.155.000	1	Tahun	1.893.155.000,00	1	Tahun	862,03	
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1	Tahun	500.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	100.000.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	100.000.000	1,0	Tahun	100.000.000	1	Tahun	100.000.000,00	1	Tahun		
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Tahun	3.721.000.000,00	1	Tahun	391.671.095,00	1	Tahun	744.200.000,00		Tahun	76.298.600,00		Tahun	164.304.600		Tahun	187.459.400	1	Tahun	307.343.760	1,0	Tahun	735.406.360	1	Tahun	1.127.077.455,00	1	Tahun		
			Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1	Tahun	-	1	Tahun	497.262.000,00	1	Tahun			Tahun			Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun		1,0	Tahun		1	Tahun	497.262.000,00	1	Tahun		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							**9.309.274.350,00**			**9.826.441.000,00**			-			**1.958.912.681**			**2.156.121.507**			4.952.559.470			9.067.593.658			18.376.868.008,00				
			Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Tersedianya Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	1	Tahun	12.957.285.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	9.727.441.000,00		Tahun	-		Tahun	1.958.912.681		Tahun	2.126.421.507	1	Tahun	4.883.259.470	1,0	Tahun	8.968.593.658	1	Tahun	8.968.593.658,00	1	Tahun	69,22	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Tersedianya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1	Tahun	1.473.823.088,00	1	Tahun	8.999.078.950,00	1	Tahun			Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun		1,0	Tahun		1	Tahun	8.999.078.950,00	1	Tahun	610,59	
			Opereasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Tersedianya Opereasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1	Tahun	-	1	Tahun	235.549.400,00	1	Tahun			Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun		1,0	Tahun		1	Tahun	235.549.400,00	1	Tahun		
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1	Tahun	495.000.000,00	1	Tahun	74.646.000,00	1	Tahun	99.000.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	29.700.000	1	Tahun	69.300.000	1,0	Tahun	99.000.000	1	Tahun	173.646.000,00	1	Tahun		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			
					Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							**10.634.240.544,00**			**12.801.274.000,00**			**165.827.600,00**			**2.326.696.250**			**4.071.714.988**			6.115.863.610			**12.680.102.448**			**23.314.342.992,00**				
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten/Kota							**10.634.240.544,00**			**12.801.274.000,00**			**165.827.600,00**			**2.326.696.250**			**4.071.714.988**			6.115.863.610			**12.680.102.448**			**23.314.342.992,00**				
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1	Tahun	5.200.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	1.040.000.000,00		Tahun	92.607.600,00		Tahun	147.257.200		Tahun	126.574.400	1	Tahun	672.015.150	1,0	Tahun	1.038.454.350	1	Tahun	1.038.454.350,00	1	Tahun		
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersedianya Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1	Tahun	5.124.350.000,00	1	Tahun	5.545.406.800,00	1	Tahun			Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun		1,0	Tahun		1	Tahun	5.545.406.800,00	1	Tahun	108,22	
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1	Tahun	1.575.000.000,00	1	Tahun	1.035.000.000,00	1	Tahun	315.000.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	220.500.000	1	Tahun	94.500.000	1,0	Tahun	315.000.000	1	Tahun	1.350.000.000,00	1	Tahun		
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1	Tahun	732.050.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	1.859.600.000,00		Tahun	25.798.000,00		Tahun	36.125.000		Tahun	135.556.000	1	Tahun	1.661.610.000	1,0	Tahun	1.859.089.000	1	Tahun	1.859.089.000,00	1	Tahun	253,96	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	1	Tahun	250.000.000,00	1	Tahun	86.849.894,00	1	Tahun	50.000.000,00		Tahun	47.422.000,00		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	2.190.000	1,0	Tahun	49.612.000	1	Tahun	136.461.894,00	1	Tahun		
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1	Tahun	9.040.817.500,00	1	Tahun	3.966.983.850,00	1	Tahun	9.536.674.000,00		Tahun	-		Tahun	2.143.314.050		Tahun	3.589.084.588	1	Tahun	3.685.548.460	1,0	Tahun	9.417.947.098	1	Tahun	13.384.930.948,00	1	Tahun	148,05	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							-			**700.000.000,00**			-			**150.000.000**			**270.000.000**			280.000.000			700.000.000			700.000.000,00				
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							-			**700.000.000,00**			-			**150.000.000**			**270.000.000**			280.000.000			700.000.000			700.000.000,00				
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Tahun	500.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	100.000.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	100.000.000	1,0	Tahun	100.000.000	1	Tahun	100.000.000,00	1	Tahun		
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1	Tahun	3.000.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	600.000.000,00		Tahun	-		Tahun	150.000.000		Tahun	270.000.000	1	Tahun	180.000.000	1,0	Tahun	600.000.000	1	Tahun	600.000.000,00	1	Tahun		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							**3.053.630.997,00**			**5.517.365.000,00**			-			**1.288.557.000**			**2.392.556.000**			1.832.387.500			5.513.500.500			**8.567.131.497,00**				
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							**3.053.630.997,00**			**5.517.365.000,00**			-			**1.288.557.000**			**2.392.556.000**			1.832.387.500			5.513.500.500			**8.567.131.497,00**				
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Tahun	-	1	Tahun	192.515.997,00	1	Tahun			Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun		1,0	Tahun		1	Tahun	192.515.997,00	1	Tahun		
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1	Tahun	3.806.660.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	5.182.365.000,00		Tahun	-		Tahun	1.233.057.000		Tahun	2.213.056.000	1	Tahun	1.732.388.000	1,0	Tahun	5.178.501.000	1	Tahun	**5.178.501.000,00**	1	Tahun	136,04	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	Tahun	750.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	150.000.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	50.000.000	1	Tahun	99.999.500	1,0	Tahun	149.999.500	1	Tahun	**149.999.500,00**	1	Tahun		
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1	Tahun	17.569.200.000,00	1	Tahun	2.861.115.000,00	1	Tahun	185.000.000,00		Tahun	-		Tahun	55.500.000		Tahun	129.500.000	1	Tahun	-	1,0	Tahun	185.000.000	1	Tahun	3.046.115.000,00	1	Tahun	17,34	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							**50.000.000,00**			**99.900.000,00**			-			-			**94.905.000**			4.995.000			99.900.000			**149.900.000,00**				
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							**50.000.000,00**			**99.900.000,00**			-			-			**94.905.000**			4.995.000			99.900.000			**149.900.000,00**				
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1	Tahun	1.143.334.870,00	1	Tahun	50.000.000,00	1	Tahun	99.900.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	94.905.000	1	Tahun	4.995.000	1,0	Tahun	99.900.000	1	Tahun	149.900.000,00	1	Tahun	13,11	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			
					Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							**12.258.120.000,00**			**6.103.967.000,00**			**-**			**-**			**1.180.975.000**			4.922.425.000			6.103.400.000			**18.361.520.000,00**			
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							**12.258.120.000,00**			**6.103.967.000,00**			**-**			**-**			**1.180.975.000**			4.922.425.000			6.103.400.000			**18.361.520.000,00**			
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Tahun	30.519.835.000,00	1	Tahun	6.434.804.000,00	1	Tahun	6.103.967.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	1.180.975.000	1	Tahun	4.922.425.000	1,0	Tahun	6.103.400.000	1	Tahun	12.538.204.000,00	1	Tahun			
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Tahun	-	1	Tahun	5.395.054.500,00	1	Tahun			Tahun			Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun		1,0	Tahun		1	Tahun	5.395.054.500,00	1	Tahun			
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Tahun	-	1	Tahun	428.261.500,00	1	Tahun			Tahun			Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun		1,0	Tahun		1	Tahun	428.261.500,00	1	Tahun			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							**199.782.000,00**			**16.093.336.976,00**			**30.702.800,00**			**342.526.600**			**4.493.041.226**			11.220.270.611			**16.086.541.236**			**16.286.323.236,12**			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							**199.782.000,00**			**16.093.336.976,00**			**30.702.800,00**			**342.526.600**			**4.493.041.226**			11.220.270.611			**16.086.541.236**			**16.286.323.236,12**			
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1	Tahun	402.627.500,00	1	Tahun	199.782.000,00	1	Tahun	13.115.236.976,00		Tahun	30.702.800,00		Tahun	315.826.600		Tahun	3.409.741.226	1	Tahun	9.353.720.611	1,0	Tahun	13.109.991.236	1	Tahun	13.309.773.236,12	1	Tahun	3305,73		
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Tahun	14.890.500.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	2.978.100.000,00		Tahun	-		Tahun	26.700.000		Tahun	1.083.300.000	1	Tahun	1.866.550.000	1,0	Tahun	2.976.550.000	1	Tahun	2.976.550.000,00	1	Tahun			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							**-**			**4.103.095.000,00**			**61.771.800,00**			**116.600.900**			**1.211.848.400**			2.699.099.500			**4.089.320.600**			**4.089.320.600,00**			
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							-			4.103.095.000,00			**61.771.800,00**			**116.600.900**			**1.211.848.400**			2.699.099.500			**4.089.320.600**			**4.089.320.600,00**			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1	Tahun	2.895.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	579.000.000,00		Tahun	61.771.800,00		Tahun	116.600.900		Tahun	152.453.400	1	Tahun	238.199.500	1,0	Tahun	569.025.600	1	Tahun	569.025.600,00	1	Tahun			
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Tahun	17.620.475.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	3.524.095.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	1.059.395.000	1	Tahun	2.460.900.000	1,0	Tahun	3.520.295.000	1	Tahun	3.520.295.000,00	1	Tahun			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							**85.861.272.867,00**			**73.092.964.950,00**			**116.557.851,00**			**5.466.182.908**			**21.492.308.450**			40.212.402.777			**67.287.451.986**			**153.148.724.852,99**			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							**85.861.272.867,00**			**73.092.964.950,00**			**116.557.851,00**			**5.466.182.908**			**21.492.308.450**			40.212.402.777			**67.287.451.986**			**153.148.724.852,99**			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1	Tahun	805.255.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	2.299.500.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	1.989.512.030	1,0	Tahun	1.989.512.030	1	Tahun	1.989.512.030,00	1	Tahun	247,07		
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1	Tahun		1	Tahun	633.200.000,00	1	Tahun			Tahun			Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun		1,0	Tahun		1	Tahun	633.200.000,00	1	Tahun			
			Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	1	Tahun	23.231.606.750,00	1	Tahun	6.793.752.200,00	1	Tahun	3.585.650.000,00		Tahun	-		Tahun	98.650.000		Tahun	325.200.000	1	Tahun	2.703.913.200	1,0	Tahun	3.127.763.200	1	Tahun	9.921.515.400,00	1	Tahun	42,71		
			Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	1	Tahun	78.069.472.250,00	1	Tahun	62.479.464.737,00	1	Tahun	63.873.248.750,00		Tahun	-		Tahun	5.215.437.788		Tahun	20.222.523.950	1	Tahun	33.345.983.601	1,0	Tahun	58.783.945.339	1	Tahun	121.263.410.076,00	1	Tahun	155,33		
			Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	1	Tahun		1	Tahun	-	1	Tahun	399.800.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	399.650.000	1,0	Tahun	399.650.000	1	Tahun	399.650.000,00	1	Tahun			
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	1	Tahun	3.204.914.900,00	1	Tahun	4.185.031.000,00	1	Tahun	1.471.722.000,00		Tahun	2.240.000,00		Tahun	8.945.000		Tahun	693.972.000	1	Tahun	765.565.000	1,0	Tahun	1.470.722.000	1	Tahun	5.655.753.000,00	1	Tahun	176,47		
			Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	1	Tahun	1.998.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	399.600.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	399.600.000	1,0	Tahun	399.600.000	1	Tahun	399.600.000,00	1	Tahun			
			Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	1	Tahun	-	1	Tahun	10.735.614.230,00	1	Tahun			Tahun			Tahun	-		Tahun	99.900.000	1	Tahun		1,0	Tahun		1	Tahun	10.735.614.230,00	1	Tahun			
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1	Tahun	1.500.000.000,00	1	Tahun	168.167.800,00	1	Tahun	300.000.000,00		Tahun	-		Tahun	3.690.000		Tahun	-	1	Tahun	296.310.000	1,0	Tahun	300.000.000	1	Tahun	468.167.800,00	1	Tahun			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					Volume	K Satuan	Rp	Volume	K Satuan	Rp	Volume	K Satuan	Rp	Volume	K Satuan	Rp	Volume	K Satuan	Rp	Volume	K Satuan	Rp	Volume	K Satuan	Rp	Volume	K Satuan	Rp	Volume	K Satuan	Rp	Volume	K Satuan	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1	Tahun	3.817.221.000,00	1	Tahun	557.398.900,00	1	Tahun	763.444.200,00		Tahun	114.317.851,00		Tahun	139.460.120		Tahun	150.712.500	1	Tahun	311.868.946	1,0	Tahun	716.359.417	1	Tahun	1.273.758.316,99	1	Tahun		
			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1	Tahun	-	1	Tahun	308.644.000,00	1	Tahun			Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun		1,0	Tahun		1	Tahun	308.644.000,00	1	Tahun		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							**682.504.450,00**			**825.000.000,00**			**156.019.100,00**			**197.593.800**			**119.379.095**			289.958.674			**762.950.669**			**1.445.455.119,00**			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							**262.280.740,00**			**190.000.000,00**			**61.776.300,00**			**58.315.400**			**-**			58.886.300			**178.978.000**			**441.258.740,00**			
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	Tahun	1.541.111.660,00	1	Tahun	262.280.740,00	1	Tahun	190.000.000,00		Tahun	61.776.300,00		Tahun	58.315.400		Tahun	-	1	Tahun	58.886.300	1,0	Tahun	178.978.000	1	Tahun	441.258.740,00	1	Tahun	28,63	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							**186.891.800,00**			**212.700.000,00**			32.230.600,00			**23.394.000**			**8.930.000**			127.569.400						**186.891.800,00**			
			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	Tahun	211.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	42.200.000,00		Tahun	-		Tahun	23.394.000		Tahun	1.000.000	1	Tahun	17.431.000	1,0	Tahun		1	Tahun	-	1	Tahun		
			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Tersedianya Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	1	Tahun	-	1	Tahun	43.377.600,00	1	Tahun			Tahun			Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun		1,0	Tahun	-	1	Tahun	43.377.600,00	1	Tahun		
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1	Tahun	750.000.000,00	1	Tahun	143.514.200,00	1	Tahun	150.000.000,00		Tahun	32.230.600,00		Tahun	-		Tahun	7.930.000	1	Tahun	91.388.400	1,0	Tahun	131.549.000	1	Tahun	275.063.200,00	1	Tahun		
			Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	TerlaksananyaPenyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1	Tahun	102.500.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	20.500.000,00		Tahun	-		Tahun	-		Tahun	-	1	Tahun	18.750.000	1,0	Tahun	18.750.000	1	Tahun	18.750.000,00	1	Tahun		
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)							**-**			**37.300.000,00**			**-**			**1.310.000**			**9.127.600**			22.827.200			33.264.800			33.264.800,00			
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	1	Tahun	186.500.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	37.300.000,00		Tahun	-		Tahun	1.310.000		Tahun	9.127.600	1	Tahun	22.827.200	1,0	Tahun	33.264.800	1	Tahun	33.264.800,00	1	Tahun		
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							**233.331.910,00**			**385.000.000,00**			**62.012.200,00**			**114.574.400**			**101.321.495**			80.675.774			**358.583.869**			**591.915.779,00**			
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Tahun	1.925.000.000,00	1	Tahun	233.331.910,00	1	Tahun	385.000.000,00		Tahun	62.012.200,00		Tahun	114.574.400		Tahun	101.321.495	1	Tahun	80.675.774	1,0	Tahun	358.583.869	1	Tahun	591.915.779,00	1	Tahun		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							**463.728.600,00**			**900.000.000,00**			**55.466.300,00**			**85.848.800**			**98.254.700**			477.637.542			**717.207.342**			**1.180.935.942,00**			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							**59.539.000,00**			**437.875.000,00**			**14.176.500,00**			**24.101.800**			**32.667.900**			237.137.241			**308.083.441**			**367.622.441,00**			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	Tahun	1.689.375.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	337.875.000,00		Tahun	5.597.000,00		Tahun	9.831.800		Tahun	23.003.800	1	Tahun	184.347.805	1,0	Tahun	222.780.405	1	Tahun	**222.780.405,00**	1	Tahun		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	Tahun	500.000.000,00	1	Tahun	59.539.000,00	1	Tahun	100.000.000,00		Tahun	8.579.500,00		Tahun	14.270.000		Tahun	9.664.100	1	Tahun	52.789.436	1,0	Tahun	85.303.036	1	Tahun	144.842.036,00	1	Tahun		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							**199.000.000,00**			**240.000.000,00**			**4.025.000,00**			**20.130.000**			**33.125.800**			143.939.100			**201.219.900**			**400.219.900,00**			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	Tahun	700.000.000,00	1	Tahun	199.000.000,00	1	Tahun	140.000.000,00		Tahun	2.512.500,00		Tahun	14.145.000		Tahun	12.100.800	1	Tahun	85.926.100	1,0	Tahun	114.684.400	1	Tahun	313.684.400,00	1	Tahun		
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlaksananya Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Tahun	500.000.000,00	1	Tahun	-	1	Tahun	100.000.000,00		Tahun	1.512.500,00		Tahun	5.985.000		Tahun	21.025.000	1	Tahun	58.013.000	pi	Tahun	86.535.500	1	Tahun	86.535.500,00	1	Tahun		

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																
									K			K			K			K			K			K			K																
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 8 x100%			16
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				**205.189.600,00**				**222.125.000,00**			**37.264.800,00**		**41.617.000**			**32.461.000**			96.561.201			**207.904.001**			**413.093.601,00**						
							Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Tahun	6.002.810.000,00	1	Tahun	205.189.600,00	1	Tahun	222.125.000,00		Tahun	37.264.800,00		Tahun	41.617.000		Tahun	32.461.000	1	Tahun	96.561.201	1,0	Tahun	207.904.001	1	Tahun	413.093.601,00	1	Tahun	6,88	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																		**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
		1	**04**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				23.676.842.791			16.620.140.000			6.514.856.881			1.136.300.329			1.875.843.525			1.690.175.417			1.992.782.430												
		1	**04**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				306.501.560			254.127.548			50.698.900			3.750.000			15.994.600			19.488.100			11.466.200												
		1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5	Dokumen	306.501.560	4	Dokumen	254.127.548	1	Dokumen	50.698.900	0	Dokumen	3.750.000	0	Dokumen	15.994.600	0	Dokumen	19.488.100	4	Dokumen	11.466.200	4	Dokumen	50.698.900	8	Dokumen	304.826.448	160	%	99,45	
		1	**04**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Peranokat Daerah**				8.817.818.879			5.263.110.968			3.483.979.461			540.269.643			1.127.618.240			979.427.151			965.909.648												
		1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	8.817.818.879	48	Bulan	5.263.110.968	12	Bulan	3.483.979.461	41	Orang / Bulan	540.269.643	42	Orang / Bula	1.127.618.240	41	Orang / Bula	979.427.151	40	Orang / Bulan	835.189.648	164	Bulan	3.482.504.682	212	Bulan	8.745.615.650	353,333	%	99,18	
		1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	130.720.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	130.720.000										1	Dokumen	130.720.000	1	Dokumen	130.720.000	1	Dokumen	130.720.000	100	%	100,00	
		1	**04**	**01**	**2.03**	**00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				248.256.345			209.398.740			20.057.300			7.566.400			7.575.500			3.915.400			1.000.000												
		1	04	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	162.196.345	4	Dokumen	126.222.140	1	Dokumen	20.057.300	0	Dokumen	7.566.400	0	Dokumen	7.575.500	0	Dokumen	3.915.400	1	Dokumen	1.000.000	1	Dokumen	20.057.300	5	Dokumen	146.279.440	100	%	90,19	
		1	04	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8	Unit	86.060.000	6	Unit	83.176.600	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit		0	Unit	-	6	Unit	83.176.600	75	%	96,65	
		1	**04**	**01**	**2.05**	**00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				596.009.594			518.695.452			71.800.200			6.790.200			38.246.100			2.725.400			24.943.100												
		1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	paket	285.290.000	3	paket	238.540.000	1	paket	46.750.000	0	paket	-	2	paket	25.350.000	0	paket	-	2	paket	15.700.000	4	paket	41.050.000	7	paket	279.590.000	140	%	98,00	
		1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dokumen	111.619.594	4	Dokumen	85.784.290	1	Dokumen	25.050.200	0	Dokumen	6.790.200	1	Dokumen	12.896.100	0	Dokumen	2.725.400	1	Dokumen	2.243.100	2	Dokumen	24.654.800	6	Dokumen	110.439.090	120	%	98,94	
		1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	orang	199.100.000	6	orang	194.371.162	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	1	orang	7.000.000	1	orang	7.000.000	7	orang	201.371.162	70	%	101,14	
		1	**04**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				2.686.928.985			2.233.214.744			283.693.000			63.508.500			70.068.800			50.891.750			155.176.300												
		1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5	Paket	271.642.900	4	Paket	114.755.042	1	Paket	6.800.000	0	Paket	-	0	Paket	3.126.000	0	Paket	1.124.000	1	Paket	2.550.000	1	Paket	6.800.000	5	Paket	121.555.042	100	%	44,75	
		1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Paket	355.065.085	4	Paket	313.771.490	1	Paket	32.705.000	1	Paket	3.757.700	1	Paket	13.356.100	1	Paket	8.069.000	1	Paket	7.521.800	4	Paket	32.704.600	8	Paket	346.476.090	160	%	97,58	
		1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5	Paket	65.914.500	4	Paket	35.422.500	1	Paket	30.492.000	1	Paket	4.324.000	1	Paket	5.367.000	1	Paket	5.090.000	1	Paket	13.747.000	4	Paket	28.528.000	8	Paket	63.950.500	160	%	97,02	
		1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5	Paket	413.800.000	4	Paket	392.198.354	1	Paket	20.000.000	1	Paket	5.250.000	1	Paket	2.250.000	1	Paket	7.750.000	1	Paket	4.750.000	4	Paket	20.000.000	8	Paket	412.198.354	160	%	99,61	
		1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Paket	236.419.000	4	Paket	205.848.980	1	Paket	30.560.000	1	Paket	7.762.500	1	Paket	7.762.500	1	Paket	7.702.500	1	Paket	7.332.500	4	Paket	30.560.000	8	Paket	236.408.980	160	%	100,00	
		1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Dokumen	109.350.000	4	Dokumen	95.350.000	1	Dokumen	14.000.000	0	Dokumen	3.400.000	0	Dokumen	3.450.000	0	Dokumen	3.150.000	1	Dokumen	7.500.000	1	Dokumen	17.500.000	5	Dokumen	112.850.000	100	%	103,20	
		1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	1.010.845.800	4	laporan	893.741.478	1	laporan	109.211.600	0	laporan	36.182.800	0	laporan	28.066.200	1	laporan	11.788.300	1	laporan	58.439.400	2	laporan	134.476.700	6	laporan	1.028.218.178	120	%	101,72	
		1	04	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	223.891.700	4	Dokumen	182.126.900	1	Dokumen	39.924.400	0	Dokumen	2.831.500	0	Dokumen	6.691.000	0	Dokumen	6.217.950	1	Dokumen	53.335.600	1	Dokumen	69.076.050	5	Dokumen	251.202.950	100	%	112,20	
		1	**04**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				10.460.447.105			7.650.294.148			2.535.486.820			506.023.586			598.448.285			611.395.616			777.919.782												

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp																	
									Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan																	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12											13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	laporan	19.186.000	4	laporan	15.616.000	1	laporan	3.570.000	0	laporan	1.174.200	0	laporan	624.800	0	laporan	1.146.200	1	laporan	624.800	1	laporan	3.570.000	5	laporan	19.186.000	100	%	100,00	
		1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	laporan	5.113.045.105	4	laporan	3.980.565.148	1	laporan	857.926.820	3	laporan	195.809.386	3	laporan	192.523.985	3	laporan	211.408.416	3	laporan	240.579.482	12	laporan	840.321.269	16	laporan	4.820.886.417	320	%	94,29	
		1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	laporan	437.716.000	4	laporan	393.213.000	1	laporan	44.390.000	2	laporan	37.440.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	6.950.000	2	laporan	44.390.000	6	laporan	437.603.000	120	%	99,97	
		1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	laporan	4.890.500.000	4	laporan	3.260.900.000	1	laporan	1.629.600.000	3	laporan	271.600.000	3	laporan	405.299.500	3	laporan	398.841.000	3	laporan	529.765.500	12	laporan	1.605.506.000	16	laporan	4.866.406.000	320	%	99,51	
																											-																	
		1	**04**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				560.880.323			491.298.400			69.141.200			8.392.000			17.892.000			22.332.000			56.367.400																	
		1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	28.141.200	0	Unit	-	2	Unit	28.141.200	1	Unit	5.392.000	0	Unit	5.392.000	0	Unit	7.332.000	0	Unit	9.417.400	1	Unit	27.533.400	1	Unit	27.533.400	50	%	97,84	
		1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Unit	532.739.123	8	Unit	491.298.400	2	Unit	41.000.000	1	Unit	3.000.000	1	Unit	12.500.000	2	Unit	15.000.000	0	Unit	35.500.000	4	Unit	66.000.000	12	Unit	557.298.400	120	%	104,61	
		1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	11.450.005	0	Unit	-	1	Unit	11.450.005										1	Unit	11.450.000	1	Unit	11.450.000	1	Unit	11.450.000	100	%	100,00	
		1	**04**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				7.776.563.900			7.554.985.967			48.000.000			8.423.000			13.716.000			8.513.000			17.023.400																	
		1	**04**	**02**	**2.01**	**00**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				3.440.698.950			3.337.570.150			23.000.000			3.517.000			6.747.000			5.699.000			6.820.400	0		22.783.400	0		3.360.353.550			97,66	
		1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5	Dokumen	3.440.698.950	4	Dokumen	3.337.570.150	1	Dokumen	23.000.000	0	Dokumen	3.517.000	0	Dokumen	6.747.000	0	Dokumen	5.699.000	1	Dokumen	6.820.400	1	Dokumen	22.783.400	5	Dokumen	3.360.353.550	100	%	97,66	
		1	**04**	**02**	**2.03**	**00**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				1.856.090.000			1.848.896.000			-			-			-			-																
		1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	63	Unit Rumah	1.856.090.000	60	Unit Rumah	1.848.896.000	0	Unit Rumah	-	0	Unit Rumah	-	0	Unit Rumah	-	0	Unit Rumah	-		Unit Rumah		0	Unit Rumah	-	60	Unit Rumah	1.848.896.000	95,2381	%	99,61	
		1	**04**	**02**	**2.06**	**00**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**				2.340.840.000			2.233.147.867			25.000.000			4.906.000			6.969.000			2.814.000			10.203.000																	
		1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	Laporan	2.340.840.000	4	Laporan	2.233.147.867	1	Laporan	25.000.000	0	Laporan	4.906.000	0	Laporan	6.969.000	0	Laporan	2.814.000	2	Laporan	10.203.000	2	Laporan	24.892.000	6	Laporan	2.258.039.867	120	%	96,46	
		1	**04**	**02**	**2.07**	**00**	**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**				138.934.950			135.371.950			-			-			-			-																
		1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	5	Laporan	138.934.950	4	Laporan	135.371.950	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-		Laporan		0	Laporan	-	4	Laporan	135.371.950	80	%	97,44	
		1	**04**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**				1.344.879.900			1.187.079.000			149.999.900			26.536.800			32.490.850			25.429.100			177.551.350																	
		1	**04**	**03**	**2.02**	**00**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**				694.880.000			642.440.000			50.000.000			9.883.700			11.853.200			6.776.500			138.579.000																	
		1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	5	Dokumen	694.880.000	4	Dokumen	642.440.000	1	Dokumen	50.000.000	0	Dokumen	9.883.700	0	Dokumen	11.853.200	0	Dokumen	6.776.500	1	Dokumen	138.579.000	1	Dokumen	167.092.400	5	Dokumen	809.532.400	100	%	116,50	
		1	**04**	**03**	**2.03**	**00**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**				649.999.900			544.639.000			99.999.900			16.653.100			20.637.650			18.652.600			38.972.350																	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV															
									K			K			K			K			K			K			K															
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	5	Dokumen	649.999.900	4	Dokumen	544.639.000	1	Dokumen	99.999.900	0	Dokumen	16.653.100	0	Dokumen	20.637.650	0	Dokumen	18.652.600	1	Dokumen	38.972.350	1	Dokumen	94.915.700	5	Dokumen	639.554.700	100	%	98,39	
		1	04	04	0.00	00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				16.816.250			-			16.816.250											16.796.000												
		1	04	04	2.01	00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				16.816.250			-			16.816.250											16.796.000												
		1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	Unit Rumah	16.816.250	0	Unit Rumah	-	1	Unit Rumah	16.816.250											0	Unit Rumah	16.796.000	0	Unit Rumah	16.796.000	0	Unit Rumah	16.796.000	0	%	99,88	
		1	**04**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				15.926.285.210			13.967.998.256			350.881.950			46.841.800			131.651.287			56.359.195			376.971.020												
		1	**04**	**05**	**2.01**	**00**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				15.926.285.210			13.967.998.256			350.881.950			46.841.800			131.651.287			56.359.195			376.971.020												
		1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5	Dokumen	2.203.490.675	4	Dokumen	2.154.833.963	1	Dokumen	22.910.800	0	Dokumen	5.186.800	0	Dokumen	1.200.000	0	Dokumen	9.633.020	1	Dokumen	5.840.850	1	Dokumen	21.860.670	5	Dokumen	2.176.694.633	100	%	98,78	
		1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	5	Dokumen	6.530.497.500	4	Dokumen	6.292.248.000	1	Dokumen	118.497.500	1	Lokasi	10.755.300	2	Lokasi	52.568.687	4	Lokasi	25.901.250	4	Lokasi	178.574.300	11	Dokumen	267.799.537	15	Dokumen	6.560.047.537	300	%	100,45	
		1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5	Dokumen	7.192.297.035	4	Dokumen	5.520.916.293	1	Dokumen	209.473.650	0	Laporan	30.899.700	0	Laporan	77.882.600	1	Laporan	20.824.925	1	Laporan	192.555.870	2	Dokumen	322.163.095	6	Dokumen	5.843.079.388	120	%	81,24	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																																			
							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																																		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
		1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**29.223.973.686**			**22.583.545.377**			**7.527.848.459**			**996.478.068**			**817.379.535**			**2.733.551.594**			1.663.496.835												
		1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**25.171.586.272**			**18.861.578.013**			**6.287.192.671**			**1.329.577.604**			**595.185.945**			**2.684.334.488**			1.487.870.343												
	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dana untuk Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bln	25.171.586.272	48	Bln	18.861.578.013	12	Bln	6.287.192.671	3	Bln	1.329.577.604	3	Bln	595.185.945	3	Bln	2.684.334.488	3	Bln	1.487.870.343	12	Bln	6.096.968.380	60	Bln	24.958.546.393	100	%	99,15	
		1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	.....			**992.386.764**			**802.966.764**			**267.655.588**			-			**157.266.286**			**28.283.000**			105.706.300												
	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bln	35.000.000	48	Bln	15.000.000	12	Bln	5.000.000	3	Bln		3	Bln	18.530.000	3	Bln	1.470.000	3	Bln		12	Bln	20.000.000	60	Bln	35.000.000	100	%	100,00	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapaianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bln	60.000.000	48	Bln	45.000.000	12	Bln	15.000.000	3	Bln		3	Bln	10.500.000	3	Bln	4.500.000	3	Bln		12	Bln	15.000.000	60	Bln	60.000.000	100	%	100,00	
	Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat	1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bln	120.000.000	48	Bln	90.000.000	12	Bln	30.000.000	3	Bln		3	Bln	26.840.000	3	Bln	3.025.000	3	Bln	10.125.000	12	Bln	39.990.000	60	Bln	129.990.000	100	%	108,33	
	Terlaksananya Pertemuan Teknis Dalam Daerah Terlaksananya Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	60	Bln	777.386.764	48	Bln	652.966.764	12	Bln	217.655.588	3	Bln		3	Bln	101.396.286	3	Bln	19.288.000	3	Bln	95.581.300	12	Bln	216.265.586	60	Bln	869.232.350	100	%	111,81	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV													
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 8 x100%			16
		1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.960.000.650**			**2.844.000.600**			**948.000.200**			**-**			**43.737.304**			**17.124.106**			69.920.192											
	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	60	Bln	20.000.000	48	Bln	15.000.000	12	Bln	5.000.000	3	Bln		3	Bln	4.800.000	3	Bln	-	3	Bln	5.200.000	12	Bln	10.000.000	60	Bln	25.000.000	100	%	125,00	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bln	424.000.050	48	Bln	318.000.000	12	Bln	106.000.000	3	Bln		3	Bln	35.937.304	3	Bln	15.124.106	3	Bln	54.720.192	12	Bln	105.781.602	60	Bln	423.781.602	100	%	99,95	
	Terlaksananya Pembayaran HonorariumTenaga Kontrak	1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bln	2.516.000.600	48	Bln	2.511.000.600	12	Bln	837.000.200	3	Bln		3	Bln	3.000.000	3	Bln	2.000.000	3	Bln	10.000.000	12	Bln	15.000.000	60	Bln	2.526.000.600	100	%	100,40	
		1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100.000.000**			**75.000.000**			**25.000.000**			**-**			**21.190.000**			**3.810.000**			-											
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin peratan dan mesin Lainnya	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peratan dan mesin Lainnya	60	Bln	40.000.000	48	Bln	30.000.000	12	Bln	10.000.000	3	Bln		3	Bln	6.750.000	3	Bln	3.250.000	3	Bln		12	Bln	10.000.000	60	Bln	40.000.000	100	%	100,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	60	Bln	60.000.000	48	Bln	45.000.000	12	Bln	15.000.000	3	Bln		3	Bln	14.440.000	3	Bln	560.000	3	Bln		12	Bln	15.000.000	60	Bln	60.000.000	100	%	100,00	
		1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**4.777.726.200**			**3.235.167.000**			**1.078.389.000**			**228.900.000**			**186.263.800**			**505.045.600**			594.926.300											
		1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**1.023.056.200**			**625.917.000**			**208.639.000**			**24.000.000**			**56.800.000**			**99.033.400**			234.589.600											
	Terlaksananya Pembayaran HonorariumTenaga Kontrak	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terpenuhinya Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terpenuhinya Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum	60	Bln	274.500.200	48	Bln	45.000.000	12	Bln	15.000.000	3	Bln	24.000.000	3	Bln	50.033.500	3	Bln	58.426.800	3	Bln	96.039.700	12	Bln	228.500.000	60	Bln	273.500.000	100	%	99,64	
	Terlaksanya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	60	Bln	228.556.000	48	Bln	190.917.000	12	Bln	63.639.000	3	Bln	-	3	Bln	7.216.000	3	Bln	-	3	Bln	61.923.000	12	Bln	69.139.000	60	Bln	260.056.000	100	%	113,78	
	Terlaksanya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	60	Bln	280.000.000	48	Bln	210.000.000	12	Bln	70.000.000	3	Bln		3	Bln	37.766.500	3	Bln	23.490.000	3	Bln	33.743.500	12	Bln	95.000.000	60	Bln	305.000.000	100	%	108,93	
	Terlaksanya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1	05	02	2.01	05	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terpenuhinya peningkatan kapasitas SDM	60	Bln	160.000.000	48	Bln	120.000.000	12	Bln	40.000.000	3	Bln		3	Bln	-	3	Bln	17.116.600	3	Bln	22.883.400	12	Bln	40.000.000	60	Bln	160.000.000	100	%	100,00	
	Terlaksanya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	05	02	2.01	07	Terpenuhinya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya Kerjasama Antar Lembaga	60	Bln	80.000.000	48	Bln	60.000.000	12	Bln	20.000.000	3	Bln		3	Bln	-	3	Bln		3	Bln	20.000.000	12	Bln	20.000.000	60	Bln	80.000.000	100	%	100,00	
		1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**				**3.754.670.000**			**2.609.250.000**			**869.750.000**			**204.900.000**			**129.463.800**			**406.012.200**			360.336.700											
	Terlaksanya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terpenuhinya sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	60	Bln	87.000.000	48	Bln	65.250.000	12	Bln	21.750.000	3	Bln		3	Bln	13.299.400	3	Bln	8.413.800	3	Bln		12	Bln	21.713.200	60	Bln	86.963.200	100	%	99,96	
	Terlaksananya Pembayaran HonorariumTenaga Kontrak	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terpenuhinya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	60	Bln	3.533.920.000	48	Bln	2.442.000.000	12	Bln	814.000.000	3	Bln	204.900.000	3	Bln	116.164.400	3	Bln	365.880.000	3	Bln	360.336.700	12	Bln	1.047.281.100	60	Bln	3.489.281.100	100	%	98,74	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K		
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
	Terlaksanya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terpenuhinya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	60	Bln	133.750.000	48	Bln	102.000.000	12	Bln	34.000.000	3	Bln		3	Bln		3	Bln	31.718.400	3	Bln		12	Bln	31.718.400	60	Bln	133.718.400	100	%	99,98	
		1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**6.133.563.000**			**4.600.172.250**			**1.533.390.750**			**210.150.000**			**208.856.237**			**521.549.150**			709.714.413										
		1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**6.133.563.000**			**4.600.172.250**			**1.533.390.750**			**210.150.000**			**208.856.237**			**521.549.150**			709.714.413										
	Terlaksananya pencegahan kebakaran dalam daerah	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pencegahan kebakaran dalam daerah	60	Bln	110.112.000	48	Bln	82.584.000	12	Bln	27.528.000	3	Bln		3	Bln		3	Bln	27.528.000	3	Bln		12	Bln	27.528.000	60	Bln	110.112.000	100	%	100,00	
	Terlaksananya pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah	60	Bln	210.611.600	48	Bln	157.958.700	12	Bln	52.652.900	3	Bln		3	Bln	26.283.637	3	Bln	20.791.000	3	Bln	100.862.263	12	Bln	147.936.900	60	Bln	305.895.600	100	%	145,24	
	Terlaksanya standarisasi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya standarisasi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran	60	Bln	1.513.442.800	48	Bln	1.135.082.100	12	Bln	378.360.700	3	Bln		3	Bln	96.122.600	3	Bln	89.480.150	3	Bln	265.453.150	12	Bln	451.055.900	60	Bln	1.586.138.000	100	%	104,80	
	Terlaksananya Pembayaran HonoriumTenaga Kontrak	1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Gaji Tenaga Kontrak Dan Insentif	60	Bln	4.299.396.600	48	Bln	3.224.547.450	12	Bln	1.074.849.150	3	Bln	210.150.000	3	Bln	86.450.000	3	Bln	383.750.000	3	Bln	343.399.000	12	Bln	1.023.749.000	60	Bln	4.248.296.450	100	%	98,81	
									40.135.262.886					**30.418.884.627**			**10.139.628.209**			**1.435.528.068**			**1.212.499.572**			**3.760.146.344**			**2.968.137.548**			**9.747.627.068**			**40.166.511.695**			
							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																																	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																																
							Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																																
							Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	60	Bulan	128.306.500	48	Bulan	113.894.200,00	12	Bulan	25.000.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	5.277.000	3	Bulan	14.906.900	3	Bulan	4.800.000	12	Bulan	24.983.900	60	Bulan	138.878.100,00	100,00	%	108,24	
							Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tersedianya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	60	Bulan	830.990.000	48	Bulan	990.875.400,00	12	Bulan	20.000.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	11.414.000	3	Bulan	6.155.000	3	Bulan	2.431.000	12	Bulan	20.000.000	60	Bulan	1.010.875.400,00	100,00	%	121,65	
							Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																			-														
							Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota		60	Bulan	1.800.620.000	48	Bulan	1.174.930.000,00				3	Bulan	-	0	Bulan		0	Bulan	-	3	Bulan		6	Bulan	-	54	Bulan	1.174.930.000,00	90,00	%	65,25	
							Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	60	Bulan	128.202.500	48	Bulan	102.911.500,00	12	bulan	25.000.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	7.498.600	3	Bulan	4.460.000	3	Bulan	13.041.400	12	Bulan	25.000.000	60	Bulan	127.911.500,00	100,00	%	99,77	
							Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	60	Bulan	1.287.674.800	48	Bulan	1.415.714.970,00	3	kegiatan	20.000.000,00	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	0	kegiatan	1.152.000	3	kegiatan	18.848.000	3	kegiatan	20.000.000	51	Bulan	1.435.714.970,00	85,00	%	111,50	
							Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pascabencana	60	Bulan	5.224.104.800	48	Bulan	4.521.310.703,00	12	Bulan	89.999.910,00	3	Bulan	-	3	Bulan	6.480.200	3	Bulan	4.657.700	3	Bulan	78.520.660	12	Bulan	89.658.560	60	Bulan	4.610.969.263,00	100,00	%	88,26	
							Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	60	Bulan	420.155.067	48	Bulan	293.267.850,00	6	bulan	124.859.750,00	3	Bulan	-	3	Bulan	66.073.550	3	Bulan	57.970.800	3	Bulan	815.000	12	Bulan	124.859.350	60	Bulan	418.127.200,00	100,00	%	99,52	
							Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Rencana Kajian Daerah Rawan Bencana	60	Bulan	160.480.000	48	Bulan	76.349.500,00	1	kegiatan	50.000.000,00	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	1	kegiatan	49.622.672	1	kegiatan	49.622.672	49	Bulan	125.972.172,00	81,67	%	78,50	
							Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																			-														
							Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	60	Bulan	710.345.200	48	Bulan	567.481.800,00	12	Bulan	215.000.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	55.648.960	3	Bulan	45.921.400	3	Bulan	109.595.300	12	Bulan	211.165.660	60	Bulan	778.647.460,00	100,00	%	109,62	
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60	Bulan	387.407.700	48	Bulan	331.098.615,00	1	kegiatan	85.000.000,00	0	kegiatan	-	0	kegiatan	6.224.000	0	kegiatan	24.951.100	1	kegiatan	53.809.100	1	kegiatan	84.984.200	49	Bulan	416.082.815,00	81,67	%	107,40	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																															
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																															
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pemadaman, dan Pengendalian Karhutla	60	Bulan	999.395.800	48	Bulan	567.717.450,00	12	bulan	354.917.850,00	3	Bulan	-	3	Bulan	26.971.000	3	Bulan	20.624.050	3	Bulan	307.322.800	12	Bulan	354.917.850	60	Bulan	922.635.300,00	100,00	%	92,32	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																															
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																															
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	Bulan	147.094.970	48	Bulan	148.209.200,00	12	Bulan	20.043.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	3.896.248	3	Bulan	-	3	Bulan	16.084.052	12	Bulan	19.980.300	60	Bulan	168.189.500,00	100,00	%	114,34	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																															
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	9.239.897.709	48	Bulan	6.708.077.001,00	12	Bulan	1.787.210.552,00	3	bulan	354.056.164	3	Bulan	545.288.366	3	Bulan	497.340.449	3	Bulan	337.637.018	12	bulan	1.734.321.997	60	Bulan	8.442.398.998,00	100,00	%	91,37	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	60	Bulan	78.336.100	48	Bulan	56.487.800,00	12	bulan	19.432.300,00	3	Bulan	-	0	Bulan		0	Bulan	-	3	Bulan	19.432.100	6	Bulan	19.432.100	54	Bulan	75.919.900,00	90,00	%	96,92	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-																							
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60	Bulan	189.955.000	48	Bulan	147.672.685,00	1	kegiatan	42.235.000,00	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	1	kegiatan	42.235.000	1	kegiatan	42.235.000	49	Bulan	189.907.685,00	81,67	%	99,98	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Data dan Laporan Administrasi Kepegawaian	60	Bulan	264.644.200	48	Bulan	181.825.178,00	12	bulan	13.143.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	508.100	3	Bulan	-	3	Bulan	5.665.300	12	Bulan	6.173.400	60	Bulan	187.998.578,00	100,00	%	71,04	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							-																							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan	14.126.696	48	Bulan	11.657.000,00	12	Bulan	2.463.348,00	3	Bulan	-	3	Bulan	1.200.000	3	Bulan	-	3	Bulan	1.260.000	12	Bulan	2.460.000	60	Bulan	14.117.000,00	100,00	%	99,93	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	146.337.050	48	Bulan	122.675.850,00	12	Bulan	23.574.700,00	3	Bulan	-	3	Bulan	12.512.200	3	Bulan	5.886.700	3	Bulan	5.175.800	12	Bulan	23.574.700	60	Bulan	146.250.550,00	100,00	%	99,94	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	70.200.500	48	Bulan	60.988.500,00	12	Bulan	7.200.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	1.200.000	3	Bulan	1.800.000	3	Bulan	4.200.000	12	Bulan	7.200.000	60	Bulan	68.188.500,00	100,00	%	97,13	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	60	Bulan	23.036.000	48	Bulan	18.153.300,00	12	bulan	5.040.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	840.000	3	Bulan	1.890.000	3	Bulan	2.310.000	12	Bulan	5.040.000	60	Bulan	23.193.300,00	100,00	%	100,68	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	60	Bulan	329.333.800	48	Bulan	165.085.200,00	12	Bulan	104.000.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	30.510.000	3	Bulan	25.650.000	3	Bulan	47.840.000	12	Bulan	104.000.000	60	Bulan	269.085.200,00	100,00	%	81,71	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	759.624.000	48	Bulan	625.554.864,00	12	Bulan	181.140.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	20.144.100	3	Bulan	70.298.300	3	Bulan	90.697.600	12	Bulan	181.140.000	60	Bulan	806.694.864,00	100,00	%	106,20	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-																							
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	Bulan	209.320.970	48	Bulan	79.910.000,00	2	kegiatan	110.310.970,00	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	0	kegiatan	-	2	kegiatan	99.365.675	2	kegiatan	99.365.675	50	Bulan	179.275.675,00	83,33	%	85,65	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat	60	Bulan	17.592.000	48	Bulan	13.984.000,00	12	bulan	3.600.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	1.800.000	3	Bulan	-	3	Bulan	1.800.000	12	Bulan	3.600.000	60	Bulan	17.584.000,00	100,00	%	99,95	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	302.889.917	48	Bulan	204.373.290,00	12	Bulan	58.098.333,00	3	Bulan	-	3	Bulan	14.873.780	3	Bulan	13.205.236	3	Bulan	26.250.800	12	Bulan	54.329.816	60	Bulan	258.703.106,00	100,00	%	85,41	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	1.659.132.000	48	Bulan	1.095.469.750,00	12	bulan	606.600.000,00	3	bulan	99.500.000	3	Bulan	123.440.000	3	Bulan	70.550.000	3	Bulan	298.210.000	12	bulan	591.700.000	60	Bulan	1.687.169.750,00	100,00	%	101,69	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD		60	Bulan	319.400.000			415.200.000,00											-				0	0	-	0	Bulan	415.200.000,00	0,00	%	129,99	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-													

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 :13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	60	Bulan	318.493.733	48	Bulan	285.363.100,00	12	bulan	196.558.850,00	3	Bulan	-	3	Bulan	23.391.500	3	Bulan	42.898.700	3	Bulan	99.220.000	12	Bulan	165.510.200	60	Bulan	450.873.300,00	100,00	%	141,56	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	60	Bulan	60.550.000	48	Bulan	56.736.500,00	12	bulan	3.750.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	3.720.000	3	Bulan	-	12	Bulan	3.720.000	60	Bulan	60.456.500,00	100,00	%	99,85	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	60	Bulan	107.053.450	48	Bulan	83.729.450,00	12	bulan	23.296.500,00	3	Bulan	-	3	Bulan	23.296.500	3	Bulan	-	3	Bulan	-	12	Bulan	23.296.500	60	Bulan	107.025.950,00	100,00	%	99,97	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																																	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																																	
			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)																																	
			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	60	Bulan	210.640.000	48	Bulan	179.140.000	12	Bulan	45.500.000	3	Bulan	5.897.800	3	Bulan	5.801.000	3	Bulan	18.465.000	3	Bulan	15.335.500	12	Bulan	45.499.300	60	Bulan	224.639.300	100	%	106,65	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota																																	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Bulan	20.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	34.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	5.480.000	3	Bulan	5.655.000	3	Bulan	22.643.000	12	Bulan	33.778.000	12	Bulan	33.778.000	20	%	168,89	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																																	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																																	
			Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Penyediaan makanan operasional tagana	60	Bulan	25.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	25.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	12.600.000	3	Bulan	6.200.000	3	Bulan	6.200.000	12	Bulan	25.000.000	12	Bulan	25.000.000	20	%	100,00	
			Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	60	Bulan	30.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	30.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	24.675.000	3	Bulan	4.780.600	3	Bulan	544.400	12	Bulan	30.000.000	12	Bulan	30.000.000	20	%	100,00	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	60	Bulan	20.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	20.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	11.928.000	3	Bulan	6.380.800	3	Bulan	1.691.200	12	Bulan	20.000.000	12	Bulan	20.000.000	20	%	100,00	
			Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	60	Bulan	290.000.000	48	Bulan	270.000.000	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	48	Bulan	270.000.000	80	%	93,10	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan																																	
			Pemberian Layanan kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan kedaruratan	60	Bulan	121.800.000	48	Bulan	73.900.000	12	Bulan	74.900.000	3	Bulan	14.639.000	3	Bulan	23.679.245	3	Bulan	8.669.755	3	Bulan	27.912.000	12	Bulan	74.900.000	60	Bulan	148.800.000	100	%	122,17	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																																	
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar																																	
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	60	Bulan	40.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	50.000.000	3	Bulan	4.240.000	3	Bulan	21.705.000	3	Bulan	13.280.000	3	Bulan	10.775.000	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	50.000.000	20	%	125,00	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota																																	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60	Bulan	373.406.600	48	Bulan	329.006.600	12	Bulan	44.400.000	3	Bulan	5.290.000	3	Bulan	17.849.000	3	Bulan	4.157.900	3	Bulan	17.103.100	12	Bulan	44.400.000	60	Bulan	373.406.600	100	%	100,00	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV												
									K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 *13			15 = 14 / 6 x100%			16
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60	Bulan	245.500.000	48	Bulan	154.000.000	12	Bulan	155.705.000	3	Bulan	9.109.600	3	Bulan	18.371.050	3	Bulan	41.539.900	3	Bulan	86.356.210	12	Bulan	155.376.760	60	Bulan	309.376.760	100	%	126,02	
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	60	Bulan	124.920.000	48	Bulan	82.420.000	12	Bulan	942.500.000	3	Bulan	6.091.000	3	Bulan	13.202.700	3	Bulan	18.166.900	3	Bulan	904.943.100	12	Bulan	942.403.700	60	Bulan	1.024.823.700	100	%	820,38	
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA																																	
							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																																	
							Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial	60	Bulan	325.580.000	48	Bulan	247.580.000	12	Bulan	83.000.000	3	Bulan	850.000	3	Bulan	23.495.000	3	Bulan	6.315.100	3	Bulan	52.339.900	12	Bulan	83.000.000	60	Bulan	330.580.000	100	%	101,54	
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																																	
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota																																	
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60	Bulan	203.880.000	48	Bulan	133.680.000	12	Bulan	470.200.000	3	Bulan	11.095.000	3	Bulan	17.000.000	3	Bulan	29.669.100	3	Bulan	411.435.900	12	Bulan	469.200.000	60	Bulan	602.880.000	100	%	295,70	
2							**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																																	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																																**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																															
		2	**07**	**01**	**2**	**01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									30.000.000																					
		2	07	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan dan dokumen Perencanaan	60	bulan	50.000.000	48	bulan	233.400.000	12	bulan	10.000.000	3	bulan	6.280.000,00	3	bulan	750.000	3	bulan	0	3	bulan	2.970.000	12	Bulan	10.000.000	60	Bulan	243.400.000	100	%	486,80	
		2	07	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disusunnya Dokumen RKA-SKPD	60	bulan	50.000.000	48	bulan	62.000.000	12	bulan	10.000.000	3	bulan	1.300.000,00	3	bulan	5.790.000	3	bulan	0	3	bulan	5.790.000	12	Bulan	12.880.000	60	Bulan	74.880.000	100	%	149,76	
		2	07	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60	bulan	50.000.000	48	bulan	91.709.793	12	bulan	10.000.000	3	bulan	7.250.000,00	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	2.750.000	12	Bulan	10.000.000	60	Bulan	101.709.793	100	%	203,42	
		2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									2.701.447.736												801.080.968											
		2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dibayarnya gaji dan tunjangan ASN	60	bulan	12.870.438.680	48	bulan	8.168.540.629	12	bulan	2.574.087.736	3	bulan	408.978.388	3	bulan	552.004.306	3	bulan	1.153.684.278	3	bulan	690.049.168	12	Bulan	2.804.716.140	60	Bulan	10.973.256.769	100	%	85,26	
		2	07	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Dilaksanakannya tata kelola keuangan	60	bulan	50.900.000	48	bulan	114.689.198	12	bulan	10.180.000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	12	Bulan	-	60	Bulan	114.689.198	100	%	225,32	
		2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dibuatnya Laporan Bulanan,Semesteran dan Tahunan Keuangan SOPD	60	bulan	585.900.000	48	bulan	55.000.000	12	bulan	117.180.000	3	bulan	26.340.000	3	bulan	26.340.000	3	bulan	8.030.000	3	bulan	111.031.800	12	Bulan	171.741.800	60	Bulan	226.741.800	100	%	38,70	
		2	**07**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									15.000.000												3.698.750											
		2	07	01	3,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dilakukannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	bulan	75.000.000	48	bulan		12	bulan	15.000.000	3	bulan	0	3	bulan	11.243.250	3	bulan	0	3	bulan	3.698.750	12	Bulan	14.942.000	60	Bulan	14.942.000	100	%	19,92	
		2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									19.800.000												9.800.000											
		2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsinya	60	bulan	99.000.000	48	bulan	64.100.000	12	bulan	19.800.000	3	bulan	0	3	bulan	5.000.000	3	bulan	0	3	bulan	9.800.000	12	Bulan	14.800.000	60	Bulan	78.900.000	100	%	79,70	
		2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									108.440.320												57.966.200											
		2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	60	bulan	23.465.000	48	bulan	9.000.000	12	bulan	4.693.000	3	bulan	1.744.600	3	bulan	1.133.600	3	bulan	1.102.400	3	bulan	712.400	12	Bulan	4.693.000	60	Bulan	13.693.000	100	%	58,35	
		2	07	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bulan	173.251.600	48	bulan	126.843.100	12	bulan	34.650.320	3	bulan	11.870.500	3	bulan	8.631.900	3	bulan	9.794.800	3	bulan	4.353.000	12	Bulan	34.650.200	60	Bulan	161.493.300	100	%	93,21	
		2	07	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat kebersihan kantor	60	bulan	39.985.000	48	bulan	9.000.000	12	bulan	7.997.000	3	bulan	3.215.000	3	bulan	2.130.000	3	bulan	2.092.000	3	bulan	560.000	12	Bulan	7.997.000	60	Bulan	16.997.000	100	%	42,51	

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1) | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%) | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																	
									K			K			K			K			K			K			K																	
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp																	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12											14 = 7 +13					15 = 14 / 6 x100%			16
		2	07	04	2,03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Informasi dan Data Tenaga Kerja	60	bulan	75.000.000	48	bulan	0	12	bulan	15.000.000	3	bulan	5.153.250	3	bulan	3.490.400	3	bulan		3	bulan	2.243.050	12	Bulan	10.886.700	60	Bulan	10.886.700	100	%	14,52	
		2	07	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Informasi dan Data Tenaga Kerja	60	bulan	225.000.000	48	bulan	0	12	bulan	45.000.000	3	bulan	7.986.500	3	bulan	23.480.000	3	bulan		3	bulan	5.165.300	12	Bulan	36.631.800	60	Bulan	36.631.800	100	%	16,28	
		2	**07**	**04**	**2,05**		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota**											20.000.000										65.840.800															
		2	07	04	2,05	01	Koordinasi dan Sinkronasi IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disahkannya Perda IMTA Kabupaten Barito Selatan	60	bulan	100.000.000	48	bulan	50.000.000	12	bulan	20.000.000	3	bulan	0	3	bulan	7.198.800	3	bulan	3.503.400	3	bulan	65.840.800	12	Bulan	76.543.000	60	Bulan	126.543.000	100	%	126,54	
		2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**																																				
		2	**07**	**05**	**2,01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											38.180.000										33.525.250															
		2	07	05	2,05	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	60	bulan	25.000.000	48	bulan	103.986.000	12	bulan	5.000.000	3	bulan	466.500,00	3	bulan	1.135.750	3	bulan	0	3	bulan	3.252.750	12	Bulan	4.855.000	60	Bulan	108.841.000	100	%	435,36	
		2	07	05	2,05	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah PKB yang didaftarkan	60	bulan	25.000.000	48	bulan	24.002.000	12	bulan	5.000.000	3	bulan	1.387.000,00	3	bulan	168.000	3	bulan	0	3	bulan	3.425.000	12	Bulan	4.980.000	60	Bulan	28.982.000	100	%	115,93	
		2	07	05	2,05	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Tersedianya Data HI dan Jamsostek	60	bulan	140.900.000	48	bulan	28.063.500	12	bulan	28.180.000	3	bulan	6.788.000,00	3	bulan	6.429.400	3	bulan	600.000	3	bulan	26.847.500	12	Bulan	40.664.900	60	Bulan	68.728.400	100	%	48,78	
		2	**07**	**05**	**2,02**		**Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											111.820.000										60.463.450															
		2	07	05	2,01	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Jumlah Perselisihan HI	60	bulan	234.101.000	48	bulan	52.117.000	12	bulan	46.820.200	3	bulan	9.451.300	3	bulan	10.407.000	3	bulan	6.365.000	3	bulan	20.492.750	12	Bulan	46.716.050	60	Bulan	98.833.050	100	%	42,22	
		2	07	05	2,01	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terakomodirnya Perselisihan Industrial	60	bulan	249.999.000	48	bulan	38.813.000	12	bulan	49.999.800	3	bulan	1.649.000	3	bulan	12.705.700	3	bulan	5.302.100	3	bulan	30.073.700	12	Bulan	49.730.500	60	Bulan	88.543.500	100	%	35,42	
		2	07	05	2,01	03	Penyelengaraan Verifikasi dan rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terverifikasinya Keanggotaan Serikat Pekerja / Buruh	60	bulan	37.500.000	48	bulan	25.090.000	12	bulan	7.500.000	3	bulan	2.060.000	3	bulan	200.000	3	bulan	300.000	3	bulan	4.932.000	12	Bulan	7.492.000	60	Bulan	32.582.000	100	%	86,89	
		2	07	05	2,01	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional lembaga Kerjasama Tripartit	60	bulan	37.500.000	48	bulan	39.854.500	12	bulan	7.500.000	3	bulan	540.000	3	bulan	1.320.000	3	bulan	565.000	3	bulan	4.965.000	12	Bulan	7.390.000	60	Bulan	47.244.500	100	%	125,99	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																																						
							PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				**150.000.000,00**			**60.196.850,00**			**40.204.000,00**			**23.412.000,00**			13.124.000			-			3.640.000														
							Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				**150.000.000,00**			**60.196.850,00**			**40.204.000,00**			**23.412.000,00**			13.124.000			-			3.640.000														
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksanannya perumusan kebijakan Pelaksanaan PUG	5	Pkt	75.000.000,00	4	Pkt	15.000.000,00	1	Keg	15.120.000,00	1	Keg	9.156.000,00	1	Keg	5.100.000			-			840.000	2	Keg	15.096.000	6	Keg	30.096.000	120	%	40,13	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi PUG	5	Keg	75.000.000,00	4	Pkt	45.196.850,00	1	Keg	25.084.000,00	1	Keg	14.256.000,00	1	Keg	8.024.000			-			2.800.000	2	Keg	25.080.000	6	Keg	70.276.850	120	%	93,70	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				**726.673.600,00**			**813.264.800,00**			**39.715.000,00**			**12.012.800,00**			12.559.300			-			15.103.000											
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota				**195.000.000,00**			**176.903.600,00**			**0,00**			**0,00**			-			-			-											
			Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Advokasi dan Pendampingan Perempuan	1	Keg	195.000.000,00	1	Keg	176.903.600,00	1	Keg	0,00	1	Keg	0,00	1	Keg	-			-			-	2	Keg	-	3	Keg	176.903.600	300	%	90,72	
			Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/kota				**304.000.000,00**			**212.120.400,00**			**19.993.000,00**			**10.212.800,00**			-			-			9.753.000											
			Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban kekerasan kewenangan Kabupaten Barito Selatan	9	Keg	304.000.000,00	7	Keg	212.120.400,00	1	Thn	19.993.000,00	1	Thn	10.212.800,00	1	Thn	-			-			9.753.000	2	Thn	19.965.800	9	Thn	232.086.200	100	%	76,34	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				**227.673.600,00**			**424.240.800,00**			**19.722.000,00**			**1.800.000,00**			12.559.300			-			5.350.000											
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban KekerasanKewenangan Kabupaten/Kota	Tersediannya Layanan Pengaduan	15	Keg	207.716.600,00	12	Keg	212.120.400,00	1	Thn	19.722.000,00	1	Thn	1.800.000,00	1	Thn	12.559.300			-			5.350.000	2	Thn	19.709.300	14	Thn	231.829.700	93,3333	%	111,61	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersediannya Layanan Pengaduan	1	Keg	19.957.000,00	1	Keg	212.120.400,00	1	Thn	0,00	1	Thn	0,00	1	Thn	-			-			-	2	Thn	-	3	Thn	212.120.400	300	%	1062,89	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				**179.829.800,00**			**123.945.800,00**			**169.835.000,00**			**35.416.000,00**			10.100.000			81.001.000			22.318.000											
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota				**114.489.800,00**			**123.945.800,00**			**169.835.000,00**			**35.416.000,00**			-			64.606.000			22.318.000											
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksannaya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	29	Keg	114.489.800,00	24	Keg	88.945.800,00	1	Thn	104.495.000,00	1	Thn	11.010.000,00	1	Thn	-			64.606.000			7.879.000	2	Thn	83.495.000	26	Thn	172.440.800	89,6552	%	150,62	
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				**65.340.000,00**			**35.000.000,00**			**210.392.000,00**			**58.116.000,00**			10.100.000			16.395.000			45.915.000											
			Pelaksanaan Penyediaan layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksannaya Layanan Konfrehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten Barito Selatan	5	thn	65.340.000,00	4	Thn	35.000.000,00	1	Thn	65.340.000,00	1	Thn	24.406.000,00	1	Thn	10.100.000			16.395.000			14.439.000	2	Thn	65.340.000	6	Thn	100.340.000	120	%	153,57	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER				**10.021.850,00**			**88.945.800,00**			**104.495.000,00**			**0,00**			-			-			-											
			Pengumpulan , Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota				**10.021.850,00**			**88.945.800,00**			**104.495.000,00**			**0,00**			-			-			-											
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenngan Kabupaten Kota	Tersediannya Data Gender dan Anak	1	Keg	10.021.850,00	1	Keg	88.945.800,00	0	Keg	104.495.000,00	0	Keg	0,00	0	Keg	-			-			-	0	Keg	-	1	Keg	88.945.800	100	%	887,52	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				**19.999.800,00**			**177.891.600,00**			**208.990.000,00**			**0,00**			-			-			-											

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
									K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K		
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
							Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten / Kota			**10.012.800,00**			**88.945.800,00**			**104.495.000,00**			**0,00**		-		-		-																
							Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersediannya Data Gender dan Anak	1	Keg	10.012.800,00	1	Keg	88.945.800,00	0	Keg	104.495.000,00	0	Keg	0,00	0	Keg	-		-			-	0	Keg	-	1	Keg	88.945.800	100	%	888,32	
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			**9.987.000,00**			**88.945.800,00**			**104.495.000,00**			**0,00**		-		-		-																
							Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Tersediannya Data Gender dan Anak	1	Keg	9.987.000,00	1	Keg	88.945.800,00	0	Keg	104.495.000,00	0	Keg	0,00	0	Keg	-		-			-	0	Keg	-	1	Keg	88.945.800	100	%	890,62	
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			**161.053.800,00**			**327.108.800,00**			**145.052.000,00**			**33.710.000,00**		27.435.000		41.982.000		31.476.000																
							Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**161.053.800,00**			**327.108.800,00**			**145.052.000,00**			**33.710.000,00**		27.435.000		41.982.000		31.476.000																
							Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Layangan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten Barito Selatan	25	pkt	161.053.800,00	20	Pkt	327.108.800,00	1	Thn	145.052.000,00	1	Thn	33.710.000,00	1	Thn	27.435.000		41.982.000			31.476.000	2	Thn	134.603.000	22	Thn	461.711.800	88	%	286,68	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																																	**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**
		2	**9**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**86.953.259.600**					**16.739.741.720**										5.640.549.912												
		2	**9**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**1.617.850.000**					**253.164.050**										77.636.870												
		2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	25	Dokumen	749.500.000	20	Dokumen	484.730.950	5	Dokumen	126.569.850	2	Dokumen	32.935.391	1	Dokumen	44.068.536	1	Dokumen	21.163.893	1	Dokumen	25.675.350	5	Dokumen	123.843.170	25	Dokumen	608.574.120	100,00	%	81,20	
		2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan	30	Laporan	868.350.000	20	Dokumen	740.954.927	10	Laporan	126.594.200	3	Laporan	3.653.100	3	Laporan	40.847.420	2	]	26.569.160	2	Laporan	51.961.520	10	Laporan	123.031.200	30	Laporan	863.986.127	100,00	%	99,50	
		2	**9**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**79.486.144.600**					**14.674.787.668**							-			4.964.792.265												
		2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	60	Bulan	78.886.144.600	48	Bulan	57.177.065.136	12	Bulan	14.432.771.668	3	Bulan	2.293.177.647	3	Bulan	3.572.629.981	3	Bulan	3.189.564.409	3	Bulan	4.809.168.765	12	Bulan	13.864.540.802	60	Bulan	61.986.233.901	100,00	%	78,58	
		2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	60	Bulan	250.000.000	48	Bulan	99.678.000	12	Bulan	164.076.000	3	Bulan	8.767.000	3	Bulan	20.274.000	3	Bulan	12.809.000	3	Bulan	122.166.000	12	Bulan	164.016.000	60	Bulan	221.844.000	100,00	%	88,74	
		2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeateran SKPD	Tersedianya Dokumen Keuangan	95	Dokumen	350.000.000	76	Dokumen	627.437.850	19	Dokumen	77.940.000	5	Dokumen	-	5	Dokumen	5.601.030	5	Dokumen	36.860.000	4	Dokumen	33.457.500	19	Dokumen	75.918.530	95	Dokumen	660.895.350	100,00	%	188,83	
		2	**9**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**325.000.000**					**95.510.000**										69.144.000												
		2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Data Aset Dinas	25	Dokumen	325.000.000	20	Dokumen	48.061.700	5	Dokumen	95.510.000	1	Dokumen	7.826.000	1	Dokumen	16.784.000	1	Dokumen	1.725.000	2	Dokumen	69.144.000	5	Dokumen	95.479.000	25	Dokumen	117.205.700	100,00	%	36,06	
		2	**9**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**2.108.000.000**					**428.600.000**										139.517.000												
		2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Data Kepegawaian ASN dan Tenaga Kontrak	40	Dokumen	2.108.000.000	32	Dokumen	3.931.050.000	8	Dokumen	428.600.000	2	Dokumen	69.578.000	2	Dokumen	114.186.000	2	Dokumen	104.661.000	2	Dokumen	139.517.000	8	Dokumen	427.942.000	40	Dokumen	4.070.567.000	100,00	%	193,10	
		2	**9**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**2.236.000.000**					**1.068.680.923**										346.876.406												
		2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	65	Buah	50.000.000	52	Buah	54.134.000	13	Buah	32.000.000	4	Buah	5.294.000	0	Buah	-	5	Buah	4.706.000	4	Buah	22.000.000	13	Buah	32.000.000	65	Buah	76.134.000	100,00	%	152,27	
		2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	15	Unit	175.000.000	12	Unit	141.420.000	3	Unit	191.411.000	1	Unit	9.687.500	1	Unit	121.150.000	0	Unit	-	0	Unit	60.123.500	2	Unit	190.961.000	14	Unit	201.543.500	93,33	%	115,17	
		2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	75	Paket	206.000.000	60	Paket	41.172.000	15	Paket	642.649.923	4	Paket	139.374.194	4	Paket	152.727.383	4	Paket	103.125.557	3	Paket	212.423.806	15	Paket	607.650.940	75	Paket	253.595.806	100,00	%	123,10	
		2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Dokumen Cetakan/Penggandaan	35	Paket	225.000.000	28	Paket	103.900.000	7	Paket	25.000.000	2	Paket	6.225.000	1	Paket	12.500.000	4	Paket	6.275.000	0	Paket	-	7	Paket	25.000.000	35	Paket	103.900.000	100,00	%	46,18	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
									Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 8 x100%			16
		2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	3600	Eks	30.000.000	2.880	Eks	26.000.000	720	Eks	37.620.000	180	Eks	-	180	Eks	1.500.000	180	Eks	1.500.000	180	Eks	32.779.500	720	Eks	35.779.500	3600	Eks	58.779.500	100,00	%	195,93	
		2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Tamu	118.800	Snack	300.000.000	59.400	Snack	567.800.000	59.400	Snack	50.000.000	14.850	Snack	-	14.850	Snack	21.275.000	14.850	Snack	16.170.000	14850	Snack	12.555.000	59.400	Snack	50.000.000	118800	Snack	580.355.000	100,00	%	193,45	
		2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pertemuan, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	175	Kali	1.250.000.000	140	Kali	913.960.300	35	Kali	90.000.000	0	Kali	-	14	Kali	39.824.900	17	Kali	40.243.500	4	Kali	6.994.600	35	Kali	87.063.000	175	Kali	920.954.900	100,00	%	73,68	
		2	**9**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.180.265.000**						**157.199.079**											42.583.371											
		2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat kedinasan	250	Surat	5.000.000	200	Surat	4.000.000	50	Surat	1.000.000	10	Surat	-	30	Surat	1.000.000	10	Surat	-	0	Surat	-	50	Surat	1.000.000	250	Surat	4.000.000	100,00	%	80,00	
		2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas telepon, air dan listrik	60	Bulan	1.175.265.000	48	Bulan	546.441.533	12	Bulan	156.199.079	3	Bulan	33.370.158	3	Bulan	35.520.551	3	Bulan	36.206.371	3	Bulan	42.583.371	12	Bulan	147.680.451	60	Bulan	589.024.904	100,00	%	50,12	
		2	**9**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**735.053.150**						**61.800.000**											11.395.600											
		2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas, kendaraan operasional dan pajak perizinan kendaraan dinas	100	Unit	500.000.000	80	Unit	234.650.000	12	Unit	8.000.000	-	Unit	-	10	Unit	5.271.100	1	Unit	480.000	1	Unit	1.395.600	12	Unit	7.146.700	92	Unit	236.045.600	92,00	%	47,21	
		2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	60	Bulan	235.053.150	48	Bulan	145.420.000	12	Bulan	53.800.000	3	Bulan	-	3	Bulan	39.950.000	3	Bulan	3.050.000	3	Bulan	10.000.000	12	Bulan	53.000.000	60	Bulan	155.420.000	100,00	%	66,12	
		2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**				**307.500.000**						**42.600.000**											18.000.000											
		2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**307.500.000**						**42.600.000**											18.000.000											
		2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Terfasilitasinya Pelaksanaan Kostratani	30	Klp.	307.500.000	24	Klp	471.450.000	6	Klp.	42.600.000	-	Klp	-	-	Klp	-	4	Klp	24.600.000	2	Klp	18.000.000	6	Klp	42.600.000	30	Klp	489.450.000	100,00	%	159,17	
		2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				**1.315.000.000**						**545.679.000**											430.510.266											
		2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**				**950.000.000**						**390.000.000**											342.322.400											
		2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga & NBM	60	Laporan	150.000.000	48	Laporan	270.973.000	12	Laporan	310.000.000	6	Laporan	4.725.000	2	Laporan	6.335.000	2	Laporan	8.018.000	2	Laporan	283.283.400	12	Laporan	302.361.400	60	Laporan	554.256.400	100,00	%	369,50	
		2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terbinanya KWT	10	Kelompok	700.000.000	8	Kelompok	186.271.000	2	Kelompok	60.000.000	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-	1	Kelompok	961.000	1	Kelompok	59.039.000	2	Kelompok	60.000.000	10	Kelompok	245.310.000	100,00	%	35,04	
		2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Informasi stok & pasokan	60	Laporan	100.000.000	48	Laporan	138.327.000	12	Laporan	20.000.000	3	Laporan	3.608.000	3	Laporan	9.615.100	3	Laporan	6.776.900	3	Laporan	-	12	Laporan	20.000.000	60	Laporan	138.327.000	100,00	%	138,33	
		2	**9**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**				**365.000.000**						**155.679.000**											88.187.866											
		2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terbinanya KWT	30	Kelompok	240.000.000	24	Kelompok	279.292.000	6	Kelompok	130.679.000	3	Kelompok	19.625.600	0	Kelompok	8.301.200	2	Kelompok	7.563.600	1	Kelompok	88.187.866	6	Kelompok	123.678.266	30	Kelompok	367.479.866	100,00	%	153,12	
		2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Tersedianya Data Konsumsi Pangan	5	Laporan	125.000.000	4	Laporan	47.507.000	4	Laporan	25.000.000	1	Laporan	798.200	1	Laporan	19.956.700	1	Laporan	3.993.800	1	Laporan	-	4	Laporan	24.748.700	8	Laporan	47.507.000	160,00	%	38,01	
		2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**				**730.000.000**						**146.000.000**											58.077.000											
		2	**9**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**				**100.000.000**						**20.000.000**											3.458.000											
		2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusun peta kerentanan & ketahanan pangan	35	Dokumen	100.000.000	28	Dokumen	75.262.000	7	Dokumen	20.000.000	2	Dokumen	1.084.000	1	Dokumen	14.532.700	1	Dokumen	924.000	3	Dokumen	3.458.000	7	Dokumen	19.998.700	35	Dokumen	78.720.000	100,00	%	78,72	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																		
									K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K				
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 :13			15 = 14 / 6 x100%			16	
		2	9	04	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**630.000.000**					**126.000.000**											54.619.000																	
		2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok	75	Kelompok	150.000.000	60	Kelompok	18.241.000	15	Kelompok	30.000.000	-	Kelompok	5.202.000	5	Kelompok	13.752.000	5	Kelompok	5.506.000	5	Kelompok	4.369.000	15	Kelompok	28.829.000	75	Kelompok	22.610.000	100,00	%	15,07	
		2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	5	Laporan	480.000.000	4	Laporan	76.292.500	1	Laporan	96.000.000	-	Laporan	5.873.000	0	Laporan	31.096.700	0	Laporan	8.586.000	1	Laporan	50.250.000	1	Laporan	95.805.700	5	Laporan	126.542.500	100,00	%	26,36	
		2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**				**125.000.000**					**25.000.000**											5.655.000																	
		2	**9**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**				**125.000.000**					**25.000.000**											5.655.000																	
		2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Keamanan Pangan	5	Laporan	125.000.000	4	Laporan	21.196.000	1	Laporan	25.000.000	-	Laporan	877.000	0	Laporan	16.384.000	0	Laporan	1.562.000	1	Laporan	5.655.000	1	Laporan	24.478.000	5	Laporan	26.851.000	100,00	%	21,48	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																																					**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
		2	**10**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**				802.687.440			713.158.600			44.420.000			7.409.000			18.466.000			5.325.000			8.337.000													
		2	**10**	**04**	**2.01**	**00**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				802.687.440			713.158.600			44.420.000			7.409.000			18.466.000			5.325.000			8.337.000													
		2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	426.001.740	4	Dokumen	352.131.600	1	Dokumen	41.710.000	0	Dokumen	7.409.000	0	Dokumen	18.466.000	0	Dokumen	5.325.000	1	Dokumen	6.317.000	1	Dokumen	37.517.000	5	Dokumen	389.648.600	100	%	91,47	
		2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	376.685.700	4	Dokumen	361.027.000	1	Dokumen	2.710.000	0	Berita Acara	-	0	Berita Acara	-	0	Berita Acara	-	2	Berita Acara	2.020.000	2	Dokumen	2.020.000	6	Dokumen	363.047.000	120	%	96,38	
		2	**10**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH**				499.926.321			344.115.194			48.687.555			8.865.400			23.344.105			12.028.050			37.718.000													
		2	**10**	**06**	**2.01**	**00**	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah**				499.926.321			344.115.194			48.687.555			8.865.400			23.344.105			12.028.050			37.718.000													
		2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Dokumen	391.525.105	4	Dokumen	257.995.594	1	Dokumen	28.772.105	0	Dokumen	972.000	0	Dokumen	13.207.105	0	Dokumen	11.055.000	1	Dokumen	37.718.000	1	Dokumen	62.952.105	5	Dokumen	320.947.699	100	%	81,97	
		2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	5	Dokumen	58.194.716	4	Dokumen	37.123.100	1	Dokumen	19.915.450	0	Dokumen	7.893.400	0	Dokumen	10.137.000	0	Dokumen	973.050	1	Dokumen	-	1	Dokumen	19.003.450	5	Dokumen	56.126.550	100	%	96,45	
		2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam	5	Dokumen	50.206.500	4	Dokumen	48.996.500	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen	-	4	Dokumen	48.996.500	80	%	97,59	
		2	**10**	**09**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**				748.530.558			668.942.150			39.396.155			12.378.300			16.184.000			8.006.000			2.632.000													
		2	**10**	**09**	**2.01**	**00**	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**				748.530.558			668.942.150			39.396.155			12.378.300			16.184.000			8.006.000			2.632.000													
		2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terlaksanannya Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	5	Dokumen	748.530.558	5	Dokumen	668.942.150	1	Dokumen	39.396.155	0	Dokumen	12.378.300	0	Dokumen	16.184.000	0	Dokumen	8.006.000	1	Dokumen	2.632.000	1	Dokumen	39.200.300	6	Dokumen	708.142.450	120	%	94,60	
		2	**10**	**10**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**				595.812.600			546.705.700			9.411.000			61.000			-			5.480.000			3.870.000													

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
									Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan			
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 :13			15 = 14 / 6 x100%			16	
		2	**10**	**10**	**2.01**	**00**	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**				595.812.600			546.705.700			9.411.000			61.000			-			5.480.000			3.870.000													
		2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	595.812.600	4	Dokumen	546.705.700	1	Dokumen	9.411.000	0	Dokumen	61.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	5.480.000	1	Dokumen	3.870.000	1	Dokumen	9.411.000	5	Dokumen	556.116.700	100	%	93,34	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																																		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota																																
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5	Dok	25.000.000	4	Dok	19.500.000	1	Dok	5.000.000	0	Dok	2.722.000	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	2.278.000	1	Dok	5.000.000	5	Dok	24.500.000	100	%	98,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5	Dok	35.000.000	4	Dok	27.700.000	1	Dok	7.000.250	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	10.154.000	1	Dok	10.154.000	5	Dok	37.854.000	100	%	108,15	
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	-	0	Dok	2.632.000	1	Dok	2.368.000	1	Dok	-	0	Dok	-	2	Dok	5.000.000	2	Dok	5.000.000	200	%	#DIV/0!	
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dok	4.216.000	0	Dok	-	1	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	2.450.000	1	Dok	6.613.000	1	Dok	9.063.000	1	Dok	9.063.000	100	%	214,97	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja SKPD	4	Dok	23.000.000	0	Dok	-	4	Dok	-	3	Dok	9.500.000	0	Dok	4.500.000	0	Dok	4.500.000	1	Dok	23.000.000	4	Dok	41.500.000	4	Dok	41.500.000	100	%	180,43	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	18.737.237.680	36	Bulan	11.359.827.393	12	Bulan	3.786.609.131	3	Bulan	540.767.872	3	Bulan	1.346.420.454	3	Bulan	1.039.115.179	3	Bulan	701.729.976	12	Bulan	3.628.033.481	48	Bulan	14.987.860.874	80	%	79,99	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah																																
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	150.000.000	36	Bulan	81.900.000	12	Bulan	27.359.220	3	bulan	7.811.000	3	Bulan	4.100.000	3	Bulan	10.491.500	3	Bulan	51.021.500	12	bulan	73.424.000	48	bulan	155.324.000	80	%	103,55	
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	75.000.000	36	Bulan	42.000.000	12	Bulan	10.000.000	3	bulan	1.230.000	3	Bulan	3.505.000	3	Bulan	4.355.000	3	Bulan	10.910.000	12	bulan	20.000.000	48	bulan	62.000.000	80	%	82,67	
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan / surat kabar	60	Bulan	60.000.000	36	Bulan	9.840.000	12	Bulan	10.560.000	0	bulan	-	3	Bulan	1.200.000	3	Bulan	-	3	Bulan	9.360.000	9	bulan	10.560.000	45	bulan	20.400.000	75	%	34,00	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu	60	Bulan	375.000.000	36	Bulan	225.000.000	12	Bulan	25.000.000	3	bulan	5.100.000	3	Bulan	14.150.000	3	Bulan	7.700.000	3	Bulan	19.450.000	12	bulan	46.400.000	48	bulan	271.400.000	80	%	72,37	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Dan Dalam Daerah	60	Bulan	720.275.000	36	Bulan	406.071.000	12	Bulan	79.250.000	3	bulan	31.673.000	3	Bulan	23.208.600	3	Bulan	24.292.400	3	Bulan	81.652.000	12	bulan	160.826.000	48	bulan	566.897.000	80	%	78,71	
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Berbasis Elektronik	24	Bulan	43.538.000	0	Bulan	-	12	Bulan	21.769.000	3	bulan	7.300.000	3	Bulan	7.580.000	3	Bulan	6.300.000	3	Bulan	6.300.000	12	bulan	27.480.000	12	bulan	27.480.000	50	%	63,12	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	12.500.000	36	Bulan	7.500.000	12	Bulan	2.500.000	3	bulan	1.000.000	3	Bulan	1.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	12	bulan	2.500.000	48	bulan	10.000.000	80	%	80,00	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	560.000.000	36	Bulan	328.500.000	12	Bulan	112.755.000	3	bulan	20.989.178	3	Bulan	22.449.638	3	Bulan	21.378.472	3	Bulan	48.644.886	12	bulan	113.462.174	48	bulan	441.962.174	80	%	78,92	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	Bulan	918.200.000	0	Bulan	-	12	Bulan	405.972.500	3	bulan	110.775.000	3	Bulan	143.600.000	3	Bulan	99.775.000		Bulan	113.435.000	9	bulan	467.585.000	9	bulan	467.585.000	37,5	%	50,92	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional lapangan	60	Bulan	50.000.000	36	Bulan	49.000.000	12	Bulan	20.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	6.000.000	3	Bulan	5.000.000	3	Bulan	36.143.500	12	Bulan	47.143.500	48	Bulan	96.143.500	80	%	192,29	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12	Bulan	170.000.000	0	Bulan	-	0	Bulan		3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	80.329.500	3	Bulan	86.329.500	12	Bulan	166.659.000	12	Bulan	166.659.000	100	%	98,03	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup																																
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																																
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		1	Dok	200.000.000	-	0	-	0	Dok	-	0	Dok	5.131.400	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	330.284.482	1	Dok	335.415.882	1	Dok	335.415.882	100	%	167,71	
			Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup																																
			Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota																																
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara		24	Bulan	50.000.000	-	Bulan	-	12	Bulan	22.000.000	3	bulan	13.279.000	3	Bulan	7.171.000	3	Bulan	4.500.000	3	Bulan	19.991.000	12	bulan	44.941.000	12	bulan	44.941.000	50	%	89,88	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		24	Bulan	100.000.000	-	Bulan	-	12	Bulan	49.534.000	3	bulan	30.560.800	3	Bulan	13.208.800	3	Bulan	5.025.000	3	Bulan	45.517.400	12	bulan	94.312.000	12	bulan	94.312.000	50	%	94,31	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota		60	Bulan	375.000.000	36	Bulan	225.000.000	12	Bulan	65.086.258	3	bulan	8.599.000	3	Bulan	30.178.500	3	Bulan	29.113.000	3	Bulan	61.990.000	12	bulan	129.880.500	48	bulan	354.880.500	80	%	94,63	
			Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota																																
			Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		60	Bulan	100.000.000	36	Bulan	75.000.000	12	Bulan	6.260.500	3	bulan	6.448.750	3	Bulan	-	3	Bulan	6.795.000	3	Bulan	11.756.250	12	bulan	25.000.000	48	bulan	100.000.000	80	%	100,00	
			Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota																																
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		60	Bulan	250.000.000	36	Bulan	147.000.000	12	Bulan	48.000.000	3	bulan	4.500.000	3	Bulan	43.078.000	3	Bulan	12.408.800	3	Bulan	15.932.800	12	bulan	75.919.600	48	bulan	222.919.600	80	%	89,17	
			Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)																																
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		60	Bulan	25.000.000	36	Bulan	14.100.000	12	Bulan	748.850	3	bulan	11.600.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	12	bulan	11.600.000	48	bulan	25.700.000	80	%	102,80	
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		60	Bulan	25.000.000	36	Bulan	14.550.000	12	Bulan	5.000.000	3		-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	24.972.200	12		24.972.200	48		39.522.200	80	%	158,09	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)																																
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh																																
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH		60	Bulan	200.000.000	36	Bulan	120.000.000	12	Bulan	38.110.000	3	bulan	10.511.400	3	Bulan	6.151.400	3	Bulan	9.022.000	3	Bulan	24.042.500	12	bulan	49.727.300	48	bulan	169.727.300	80	%	84,86	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Pengawasan Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		60	Bulan	150.000.000	36	Bulan	89.400.000	12	Bulan	29.675.000	3	bulan	9.289.400	3	Bulan	4.824.000	3	Bulan	9.998.000	3	Bulan	13.418.000	12	bulan	37.529.400	48	bulan	126.929.400	80	%	84,62	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		60	Bulan	50.000.000	36	Bulan	30.000.000	12	Bulan	8.530.000	3	bulan	13.345.400	3	Bulan	4.657.700	3	Bulan	9.772.000	3	Bulan	26.016.500	12	bulan	53.791.600	48	bulan	83.791.600	80	%	167,58	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH																																	
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang erkait dengan PPLH																																	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional dan hak Kearifan		24	Bulan	20.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	10.000.000	3	bulan	3.900.000	3	Bulan	8.720.000	3	Bulan	3.900.000	3	Bulan	3.990.000	12	bulan	20.510.000	12	bulan	20.510.000	50	%	102,55	
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH																																	
			Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan		24	Bulan	30.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	13.000.000	3	bulan	3.900.000	3	Bulan	4.185.000	3	Bulan	6.820.000	3	Bulan	9.275.000	12	bulan	24.180.000	12	bulan	24.180.000	50	%	80,60	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat																																	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																																	
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		24	Bulan	80.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	37.000.000	3	bulan	4.350.000	3	Bulan	10.568.000	3	Bulan	8.815.000	3	Bulan	22.891.800	12	bulan	46.624.800	12	bulan	46.624.800	50	%	58,28	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		24	Bulan	70.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	31.020.000	3	bulan	11.686.700	3	Bulan	3.450.000	3	Bulan	3.450.000	3	Bulan	16.233.100	12	bulan	34.819.800	12	bulan	34.819.800	50	%	49,74	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat																																	
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota																																	
			Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam		24	Bulan	10.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	5.000.000	3	bulan	3.135.400	3	Bulan	9.806.200	3	Bulan	6.660.200	3	Bulan	390.000	12	bulan	19.991.800	12	bulan	19.991.800	50	%	199,92	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup																																	
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota																																	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota		24	Bulan	10.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	5.000.000	3	bulan	5.309.400	3	Bulan	-	3	Bulan	7.458.000	3	Bulan	12.225.400	12	bulan	24.992.800	12	bulan	24.992.800	50	%	249,93	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan / atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan		24	Bulan	60.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	29.740.000	3	bulan	6.458.000	3	Bulan	5.536.000	3	Bulan	8.942.100	3	Bulan	10.823.000	12	bulan	31.759.100	12	bulan	31.759.100	50	%	52,93	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Program Pengelolaan Persampahan																															
			Pengelolaan Sampah																															
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota		1	Dok	100.000.000	-	Dok	-	0	Dok		0	Dok	24.045.400	0	Dok	3.385.700	0	Dok	38.414.100	1	Dok	34.059.400	1	Dok	99.904.600	1	Dok	99.904.600	100	%	99,90	
			Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali		24	Bulan	70.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	32.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	8.584.300	3	Bulan	10.799.500	3	Bulan	19.555.000	12	Bulan	38.938.800	12	Bulan	38.938.800	50	%	55,63	
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST /		60	Bulan	15.447.500.000	36	Bulan	9.090.000.000	12	Bulan	2.817.230.890	3	Bulan	30.650.850	3	Bulan	49.168.600	3	Bulan	31.780.550	3	Bulan	239.839.740	12	Bulan	351.439.740	48	Bulan	9.441.439.740	80	%	61,12	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		24	Bulan	30.000.000	0	Bulan	-	12	12	14.192.000	3	Bulan	672.304.000	3	Bulan	768.347.000	3	Bulan	759.390.000	3	Bulan	898.328.750	12	Bulan	3.098.369.750	12	Bulan	3.098.369.750	50	%	10327,90	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		60	Bulan	750.000.000	36	Bulan	430.500.000	12	Bulan	143.301.000	3	Bulan	22.487.000	3	Bulan	16.299.600	3	Bulan	71.602.004	3	Bulan	268.926.200	12	Bulan	379.314.804	48	Bulan	809.814.804	80	%	107,98	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																															**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.	Meningkatnya Kelembagaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.																													
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Program , Kegiatan, Sub Kegiatan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah																													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	60	bulan		48	bulan		12	bulan	33.119.980	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	4.000.000				9	Bulan	4.000.000	57	Bulan	4.000.000	95	%	#DIV/0!	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dukcapil	60	bulan		48	bulan		12	bulan	2.749.736.378	3	bulan	529.685.134	3	bulan	823.726.526	3	bulan	653.603.969				9	Bulan	2.007.015.629	57	Bulan	2.007.015.629	95	%	#DIV/0!	
			Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kelembagaan Pelayanan Administrasi Kependudukan																													
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Kebijakan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	60	bulan		48	bulan		12	bulan	35.612.760	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-				9	Bulan	-	57	Bulan	-	95	%	#DIV/0!	
			Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Dokumen Kependudukan.																													
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Dinas Dukcapil.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	4.999.700	3	bulan	1.250.000	3	bulan	627.000	3	bulan	2.600.000				9	Bulan	4.477.000	57	Bulan	4.477.000	95	%	#DIV/0!	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya bahan pencetakan dokumen kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	429.659.870	3	bulan	-	3	bulan	36.317.000	3	bulan	11.120.000				9	Bulan	47.437.000	57	Bulan	47.437.000	95	%	#DIV/0!	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik kantor (ATK, Bahan Cetak, dll)	60	bulan		48	bulan		12	bulan	28.954.900	3	bulan	7.700.000	3	bulan	11.693.000	3	bulan	-				9	Bulan	19.393.000	57	Bulan	19.393.000	95	%	#DIV/0!	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Dukcapil.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	5.366.660	3	bulan	1.222.000	3	bulan	1.870.000	3	bulan	499.980				9	Bulan	3.591.980	57	Bulan	3.591.980	95	%	#DIV/0!	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Jasa Informasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui Media Cetak (surat kabar)	60	bulan		48	bulan		12	bulan	4.998.000	3	bulan	-	3	bulan	1.000.000	3	bulan	-				9	Bulan	1.000.000	57	Bulan	1.000.000	95	%	#DIV/0!	
			Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Jasa Alat Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Alat Pelindung Diri Pencegahan COVID-19	60	bulan		48	bulan		12	bulan	5.319.000	3	bulan	1.000.000	3	bulan	-	3	bulan	1.870.000				9	Bulan	2.870.000	57	Bulan	2.870.000	95	%	#DIV/0!	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan tercapainya target pelayanan Dokumen Kependudukan ke Luar Daerah dan Dalam Daerah.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	227.935.000	3	bulan	139.566.646	3	bulan	36.431.735	3	bulan	50.978.950				9	Bulan	226.977.331	57	Bulan	226.977.331	95	%	#DIV/0!	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Tersedianya Peralatan SIAK dan Peralatan Perekaman KTP dan Printer KTP-el dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait dokumen kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta dukungan manajemen.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	307.367.780	3	bulan	-	3	bulan	158.498.000	3	bulan	94.032.000				9	Bulan	252.530.000	57	Bulan	252.530.000	95	%	#DIV/0!	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Peralatan Kerja Pelayanan Administrasi dan Dokumen Kependudukan																															
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Kursi untuk Prasarana Kerja Pelayanan Administrasi dan Dokumen Kependudukan.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	3.850.000	3	bulan	-	3	bulan	3.850.000	3	bulan	-				9	Bulan	3.850.000	57	Bulan	3.850.000	95	%	#DIV/0!	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja (komputer) Pelayanan Administrasi Kependudukan	60	bulan		48	bulan		12	bulan	12.991.050	3	bulan	-	3	bulan	12.484.000	3	bulan	-				9	Bulan	12.484.000	57	Bulan	12.484.000	95	%	#DIV/0!	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.																															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pelayanan Surat Menyurat	60	bulan		48	bulan		12	bulan	1.920.000	3	bulan	600.000	3	bulan	600.000	3	bulan	600.000				9	Bulan	1.800.000	57	Bulan	1.800.000	95	%	#DIV/0!	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air, Sumber Daya Listrik, dan Jasa Internet Kantor Dukcapil	60	bulan		48	bulan		12	bulan	170.053.539	3	bulan	10.713.441	3	bulan	7.716.235	3	bulan	68.625.735				9	Bulan	87.055.411	57	Bulan	87.055.411	95	%	#DIV/0!	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Kantor, Sopir, Petugas Jaga Malam, Cleaning Service, Petugas Kebersihan, Operator Komputer (Gaji/Honorarium Pegawai Non PNS /Pegawai Kontrak) Dinas Dukcapil.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	195.600.000	3	bulan	32.600.000	3	bulan	65.200.000	3	bulan	16.300.000				9	Bulan	114.100.000	57	Bulan	114.100.000	95	%	#DIV/0!	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Peralatan Kerja Lainnya Dinas Dukcapil																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV												
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Tersedianya Mobil Dinas Operasional Lapangan yang handal, siap pakai untuk mendukung kelancaran tugas jemput bola Pelayanan Administrasi Kependudukan ke Desa-desa di Kabupaten Barito Selatan.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	22.444.650	3	bulan	12.550.000	3	bulan	1.400.000	3	bulan	3.400.000				9	Bulan	17.350.000	57	Bulan	17.350.000	95	%	#DIV/0!	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya jasa pemeliharaan Sarana Peralatan Kerja, Peralatan dan Mesin yang memadai dan handal untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pelayanan Adminduk.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	6.950.000	6	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	-				12	Bulan	-	60	Bulan	-	100	%	#DIV/0!	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Dukcapil	60	bulan		48	bulan		12	bulan	7.999.550	3	bulan	5.410.000	3	bulan	2.491.000	3	bulan	-				9	Bulan	7.901.000	57	Bulan	7.901.000	95	%	#DIV/0!	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang memadai nyaman dan aman	60	bulan		48	bulan		12	bulan	3.974.000	3	bulan	850.000	3	bulan	-	3	bulan	2.200.000				9	Bulan	3.050.000	57	Bulan	3.050.000	95	%	#DIV/0!	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.																														
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP elektronik per Satuan Penduduk, Rasio Penerbitan KK, KIA dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Penerbitan KIA.																														
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akurasi Data Kependudukan, Indek Kepuasan Masyarakat, dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	60	bulan		48	bulan		12	bulan	62.208.940	3	bulan	27.482.400	3	bulan	3.375.000	3	bulan	18.152.940				9	Bulan	49.010.340	57	Bulan	49.010.340	95	%	#DIV/0!	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan.																														
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penerbitan KTP elektronik	60	bulan		48	bulan		12	bulan	43.239.880	3	bulan	6.875.000	3	bulan	16.883.750	3	bulan	18.433.000				9	Bulan	42.191.750	57	Bulan	42.191.750	95	%	#DIV/0!	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Verifikasi Bantuan Sosial Penduduk Rentan.																														
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pengawasan Data Penduduk Rentan dan Bantuan Sosial Penduduk Rentan.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	4.999.900	3	bulan	1.230.400	3	bulan	1.150.000	3	bulan	1.200.000				9	Bulan	3.580.400	57	Bulan	3.580.400	95	%	#DIV/0!	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi ber Akta Kelahiran dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian.																														
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian.																														
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Pengesahan Anak, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dll)	60	bulan		48	bulan		12	bulan	63.459.840	3	bulan	18.487.400	3	bulan	35.650.800	3	bulan	8.337.500				9	Bulan	62.475.700	57	Bulan	62.475.700	95	%	#DIV/0!	
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Akta Perkawinan)																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp									
														Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Meningkatnya Jumlah Pasangan Keluarga Prasejahtera Umat Muslim di Kabupaten Barito Selatan yang memiliki Dokumen Akta Nikah/Buku Nikah.	60	bulan		48	bulan		12	bulan	102.699.900	3	bulan	31.425.000	3	bulan	19.210.000	3	bulan	37.345.000				9	Bulan	87.980.000	57	Bulan	87.980.000	95	%	#DIV/0!	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Akses Data Kependudukan dan Instansi/Lembaga yang menandatangani kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik.																														
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan dan Instansi yangmenandatangani Kerjasama dan melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Data.																														
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan dan Instansi yangmenandatangani Kerjasama dan melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan	60	bulan		48	bulan		12	bulan	32.484.820	3	bulan	6.494.000	3	bulan	11.667.200	3	bulan	10.109.600				9	Bulan	28.270.800	57	Bulan	28.270.800	95	%	#DIV/0!	
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya Data Instansi yang telah melaksanakan penandatanganan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk pelayanan Publik	60	bulan		48	bulan		12	bulan	50.399.960	3	bulan	19.401.600	3	bulan	6.367.400	3	bulan	17.333.900				9	Bulan	43.102.900	57	Bulan	43.102.900	95	%	#DIV/0!	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																														**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																														
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																														
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	21.370.004.280	48	Bulan	17.096.914.424	12	Bulan	4.120.653.018	3	Bulan	909.943.640	3	Bulan	1.017.085.732	3	Bulan	1.138.444.992	3	Bulan	1.026.359.310	12	Bulan	4.091.833.674	60	Bulan	21.188.748.098	100	%	99,15	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	Bulan	150.000.000	48	Bulan	100.820.000	12	Bulan	80.610.000	3	Bulan	-	3	Bulan	24.247.200	3	Bulan	8.300.000	3	Bulan	48.041.400	12	Bulan	80.588.600	60	Bulan	181.408.600	100	%	120,94	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																														
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Bulan	35.000.000	48	Bulan	20.000.000	12	Bulan	15.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	2.945.000	3	Bulan	4.935.000	3	Bulan	7.120.000	12	Bulan	15.000.000	60	Bulan	35.000.000	100	%	100,00	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																														
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	60	Bulan	34.900.000	0	Bulan	-	12	Bulan	99.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	32.800.000	3	Bulan	-	3	Bulan	66.000.000	12	Bulan	98.800.000	12	Bulan	98.800.000	20	%	283,09	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																														
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan	25.000.000	48	Bulan	18.030.000	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	3.578.500	3	Bulan	-	3	Bulan	1.421.000	12	Bulan	4.999.500	60	Bulan	23.029.500	100	%	92,12	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	120.000.000	48	Bulan	80.000.000	12	Bulan	50.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	26.924.350	3	Bulan	6.479.000	3	Bulan	10.397.650	12	Bulan	43.801.000	60	Bulan	123.801.000	100	%	103,17	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	103.000.000	48	Bulan	81.000.000	12	Bulan	40.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	9.894.300	3	Bulan	4.420.010	3	Bulan	25.685.000	12	Bulan	39.999.310	60	Bulan	120.999.310	100	%	117,48	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersediannya bahan bacaan / surat kabar	60	Bulan	52.000.000	48	Bulan	31.200.000	12	Bulan	12.750.000	3	Bulan	-	3	Bulan	10.850.000	3	Bulan	-	3	Bulan	1.900.000	12	Bulan	12.750.000	60	Bulan	43.950.000	100	%	84,52	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I			II			III			IV																					
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 *13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu	60	Bulan	170.000.000	12	Bulan	114.000.000	12	Bulan	83.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	16.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	67.000.000	12	Bulan	83.000.000	24	Bulan	197.000.000	40	%	115,88	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	60	Bulan	1.315.000.000	48	Bulan	951.750.000	12	Bulan	363.769.250	3	Bulan	-	3	Bulan	126.156.360	3	Bulan	119.573.200	3	Bulan	118.039.690	12	Bulan	363.769.250	60	Bulan	1.315.519.250	100	%	100,04	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	Bulan	35.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	34.220.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	31.340.390	12	Bulan	31.340.390	12	Bulan	31.340.390	20	%	89,54	
			Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel Kantor	60	Bulan	63.900.000	0	Bulan	-	12	Bulan	55.900.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	55.890.000	12	Bulan	55.890.000	12	Bulan	55.890.000	20	%	87,46	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor mesin lainnya	60	Bulan	56.400.000	0	Bulan	-	12	Bulan	54.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	54.500.000	12	Bulan	54.500.000	12	Bulan	54.500.000	20	%	96,63	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	18.000.000	48	Bulan	13.250.000	12	Bulan	1.615.000	3	Bulan	-	3	Bulan	1.150.000	3	Bulan	420.000	3	Bulan	44.000	12	Bulan	1.614.000	60	Bulan	14.864.000	100	%	82,58	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	345.000.000	48	Bulan	286.000.000	12	Bulan	68.000.000	3	Bulan	8.940.586	3	Bulan	14.696.062	3	Bulan	21.722.285	3	Bulan	19.436.427	12	Bulan	64.795.360	60	Bulan	350.795.360	100	%	101,68	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	41.700.000	48	Bulan	32.000.000	12	Bulan	8.110.000	3	Bulan	-	3	Bulan	6.503.975	3	Bulan	1.261.325	3	Bulan	316.000	12	Bulan	8.081.300	60	Bulan	40.081.300	100	%	96,12	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	3.100.000.000	48	Bulan	2.325.000.000	12	Bulan	905.810.000	3	Bulan	196.500.000	3	Bulan	230.362.500	3	Bulan	130.132.500	3	Bulan	332.600.000	12	Bulan	889.595.000	60	Bulan	3.214.595.000	100	%	103,70	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	Bulan	60.000.000	12	Bulan	35.000.000	12	Bulan	51.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	22.481.500	3	Bulan	-	3	Bulan	23.938.200	12	Bulan	46.419.700	24	Bulan	81.419.700	40	%	135,70	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	Bulan	25.000.000	48	Bulan	15.000.000	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	2.790.000	3	Bulan	1.850.000	3	Bulan	360.000	12	Bulan	5.000.000	60	Bulan	20.000.000	100	%	80,00	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60	Bulan	275.000.000	48	Bulan	210.000.000	12	Bulan	65.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	42.920.000	3	Bulan	14.572.000	3	Bulan	7.500.000	12	Bulan	64.992.000	60	Bulan	274.992.000	100	%	100,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	Bulan	79.964.200	48	Bulan	29.964.200	12	Bulan	80.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	15.327.000	3	Bulan	4.965.000	3	Bulan	55.000.000	12	Bulan	75.292.000	60	Bulan	105.256.200	100	%	131,63	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	Bulan	40.000.000	48	Bulan	20.000.000	12	Bulan	20.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	10.650.000	3	Bulan	-	3	Bulan	9.350.000	12	Bulan	20.000.000	60	Bulan	40.000.000	100	%	100,00	
			Penataan Organisasi																																
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60	Bulan	46.000.000	48	Bulan	31.000.000	12	Bulan	15.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	2.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	12.990.000	12	Bulan	14.990.000	60	Bulan	45.990.000	100	%	99,98	
			PROGRAM PENATAAN DESA																																
			Penyelenggaraan Penataan Desa																																
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	60	Bulan	80.000.000	48	Bulan	60.000.000	12	Bulan	20.000.000	3	Bulan	6.000.000	3	Bulan	12.721.610	3	Bulan	-	3	Bulan	1.278.000	12	Bulan	19.999.610	60	Bulan	79.999.610	100	%	100,00	
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	60	Bulan	878.102.488	0	Bulan	-	12	Bulan	878.102.488	3	Bulan	-	3	Bulan	249.430.160	3	Bulan	172.374.112	3	Bulan	191.241.760	12	Bulan	613.046.032	12	Bulan	613.046.032	20	%	69,81	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV											
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA																															
			Fasilitasi Kerja sama antar Desa																															
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	60	Bulan	85.000.000	48	Bulan	60.000.000	12	Bulan	30.000.000	3	Bulan	2.000.000	3	Bulan	16.964.200	3	Bulan	3.313.000	3	Bulan	7.665.000	12	Bulan	29.942.200	60	Bulan	89.942.200	100	%	105,81	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																															
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																															
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	60	Bulan	397.000.000	48	Bulan	327.000.000	12	Bulan	70.000.000	3	Bulan	9.957.100	3	Bulan	25.792.200	3	Bulan	22.527.962	3	Bulan	11.642.038	12	Bulan	69.919.300	60	Bulan	396.919.300	100	%	99,98	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Desa	12	Bulan	-	0	Bulan	-	12	Bulan	46.999.900	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	46.987.300										
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (DD dan ADD)	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	60	Bulan	288.789.927.500	48	Bulan	231.107.475.300	12	Bulan	66.581.136.100	3	Bulan	27.483.500	3	Bulan	20.209.620.296	3	Bulan	20.631.918.328	3	Bulan	25.595.031.546	12	Bulan	66.464.053.670	60	Bulan	297.571.528.970	100	%	103,04	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	60	Bulan	162.000.000	48	Bulan	137.000.000	12	Bulan	25.000.000	3	Bulan	4.454.000	3	Bulan	4.979.000	3	Bulan	10.415.000	3	Bulan	5.063.000	12	Bulan	24.911.000	60	Bulan	161.911.000	100	%	99,95	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	60	Bulan	410.000.000	48	Bulan	310.000.000	12	Bulan	100.000.000	3	Bulan	100.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	12	Bulan	100.000.000	60	Bulan	410.000.000	100	%	100,00	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	60	Bulan	205.000.000	48	Bulan	165.000.000	12	Bulan	92.000.000	3	Bulan	3.030.000	3	Bulan	26.391.700	3	Bulan	8.885.100	3	Bulan	53.692.900	12	Bulan	91.999.700	60	Bulan	256.999.700	100	%	125,37	
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	60	Bulan	2.300.000.000	12	Bulan	1.427.150.000	12	Bulan	1.399.645.000	3	Bulan	11.731.400	3	Bulan	2.634.200	3	Bulan	115.201.200	3	Bulan	1.167.410.800	12	Bulan	1.296.977.600	24	Bulan	2.724.127.600	40	%	118,44	
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	60	Bulan	43.000.000	48	Bulan	33.000.000	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	500.000	3	Bulan	5.026.000	3	Bulan	-	3	Bulan	4.474.000	12	Bulan	10.000.000	60	Bulan	43.000.000	100	%	100,00	
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	60	Bulan	115.000.000	48	Bulan	85.000.000	12	Bulan	30.000.000	3	Bulan	10.575.700	3	Bulan	8.485.090	3	Bulan	4.358.200	3	Bulan	5.684.800	12	Bulan	29.103.790	60	Bulan	114.103.790	100	%	99,22	
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	60	Bulan	80.000.000	48	Bulan	30.000.000	12	Bulan	50.000.000	3	Bulan	15.266.900	3	Bulan	5.197.300	3	Bulan	11.912.950	3	Bulan	17.621.050	12	Bulan	49.998.200	60	Bulan	79.998.200	100	%	100,00	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	60	Bulan	80.000.000	48	Bulan	60.000.000	12	Bulan	45.000.000	3	Bulan	6.201.000	3	Bulan	4.661.000	3	Bulan	8.638.000	3	Bulan	25.500.000	12	Bulan	45.000.000	60	Bulan	105.000.000	100	%	131,25	
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	60	Bulan	142.000.000	48	Bulan	107.500.000	12	Bulan	39.500.000	3	Bulan	9.524.650	3	Bulan	7.206.000	3	Bulan	12.556.850	3	Bulan	10.212.500	12	Bulan	39.500.000	60	Bulan	147.000.000	100	%	103,52	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN																															
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat																															
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	60	Bulan	46.700.000	48	Bulan	31.700.000	12	Bulan	15.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	1.080.000	3	Bulan	13.268.050	3	Bulan	651.950	12	Bulan	15.000.000	60	Bulan	46.700.000	100	%	100,00	
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	60	Bulan	75.000.000	48	Bulan	60.000.000	12	Bulan	15.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	4.663.400	3	Bulan	1.217.700	3	Bulan	9.118.900	12	Bulan	15.000.000	60	Bulan	75.000.000	100	%	100,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	60	Bulan	55.000.000	48	Bulan	40.000.000	12	Bulan	15.000.000	3	Bulan	500.000	3	Bulan	9.001.700	3	Bulan	1.350.000	3	Bulan	4.140.700	12	Bulan	14.992.400	60	Bulan	54.992.400	100	%	99,99	
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	60	Bulan	2.368.350.000	48	Bulan	2.100.190.000	12	Bulan	468.160.000	3	Bulan	50.574.550	3	Bulan	68.072.250	3	Bulan	53.680.720	3	Bulan	287.009.240	12	Bulan	459.336.760	60	Bulan	2.559.526.760	100	%	108,07	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	60	Bulan	120.000.000	48	Bulan	70.000.000	12	Bulan	25.000.000	3	Bulan	5.772.000	3	Bulan	6.472.400	3	Bulan	6.575.900	3	Bulan	6.142.600	12	Bulan	24.962.900	60	Bulan	94.962.900	100	%	79,14	
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60	Bulan	50.000.000	48	Bulan	40.000.000	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	4.310.000	3	Bulan	3.604.000	3	Bulan	1.389.000	3	Bulan	677.000	12	Bulan	9.980.000	60	Bulan	49.980.000	100	%	99,96	
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	60	Bulan	97.000.000	48	Bulan	77.000.000	12	Bulan	20.000.000	3	Bulan	5.949.700	3	Bulan	3.275.700	3	Bulan	-	3	Bulan	10.773.400	12	Bulan	19.998.800	60	Bulan	96.998.800	100	%	100,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA																															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	**Terpenuhinya Pelayanan Publik dan administrasi Perkantoran yang efisien dan akuntabel**			**28.245.040.550,00**			**11.147.696.995,00**			**4.546.980.686,00**			**676.086.786,00**			1.223.704.034			1.629.962.242			1.161.573.883										
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**16.548.273.950,00**			**3.237.913.286,00**			**3.088.420.286,00**			**472.884.856,00**			1.032.072.907			813.623.092			765.357.113										
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	5	thn	15.766.273.950,00	4	thn	2.926.720.286,00	1	thn	2.926.720.286,00	1	thn	443.489.856,00	1,00	thn	971.677.907			790.243.092			716.437.113	2	thn	2.921.847.968	6	thn	5.848.568.254	120	%	37,10	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan	5	thn	782.000.000,00	4	thn	311.193.000,00	1	thn	161.700.000,00	1	thn	29.395.000,00	1,00	thn	60.395.000			23.380.000			48.920.000	2	thn	162.090.000	6	thn	473.283.000	120	%	60,52	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				**4.215.535.000,00**			**1.953.750.857,00**			**219.857.400,00**			**53.690.300,00**			83.492.560			45.144.650			168.553.490										
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tepenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	thn	400.000.000,00	4	thn	175.304.750,00	1	thn	66.702.400,00	1	thn	11.482.000,00	1,00	thn	11.882.000			18.257.000			81.171.000	2	thn	122.792.000	6	thn	298.096.750	120	%	74,52	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan, minum Pegawai dan Rapat	28	pkt	2.990.900.000,00	4	thn	1.056.285.600,00	1	thn	12.000.000,00	1	thn	1.984.000,00	1,00	thn	4.000.000			-			6.000.000	2	thn	11.984.000	6	thn	1.068.269.600	21,4286	%	35,72	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Makan dan Minum Tamu	5	thn	19.635.000,00	4	thn	229.880.000,00	1	thn	7.755.000,00	1	thn	1.292.500,00	1,00	thn	1.292.500			2.585.000			2.585.000	2	thn	7.755.000	6	thn	237.635.000	120	%	1210,26	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	5	thn	805.000.000,00	4	thn	492.280.507,00	1	thn	133.400.000,00	1	thn	38.931.800,00	1,00	thn	66.318.060			24.302.650			78.797.490	2	thn	208.350.000	6	thn	700.630.507	120	%	87,03	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**5.855.700.000,00**			**4.464.130.400,00**			**686.678.000,00**			**0,00**			-			621.193.125			33.677.000										
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Peralatan KB	5	thn	5.855.700.000,00	4	thn	4.464.130.400,00	1	thn	686.678.000,00	1	thn	0,00	1,00	thn	-			621.193.125			33.677.000	2	thn	654.870.125	6	thn	5.119.000.525	120	%	87,42	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**900.531.600,00**			**1.138.040.109,00**			**470.381.400,00**			**128.090.630,00**			100.138.567			82.475.375			133.412.380										
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan telepon Kantor	5	thn	225.000.000,00	4	thn	236.904.109,00	1	thn	70.687.400,00	1	thn	11.079.630,00	1,00	thn	11.977.567			18.114.375			17.501.380	2	thn	58.672.952	6	thn	295.577.061	120	%	131,37	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Gaji Non PNS	5	thn	675.531.600,00	4	thn	901.136.000,00	1	thn	399.694.000,00	1	thn	117.011.000,00	1,00	thn	88.161.000			64.361.000			115.911.000	2	thn	385.444.000	6	thn	1.286.580.000	120	%	190,45	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**725.000.000,00**			**353.862.343,00**			**81.643.600,00**			**21.421.000,00**			8.000.000			67.526.000			60.573.900										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya dana pemeliharaan Kendaraan bermotor Roda 4, Roda 2 dan pajak/perizinan kendaraan	5	thn	375.000.000,00	4	thn	198.799.343,00	1	thn	38.000.000,00	1	thn	8.000.000,00	1,00	thn	8.000.000			-			21.954.900	2	thn	37.954.900	6	thn	236.754.243	120	%	63,13	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan peralatan mesin lainnya	5	thn	125.000.000,00	4	thn	58.488.000,00	1	thn	10.000.000,00	1	thn	3.061.000,00	1,00	thn	-			3.165.000			3.750.000	2	thn	9.976.000	6	thn	68.464.000	120	%	54,77	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Dana Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	thn	225.000.000,00	4	thn	96.575.000,00	1	thn	33.643.600,00	1	thn	10.360.000,00	1,00	thn	-			64.361.000			34.869.000	2	thn	109.590.000	6	thn	206.165.000	120	%	91,63	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				**1.665.000.000,00**			**2.147.278.700,00**			**75.352.000,00**			**18.507.600,00**			-			51.629.400			3.970.000										
			Pemanduan dan singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				**160.000.000,00**			**57.449.500,00**			**55.357.000,00**			**9.707.600,00**			-			44.504.400			-										
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan,Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Terlaksananya Rapat teknis, Sosdialisasi dan Orientasi Pengendalian Penduduk	5	Keg	50.000.000,00	4	Keg	29.980.000,00	1	Keg	35.381.000,00	1	Keg	0,00	1,00	Keg	-			34.796.000			-	2	Keg	34.796.000	6	Keg	64.776.000	120	%	129,55	
			Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten	5	Keg	50.000.000,00	4	Keg	19.976.500,00	1	Keg	9.987.600,00	1	Keg	9.707.600,00	1,00	Keg	-			-			-	2	Keg	9.707.600	6	Keg	29.684.100	120	%	59,37	
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Informal	Terlaksananya Pembentukan Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Pojok Kependudukan	5	Keg	60.000.000,00	4	Keg	7.493.000,00	1	Pkt	9.988.400,00	1	Pkt	0,00	1,00	Pkt	-			9.708.400			-	2	Pkt	9.708.400	6	Pkt	17.201.400	120	%	28,67	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				**1.505.000.000,00**			**2.089.829.200,00**			**19.995.000,00**			**8.800.000,00**			-			7.125.000			3.970.000										
			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Analisis dan Sinkronisasi Data Program	30	Keg	1.205.000.000,00	24	Keg	260.479.200,00	1	Keg	10.000.000,00	1	Keg	8.800.000,00			-			-			1.200.000	1	Keg	10.000.000	25	Keg	270.479.200	83,3333	%	22,45	
			Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan Kampung KB	5	Pkt	300.000.000,00	4	Pkt	1.829.350.000,00	1	Thn	9.995.000,00	1	Thn	0,00			-			7.125.000			2.770.000	1	Thn	9.895.000	5	Thn	1.839.245.000	100	%	613,08	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				**4.927.989.400,00**			**4.145.902.600,00**			**2.069.790.250,00**			**8.230.560,00**			633.888.700			269.410.000			864.039.800										
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				**243.000.000,00**			**0,00**			**243.000.000,00**			**0,00**			115.953.700			-			116.358.400										
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya Dana Opersional 6 Balai Penyuluhan KB di 6 Kecamatan	1	Thn	243.000.000,00	0	Pkt	0,00	1	Thn	243.000.000,00	1	Thn	0,00	1,00	Thn	115.953.700			-			116.358.400	2	Thn	232.312.100	2	Thn	232.312.100	200	%	95,60	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				**3.645.206.000,00**			**3.065.886.500,00**			**1.433.620.000,00**			**0,00**			363.086.000			132.108.000			690.563.400										
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	2	PKt	226.106.000,00	1	Pkt	137.306.000,00	1	Pkt	88.800.000,00	1	Pkt	0,00	1,00	Pkt	44.400.000			-			42.000.000	2	Pkt	86.400.000	3	Pkt	223.706.000	150	%	98,94	
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Tersedianya Dana Operasioanl Pnyuluhan dalam rangka Penurunan Stunting	3	Pkt	629.100.000,00	2	Pkt	808.594.000,00	2	Pkt	798.405.000,00	2	Pkt	0,00	2,00	Pkt	91.129.000			132.108.000			329.768.000	4	Pkt	553.005.000	6	Pkt	1.361.599.000	200	%	216,44	
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya Operasioanl Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD)	5	Pkt	2.790.000.000,00	4	Pkt	2.119.986.500,00	1	Thn	546.415.000,00	1	Thn	0,00	1,00	Thn	227.557.000			-			318.795.400	2	Thn	546.352.400	6	Thn	2.666.338.900	120	%	95,57	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta PelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				**781.033.400,00**			**1.080.016.100,00**			**134.420.250,00**			**8.230.560,00**			73.849.000			15.802.000			36.493.000										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV										
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana PenunjangPelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan TermasuK Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20	Keg	506.033.400,00	16	Keg	558.936.000,00	1	Keg	54.412.700,00	1	Keg	0,00	1,00	Keg	33.536.000			3.114.000			17.741.000	2	Keg	54.391.000	18	Keg	613.327.000	90	%	121,20	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12	Keg	275.000.000,00	8	Keg	521.080.100,00	1	Thn	80.007.550,00	1	Thn	8.230.560,00	1,00	Thn	40.313.000			12.688.000			18.752.000	2	Thn	79.983.560	10	Thn	601.063.660	83,3333	%	218,57	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				**258.750.000,00**			**0,00**			**258.750.000,00**			**0,00**			81.000.000			121.500.000			20.625.000										
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB	3	Keg	258.750.000,00	0	Keg	0,00	3	Keg	258.750.000,00	3	Keg	0,00	3,00	Keg	81.000.000			121.500.000			20.625.000	6	Keg	223.125.000	6	Keg	223.125.000	200	%	86,23	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				**600.000.000,00**			**478.572.400,00**			**76.256.550,00**			**21.862.000,00**			8.638.000			25.843.000			19.096.000										
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				**62.500.000,00**			**270.480.000,00**			**41.507.400,00**			**13.389.000,00**			8.638.000			-			19.096.000										
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	5	keg	62.500.000,00	4	Keg	270.480.000,00	1	Pkt	41.507.400,00	1	Pkt	13.389.000,00	1,00	Pkt	8.638.000			-			19.096.000	2	Pkt	41.123.000	6	Pkt	311.603.000	120	%	498,56	
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				**537.500.000,00**			**208.092.400,00**			**34.749.150,00**			**8.473.000,00**			-			25.843.000			-										
			Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Kelaurga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Kelaurga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	keg	250.000.000,00	4	Keg	65.130.000,00	1	Pkt	9.929.150,00	1	Pkt	4.363.000,00	1,00	Pkt	-			5.133.000			-	2	Pkt	9.496.000	6	Pkt	74.626.000	120	%	29,85	
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksanya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15	Keg	225.000.000,00	12	Keg	89.916.400,00	1	Pkt	14.970.000,00	1	Pkt	4.110.000,00	1,00	Pkt	-			10.860.000			-	2	Pkt	14.970.000	14	Pkt	104.886.400	93,3333	%	46,62	
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksanannya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	20	Keg	62.500.000,00	16	Keg	53.046.000,00	2	Pkt	9.850.000,00	2	Pkt	0,00	2,00	Pkt	-			9.850.000			-	4	Pkt	9.850.000	20	Pkt	62.896.000	100	%	100,63	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																															**DINAS PERHUBUNGAN**
			PROGRAM PENUNJANG URSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																															
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																															
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gajih dan Tunjangan ASN	60	bulan	19.471.419.745	48	bulan	17.007.797.410	12	bulan	3.894.283.949	3	bulan	601.198.483	3	Bulan	1.240.516.428	3	Bulan	1.060.587.383			945.009.857	9	Bulan	3.847.312.151	57	Bulan	20.855.109.561	95	%	107,11	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																															
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		60	Bulan	884.000.000				12	Bulan	176.800.000	0	Bulan		0	Bulan		3		166.500.000			-	3	Bulan	166.500.000	3	Bulan	166.500.000	5	%	18,83	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		60	Bulan	-				12	Bulan	-	0	Bulan		0	Bulan	0	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	%	#DIV/0!	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																															
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	bulan	165.000.000	48	bulan	62.642.000	12	bulan	33.000.000	3	bulan	1.600.000	3	Bulan	2.600.000	3	Bulan	4.900.000	3	Bulan	22.190.000,00	12	Bulan	31.290.000	60	Bulan	93.932.000	100	%	56,93	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	60	bulan	353.100.000	48	bulan	231.398.900	12	bulan	70.620.000	3	bulan	11.492.000	3	Bulan	11.492.000	3	Bulan	13.105.600	3	Bulan	34.522.000,00	12	Bulan	70.611.600	60	Bulan	302.010.500	100	%	85,53	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		60	bulan	532.500.000	48	bulan	261.861.000	12	bulan	106.500.000	3	bulan	24.600.000	3	Bulan	22.000.000	3	Bulan	32.000.000	3	Bulan	27.900.000,00	12	Bulan	106.500.000	60	Bulan	368.361.000	100	%	69,18	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.	60	bulan	254.999.800	48	bulan	256.205.780	12	bulan	50.999.960	3	bulan	6.950.000,00	3	Bulan	6.950.000	3	Bulan	6.950.000	3	Bulan	30.149.960,00	12	Bulan	50.999.960	60	Bulan	307.205.740	100	%	120,47	
			Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.	60	bulan	62.500.000	48	bulan	49.336.360	12	bulan	12.500.000	3	bulan	1.900.000	3	Bulan	900.000	3	Bulan	-	3	Bulan	9.700.000,00	12	Bulan	12.500.000	60	Bulan	61.836.360	100	%	98,94	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pelaksanaan pembinaan,monitoring dan evaluasi dalam daerah Terlaksananya pelaksanaan pertemuan teknis dan konsultasi keluar daerah	60	bulan	2.995.005.700	48	bulan	543.543.535	12	bulan	599.001.140	3	bulan	150.556.200	3	Bulan	206.310.645	3	Bulan	118.361.400	3	Bulan	121.225.755,00	12	Bulan	596.454.000	60	Bulan	1.139.997.535	100,00	%	38,06	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																															
			Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan		60	Bulan	3.083.800.000				12	Bulan	616.760.000	0	Bulan					3	Bulan	421.475.000	3	Bulan	131.087.937,00	6	Bulan	552.562.937	6	Bulan	552.562.937	10	%	17,92	
			Pengadaan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		60	Bulan	593.750.000				12	Bulan	118.750.000	0	Bulan		3	Bulan	4.200.000	3	Bulan	54.825.000	3	Bulan	59.665.000,00	9	Bulan	118.690.000	9	Bulan	118.690.000	15	%	19,99	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		60	Bulan	3.490.050.000				12	Bulan	698.010.000	0	Bulan		3	Bulan	14.000.000	3	Bulan	426.140.000	3	Bulan	244.100.000,00	9	Bulan	684.240.000	9	Bulan	684.240.000	15	%	19,61	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		60	Bulan	100.000.000				12	Bulan	20.000.000	0	Bulan		3	Bulan	700.000	3	Bulan	16.838.750	3	Bulan	2.196.250,00	9	Bulan	19.735.000	9	Bulan	19.735.000	15	%	19,74	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat Meyurat	60	bulan	30.020.000	48	bulan	30.700.000	12	bulan	6.004.000	3	bulan	1.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	1.500.000	3	Bulan	3.000.000,00	12	Bulan	6.000.000	60	Bulan	36.700.000	100	%	122,25	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Layanan Telepon, Internet, Air dan Listrik Kantor	60	bulan	611.090.000	48	bulan	318.601.129,00	12	bulan	122.218.000	3	bulan	23.267.400	3	Bulan	23.930.280	3	Bulan	26.693.640	3	Bulan	28.321.626,00	12	Bulan	102.212.946	60	Bulan	420.814.075	100	%	68,86	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Kontrak Pegawai Non PNS	60	bulan	7.263.250.000	48	bulan	3.612.240.000	12	bulan	1.452.650.000	3	bulan	235.790.000	3	Bulan	338.510.000	3	Bulan	323.700.000	3	Bulan	465.210.000,00	12	Bulan	1.363.210.000	60	Bulan	4.975.450.000	100	%	68,50	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV												
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan,biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	60	bulan	350.000.000	48	bulan	245.068.450	12	bulan	70.000.000	0	Bulan	-	3	Bulan	48.514.250	3	Bulan	4.443.000	3	Bulan	10.559.900,00	9	Bulan	63.517.150	57	Bulan	308.585.600	95	%	88,17	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan rutin / Berkala komputer Dan Peralatannya	60	bulan	175.064.500	48	Bulan	86.300.000	12	Bulan	35.012.900	0	Bulan	-	0	Bulan	0	0	Bulan	-	3	Bulan	34.991.600,00	3	Bulan	34.991.600	51	Bulan	121.291.600	85	%	69,28	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	60	bulan	2.879.093.000	48	bulan	55.000.000	12	Bulan	575.818.600	0	Bulan	-	3	Bulan	14.950.000	3	Bulan	147.900.000	3	Bulan	401.280.000,00	9	Bulan	564.130.000	57	Bulan	619.130.000	95	%	21,50	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																																	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																																	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		60	bulan	1.392.900.000	48	bulan		12	bulan	278.580.000	0	bulan	-	3	Bulan	7.000.000	0	Bulan	-	3	Bulan	268.440.000,00	6	Bulan	275.440.000	54	Bulan	275.440.000	90	%	19,77	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		60	bulan	400.000.000	48	bulan	317.657.000	12	bulan	80.000.000	3	bulan	4.050.000,00	3	Bulan	4.525.000	3	Bulan	26.775.000	3	Bulan	44.607.500,00	12	Bulan	79.957.500	60	Bulan	397.614.500	100	%	99,40	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																																	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		60	bulan	100.000.000	36	bulan	62.885.500	12	bulan	20.000.000	3	bulan	8.356.000,00	3	Bulan	11.543.000			-			-	6	Bulan	19.899.000	42	Bulan	82.784.500	70	%	82,78	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																																	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		60	bulan	4.891.000.000	24	bulan	1.953.420.000	12	bulan	978.200.000	0	bulan	-	3	Bulan	10.620.000			-			686.877.055,00	3	Bulan	697.497.055	27	Bulan	2.650.917.055	45	%	54,20	
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										25.000.000	0	bulan		0	Bulan		3	Bulan	25.000.000			-	3	Bulan	25.000.000	3	Bulan	25.000.000	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		60	bulan	175.000.000	12	bulan	5.000.000	12	bulan	35.000.000	0	bulan	-	0	Bulan	0			10.620.000	3	Bulan	9.987.000,00	3	Bulan	20.607.000	15	Bulan	25.607.000	25	%	14,63	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																																	
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		60	Bulan	650.000.000	12	bulan	61.785.000	12	Bulan	130.000.000	3	bulan	11.314.400	3	Bulan	37.008.600	3	Bulan	48.245.700	3	Bulan	33.348.230,00	12	Bulan	129.916.930	24	Bulan	191.701.930	40	%	29,49	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Pengadaan,Pemasangan,Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		60	Bulan	50.000.000				12	Bulan	10.000.000										3	Bulan	9.900.000,00	3	Bulan	9.900.000	3	Bulan	9.900.000	5	%	19,80	
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		60	Bulan	1.050.000.000	48	bulan	73.399.000	12	Bulan	210.000.000	3	bulan	19.677.000	3	Bulan	71.467.000	3	Bulan	1.750.000	3	Bulan	117.023.200,00	12	Bulan	209.917.200	60	Bulan	283.316.200	100	%	26,98	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		60	Bulan	250.000.000	24	bulan	73.488.500	12	Bulan	50.000.000									-	3	Bulan	44.212.000,00	3	Bulan	44.212.000	27	Bulan	117.700.500	45	%	47,08	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																																	
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		60	Bulan	1.615.625.000	48	bulan	69.180.000	12	Bulan	323.125.000	3	bulan	13.713.000	3	Bulan	30.328.600	3	Bulan	25.613.000	3	Bulan	94.020.000,00	12	Bulan	163.674.600	60	Bulan	232.854.600	100	%	14,41	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota																																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp									
														Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan									
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisai Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		60	Bulan	100.000.000	48	bulan	67.773.000	12	Bulan	20.000.000	3	bulan	5.805.000	3	Bulan	-	3	Bulan	4.245.000	3	Bulan	9.935.000,00	12	Bulan	19.985.000	60	Bulan	87.758.000	100	%	87,76	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																															
			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan																															
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota		60	bulan	300.000.000	48	bulan	109.512.000	12	bulan	60.000.000	3	bulan	10.920.400,00	3	Bulan	26.941.800	3	Bulan	16.025.000	3	Bulan	6.076.000,00	12	Bulan	59.963.200	60	Bulan	169.475.200	100	%	56,49	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang Peroranga atau Badan Usaha yang Berdomisili																															Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kewenangan		60	Bulan	2.989.375.000	48	bulan	104.864.000	12	Bulan	597.875.000	3	bulan	9.075.000,00	3	Bulan	17.089.300	3	Bulan	3.803.400	3	Bulan	253.776.900,00	12	Bulan	283.744.600	60	Bulan	388.608.600	100	%	13,00	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																															
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		60	bulan	3.088.460.000	48	bulan	1.949.371.920	12	bulan	617.692.000	3	bulan	163.129.100	3	Bulan	126.952.860	3	Bula	89.003.020	3	Bulan	224.403.716,00	12	Bulan	603.488.696	60	Bulan	2.552.860.616	100	%	82,66	Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
																1.304.893.983			2.279.049.763			3.076.999.893			4.373.716.486			11.034.660.125						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																															**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																															
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																															
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	Dok	15.000.000	12	Dok	17.130.000	6	Dok	4.000.000	3	Dok	2.000.000	0	Dok		1	Dok	250.000	2	Dok	1.610.000	6	Dok	3.860.000	18	Dok	20.990.000	60	%	139,93	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	Dok	9.000.000	24	Dok	3.000.000	12	Dok	4.000.000	3	Dok	500.000	0	Dok		3	Dok	750.000	6	Dok	2.515.400	12	Dok	3.765.400	36	Dok	6.765.400	60	%	75,17	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60	Dok	45.000.000	24	Dok	-	12	Dok	4.000.000	3	Dok					4		2.250.000	5		750000	12	Dok	3.000.000	36	Dok	3.000.000	60	%	6,67	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	60	Dok		24	Dok	-	12	Dok	4.000.000	3	Dok	375.000	0	Dok	-	1	Dok	3.190.000	8	Dok	-	12	Satuan	3.565.000	36	Satuan	3.565.000	60	%	#DIV/0!	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	50	Dok		20	Dok	-	10	Dok	4.000.000	3	Dok								7	Dok	4.000.000	10	Dok	4.000.000	30	Dok	4.000.000	60	%	#DIV/0!	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	60	Dok		24	Dok	9.000.000	12	Dok	12.000.000	3	Dok	3.653.100	0	Dok	-	5	Dok	750.000	4	Dok	7.349.400	12	Dok	11.752.500	36	Dok	20.752.500	60	%	#DIV/0!	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																															
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	bln	17.371.857.790	24	bln	5.846.122.938	12	bln	2.836.199.890	3	bln	410.531.962	3	Bln	865.343.473	3	Bln	783.980.464	3	Bln	693.034.130	12	bln	2.752.890.029	36	bln	8.599.012.967	60	%	49,50	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok		24	Dok	-	12	Dok	17.554.000	3	Dok					3		7.894.400	0		9.562.000	6	Dok	17.456.400	30	Dok	17.456.400	50	%	#DIV/0!	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dok	250.000.000	24	Dok	125.264.364	12	Dok	95.156.000	3	Dok	19.320.000	3	Dok	16.630.000	1	Dok	28.160.000	0	Dok	30.742.000	7	Dok	94.852.000	31	Dok	220.116.364	51,6667	%	88,05	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV													
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	95	Laporan	15.000.000	38	Laporan	3.000.000	19	Laporan	15.000.000	5	Laporan	4.250.000	5	Lap	875.000	1	Lap	2.750.000	0	Lap	6.639.000	11	Laporan	14.514.000	49	Laporan	17.514.000	51,5789	%	116,76	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																																		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	Laporan		8	Laporan		4	Laporan	5.000.000	1	Laporan	2.445.000	2	Lap	1.855.000	1	Lap	500.000	0	Lap	200.000	4	Laporan	5.000.000	12	Laporan	5.000.000	60	%	#DIV/0!	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40	Laporan		16	Laporan		8	Laporan	5.000.000	2	Laporan	670.000	2	Lap	1.200.000	1	Lap	-	3	Lap	3.125.000	8	Laporan	4.995.000	24	Laporan	4.995.000	60	%	#DIV/0!	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																						-												
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	25.000.000	24	Paket	10.000.000	12	Paket	15.000.000	3	Paket	1.026.000	5	Paket	3.000.000	1	Paket	10.000.000	3	Paket	974.000	12	Paket	15.000.000	36	Paket	25.000.000	60	%	100,00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120	Paket	200.000.000	48	Paket	377.904.081	24	Paket	70.000.000	6	Paket	10.764.200	7	Paket	7.083.300	7	Paket	38.617.000	4	Paket	78.002.600	24	Paket	134.467.100	72	Paket	512.371.181	60	%	256,19	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120	Paket	25.000.000	48	Paket	61.841.000	24	Paket	20.000.000	6	Paket	182.500	10	Paket	10.432.900	4	Paket	7.716.000	4	Paket	1.665.600	24	Paket	19.997.000	72	Paket	81.838.000	60	%	327,35	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket		4	Paket		2	Paket	17.000.000	0	Paket	1.208.100	1	Paket	6.015.000	0	Paket	7.646.000	1	Paket	2.130.900	2	Paket	17.000.000	6	Paket	17.000.000	60	%	#DIV/0!	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	35.000.000	24	Paket	48.545.000	12	Paket	20.000.000	3	Paket	3.000.000	5	Paket	8.011.000	2	Paket	6.390.000	2	Paket	46.549.000	12	Paket	63.950.000	36	Paket	112.495.000	60	%	321,41	
			Penyediaan Bahan Bacaan, dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bacaan , dan Perundang-Undangan	10	Dokumen	75.000.000	4	Dokumen	26.580.000	2	Dok		0	Dokumen								0		-	0	Dokumen	-	4	Dokumen	26.580.000	40	%	35,44	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	125.000.000	24	Laporan	65.000.000	12	Lap	40.000.000	3	Laporan	5.260.000	4	Laporan	14.755.000	3	Laporan	19.985.000	2	Laporan	-	12	Laporan	40.000.000	36	Laporan	105.000.000	60	%	84,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	600.000.000	24	Laporan	351.978.384	12	Lap	140.290.000	3	Laporan	31.308.700	3	Lap	10.240.950	2	Lap	64.798.500	4	Lap	46.228.800	12	Laporan	152.576.950	36	Laporan	504.555.334	60	%	84,09	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	12.500.000	24	Laporan	4.996.000	12	Laporan	3.095.000	3	Laporan	47.000	5	Laporan	1.004.000	3	Laporan	1.000.000	1	Laporan	1.044.000	12	Laporan	3.095.000	36	Laporan	8.091.000	60	%	64,73	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120	Laporan	175.000.000	48	Laporan	66.706.170	24	Laporan	40.000.000	6	Laporan	6.795.391	1	Laporan	5.305.164	1	Laporan	13.924.178	16	Laporan	7.815.258	24	Laporan	33.839.991	72	Laporan	100.546.161	60	%	57,45	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	1.705.000.000	40	Laporan	591.850.000	20	Laporan	324.000.000	5	Laporan	45.400.000	5	Laporan	68.100.000	1	Laporan	73.500.000	9	Laporan	90.800.000	20	Laporan	277.800.000	60	Laporan	869.650.000	100	%	51,01	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						-												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	Unit		8	Unit	22.500.000	4	Unit	10.000.000	0	Unit									4		10.000.000	4	Unit	10.000.000	12	Unit	32.500.000	60	%	#DIV/0!	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di sediakan	5	Unit		2	Unit	7.500.000														-											
			Penataan Organisasi																																		
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60	Dok	30.000.000	24	Dok	6.000.000	12	Dok	5.000.000	0	Dok							10		4.306.000	2		694.000	12	Dok	5.000.000	36	Dok	11.000.000	60	%	36,67	
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																															
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Aspirasi Publik	60	Dok	50.000.000		dok	39.422.000	12	Dok		0	Dok								12		-	12	Dok	-	12	Dok	39.422.000	20	%	78,84	
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1890	Dok	765.000.000	756	Dok	491.786.256	378	Dok	55.000.000	95	Dok	9.794.000	0	Dok	-	205	Dok	40.049.100	78	Dok	21.564.000	378	Dok	71.407.100	1134	Dok	563.193.356	60	%	73,62	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	20000	Dok	500.000.000	8.000	Dok	576.801.683	4000	Dok	37.000.000	0	Dok								4000		36.051.500	4000	Dok	36.051.500	12000	Dok	612.853.183	60	%	122,57	
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	30	Dok	1.080.000.000	12	Dok	224.592.362	6	Dok	95.000.000	1	Dok	12.770.000	0	Dok	-	4	Dok	33.028.795	1	Dok	34.575.000	6	Dok	80.373.795	18	Dok	304.966.157	60	%	28,24	
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	90	Layanan	7.250.000.000	36	Layanan	2.508.245.000	18	Layanan	1.000.000.000	0	Layanan								18		1.399.557.000	18	Layanan	1.399.557.000	54	Layanan	3.907.802.000	60	%	53,90	
			Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	5	Dok	-	2	Dok	245.000.000	1	Dok	-	0	Dok					1		245.000.000	0		-	1	Dok	245.000.000	3	Dok	490.000.000	60	%	#DIV/0!	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Pemerintah	45	Dok		18	Dok	6.800.000	9	Dok	15.000.000	0	Dok					6		4.530.000	3		10.370.700	9	Dok	14.900.700	27	Dok	21.700.700	60	%	#DIV/0!	
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	90	Unit		36	Unit		18	Unit	40.000.000	0	Unit								18		29.200.000	18	Unit	29.200.000	54	Unit	29.200.000	60	%	#DIV/0!	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA																															
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																															
			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Domain		2	Domain	134.628.000	1	Domain	10.000.000	0	Domain		0	Domain	1.000.000	1	Domain	8.192.800	0	Domain	-	1	Domain	9.192.800	3	Domain	143.820.800	60	%	#DIV/0!	
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150	Domain		60	Domain	39.380.000	30	Domain	15.000.000	0	Domain		7	Sub Domain	3.884.000	2	Sub Domain	750.000	21	Sub Domain	10.360.116	30	Domain	14.994.116	90	Domain	54.374.116	60	%	#DIV/0!	
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5	Unit		2	Unit		1	Unit	30.000.000	1	Unit	20.365.900	0	Unit	-	0	Unit	8.676.667	0	Unit	-	1	Unit	29.042.567	3	Unit	29.042.567	60	%	#DIV/0!	
			Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																															
			Penatalaksanaan dan Pengawasan e - government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e - government dalam Penyelenggaraan	150	Dok	100.000.000	60	Dok	19.990.000	30	Dok	70.000.000	8	Dok	6.063.000	7	30	53.485.000	14	8	4.910.000	1	7	4.200.000	30	Dok	68.658.000	90	Dok	88.648.000	60	%	88,65	
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	15	Pusat Data		6	Pusat Data	151.784.000	3	Pusat Data	240.000.000	0	Pusat Data	2.406.000	0	Pusat Data	-	2	Pusat Data	226.869.853	1	Pusat Data	7.720.000	3	Pusat Data	236.995.853	9	Pusat Data	388.779.853	60	%	#DIV/0!	
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	50	Dok		20	Dok		10	Dok	52.000.000	3	Dok	18.434.100	0	Dok	-	6	Dok	5.115.500	1	Dok	30.916.600	10	Dok	54.466.200	30	Dok	54.466.200	60	%	#DIV/0!	
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	15	Dok		6	Dok		3	Dok	43.000.000	2	Dok	34.323.000	0	Dok	-	0	Dok	7.060.000	1	Dok	1.000.000	3	Dok	42.383.000	9	Dok	42.383.000	60	%	#DIV/0!	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	150	Dok		60	Dok		30	Dok	15.000.000	7	Dok	330.000	0	Dok	-	2	Dok	3.300.000	21	Dok	11.370.000	30	Dok	15.000.000	90	Dok	15.000.000	60,00	%	#DIV/0!	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																															**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																															

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV													
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																																
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		60	bulan	7.131.507.168	48	bulan	18.023.312.148	12	bulan	3.633.490.856	3	bulan	538.485.847	3	bulan	1.155.297.556	3	bulan	992.103.064	3	bulan	862.115.737	12	bulan	3.548.002.204	60	bulan	21.571.314.352	100,00	bulan	302,48	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2	Dokumen	-	2	Dokumen	143.800.000	2	Dokumen	143.800.000	0	Dokumen	29.850.000	1	Dokumen	31.850.000		Dokumen	30.850.000		Dokumen	30.850.000	1	Dokumen	123.400.000	3	Dokumen	267.200.000	150,00	Dokumen	#DIV/0!	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-								-			-			-										
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		18	Orang		18	Orang	36.412.000	18	Orang	36.412.000		Orang			Orang	-		Orang	-		Orang	-	0	Orang	-	18	Orang		100,00	Orang		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							-								-			-			-										
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	Paket		1	Paket	-	1	Paket	66.847.000		Paket	18.190.500	1	Paket	19.573.500		Paket	23.899.000		Paket	31.617.000	1	Paket	93.280.000	2	Paket	93.280.000	200,00	Paket	#DIV/0!	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1	Paket	44.000.000	1	Paket	152.847.000	1	Paket	38.849.070		Paket	8.456.000	1	Paket	9.986.850		Paket	16.841.400		Paket	23.695.200	1	Paket	58.979.450	2	Paket	211.826.450	200,00	Paket	481,42	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		3	Laporan		3	Laporan	38.849.070	3	Laporan	7.500.000	1	Laporan	1.500.000	1	Laporan	-		Laporan	1.000.000		Laporan	5.000.000	2	Laporan	7.500.000	5	Laporan	46.349.070	166,67	Laporan	#DIV/0!	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5	Laporan	365.454.523	5	Laporan	733.552.577	5	Laporan	257.230.000	1	Laporan	70.417.800	1	Laporan	152.734.511		Laporan	33.773.600		Laporan	272.871.633	2	Laporan	529.797.544	7	Laporan	1.263.350.121	140,00	Laporan	345,69	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							257.230.000								-			-			-										
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5	Laporan	19.000.000	5	Laporan	46.000.000	5	Laporan	15.000.000	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	3.000.000		Laporan	3.500.000		Laporan	5.500.000	2	Laporan	15.000.000	7	Laporan	61.000.000	140,00	Laporan	321,05	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	Laporan	121.706.001	12	Laporan	291.312.174	12	Laporan	69.100.000	2	Laporan	14.854.390	4	Laporan	13.302.347		Laporan	15.310.316		Laporan	24.083.294	6	Laporan	67.550.347	18	Laporan	358.862.521	150,00	Laporan	294,86	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5	Laporan	87.847.750	5	Laporan	206.583.000	5	Laporan	13.066.000	1	Laporan	10.986.000	1	Laporan	-		Laporan	2.080.000		Laporan	-	2	Laporan	13.066.000	7	Laporan	219.649.000	140,00	Laporan	250,03	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		60	bulan	1.007.250.000	48	bulan	3.127.550.000	12	bulan	1.117.200.000	3	bulan	272.250.000	3	bulan	182.900.000		bulan	270.450.000		bulan	353.450.000	6	bulan	1.079.050.000	54	bulan	4.206.600.000	90,00	bulan	417,63	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-								-			-			-										
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		18	Unit		18	Unit	24.800.000	18	Unit	24.800.000	2	Unit	10.253.200	2	Unit	583.700		Unit	10.000.000		Unit	2.862.400	4	Unit	23.699.300	22	Unit	48.499.300	122,22	Unit	#DIV/0!	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8	Unit		8	Unit	53.777.100	8	Unit	53.777.100		Unit	53.777.100	8	Unit	-		Unit	-		Unit	-	8	Unit	53.777.100	16	Unit	107.554.200	200,00	Unit	#DIV/0!	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5	Unit		5	Unit	6.825.000	5	Unit	6.825.000		Unit			Unit	-		Unit	6.825.000		Unit	11.904.000	0	Unit	18.729.000	5	Unit	25.554.000	100,00	Unit	#DIV/0!	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							-								-			-			-										
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							-								-			-			-										
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		6	Koperasi	121.454.000	6	Koperasi	228.429.780	6	Koperasi	26.999.780	1	Koperasi	1.012.000	2	Koperasi	13.095.000		Koperasi	12.515.380		Koperasi	-	3	Koperasi	26.622.380	9	Koperasi	255.052.160	150,00	Koperasi	210,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I			II			III			IV																					
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		2	Koperasi		2	Koperasi	9.999.860	2	Koperasi	9.999.860		Koperasi			Koperasi	-		Koperasi	-		Koperasi	893.860	0	Koperasi	893.860	2	Koperasi	10.893.720	100,00	Koperasi	#DIV/0!	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							-									-			-			-											
			Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah							-									-			-			-											
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		6	Koperasi	92.795.000	6	Koperasi	161.244.800	6	Koperasi	10.016.800		Koperasi		1	Koperasi	1.144.000		Koperasi	8.358.000		Koperasi	436.800	1	Koperasi	9.938.800	7	Koperasi	171.183.600	116,67	Koperasi	184,48	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							-									-			-			-											
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							-									-			-			-											
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		25	Orang		25	Orang	49.999.800	25	Orang	49.999.800		Orang		25	Orang	45.999.800		Orang	-		Orang	20.496.500	25	Orang	66.496.300	50	Orang	116.496.100	200,00	Orang	#DIV/0!	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							-									-			-			-											
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							-									-			-			-											
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi		2	Orang		2	Orang	67.999.880	2	Orang	67.999.880	1	Orang	13.996.800	1	Orang	41.437.186		Orang	1.626.000		Orang	84.533.380	2	Orang	141.593.366	4	Orang	209.593.246	200,00	Orang	#DIV/0!	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							-									-			-			-											
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan							-									-			-			-											
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		5	Unit Usaha		5	Unit Usaha	14.999.880	5	Unit Usaha	14.999.880	2	Unit Usaha	9.628.880	1	Unit Usaha	1.084.000		Unit Usaha	-		Unit Usaha	4.270.000	3	Unit Usaha	14.982.880	8	Unit Usaha	29.982.760	160,00	Unit Usaha	#DIV/0!	
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		5	Unit Usaha	111.058.000	5	Unit Usaha	123.557.800	5	Unit Usaha	12.499.800		Unit Usaha			Unit Usaha	-		Unit Usaha	-		Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	5	Unit Usaha	123.557.800	100,00	Unit Usaha	111,26	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		5	Unit Usaha		5	Unit Usaha	25.000.000	5	Unit Usaha	25.000.000		Unit Usaha			Unit Usaha	-		Unit Usaha	-		Unit Usaha	99.825.900	0	Unit Usaha	99.825.900	5	Unit Usaha	124.825.900	100,00	Unit Usaha	#DIV/0!	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		12	Orang	94.941.300	12	Orang	214.505.680	12	Orang	19.999.980	6	Orang	19.046.780	3	Orang	950.000		Orang	-		Orang	-	9	Orang	19.996.780	21	Orang	234.502.460	175,00	Orang	247,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							-									-			-			-											
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							-									-			-			-											
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		3	Orang		3	Orang	49.999.920	3	Orang	49.999.920		Orang			Orang	-		Orang	25.000.000		Orang	74.974.000	0	Orang	99.974.000	3	Orang	149.973.920	100,00	Orang	#DIV/0!	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																																	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV												
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				**23.128.604.509**			**16.702.301.915**			**4.787.972.774**			**663.207.902**											**3.893.775.475**			**20.596.077.390**			**89,05**		
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**36.400.000**			**36.400.000**			**-**			**-**											**-**			**36.400.000**					
			Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	60	Bulan	11.100.000	24	Bulan	11.100.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	24	Bulan	11.100.000	40	%	100,00	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan dan Aset	60	Bulan	10.100.000	24	Bulan	10.100.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	24	Bulan	10.100.000	40	%	100,00	
			Penyusunan Lakip, LKPj, dan LPPD	Tersedianya Dokumen Lakip, LKPj, dan LPPD	60	Bulan	7.600.000	24	Bulan	7.600.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	24	Bulan	7.600.000	40	%	100,00	
			Penyusunan Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran Data	Tersedianya Dokumen Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran Data	60	Bulan	7.600.000	24	Bulan	7.600.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	24	Bulan	7.600.000	40	%	100,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**16.621.741.159**			**11.702.474.497**			**3.611.080.874**			**391.703.659**			**1.007.496.830**			**748.942.911**			**556.255.210**			**2.704.398.610**			**14.406.873.107**				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	16.621.741.159	48	Bulan	11.702.474.497	12	Bulan	3.611.080.874	3	Bulan	391.703.659	3	Bulan	1.007.496.830	3	Bulan	748.942.911	3	Bulan	556.255.210	12	Bulan	2.704.398.610	60	Bulan	14.406.873.107	100	%	86,67	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**171.500.000**			**118.889.000**			**50.000.000**			**33.750.000**			**-**			**-**			**11.060.000**			**44.810.000**			**163.699.000**				
			Pengadaan pakaian dinas (PDH dan Putih)	Tersedianya pakaian dinas (PDH dan Putih)	5	Paket	171.500.000	3	Paket	118.889.000	1	Paket	50.000.000	1	Paket	33.750.000	-	Paket	-	-	-	-	-	-	11.060.000	1	Paket	44.810.000	4	Tahun	163.699.000	80	%	95,45	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1.519.819.750**			**1.162.531.915**			**340.581.500**			**84.820.800**			**103.027.400**			**98.733.200**			**165.145.676**			**451.727.076**			**1.614.258.991**				
			Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya Peralatan Kelistrikan	60	Bulan	9.000.000	24	Bulan	1.200.000	12	Bulan	7.800.000	3	Bulan	1.981.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	5.800.000	12	Bulan	7.781.000	36	Bulan	8.981.000	60	%	99,79	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	Bulan	208.997.500	48	Bulan	143.638.000	12	Bulan	65.252.000	3	Bulan	16.098.900	3	Bulan	15.980.100	3	Bulan	15.918.300	3	Bulan	26.165.500	12	Bulan	74.162.800	60	Bulan	217.800.800	100	%	104,21	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60	Bulan	3.650.000	12	Bulan	2.000.000	12	Bulan	1.650.000	3	Bulan	650.000	3	Bulan	500.000	3	Bulan	500.000	3	Bulan	1.180.000	12	Bulan	2.830.000	24	Bulan	4.830.000	40	%	132,33	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	89.629.250	48	Bulan	47.654.250	12	Bulan	41.849.500	3	Bulan	10.350.000	3	Bulan	10.350.000	3	Bulan	10.350.000	3	Bulan	19.390.000	12	Bulan	50.440.000	60	Bulan	98.094.250	100	%	109,44	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan koran 2 jenis	60	Bulan	70.000.000	48	Bulan	66.000.000	12	Bulan	3.997.000	3	Bulan	750.000	3	Bulan	-	3	Bulan	1.500.000	3	Bulan	750.000	12	Bulan	3.000.000	60	Bulan	69.000.000	100	%	98,57	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Makanan dan minuman pegawai kantor 51 pegawai	60	Bulan	140.945.100	48	Bulan	106.615.000	12	Bulan	19.995.000	3	Bulan	4.974.500	3	Bulan	4.974.500	3	Bulan	4.963.500	3	Bulan	5.079.000	12	Bulan	19.991.500	60	Bulan	126.606.500	100	%	89,83	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan koordinasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	60	Bulan	997.597.900	48	Bulan	795.424.665	12	Bulan	200.038.000	3	Bulan	50.016.400	3	Bulan	71.222.800	3	Bulan	65.501.400	3	Bulan	106.781.176	12	Bulan	293.521.776	60	Bulan	1.088.946.441	100	%	109,16	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**2.508.566.500**			**2.145.872.100**			**110.580.500**			**10.220.000**			**100.280.000**			**-**			**17.100.000**			**127.600.000**			**2.273.472.100**				
			Pembanguna Gedung Kantor	Tersedianya Banguna Gedung Kantor	2	Paket	1.550.000.000	2	Paket	1.516.900.000	0	Paket	-	-	Paket	-										0	Paket	-	2	Paket	1.516.900.000	100	%	97,86	
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor	60	Bulan	387.486.000	36	Bulan	384.790.000	0	Bulan	-	1	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	-	1	Paket	16.250.000	4	Bulan	16.250.000	40	Bulan	401.040.000	66,6667	%	103,50	
			Pengadaan Floter	Tersedianya Peralatan Cetak	1	Paket	85.000.000	1	Paket	66.000.000	0	Paket	-	-	Paket	-										0	Paket	-	1	Paket	66.000.000	100	%	77,65	
			Pengadaan Sistem Aplikasi Perizinan	Tersedianya Sistem Aplikasi Perizinan	1	Paket	200.000.000	1	Paket	15.000.000	0	Paket	-	-	Paket	-						-			-	0	Paket	-	1	Paket	15.000.000	100	%	7,50	
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	60	Bulan	286.080.500	24	Bulan	163.182.100	12	Bulan	110.580.500	3	Bulan	10.220.000	3	Bulan	100.280.000	3	Bulan	-	3	Bulan	850.000	12	Bulan	111.350.000	36	Bulan	274.532.100	60	%	95,96	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**2.138.647.100**			**1.412.504.403**			**640.579.900**			**117.676.443**			**122.991.712**			**119.095.895**			**140.426.739**			**500.190.789**			**1.912.695.192**				
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya materai 10000	60	Bulan	5.640.000	48	Bulan	3.000.000	12	Bulan	2.640.000	3	Bulan	1.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	1.100.000	3	Bulan	500.000	12	Bulan	2.600.000	60	Bulan	5.600.000	100	%	99,29	
			Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air dan listrik	Biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	539.527.100	48	Bulan	299.860.403	12	Bulan	155.179.900	3	Bulan	34.434.443	3	Bulan	16.964.462	3	Bulan	11.717.395	3	Bulan	9.770.489	12	Bulan	72.886.789	60	Bulan	372.747.192	100	%	69,09	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 16 pegawai kontrak	60	Bulan	1.593.480.000	48	Bulan	1.109.644.000	12	Bulan	482.760.000	3	Bulan	82.242.000	3	Bulan	106.027.250	3	Bulan	106.278.500	3	Bulan	130.156.250	12	Bulan	424.704.000	60	Bulan	1.534.348.000	100	%	96,29	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**131.930.000**			**123.630.000**			**35.150.000**			**25.037.000**			**7.843.000**			**1.130.000**			**31.039.000**			**65.049.000**			**188.679.000**				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	60	Bulan	65.000.000	24	Bulan	50.000.000	12	Bulan	15.000.000	3	Bulan	8.237.000	3	Bulan	6.065.000	3	Bulan	650.000	3	Bulan	9.989.000	12	Bulan	24.941.000	36	Bulan	74.941.000	60	%	115,29	
			Pemeliharaan rutin Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin Peralatan dan Mesin Lainnya	60	Bulan	16.930.000	24	Bulan	33.780.000	12	Bulan	10.150.000	3	Bulan	6.800.000	3	Bulan	1.778.000	3	Bulan	480.000	3	Bulan	1.050.000	12	Bulan	10.108.000	36	Bulan	43.888.000	60	%	259,23	
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2	Paket	25.000.000	1	Paket	15.000.000	1	Paket	10.000.000	1	Paket	10.000.000	-	Paket	-			-	2	Paket	20.000.000	3	Paket	30.000.000	4	Paket	45.000.000	200	%	180,00	
			Pemeliharaan Bando/Baliho	Terlaksananya Pemeliharaan Bando/Baliho	1	Paket	25.000.000	1	Paket	24.850.000	0	Paket	-	-	Paket	-									0	Paket	-	1	Paket	24.850.000	100	%	99,40	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				**681.267.273**			**343.350.498**			**320.000.000**			**70.660.900**			**58.370.500**			**110.597.502**			**100.120.400**			**339.749.302**			**683.099.800**				
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota				**354.199.773**			**92.750.773**			**260.000.000**			**56.084.100**			**44.502.500**			**90.501.502**			**88.911.300**			**279.999.402**			**372.750.175**				
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya standar penerbitan perizinan dan non perizinan	24	Bulan	354.199.773	12	Bulan	92.750.773	12	Bulan	260.000.000	3	Bulan	56.084.100	3	Bulan	44.502.500	3	Bulan	90.501.502	3	Bulan	88.911.300	12	Bulan	279.999.402	24	Bulan	372.750.175	100	%	105,24	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				**327.067.500**			**250.599.725**			**60.000.000**			**14.576.800**			**13.868.000**			**20.096.000**			**11.209.100**			**59.749.900**			**310.349.625**				
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten / Kota	Tersedianya kajian pemetaan potensi dan peluang investasi di Barito Selatan	24	Bulan	327.067.500	12	Bulan	250.599.725	12	Bulan	60.000.000	3	Bulan	14.576.800	3	Bulan	13.868.000	3	Bulan	20.096.000	3	Bulan	11.209.100	12	Bulan	59.749.900	24	Bulan	310.349.625	100	%	94,89	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				**270.000.000**			**188.526.800**			**50.000.000**			**-**			**5.596.800**			**44.369.700**			-			**49.966.500**			**238.493.300**				
			Penyelenggaraan Promosin Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**270.000.000**			**188.526.800**			**50.000.000**			**-**			**5.596.800**			**44.369.700**			-			**49.966.500**			**238.493.300**				
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pameran promosi unggulan daerah dan meningkatnya penanaman modal di Barito Selatan	24	Bulan	270.000.000	12	Bulan	188.526.800	12	Bulan	50.000.000	3	Bulan		3	Bulan	5.596.800	3	Bulan	44.369.700	3	Bulan		12	Bulan	49.966.500	24	Bulan	238.493.300	100	%	88,33	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				**1.302.143.000**			**985.303.628**			**310.000.000**			**67.095.000**			**100.772.881**			**54.405.550**			**93.625.119**			**315.898.550**			**1.301.202.178**				
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi				**1.302.143.000**			**985.303.628**			**310.000.000**			**67.095.000**			**100.772.881**			**54.405.550**			**93.625.119**			**315.898.550**			**1.301.202.178**				
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik	Terlaksananya kegiatan penerbitan izin dan non perizinan	24	Bulan	280.640.000	12	Bulan	129.820.100	12	Bulan	150.000.000	3	Bulan	36.142.000	3	Bulan	51.338.381	3	Bulan	21.129.400	3	Bulan	47.320.100	12	Bulan	155.929.881	24	Bulan	285.749.981	100	%	101,82	
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan penerbitan izin dan non perizinan	24	Bulan	118.313.000	12	Bulan	38.199.400	12	Bulan	80.000.000	3	Bulan	10.776.000	3	Bulan	12.882.400	3	Bulan	26.710.350	3	Bulan	29.629.869	12	Bulan	79.998.619	24	Bulan	118.198.019	100	%	99,90	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Terlaksananya Rapat, Konsultasi dan Evaluasi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	24	Bulan	50.000.000	12	Bulan	10.000.000	12	Bulan	40.000.000	3	Bulan	5.596.800	3	Bulan	12.638.200	3	Bulan	5.596.800	3	Bulan	16.168.150	12	Bulan	39.999.950	24	Bulan	49.999.950	100	%	100,00	
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	36	Bulan	144.587.000	24	Bulan	103.636.800	12	Bulan	40.000.000	3	Bulan	14.580.200	3	Bulan	23.913.900	3	Bulan	969.000	3	Bulan	507.000	12	Bulan	39.970.100	36	Bulan	143.606.900	100	%	99,32	
			Persiapan rencana kerja program sistem pelayanan perizinan (SIP)	Terlaksananya rencana kerja program sistem pelayanan perizinan (SIP)	60	Bulan	39.792.000	24	Bulan	39.747.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	24	Bulan	39.747.000	40	%	99,89	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas pelayanan perizinan	60	Bulan	115.782.000	36	Bulan	115.764.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	36	Bulan	115.764.000	60	%	99,98	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I			II			III			IV																					
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Rapat-rapat dan konsultasi bidang pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya Rapat-rapat dan konsultasi bidang pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan	60	Bulan	86.232.000	36	Bulan	85.369.328	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	36	Bulan	85.369.328	60	%	99,00	
			Pengadaan Baliho/spanduk media informasi perizinan dan non perizinan	Tersedianya Baliho/spanduk media informasi perizinan dan non perizinan	60	Bulan	63.616.000	36	Bulan	60.615.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	36	Bulan	60.615.000	60	%	95,28	
			Pengelolaan administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya Pengelolaan administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan	60	Bulan	121.232.000	24	Bulan	121.175.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	24	Bulan	121.175.000	40	%	99,95	
			Penyusunan kebijakan layanan perizinan dan non perizinan	Tersedianya kebijakan layanan perizinan dan non perizinan	60	Bulan	111.100.000	36	Bulan	110.178.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	36	Bulan	110.178.000	60	%	99,17	
			sosialisasi/penyuluhan peraturan perizinan	sosialisasi/penyuluhan peraturan perizinan	60	Bulan	38.000.000	12	Bulan	38.000.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	12	Bulan	38.000.000	20	%	100,00	
			Pemetaan izin usaha	Terlaksananya Pemetaan izin usaha	60	Bulan	57.795.000	12	Bulan	57.745.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	12	Bulan	57.745.000	20	%	99,91	
			Identifikasi dan inventarisasi izin usaha	Terlaksananya Identifikasi dan inventarisasi izin usaha	60	Bulan	75.054.000	12	Bulan	75.054.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Bulan	-	12	Bulan	75.054.000	20	%	100,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				**1.264.290.000**			**737.340.800**			**452.352.000**			**29.781.200**			**116.910.000**			**67.796.500**			**265.434.000**			**479.921.700**			**1.217.262.500**				
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**1.264.290.000**			**737.340.800**			**452.352.000**			**29.781.200**			**116.910.000**			**67.796.500**			**265.434.000**			**479.921.700**			**1.217.262.500**				
			Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal	Meningkatnya ketaatan seluruh pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan Peraturan penanaman modal dan peraturan usaha lainnya	24	Bulan	119.553.000	12	Bulan	70.950.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	2	Bulan	49.997.000	2	Bulan	49.997.000	14	Bulan	120.947.000	58,3333	%	101,17	
			Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	Meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi seluruh staf bidang pengawasan dan pengendalian	24	Bulan	465.126.000	12	Bulan	149.714.000	12	Bulan	315.412.000	3	Bulan	-	3	Bulan	93.950.000	3	Bulan	46.100.000	3	Bulan	122.315.000	12	Bulan	262.365.000	24	Bulan	412.079.000	100	%	88,60	
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Meningkatnya ketaatan seluruh pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan Peraturan penanaman modal dan peraturan usaha lainnya	24	Bulan	222.846.000	12	Bulan	61.186.800	12	Bulan	136.940.000	3	Bulan	29.781.200	3	Bulan	22.960.000	3	Bulan	21.696.500	3	Bulan	93.122.000	12	Bulan	167.559.700	24	Bulan	228.746.500	100	%	102,65	
			Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian penanaman modal	60	Bulan	189.000.000	36	Bulan	188.655.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-								-	0	Bulan	-	36	Bulan	188.655.000	60	%	99,82	
			Evaluasi laporan kinerja penanaman modal (LKPM)	Tersedianya laporan kinerja penanaman modal (LKPM)	60	Bulan	96.475.000	36	Bulan	96.144.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-								-	0	Bulan	-	36	Bulan	96.144.000	60	%	99,66	
			Kegiatan penyusunan data dan pelaporan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Terlaksanannya Kegiatan penyusunan data dan pelaporan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	60	Bulan	74.900.000	36	Bulan	74.461.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-									0	Bulan	-	36	Bulan	74.461.000	60	%	99,41	
			Rapat dan konsultasi bidang pengawasan dan pengendalian	Terlaksananya rapat dan konsultasi bidang pengawasan dan pengendalian	60	Bulan	96.390.000	36	Bulan	96.230.000	0	Bulan	-	-	Bulan	-									0	Bulan	-	36	Bulan	96.230.000	60	%	99,83	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	paket	23.321.645,00	1	paket	-	1	paket	23.321.645	1	paket	4.457.750	1	paket	3.465.000			6.350.000			9.047.145	2	paket	23.319.895	3	paket	23.319.895	300	%	99,99	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV											
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	paket	8.040.000,00	1	paket	5.000.000	1	paket	8.040.000	1	paket		1	paket	4.125.000			2.000.000			1.865.000	2	paket	7.990.000	3	paket	12.990.000	300	%	161,57	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Gaji dan Tunjangan ASN	1	paket	3.216.527.386,00	1	paket	3.203.107.135	1	paket	3.216.527.386	1	paket	653.191.551			1.099.791.659			677.456.899			942.742.473	1	paket	3.373.182.582	2	paket	6.576.289.717	200	%	204,45	
			Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	paket	617.295.932,00	1	paket	670.695.702	1	paket	617.295.932	1	paket	149.372.110			124.786.150			124.040.000			293.692.017	1	paket	691.890.277	2	paket	1.362.585.979	200	%	220,73	
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah																																
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya kegiatann pengelolaan dan pemeliharaan aset tetap lainnya	1	paket	3.997.730,00	1	paket	17.398.000	1	paket	3.997.730,00	1	paket	1.087.600			1.793.500			-			1.128.473	1	paket	4.009.573	2	paket	21.407.573	200	%	535,49	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	1	kegiatan	12.000.000,00	0	0	-	1	kegiatan	12.000.000,00	1	kegiatan	3.500.000			-			-			8.499.800	1	kegiatan	11.999.800	1	kegiatan	11.999.800	100	%	100,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	1	kegiatan	5.220.270,00	1	keg	164.791.500	1	kegiatan	5.220.270,00	1	kegiatan	1.575.000			-			-			3.645.270	1	kegiatan	5.220.270	2	kegiatan	170.011.770	200	%	3256,76	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																																
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota																																
			Peberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan Dalam Rangka Sumpah Pemuda	1	kegiatan	256.916.000,00	1	keg	189.650.000	1	kegiatan	256.916.000,00				1	kegiatan	35.000.000			20.000.000			376.916.000	1	kegiatan	431.916.000	2	kegiatan	621.566.000	200	%	241,93	
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tercapainya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1	paket	246.432.500,00	1	keg	97.680.000	1	paket	246.432.500,00	1	keg	34.557.000	1	paket	-						373.475.500	2	paket	408.032.500	3	paket	505.712.500	300	%	205,21	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																																
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi pusat kewenangan daerah																																
			Koordinasi, Singkranisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	terlaksananya pembinaan olahaga usia dini	1	kegiatan	95.984.150,00	1	keg	44.500.000	1	Keg	95.984.150,00				1	kegiatan	9.610.000				1	kegiatan	97.284.050	2	Keg	106.894.050	3	Keg	151.394.050	300	%	157,73	
			Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Kota	terlakasananya kegiatan dahani dahanai	1	kegiatan	299.987.719,00																1	kegiatan	299.788.359										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV													
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan											
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 8 x100%			16
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota																																	
			Penyelenggaraaan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/kota	1	kegiatan	10.910.000,00	0	0	-														(10.910.000)	0		(10.910.000)	0		(10.910.000)	0	%	-100,00		
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Tercapainya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1	Kegiatan	10.003.800,00	0	0													1	Kegiatan	194.003.660	1		194.003.660	1		194.003.660	100	%	1939,30		
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat daerah Provinsi																																	
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	terselenggranya pembinaan atlet berprestasi	1	Kegiatan	150.000.000,00																													
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																																	
			Pengembangan Organisasi Keolahraan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	1	kegiatan	528.843.000,00	0	0								1	kegiatan	410.643.000				1	Kegiatan	1.218.087.000	2		1.628.730.000	2		1.628.730.000	200	%	307,98		
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																																	
			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	terlaksananya kegiatan dahani dahanai	1	kegiatan	124.999.886															1	kegiatan	124.999.886												
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																																	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																																	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																																	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10	Dok		4	Dok		2	Dok	50.000.000	1	Dok	1.007.000	0	Dok	-	1	Dok	24.724.000	0	Dok	24.254.000	2	Dok	49.985.000	6	Dok	49.985.000	60	%	#DIV/0!		
			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	150	Orang		60	Orang		30	Orang	10.000.000	15	Org	5.645.000	0	Org	-		Org	515.000	15	Org	3.840.000	30	Org	10.000.000	90	Org	10.000.000	60	%	#DIV/0!		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																																	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																																	
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																																	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5	Laporan		2	Laporan		1	Laporan	25.000.000	0	Laporan	-								1		24.999.136	1	Laporan	24.999.136	3	Laporan	24.999.136	60	%	#DIV/0!		
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Jaringan Telekomunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Jaringan Telekomunikasi Sandi Pemerintah Daerah	60	Dokumen		24	Laporan		12	Laporan	25.000.000	0	Laporan								0			0	Laporan	-	24	Laporan	-	40	%	#DIV/0!		
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	15	Laporan		6	Laporan	141.694.200	3	Laporan	25.000.000	0	Laporan								0			0	Laporan	-	6	Laporan	141.694.200	40	%	#DIV/0!		
			Operasional Jaringan Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan sandi	31	PD		31	PD	10.377.000	31	PD	25.000.000	0	PD								0			0	PD	-	31	PD	10.377.000	100	%	#DIV/0!		

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV												
									K			K			K			K			K			K			K			K			K			K		
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																																		**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**
							PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																																
							Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota																																		
							Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Seleksi GITA BAHANA NUSANTARA tingkat kabupaten Banto Selatan	1	keg	19.999.750,00	1	keg	2.980.000	1	keg	19.999.750,00				1	kegiatan	10.000.000				1	kegiatan	9.999.750	2	keg	19.999.750	3	keg	22.979.750	300	%	114,90	
							Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota																																		
							Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya pelindungan, pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	1	keg	48.242.500,00	1	keg	9.883.000,00	1	keg	48.242.500,00	1	keg	6.600.000	1	kegiatan	23.856.600				1	kegiatan	15.737.900	3	keg	46.194.500	4	keg	56.077.500	400	%	116,24	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL																																		
							Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota																																		
							Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan ISEN MULANG	1	keg	64.475.000,00	1	keg	80.020.000	1	keg	64.475.000,00	1	keg	860.000	1	kegiatan	57.705.000				1	kegiatan	-	3	keg	58.565.000	4	keg	138.585.000	400	%	214,94	
							PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																																		
							Pengelolaan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota																																		
							Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemeliharaan dan pengelolaan benda purbakala/cagar budaya	1	keg	46.922.000,00	1	keg	38.100.000	1	keg	46.922.000,00	1	keg	9.822.000			-				1	keg	586.841.950	2	keg	596.663.950	3	keg	634.763.950	300	%	1352,81	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN																																		
							Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota																																		
							Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan Benda Museum Kab. Barsel	1	keg	17.217.700,00	1	keg	17.209.000	1	keg	17.217.700,00	1	keg	3.573.000	1	kegiatan	-						13.644.700	2	keg	17.217.700	3	keg	34.426.700	300	%	199,95	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																																		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																																		
		2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																		
		2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	Dokumen	26.656.500	4	Dokumen	14.055.700	4	Dokumen	12.600.800	2	Dokumen	8.656.500	1	Dokumen	3.127.200		Dokumen	775.000	1	Dokumen	2.842.000	4	Dokumen	15.400.700	8	Dokumen	29.456.400	100	%	110,50	
		2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	20	Dokumen	103.314.600	16	Dokumen	92.311.900	4	Dokumen	11.002.700	3	Dokumen	9.575.100		Dokumen	907.200		Dokumen	450.000	1	Dokumen	3.745.379	4	Dokumen	14.677.679	20	Dokumen	106.989.579	100	%	103,56	
		2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																		
		2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	70	Bulan	14.867.848.626	56	Bulan	12.583.801.652	14	Bulan	2.284.046.974	3	Bulan	373.412.241	4	Bulan	878.863.776	4	Bulan	508.634.418	3	Bulan	532.954.412	14	Bulan	2.293.864.847	70	Bulan	14.877.666.499	100	%	100,07	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																
									K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K		
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp			
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 / 13			15 = 14 / 6 x100%			16
		2	**23**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																																			
		2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah	60	Bulan	72.849.860	48	Bulan	63.585.800	12	Bulan	9.264.060	3	Bulan	6.655.900	3	Bulan	2.524.287	3	Bulan	-	3	Bulan	6.381.373	12	Bulan	15.561.560	60	Bulan	79.147.360	100	%	108,64	
		2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																			
		2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	42.550.000	-	Paket	-	1	Paket	42.550.000	-	Paket	-	1	Paket	42.495.600		Paket			Paket		1	Paket	42.495.600	1	Paket	42.495.600	100	%	99,87	
		2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terdidik secara teknis	42	Orang	105.858.600	39	Orang	99.642.600	3	Orang	6.216.000	-	Orang	-	-	Orang	-		Orang			Orang		0	Orang	-	39	Orang	99.642.600	92,8571	%	94,13	
		2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																			
		2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor	60	Bulan	55.928.324	48	Bulan	31.508.118	12	Bulan	24.420.206	3	Bulan	13.504.000	3	Bulan	6.419.000	3	Bulan	4.497.000	3	Bulan	14.439.000	12	Bulan	38.859.000	60	Bulan	70.367.118	100	%	125,82	
		2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan habis pakai komputer	60	Bulan	205.794.400	48	Bulan	141.454.800	12	Bulan	64.339.600	3	Bulan	17.905.000	3	Bulan	3.318.400	3	Bulan	43.018.000	3	Bulan	53.675.000	12	Bulan	117.916.400	60	Bulan	259.371.200	100	%	126,03	
		2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	60	Bulan	44.676.000	48	Bulan	34.275.000	12	Bulan	10.401.000	3	Bulan	5.212.500	3	Bulan	6.670.000	3	Bulan		3	Bulan	7.578.700	12	Bulan	19.461.200	60	Bulan	53.736.200	100	%	120,28	
		2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	71.632.270	48	Bulan	56.649.350	12	Bulan	14.982.920	3	Bulan	9.058.200	3	Bulan	2.150.000	3	Bulan	3.767.200	3	Bulan	10.049.900	12	Bulan	25.025.300	60	Bulan	81.674.650	100	%	114,02	
		2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar/majalah	60	Bulan	51.894.000	48	Bulan	37.815.000	12	Bulan	14.079.000	-	Bulan	-	6	Bulan	10.500.000	3	Bulan	3.575.000	3	Bulan	3.989.000	12	Bulan	18.064.000	60	Bulan	55.879.000	100	%	107,68	
		2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi teknis ke dalam daerah/luar daerah	60	Bulan	883.432.997	48	Bulan	801.238.997	12	Bulan	82.194.000	3	Bulan	18.785.400	3	Bulan	63.157.460	3	Bulan	250.000	3	Bulan	55.201.065	12	Bulan	137.393.925	60	Bulan	938.632.922	100	%	106,25	
		2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																			
		2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	60	Bulan	43.929.000	48	Bulan	31.925.000	12	Bulan	12.004.000	3	Bulan	6.304.000	3	Bulan	3.000.000	3	Bulan	2.700.000	3	Bulan	6.333.000	12	Bulan	18.337.000	60	Bulan	50.262.000	100	%	114,42	
		2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa layanan telepon, internet, air dan listrik	60	Bulan	514.563.081	48	Bulan	350.411.279	12	Bulan	164.151.802	3	Bulan	10.328.985	3	Bulan	34.312.079	3	Bulan	27.564.783	3	Bulan	15.210.245	12	Bulan	87.416.092	60	Bulan	437.827.371	100	%	85,09	
		2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pegawai pemerintah non ASN	60	Bulan	1.180.888.920	48	Bulan	920.638.500	12	Bulan	260.250.420	3	Bulan	60.289.500	3	Bulan	75.512.559	2	Bulan	49.237.500	4	Bulan	94.109.200	12	Bulan	279.148.759	60	Bulan	1.199.787.259	100	%	101,60	
		2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																			
		2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Mobil Unit Perpustakaan Keliling	60	Bulan	140.830.700	48	Bulan	91.830.700	12	Bulan	49.000.000	3	Bulan	9.233.258	3	Bulan	20.574.905	3	Bulan	18.357.000	3	Bulan	791.000	12	Bulan	48.956.163	60	Bulan	140.786.863	100	%	99,97	
		2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan	123.993.000	48	Bulan	103.681.000	12	Bulan	20.312.000	-	Bulan	-	6	Bulan	15.142.000	3	Bulan	5.130.000	3	Bulan	16.521.000	12	Bulan	36.793.000	60	Bulan	140.474.000	100	%	113,29	
		2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi gedung perpustakaan umum kabupaten/kota	1	Unit	2.149.072.000	-	Unit	-	1	Unit	2.149.072.000	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit		0	Unit	-	0	Unit	-	0	%	0,00	
		2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**																																			
		2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																																			
		2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah pengelolaan koleksi perpustakaan elektronik	18.284	Record	128.543.300	14.320	Record	96.300.000	3.964	Record	32.243.300	1.272	Record	10.936.237	1.601	Record	12.446.300	1009	Record	8.192.400	82	Record	600.000	3.964	Record	32.174.937	18.284	Record	128.474.937	100	%	99,95	
		2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan dan pembinaan perpustakaan	93	Perpustakaan	217.256.300	86	Perpustakaan	181.475.500	7	Perpustakaan	35.780.800	5	Perpustakaan	13.158.100	1	Perpustaka	12.400.400		Perpustakaan	9.030.457	1	Perpustakaan	1.100.000	7	Perpustakaan	35.688.957	93	Perpustakaan	217.164.457	100	%	99,96	
		2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan keliling dan story telling	145	Kali	341.920.020	121	Kali	302.762.200	24	Kali	39.157.820	6	Kali	12.382.900	3	Kali	4.741.000	5	Kali	5.602.000	10	Kali	16.426.500	24	Kali	39.152.400	145	Kali	341.914.600	100	%	100,00	
		2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengolahan bahan pustaka	7.112	Eksemplar	56.029.920	4.806	Eksemplar	32.071.700	2.306	Eksemplar	23.958.220	421	Eksemplar	15.445.400	354	Eksemplar	5.090.000	1608	Eksemplar	3.314.700	11	Eksemplar	-	2394	Eksemplar	23.850.100	7.200	Eksemplar	55.921.800	101,237	%	99,81	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyusunan data dan buku informasi perpustakaan	2	Dokumen	36.162.690	1	Dokumen	19.030.330	1	Dokumen	17.132.360	-	Dokumen	5.435.600	-	Dokumen	7.652.000	1	Dokumen	3.416.000	0	Dokumen	58.011.360	1	Dokumen	74.514.960	2	Dokumen	93.545.290	100	%	258,68	
		2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																																			
		2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lomba minat baca tingkat kabupaten	18	Lomba	279.297.604	15	Lomba	237.234.804	3	Lomba	42.062.800	-	Lomba	-	-	Lomba	-		Lom ba	9.339.400	0	Lom ba	-	0	Lomba	9.339.400	15	Lomba	246.574.204	83,3333	%	88,28	
		2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan literasi berbasis inklusi sosial	60	Bulan	245.518.280	48	Bulan	212.975.000	12	Bulan	32.543.280	-	Bulan	-	2	Bulan	7.861.750	1	Bulan		9	Bulan	-	12	Bulan	7.861.750	60	Bulan	220.836.750	100	%	89,95	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																																		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**																																
		2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan arsip dinamis	31	OPD	217.722.860	21	OPD	194.422.900	10	OPD	23.299.960	-	OPD	-	2	OPD	1.775.000	4	OPD	8.703.600	4	OPD	12.821.360	10	OPD	23.299.960	31	OPD	217.722.860	100	%	100,00	
		2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		2	24	02	2.02	02	*Akuisisi*, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pengelolaan arsip statis pada depo arsip	60	Bulan	90.367.530	48	Bulan	81.367.750	12	Bulan	8.999.780	3	Bulan	6.495.420	6	Bulan	1.110.460		Bulan	1.419.800	3	Bulan	-	12	Bulan	9.025.680	60	Bulan	90.393.430	100	%	100,03	
		2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota**																																		
		2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi,Akse dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah penyediaan informasi arsip melalui JIKN	12	Bulan	23.782.080	-	Bulan	-	12	Bulan	23.782.080	-	Bulan	-	6	Bulan	11.309.400	2	Bulan	3.823.160	4	Bulan	8.610.020	12	Bulan	23.742.580	12	Bulan	23.742.580	100	%	99,83	
		2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan unit kearsipan	31	OPD	169.495.160	18	OPD	143.591.100	13	OPD	25.904.060	3	OPD	13.181.000	3	OPD	-	1	OPD		6	OPD	12.470.060	13	OPD	25.651.060	31	OPD	169.242.160	100	%	99,85	
3							**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																																		
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																																		**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**
		3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**2.169.500.000**						**688.500.000**											476.439.700												
		3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**897.500.000**						**95.500.000**											51.886.000												
		3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data dan informasi perikanan	60	bulan	152.500.000	48	bulan	132.477.000	12	Bulan	30.500.000	3	Bulan	3.708.000	3	Bulan	5.610.000	3	Bulan	14.694.400	3	Bulan	6.172.000	12	Bulan	30.184.400	60	Bulan	138.649.000	100,00	%	90,92	
		3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sapras Perikanan tangkap	60	Unit	115.000.000	48	Unit	3.078.385.000	0	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-				0	Unit	-	-	Unit	-	48	Unit	3.078.385.000	80,00	%	2.676,86	
		3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya bantuan sarana nelayan	200	Paket	630.000.000	160	Paket	612.617.000	40	Paket	65.000.000	-	Paket	-	10	Paket	12.884.000	5	Paket	6.315.000	25	Paket	45.714.000	40	Paket	64.913.000	200	Paket	658.331.000	100,00	%	104,50	
		3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**790.000.000**						**498.000.000**											387.427.500												
		3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Tersedianya Kapal penangkap ikan di PUD lengkap	45	Unit	590.000.000	40	Unit	557.200.000	5	Unit	458.000.000	-	Unit	708.000	2	Unit	79.559.000	0	Unit	718.000	3	Unit	375.867.500	5	Unit	456.852.500	45	Unit	933.067.500	100,00	%	158,15	
		3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	terlaksananya kegiatan mintoring dan evaluasi	100	Paket	125.000.000	80	Paket	57.656.000	20	Paket	25.000.000	5	Paket	4.770.000	5	Paket	6.870.000	5	Paket	4.800.000	5	Paket	8.511.000	20	Paket	24.951.000	100	Paket	66.167.000	100,00	%	52,93	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Tersedianya Fasilitas PROSEHATKAN Nelayan	5	Paket	75.000.000	4	Paket	50.688.000	1	Paket	15.000.000	-	Paket	2.675.400	0	Paket	5.453.400	1	Paket	3.548.000	0	Paket	3.049.000	1	Paket	14.725.800	5	Paket	53.737.000	100,00	%	71,65	
		3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**				**407.000.000**						**85.000.000**											34.733.200											
		3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pelayanan TPI	60	Bulan	407.000.000	48	Bulan	502.840.000	12	Bulan	85.000.000	3	Bulan	10.610.600	3	Bulan	21.222.000	3	Bulan	16.357.000	3	Bulan	34.733.200	12	Bulan	82.922.800	60	Paket	537.573.200	100,00	%	132,08	
		3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**75.000.000**						**10.000.000**											2.393.000											
		3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	Terlaksanaya pembinaan dan Ijin Usaha Perikanan	5	Paket	75.000.000	4	Paket	92.900.000	1	Paket	10.000.000	-	Paket	-	1	Paket	7.142.400	0	Paket	350.000	0	Paket	2.393.000	1	Paket	9.885.400	5	Paket	95.293.000	100,00	%	127,06	
		3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**3.674.000.000**						**635.000.000**											273.769.489											
		3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**				**2.275.000.000**						**370.200.000**											164.584.800											
		3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan	5	Paket	1.500.000.000	4	Paket	392.255.000	1	Paket	225.200.000	-	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	99.900.000	0	Paket	125.200.000	1	Paket	225.100.000	5	Paket	517.455.000	100,00	%	34,50	
		3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sapras Budidaya	30	Paket	75.000.000	24	Paket	97.656.000	6	Paket	15.000.000	1	Paket	2.049.000	2	Paket	6.434.000	1	Paket	1.134.000	2	Paket	4.953.000	6	Paket	14.570.000	30	Paket	102.609.000	100,00	%	136,81	
		3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Tersediannya Fasilitas Bantuan	250	Paket	300.000.000	200	Paket	163.796.000	50	Paket	50.000.000	-	Paket	-	30	Paket	38.621.200	0	Paket	-	20	Paket	10.590.100	50	Paket	49.211.300	250	Paket	174.386.100	100,00	%	58,13	
		3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya kegiatan Sarana Percontohan Dinas	5	Paket	400.000.000	4	Paket	128.900.000	1	Paket	80.000.000	1	Paket	13.728.000	0	Paket	19.431.400	0	Paket	22.825.700	0	Paket	23.841.700	1	Paket	79.826.800	5	Paket	152.741.700	100,00	%	38,19	
		3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				**1.399.000.000**						**264.800.000**											109.184.689											
		3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Perikanan Budidaya	60	Laporan	75.000.000	48	Laporan	62.102.000	12	Laporan	15.000.000	3	Laporan	-	3	Laporan	1.203.000	3	Laporan	1.944.000	3	Laporan	11.719.000	12	Laporan	14.866.000	60	Laporan	73.821.000	100,00	%	98,43	
		3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidaya ikan	15	Paket	390.000.000	12	Paket	310.020.000	3	Paket	78.000.000	-	Paket	14.111.956	1	Paket	18.070.703	1	Paket	20.700.000	1	Paket	24.968.689	3	Paket	77.851.348	15	Paket	334.988.689	100,00	%	85,89	
		3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Kegiatan UPTD BBI Palu Rejo	60	Bulan	249.000.000	48	Bulan	194.280.000	12	Bulan	49.800.000	3	Bulan	8.300.000	3	Bulan	12.450.000	3	Bulan	12.450.000	3	Bulan	16.600.000	12	Bulan	49.800.000	60	Bulan	210.880.000	100,00	%	84,69	
		3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Kegiatan Kesehatan ikan dan lingkungan	60	Bulan	165.000.000	48	Bulan	80.286.000	12	Bulan	33.000.000	3	Bulan	6.007.400	3	Bulan	9.243.000	3	Bulan	4.500.000	3	Bulan	13.177.000	12	Bulan	32.927.400	60	Bulan	93.463.000	100,00	%	56,64	
		3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya Bantuan Saprodi Budidaya	5	Kegiatan	270.000.000	4	Kegiatan	167.840.000	1	Kegiatan	54.000.000	1	Kegiatan	22.343.658	0	Kegiatan	4.122.000	0	Kegiatan	3.450.000	0	Kegiatan	19.782.500	1	Kegiatan	49.698.158	5	Kegiatan	-	100,00	%	-	
		3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya Lahan Untuk Pembudidaya Ikan	5	Paket	250.000.000	4	Paket	47.414.000	1	Paket	35.000.000	-	Paket	10.476.100	0	Paket	1.375.500	0	Paket	-	1	Paket	22.937.500	1	Paket	34.789.100	5	Paket	70.351.500	100,00	%	28,14	
		3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**175.000.000**						**35.000.000**											15.307.400											
		3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**				**175.000.000**						**35.000.000**											15.307.400											
		3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Telaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	175	Kegiatan	100.000.000	140	Kegiatan	16.073.000	35	Kegiatan	20.000.000	8	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	8	Kegiatan	9.356.100	19	Kegiatan	10.435.400	35	Kegiatan	19.791.500	175	Paket	-	100,00	%	-	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
									Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 8 x100%			16
		3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Telaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya	5	Kegiatan	75.000.000	4	Kegiatan	11.561.000	1	Kegiatan	15.000.000	-	Kegiatan	2.300.000	1	Kegiatan	3.450.000	0	Kegiatan	4.375.000	0	Kegiatan	4.872.000	1	Kegiatan	14.997.000	5	Kegiatan	16.433.000	100,00	%	21,91	
		3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**				**745.000.000**						**128.000.000**												34.395.000											
		3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**				**75.000.000**						**15.000.000**												5.204.000											
		3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan	60	Bulan	75.000.000	48	Bulan	12.102.000	12	Bulan	15.000.000	3	Bulan	4.547.000	3	Bulan	1.222.000	3	Bulan	3.794.000	3	Bulan	5.204.000	12	Bulan	14.767.000	60	Bulan	17.306.000	100,00	%	23,07	
		3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**				**290.000.000**						**58.000.000**												7.946.000											
		3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Bimbingan kepada Usaha Mikro	15	Kali	290.000.000	12	Kali	199.326.000	3	Kali	58.000.000	-	Kali	-	1	Kali	32.654.000	1	Kali	16.500.000	1	Kali	7.946.000	3	Kali	57.100.000	15	Kali	207.272.000	100,00	%	71,47	
		3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**				**380.000.000**						**55.000.000**												21.245.000											
		3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Ikan untuk Konsumsi	60	Bulan	255.000.000	48	Bulan	109.600.000	12	Bulan	30.000.000	3	Bulan	5.400.000	3	Bulan	7.664.000	3	Bulan	5.964.000	3	Bulan	10.355.000	12	Bulan	29.383.000	60	Bulan	119.955.000	100,00	%	47,04	
		3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas kepada Usaha Mikro	15	Kecamatan	125.000.000	12	Kecamatan	52.900.000	3	Kecamatan	25.000.000	-	Kecamatan	-	1	Kecamatan	5.264.000	1	Kecamatan	6.166.000	1	Kecamatan	10.890.000	3	Kecamatan	22.320.000	15	Kecamatan	63.790.000	100,00	%	51,03	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																																	**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**
							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																																
							Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																																
							Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/kota	1	paket	45.000.000,00	1	paket	65.000.000	1	paket	45.000.000,00										1	paket	45.000.000	1	paket	45.000.000	2	paket	110.000.000	200	%	244,44	
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																																
							Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																																
							Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlasananya penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan Luar Negeri	1	paket	20.000.000,00	0	0	-	1	paket	20.000.000,00										1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000	100	%	100,00	
							Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwsata Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Putra Putri Pariwsata Tingkat Kabupaten dan Provinsi	1	keg	56.125.000,00	0	0	-	1	keg	56.125.000,00							1	kegiatan	56.125.000						-	1	keg	56.125.000	1	keg	56.125.000	100	%	100,00	
							Peningkatan Kerjasama dan Kemintaan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Tercapainya Kegiatan kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam Negri	1	keg	20.000.000,00	1	keg	30.000.000	1	keg	20.000.000,00													1	kegiatan	20.000.000	1	keg	20.000.000	2	keg	50.000.000	200	%	250,00	
							Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Kegiatan minitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	1	keg	20.000.000,00	1	keg	17.420.000	1	keg	20.000.000													1	kegiatan	20.000.000	1	keg	20.000.000	2	keg	37.420.000	200	%	187,10	

No	Sasaran	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
								Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp										
																	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan										
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATANN DAN PERLINDUNGAN HAK																																			
						Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																																		
						Pengembangan Sistem Pemasaran	Terlaksananya Festival Kuliner Banto Selatan	1	keg	10.000.000,00	0	0	-	1	keg	10.000.000,00											1	kegiatan	10.000.000	1	keg	10.000.000	1	keg	10.000.000	100	%	100,00	
						PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																																			
						Pelaksanaaan Peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar																																			
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan usaha	1	keg	30.000.000,00	0	0	-	1	keg	30.000.000											1	kegiatan	30.000.000	1	keg	30.000.000	1	keg	30.000.000	100	%	100,00	
						Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif																																			
						Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Tersedianya Fasilitas menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1	paket	25.000.000,00	0	0	-	1	paket	25.000.000											1	paket	25.000.000	1	paket	25.000.000	1	paket	25.000.000	100	%	100,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																																			**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**
		3	**27**	**2**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				**8.210.500.000**						**5.742.233.900**										3.491.908.265												
		3	**27**	**02**	**2.01**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**				**1.601.000.000**						**3.516.255.000**										2.516.068.396												
		3	27	02	2.01	01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokal	Jumlah kelompok tani yang dibina	60	Poktan	62.600.000	30	Poktan	95.000.000	30	Poktan	62.600.000	10	Poktan	3.584.000	15	Poktan	52.058.000	2	Poktan	355.000	3	Poktan	6.602.500	30	Poktan	62.599.500	60	Poktan	101.602.500	100,00	%	162,30	
		3	27	02	2.01	02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana pendukung pertanian	40	Paket	1.601.000.000	30	Paket	754.022.000	10	Paket	3.453.655.000	0	Paket	18.961.000	5	Paket	376.888.800	1	Paket	480.990.850	4	Paket	2.516.068.396	10	Paket	3.392.909.046	40	Paket	3.270.090.396	100,00	%	204,25	
		3	**27**	**02**	**2.02**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**				**3.440.500.000**						**621.057.400**										342.583.469												
		3	27	02	2.02	01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bantuan bibt karet	125.000	Batang	2.050.000.000	30.000	Batang	375.379.000	5.000	Batang	334.348.000	0	Batang	36.870.700	3000	Bibit/Kg	60.175.900	500	Bibit/Kg	53.661.700	1500	Bibit/Kg	183.319.700	5.000	Batang	334.028.000	35.000	Batang	558.698.700	28,00	%	27,25	
		3	27	02	2.02	02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya Bibit Karet	50.000	Batang	775.000.000	40.000	Batang	670.000.000	10.000	Batang	112.310.400	3.000	Batang	11.052.600	3000	Bibit/Kg	31.638.400	2000	Bibit/Kg	35.326.700	2000	Bibit/Kg	27.564.700	10.000	Batang	105.582.400	50.000	Batang	598.949.700	100,00	%	77,28	
		3	27	02	2.02	03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah tanaman dan varietas baru	25	Jenis	615.500.000	20	Jenis	571.385.000	5	Jenis	174.399.000	1	Jenis	5.534.000	1	Jenis	33.646.800	1	Jenis	2.300.000	2	Jenis	131.699.069	5	Jenis	173.179.869	25	Jenis	#REF!	100,00	%	#REF!	
		3	**27**	**02**	**2.03**	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**300.000.000**						**98.803.500**										71.122.900												
		3	27	02	2.03	01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terfasilitasinya Kelembagaan UPT BB Padi Dan Hortikultura	60	Bulan	300.000.000	48	Bulan	78.697.050	12	Bulan	98.803.500	3	Bulan	8.674.000	3	Bulan	6.238.800	3	Bulan	12.767.500	3	Bulan	71.122.900	12	Bulan	98.803.200	60	Bulan	149.819.950	100,00	%	49,94	
		3	**27**	**02**	**2.05**	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**2.869.000.000**						**821.918.000**										562.133.500												
		3	27	02	2.05	01 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terfasilitasinya Kelembagaan UPT-PBHMT	60	Bulan	225.000.000	48	Bulan	140.000.000	12	Bulan	45.000.000	3	Bulan	0	3	Bulan	248.000	3	Bulan	2.760.000	3	Bulan	33.335.200	12	Bulan	36.343.200	60	Bulan	173.335.200	100,00	%	77,04	
		3	27	02	2.05	05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibt yang tersedia	7.500	Bibit/Kg	1.250.000.000	6.000	Bibit/Kg	360.000.000	1.500	Bibit/Kg	597.248.000	250	Bibit/Kg	35.765.000	200	Bibit/Kg	52.554.000	500	Bibit/Kg	32.460.000	550	Bibit/Kg	472.740.000	1.500	Bibit/Kg	593.519.000	7.500	Bibit/Kg	832.740.000	100,00	%	66,62	
		3	27	02	2.05	06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terpeliharanya kebun induk (28 Ha.)	60	Bulan	1.394.000.000	48	Bulan	130.118.000	12	Bulan	179.670.000	3	Bulan	28.661.900	3	Bulan	38.736.700	3	Bulan	52.363.100	3	Bulan	56.058.300	12	Bulan	175.820.000	60	Bulan	186.176.300	100,00	%	13,36	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																	
									K			K			K			K			K			K			K																	
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp																	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12																	
		3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain**				**1.394.000.000**					**684.200.000**															715.585.000																	
		3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Tersedianya bibit ternak	6.700	Ekor	1.394.000.000	5.360	Bulan	448.242.000	1.340	Ekor	684.200.000	0	Ekor	8.911.000	100	Ekor	8.659.000	150	Ekor	12.551.800	1090	Ekor	632.048.400	1.340	Ekor	662.170.200	6.700	Ekor	1.080.290.400	100,00	%	77,50	
		3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				**1.000.000.000**					**124.626.000**															63.073.800																	
		3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**				**400.000.000**					**24.626.000**															20.462.800																	
		3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pertemuan Dan Koordinasi	20	Kegiatan	400.000.000	17	Kegiatan	190.350.000	3	Kegiatan	24.626.000	1	Kegiatan	582.000	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	2.435.400	1	Kegiatan	20.462.800	3	Kegiatan	23.480.200	20	Kegiatan	210.812.800	100,00	%	52,70	
		3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**				**600.000.000**					**100.000.000**															42.611.000																	
		3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah UPT, BPP yang dipelihara	30	BPP	600.000.000	24	BPP	510.000.000	6	BPP	100.000.000	2	BPP	3.330.000	0	BPP	-	2	BPP	50.733.000	2	BPP	42.611.000	6	BPP	96.674.000	30	Bulan	552.611.000	100,00	%	92,10	
		3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				**1.287.000.000**					**277.000.000**															111.493.600																	
		3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**1.137.000.000**					**227.000.000**															84.898.600																	
		3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tersediaannya sarana pelayanan pengobatan	5.000	Dosis	1.137.000.000	4.000	Dosis	347.216.000	1.000	Dosis	227.000.000	250	Dosis	35.494.400	250	Dosis	49.775.700	250	Dosis	52.055.000	250	Dosis	84.898.600	1.000	Dosis	222.223.700	5.000	Dosis	432.114.600	100,00	%	38,00	
		3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**150.000.000**					**50.000.000**															26.595.000																	
		3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Tersedianya Laporan	60	Laporan	150.000.000	48	Laporan	60.118.000	12	Laporan	50.000.000	3	Laporan	8.422.000	3	Laporan	2.435.400	3	Laporan	477.000	3	Laporan	26.595.000	12	Laporan	37.929.400	60	Laporan	86.713.000	100,00	%	57,81	
		3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**				**525.000.000**					**50.000.000**															17.289.410																	
		3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**				**525.000.000**					**50.000.000**															17.289.410																	
		3	27	05	2.01	02	Penganganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tersediaan Benih Padi	48.000	Kg	325.000.000	48.000	Kg	115.987.000	0	Kg	-	0	Kg	0	0	Kg							-	-	Kg	-	48.000	Kg	115.987.000	100,00	%	35,69	
		3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gapoktan yang dibina untuk akibat kebakaran di Lahan Pertanian	30	Gapoktan	200.000.000	24	Gapoktan	30.811.000	6	Gapoktan	50.000.000	3	Gapoktan	10.625.600	1	Gapoktan	4.525.000	1	Gapoktan	17.559.700	1	Gapoktan	17.289.410	6	Gapoktan	49.999.710	30	Gapoktan	48.100.410	100,00	%	24,05	
		3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**				**270.000.000**					**30.000.000**															20.736.900																	
		3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**270.000.000**					**30.000.000**															20.736.900																	
		3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Izin Usaha Pertanian/ Pemberian Izin Usaha Pertanian TPH (SKKP)	50	PBS	150.000.000	20	PBS	20.844.000	10	PBS	30.000.000	2	PBS	1.055.000	0	PBS	-	4	PBS	8.208.100	4	PBS	20.736.900	10	PBS	30.000.000	30	PBS	41.580.900	60,00	%	27,72	
		3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Pembinaan,Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan PBS	40	PBS	120.000.000	20	PBS	50.000.000	0	PBS	-	-	PBS	0	0	PBS							-	-	PBS	-	20	Kec	50.000.000	50,00	%	41,67	
		3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				**8.550.750.000**					**1.550.944.900**															599.166.900																	
		3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**				**8.550.750.000**					**1.550.944.900**															599.166.900																	
		3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Tersedianya fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	30	BPP	4.570.250.000	24	BPP	2.104.600.000	24	BPP	1.107.198.100	6	BPP	107.203.800	6	BPP	259.249.700	6	BPP	270.900.000	6	BPP	453.753.300	24	BPP	1.091.106.800	48	BPP	2.558.353.300	160,00	%	55,98	
		3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terbinanya Kelembagaan Petani	60	WKPP	1.454.000.000	48	WKPP	386.750.000	12	WKPP	102.170.000	3	WKPP	11.817.200	3	WKPP	42.993.200	3	WKPP	17.151.800	3	WKPP	30.173.600	12	WKPP	102.135.800	60	WKPP	416.923.600	100,00	%	28,67	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
									K			K			K			K			K			K			K													
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp											
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya Fasilitasi Kelembagaan UPT-BPP	60	Bulan	2.526.500.000	48	Bulan	1.494.684.000	12	Bulan/BPP	341.576.800	3	Bulan/BPP	59.202.500	3	Bulan/BPP	82.804.000	3	Bulan/BPP	83.994.000	3	Bulan/BPP	115.240.000	12	Bulan	341.240.500	60	Bulan	1.609.924.000	100,00	%	63,72	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																																		**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**
							PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							-																									
							Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,							-																										
							Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		3	Laporan	68.495.000	3	Laporan	138.126.900	3	Laporan	33.000.000	1	Laporan	1.250.000	1	Laporan	7.002.000		Laporan	5.662.000		Laporan	18.102.000	2	Laporan	32.016.000	5	Laporan	170.142.900	166,67	Laporan	248,40	
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							-																										
							Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							-																										
							Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		14	Unit	1.088.014.152	14	Unit	2.257.332.456	14	Unit	84.999.860	6	Unit	14.961.952	3	Unit	13.273.092		Unit	25.386.942		Unit	29.395.722	9	Unit	83.017.708	23	Unit	2.340.350.164	164,29	Unit	215,10	
							Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							-																										
							Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		12	Dokumen		12	Dokumen	45.000.000	12	Dokumen	45.000.000	4	Dokumen	20.488.000	4	Dokumen	2.125.000		Dokumen	4.190.000		Dokumen	18.155.000	8	Dokumen	44.958.000	20	Dokumen	89.958.000	166,67	Dokumen	#DIV/0!	
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							-																										
							Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		13	Laporan	2.581.442.000	13	Laporan	5.034.723.300	13	Laporan			Laporan			Laporan	-		Laporan	-		Laporan	-											
							Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		13	Laporan		13	Laporan	-	13	Laporan	381.000.000		Laporan	14.912.000	13	Laporan	349.087.000		Laporan	8.352.000		Laporan	1.182.234.000	13	Laporan	1.554.585.000	26	Laporan	1.554.585.000	200,00	Laporan	#DIV/0!	
							Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							-																										
							Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		14	Laporan		14	Laporan	25.000.000	14	Laporan	25.000.000	2	Laporan	1.750.000	8	Laporan	-		Laporan	-		Laporan	184.220.000	10	Laporan	185.970.000	24	Laporan	210.970.000	171,43	Laporan	#DIV/0!	
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							-																										
							Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							-																										
							Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		107	Unit	296.340.000	107	Unit	726.250.160	107	Unit	98.889.160	40	Unit	19.275.000	20	Unit	14.936.500		Unit	14.722.000		Unit	41.650.850	60	Unit	90.584.350	167	Unit	816.834.510	156,07	Unit	275,64	
							Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		3	Tempat Usaha		3	Tempat Usaha	9.999.940	3	Tempat Usaha	9.999.940	1	Tempat Usaha	1.099.000	1	Tempat Usaha	3.445.000		Tempat Usaha	2.775.000		Tempat Usaha	2.625.000	2	Tempat Usaha	9.944.000	5	Tempat Usaha	19.943.940	166,67	Tempat Usaha	#DIV/0!	
							Penyidikan Metrologi Legal		44	Unit		44	Unit	12.000.000	44	Unit	12.000.000		Unit			Unit	-		Unit	1.204.000		Unit	10.796.000	-	Unit	12.000.000	44	Unit	24.000.000	100,00	Unit	#DIV/0!	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																																		**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							-																									

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
									K			K			K			K			K			K			K			K			K			K				
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
							Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		1	Dokumen	408.592.000	1	Dokumen	712.448.256	1	Dokumen																										
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		2	Dokumen		2	Dokumen	14.077.500	2	Dokumen	14.077.500		Dokumen		2	Dokumen	10.701.000		Dokumen	-		Dokumen	28.001.500	2	Dokumen	38.702.500	4	Dokumen	52.780.000	200,00	Dokumen	#DIV/0!		
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		3	Dokumen		3	Dokumen	120.953.000	3	Dokumen	120.953.000	1	Dokumen	20.720.000	1	Dokumen	54.623.380		Dokumen	26.616.700		Dokumen	3.500.000	2	Dokumen	105.460.080	5	Dokumen	226.413.080	166,67	Dokumen	#DIV/0!		
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							-								-			-			-														
							Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							-								-			-			-														
							Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		10	Dokumen	274.317.350	10	Dokumen	731.327.950	10	Dokumen	243.047.900		Dokumen		5	Dokumen	124.895.300		Dokumen	29.851.000		Dokumen	281.133.600	5	Dokumen	435.879.900	15	Dokumen	1.167.207.850	150,00	Dokumen	425,50		
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																																		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN**																																
		3	**32**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Satuan permukiman pada Tahap**										150.000.000																						
		3	32	04	2.01	01	Pengelolaan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan	Terciptanya SDM yang Mandiri dalam satuan	60	bulan	125.000.000	48	bulan	71.402.000	12	bulan	25.000.000	3	bulan	1.381.000	3	bulan	3.381.000	3	bulan	9.441.250	3	bulan	8.135.000	12	Bulan	22.338.250	60	Bulan	93.740.250	100	%	74,99		
		3	32	04	2.01	02	Pengelolaan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka	Terpeliharanya Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan	60	bulan	625.000.000	48	bulan	60.667.000	12	bulan	125.000.000	3	bulan	6.742.500	3	bulan	14.116.100	3	bulan	10.200.300	3	bulan	53.266.082	12	Bulan	84.324.982	60	Bulan	144.991.982	100	%	23,20		
4							**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																																		
							SEKRETARIAT DAERAH																																		**SEKRETARIAT DAERAH**
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	- Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																																		
								- Persentase Pelayanan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati																																		
								- Persentase tercapainya Regulasi Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi																																		
							Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																		
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	Bulan	125.000.000	48	Bulan	100.000.000	12	Bulan	24.999.820	3	Bulan	4.283.000	3	Bulan		3	Bulan	1.200.000	3	Bulan	16.716.750	12	Bulan	22.199.750	60	Bulan	122.199.750	83,00	%	97,76	**Setda**	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat Daerah**																																		
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	57.162.420.070	48	Bulan	45.729.936.056	12	Bulan	11.413.668.208	3	Bulan	1.712.664.075	3	Bulan	4.394.835.028	3	Bulan	3.019.018.226	3	Bulan	2.219.077.655	12	Bulan	11.345.594.984	60	Bulan	57.075.531.040	94,00	%	99,85	**Setda**	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																		
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	747.195.000	48	Bulan	597.756.000	12	Bulan	1.027.738.500	3	Bulan		3	Bulan	47.785.000	3	Bulan	98.675.000	3	Bulan	876.410.000	12	Bulan	1.022.870.000	60	Bulan	1.620.626.000	87,00	%	216,89	**Setda**	
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Bulan	805.062.920	48	Bulan	644.050.336	12	Bulan	161.012.584	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	160.300.000	3	Bulan		12	Bulan	160.300.000	60	Bulan	804.350.336	80,00	%	99,91	**Setda**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I			II			III			IV																				
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan												-																			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bulan	2.105.000.000	48	Bulan	1.684.000.000	12	Bulan	1.355.750.000	3	Bulan	75.758.000	3	Bulan	91.345.000	3	Bulan	132.517.000	3	Bulan	1.027.629.000	12	Bulan	1.327.249.000	60	Bulan	3.011.249.000	92,00	%	143,05	**Setda**
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	2.523.000.000	48	Bulan	2.018.400.000	12	Bulan	1.773.040.000	3	Bulan	188.110.768	3	Bulan	190.271.963	3	Bulan	125.398.817	3	Bulan	1.269.258.452	12	Bulan	1.773.040.000	60	Bulan	3.791.440.000	103,00	%	150,28	**Setda**
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60	Bulan	2.034.997.010	48	Bulan	1.627.997.608	12	Bulan	406.999.402	3	Bulan		3	Bulan	9.878.900	3	Bulan	397.022.000	3	Bulan		12	Bulan	406.900.900	60	Bulan	2.034.898.508	81,00	%	100,00	**Setda**
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Bulan	1.275.100.000	48	Bulan	1.020.080.000	12	Bulan	329.450.300	3	Bulan		3	Bulan	199.333.800	3	Bulan	35.900.000	3	Bulan	94.216.500	12	Bulan	328.163.000	60	Bulan	1.219.413.800	96,00	%	95,63	**Setda**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																															
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	Bulan	13.428.000.000	48	Bulan	10.742.400.000	12	Bulan	2.553.000.000	3	Bulan	638.000.000	3	Bulan	630.950.000	3	Bulan	386.950.000	3	Bulan		12	Bulan	2.403.900.000	60	Bulan	13.146.300.000	95,00	%	97,90	**Setda**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	500.728.650	48	Bulan	400.582.920	12	Bulan	100.145.730	3	Bulan	16.400.000	3	Bulan		3	Bulan	82.900.000	3	Bulan		12	Bulan	99.300.000	60	Bulan	499.882.920	87,00	%	99,83	**Setda**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	270.000.000	48	Bulan	216.000.000	12	Bulan	95.575.250	3	Bulan	11.410.000	3	Bulan	13.800.000	3	Bulan	14.225.000	3	Bulan	56.006.750	12	Bulan	95.441.750	60	Bulan	311.441.750	94,00	%	115,35	**Setda**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bulan	4.336.155.120	48	Bulan	3.468.924.096	12	Bulan	899.391.024	3	Bulan	134.134.876	3	Bulan	260.720.150	3	Bulan	214.539.994	3	Bulan	228.543.952	12	Bulan	837.938.972	60	Bulan	4.306.863.068	93,00	%	99,32	**Setda**
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	657.435.000	48	Bulan	525.948.000	12	Bulan	877.914.000	3	Bulan	27.700.000	3	Bulan	54.000.000	3	Bulan	40.890.000	3	Bulan	741.075.000	12	Bulan	863.665.000	60	Bulan	1.389.613.000	97,00	%	211,37	**Setda**
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bulan	955.395.000	48	Bulan	764.316.000	12	Bulan	1.005.867.204	3	Bulan		3	Bulan	73.446.780	3	Bulan	34.486.000	3	Bulan	889.379.720	12	Bulan	997.312.500	60	Bulan	1.761.628.500	88,00	%	184,39	**Setda**
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	Bulan	380.000.000	48	Bulan	304.000.000	12	Bulan	76.000.000	3	Bulan	11.051.500	3	Bulan	16.023.400	3	Bulan	9.861.200	3	Bulan	32459100	12	Bulan	69.395.200	60	Bulan	373.395.200	91,00	%	98,26	**Setda**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	Bulan	4.679.390.000	48	Bulan	3.743.512.000	12	Bulan	1.148.866.800	3	Bulan	142.521.000	3	Bulan	295.691.666	3	Bulan	357.677.241	3	Bulan	350.244.051	12	Bulan	1.146.133.958	60	Bulan	4.889.645.958	93,00	%	104,49	**Setda**
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Bulan	218.000.000	48	Bulan	147.400.000	12	Bulan	83.750.000	3	Bulan		3	Bulan	20.255.000	3	Bulan	19.250.000	3	Bulan	40.790.000	12	Bulan	80.295.000	60	Bulan	227.695.000	77,00	%	104,45	**Setda**
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	Bulan	1.463.450.000	48	Bulan	1.170.760.000	12	Bulan	1.460.650.000	3	Bulan		3	Bulan	24.825.000	3	Bulan	254.365.000	3	Bulan	1.085.235.675	12	Bulan	1.364.425.675	60	Bulan	2.535.185.675	82,00	%	173,23	**Setda**
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	Bulan	435.000.000	48	Bulan	348.000.000	12	Bulan	141.000.000	3	Bulan	21.730.000	3	Bulan	21.560.000	3	Bulan	35.490.000	3	Bulan	57.190.000	12	Bulan	135.970.000	60	Bulan	483.970.000	95,00	%	111,26	**Setda**
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**																															
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																															
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah																															
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang di sediakan	60	Bulan	2.200.000.000	48	Bulan	1.760.000.000	12	Bulan	684.148.400	3	Bulan	102.133.500	3	Bulan	115.538.500	3	Bulan	116.492.500	3	Bulan	347.383.900	12	Bulan	681.548.400	60	Bulan	2.441.548.400	95,00	%	110,98	**Setda**

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang di sediakan	60	Bulan	870.000.000	48	Bulan	696.000.000	12	Bulan	144.500.000	3	Bulan	83.195.000	3	Bulan	61.663.000	3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	144.858.000	60	Bulan	840.858.000	107,00	%	96,65	**Setda**
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah Kepala Daerah																															
			Penataan Organisasi	**Terlaksananya Penataan Organisasi**																														
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60	Bulan	525.000.000	48	Bulan	420.000.000	12	Bulan	155.000.000	3	Bulan	22.885.142	3	Bulan	33.473.172	3	Bulan	31.444.200	3	Bulan	66.852.400	12	Bulan	154.654.914	60	Bulan	574.654.914	96,00	%	109,46	**Setda**
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60	Bulan	350.000.000	48	Bulan	280.000.000	12	Bulan	100.000.000	3	Bulan	12.158.400	3	Bulan	19.969.100	3	Bulan	17.511.450	3	Bulan	50.259.090	12	Bulan	99.898.040	60	Bulan	379.898.040	93,00	%	108,54	**Setda**
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	60	Bulan	775.000.000	48	Bulan	620.000.000	12	Bulan	155.000.000	3	Bulan	28.499.000	3	Bulan	34.386.900	3	Bulan	40.410.800	3	Bulan	51.478.200	12	Bulan	154.774.900	60	Bulan	774.774.900	92,00	%	99,97	**Setda**
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**																														
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	60	Bulan	2.024.850.000	48	Bulan	1.619.880.000	12	Bulan	571.070.000	3	Bulan	74.522.799	3	Bulan	89.572.552	3	Bulan	198.235.725	3	Bulan	200.882.016	12	Bulan	563.213.092	60	Bulan	2.183.093.092	92,00	%	107,82	**Setda**
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	60	Bulan	2.074.954.100	48	Bulan	1.659.963.280	12	Bulan	848.696.020	3	Bulan	74.573.832	3	Bulan	161.907.520	3	Bulan	153.975.835	3	Bulan	444.796.404	12	Bulan	835.253.591	60	Bulan	2.495.216.871	95,00	%	120,25	**Setda**
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	60	Bulan	2.999.921.000	48	Bulan	2.399.936.800	12	Bulan	685.179.000	3	Bulan	45.600.000	3	Bulan	133.500.000	3	Bulan	207.928.449	3	Bulan	297.892.759	12	Bulan	684.921.208	60	Bulan	3.084.858.008	88,00	%	102,83	**Setda**
	S.2 : Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	- Persentase Hasil Pelayanan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat																														
				- Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintah																														
				- Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																														
			Administrasi Tata Pemerintahan	**Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan**																														
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	60	Bulan	795.000.000	48	Bulan	636.000.000	12	Bulan	159.000.000	3	Bulan	30.595.000	3	Bulan	38.066.400	3	Bulan	17.247.300	3	Bulan	48.748.700	12	Bulan	134.657.400	60	Bulan	770.657.400	93,00	%	96,94	**Setda**
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	60	Bulan	1.500.000.000	48	Bulan	1.200.000.000	12	Bulan	670.000.000	3	Bulan	89.123.800	3	Bulan	76.540.660	3	Bulan	116.012.492	3	Bulan	388.103.900	12	Bulan	669.780.852	60	Bulan	1.869.780.852	97,00	%	124,65	**Setda**
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	60	Bulan	1.354.370.000	48	Bulan	1.083.496.000	12	Bulan	620.874.000	3	Bulan	67.401.400	3	Bulan	76.246.000	3	Bulan	36.988.566	3	Bulan	433.130.604	12	Bulan	613.766.570	60	Bulan	1.697.262.570	96,00	%	125,32	**Setda**
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**																														
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	60	Bulan	12.436.923.500	48	Bulan	9.949.538.800	12	Bulan	3.202.384.700	3	Bulan	142.341.280	3	Bulan	1.232.770.093	3	Bulan	487.428.600	3	Bulan	1.294.330.088	12	Bulan	3.156.870.061	60	Bulan	13.106.408.861	93,00	%	105,38	**Setda**
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	60	Bulan	11.920.000.000	48	Bulan	9.536.000.000	12	Bulan	4.478.400.000	3	Bulan	16.796.700	3	Bulan	1.239.917.350	3	Bulan	365.640.975	3	Bulan	2.853.992.733	12	Bulan	4.476.347.758	60	Bulan	14.012.347.758	91,00	%	117,55	**Setda**
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	60	Bulan	6.631.600.000	48	Bulan	5.305.280.000	12	Bulan	1.326.320.000	3	Bulan	12.111.500	3	Bulan	534.923.900	3	Bulan	428.247.700	3	Bulan	338.549.512	12	Bulan	1.313.832.612	60	Bulan	6.619.112.612	89,00	%	99,81	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																														

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV												
					K			K			K		K			K			K			K			K			K			K			
					Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																														
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Porsentase terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**																														
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60	Bulan	571.990.000	48	Bulan	457.592.000	12	Bulan	164.398.000	3	Bulan	25.606.200	3	Bulan	22.853.080	3	Bulan	52.295.000	3	Bulan	63.640.520	12	Bulan	164.394.800	60	Bulan	621.986.800	93,00	%	108,74	**Setda**
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	60	Bulan	154.000.000	48	Bulan	123.200.000	12	Bulan	30.800.000	3	Bulan	13.300.000	3	Bulan	6.870.000	3	Bulan	7.710.000	3	Bulan	2.820.000	12	Bulan	30.700.000	60	Bulan	153.900.000	102,00	%	99,94	**Setda**
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60	Bulan	387.010.000	48	Bulan	309.608.000	12	Bulan	107.402.000	3	Bulan	13.217.000	3	Bulan	21.924.956	3	Bulan	16.300.600	3	Bulan	55.872.492	12	Bulan	107.315.048	60	Bulan	416.923.048	93,00	%	107,73	**Setda**
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah**																														
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																														
			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																														
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																														
	T.1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	- Persentase Hasil Koordinasi Perekonomian yang terlaksana																														
				- Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang di tender/seleksikan																														
				- Persentase Hasil Koordinasi Administrasi Pembangunan yang terlaksana																														
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**																														
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	60	Bulan	292.555.000	48	Bulan	234.044.000	12	Bulan	133.511.000	3	Bulan	907.000	3	Bulan		3	Bulan	9.010.000	3	Bulan	123.247.700	12	Bulan	133.164.700	60	Bulan	367.208.700	81,00	%	125,52	**Setda**
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	60	Bulan	447.500.000	48	Bulan	358.000.000	12	Bulan	164.500.000	3	Bulan	1.132.000	3	Bulan	19.931.400	3	Bulan	22.757.700	3	Bulan	115.018.350	12	Bulan	158.839.450	60	Bulan	516.839.450	85,00	%	115,49	**Setda**
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	60	Bulan	262.800.000	48	Bulan	210.240.000	12	Bulan	52.560.000	3	Bulan	7.576.000	3	Bulan	10.650.000	3	Bulan	11.434.000	3	Bulan	22.768.400	12	Bulan	52.428.400	60	Bulan	262.668.400	90,00	%	99,95	**Setda**
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																														
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																														
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**																														
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	60	Bulan	700.000.000	48	Bulan	56.000.000	12	Bulan	140.000.000	3	Bulan	16.750.800	3	Bulan	33.674.700	3	Bulan	27.527.900	3	Bulan	60.422.814	12	Bulan	138.376.214	60	Bulan	194.376.214	18,00	%	27,77	**Setda**
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60	Bulan	505.589.500	48	Bulan	404.471.600	12	Bulan	101.117.900	3	Bulan	4.545.000	3	Bulan	39.133.250	3	Bulan	13.014.050	3	Bulan	44.344.550	12	Bulan	101.036.850	60	Bulan	505.508.450	90,00	%	99,98	**Setda**
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60	Bulan	697.407.000	48	Bulan	557.925.600	12	Bulan	139.481.400	3	Bulan	29.981.200	3	Bulan	20.375.600	3	Bulan	28.329.500	3	Bulan	60.665.100	12	Bulan	139.351.400	60	Bulan	697.277.000	92,00	%	99,98	**Setda**
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Terlaksanannya Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa**																														
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60	Bulan	305.397.000	48	Bulan	244.317.600	12	Bulan	61.079.400	3	Bulan	17.332.700	3	Bulan	20.519.600	3	Bulan		3	Bulan	23.172.250	12	Bulan	61.024.550	60	Bulan	305.342.150	99,00	%	99,98	**Setda**

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
									Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp										
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
							Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	60	Bulan	174.994.000	48	Bulan	139.995.200	12	Bulan	34.998.800	3	Bulan	15.125.300	3	Bulan	12.608.700	3	Bulan	4.267.350	3	Bulan	2.938.000	12	Bulan	34.939.350	60	Bulan	174.934.550	105,00	%	99,97	**Setda**
							Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	Bulan	810.679.000	48	Bulan	648.543.200	12	Bulan	162.135.550	3	Bulan	38.487.100	3	Bulan	32.227.900	3	Bulan	22.781.380	3	Bulan	67.560.650	12	Bulan	161.057.030	60	Bulan	809.600.230	94,00	%	99,87	**Setda**
							Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**																																
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	60	Bulan	130.240.000	48	Bulan	104.192.000	12	Bulan	26.048.000	3	Bulan	6.820.000	3	Bulan	6.325.000	3	Bulan	3.581.000	3	Bulan	9.311.800	12	Bulan	26.037.800	60	Bulan	130.229.800	96,00	%	99,99	**Setda**
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	60	Bulan	82.850.000	48	Bulan	66.280.000	12	Bulan	16.570.000	3	Bulan	316.000	3	Bulan		3	Bulan	12.090.200	3	Bulan	3.673.300	12	Bulan	16.079.500	60	Bulan	82.359.500	81,00	%	99,41	**Setda**
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	60	Bulan	116.535.000	48	Bulan	93.228.000	12	Bulan	43.307.000	3	Bulan	2.526.000	3	Bulan	8.808.360	3	Bulan	5.113.000	3	Bulan	26.460.900	12	Bulan	42.908.260	60	Bulan	136.136.260	92,00	%	116,82	**Setda**
							SEKRETARIAT DPRD																																**SEKRETARIAT DPRD**
		04	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**80.497.246.204,16**			**76.194.790.483**			**20.439.560.541**			**4.325.651.582**			**5.205.558.475**			**5.130.329.805**			**6.939.318.975**										
		04	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9.638.429.450,65**			**9.107.052.442**			**2.551.233.267**			**387.057.926**			**786.005.188**			**618.507.516**			**709.887.656**										
		04	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	9.515.709.450,65	48	Bulan	8.984.624.942	12	Bulan	2.485.153.267	3	Bulan	369.392.426	3	Bulan	748.382.988	3	Bulan	610.507.516	3	Bulan	530.126.939	12	Bulan	2.258.409.869	60	Bulan	11.243.034.811	100	%	118,15	
		04	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanya penata usahaan dan verifikasi keuangan SKPD	60	Bulan	122.720.000	48	Bulan	122.427.500	12	Bulan	66.080.000	3	Bulan	17.665.500	3	Bulan	37.622.200	3	Bulan	8.000.000	3	Bulan	179.760.717	12	Bulan	243.048.417	60	Bulan	365.475.917	100	%	297,81	
		04	**01**	**2**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**306.002.500**			**288.567.280**			**122.236.000**			**-**			**-**			**9.293.000**			**88.137.000**										
		04	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkaparnya	Tersedianya pakaiaan dinas pegawai	3	Kegiatan	117.400.000	1	Kegiatan	117.253.200	1	Kegiatan	74.984.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	81.969.000	1	Kegiatan	81.969.000	2	Kegiatan	199.222.200	66,6667	%	169,70	
		04	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian	60	Bulan	27.700.000	48	Bulan	25.630.000	12	Bulan	47.252.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	9.293.000	3	Bulan	6.168.000	12	Bulan	15.461.000	60	Bulan	41.091.000	100	%	148,34	
		04	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pelatihan, Sosialisasi Bimtek PNS	60	Bulan	160.902.500	48	Bulan	145.684.080	12	Bulan		3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-				9	Bulan	-	57	Bulan	145.684.080	95	%	90,54	
		04	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**6.054.195.000**			**6.032.501.858**			**1.074.242.340**			**239.429.700**			**244.563.389**			**278.756.175**			**659.551.913**										
		04	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen insatalasi listrik dan jasa insalatir	60	Bulan	442.565.250	48	Bulan	441.881.000	12	Bulan	100.044.500	3	Bulan	37.400.000	3	Bulan	20.521.326	3	Bulan	37.128.746	3	Bulan	47.462.625	12	Bulan	142.512.697	60	Bulan	584.393.697	100	%	132,05	
		04	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor kebutuhan atk kantor, tersedianya kalender dinding dan meja serta buku agenda pakaian dinas	60	Bulan	627.394.000	48	Bulan	627.285.348	12	Bulan	225.560.000	3	Bulan	13.039.200	3	Bulan	45.728.250	3	Bulan	47.781.200	3	Bulan	118.122.750	12	Bulan	224.671.400	60	Bulan	851.956.748	100	%	135,79	
		04	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya kebersihan kantor dan rujab DPRD	60	Bulan	551.410.000	48	Bulan	549.209.000	12	Bulan	183.800.000	3	Bulan	36.067.800	3	Bulan	68.499.163	3	Bulan	29.566.307	3	Bulan	69.421.427	12	Bulan	203.554.697	60	Bulan	752.763.697	100	%	136,52	
		04	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	392.317.750	48	Bulan	392.271.550	12	Bulan	149.167.640	3	Bulan	10.601.100	3	Bulan	35.587.250	3	Bulan	40.359.750	3	Bulan	62.499.900	12	Bulan	149.048.000	60	Bulan	541.319.550	100	%	137,98	
		04	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan langganan media cetak	60	Bulan	1.165.798.000	48	Bulan	1.165.268.000	12	Bulan	115.800.200	3	Bulan	-	3	Bulan	56.752.500	3	Bulan	57.910.000	3	Bulan	108.136.500	12	Bulan	222.799.000	60	Bulan	1.388.067.000	100	%	119,07	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 8 x100%			16
		04	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman harian Anggota DPRD dan Pegawai Setwan, Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman tamu Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	60	Bulan	1.902.220.000	48	Bulan	1.896.895.200	12	Bulan	200.000.000	3	Bulan	59.932.800	3	Bulan	-	3	Bulan	66.010.172	3	Bulan	73.830.887	12	Bulan	199.773.859	60	Bulan	2.096.669.059	100	%	110,22	
		04	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	60	Bulan	972.490.000	48	Bulan	959.691.760	12	Bulan	99.870.000	3	Bulan	82.388.800	3	Bulan	17.474.900	3	Bulan	-	3	Bulan	180.077.824	12	Bulan	279.941.524	60	Bulan	1.239.633.284	100	%	127,47	
		04	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**225.000.000**			**161.259.220**			**741.700.800**			**-**			**179.691.000**			**366.504.750**			**550.655.160**											
		04	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor dan rumah jabatan, komputer, printer dll, tersedianya AC kantor, tersedianya perlengkapan rumah tangga rujab	5	Kegiatan	150.000.000	4	Kegiatan	109.259.220	1	Kegiatan	241.700.800	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	179.691.000	0	Kegiatan	60.905.000			367.255.000	1	Kegiatan	607.851.000	5	Kegiatan	717.110.220	100	%	478,07	
		04	01	2	07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan mushola rumah jabatan DPRD, pengadaan teralis dan carport rujab DPRD	5	Kegiatan	75.000.000	4	Kegiatan	52.000.000	1	Kegiatan	500.000.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	305.599.750	1	Kegiatan	183.400.160	2	Kegiatan	488.999.910	6	Kegiatan	540.999.910	120	%	721,33	
		04	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4.360.723.318**			**4.309.727.077**			**1.453.132.920**			**275.225.226**			**603.424.189**			**198.009.981**			**554.617.938**											
		04	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya pembelian benda pos/materai	60	Bulan	44.800.000	48	Bulan	44.376.500	12	Bulan	16.799.760	3	Bulan	1.000.000	3	Bulan	2.000.000	3	Bulan	6.768.000	3	Bulan	9.896.800	12	Bulan	19.664.800	60	Bulan	64.041.300	100	%	142,95	
		04	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	60	Bulan	1.496.541.760	48	Bulan	1.469.151.247	12	Bulan	467.653.160	3	Bulan	58.863.926	3	Bulan	99.090.310	3	Bulan	76.311.981	3	Bulan	68.586.572	12	Bulan	302.852.789	60	Bulan	1.772.004.036	100	%	118,41	
		04	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	60	Bulan	138.450.000	48	Bulan	137.796.500	12	Bulan	20.000.000	3	Bulan	1.500.000	3	Bulan	7.675.000	3	Bulan	4.970.000	3	Bulan	5.750.000	12	Bulan	19.895.000	60	Bulan	157.691.500	100	%	113,90	
		04	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa konsultasi pengawasan, penyediaan jasa konsultasi perencanaan terakomodirnnya kegiatan DPRD dalam	60	Bulan	2.680.931.558	48	Bulan	2.658.402.830	12	Bulan	948.680.000	3	Bulan	213.861.300	3	Bulan	494.658.879	3	Bulan	109.960.000	3	Bulan	470.384.566	12	Bulan	1.288.864.745	60	Bulan	3.947.267.575	100	%	147,23	
		04	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.710.337.000**			**2.696.955.030**			**421.290.400**			**49.545.398**			**160.917.323**			**155.325.365**			**393.457.992**											
		04	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD	60	Bulan	502.172.000	48	Bulan	497.996.137	12	Bulan	100.006.400	3	Bulan	29.223.198	3	Bulan	17.130.582	3	Bulan	27.650.549	3	Bulan	72.222.096	12	Bulan	146.226.425	60	Bulan	644.222.562	100	%	128,29	
		04	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasioal	60	Bulan	516.430.000	48	Bulan	508.608.243	12	Bulan	120.784.000	3	Bulan	4.172.200	3	Bulan	67.579.991	3	Bulan	35.503.316	3	Bulan	34.395.896	12	Bulan	141.651.403	60	Bulan	650.259.646	100	%	125,91	
		04	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel kantor	60	Bulan	86.600.000	48	Bulan	86.595.000	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	4.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	6.000.000	12	Bulan	10.000.000	60	Bulan	96.595.000	100	%	111,54	
		04	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya alat studio dan alat-alat komunikasi lainnya	60	Bulan	268.765.000	48	Bulan	268.436.900	12	Bulan	40.500.000	3	Bulan	6.000.000	3	Bulan	22.860.000	3	Bulan	6.100.000	3	Bulan	29.190.000	12	Bulan	64.150.000	60	Bulan	332.586.900	100	%	123,75	
		04	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor DPRD, terpeliharanya rumah	60	Bulan	1.336.370.000	48	Bulan	1.335.318.750	12	Bulan	150.000.000	3	Bulan	10.150.000	3	Bulan	49.346.750	3	Bulan	86.071.500	3	Bulan	251.650.000	12	Bulan	397.218.250	60	Bulan	1.732.537.000	100	%	129,65	
		04	**01**	**2**	**15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				**47.254.314.935,51**			**43.775.609.191**			**10.270.303.814**			**2.473.960.532**			**2.755.964.336**			**2.252.963.036**			**2.560.330.816**											
		04	01	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji dan tunjangan DPRD	60	Bulan	45.620.936.735,51	48	Bulan	42.242.148.557	12	Bulan	9.902.453.914	3	Bulan	2.470.651.130	3	Bulan	2.532.612.624	3	Bulan	2.249.856.252	3	Bulan	2.398.396.032	12	Bulan	9.651.516.038	60	Bulan	51.893.664.595	100	%	113,75	
		04	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD	5	Kegiatan	1.481.978.000	4	Kegiatan	1.476.300.200	1	Kegiatan	280.249.900	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	161.500.000	1	Kegiatan	2.000.000	1	Kegiatan	160.828.000	4	Bulan	324.328.000	8	Bulan	1.800.628.200	160	%	121,50	
		04	01	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya medical check up dan pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	60	Bulan	151.400.200	48	Bulan	57.160.434	12	Bulan	87.600.000	3	Bulan	3.309.402	3	Bulan	61.851.712	3	Bulan	1.106.784	3	Bulan	1.106.784	12	Bulan	67.374.682	60	Bulan	124.535.116	100	%	82,26	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																	
									K			K			K			K			K			K			K																	
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp																	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12					13					14 = 7 +13					15 = 14 / 6 x100%			16
		04	01	2	16		**Layanan Administrasi DPRD**				**9.948.244.000**			**9.823.118.385**			**3.805.421.000**			**900.432.800**			**474.993.050**			**1.250.969.982**			**1.422.680.500**																	
		04	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat dengar pendapat, paripurna dan AKD (alat kelengkapan dewan), Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD, Terpenuhinya pembuatan	60	Bulan	921.563.000	48	Bulan	895.628.500	12	Bulan	698.935.000	3	Bulan	197.069.200	3	Bulan	134.791.850	3	Bulan	204.869.850	3	Bulan	387.689.400	12	Bulan	924.420.300	60	Bulan	1.820.048.800	100	%	197,50	
		04	01	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya keamanan lingkungan gedung kantor, Terpenuhinya penyediaan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD, Terpenuhinya sejumlah jasa tenaga pendukung administrasi kantor, satpam, cleaning service, sopir, staf ahli dan staf fraksi	60	Bulan	9.026.681.000	48	Bulan	8.927.489.885	12	Bulan	3.106.486.000	3	Bulan	703.363.600	3	Bulan	340.201.200	3	Bulan	1.046.100.132	3	Bulan	1.034.991.100	12	Bulan	3.124.656.032	60	Bulan	12.052.145.917	100	%	133,52	
		04	**02**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**32.755.863.845**			**32.254.768.862**			**8.797.662.000**			**1.422.875.200**			**2.373.919.565**			**2.613.306.241**			**4.272.549.550**																	
		04	**02**	**2**	**01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**				**3.268.338.220**			**3.245.251.387**			**700.540.000**			**-**			**-**			**134.121.995**			**223.209.784**																	
		04	02	2	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Bapemperda, Kegiatan Raperda	60	Bulan	2.568.738.220	48	Bulan	2.560.937.650	12	Bulan	500.140.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	134.121.995	3	Bulan	223.209.784	12	Bulan	357.331.779	60	Bulan	2.918.269.429	100	%	113,61	
		04	02	2	01	03	Penyelenggaran kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya pembahasan ranperda yang diusulkan dan Ranperda Inisiatif DPRD	60	Bulan	699.600.000	48	Bulan	684.313.737	12	Bulan	200.400.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	0	Bulan	-	9	Bulan	-	57	Bulan	684.313.737	95	%	97,81	
		04	**02**	**2**	**04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**				**9.593.262.200**			**9.535.545.621**			**1.997.457.000**			**98.738.400**			**759.421.111**			**687.104.228**			**1.480.548.192**																	
		04	02	2	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya bimbingan teknis DPRD	60	Bulan	2.150.817.200	48	Bulan	2.129.310.221	12	Bulan	599.882.000	3	Bulan	65.222.400	3	Bulan	250.662.111	3	Bulan	217.954.228	3	Bulan	457.628.192	12	Bulan	991.466.931	60	Bulan	3.120.777.152	100	%	145,10	
		04	02	2	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya jasa publikasi kegiatan DPRD, Terwujudnya dokumentasi dan dekorasi kegiatan lembaga DPRD	60	Bulan	7.442.445.000	48	Bulan	7.406.235.400	12	Bulan	1.397.575.000	3	Bulan	33.516.000	3	Bulan	508.759.000	3	Bulan	469.150.000	3	Bulan	1.022.920.000	12	Bulan	2.034.345.000	60	Bulan	9.440.580.400	100	%	126,85	
		04	**02**	**2**	**05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				**8.628.358.025**			**8.234.046.500**			**2.296.175.000**			**809.045.000**			**693.452.000**			**587.198.000**			**1.219.303.000**																	
		04	02	2	05	01	Kunjungan Kerja Dalam daerah	Diperolehnya aspirasi masyarakat mengenai perekonomian/ pembangunan serta tersedianya upaya pengendalian dan pengawasan publik melalui kunjungan kerja dalam daerah, Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi DPRD atas kegiatan kepemerintahan daerah	60	Bulan	5.901.195.500	48	Bulan	5.572.590.000	12	Bulan	1.170.250.000	3	Bulan	380.560.000	3	Bulan	686.752.000	3	Bulan	53.164.000	3	Bulan	604.341.000	12	Bulan	1.724.817.000	60	Bulan	7.297.407.000	100	%	123,66	
		04	02	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya pelaksanaan reses pertemuan/dialog Anggoat DPRD dan konstituennya pada daerah pemilihan	60	Bulan	2.727.162.525	48	Bulan	2.661.456.500	12	Bulan	1.125.925.000	3	Bulan	428.485.000	3	Bulan	6.700.000	3	Bulan	534.034.000	3	Bulan	614.962.000	12	Bulan	1.584.181.000	60	Bulan	4.245.637.500	100	%	155,68	
		04	**02**	**2**	**08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**				**11.265.905.400**			**11.239.925.354**			**3.803.490.000**			**515.091.800**			**921.046.454**			**1.204.882.018**			**1.349.488.574**																	
		04	02	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Diperolehnya data/informasi yang dibutuhkan diperbandingkan dalam penyelenggaran pemerintah daerah melalui studi banding/kunjungan kerja ke luar daerah, Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD ke luar daerah	60	Bulan	10.886.405.400	48	Bulan	10.862.192.319	12	Bulan	3.763.960.000	3	Bulan	509.465.000	3	Bulan	903.462.454	3	Bulan	1.192.127.818	3	Bulan	1.296.018.774	12	Bulan	3.901.074.046	60	Bulan	14.763.266.365	100	%	135,61	
		04	02	2	08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya dokumen hasil kegiatan rapat-rapat kegiatan penganggaran dan pengawasan legislatif	60	Bulan	379.500.000	48	Bulan	377.733.035	12	Bulan	39.530.000	3	Bulan	5.626.800	3	Bulan	17.584.000	3	Bulan	12.754.200	3	Bulan	53.469.800	12	Bulan	89.434.800	60	Bulan	467.167.835	100	%	123,10	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
									Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
5							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																	
							PERENCANAAN																																	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																										5.888.168.464							
		5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah																										68.689.000							
		5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	31.889.000	4	Dokumen	24.407.500	1	Dokumen	7.389.000	1	Dokumen	4.760.000	-	Dokumen	2.379.000	0	Dokumen	250.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	7.389.000	5	Dokumen	31.796.500	100	%	99,71	
		5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	39.249.125	4	Dokumen	28.533.025	1	Dokumen	10.000.000		Dokumen	-		Dokumen	1.973.000	1	Dokumen	4.049.000	0	Dokumen	3.978.000	1	Dokumen	10.000.000	5	Dokumen	38.533.025	100	%	98,18	
		5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	35.146.125	4	Dokumen	23.852.025	1	Dokumen	10.000.000		Dokumen	-		Dokumen	-	1	Dokumen	7.340.000	0	Dokumen	2.660.000	1	Dokumen	10.000.000	5	Dokumen	33.852.025	100	%	96,32	
		5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	30.146.125	4	Dokumen	23.626.225	1	Dokumen	6.000.000		Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	6.000.000	1	Dokumen	6.000.000	5	Dokumen	29.626.225	100	%	98,28	
		5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	30.146.125	4	Dokumen	23.342.525	1	Dokumen	6.000.000		Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	2.803.000	1	Dokumen	3.197.000	1	Dokumen	6.000.000	5	Dokumen	29.342.525	100	%	97,33	
		5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Dokumen	105.851.600	12	Dokumen	92.464.600	3	Dokumen	17.773.000	2	Dokumen	1.961.250	1	Dokumen	3.011.750	0	Dokumen	-	0	Dokumen	12.800.000	3	Dokumen	17.773.000	15	Dokumen	110.237.600	100	%	104,14	
		5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	Dokumen	7.327.000		Dokumen		10	Dokumen	11.527.000	9	Dokumen	6.266.750	1	Dokumen	1.060.250	0	Dokumen	-	0	Dokumen	4.200.000	10	Dokumen	11.527.000	10	Dokumen	11.527.000	20	%	157,32	
		5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										4.180.660.908							
		5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	21.709.318.600	48	Bulan	16.198.210.445	12	Bulan	4.237.448.132	3	Bulan	588.807.809	3	Bulan	1.074.601.370	3	Bulan	1.285.182.366	3	Bulan	986.931.363	12	Bulan	3.935.522.908	60	Bulan	20.133.733.353	100	%	92,74	
		5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30	Dokumen	50.000.000	24	Dokumen	32.210.768	6	Dokumen	185.600.000		Dokumen	2.672.000	1	Dokumen	2.600.000	2	Dokumen	5.828.000	3	Dokumen	174.500.000	6	Dokumen	185.600.000	30	Dokumen	217.810.768	100	%	435,62	
		5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dokumen	51.700.000	12	Dokumen	31.014.766	12	Dokumen	20.600.000	3	Dokumen	3.280.000	3	Dokumen	3.814.500	3	Dokumen	4.761.000	3	Dokumen	8.744.500	12	Dokumen	20.600.000	24	Dokumen	51.614.766	40	%	99,84	
		5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	45.338.000		Dokumen	15.414.766	1	Dokumen	8.338.000	1	Dokumen	8.338.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	8.338.000	1	Dokumen	23.752.766	20	%	52,39	
		5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30	Dokumen	20.500.000	24	Dokumen	36.956.100	6	Dokumen	5.000.000	4	Dokumen	1.089.500	0	Dokumen	1.733.000	1	Dokumen	950.000	1	Dokumen	1.227.500	6	Dokumen	5.000.000	30	Dokumen	41.956.100	100	%	204,66	
		5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Laporan	41.200.000	48	Laporan	20.600.000	12	Laporan	20.600.000	4	Laporan	3.517.000	2	Laporan	4.865.000	2	Laporan	3.900.000			8.318.000	8	Laporan	20.600.000	56	Laporan	41.200.000	93	%	100,00	
		5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	Dokumen	10.000.000	8	Dokumen	5.000.000	2	Dokumen	5.000.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.068.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.932.000	2	Dokumen	5.000.000	10	Dokumen	10.000.000	100	%	100,00	
		5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																										40.461.270							
		5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100	%	45.000.000	100	%	44.970.000															0		-	100	0	44.970.000	100	%	99,93	
		5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Anggaran Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah	100	%	42.800.000	100	%	42.800.000															0		-	100	0	42.800.000	100	%	100,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K			K			K			K			K			K			K												
					Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	40.573.270	4	Dokumen		1	Dokumen	40.573.270	1	Dokumen	2.000.600	0	Dokumen	9.414.200	0	Dokumen	9.877.500	0	Dokumen	19.168.970	1	Dokumen	40.461.270	5	Dokumen	40.461.270	100	%	99,72	
		5 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																								**62.197.000**			**62197000**					
		5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	5	Set					5	Set	10.975.000										5	Set	10.975.000	5	Set	10.975.000	5	Set	10.975.000	100	%	#DIV/0!	
		5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35	Dokumen	108.431.900,00	28	Dokumen	71.301.800	7	Dokumen	39.315.000	3	Dokumen	1.050.000	1	Dokumen	13.618.000	1	Dokumen	7.408.000	2	Dokumen	17.146.000	7	Dokumen	39.222.000	35	Dokumen	110.523.800	100	%	101,93	
		5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	166.221.866	14	Orang	133.551.416	1	Orang	4.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	0	Orang	-	1	Orang	4.000.000	1	Orang	4.000.000	15	Orang	137.551.416	100	%	82,75	
		5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang	14.700.000				3	Orang	9.800.000	-	Orang	-	-	Orang	-	2	Orang	8.000.000	0	Orang	-	2	Orang	8.000.000	2	Orang	8.000.000	7	%	54,42	
		5 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																								**712.768.553**			**712.768.553**					
		5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	116.520.870	16	Paket	103.793.256	4	Paket	52.373.732	3	Paket	9.947.850	1	Paket	2.586.230	0	Paket	-	0	Paket	39.839.652	4	Paket	52.373.732	20	Paket	156.166.988	100	%	134,02	
		5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	193.993.100,00	48	Paket	163.533.300	12	Paket	59.320.000	3	Paket	11.632.000	3	Paket	11.686.000	5	Paket	5.757.500	1	Paket	30.244.500	12	Paket	59.320.000	60	Paket	222.853.300	100	%	114,88	
		2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	1	Paket					1	Paket	56.700.000					Paket			Paket		1	Paket	56.175.000	1	Paket	56.175.000	1	Paket	56.175.000	100	%	#DIV/0!	
		5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	148.220.850	48	Paket	123.053.450	12	Paket	50.562.750	3	Paket	11.785.500	3	Paket	8.190.000	4	Paket	3.540.000	2	Paket	27.047.250	12	Paket	50.562.750	60	Paket	173.616.200	100	%	117,13	
		5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar / Majalah / Buku	576	Eksemplar	68.080.001	144	Eksemplar	59.662.335																0	Paket	-	144	Paket	59.662.335	25	%	87,64	
		5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	516.368.000	48	Laporan	350.049.000	12	Laporan	40.353.000	3	Laporan	8.180.000	3	Laporan	8.812.500	3	Laporan	9.000.000	3	Laporan	14.335.000	12	Laporan	40.327.500	60	Laporan	774.058.571	100	%	149,90	
		5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	Laporan	982.224.712	480	Laporan	878.007.103	120	Laporan	432.322.000	36	Laporan	46.692.046	14	Laporan	89.371.144	25	Laporan	108.285.912	45	Laporan	179.660.469	120	Laporan	424.009.571	600	Laporan	1.302.016.674	100	%	132,56	
		5 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Dokumen	61.649.000	8	Dokumen	31.645.000	2	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	3.320.000	0	Dokumen	7.055.000	0	Dokumen	7.025.000	1	Dokumen	12.600.000	2	Dokumen	30.000.000	10	Dokumen	61.645.000	100	%	99,99	
		5 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																								**326.765.000**								
		5 01 01 2.07 07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer PC/Laptop, Printer, Sound System yang dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung	15	Unit	296.295.450,00	4	Unit	275.268.450	9	unit	301.020.000	1	unit	2.430.000	0	unit	-	0	unit	-	8	unit	279.335.000	9	unit	281.765.000	13	unit	557.033.450	87	%	188,00	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										45.000.000												45.000.000	0		45.000.000	0		45.000.000	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		5 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								**332.879.734**								
		5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	33.000.000	48	Laporan	27.000.000	12	Laporan	6.000.000	2	Laporan	1.200.000	4	Laporan	1.800.000	3	Laporan	1.800.000	3	Laporan	1.200.000	12	Laporan	6.000.000	60	Laporan	33.000.000	100	%	100,00	
		5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bulan	914.152.593	48	Bulan	573.680.827	12	Bulan	208.678.752	4	Bulan	48.303.108	2	Bulan	47.870.541	3	Bulan	51.197.932	3	Bulan	52.725.153	12	Bulan	200.096.734	60	Bulan	773.777.561	100	%	84,64	
		5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	1.718.383.000	48	Laporan	1.454.731.200	12	Laporan	126.783.000	2	Laporan	10.540.000	4	Laporan	23.748.000	3	Laporan	41.745.000	3	Laporan	50.750.000	12	Laporan	126.783.000	60	Laporan	1.581.514.200	100	%	92,04	
		5 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																								**163.746.999**								
		5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	120.000.000	4	Unit	95.115.215	1	Unit	32.737.500	-	Unit	-	1	Unit	10.416.000	0	Unit	-	0	Unit	11.825.999	1	Unit	22.241.999	5	Unit	117.357.214	100	%	97,80	
		5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	Unit	117.384.545	120	Unit	75.021.003	30	Unit	35.535.000	3	Unit	3.405.000	4	Unit	11.390.000	3	Unit	9.375.000	20	Unit	17.420.000	30	Unit	41.590.000	150	Unit	116.611.003	100	%	99,34	
		5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Tahun	349.915.000	1	Tahun	296.715.000	1	Tahun	100.000.000	0	Tahun	20.000.000	1	Tahun	29.915.000	0	Tahun	-	0	Tahun	50.000.000	1	Tahun	99.915.000	2	Tahun	396.630.000	50	%	113,35	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K			K			K			
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**																															
																											869.140.047						
		5 01 02 2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**																									**384.641.727**						
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksanaya Forum Konsultasi Publik	5	Kegiatan	15.000.000				1	Kegiatan	14.640.000	1	Kegiatan	14.496.800	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan		1	Kegiatan	14.496.800	1	Kegiatan	14.496.800	20	%	96,65	
		5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksanaya Forum SKPD/Lintas SKPD	5	Kegiatan	328.008.515	4	Kegiatan	273.601.715	1	Kegiatan	52.310.000	1	Kegiatan	25.564.300	0	Kegiatan	14.853.000	0	Kegiatan	3.900.000	0	Kegiatan	7.800.000	1	Kegiatan	52.117.300	5	Kegiatan	325.719.015	100	%	99,30	
		5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2023	5	Kegiatan	345.064.456	4	Kegiatan	196.008.407	1	Kegiatan	40.240.000	1	Kegiatan	21.720.000	0	Kegiatan	8.776.800	0	Kegiatan	3.150.000	0	Kegiatan	6.300.000	1	Kegiatan	39.946.800	5	Kegiatan	235.955.207	100	%	68,38	
		5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Berita Acara Musrenbang Kecamatan	5	Kegiatan	372.364.056	4	Kegiatan	235.308.007	1	Kegiatan	128.156.000	1	Kegiatan	128.046.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-		Kegiatan	-	1	Kegiatan	128.046.000	5	Kegiatan	363.354.007	100	%	97,58	
		5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RPD Tahun 2023-2026, Dokumen RKPD Tahun 2023, dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022	15	Dokumen		12	Dokumen		3	Dokumen	150.438.500	1	Dokumen	33.049.900	1	Dokumen	69.704.927	1	Dokumen			Dokumen	47.280.000	3	Dokumen	150.034.827	15	Dokumen	817.872.714	100	%	92,55	
				Tersedianya Dokumen Evaluasi RKPD	1	Dokumen	883.706.000			667.837.887																								
				Tersusunnya Laporan Evaluasi RPJMD	4	Tahun																												
				Tersusunnya Perubahan RKPD 2022	1	Dokumen																												
				Tersusunnya RKPD 2022	5	Tahun																												
		5 01 02 2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**																									**164.083.400**						
		5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Analisis Data dan Informasi Perencanaan	20	Laporan	173.880.000	16	Laporan	103.112.500	4	Laporan	49.484.500	1	Laporan	5.326.200	0	Laporan	4.548.500	3	Laporan	39.386.400	0	Laporan	-	4	Laporan	49.261.100	20	Laporan	152.373.600	100	%	87,63	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksanaya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	5	Laporan	69.000.000				1	Laporan	76.065.000	-	Laporan	-	1	Laporan	23.248.500	0	Laporan	30.151.500	0	Laporan	22.650.000	1	Laporan	76.050.000	1	Laporan	76.050.000	20	%	110,22	
		5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Buku Informasi Pembangunan	5	Dokumen	296.531.700	4	Dokumen	133.373.600	1	Dokumen	38.800.000	1	Dokumen	14.509.300	0	Dokumen	13.913.000	0	Dokumen	5.750.000	0	Dokumen	4.600.000	1	Dokumen	38.772.300	5	Dokumen	172.145.900	100	%	58,05	
		5 01 02 2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**																									**320.414.920**						
		5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi	60	Laporan	807.552.800	48	Laporan	653.132.743	12	Laporan	190.323.500	2	Laporan	25.408.800	4	Laporan	40.528.200	3	Laporan	29.821.200	3	Laporan	94.337.420	12	Laporan	190.095.620	60	Laporan	843.228.363	100	%	104,42	
		5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20	Dokumen		16	Dokumen		4	Dokumen	133.157.500	-	-	4.870.800	1	Dokumen	46.365.100	1	Dokumen	19.573.500	2	Dokumen	59.509.900	4	Dokumen	130.319.300	20	Dokumen	691.971.840	100	%	103,34	
				Terlaksanaya laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	5	Tahun																												
				Terlaksanaya Rapat Pertemuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Tim Evaluasi dan Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)	5	Tahun	669.635.812			561.652.540																										
				Terlaksanaya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	5	Tahun																												
		5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**																									1.653.539.135						
		5 01 03 2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**																									**517.840.944**						
		5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	328.467.439	4	Dokumen	300.238.578	1	Dokumen	48.600.000	1	Dokumen	23.463.800	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	25.130.456	1	Dokumen	48.594.256	5	Dokumen	348.832.834	100	%	106,20	
		5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	7	PD	66.300.000	7	PD	54.425.800	7	PD	10.400.000	7	PD	10.400.000	0	PD	-	0	PD	-	0	PD	-	7	PD	10.400.000	14	PD	64.825.800	200	%	97,78	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV														
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7	PD	164.702.000,00	7	PD	121.743.900	7	Laporan	80.000.000			18.071.000	4	Laporan	2.475.000	2	Laporan	3.150.000	1	Laporan	56.273.100	7	Laporan	79.969.100	14	Laporan	201.713.000	200	%	122,47		
		5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7	PD	147.004.100,00	7	PD	107.347.600	7	PD	53.000.000			-		PD	2.100.000	5	PD	27.048.888	2	PD	22.947.000	7	PD	52.095.888	14	PD	159.443.488	200	%	108,46		
		5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	Dokumen	298.189.777	8	Dokumen	259.600.182	2	Dokumen	80.000.000			-	2	Dokumen	23.891.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	56.050.400	2	Dokumen	79.941.400	10	Dokumen	339.541.582	100	%	113,87		
		5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	PD	36.250.000,00	9	PD	21.250.000	9	PD	15.000.000			600.000		PD	-	9	PD	14.400.000	0	PD	-	9	PD	15.000.000	18	PD	36.250.000	200	%	100,00		
		5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	PD	161.580.000,00	9	PD	105.636.600	9	PD	55.000.000			1.050.000		PD	22.789.000	9	PD	24.377.400	0	PD	6.771.000	9	PD	54.987.400	18	PD	160.624.000	200	%	99,41		
		5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9	Laporan	776.206.950,00	9	Laporan	598.888.724	9	Laporan	176.990.000			29.977.000	3	Laporan	50.717.500	4	Laporan	8.670.600	2	Laporan	87.487.800	9	Laporan	176.852.900	18	Laporan	775.741.624	200	%	99,94		
		5 01 03 2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**																								**519.626.100**								
		5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	Dokumen	362.211.200	12	Dokumen	244.396.661	3	Dokumen	191.000.000			42.086.500	1	Dokumen	43.067.000	1	Dokumen	9.249.600	1	Dokumen	94.496.900	3	Dokumen	188.900.000	15	Dokumen	433.296.661	100	%	119,63		
		5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6	PD	34.014.900	6	PD	29.911.100	6	PD	3.180.000			770.000	6	PD	500.000	0	PD	1.910.000	0	PD	-	6	PD	3.180.000	12	PD	33.091.100	200	%	97,28		
		5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	15	Laporan	326.028.600	12	Laporan	270.289.700	3	Laporan	37.000.000			9.135.000	1	Laporan	17.482.400	0	Laporan	7.509.000	2	Laporan	2.811.000	3	Laporan	36.937.400	15	Laporan	307.227.100	100	%	94,23		
		5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	Laporan	364.998.000,00	4	Laporan	225.408.176	1	Laporan	190.000.000			31.440.800	0	Laporan	26.512.600	1	Laporan	31.470.800	0	Laporan	100.575.800	1	Laporan	190.000.000	5	Laporan	415.408.176	100	%	113,81		
		5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15	Dokumen	262.028.000	12	Dokumen	97.188.800	3	Dokumen	34.000.000			500.000	1	Dokumen	9.675.000	0	Dokumen	14.883.600	2	Dokumen	8.941.400	3	Dokumen	34.000.000	15	Dokumen	131.188.800	100	%	50,07		
		5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3	PD	3.927.000,00	3	PD	1.677.000	3	PD	2.580.000			950.000	3	PD	800.000	0	PD	-	0	PD	830.000	3	PD	2.580.000	6	PD	4.257.000	200	%	108,40		
		5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	15	Laporan	360.037.861	12	Laporan	305.596.262	3	Laporan	42.150.000			16.456.200	1	Laporan	9.404.700	0	Laporan	13.341.400	2	Laporan	2.900.000	3	Laporan	42.102.300	15	Laporan	347.698.562	100	%	96,57		
		5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5	Laporan	115.396.300,00	4	Laporan	82.945.300	1	Laporan	22.000.000			378.000	1	Laporan	20.157.400	0	Laporan	-	0	Laporan	1.391.000	1	Laporan	21.926.400	5	Laporan	104.871.700	100	%	90,88		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5 01 03 2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**																								**616.072.091**								
		5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30	Dokumen	232.395.000	24	Dokumen	188.964.642	6	Dokumen	43.150.000	1	Dokumen	5.865.000	3	Dokumen	29.052.200	1	Dokumen	7.402.200	1	Dokumen	-	6	Dokumen	42.319.400	30	Dokumen	231.284.042	100	%	99,52	
		5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6	Perangkat Daerah	51.722.500	6	Perangkat Daerah	43.934.500	6	Perangkat Daerah	6.000.000	0	-	-	3	Perangkat Daerah	3.250.000	1	rangkat Daer	-	2	Perangkat Daerah	2.750.000	6	Perangkat Daerah	6.000.000	12	Perangkat Daerah	49.934.500	200	%	96,54	
		5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6	Perangkat Daerah	276.789.200	6	Perangkat Daerah	196.309.000	6	Perangkat Daerah	80.150.000	1	Perangkat Daerah	5.650.000	2	Perangkat Daerah	31.030.000	1	rangkat Daer	16.500.000	2	Perangkat Daerah	25.200.000	6	Perangkat Daerah	78.380.000	12	Perangkat Daerah	274.689.000	200	%	99,24	
		5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	30	Laporan	654.952.075	24	Laporan	470.437.675	6	Laporan	219.450.000	2	Laporan	68.933.700	3	Laporan	95.286.800	0	Laporan	15.304.100	1	Laporan	39.678.070	6	Laporan	219.202.670	30	Laporan	689.640.345	100	%	105,30	
		5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30	Dokumen	667.393.500	24	Dokumen	586.507.500	6	Dokumen	80.150.000	2	Dokumen	24.040.000	0	Dokumen	5.000.000	2	Dokumen	28.346.000	2	Dokumen	22.716.000	6	Dokumen	80.102.000	30	Dokumen	666.609.500	100	%	99,88	
		5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	30	Laporan	966.844.000,00	24	Laporan	898.282.000	6	Laporan	191.000.000	1	Laporan	5.714.000	2	Laporan	36.908.800	2	Laporan	17.008.200	1	Laporan	130.437.021	6	Laporan	190.068.021	30	Laporan	1.088.350.021	100	%	112,57	
			KEUANGAN																																**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel	**5 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																																
		5 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																
		5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Renja,RKA-SKPD	60	Bulan	78.696.115,00	48	Bulan	77.943.515,00	12	Bulan	39.664.880,00	3	Bulan	13.673.000	3	Bulan	12.470.000	3	Bulan	500.000	3	Bulan	13.009.880	12	Bulan	39.652.880	60	Bulan	117.596.395	100	%	149,43	
		5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokomen Perubahan Renja, RKA SKPD	60	Bulan	58.359.850,00	48	Bulan	57.129.625,00	12	Bulan	33.840.000,00	3	Bulan		3	Bulan	5.478.000	3	Bulan	17.604.000	3	Bulan	9.142.000	12	Bulan	32.224.000	60	Bulan	89.353.625	100	%	153,11	
		5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA SKPD									63.119.000,00											62.962.500	0	Bulan	62.962.500	0	Bulan	62.962.500	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan DPA Perubahan SKPD									56.800.000,00											56.796.000	0	Bulan	56.796.000	0	Bulan	56.796.000	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah SKPD	60	Bulan	51.893.610,00	48	Bulan	51.284.410,00	12	Bulan	30.300.000,00	3	Bulan		3	Bulan	13.840.300	3	Bulan	10.972.700	3	Bulan	5.487.000	12	Bulan	30.300.000	60	Bulan	81.584.410	100	%	157,21	
		5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																
		5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNSD dan Tersedianya Tambahan Penghasilan PNSD	60	Bulan	19.800.675.631,00	48	Bulan	18.713.402.123,00	12	Bulan	23.366.142.028,00	3	Bulan	3.461.397.548	3	Bulan	3.591.492.931	3	Bulan	6.425.434.380	3	Bulan	6.382.969.026	12	Bulan	19.861.293.885	60	Bulan	38.574.696.008	100	%	194,82	
		5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	456.596.270,00	48	Bulan	500.352.550,00	12	Bulan	206.309.260,00	3	Bulan	29.512.380	3	Bulan	54.537.180	3	Bulan	30.522.400	3	Bulan	91.722.100	12	Bulan	206.294.060	60	Bulan	706.646.610	100	%	154,76	
		5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	60	Bulan	371.723.580,00	48	Bulan	371.087.240,00	12	Bulan	200.804.560,00	3	Bulan	29.944.360	3	Bulan	48.831.340	3	Bulan	57.474.780	3	Bulan	64.443.400	12	Bulan	200.693.880	60	Bulan	571.781.120	100	%	153,82	
		5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD										596.040.000,00											596.040.000	0	Bulan	596.040.000	0	Bulan	596.040.000	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		5 02 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																								-								
		5 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tertibnya penganggran dan Perencanaan BMD	60	Bulan	49.426.000,00	48	Bulan	35.930.000,00	12	Bulan	35.021.400,00	3	Bulan	3.350.000	3	Bulan	10.410.700	3	Bulan	9.100.000	3	Bulan	12.160.700	12	Bulan	35.021.400	60	Bulan	70.951.400	100	%	143,55	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Inventarisasi Internal Aset tetap BPKAD	60	Bulan	98.666.290,00	48	Bulan	97.871.880,00	12	Bulan	185.189.150,00	3	Bulan	16.904.550	3	Bulan	22.459.050	3	Bulan	12.356.800	3	Bulan	119.847.865	12	Bulan	171.568.265	60	Bulan	269.440.145	100	%	273,08	
		5	**02**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**																																			
		5	02	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Honorarium Pegawai Non PNS, Pencapaian Target Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah	60	Bulan	699.799.610,00	48	Bulan	695.584.155,00	12	Bulan	106.132.949,00	3	Bulan	5.300.000	3	Bulan	12.576.500	3	Bulan	14.656.000	3	Bulan	70.149.234	12	Bulan	102.681.734	60	Bulan	798.265.889	100	%	114,07	
		5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																									-								
		5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pentaan, Pengelolaan Administrasi Kepegawaiiaan	60	Bulan	510.256.235,00	48	Bulan	502.450.035,00	12	Bulan	184.224.150,00	3	Bulan	22.040.200	3	Bulan	29.729.450	3	Bulan	23.827.300	3	Bulan	104.885.400	12	Bulan	180.482.350	60	Bulan	682.932.385	100	%	133,84	
		5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																									-								
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kompunen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan	113.157.207,00	48	Bulan	108.863.375,00	12	Bulan	33.732.570,00	3	Bulan		3	Bulan	10.528.785	3	Bulan	12.689.229	3	Bulan	10.514.556	12	Bulan	33.732.570	60	Bulan	142.595.945	100	%	126,02	
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	Bulan	347.192.427,50	48	Bulan	347.095.946,00	12	Bulan	107.459.100,00	3	Bulan	24.222.000	3	Bulan	35.649.300	3	Bulan	29.114.100	3	Bulan	18.465.300	12	Bulan	107.450.700	60	Bulan	454.546.646	100	%	130,92	
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih	60	Bulan	59.113.000,00	48	Bulan	58.383.000,00	12	Bulan	71.049.220,00	3	Bulan	5.457.600	3	Bulan	12.117.540	3	Bulan	4.559.000	3	Bulan	48.915.080	12	Bulan	71.049.220	60	Bulan	129.432.220	100	%	218,96	
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen SKPD	60	Bulan	1.715.373.500,00	48	Bulan	1.666.548.500,00	12	Bulan	33.519.780,00	3	Bulan	3.978.000	3	Bulan	11.262.000	3	Bulan	14.870.000	3	Bulan	3.409.780	12	Bulan	33.519.780	60	Bulan	1.700.068.280	100	%	99,11	
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	60	Bulan	109.997.000,00	48	Bulan	109.700.000,00	12	Bulan	36.995.000,00	3	Bulan	1.320.000	3	Bulan	3.770.000	3	Bulan	3.170.000	3	Bulan	6.190.000	12	Bulan	14.450.000	60	Bulan	124.150.000	100	%	112,87	
		5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianaya Makan Minum Kantor, Tersedianya makan minum tamu	60	Bulan	586.586.000,00	48	Bulan	560.739.000,00	12	Bulan	72.287.080,00	3	Bulan	6.875.000	3	Bulan	7.775.000	3	Bulan	19.850.000	3	Bulan	37.785.000	12	Bulan	72.285.000	60	Bulan	633.024.000	100	%	107,92	
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	60	Bulan	759.040.075,00	48	Bulan	753.876.345,00	12	Bulan	189.999.820,00	3	Bulan	19.700.800	3	Bulan	59.910.800	3	Bulan	60.829.875	3	Bulan	49.484.020	12	Bulan	189.925.495	60	Bulan	943.801.840	100	%	124,34	
		5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																			
		5	02	01	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									6.528.020.000,00											4.108.863.365	0	Bulan	4.108.863.365	0	Bulan	4.108.863.365	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	60	Bulan	350.399.770,00	48	Bulan	346.804.270,00	12	Bulan	26.106.040,00	3	Bulan		3	Bulan	2.561.400	3	Bulan	-	3	Bulan	15.344.640	12	Bulan	17.906.040	60	Bulan	364.710.310	100	%	104,08	
		5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	60	Bulan	9.619.860.000,00	48	Bulan	7.579.682.500,00	12	Bulan	258.228.500,00	3	Bulan	52.900.000	3	Bulan	3.141.720	3	Bulan	-	3	Bulan	187.576.780	12	Bulan	243.618.500	60	Bulan	7.823.301.000	100	%	81,32	
		5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																			
		5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksannya surat menyurat	60	Bulan	247.460.406,00	48	Bulan	273.517.605,00	12	Bulan	61.463.840,00	3	Bulan	3.653.600	3	Bulan	15.123.640	3	Bulan	12.073.200	3	Bulan	30.613.400	12	Bulan	61.463.840	60	Bulan	334.981.445	100	%	135,37	
		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanya komonikasi dan terpenuhinya kewajiboan air dan listrik	60	Bulan	1.365.307.294,70	48	Bulan	1.177.857.514,00	12	Bulan	415.593.824,00	3	Bulan	81.608.851	3	Bulan	68.311.976	3	Bulan	118.723.968	3	Bulan	92.734.100	12	Bulan	361.378.895	60	Bulan	1.539.236.409	100	%	112,74	
		5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedinya jasa administrasi pengelolaan keuangan SKPD	60	Bulan	1.027.361.075,00	48	Bulan	1.011.879.075,00	12	Bulan	426.271.200,00	3	Bulan	60.700.000	3	Bulan	122.770.000	3	Bulan	59.825.000	3	Bulan	138.064.840	12	Bulan	381.359.840	60	Bulan	1.393.238.915	100	%	135,61	
		5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																			
		5	02	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									52.276.000,00											3	Bulan	51.176.000	3	Bulan	51.176.000	3	Bulan	51.176.000	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	Bulan	420.957.900,00	48	Bulan	418.638.690,00	12	Bulan	1.061.744.800,00	3	Bulan	0	3	Bulan	8.421.900	3	Bulan	-	3	Bulan	1.044.290.000	12	Bulan	1.052.711.900	60	Bulan	1.471.350.590	100	%	349,52	
		5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berrkala perlengkapan gedung kantor	60	Bulan	423.640.901,00	48	Bulan	432.922.500,00	12	Bulan	46.592.340,00	3	Bulan		3	Bulan	-	3	Bulan	15.187.340	3	Bulan	9.500.000	12	Bulan	24.687.340	60	Bulan	457.609.840	100	%	108,02	
		5	**02**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**																																	
		5	02	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksanya monitoring dan evaluasi perencanaan kegiatan	60	Bulan	623.055.320,00	48	Bulan	620.238.464,00	12	Bulan	176.327.680,00	3	Bulan	40.621.100	3	Bulan	64.965.000	3	Bulan	53.810.680	3	Bulan	16.832.000	12	Bulan	176.228.780	60	Bulan	796.467.244	100	%	127,83	
		5	02	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Penyusunan LPPD, TEPRA, LAKIP, SIPD, RUP dan SPIP	60	Bulan	153.949.680,00	48	Bulan	152.837.880,00	12	Bulan	148.249.500,00	3	Bulan	36.668.700	3	Bulan	50.250.000	3	Bulan	25.608.200	3	Bulan	35.544.400	12	Bulan	148.071.300	60	Bulan	300.909.180	100	%	195,46	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																	
									K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**																																			
		5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**																																			
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedinya dokumen nota kesepakatan KUA PPAS	60	Bulan	40.000.000,00	48	Bulan	40.000.000,00	12	Bulan	70.000.000,00	3	Bulan	18.133.800	3	Bulan	-	3	Bulan	14.799.500	3	Bulan	24.949.700	12	Bulan	57.883.000	60	Bulan	97.883.000	100	%	244,71	
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedinya dokumen nota kesepakatan KUA PPAS	60	Bulan	36.300.000,00	48	Bulan	36.273.600,00	12	Bulan	46.300.000,00	3	Bulan	2.701.100	3	Bulan	24.373.500	3	Bulan	11.567.900	3	Bulan	2.451.300	12	Bulan	41.093.800	60	Bulan	77.367.400	100	%	213,13	
		5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksanya verifikasi RKA	60	Bulan	150.913.350,00	48	Bulan	148.512.350,00	12	Bulan	45.473.350,00	3	Bulan	17.524.350	3	Bulan	-	3	Bulan	4.708.500	3	Bulan	11.581.050	12	Bulan	33.813.900	60	Bulan	182.326.250	100	%	120,82	
		5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksanya verifkasi Perubahan RKA SKPD	60	Bulan	518.943.900,00	48	Bulan	504.666.200,00	12	Bulan	73.178.400,00	3	Bulan		3	Bulan	26.546.950	3	Bulan	-	3	Bulan	33.411.600	12	Bulan	59.958.550	60	Bulan	564.624.750	100	%	108,80	
		5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersedinya Data Hasil Verfikasi DPA SKPD	60	Bulan	75.291.250,00	48	Bulan	74.352.650,00	12	Bulan	216.879.000,00	3	Bulan	15.310.100	3	Bulan	6.222.000	3	Bulan	19.994.750	3	Bulan	173.005.850	12	Bulan	214.532.700	60	Bulan	288.885.350	100	%	383,69	
		5	02	02	2.01	07	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksanya penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	60	Bulan	68.096.200,00	48	Bulan	67.612.000,00	12	Bulan	111.481.200,00	3	Bulan		3	Bulan	-	3	Bulan	39.455.200	3	Bulan	71.978.000	12	Bulan	111.433.200	60	Bulan	179.045.200	100	%	262,93	
		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksanya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	60	Bulan	806.996.000,00	48	Bulan	789.037.584,00	12	Bulan	200.000.000,00	3	Bulan	31.785.500	3	Bulan	12.275.400	3	Bulan	6.000.000	3	Bulan	146.879.600	12	Bulan	196.940.500	60	Bulan	985.978.084	100	%	122,18	
		5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	60	Bulan	683.159.425,00	48	Bulan	668.702.050,00	12	Bulan	160.000.000,00	3	Bulan	4.600.000	3	Bulan	23.489.400	3	Bulan	61.921.815	3	Bulan	69.970.070	12	Bulan	159.981.285	60	Bulan	828.683.335	100	%	121,30	
		5	02	02	2.01	10	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersedianya Regolasi serta kebijakan Bidang Anggaran	60	Bulan	1.223.570.550,00	48	Bulan	651.559.150,00	12	Bulan	136.696.000,00	3	Bulan	32.324.600	3	Bulan	29.862.850	3	Bulan	30.539.150	3	Bulan	27.366.100	12	Bulan	120.092.700	60	Bulan	771.651.850	100	%	63,07	
		5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksanya Anggaran Pembiayaan	60	Bulan	154.882.000,00	48	Bulan	154.463.800,00	12	Bulan	518.304.000,00	3	Bulan	33.904.400	3	Bulan	53.542.792	3	Bulan	100.000.000	3	Bulan	330.856.808	12	Bulan	518.304.000	60	Bulan	672.767.800	100	%	434,37	
		5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksanya Anggaran Pembiayaan	60	Bulan	528.583.300,00	48	Bulan	792.182.000,00	12	Bulan	233.721.350,00	3	Bulan	22.046.400	3	Bulan	45.574.950	3	Bulan	8.300.000	3	Bulan	156.416.650	12	Bulan	232.338.000	60	Bulan	1.024.520.000	100	%	193,82	
		5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Penggangaran Daerah Kabupaten/Kota	60	Bulan	93.947.450,00	48	Bulan		12	Bulan	224.047.500,00	3	Bulan	11.253.600	3	Bulan	58.800.000	3	Bulan	11.652.400	3	Bulan	142.302.400	12	Bulan	224.008.400	60	Bulan	224.008.400	100	%	238,44	
		5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**																																			
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya dana Pengelolaan dan penerapan BUD dan Kuasa BUD	60	Bulan	396.877.000,00	48	Bulan	390.841.783,00	12	Bulan	61.896.600,00	3	Bulan	15.378.400	3	Bulan	17.494.200	3	Bulan	3.454.000	3	Bulan	25.462.500	12	Bulan	61.789.100	60	Bulan	452.630.883	100	%	114,05	
		5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedinya dana penyipan, Pelaksanaan Pengendalian Penerbitan Anggaran KAS dan SPD	60	Bulan	15.000.000,00	48	Bulan	14.613.800,00	12	Bulan	44.995.000,00	3	Bulan	5.909.200	3	Bulan	2.475.400	3	Bulan	1.266.000	3	Bulan	34.932.200	12	Bulan	44.582.800	60	Bulan	59.196.600	100	%	394,64	
		5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tersedinaya Dana Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah	60	Bulan	566.432.900,00	48	Bulan	560.410.834,00	12	Bulan	108.399.850,00	3	Bulan	29.947.300	3	Bulan	16.341.400	3	Bulan	30.483.200	3	Bulan	40.504.250	12	Bulan	117.276.150	60	Bulan	677.686.984	100	%	119,64	
		5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terkelolanya Dana Perimbangan dan Dana Transper Lainnya	60	Bulan	1.750.573.744,00	48	Bulan	1.496.406.347,00	12	Bulan	64.971.000,00	3	Bulan	11.422.000	3	Bulan	-	3	Bulan	8.338.800	3	Bulan	58.075.000	12	Bulan	77.835.800	60	Bulan	1.574.242.147	100	%	89,93	
		5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tersedianya Dana Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2021	60	Bulan	35.433.700,00	48	Bulan	34.564.000,00	12	Bulan	68.580.000,00	3	Bulan	2.940.000	3	Bulan	9.580.500	3	Bulan	-	3	Bulan	31.562.200	12	Bulan	44.082.700	60	Bulan	78.646.700	100	%	221,95	
		5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tersedinya Dana Pengelolaan Administrasi Bendahara Umum Daerah (BUD)	60	Bulan	516.728.850,00	48	Bulan	505.871.900,00	12	Bulan	63.232.000,00	3	Bulan	12.201.950	3	Bulan	21.753.950	3	Bulan	5.027.950	3	Bulan	24.045.300	12	Bulan	63.029.150	60	Bulan	568.901.050	100	%	110,10	
		5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya Dana Penyusunan Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keungan Daerah	60	Bulan	634.421.750,00	48	Bulan	615.477.337,00	12	Bulan	124.664.000,00	3	Bulan	18.192.000	3	Bulan	25.607.200	3	Bulan	23.182.000	3	Bulan	57.324.100	12	Bulan	124.305.300	60	Bulan	739.782.637	100	%	116,61	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
									K			K			K			K			K			K			K														
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12											13			14 = 7 :13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran KAS serta Pentausahaan dan Pertanggungjawaban Seb Kegiatan	60	Bulan	224.020.000,00	48	Bulan	213.026.400,00	12	Bulan	325.465.350,00	3	Bulan	13.801.600	3	Bulan	22.892.200	3	Bulan	19.079.000	3	Bulan	248.291.358	12	Bulan	304.064.158	60	Bulan	517.090.558	100	%	230,82	
		5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Penatausahaan Keuangan Daerah	60	Bulan	609.483.045,00	48	Bulan	503.085.600,00	12	Bulan	271.392.250,00	3	Bulan	16.287.200	3	Bulan	13.126.000	3	Bulan	11.626.800	3	Bulan	221.358.200	12	Bulan	262.398.200	60	Bulan	765.483.800	100	%	125,60	
		5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**																																				
		5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi penerimaan dan Pengeluaran KAS	60	Bulan	478.199.800,00	48	Bulan	460.343.105,00	12	Bulan	144.359.700,00	3	Bulan	8.485.600	3	Bulan	20.813.300	3	Bulan	4.902.200	3	Bulan	109.351.153	12	Bulan	143.552.253	60	Bulan	603.895.358	100	%	126,29	
		5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	60	Bulan	218.317.830,00	48	Bulan	217.852.930,00	12	Bulan	292.881.360,00	3	Bulan	19.637.200	3	Bulan	36.592.000	3	Bulan	22.297.760	3	Bulan	208.342.489	12	Bulan	286.869.449	60	Bulan	504.722.379	100	%	231,19	
		5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi penyusunan Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD	60	Bulan	578.644.240,00	48	Bulan	563.283.620,00	12	Bulan	278.277.000,00	3	Bulan	9.745.000	3	Bulan	9.919.000	3	Bulan	33.775.300	3	Bulan	224.750.700	12	Bulan	278.190.000	60	Bulan	841.473.620	100	%	145,42	
		5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan keungan SKPD, BLUD Laporan Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	396.384.260,00	48	Bulan	396.151.880,00	12	Bulan	104.170.060,00	3	Bulan	12.447.000	3	Bulan	10.371.000	3	Bulan	30.820.740	3	Bulan	48.779.620	12	Bulan	102.418.360	60	Bulan	498.570.240	100	%	125,78	
		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	60	Bulan	654.339.740,00	48	Bulan	642.104.020,00	12	Bulan	227.513.520,00	3	Bulan	33.090.000	3	Bulan	35.905.500	3	Bulan	43.181.460	3	Bulan	114.341.160	12	Bulan	226.518.120	60	Bulan	868.622.140	100	%	132,75	
		5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan tanggapan /Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan	60	Bulan	406.016.780,00	48	Bulan	405.526.700,00	12	Bulan	40.843.540,00	3	Bulan	1.300.000	3	Bulan	24.088.800	3	Bulan	10.206.740	3	Bulan	4.586.800	12	Bulan	40.182.340	60	Bulan	445.709.040	100	%	109,78	
		5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keungan Pemerintah Daerah	60	Bulan	251.499.640,00	48	Bulan	250.844.840,00	12	Bulan	150.031.800,00	3	Bulan		3	Bulan	-	3	Bulan	13.890.950	3	Bulan	134.653.213	12	Bulan	148.544.163	60	Bulan	399.389.003	100	%	158,80	
		5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**																																				
		5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Belanja Bunga	60	Bulan	1.247.640.986,00	48	Bulan	1.285.000.000,00	12	Bulan	926.217.034,00	3	Bulan	856.246.265	3	Bulan	69.970.768	3	Bulan	-	3	Bulan		12	Bulan	926.217.033	60	Bulan	2.211.217.033	100	%	177,23	
		5	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Belanja Subsidi PDAM Kab. Banto Selatan	60	Bulan	1.285.000.000,00	48	Bulan		12	Bulan	783.742.010,00	3	Bulan		3	Bulan	783.742.010	3	Bulan	-	3	Bulan		12	Bulan	783.742.010	60	Bulan	783.742.010	100	%	60,99	
		5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Belanja Bantuan Keuangan	60	Bulan	87.391.541.000,00	48	Bulan	86.325.482.880,00	12	Bulan	71.563.400.000,00	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	54.074.353.960	12	Bulan	54.074.353.960	60	Bulan	140.399.836.840	100	%	160,66	
		5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Bantuan Sosial Belanja Tidak terduga	60	Bulan	27.947.407.375,00	48	Bulan	24.676.852.898,00	12	Bulan	30.185.858.984,00	3	Bulan	800.000.000	3	Bulan	6.791.329.644	3	Bulan	2.437.573.200	3	Bulan	5.864.125.944	12	Bulan	15.893.028.788	60	Bulan	40.569.881.686	100	%	145,17	
		5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil KabupatenKota	Belanja Bagi hasil pajak Kepada Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Desa Terkoordinasinya Pengelolaan data Dana Bagi Hasil Kabopaten/Kota	60	Bulan	3.875.670.196,00	48	Bulan	1.961.291.500,00	12	Bulan	3.779.144.338,00	3	Bulan							-			1.700.837.864	3	Bulan	1.700.837.864	51	Bulan	3.662.129.364	85	%	94,49	
		5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**																																				
		5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**																																			
		5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Buku Standar Harga	60	Bulan	192.016.470,00	48	Bulan	190.495.770,00	12	Bulan	175.255.700,00	3	Bulan	86.797.500	3	Bulan	7.500.000	3	Bulan	29.489.500	3	Bulan	49.578.700	12	Bulan	173.365.700	60	Bulan	363.861.470	100	%	189,49	
		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pelaporan BMD Tersedianya Laporan BMD Tersedianya Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah melaui Pendampingan Sistem Aplikasi SIMBADA BMD	60	Bulan	1.005.500.000,00	48	Bulan	978.140.897,00	12	Bulan	433.261.200,00	3	Bulan	8.300.000	3	Bulan	69.561.200	3	Bulan	8.300.000	3	Bulan	286.651.700	12	Bulan	372.812.900	60	Bulan	1.350.953.797	100	%	134,36	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah									33.597.800,00											29.058.200	0	Bulan	29.058.200	0	Bulan	29.058.200	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terkelolanya Aset Barang Milik Daerah, Terkelolanya kepemilikan atas Tanah Pemda, Terpenuhinya Pengamanan Dokumen Kepemilikan Tanah	60	Bulan	630.940.000,00	48	Bulan	596.494.779,00	12	Bulan	357.565.720,00	3	Bulan	25.234.000	3	Bulan	94.026.020	3	Bulan	40.673.200	3	Bulan	158.138.220	12	Bulan	318.071.440	60	Bulan	914.566.219	100	%	144,95	
		5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksanya Penilaian dan Lelang Barang Milik Daerah	60	Bulan	160.208.840,00	48	Bulan	139.893.380,00	12	Bulan	76.314.220,00	3	Bulan	6.450.100	3	Bulan	3.851.400	3	Bulan	29.782.800	3	Bulan	35.773.600	12	Bulan	75.857.900	60	Bulan	215.751.280	100	%	134,67	
		5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanya Pengendalian BMD	60	Bulan	782.433.000,00	48	Bulan	722.325.200,00	12	Bulan	99.164.380,00	3	Bulan	20.758.000	3	Bulan	31.861.000	3	Bulan	5.847.980	3	Bulan	40.149.600	12	Bulan	98.616.580	60	Bulan	820.941.780	100	%	104,92	
		5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksanya Pemindah tanganan BMD	60	Bulan	577.087.000,00	48	Bulan	223.106.560,00	12	Bulan	163.456.600,00	3	Bulan	21.271.200	3	Bulan	19.722.700	3	Bulan	29.753.400	3	Bulan	80.321.800	12	Bulan	151.069.100	60	Bulan	374.175.660	100	%	64,84	
		5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**																																	
		5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**																																	
		5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Daerah									137.827.800,00	3	Bulan		3	Bulan	-	3	Bulan		3	Bulan	137.705.400	12	Bulan	137.705.400	12	Bulan	137.705.400	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Paiak Daerah	Terlaksanya Penyuluhan PBB-P2	60	Bulan	562.143.800,00	48	Bulan	520.105.800,00	12	Bulan	81.522.736,00	3	Bulan		3	Bulan	-	3	Bulan	81.329.736	3	Bulan		12	Bulan	81.329.736	60	Bulan	601.435.536	100	%	106,99	
		5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedinya Aplikasi/Layanan BPHTB Online, Tersedianya formulir SPPT dan STTS PBB P2	60	Bulan	320.639.000,00	48	Bulan	319.140.000,00	12	Bulan	902.466.400,00	3	Bulan	29.790.000	3	Bulan	185.900.000	3	Bulan	8.250.000	3	Bulan	636.534.400	12	Bulan	860.474.400	60	Bulan	1.179.614.400	100	%	367,89	
		5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tercapainya Pendapatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	60	Bulan	488.177.000,00	48	Bulan	487.175.400,00	12	Bulan	196.903.040,00	3	Bulan	30.682.820	3	Bulan	40.734.200	3	Bulan	23.572.226	3	Bulan	97.168.800	12	Bulan	192.158.046	60	Bulan	679.333.446	100	%	139,16	
		5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksanya Pemeliharaan Aplikasi SISMIOP	60	Bulan	79.860.000,00	48	Bulan	79.050.000,00	12	Bulan	50.050.000,00	3	Bulan		3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan		12	Bulan	-	60	Bulan	79.050.000	100	%	98,99	
		5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tercapainya Penilaian PBB P2 dan BPHTB	60	Bulan	1.564.952.900,00	48	Bulan	1.539.302.760,00	12	Bulan	197.904.050,00	3	Bulan	22.396.980	3	Bulan	20.160.000	3	Bulan	71.808.249	3	Bulan	81.086.203	12	Bulan	195.451.432	60	Bulan	1.734.754.192	100	%	110,85	
		5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksanya Penagihan Pajak Daerah	60	Bulan	268.239.834,00	48	Bulan	256.668.192,00	12	Bulan	374.614.147,00	3	Bulan	9.175.000	3	Bulan	162.954.700	3	Bulan	63.884.040	3	Bulan	112.338.408	12	Bulan	348.352.148	60	Bulan	605.020.340	100	%	225,55	
		5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksanya Pengendalian, Pengawasan dan penyusunan Laporan PAD	60	Bulan	223.646.087,00	48	Bulan	223.214.132,00	12	Bulan	12.262.600,00	3	Bulan		3	Bulan	-	3	Bulan	5.651.750	3	Bulan	6.466.000	12	Bulan	12.117.750	60	Bulan	235.331.882	100	%	105,23	
		5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tersediaya Dana Pengelolaan Administrasi Laporan Realisasi Penerimaan	60	Bulan	706.859.329,00	48	Bulan	701.630.591,00	12	Bulan	300.585.135,00	3	Bulan	26.616.200	3	Bulan	50.765.700	3	Bulan	42.708.700	3	Bulan	173.489.630	12	Bulan	293.580.230	60	Bulan	995.210.821	100	%	140,79	
		5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pekan Panutan Pajak dan Retribusi Daerah Terlaksanya Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	Bulan	368.099.900,00	48	Bulan	367.044.935,00	12	Bulan	45.723.760,00	3	Bulan	5.523.000	3	Bulan	21.188.200	3	Bulan	13.080.600	3	Bulan	5.491.250	12	Bulan	45.283.050	60	Bulan	412.327.985	100	%	112,02	
							KEPEGAWAIAN																																	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																															
		5	**3**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																															
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana kerja tahunan perangkat daerah	6	Dok	22.565.340	4	Dok	-	2	Dok	22.256.340	1	Dok	14.478.250	1	Dok	-	1	Dok	3.560.800	0	Dok	12.707.200	3	Dok	30.746.250	7	Dok	30.746.250	116,667	%	136,25	
		5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20	Lap	300.000.000	16	Lap	225.811.150	5	Lap	25.952.500	3	Lap	14.110.350	3	Lap	11.436.150	4	Lap	-	1	Lap	11.901.000	11	Lap	37.447.500	27	Lap	263.258.650	135	%	87,75	
		5	**3**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																				0		-										

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp			
									Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan				
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tesedianya gaji dan Tunjangan ASN	70	Bln	15.520.000.000	56	Bln	15.304.703.987	14	Bln	3.046.092.008	3	Bln	506.526.599	5	Bln	388.379.780	3	Bln	1.157.976.571	3	Bln	621.436.187	14	Bln	2.674.319.137	70	Bln	17.979.023.124	100	%	115,84	
		5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya Jasa Administrasi keuangan SKPD	60	Dok	651.197.484	36	Dok	348.720.000	12	Dok	100.200.000	3	Dok	15.960.000	6	Dok	15.960.000	9	Dok	10.640.000	3	Dok	59.640.000	21	Dok	102.200.000	57	Dok	450.920.000	95	%	69,24	
		5	**3**	**1**	**2,03**		**Administrasi Barang M ilik Daerah pada Perangkat Daerah**																																			
		5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Bln	75.000.000	36	Bln	42.300.000	2	Bln	18.000.000	3	Bln	3.900.000	6	Bln	3.900.000	9	Bln	2.600.000	3	Bln	9.200.000	21	Bln	19.600.000	57	Bln	61.900.000	95	%	82,53	
		5	**3**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																			
		5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tesediany a pakaian dinas ASN beserta perlengkapannya	450	Buah	320.000.000	360	Buah	232.474.000	0	Buah	-	0	Buah	-		Buah	-		Buah	-		Buah	-	0	Buah	-	360	Buah	232.474.000	80	%	72,65	
		5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terselesaikannya administrasi karpeg, karis/karsu , taspen ASN	250	Tahun	63.453.600	200	Tahun	80.505.200	1	Tahun	11.931.700		Tahun	6.599.400	0,6	Tahun	504.000	0,9	Tahun	2.415.400	0,1	Tahun	2.375.200	1,6	Tahun	11.894.000	201,6	Tahun	92.399.200	80,64	%	145,62	
		5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	4	0rang	30.000.000	0	0rang	-	4	0rang	29.788.000		0rang	-	3	0rang	6.168.000	3	0rang	-	1	0rang	8.620.888	7	0rang	14.788.888	7	0rang	14.788.888	175	%	49,30	
		5	**3**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																			
		5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersediany a komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan gedung	60	Paket	79.156.100	48	Paket	54.831.465	12	Paket	4.930.851		Paket	2.910.000	2	Paket	-	3	Paket	2.000.000	1	Paket	-	6	Paket	4.910.000	54	Paket	59.741.465	90	%	75,47	
		5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediany a Alat Tulis Kantor kantor Tersediany a Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	60	paket	409.396.000	48	paket	347.867.500	12	paket	28.859.300		paket	8.386.000	1	paket	6.437.000	3	paket	7.444.400	1	paket	25.697.050	5	paket	47.964.450	53	paket	395.831.950	88,3333	%	96,69	
		5	03	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	tersediany a makan dan minuan kantor tesediany a makanan dan minuman tamu	60	Paket	509.330.260	36	Paket	198.000.000	12	Paket	76.200.000	3	Paket	-	6	Paket	25.300.000	9	Paket	18.975.000	3	Paket	41.779.000	21	Paket	86.054.000	57	Paket	284.054.000	95	%	55,77	
		5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersediany a barang cetakan dan penggandaan	60	Paket	295.000.000	48	Paket	252.900.750	12	Paket	15.164.000		Paket	2.850.000	5	Paket	5.580.000	9	Paket	2.850.000	3	Paket	15.744.250	17	Paket	27.024.250	65	Paket	279.925.000	108,333	%	94,89	
		5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah luar daerah	60	lap	2.158.790.734	48	lap	1.167.353.499		lap	200.000.000	3	lap	72.993.000	150	lap	54.354.300	225	lap	36.135.000	75	lap	71.517.700	453	lap	235.000.000	501	lap	1.402.353.499	835	%	64,96	
		5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Tersediannya penyimpanan data pegawai berbasis digital	5	tahun	84.655.000	4	tahun	67.724.000	0	tahun	0	0	tahun	-		tahun	-		tahun	-	0	tahun	-	0	tahun	#VALUE!	4	tahun	#VALUE!	80	%	#VALUE!	
		5	**3**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																			
		5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersediany a peralatan kantor dan mesin lainya	5	unit	224.128.471	4	unit	176.378.750	1	unit	33.565.000		unit	2.722.500	3	unit	14.706.000	3	unit		1	unit	31.801.500	7	unit	49.230.000	11	unit	225.608.750	220	%	100,66	
		5	**3**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																			
		5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediany a Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	60	bln	430.604.009	48	bln	339.993.637	12	bln	68.499.996		bln	20.471.962	6	bln	15.606.355	9	bln	13.680.134	3	bln	28.887.649	18	bln	78.646.100	66	bln	418.639.737	110	%	97,22	
		5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediany a Jasa Administrasi Keuangan Tersediany a Petugas keamanan ,Kebersihan, Sopir dan Admin Kantor	60	Bln	745.750.000	48	Bln	811.810.000	12	Bln	216.600.000		Bln	54.150.000	6	Bln	34.450.000	9	Bln	49.200.000	3	Bln	65.600.000	18	Bln	203.400.000	66	Bln	1.015.210.000	110	%	136,13	
		5	**3**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																			
		5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas	5	unit	125.000.000	2	unit	33.286.074	1	unit	10.000.000		unit	1.592.000	1	unit	7.708.650	1	unit	-	1	unit	5.887.650	3	unit	15.188.300	5	unit	48.474.374	100	%	38,78	
		5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Lokal Internet Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan mesin lainnya	60	bln	387.780.500	48	bln	236.750.000	12	bln	24.950.000		bln	5.680.000	6	bln	6.150.000	9	bln	3.580.750	3	bln	1.550.000	18	bln	16.960.750	66	bln	253.710.750	110	%	65,43	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi atap Kantor BKPSDM terlaksananyapemelih araan / rehabilitasi rutin gedung kantor dan bangunan lainnya	5	bln	387.780.500	4	bln	303.770.696	1	bln	43.702.500		bln	13.721.450	6	bln	27.766.000	9	bln	-	3	bln	22.159.750	18	bln	63.647.200	22	bln	367.417.896	440	%	94,75	
		5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan / Rehabilitasi Mushola kantor BKPSDM dan bangunan lainnya	3	bln	300.000.000	4	bln	219.705.600	1	bln	35.495.000		bln	650.000	6	bln	-	9	bln	-	3	bln	34.782.550	18	bln	35.432.550	22	bln	255.138.150	733,333	%	85,05	
		5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**																				0		-										
		5	**3**	**2**	**2,01**		Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																				0		-										
		5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan , Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya penyusnan formasi/kebutuhan ASN Kabupaten Barito Selatan	5	dok	200.000.000	4	dok	232.241.300	1	dok	62.800.000		dok	14.711.500	1	dok	20.849.500	1	dok	13.900.000	0	dok	35.269.000	2	dok	84.730.000	6	dok	316.971.300	120	%	158,49	
		5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan PNS dan PPPK serta Usul Penetapan NIP	550	dok	520.032.114	545	dok	452.002.900	509	dok	200.000.000		dok	21.232.500	1	dok	31.367.900	1	dok	19.339.200	0	dok	65.309.276	2	dok	137.248.876	547	dok	589.251.776	99,4545	%	113,31	
		5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya penyelesaian SK Pensiun ASN	750	orang	98.000.000	760	orang	98.024.900	125	orang	13.475.000		orang	2.380.000	79	orang	8.898.700	109	orang		16	orang	12.184.800	204	orang	23.463.500	964	orang	121.488.400	128,533	%	123,97	
		5	03	02	2.01	10	Pen gelolaan Sistem Informasi Kepegaw aian	Terlaksan an ya pemu takh iran dan pen do ku men tasian data ASN	3700	dok	100.000.000	3710	dok	233.845.250	4	dok	168.000.000		dok	24.588.600	2	dok	21.009.600	3	dok	90.123.000	1	dok	41.781.500	6	dok	177.502.700	3716	dok	411.347.950	100,432	%	411,35	
		5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya penyusunan informasi kepegawaian	3	dok	150.000.000	2	dok	79.061.200	1	dok	14.500.000		dok	5.101.400	2	dok	9.279.300	3	dok		1	dok	10.000.000	6	dok	24.380.700	8	dok	103.441.900	266,667	%	68,96	
		5	**3**	**2**	**2,02**		**M utasi dan Promosi ASN**					0														0		-										
		5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terkelolanya mutasi ASN Kabupaten Barito Selatan	250	orang	50.000.000	250	orang	7.503.700	250	orang	15.000.000		orang	12.080.800	62	orang	674.000	93	orang	1.804.000	157	orang	5.420.000	312	orang	19.978.800	562	orang	27.482.500	224,8	%	54,97	
		5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksaanya penyelesaian kenaikan pangkat ASN	3295	orang	580.466.000	3762	orang	486.191.350	500	orang	65.000.000		orang	616.000	308	orang	33.415.100	558	orang	8.583.400	0	orang	42.273.700	866	orang	84.888.200	4628	orang	571.079.550	140,455	%	98,38	
		5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Promosi ASN Melalui Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	90	dok	250.000.000	106	dok	716.803.750	25	dok	350.000.000		dok	-	1	dok	138.633.600	1	dok	11.985.800	1	dok	44.302.460	3	dok	194.921.860	109	dok	911.725.610	121,111	%	364,69	
		5	**3**	**2**	**2,03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**					0														0		-										
		5	03	02	2.03		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		4	lap	30.000.000	0	lap		4	lap	30.000.000	0	lap	353.000	3	lap	7.792.000	3	lap	-	1	lap	6.330.000	7	lap	14.475.000	7	lap	14.475.000	175	%	48,25	
		5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Penangan Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar Aparatur	50	orang	7.341.881.283	30	orang	1.891.161.929	50	orang	50.000.000		orang	4.535.000	20	orang	18.480.000	40	orang	4.017.148	10	orang	81.429.297	70	orang	108.461.445	100	orang	1.999.623.374	200	%	27,24	
		5	03	02	2.03	05	Koordinas dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksanakannya Koordinasi dan KerjaSama Pelaksanaan Diklatpim Tingkat II, III dan IV Terlaksanakannya Koordinasi dan KerjaSama Pelaksanaan Diklat Teknis dan Bimtek ASN Terlaksanakannya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS	845	orang	2.883.943.553	509	orang	1.326.228.100	135	orang	767.294.400		orang	910.000	0	orang	17.375.200	0	orang	716.268.000	17	orang	729.037.200	17	orang	1.463.590.400	526	orang	2.789.818.500	62,2485	%	96,74	
		5	03	02	2.03	06	F asilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksanakannya Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II	250	orang	230.832.054	304	orang	197.560.000	100	orang	40.999.950		orang	-	35	orang	12.292.200	70	orang	17.599.450	30	orang	10.500.000	135	orang	40.391.650	439	orang	237.951.650	175,6	%	103,08	
		5	03	02	2.03		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fyngsional	Terlaksanaanya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	6	dok	60.000.000	0	dok	-	6	dok	59.999.800		dok	983.800	0	dok	5.160.000	3	dok	2.440.000	2	dok	48.748.023	5	dok	57.331.823	5	dok	57.331.823	83,3333	%	95,55	
		5	03	02	2.03		Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya Fasilitasi Fungsional ASN	2	orang	82.000.000	1	orang	41.000.000	1	orang	40.999.950		orang	8.309.400	0	orang	5.296.200	10	orang	-	10	orang	14.952.600	20	orang	28.558.200	21	orang	69.558.200	1050	%	84,83	
		5	03	02	2.03	14	F asilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelesaian Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu Terlaksananya Fasilitasi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ASN	250	orang	110.000.000	145	orang	74.210.500	50	orang	28.700.000		orang	9.780.800	0	orang	14.083.000	25	orang	11.760.000	25	orang	3.911.400	50	orang	39.535.200	195	orang	113.745.700	78	%	103,41	
		5	**3**	**2**	**2,04**		**Penilaian dan Evaluasi Kineria Aparatur**																			0		-										
		5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		2	dok	142.000.000	1	dok	69.320.000	1	dok	53.759.950	1	dok		1	dok	28.238.094	1	dok	-	80	dok	19.159.356	83	dok	47.397.450	84	dok	116.717.450	4200	%	82,20	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
									K			K			K			K			K			K			K														
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		5	03	02	2.04	02	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		5	dok	22.500.210	4	dok		1	dok	22.500.210		dok	7.668.210	1	dok	8.410.000	1	dok	-	2	dok	12.612.000	4	dok	28.690.210	8	dok	28.690.210	160	%	127,51	
		5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya Pengelolaan Tanda Jasa/ Satya Lencana PNS	250	orang	175.000.000	4	orang	132.565.500	1	orang	27.499.850		orang	2.203.850	0	orang	5.596.800	203	orang	-	-103	orang	34.699.200	100	orang	42.499.850	104	orang	175.065.350	41,6	%	100,04	
		5	03	02	2.04	07	Pembin aan Disiplin ASN	Terlaksananya Fasilatasi dan Pembinaan Disiplin ASN Serta Penyelesaian Kasus-Kasus Disiplin	5	orang	875.000.000	4	orang	586.393.900	1	orang	74.196.350		orang	-	5	orang	12.867.908	10	orang	-	10	orang	64.738.442	25	orang	77.606.350	29	orang	664.000.250	580	%	75,89	
		5	03	02	2.04		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Fasilatasi dan Pembinaan Disiplin ASN Serta Penyelesaian Kasus-Kasus Disiplin	2	lap	15.000.000	1	lap		1	lap	15.000.000		lap	3.623.100	2	lap	5.900.000	5	lap	4.304.000	7	lap	6.172.000	14	lap	19.999.100	15	lap	19.999.100	750	%	133,33	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																																		**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**
		5	05	02				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**																																
		5	05	02	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**																																	
		5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5	Tahun	587.370.600		Tahun	537.969.612			43.000.000				1	Dokumen	9.305.100	0	Dokumen	8.020.800	0	Dokumen	12.817.100	1	Dokumen	30.143.000	1	Dokumen	568.112.612	20	%	96,72	
								Rakornas Litbang Kemendagri																																
								Terselenggaranya Edukasi Perekayasaaan Litbang dan IPTEK																																
								Terselenggaranya Inventarisasi Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA)																																
								Terselenggaranya Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah																																
6							**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																																	
							INSPEKTORAT DAERAH																																	**INSPEKTORAT**
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja																																
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas	5	Dokumen	90.000.000,00	4	Dok	70.725.000,00	1	Dokumen	20.000.000,00			-			7.000.000			5.000.000			8.000.000		Dokumen	20.000.000	4	Dokumen	90.725.000	80	%	100,81	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaporan realisasi capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	Dokumen	120.000.000,00	5	Dok	114.164.000,00	6	Dokumen	20.000.000,00			-			4.800.000			5.600.000			9.600.000	6	Dokumen	20.000.000	11	Dokumen	134.164.000	44	%	111,80	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi SAKIP OPD	155	Laporan	90.000.000,00	31	Laporan	64.630.000,00		Laporan	30.000.000,00			11.000.000,00			18.750.000			-			-		Laporan	29.750.000	31	Laporan	94.380.000	20	%	104,87	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	18.737.237.680,00	48	Bulan	16.889.702.014,00	12	Bulan	4.774.685.736,00	4	Bln	907.371.193,00	3	Bln	1.535.961.207	3	Bln	1.064.150.892	2	Bln	1.122.294.685	12	Bulan	4.629.777.977	60	Bulan	21.519.479.991	100	%	114,85	
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Akuntansi SKPD	60	Bulan	350.000.000,00	48	Bulan	267.860.000,00									-								0	Bulan	-	48	Bulan	267.860.000	80	%	76,53	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran Inspektorat Daerah Kab. Barsel	5	Dokumen	50.000.000,00	4	Dokumen	38.249.000,00																0	Dokumen	-	4	Dokumen	38.249.000	80	%	76,50	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran Inspektorat Daerah Kab. Barsel	60	Dokumen	20.000.000,00	12	Dokumen	10.000.000,00	12	Laporan	20.000.000,00			-			4.950.000			4.950.000			9.900.000	0	Dokumen	19.800.000	12	Dokumen	29.800.000	20	%	149,00	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																	
							Pendataan dan Pengolahan Adminsitrasi Kepegawaian	Terlaksananya administrasi penilaian angka kredit auditor dan P2UPD	10	Semester	100.000.000,00	6	Semester	59.495.000,00	30	Dokumen	20.000.000,00			7.850.000,00			250.000			6.500.000			125.000	0		14.725.000	6		74.220.000	60	%	74,22	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					I			II			III			IV																				
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Aparatur Pengawasan	150	Orang	750.000.000,00	120	Orang	631.660.704,00	20	Orang	200.000.000,00		Orang	25.675.000,00			37.704.650			47.624.436			44.531.847	0		155.535.933	120		787.196.637	80	%	104,96	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																																
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	300.000.000,00	48	Bulan	268.965.750,00	12	Bulan	80.000.000	3	Bln	500.000	3	Bln	50.615.800	3	Bln	6.807.000	3	Bln	91.055.000	12	Bulan	148.977.800	60	Bulan	417.943.550	100	%	139,31	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	Tahun	50.000.000,00				1	Tahun	50.000.000			24.833.000			16.269.500			1.050.000	1	Thn	61.443.000			103.595.500			103.595.500	0	%	207,19	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	400.000.000,00	48	Bulan	378.970.000,00	1	Tahun	60.000.000	3	Bln	12.300.000	3	Bln	17.700.000	3	Bln	15.000.000	3	Bln	25.000.000	12	Bulan	70.000.000	60	Bulan	448.970.000	100	%	112,24	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersediannya bahan bacaan / surat kabar	60	Bulan	30.000.000,00	48	Bulan	21.200.000,00	2	Eksemplar	5.000.000	3	Bln	360.000	3	Bln	1.110.000	3	Bln	1.110.000	3	Bln	1.235.000	12	Bulan	3.815.000	60	Bulan	25.015.000	100	%	83,38	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu	60	Bulan	350.000.000,00	12	Bulan	279.635.700,00	1	Tahun	20.000.000	3	Bln	2.550.000	0	Bln	-	6	Bln	10.150.000	3	Bln	4.755.000	12	Bulan	17.455.000	24	Bulan	297.090.700	40	%	84,88	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Dan Dalam Daerah	60	Bulan	1.700.000.000,00	12	Bulan	1.519.682.700,00	12	Bulan	146.290.000	3	Bln	61.501.000	3	Bln	9.443.500	3	Bln	41.838.100	3	Bln	113.027.460	12	Bulan	225.810.060	24	Bulan	1.745.492.760	40	%	102,68	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah																																
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanaya pengiriman surat menyurat kantor	60	Bulan	50.000.000,00	48	Bulan	42.246.000,00	12	Bulan	10.000.000	3	Bln	3.285.500,00	3	Bln	1.549.000	3	Bln	3.772.000	3	Bln	5.865.500	12	Tahun	14.472.000	60	Bulan	56.718.000	100	%	113,44	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Air, Internet,TV Kabel	60	Bulan	4.700.000.000,00	12	Bulan	376.576.719,00	12	Bulan	175.800.000	3	Bln	12.178.800,00	3	Bln	16.644.900	3	Bln	16.826.000	3	Bln	40.480.600	12	Tahun	86.130.300	24	Bulan	462.707.019	40	%	9,84	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	1.000.000.000,00	12	Bulan	890.188.787,00	12	Bulan	250.000.000	3	Bln	40.900.000,00	3	Bln	81.800.000	3	Bln	40.900.000	3	Bln	115.100.000	12	Tahun	278.700.000	24	Bulan	1.168.888.787	40	%	116,89	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanaya Administrasi Pengelolaan BMD yang tertib dan memadai	100	%	210.000.000,00	80	%	139.332.485,00	20	%	20.000.000	4	%	7.975.000,00	5	%	42.525.700	4	%	12.642.400	5	%	19.565.300	18	%	82.708.400	98	%	222.040.885	98,00	%	105,73	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																																
			Penyelenggaraan Penaawasan Internal																																
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksanaya pengawasan kinerja OPD	31	Laporan	800.000.000,00	25	Laporan	417.597.000,00	6	Laporan	100.000.000	0	Lap	-			5.000.000			43.750.000			44.875.000	0	Laporan	93.625.000	25	Laporan	511.222.000	80,65	%	63,90	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksanaya pengawasan pengelolaan keuangan OPD	155	Laporan	2.798.777.000,00	31	Laporan	2.512.108.000,00	31	Laporan	400.000.000			45.827.000			-			9.500.000			302.821.000	0	Laporan	358.148.000	31	Laporan	2.870.256.000	20,00	%	102,55	
			Reviu Laporan Kinerja	Terlaksanaya Reviu LKIP Pemda dan Reviu LPPD	10	Kegiatan	218.026.000,00	2	Kegiatan	158.156.000,00	2	Kegiatan	20.000.000	2	Keg	19.900.000			-			-				2	Kegiatan	19.900.000	4	Kegiatan	178.056.000	40,00	%	81,67	
			Reviu Laporan Keuangan	Terlaksanaya Reviu LKPD, Reviu RKPD, Reviu Perubahan RKPD, Reviu RKA, Reviu RKA Perubahan, Reviu DAK, Reviu BOS	50	Dokumen	650.000.000,00	10	Dokumen	200.200.000,00	6	Dokumen	100.000.000	1	Dok	9.350.000			9.250.000			10.500.000			79.450.000	1	Dokumen	108.550.000	11	Dokumen	308.750.000	22,00	%	47,50	
			Pengawasan Desa	Terlaksanaya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Pemerintahan desa	430	Desa	2.650.000.000,00	280	Desa	1.802.488.000	86	Desa	469.200.000			-			344.530.000			112.312.000			6.882.000	0	Desa	463.724.000	280	Desa	2.266.212.000	65,12	%	85,52	
			Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksanaya kerjasama pengawasan internal	10	Kegiatan	550.000.000,00	2	Kegiatan	66.016.000,00	2	Kegiatan	50.000.000	1	Keg	34.700.000,00			-			-			64.135.000	1	Kegiatan	98.835.000	3	Kegiatan	164.851.000	30,00	%	29,97	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksanaya kerjasama pengawasan internal	12	Semester	1.000.000.000,00	10	Semester	615.899.000,00	2	Semester	100.000.000	1	Smt	13.791.000,00			40.518.600	1	Smt	32.512.400			53.125.100	2	Semester	139.947.100	12	Semester	755.846.100	100,00	%	75,58	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tuiuan Tertentu																																
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Tunggakan Kerugian Negara/Daerah	100	%	300.000.000,00	70	%	167.859.800,00	30	%	50.000.000,00		%	-			-			-			86.074.500	0	%	86.074.500	70	Semester	253.934.300	70,00	%	84,64	
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksanaya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	Kegiatan	1.250.000.000,00	75	Kegiatan	885.216.800,00	25	Kegiatan	250.000.000,00	2	Keg	14.332.000,00			11.250.000			99.507.000			71.680.000	2	Kegiatan	196.769.000	77	Semester	1.081.985.800	77,00	%	86,56	
			PEOGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																																
			Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																																
			Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan	Terlaksanaya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	15	Kegiatan	150.000.000,00	3	Kegiatan	52.200.000,00	2	Kegiatan	20.000.000			-			-	1	keg	10.983.600	1	keg	3.931.400	2	Kegiatan	14.915.000	5	Semester	67.115.000	33,33	%	44,74	
			Pendampingan dan Asistensi																																

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 8 x100%			16
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Kegiatan	150.000.000,00	8	Kegiatan	135.840.000,00	2	Kegiatan	20.000.000	1	Keg	4.500.000,00	1	Keg	13.000.000			500.000			1.999.000	2	Kegiatan	19.999.000	10	Kegiatan	155.839.000	100,00	%	103,89	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	40	Kegiatan	150.000.000,00	10	Kegiatan	131.534.400,00	1	Kegiatan	30.000.000			-			-			-	1	Keg	28.324.000	1	Kegiatan	28.324.000	11	Kegiatan	159.858.400	27,50	%	106,57	
			Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pencegahan Korupsi Terintegrasi	1	Kegiatan	200.000.000,00	1	Kegiatan	163.008.000,00	1	Kegiatan	30.000.000			-			1.500.000			11.577.900	1	Keg	56.630.000	1	Kegiatan	69.707.900	2	Kegiatan	232.715.900	200,00	%	116,36	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																																	
			KECAMATAN																																	
			KECAMATAN DUSUN HILIR																																	**KECAMATAN DUSUN HILIR**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																																	
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedia Dana Penyusunan Renja, Renstra, RKA dan DPA	5	kali	5.000.000	4	kali	3.000.000	1	kali	3.000.000,00	1	kali	3.000.000	0	kali	-	0	kali	-	0	kali		1	kali	3.000.000	5	kali	6.000.000	100	%	120,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dana Penyusunan Dokumen LAKIP	5	kali	5.000.000	4	kali	2.000.000	1	kali	2.000.000,00	1	kali	2.000.000	0	kali	-	0	kali	-	0	kali		1	kali	2.000.000	5	kali	4.000.000	100	%	80,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	bln	1.666.402.805	48	bln	1.666.402.805	12	bln	1.718.872.615,00	3	bln	328.454.014	3	bln	427.663.921	3	bln	498.450.527	3	bln	302.168.262	12	bln	1.556.736.724	60	bln	3.223.139.529	100	%	193,42	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	kali	3.000.000	4	kali	3.000.000	1	kali	3.000.000,00	0	kali		0	kali		0	kali		1	kali	3.000.000	1	kali	3.000.000	5	kali	6.000.000	100	%	200,00	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dana Penyusunan LPPD dan IKK	5	kali	5.000.000	4	kali	2.000.000	1	kali	2.000.000,00	1	kali	2.000.000	0	kali	-	0	kali	-	0	kali		1	kali	2.000.000	5	kali	4.000.000	100	%	80,00	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Dana untuk Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	bln	55.000.000	48	bln	-	12	bln		3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	-	100	%	0,00	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.000.000														1.000.000												
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Dana untuk Sarana Media Cetak dan elektronik	60	bln	50.000.000	48	bln	-	12	bln	1.000.000,00	3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	-	100	%	0,00	
			Pelatihan Formal	Terlaksananya Pelatihan Formal / Bimtek	60	bln	50.000.000	48	bln	3.850.000	12	bln		3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	3.850.000	100	%	7,70	
			Adminitrasi Umum Perangkat Daerah							3.000.000																										
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Dana untuk Pembelian Komponen Instalasi Listrik Kantor / Peneranghan Bangunan Kantor	60	bln	10.000.000	48	bln	2.976.000	12	bln	3.850.000,00	3	bln	1.400.000	3	bln	1.400.000	3	bln	1.050.000	3	bln		12	bln	3.850.000	60	bln	6.826.000	100	%	68,26	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Bahan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	60	bln	6.500.000	48	bln	19.919.500	12	bln	-	3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	19.919.500	100	%	306,45	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya Dana untuk bahan Cetakan dan Penggandaan	60	bln	15.500.000	48	bln	25.000.000	12	bln	2.976.000,00	3	bln	870.000	3	bln	870.000	3	bln	1.196.000	3	bln		12	bln	2.936.000	60	bln	27.936.000	100	%	180,23	
			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	60	bln	25.000.000	48	bln	60.220.000	12	bln	20.000.000,00	3	bln	4.757.000	3	bln	7.203.000	3	bln	7.975.000	3	bln		12	bln	19.935.000	60	bln	80.155.000	100	%	320,62	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Dana Makan Minum Rapat	60	bln	20.000.000	48	bln	-	12	bln	25.000.000,00	3	bln	7.500.000	3	bln	7.750.000	3	bln	9.750.000	3	bln		12	bln	25.000.000	60	bln	25.000.000	100	%	125,00	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Dana Makan Minum Tamu Rujab Camat	60	bln	29.841.000	48	bln	2.956.000	12	bln		3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	2.956.000	100	%	9,91	
			Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	60	bln	42.500.000	48	bln	9.746.961	12	bln		3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	9.746.961	100	%	22,93	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dana untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60	bln	150.000.000	48	bln	153.000.000	12	bln	59.045.000,00	3	bln	14.707.000	3	bln	29.883.000	3	bln	14.299.000	3	bln	11.049.000	12	bln	69.938.000	60	bln	222.938.000	100	%	148,63	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang Undangan	60	bln	2.500.000	48	bln	-	12	bln		3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	-	100	%	0,00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							99.850.700																										

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV													
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.500.000			4.900.000			3.000.000,00			900.000			900.000			1.200.000				0		3.000.000	0		7.900.000	#DIV/0!	%	175,56	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.500.000			-			15.000.000,00			1.203.000			645.500			-			5.679.000	0		7.527.500	0		7.527.500	#DIV/0!	%	60,22	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedinya Dana untuk Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak Kantor Camat Dusun Hilir	60	bln	85.000.000	48	bln	29.870.000	12	bln	154.800.000,00	3	bln	25.500.000	3	bln	38.700.000	3	bln	51.900.000	3	bln	38.400.000	12	bln	154.500.000	60	bln	184.370.000	100	%	216,91	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan Mesin dan BBM Genset Kantor	60	bln	70.000.000	48	bln	-	12	bln	100.000.000,00	3	bln	23.871.000	3	bln	23.500.000	3	bln	24.778.000	3	bln	27.730.500	12	bln	99.879.500	60	bln	99.879.500	100	%	142,69	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Speed Boat dan BBM	Tersedinya Dana untuk Pemeliharaan Rutin Berkala Speed Boat dan BBM	60	bln	45.000.000	48	bln	-	12	bln		3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	-	100	%	0,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	bln	6.000.000	48	bln	29.374.000	12	bln	5.000.000,00	3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	29.374.000	100	%	489,57	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Dana untuk Pemeliharaan dan Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bln	7.000.000	48	bln	9.302.800	12	bln		3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	9.302.800	100	%	132,90	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Roda 4	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Roda 4	60	bln	10.000.000	48	bln	-	12	bln		3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	-	100	%	0,00	
			Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedinya Dana untuk Pengadaan Meubeler Kantor	5	kali	50.000.000	4	kali	-	1	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	4	kali	-	80	%	0,00	
			Pengadaan PC, Printer dan Laptop	Tersedinya Dana untuk Pengadaan PC, Printer dan Laptop	5	kali	25.000.000	4	kali	-	1	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	4	kali	-	80	%	0,00	
			Pengadaan AC Kantor	Terlaksananya Pengadaan AC Kantor	1	kali	10.000.000	1	kali	-	1	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	1	kali	-	100	%	0,00	
			Penyediaan Rumah Jabatan Dinas	Tersedianya Rumah Jabatan Dinas	1	kali	752.445.000	1	kali	21.936.000	1	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	1	kali	21.936.000	100	%	2,92	
			Penataan Organisasi							-																									
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas ke Desa Desa	60	bln		48	bln	141.221.400,00	12	bln	21.040.000,00	3	bln	4.000.000,00	3	bln	11.900.000	3	bln	5.040.000	3	bln	19.320.000	12	bln	40.260.000	60	bln	181.481.400	100	%	#DIV/0!	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							93.536.900																									
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							-																									
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	60	bln	65.000.000	48	bln	-	12	bln	33.300.000,00	3	bln		3	bln	11.350.000	3	bln	9.852.000	3	bln	11.278.000	12	bln	32.490.000	60	bln	32.490.000	100	%	49,98	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Antisipasi Penanggulangan Bencana	60	bln	10.000.000	48	bln	5.000.000	12	bln	10.000.000,00	3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	5.000.000	100	%	50,00	
			Pengawasan Kegiatan Pemilu	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Pemilu	4	kali		4	kali	-	3	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	4	kali	-	100	%	#DIV/0!	
			Posko Pemilihan Umum (Pemilu)	Terlaksanaya Pelaksanaan Posko Pemilu	4	kali		4	kali	-	3	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	4	kali	-	100	%	#DIV/0!	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Dana Untuk Pelayanan PATEN Kecamatan	60	bln	10.000.000	48	bln	-	12	bln	5.000.000,00	3	bln		3	bln		3	bln		3	bln	5.000.000	12	bln	5.000.000	60	bln	5.000.000	100	%	50,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							-																									
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							-																									
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Dana PKK Kecamatan	60	bln	20.000.000	48	bln	4.900.000	12	bln	20.025.000,00	3	bln		3	bln		3	bln	15.208.000	3	bln	4.168.000	12	bln	19.376.000	60	bln	24.276.000	100	%	121,38	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		60	bln		48	bln	-	12	bln		3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	60	bln	-	100	%	#DIV/0!	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Dana untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kapasitas Kelurahan)	60	bln	225.000.000	48	bln	10.000.000	12	bln	150.000.000,00	3	bln	26.628.000	3	bln	32.988.500	3	bln	38.452.000	3	bln	28.049.000	12	bln	126.117.500	60	bln	136.117.500	100	%	60,50	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Dana untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	60	bln		48	bln	-	12	bln	350.000.000,00	3	bln		3	bln		3	bln		3	bln	30.000.000	12	bln	30.000.000	60	bln	30.000.000	100	%	#DIV/0!	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV											
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
							Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tersedianya Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							12	bln	250.000.000,00	3	bln		3	bln		3	bln		3	bln		12	bln	-	12	bln	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																																	
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																															
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya Dana Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	5	kali	20.000.000	4	kali		1	kali	5.000.000,00	0	kali			kali		1	kali	5.000.000		kali		1	kali	5.000.000	5	kali	5.000.000	100	%	25,00	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																															
							Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tersedianya Dana FKUB	5	kali	10.000.000	4	kali		1	kali	1.000.000,00	0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	4	kali	-	80	%	0,00	
							Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan	Tersedianya Dana untuk Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan	5	kali	75.000.000	4	kali		1	kali	-	0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	4	kali	-	80	%	0,00	
							Pembuatan Profil dan Monografi Kecamatan	Terlaksananya Pembuatan Profil dan Monografi Kecamatan	5	kali	3.000.000	4	kali		1	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	4	kali	-	80	%	0,00	
							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	6	bln					6	bln	67.000.000,00							6	Bulan	48.290.000	6	Bulan	48.290.000	6	Bulan	48.290.000	100	%	#DIV/0!	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																															
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																															
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersedianya Dana Fasilitasi ADD dan DD	5	kali	6.500.000	4	kali		1	kali	5.000.000,00	0	kali		0	kali		0	kali		1	kali	6.300.000	1	kali	6.300.000	5	kali	6.300.000	100	%	96,92	
							Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							10	bln	50.600.000,00							10	bln	28.680.000	10	kali	28.680.000	10	kali	28.680.000	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
							Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dana FKDM Tingkat Kecamatan	5	kali		4	kali		1	kali	1.000.000,00	0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	4	kali	-	80	%	#DIV/0!	
							Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrenbang)	Tersedianya Dana Kegiatan Musrenbang Kecamatan			9.000.000						30.564.000,00			30.564.000,00			-			-						0		30.564.000	0		30.564.000	#DIV/0!	%	339,60	
							Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Tersedianya Danan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	kali	10.000.000	4	kali		1	kali	3.000.000,00	0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	-	4	kali	-	80	%	0,00	
							KECAMATAN DUSUN SELATAN																															**KECAMATAN DUSUN SELATAN**
		7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**																															
		7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																															
	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup	7	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dana untuk Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Kantor Kecamatan Dusun Selatan	60	Bln	24.501.484.180	48	Bln	18.081.488.019	12	Bln	3.776.967.499	3	Bln	676.490.900	3	Bln	1.175.431.938	3	Bln	1.076.905.026	3	Bln	637.977.563	12	Bulan	3.566.805.427	60	Bulan	21.648.293.446	100	%	88,36	
		7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																													

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K				
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp		
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16	
	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	Bln	375.495.772	48	Bln	345.146.075	12	Bln	49.300.000	3	Bln	7.994.400	3	Bln	16.958.400	3	Bln	-	3	Bln	24.055.700	12	Bulan	49.008.500	60	Bulan	394.154.575	100	%	104,97		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bln	129.021.948	48	Bln	112.052.060	12	Bln	16.969.500	3	Bln	793.750	3	Bln	1.557.750	3	Bln	-	3	Bln	14.274.000	12	Bulan	16.625.500	60	Bulan	128.677.560	100	%	99,73		
	Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat	7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bln	356.012.500	48	Bln	345.493.700	12	Bln	10.000.000	3	Bln	2.500.000	3	Bln	2.500.000	3	Bln	-	3	Bln	5.000.000	12	Bulan	10.000.000	60	Bulan	355.493.700	100	%	99,85		
	Terlaksananya Pertemuan Teknis Dalam Daerah Terlaksananya Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bln	1.347.077.300	48	Bln	1.118.218.500	12	Bln	219.780.000	3	Bln	32.361.400	3	Bln	46.405.000	3	Bln	30.891.400	3	Bln	107.617.200	12	Bulan	217.275.000	60	Bulan	1.335.493.500	100	%	99,14		
		7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																				
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bln	449.643.736	48	Bln	219.038.940	12	Bln	54.759.735	3	Bln	11.720.564	3	Bln	15.524.441	3	Bln	8.933.851	3	Bln	17.270.617	12	Bulan	53.449.473	60	Bulan	272.488.413	100	%	60,60		
	Terlaksananya Pembayaran HonoariumTenaga Kontrak	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bln	1.987.600.000	48	Bln	1.633.400.000	12	Bln	342.000.000	3	Bln	58.200.000	3	Bln	86.400.000	3	Bln	84.600.000	3	Bln	112.800.000	12	Bulan	342.000.000	60	Bulan	1.975.400.000	100	%	99,39		
		7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																						-													
	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	Bln	117.600.000	48	Bln	107.991.550	12	Bln	9.600.000	3	Bln	3.195.000	3	Bln	865.000	3	Bln	-	3	Bln	5.540.000	12	Bulan	9.600.000	60	Bulan	117.591.550	100	%	99,99		
	Terlaksananya PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Kantor	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	Bln	59.219.500	48	Bln	56.145.000	12	Bln	3.064.500	3	Bln	1.000.000	3	Bln	950.000	3	Bln	-	3	Bln	1.050.000	12	Bulan	3.000.000	60	Bulan	59.145.000	100	%	99,87		
	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Bln	-	0	0	-	0	0	30.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Bln	29.988.000	1	Bulan	29.988.000	1	Bulan	29.988.000	100	%	#DIV/0!		
		7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																																			
		7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**																																		
	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan Tingkat Tingkat Kecamatan Terlaksanya Musrenbang	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60	Bln	165.490.000	48	Bln	155.490.000	12	Bln	10.000.000	3	Bln	10.000.000	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	12	Bulan	10.000.000	60	Bulan	165.490.000	100	%	100,00		
	Terlaksananya Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24	Bln	956.339.334	12	Bln	503.325.355	12	Bln	403.510.014	3	Bln	-	3	Bln	139.299.750	3	Bln	212.749.456	3	Bln	42.855.495	12	Bulan	394.904.701	24	Bulan	898.230.056	100	%	93,92		
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60	Bln	3.701.799.740	48	Bln	2.995.705.959	12	Bln	647.540.820	3	Bln	118.055.800	3	Bln	157.459.700	3	Bln	90.019.400	3	Bln	275.875.800	12	Bulan	641.410.700	60	Bulan	3.637.116.659	100	%	98,25		
		7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**																																			
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas RT/RW di Tiga Kelurahan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas TPPKK Kecamatan	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60	Bln	1.138.800.000	48	Bln	939.000.000	12	Bln	196.700.000	3	Bln	30.200.000	3	Bln	61.600.000	3	Bln	2.000.000	3	Bln	102.870.000	12	Bulan	196.670.000	60	Bulan	1.135.670.000	100	%	99,73		

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
									K			K			K			K			K			K			K													
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp											
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																				-														
	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	7	01	03	2.05	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12	Bln	750.000.000	0	Bln	-	12	Bln	750.000.000	3	Bln	27.000.000	3	Bln	392.246.000	3	Bln	165.651.000	3	Bln	154.978.000	12	Bulan	739.875.000	12	Bulan	739.875.000	100	%	98,65	
		7	01	05			PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																																	
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan																																	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	Bln		0	Bln		0	Bln	67.000.000	0	Bln		0	Bln	-	0	Bln	-	6	Bln	66.981.000	6	Bulan	66.981.000	6	Bulan	66.981.000	100	%	#DIV/0!	
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																																	
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan																																	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7	01	05	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	Bln		0	Bln		0	Bln	66.360.000	0	Bln		0	Bln	-	0	Bln	-	10	Bln	64.704.000	10	Bulan	64.704.000	10	Bulan	64.704.000	100	%	#DIV/0!	
TOTAL															6.653.552.068					979.511.814			2.097.197.979			1.671.750.133			1.663.837.375			6.412.297.301			33.024.792.459			
							KECAMATAN DUSUN UTARA																																	KECAMATAN DUSUN UTARA
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																	
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencaan SKPD	60	Bulan	20.846.824	48	Bulan	-	12	Bulan	20.846.824	3	Bulan	-	3	Bulan	2.393.750	3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	2.393.750	60	Bulan	2.393.750	100	%	11,48	
							Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	60	Bulan	5.000.000	48	Bulan	-	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	1.272.000	3	Bulan	-	3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	1.272.000	60	Bulan	1.272.000	100	%	25,44	
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	60	Bulan	5.000.000	48	Bulan	-	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	2.500.000	12	Bulan	2.500.000	60	Bulan	2.500.000	100	%	50,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Bulan	3.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	3.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	288.000	12	Bulan	288.000	12	Bulan	288.000	100	%	9,60	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Bulan	3.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	3.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	-	12	Bulan	-	100	%	-	
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	3.837.100.546	48	Bulan	1.961.550.273	12	Bulan	1.925.851.902	3	Bulan	294.435.941	3	Bulan	384.530.000	3	Bulan	630.532.572	3	Bulan	528.557.727	12	Bulan	1.838.056.240	60	Bulan	3.799.606.513	100	%	99,02	
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	50.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	50.000.000	3	Bulan	12.000.000	3	Bulan	12.000.000	3	Bulan	12.000.000	3	Bulan	13.976.000	12	Bulan	49.976.000	12	Bulan	49.976.000	100	%	99,95	
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah																																	
							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terkoordinasinya Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12	Bulan	5.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	636.000	3	Bulan	-	3	Bulan		3	Bulan	4.052.000	12	Bulan	4.688.000	12	Bulan	4.688.000	100	%	93,76	
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Persamaan Data Dalam Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12	Bulan	5.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan		3	Bulan	2.500.000	3	Bulan		3	Bulan	2.500.000	12	Bulan	5.000.000	12	Bulan	5.000.000	100	%	100,00	
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																	
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12	Bulan	34.880.000		Bulan	-	12	Bulan	34.880.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	34.880.000	12	Bulan	34.880.000	12	Bulan	34.880.000	100	%	100,00	
							Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tercapainya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	Bulan	355.400.000	12	Bulan	167.400.000	12	Bulan	188.000.000	3	Bulan	25.510.000	3	Bulan	48.226.000	3	Bulan	41.772.000	3	Bulan	71.300.000	12	Bulan	186.808.000	24	Bulan	354.208.000	100	%	99,66	
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	Bulan	10.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	10.000.000	12	Bulan	10.000.000	12	Bulan	10.000.000	100	%	100,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya Dana Pemulangan Pegawai yang Pensiun	12	Bulan	5.000.000		Bulan	-	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	5.000.000	12	Bulan	5.000.000	12	Bulan	5.000.000	100	%	100,00	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																																	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan	13.000.000	48	Bulan	-	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	1.250.000	3	Bulan	1.250.000	3	Bulan	-	3	Bulan	2.500.000	12	Bulan	5.000.000	60	Bulan	5.000.000	100	%	38,46	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	94.320.000	48	Bulan	34.320.000	12	Bulan	60.000.000	3	Bulan	9.050.000	3	Bulan	9.900.000	3	Bulan	-	3	Bulan	37.262.000	12	Bulan	56.212.000	60	Bulan	90.532.000	100	%	95,98	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	60	Bulan	20.000.000	48	Bulan	-	12	Bulan	20.000.000	3	Bulan	474.000	3	Bulan	1.800.000	3	Bulan	-	3	Bulan	17.632.383	12	Bulan	19.906.383	60	Bulan	19.906.383	100	%	99,53	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	10.505.200	48	Bulan	5.505.200	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan		3	Bulan	2.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	2.500.000	12	Bulan	5.000.000	60	Bulan	10.505.200	100	%	100,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Bulan	38.500.000	12	Bulan	13.500.000	12	Bulan	25.000.000	3	Bulan		3	Bulan	3.525.000	3	Bulan	-	3	Bulan	21.424.000	12	Bulan	24.949.000	24	Bulan	38.449.000	100	%	99,87	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	10.000.000	48	Bulan	5.000.000	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	5.000.000	3	Bulan		12	Bulan	5.000.000	60	Bulan	10.000.000	100	%	100,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	44.446.624	48	Bulan	19.446.624	12	Bulan	25.000.000	3	Bulan	3.168.675	3	Bulan	5.020.734	3	Bulan	3.975.381	3	Bulan	8.583.680	12	Bulan	20.748.470	60	Bulan	40.195.094	100	%	90,43	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	10.000.000	48	Bulan	-	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan		3	Bulan	9.493.583	12	Bulan	9.493.583	60	Bulan	9.493.583	100	%	94,94	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	724.626.850	48	Bulan	286.869.350	12	Bulan	225.800.000	3	Bulan	33.800.000	3	Bulan	54.315.000	3	Bulan	50.700.000	3	Bulan	86.940.000	12	Bulan	225.755.000	60	Bulan	512.624.350	100	%	70,74	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	200.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	200.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	189.700.000	12	Bulan	189.700.000	12	Bulan	189.700.000	100	%	94,85	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	10.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	10.000.000	3	Bulan		12	Bulan	10.000.000	12	Bulan	10.000.000	100	%	100,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																																	
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																																	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Bulan	30.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	30.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	29.256.000	12	Bulan	29.256.000	12	Bulan	29.256.000	100	%	97,52	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																																	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																																	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24	Bulan	8.000.000	12	Bulan	5.000.000	12	Bulan	3.000.000	3	Bulan	3.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan		12	Bulan	3.000.000	24	Bulan	8.000.000	100	%	100,00	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksanannya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	24	Bulan	614.596.805	12	Bulan	264.596.805	12	Bulan	350.000.000	3	Bulan	133.800.000	3	Bulan	186.000.000	3	Bulan	9.800.000	3	Bulan	20.400.000	12	Bulan	350.000.000	24	Bulan	614.596.805	100	%	100,00	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																									-			-		%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksanannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	24	Bulan	13.000.000	12	Bulan	7.000.000	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	1.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	3.500.000	12	Bulan	5.000.000	24	Bulan	12.000.000	100	%	92,31	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12	Bulan	147.724.000	0	Bulan	-	12	Bulan	147.724.000	3	Bulan	15.343.000	3	Bulan	15.000.000	3	Bulan	29.700.000	3	Bulan	87.209.000	12	Bulan	147.252.000	12	Bulan	147.252.000	100	%	99,68	
			Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																																	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
									K			K			K			K			K			K			K														
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12													16
							Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terealisasinya Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12	Bulan	250.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	250.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	150.620.000	3	Bulan	14.580.000	3	Bulan	84.800.000	12	Bulan	250.000.000	12	Bulan	250.000.000	100	%	100,00	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																																		
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																																		
							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tercapainya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Bulan	67.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	67.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	52.616.000	12	Bulan	52.616.000	12	Bulan	52.616.000	100	%	78,53	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																																		
							Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																																		
							Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Bulan	10.000.000	12	Bulan	-	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	9.152.000	12	Bulan	9.152.000	24	Bulan	9.152.000	200	%	91,52	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																																		
							Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																																		
							Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tercapainya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12	Bulan	50.000.000	0	Bulan	-	12	Bulan	50.000.000	3	Bulan	20.992.000	3	Bulan	19.572.000	3	Bulan	-	3	Bulan		12	Bulan	40.564.000	12	Bulan	40.564.000	100	%	81,13	
							Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tercapainya Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12	Bulan	70.816.000	0	Bulan	-	12	Bulan	70.816.000	3	Bulan	-	3	Bulan		3	Bulan	-	3	Bulan	46.608.000	12	Bulan	46.608.000	12	Bulan	46.608.000	100	%	65,82	
							TOTAL				**6.775.762.849**						**3.834.918.726**			**554.731.616**			**900.652.484**			**808.059.953**			**1.382.630.373**			**3.646.074.426**			**6.416.262.678**				
							KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI																																	**KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI**
		7	01	01			**A. PROGRAM PENUNJANG USUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																																		
		7	01	01	2.01		**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**																																		
		7	01	01	2.01	02	a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	Bulan	50.000.000	48	Bulan	40.000.000	12	Bulan	12.500.000	3	Bulan	3.010.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	9.490.000	12	Bulan	12.500.000	60	Bulan	52.500.000	100	%	105,00	
		7	01	01	2.01	03	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60	Bulan	10.000.000	48	Bulan	8.000.000	12	Bulan	4.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	4.500.000	12	Bulan	4.500.000	60	Bulan	12.500.000	100	%	125,00	
		7	01	01	2.01	04	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	60	Bulan	10.000.000	48	Bulan	8.000.000	12	Bulan	4.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	4.500.000	12	Bulan	4.500.000	60	Bulan	12.500.000	100	%	125,00	
		7	01	01	2.01	05	d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	60	Bulan	10.000.000	48	Bulan	8.000.000	12	Bulan	6.034.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	6.034.000	12	Bulan	6.034.000	60	Bulan	14.034.000	100	%	140,34	
		7	01	01	2.01	06	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	Bulan	10.000.000	48	Bulan	8.000.000	12	Bulan	4.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	4.500.000	12	Bulan	4.500.000	60	Bulan	12.500.000	100	%	125,00	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 :13			15 = 14 / 6 x100%			16
		7	01	01	2.02		**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																		
		7	01	01	2.02	01	a. Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	10.875.724.850	48	Bulan	8.700.459.880	12	Bulan	1.812.701.108	3	Bulan	276.036.723	3	Bulan	652.578.941	3	Bulan	403.920.974	3	Bulan	427.252.963	12	Bulan	1.759.789.601	60	Bulan	10.460.249.481	100	%	96,18	
		7	01	01	2.02	03	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersediannya Honor Pelaksana Penatausahan dan penguji keuangan SKPD	60	Bulan	463.800.000	48	Bulan	371.040.000	12	Bulan	92.760.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	69.571.000	3	Bulan	23.189.000	12	Bulan	92.760.000	60	Bulan	463.800.000	100	%	100,00	
		7	01	01	2.06		**3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																		
		7	01	01	2.06	01	a. Penyajian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyajian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan	49.999.480	48	Bulan	39.999.584	12	Bulan	9.999.896	3	Bulan	2.487.632	3	Bulan	4.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	3.500.000	12	Bulan	9.987.632	60	Bulan	49.987.216	100	%	99,98	
		7	01	01	2.06	03	b. Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyedian Peralatan Rumah Tangga	60	Bulan	145.094.000	48	Bulan	116.075.200	12	Bulan	26.848.800	3	Bulan	5.967.300	3	Bulan	11.250.000	3	Bulan	-	3	Bulan	7.356.500	12	Bulan	24.573.800	60	Bulan	140.649.000	100	%	96,94	
		7	01	01	2.06	05	c. Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	145.631.250	48	Bulan	116.505.000	12	Bulan	29.126.250	3	Bulan	7.252.000	3	Bulan	8.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	13.370.000	12	Bulan	29.122.000	60	Bulan	145.627.000	100	%	100,00	
		7	01	01	2.06	08	d Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bulan	177.150.000	48	Bulan	141.720.000	12	Bulan	35.430.000	3	Bulan	5.820.000	3	Bulan	19.775.000	3	Bulan	-	3	Bulan	9.835.000	12	Bulan	35.430.000	60	Bulan	177.150.000	100	%	100,00	
		7	01	01	2.06	09	e. penyedian Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penyedian Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	1.000.000.000	48	Bulan	800.000.000	12	Bulan	258.441.750	3	Bulan	30.986.000	3	Bulan	68.599.200	3	Bulan	60.810.054	3	Bulan	97.931.377	12	Bulan	258.326.631	60	Bulan	1.058.326.631	100	%	105,83	
		7	01	01	2.07		**4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																		
		7	01	01	2.07	06	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	Bulan	1.039.560.000	48	Bulan	831.648.000			261.733.000	3	Bulan	14.300.000	3	Bulan	1.900.000	3	Bulan	-	3	Bulan	137.486.000	12	Bulan	153.686.000	60	Bulan	985.334.000	100	%	94,78	
		7	01	01	2.08		**5. Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																		
		7	01	01	2.08	01	a. Penyedian Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyedian Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	24.960.000	48	Bulan	19.968.000	12	Bulan	4.992.000	3	Bulan	1.152.000	3	Bulan	2.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	1.340.000	12	Bulan	4.992.000	60	Bulan	24.960.000	100	%	100,00	
		7	01	01	2.08	02	b. Penyedian Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyedian Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	1.081.586.820	48	Bulan	865.269.456	12	Bulan	64.757.364	3	Bulan	2.495.622	3	Bulan	4.155.592	3	Bulan	3.669.999	3	Bulan	5.434.562	12	Bulan	15.755.775	60	Bulan	881.025.231	100	%	81,46	
		7	01	01	2.08	03	c. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	97.680.000	48	Bulan	78.144.000	12	Bulan	19.536.000	3	Bulan	3.109.000	3	Bulan	11.350.000	3	Bulan	-	3	Bulan	5.077.000	12	Bulan	19.536.000	60	Bulan	97.680.000	100	%	100,00	
		7	01	01	2.08	04	d. Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	681.000.000	48	Bulan	544.800.000	12	Bulan	136.200.000	3	Bulan	22.700.000	3	Bulan	34.050.000	3	Bulan	22.700.000	3	Bulan	56.750.000	12	Bulan	136.200.000	60	Bulan	681.000.000	100	%	100,00	
		7	01	01	2.09		**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																		
		7	01	01	2.09	05	a. Pemeliharan Mebel	Tersedianya Pemeliharan Mebel	60	Bulan	50.000.000	48	Bulan	40.000.000	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	7.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	2.500.000	12	Bulan	10.000.000	60	Bulan	50.000.000	100	%	100,00	
		7	01	01	2.09	06	b. Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	Bulan	50.000.000	48	Bulan	40.000.000	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	9.920.000	12	Bulan	9.920.000	60	Bulan	49.920.000	100	%	99,84	
		7	01	02			**B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																																		
		7	01	02	2.01		**1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**																																		
		7	01	02	2.01	01	a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	60	Bulan	177.650.000	48	Bulan	142.120.000	12	Bulan	63.030.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	63.030.000	12	Bulan	63.030.000	60	Bulan	205.150.000	100	%	115,48	
		7	01	02	2.02		**2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di**																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV												
					Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	K Volume	K Satuan	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
		7 01 02 2.02 03	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	Bulan	387.457.500	48	Bulan	309.966.000	12	Bulan	77.491.500	3	Bulan	12.700.000	3	Bulan	19.050.000	3	Bulan	12.700.000	3	Bulan	28.830.000	12	Bulan	73.280.000	60	Bulan	383.246.000	100	%	98,91	
		7 01 03	**C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																																
		7 01 03 2.01	**1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																																
		7 01 03 2.01 03	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	Bulan	25.349.900	48	Bulan	20.279.920	12	Bulan	22.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	22.500.000	12	Bulan	22.500.000	60	Bulan	42.779.920	100	%	168,76	
		7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**																																
		7 01 04 2.01	**2. Koordianasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**																																
		7 01 04 2.01 01	a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	60	Bulan	25.500.000	48	Bulan	20.400.000	12	Bulan	22.500.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	22.500.000	12	Bulan	22.500.000	60	Bulan	42.900.000	100	%	168,24	
		7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**																																
		7 01 05 2.01	**1. Koordianasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**																																
		7 01 05 2.01 01	a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	Bulan	719.595.000	48	Bulan	67.000.000	12	Bulan	67.000.000	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	67.000.000	12	Bulan	67.000.000	60	Bulan	134.000.000	100	%	18,62	
		7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**																																
		7 01 06 2.01	**1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi**																																
		7 01 06 2.01 01	a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	Bulan	50.000.000	12	Bulan	39.672.000	12	Bulan	39.672.000	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	39.672.000	12	Bulan	39.672.000	24	Bulan	79.344.000	200	%	158,69	
			KECAMATAN JENAMAS																																**KECAMATAN JENAMAS**
		7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.886.833.251**			**6.296.833.660**			**2.172.074.039**			**332.759.896**			**539.606.456**			**504.685.666**			**726.022.215**			**2.103.074.233**			**8.399.907.893**			**84,96**	
		7 01 01 2 02	**Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah																														
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.502.833.251			4.749.111.890			1.401.274.039			208.382.996			442.659.456			378.315.966			341.257.715			1.370.616.133			6.119.728.023			94,11	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				31.300.000			11.487.500			5.000.000			1.200.000			0			1.740.000			2.060.000			5.000.000			16.487.500			52,68	
			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				119.700.000			78.821.320			38.520.000			2.984.000			234.000			6.121.800			11.328.800			20.668.600			99.489.920			83,12	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				351.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00	
			Penyediaan alat tulis kantor				116.500.000			94.831.500			50.000.000			8.732.000			4.366.000			9.902.400			8.169.600			31.170.000			126.001.500			108,16	
			Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				25.000.000			7.000.000			0			0			0			0			0			0			7.000.000			28,00	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				42.500.000			19.481.750			10.000.000			1.061.000			0			2.005.000			6.668.000			9.734.000			29.215.750			68,74	
			Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor				29.000.000			15.206.500			6.880.000			365.900			2.690.000			0			3.819.000			6.874.900			22.081.400			76,14	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				23.600.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00	
			Penyediaan makanan dan minuman				224.400.000			35.000.000			35.000.000			9.375.000			10.375.000			5.242.500			10.007.500			35.000.000			70.000.000			31,19	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
									K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K		
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
							Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi/Pertemuan teknis dalam daerah				1.400.000.000			642.339.200			272.000.000			53.709.000			47.982.000			54.408.000			115.841.600			271.940.600			914.279.800			65,31		
							Honorarium Non PNS (Permendagri 13) / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Permendagri 90)				656.000.000			639.000.000			353.400.000			46.950.000			31.300.000			46.950.000			226.870.000			352.070.000			991.070.000			151,08		
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				365.000.000			4.554.000			0			0			0			0			0			0			4.554.000			1,25		
		7	01	02			**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparator**				**3.389.000.000**			**1.112.250.000**			**200.000.000**			**7.010.400**			**44.000.000**			**42.496.000**			**56.493.000**			**149.999.400**			**1.262.249.400**			**37,25**		
							Pengadaan Alat Studio				40.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				45.000.000			1.500.000			0			0			0			0			0			0			1.500.000			3,33		
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				90.000.000			76.000.000			75.000.000			0			20.000.000			19.800.000			35.200.000			75.000.000			151.000.000			167,78		
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				300.000.000			50.000.000			50.000.000			6.010.400			20.000.000			9.765.000			14.224.000			49.999.400			99.999.400			33,33		
							Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				35.000.000			23.400.000			20.000.000			0						12.931.000			7.069.000			20.000.000			43.400.000			124,00		
							Pemeliharaan rutin/berkala mubelair				24.000.000			10.000.000			5.000.000			1.000.000			4.000.000			0			0			5.000.000			15.000.000			62,50		
							Pengadaan Meubelair				50.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Pengadaan LCD Proyektor				40.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Pengadaan Televisi (TV)				60.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Pengadaan Mesin Genset				40.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer				100.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Pengadaan AC Unit				30.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon III dan IV				20.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Penimbunan Halaman dan Pembuatan Pagar Rumah Jabatan Camat				150.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan				1.500.000.000			50.000.000			50.000.000			0			0			0			0			0			50.000.000			3,33		
							Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Kecamatan				450.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Pembuatan Pagar Beton Kantor Kecamatan Jenamas				200.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Penataan Halaman Kantor Camat Jenamas				200.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Pengadaan Pembuatan Nomor Rumah Penduduk				15.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				0			0			0			0			0			0			0			0			0			#DIV/0!		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rahab Aula Kantor)				0			901.350.000			0			0			0			0			0			0			901.350.000			#DIV/0!		
		7	01	03			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**159.400.000**			**8.500.000**			**0**			**0**			**0**												**8.500.000**			**5,33**		
							Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				97.400.000			8.500.000			0			0			0			0			0			0			8.500.000			8,73		
							Pengadaan Pakaian Dinas / PDH				62.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
		7	01	04			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**2.061.750.000**			**391.609.800**			**160.000.000**			**42.500.000**			**8.980.000**			**5.060.000**			**98.310.000**			**154.850.000**			**491.609.800**			**23,84**		
							Pendidikan dan Pelatihan Formal				350.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Peningkatan Kapasitas RT / RW				258.000.000			93.600.000			0			0			0			0			0			0			93.600.000			36,28		
							Kegiatan PATEN				145.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan				160.000.000			70.000.000			25.000.000			25.000.000			0			0			0			25.000.000			95.000.000			59,38		
							Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan (Permendagri 13), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Permendagri 90)				180.000.000			41.319.800			0			0			0			0			0			0			41.319.800			22,96		
							Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa				146.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00		
							Peningkatan Kapasitas Kecamatan (Permendagri 13), Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik (Permendagri 90)				445.000.000			135.090.000			60.000.000			2.500.000			8.980.000			5.060.000			43.460.000			60.000.000			195.090.000			43,84		

No	Sasaran	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
								Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp									
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
						Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Permendagri 90)				125.000.000			46.000.000			15.000.000			15.000.000			0			0			0			15.000.000			61.000.000			48,80	
						Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan				130.000.000			5.000.000			0			0			0			0			0			0			5.000.000			3,85	
						Pelaksanaan Penetapan Tata Batas Desa Se Kecamatan Jenamas				122.750.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00	
						Penanganan dan Pemeliharaan Kamtibmas				0			600.000			0			0			0			0			0			0			600.000			#DIV/0!	
						Antisipasi Penanggunalangan Bencana Alam				0			600.000			0			0			0			0			0			0			600.000			#DIV/0!	
						Antisipasi Penanggunalangan Bencana Alam				0			0			0			0			0			0			0			0			0			#DIV/0!	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0			0			60.000.000			0			0			0			54.850.000			54.850.000			54.850.000			#DIV/0!	
		7	01	05		**Program Peningkatan Pengembanagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanagn**				**340.000.000**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0,00**	
						Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA				65.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00	
						Pembuatan Profil Kecamatan dan Monografi Kecamatan				65.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00	
						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD				65.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00	
						Pembuatan LAKIP,LKJ dan LPPD				65.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00	
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				80.000.000			0			0			0			0			0			0			0			0			0,00	
						Kerja sama kontrak Jaringan Seluler				0			0			0			0			0			0			0			0			0			#DIV/0!	
		7	01	06		**Program Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan**				**0**			**474.210.000**			**220.000.000**			**0**			**0**			**140.000.000**			**80.000.000**			**220.000.000**			**694.210.000**			**#DIV/0!**	
						Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (Pembuatan Bangunan Taman Bacaan Masyarakat Kel. Rantau Kujang)				0			0			0			0			0			0			0			0			0			#DIV/0!	
						Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (Pembuatan Wahana Permainan Anak Usia Dini)				0			0			0			0			0			0			0			0			0			#DIV/0!	
						Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman (Pengadaan Pompa Kebakaran Portable)				0			0			0			0			0			0			0			0			0			#DIV/0!	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** (Permendagri 90)				0			474.210.000			220.000.000			0			0			140.000.000			80.000.000			220.000.000			694.210.000			#DIV/0!	
		7	01	07		**Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**				**0**			**486.516.500**			**430.000.000**			**0**			**0**			**58.400.000**			**303.495.000**			**361.895.000**			**848.411.500**			**#DIV/0!**	
						Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serja kejadian luar biasa lainnya (Edukasi Manajemen proteksi Kebakaran/ Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran Swakarsa Kelurahan Rantau Kujang)				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			#DIV/0!	
						Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Penyelenggaraan Pelatihan Anyaman Purun)				0			0			0			0			0			0			0			0			0			#DIV/0!	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																
									K			K			K			K			K			K			K																
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp																
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12															13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Permendagri 90)				0			236.516.500			180.000.000			0			0			23.400.000			156.600.000																
							Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan				0			250.000.000			250.000.000			0			0			35.000.000			146.895.000																
		7	01	08			**Program Peningkatan Kelurahan**				**0**			**455.000.000**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**																
							Pembuatan Jalan/Geang Cor Beton RT. 20 Kelurahan Rantau Kujang				0			150.000.000			0			0			0			0			0																
							Peningkatan Jalan Pelajar Kelurahan Rantau Kujang				0			130.000.000			0			0			0			0			0																
							Peningkatan Jalan Damai Kelurahan Rantau Kujang				0			0			0			0			0			0			0																
							Pengadaan/Pembuatan Papan Nama Jalan/Gang di Kelurahan Rantau Kujang				0			0			0			0			0			0			0																
							Pembuatan Gapura/Pintu Gerbang selamat Datang dan Kampung KB				0			65.000.000			0			0			0			0			0																
							Kegiatan Sunatan Masal di Kelurahan Rt. Kujang				0			0			0			0			0			0			0																
							Peningkatan Kades Posyandu dan Peningkatan Kesehatan Bagi Balita dan Lansia				0			0			0			0			0			0			0																
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran Utan dan Lahan (Karhutla) di Kelurahan Rantau Kujang				0			0			0			0			0			0			0																
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan				0			50.000.000			0			0			0			0			0																
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bermain				0			30.000.000			0			0			0			0			0																
							Pengadaan Tenda untuk Kegiatan Posyandu di Kelurahan Rantau Kujang				0			30.000.000			0			0			0			0			0																
		7	01	09			**Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**0**			**10.000.000**			**10.000.000**			**375.000**			**3.625.000**			**3.000.000**			**3.000.000**																
							Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentera Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0			10.000.000			10.000.000			375.000			3.625.000			3.000.000			3.000.000																
		7	01	10			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**				**0**			**0**			**67.000.000**			**0**			**0**			**0**			**67.000.000**																
							Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				0			0			67.000.000			0			0			0			67.000.000																
		7	01	11			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**0**			**0**			**38.600.000**			**0**			**0**			**0**			**19.450.000**																
							Fasilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa				0			0			38.600.000			0			0			0			19.450.000																
							jumlah				**15.836.983.250,92**			**9.234.919.960,00**			**3.297.674.039,00**			**382.645.296**			**596.211.456**			**753.641.666**			**1.353.770.215**																
							KECAMATAN KARAU KUALA																																						**KECAMATAN KARAU KUALA**
		7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																																					
		7	1	1	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-																																		
1	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup	7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	10.168.959.051	48	Bulan	1.864.941.619	12	Bulan	1.750.061.192	3	Bulan	269.465.753	3	Bulan	538.687.796	3	Bulan	403.809.929	3	Bulan	350.102.150	12	Bulan	1.562.065.628	60	Bulan	3.427.007.247	100	%	33,70	
1	Tersedianya Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7	1	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Bulan			Bulan			Bulan	10.000.000		Bulan			Bulan		3	Bulan		3	Bulan	10.000.000	6	Bulan	10.000.000	6	Bulan	10.000.000	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	1	1	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-																																

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp			
									Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
2	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	89.299.200	48	Bulan	1.400.000	12	Bulan	1.400.000	3	Bulan	820.000	3	Bulan	280.000	3	Bulan	300.000	3	Bulan	-	12	Bulan	1.400.000	60	Bulan	2.800.000	100	%	3,14	
3	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	193.481.600	48	Bulan	15.000.000	12	Bulan	15.000.000	3	Bulan	6.021.900	3	Bulan	3.693.600	3	Bulan	2.264.000	3	Bulan	3.020.500	12	Bulan	15.000.000	60	Bulan	30.000.000	100	%	15,51	
4	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.	7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Bulan	32.743.040	48	Bulan	7.000.000	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	2.747.000	3	Bulan	2.301.000	3	Bulan	2.621.000	3	Bulan	2.331.000	12	Bulan	10.000.000	60	Bulan	17.000.000	100	%	51,92	
5	Barang Cetakan, Penggandaan	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Bulan	81.857.600	48	Bulan	5.054.960	12	Bulan	4.911.160	3	Bulan	1.633.250	3	Bulan	911.760	3	Bulan	401.000	3	Bulan	1.965.150	12	Bulan	4.911.160	60	Bulan	9.966.120	100	%	12,17	
6	Terlaksana kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	60	Bulan	2.604.560.000	48	Bulan	175.175.856	12	Bulan	208.114.000	3	Bulan	35.539.000	3	Bulan	58.875.000	3	Bulan	51.383.913	3	Bulan	52.186.187	12	Bulan	197.984.100	60	Bulan	373.159.956	100	%	14,33	
		7	1	1	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-																														
7	Tersedianya Genset Kantor Kelurahan	7	1	1	2,07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	Kegiatan	-		Kegiatan		1	Kegiatan	9.600.000	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-			9.600.000	0	Kegiatan	9.600.000	0	Kegiatan	9.600.000	0	%	#DIV/0!	
8	Tersedianya Kursi	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Kegiatan	-		Kegiatan		1	Kegiatan	14.980.000	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-			13.880.000	0	Kegiatan	13.880.000	0	Kegiatan	13.880.000	0	%	#DIV/0!	
8	Tersedianya Komputer dan UPS	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer dan UPS yang Disediakan	1	Kegiatan	-		Kegiatan		1	Kegiatan	37.100.000	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-			37.100.000	0	Kegiatan	37.100.000	0	Kegiatan	37.100.000	0	%	#DIV/0!	
9	Pemasangan Keramik dan Pengecatan Aula Kantor Kecamatan	7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Kegiatan	-		Kegiatan		1	Kegiatan	144.690.000	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-			144.344.000	0	Kegiatan	144.344.000	0	Kegiatan	144.344.000	0	%	#DIV/0!	
		7	1	1	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																		
10	Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	74.416.000	48	Bulan	4.800.000	12	Bulan	4.800.000	3	Bulan	1.200.000	3	Bulan	2.400.000	3	Bulan	1.200.000	3	Bulan	-	12	Bulan	4.800.000	60	Bulan	9.600.000	100	%	12,90	
11	Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Bulan	178.598.400	48	Bulan	32.374.390	12	Bulan	39.407.680	3	Bulan	5.866.749	3	Bulan	5.500.001	3	Bulan	5.950.600	3	Bulan	8.236.473	12	Bulan	25.553.823	60	Bulan	57.928.213	100	%	32,43	
12	Tersedianya kegiatan Jasa pelayanan Administrasi kantor	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	1.196.609.280	48	Bulan	229200000	12	Bulan	229.200.000	3	Bulan	38.200.000	3	Bulan	57.300.000	3	Bulan	57.300.000	3	Bulan	76.400.000	12	Bulan	229.200.000	60	Bulan	458.400.000	100	%	38,31	
		7	1	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-																														
13	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	Bulan	70.000.000	48	Bulan		12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	7.725.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	1.049.800	12	Bulan	8.774.800	60	Bulan	8.774.800	100	%	12,54	
14	Terpeliharanya Gedung Aula Kantor Kelurahan	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	Bulan		48	Bulan		12	Bulan	38.220.000	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	-	3	Bulan	38.100.000	12	Bulan	38.100.000	60	Bulan	38.100.000	100	%	#DIV/0!	
15	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	60	Bulan	37.208.000	48	Bulan	7000000	12	Bulan	6.980.000	3	Bulan	2.760.000	3	Bulan	700.000	3	Bulan	-	3	Bulan	3.520.000	12	Bulan	6.980.000	60	Bulan	13.980.000	100	%	37,57	
		7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**																																		
		7	1	2	2,01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**																																		
16	Terlaksananya Kegiatan Kapasitas Kecamatan	7	1	2	2,01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Bulan	250.000.000	48	Bulan	93705000	12	Bulan	40.000.000	3	Bulan	9.362.500	3	Bulan	10.250.000	3	Bulan	11.750.000	3	Bulan	8.637.500	12	Bulan	40.000.000	60	Bulan	133.705.000	100	%	53,48	
		7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**																																		
		7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																																		
17	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	48	Bulan	-	36	Bulan	218.500.000	12	Bulan	224.150.000	3	Bulan	-	3	Bulan	2.000.000	3	Bulan	2.000.000	3	Bulan	205.000.000	12	Bulan	209.000.000	48	Bulan	427.500.000	100	%	#DIV/0!	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K			
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%			16
18	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48	Bulan	-	36	Bulan	127500000	12	Bulan	125.850.000	3	Bulan	-	3	Bulan	28.600.000	3	Bulan	30.600.000	3	Bulan	66.650.000	12	Bulan	125.850.000	48	Bulan	253.350.000	100	%	#DIV/0!	
		7	**1**	**3**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**																																		
19	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT / RW & Tersedianya Kegiatan Pembinaan TP - PKK Kecamatan dan TP-PKK Kelurahan	7	1	3	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60	Bulan	1.041.824.000	48	Bulan	63000000	12	Bulan	127.975.000	3	Bulan	12.400.000	3	Bulan	26.084.000	3	Bulan	23.350.000	3	Bulan	65.141.000	12	Bulan	126.975.000	60	Bulan	189.975.000	100	%	18,23	
		7	**1**	**3**	**2,05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**				-																													
20	Terlaksana kegiatan PPKM	7	1	3	2,05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12	Bulan	-		Bulan	0	12	Bulan	250.000.000	3	Bulan	-	3	Bulan	37.152.250	3	Bulan	56.344.350	3	Bulan	155.923.400	12	Bulan	249.420.000	12	Bulan	249.420.000	100	%	#DIV/0!	
		7	1	6			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMU**																																		
		7	1	6	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-																														
21	Tersedianya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Bulan			Bulan			Bulan	67.000.000		Bulan	-		Bulan		3	Bulan		3	Bulan	66.980.000	6	Bulan	66.980.000	6	Bulan	66.980.000	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**																																		
		7	**1**	**6**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				-																														
21	Tersedianya Verifikasi ADD dan DD	7	1	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60	Bulan	186.040.000	48	Bulan	12.600.000	12	Bulan	15.750.000	3	Bulan	-	3	Bulan	5.250.000	3	Bulan	5.250.000	3	Bulan	5.250.000	12	Bulan	15.750.000	60	Bulan	28.350.000	100	%	15,24	
22	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7	1	6	2,01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokemen Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Kegiatan		1	Kegiatan		0	Kegiatan	48.600.000	-	Kegiatan		-	Kegiatan		-	Kegiatan		1	Kegiatan	48.540.000	1	Kegiatan	48.540.000	2	Kegiatan	48.540.000	200	%	#DIV/0!	
22	Tersedianya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	7	1	6	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5	Kegiatan	111.624.000	4	Kegiatan	14.145.000	1	Kegiatan	15.000.000	1	Kegiatan	15.000.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	15.000.000	5	Kegiatan	29.145.000	100	%	26,11	
8							**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																																
							KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																																**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																																
		8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																
		8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	terlaksananya penyusunan RKA murni	60	bulan	31.250.000	48	bulan	257.750.000	12	bulan	6.250.000	3	bulan	-	3	bulan	6.250.000	3	bulan	-	3	bulan	14.827.096	12	Bulan	21.077.096	60	Bulan	278.827.096	100	%	892,25	
		8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																
		8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gajih dan Tunjangan ASN	60	bulan	11.271.227.590	48	bulan	9.576.911.547	12	bulan	2.254.245.518	3	bulan	388.834.931	3	bulan	945.241.606	3	bulan	678.473.072	3	bulan	489.578.545	12	Bulan	2.502.128.154	60	Bulan	12.079.039.701	100	%	107,17	
		8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																
		8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	60	bulan	104.385.500	48	bulan	98.764.930	12	bulan	20.877.100	3	bulan	5.195.400	3	bulan	4.888.800	3	bulan	5.182.800	3	bulan	5.605.000	12	Bulan	20.872.000	60	Bulan	119.636.930	100	%	114,61	
		8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Untuk Kantor	60	bulan	10.000.000	48	bulan	6.999.996	12	bulan	2.000.000	3	bulan	500.000	3	bulan	500.000	3	bulan	500.000	3	bulan	500.000	12	Bulan	2.000.000	60	Bulan	8.999.996	100	%	90,00	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																	
									K			K			K			K			K			K			K																	
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp																	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12																	15 = 14 / 6 x100%			16
		8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan dan Penjilidan	60	bulan	47.638.750	48	bulan	59.768.797	12	bulan	9.527.750	3	bulan	3.487.000	3	bulan	1.917.000	3	bulan	1.949.500	3	bulan	2.156.250	12	Bulan	9.509.750	60	Bulan	69.278.547	100	%	145,42	
		8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.	60	bulan	38.535.000	48	bulan	41.000.000	12	bulan	7.707.000	3	bulan	-	3	bulan	3.800.000	3	bulan	1.900.000	3	bulan	2.000.000	12	Bulan	7.700.000	60	Bulan	48.700.000	100	%	126,38	
		8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Biaya Untuk Konsumsi Rapat	60	bulan	199.457.500	48	bulan	127.097.000	12	bulan	39.891.500	3	bulan	10.000.000	3	bulan	10.800.000	3	bulan	10.800.000	3	bulan	8.280.000	12	Bulan	39.880.000	60	Bulan	166.977.000	100	%	83,72	
		8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pelaksanaan pembinaan,monitoring dan evaluasi dalam daerah Terlaksananya pelaksanaan pertemuan teknis dan konsultasi keluar daerah	60	bulan	921.950.300	48	bulan	897.189.768	12	bulan	184.390.060	3	bulan	59.859.800	3	bulan	55.481.560	3	bulan	56.247.000	3	bulan	23.458.700	12	Bulan	195.047.060	60	Bulan	1.092.236.828	100	%	118,47	
		8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																					
		8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat Meyurat	60	bulan	15.000.000	48	bulan	8.560.000	12	bulan	3.000.000	3	bulan	744.000	3	bulan	744.000	3	bulan	1.488.000	3	bulan	24.000	12	Bulan	3.000.000	60	Bulan	11.560.000	100	%	77,07	
		8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Layanan Telepon, Internet, Air dan Listrik Kantor	60	bulan	175.296.000	48	bulan	96.862.318,00	12	bulan	35.059.200	3	bulan	3.959.182	3	bulan	5.984.311	3	bulan	6.655.949	3	bulan	7.061.822	12	Bulan	23.661.264	60	Bulan	120.523.582	100	%	68,75	
		8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Kontrak Pegawai Non PNS	60	bulan	1.581.000.000	48	bulan	732.034.000	12	bulan	316.200.000	3	bulan	50.400.000	3	bulan	100.800.000	3	bulan	51.550.000	3	bulan	99.650.000	12	Bulan	302.400.000	60	Bulan	1.034.434.000	100	%	65,43	
		8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																					
		8	**01**	**01**	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan rutin / Berkala komputer Dan Peralatannya	60	bulan	50.000.000	48	bulan	79.696.485	12	bulan	10.000.000	3	bulan	2.500.000	3	bulan	2.500.000	3	bulan	2.500.000	3	bulan	2.500.000	12	Bulan	10.000.000	60	Bulan	89.696.485	100	%	179,39	
		8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**																																					
		8	01	02	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**																																					
		8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	60	bulan	65.000.000	48	bulan	69.096.400	12	bulan	13.000.000	3	bulan	12.604.200	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	375.000	12	Bulan	12.979.200	60	Bulan	82.075.600	100	%	126,27	
		8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksana dan terpenuhinya pengembangan dan peningkatan kapasitas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangasaan (D-FPK) Terpenuhinya pengembangan oprasional Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP-FKUB)	60	bulan	116.550.000	48	bulan	97.398.400	12	bulan	23.310.000	3	bulan	-	3	bulan	4.680.800	3	bulan	16.177.400	3	bulan	2.336.000	12	Bulan	23.194.200	60	Bulan	120.592.600	100	%	103,47	
		8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terlaksananya jumlah peserta diklat wawasan kebangsaan Terpenuhinya pengembangan Pusat Pendidikan Kebangsaan (PPWK)	60	bulan		48	bulan	253.855.000	12	bulan	21.508.250	3	bulan	-	3	bulan	11.390.450	3	bulan	10.117.800	3	bulan	9.967.300	12	Bulan	31.475.550	60	Bulan	285.330.550	100	%	#DIV/0!	
		8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka	Terlaksannya forum peningkatan kesadaran bela negara Terlaksananya ikrar bersama anak bangsa	60	bulan	149.280.000	48	bulan	286.544.700	12	bulan	29.856.000	3	bulan	-	3	bulan	13.980.400	3	bulan	-	3	bulan	105.809.400	12	Bulan	119.789.800	60	Bulan	406.334.500	100	%	272,20	
		8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan pengawas pengembangan sosial ekonomi kemasyarakatan yang terlaksana Terpenuhinya pritemuan teknis bidang ketahanan ideologi bangsa	60	bulan	180.700.000	48	bulan	50.275.800	12	bulan	36.140.000	3	bulan	8.268.000	3	bulan	13.070.800	3	bulan	5.596.800	3	bulan	9.163.200	12	Bulan	36.098.800	60	Bulan	86.374.600	100	%	47,80	
		8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**																																					

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K			K			K			I			II			III			IV			K			K			K		
									Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	
1	*2*	*3*					*4*	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*10*			*11*			*12*			*13*			*14 = 7 +13*			*15 = 14 / 6 x100%*			*16*
		8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**																																		
		8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	terpenuhinya buku direktori partai politik	60	bulan	11.250.000	48	bulan	10.000.000	12	bulan	2.250.000	3	bulan	-	3	bulan	2.250.000	3	bulan	-	3	bulan	-	12	Bulan	2.250.000	60	Bulan	12.250.000	100	%	108,89	
		8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan,Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Bantuan Keuangan Partai Politik	60	bulan	8.939.250.000	48	bulan	1.188.942.000	12	bulan	1.787.850.000	3	bulan	4.862.000,00	3	bulan	98.814.000	3	bulan	400.816.000	3	bulan	1.293.345.000	12	Bulan	1.797.837.000	60	Bulan	2.986.779.000	100	%	33,41	
								Terlaksananya Verifikasi Kelengkapan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Yang Ada Kursi di DPRD																																
								Tersalurnya Bantuan Dana hibah Untuk Partai Politik																														
		8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Politik dan Kemasyarakatan	60	bulan	163.135.000	48	bulan	210.051.200	12	bulan	32.627.000	3	bulan	7.445.400,00	3	bulan	-	3	bulan	13.192.200	3	bulan	11.989.400	12	Bulan	32.627.000	60	Bulan	242.678.200	100	%	148,76	
		8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	terlaksananya evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Barito Selatan	60	bulan	98.100.000	48	bulan	311.219.000	12	bulan	19.620.000	3	bulan	3.696.000	3	bulan	9.432.000	3	bulan	4.741.000	3	bulan	21.751.000	12	Bulan	39.620.000	60	Bulan	350.839.000	100	%	357,63	
								terlaksananya pemantauan indeks demokrasi Indonesia																														
		8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**																																
		8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**																																
		8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terpenuhinya Buku Direktori Ormas, LSM, dan Nirlaba lainnya	60	bulan	11.250.000	48	bulan	10.450.000	12	bulan	2.250.000	3	bulan	1.200.000	3	bulan	-	3	bulan	-	3	bulan	8.695.000	12	Bulan	9.895.000	60	Bulan	20.345.000	100	%	180,84	
		8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	terlaksanannya pembinaan dan pendaftaran ormas	60	bulan	2.650.000.000	48	bulan	993.210.400	12	bulan	530.000.000	3	bulan	0	3	bulan	362.500.000	3	bulan	-	3	bulan	469.792.000	12	Bulan	832.292.000	60	Bulan	1.825.502.400	100	%	68,89	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	
									Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp										
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 8 x100%			16
		8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evalusi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan	60	bulan	83.499.000	48	bulan	81.322.800	12	bulan	16.699.800	3	bulan	5.609.400	3	bulan	6.790.200	3	bulan	1.210.000	3	bulan	3.065.000	12	Bulan	16.674.600	60	Bulan	97.997.400	100	%	117,36	
		8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**																																		
		8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**																																		
		8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tercapainya Jumlah Deteksi Dini Dalam Upaya Stabilitas Daerah	60	bulan	12.748.900	48	bulan	131.577.000	12	bulan	2.549.780	3	bulan	39.500	3	bulan	-	3	bulan	1.358.000	3	bulan	1.139.000	12	Bulan	2.536.500	60	Bulan	134.113.500	100	%	1051,96	
		8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Terbentuknya Tim Terpadu dan Pengembangan Penanganan Konflik Sosial jumlah orang asing NGO dan lembaga nirlaba lainnya	60	bulan	71.173.000	48	bulan	144.664.000	12	bulan	14.234.600	3	bulan	7.362.200	3	bulan	-	3	bulan	754.000	3	bulan	31.107.200	12	Bulan	39.223.400	60	Bulan	183.887.400	100	%	258,37	
		8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terlaksananya deteksi keamanan dan ketertiban masyarakat terlaksananya pengembangan dan peningkatan kapasitas pencegahan dan penangan konflik	60	bulan	212.249.800	48	bulan	247.851.000	12	bulan	42.449.960	3	bulan	4.798.160	3	bulan	4.790.000	3	bulan	10.570.000	3	bulan	42.264.500	12	Bulan	62.422.660	60	Bulan	310.273.660	100	%	146,18	
		8	**01**	**06**	**2.01**	**06**	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60	bulan		48	bulan		12	bulan	598000000	3	bulan		3	bulan		3	bulan	591.974.453	12	Bulan	591974453	60	Bulan	591974453	100	%	#DIV/0!	
											31.157.775.705			**16.174.770.441**			**6.844.555.141**			**581.365.173**			**1.666.605.927**			**1.281.779.521**			**2.681.384.413**			**6.803.109.487**			**22.977.879.928**			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																									
Predikat kinerja																																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																								
Faktor penahambat pencapaian kinerja:																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																																								

Buntok, Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

JAYA WARDANA AP, SE., M.Ec.DEV
NIP. 19740702 199403 1 011

2.6 Sustainable Development Goals (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda 2030 dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Terdapat 17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's), seperti pada gambar berikut:

Gambar 2. 41
Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)



Sumber : https://sdgs.bappenas.go.id/

Tabel 2.87
Tujuan dan Indikator Kinerja SDGs
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Daerah	Capaian kinerja tahun 2022
1.	Tanpa kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	6.830 Jiwa
2.	Tanpa kelaparan	Prevalensi stunting	35,60 %
3.	Kehidupan sehat dan sejahtera	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	- 200 - 2
4.	Pendidikan berkualitas	Persentase angka melek hurup penduduk umur ≥15 tahun.	99,99 %
5.	Kesetaraan gender	Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD	10 Kursi
6.	Air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi.	64,73
7.	Energi bersih dan terjangkau	- Rasio elektrifikasi	N/A
8.	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	- Laju pertumbuhan Ekonomi - Tingkat Pengangguran terbuka	- 6,28 - 3,53

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Daerah	Capaian kinerja tahun 2022
9.	Industri, Inovasi dan infrastruktur	- Kondisi mantap jalan	358,97 km
10.	Berkurangnya kesenjangan	- Rasio Gini - Indeks Desa Membangun	- 0,31 - N/A
11.	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	Jumlah rumah layak huni	96
12.	Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	- Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	N/A
13.	Penanganan perubahan iklim	- Tersedianya strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	N/A
14.	Ekosistem lautan	-	Tidak ada wilayah laut di Barito Selatan.
15.	Ekosistem Darat	- Luas kawasan hutan	445.643 Ha
16.	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	- Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B - Persentase bayi berakta kelahiran	- N/A - N/A - N/A
17.	Kemitraan untuk mencapai tujuan	- Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	N/A

2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan SPM di Indonesia merupakan amanat dari Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan pengganti dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yangberhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis Pelayanan Dasar untuk daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan kesetaraan;
d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
g. pelayanan kesehatan balita;
h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);
p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
u. pelayanan informasi rawan bencana;
v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

SPM di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 bisa dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.88
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
A.	**BIDANG PENDIDIKAN**							
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
B.	**Bidang Kesehatan**							

1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupaJumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	

10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah Warga Negara penderita terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara penderitadengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
C.	**Bidang Pekerjaan Umum**							
1.	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warna negara yang memperolehkebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupaJumlah barang, jasa dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum.
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warna negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100%	Setiap tahun	
D.	**Bidang Perumahan Rakyat**							
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupaJumlah barang, jasa dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang perumahan rakyat.
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100%	Setiap tahun	

	terkena relokasi Program Pemerintah Daerahkabupaten/kota;	programPemerintah Daerahkabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyedian rumah layak huni.						
E.	**Bidang Trantibumlinmas**							
1.	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupaJumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang trantibumlimnas.
2.	pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
3.	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layananpencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
4.	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layananpenyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
5.	Pelayananpenyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
F.	**Bidang Sosial**							
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negarapenyandang disabilitas terlantar yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupaJumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan yang ditetapkan

		memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti						dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial.
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%		
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencanaKabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	

2.8 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan tidak lepas dari permasalahan dan kendala namun hal itu menjadi sebuah tantangan untuk pemecahan dengan solusi-solusi kebijakan pembangunan pendidikan yang handal. Permasalahan tersebut yaitu:

2.8.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan

2.8.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Pendidikan

   Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

   a. Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
   b. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya terwujud.
   c. Jumlah minimum guru masih belum terpenuhi.
   d. Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik.
   e. Kenaikan jabatan kepala sekolah terhambat karena sertifikasi-perjalanan dinas tidak dapat dilakukan.
   f. Proses belajar mengajar terganggu terutama karena belum semua sekolah, guru, dan peserta didik terlayani jaringan internet/paket internet untuk menunjang pembelajaran daring.

2. Kesehatan

   Prioritas bidang kesehatan memiliki sasaran meningkatnya usia harapan hidup. Dari 10 indikator kinerja yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup capaian kinerja 3,83 kasus dari target 4 kasus, Angka Kelangsungan Hidup Bayi capaian kinerja 99,9% dari target 99,9%, Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup capaian kinerja 339,9 dari target 45, Rasio Posyandu per Satuan Balita capaian kinerja 80%: dari target 1:50, Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk capaian kinerja 10 dari target 10:100.00, Rasio Pustu per Satuan

Penduduk capaian kinerja 6 dari target 6:10.000, Rasio Dokter per Satuan Penduduk capaian kinerja 42,6 dari target 42:100.00, Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan capaian kinerja 0,019 dari target 3%, dan Cakupan Pelayanan Nifas capaian kinerja 62% dari target 85%. Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain:

a. Angka harapan hidup masyarakat Barito Selatan yaitu 67,48 tahun masih dibawah rata-rata nasional 73,5 tahun.
b. Tingginya angka stunting.
c. Tingginya angka kematian bayi.
d. Tenaga kesehatan yang masih sangat kurang yaitu dokter gigi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan di 12 PKM.
e. Masih rendahnya jumlah jamban yang dimiliki warga.
f. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. Salah satu sistem jaringan prasarana adalah sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan jalan merupakan bagian dari Sistem jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Jaringan jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Sistem jaringan jalan yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi didaerah ini menyebabkan pengurangan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan pada wilayah tertentu, selain itu jaringan jalan juga untuk membuka peluang kegiatan

perdagangan antar wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan adanya sitem jaringan jalan yang terkoneksi antar wilayah diharapkan dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya merata disemua daerah.Dengan dibangun/ditingkatkannya infrastruktur jalan, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana jalan yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Menghubungkan Jaringan jalan antar desa, desa ke kecamatan dan desa/kecamatan ke ibu kota kabupaten merupakan tantangan bagi Kabupaten Barito Selatan ke depan karena masih terdapat 3 kecamatan belum sepenuhnya terhubung ke ibu kota kabupaten dan harus menggunakan transportasi air, terkecuali terlebih dahulu melewati kabupaten tetangga.

Capaian proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Barito Selatan rentang waktu tahun 2017-2022 dari total panjang jalan keseluruhan 1.035,040 Km yaitu target tahun 2017 sepanjang 421,66 Km (0,41) dan realisasi 613,158 Km (0,59), Target tahun 2018 sepanjang 463,83 Km (0,45) dan realisasi 559,439 Km (0,54), Target tahun 2019 sepanjang 510,21 Km (0,49) dan realisasi 483,670 Km (0,47), Target tahun 2020 sepanjang 561,23 Km (0,54) dan realisasi 648,35 Km (0,63), Target tahun 2021 sepanjang 617,35 Km (0,60) dan realisasi 680,970 Km (0,66) Target tahun 2022 sepanjang 679,09 Km dan realisasi 358,97 Km. Dari data tersebut, Pada tahun 2019 terjadi penurunan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dan capaiannya di bawah target. Selanjutnya dari tahun 2020-2021 proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan menjadi 0,63 di tahun 2020 dan 0,66 di

tahun 2021 ditahun 2022 terjadi penurunan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dan capaiannya di bawah target.

b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)

Berbanding lurus dengan proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) persentase capaian tahun 2017-2018 melebihi target yang ditetapkan yaitu target tahun 2017 sebesar 40,71 persen dan realisasi 59,24 persen, target tahun 2018 sebesar 44,81 persen dan realisasi 54,05 persen, target tahun 2019 sebesar 49,29 persen dan realisasi 46,73 persen, target tahun 2020 sebesar 54,22 persen dan realisasi 65,79 persen, target tahun 2021 sebesar 59,65 persen dan realisasi dengan 65,7 persen dan target tahun 2022 sebesar 59,65 persen dan realisasi dengan 36,87 persen.

c. Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air(minimal 1,5 m)

Prasarana drainase dominan hanya terdapat di daerah Kota Buntok yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dibanding kecamatan lainnya.Untuk kawasan pedesaan, drainase banyak dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat. Rata-rata masyarakat membangun drainase lebih bersifat swadaya. Pembangunan tersebut lebih pada kebutuhan untuk mengalirkan air pemakaian rumah tangga keperluan sehari-hari.

Capaian panjang jalan bertrotoar dan berdrainase yang disediakan bagi pejalan kaki mengalami peningkatan namun belum signifikan atau masih jauh dari target yang ditetapkan dalam rentang waktu tahun 2017-2022, Capaian tahun 2017 sebesar 0,078 persen dari target 10 persen, capaian tahun 2018 sebesar 0,094 persen dari target 12 persen, capaian tahun 2019 sebesar 0,109 persen dari target 14 persen, capaian tahun 2020 sebesar 0,109 persen dari target 16 persen, capaian tahun 2021 sebesar 1,125 persen dari target 18 persen dan capaian tahun 2022 sebesar 0,072 persen dari target 18 persen. Peningkatan dan pembangunan trotoar dan drainase ini setiap tahunnya terfokus di Kota Buntok karena Kota Buntok sebagai ibu kota kabupaten yang merupakan wilayah perkotaan yang perlu ditata.

d. Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar diperoleh dari panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar dibagi panjang seluruh sempadan jalan kabupaten. Capaian Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar belum mencapai target yang ditetapkan dari Tahun 2017-2022, namun terus mengalami penurunan, yaitu 5,79 persen di tahun 2017 dari target 2 persen, 5,16 persen di tahun 2018 dari target 1 persen, 4,93 persen di tahun 2019 dari target 1 persen, 4,64 persen di tahun 2020 dari target 1 persen, 4,53 persen di tahun 2021 dari target 1 persen dan 0 persen di tahun 2022 dari target 1 persen. Capaian tahun 2022 telah melewati target 1 persen. Penurunan ini menunjukkan telah dilakukan penataan, terkhususnya di Kota Buntok dan Sababilah sebagai wilayah pengembangan kota.

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Capaian persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Barito Selatan sepanjang tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 sebesar 36 persen dari target 30,67 persen, pada tahun 2018 sebesar 52,18 persen dari target 30,67 persen, pada tahun 2019 sebesar 4,01 persen dari target 25,57 persen, pada tahun 2020 sebesar 50,48 persen dari target 25,32 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 64,73 persen dari target 20,67 persen pada tahun 2022 menetap di angka 64,73 persen dari target 20,67 persen. Penurunan persentase pada tahun 2019 disebabkan perubahan pola perhitungan menyesuaikan dengan aplikasi SPM dari Pemerintah Pusat dimana sektor persampahan bukan lagi bagian perhitungan SPM akses sanitasi layak, sehingga penyesuaian perhitungan capaian baru dapat dilakukan mulai tahun 2020. Berdasarkan target exercise/distribusi Provinsi Kalimantan Tengah bahwa target akses sanitasi layak Kabupaten Barito Selatan sebesar 69 persen sampai tahun 2024.

Capaian sampai tahun 2022 ini merupakan keberhasilan Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Barito Selatan yang telah mengupayakan tercapainya target melalui berbagai program mulai dari pemicuan, pembangunan jamban sehat bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR), pembangunan SPALD skala komunal yang didanai dari APBD Kabupaten, DAK, Dana Desa serta swasta (CSR).

f. Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar

Persentase capaian indikator sempadan sungai yang dipakai bangunan liar diperoleh dari panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dibagi panjang seluruh sempadan sungai di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 2017-2021 Persentase tidak mengalami penurunan yaitu tetap sebesar 2 persen dan ditahun 2022 terjadi peningkatan ke angka sebesar 5,28 persen. Hal ini menunjukkan belum ada penanganan atau penertiban bangunan liar di sempadan sungai.

g. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat

Dari Kurun waktu tahun 2017-2022, capaian persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Barito Selatan yaitu capaian tahun 2017 sebesar 7 persen dari target 10 persen, capaian tahun 2018 sebesar 7 persen dari target 12 persen, capaian tahun 2019 sebesar 7 persen dari target 16 persen, capaian tahun 2020 sebesar 7 persen dari target 20 persen, capaian tahun 2021 sebesar 86,58 dari target 24 persen dan capaian tahun 2022 sebesar 50 persen dari target 25 persen.

h. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Capaian persentase realisasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor diperoleh dari jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikali 100 persen. Capaian tahun 2017 sebesar 0 persen dari target 1,50 persen, capaian tahun 2018 sebesar 0 persen dari target 1,70

persen, capaian tahun 2019 sebesar 0,76 persen dari target 1,90 persen, capaian tahun 2020 sebesar 0,76 persen dari target 2,10 persen, capaian tahun 2021 sebesar 1,13 persen dari target 2,50 persen dan capaian tahun 2022 sebesar 100 persen dari target 3 persen. Penanganan daerah rawan longsor baru bisa terealisasi mulai tahun 2019 dengan capaian sebesar 0,76 persen dan terus meningkat sampai tahun 2022 mencapai sebesar 100 persen.

i. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Selatan menunjukan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2017-2022 namun masih berada di bawah target yang ditetapkan. Target tahun 2017 seluas 5469.6 Ha (47,11 persen) dan realisasi 3265.01 Ha (28,12 persen), target tahun 2018 seluas 6069.6 Ha (52,27 persen) dan realisasi 3265.01 Ha (28,12 persen), target tahun 2019 seluas 6469.6 Ha (55,72 persen) dan realisasi 3265.01 Ha (28,12 persen), target tahun 2020 seluas 6869.6 Ha (59,16 persen) dan realisasi 4081,27 Ha (35,15 persen), target tahun 2021 seluas 7269.6 Ha (62,61 persen) dan realisasi 4897,52 Ha (42,18 persen) dan target tahun 2022 seluas 7669,60 Ha (..... persen) dan realisasi ..... Ha (34,49 persen). Peningkatan luas irigasi dalam kondisi baik disebabkan selain pendanaan APBD Kabupaten juga karena adanya dukungan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi khususnya Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa.

j. Rasio Jaringan Irigasi

Realisasi rasio jaringan irigasi Kabupaten Barito Selatan dalam kondisi baik sepanjang tahun 2017-2022 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar 0,001, tahun 2018 sebesar 0,001, tahun 2019 sebesar 0,34, tahun 2020 sebesar 0,35, tahun 2021 sebesar 0,40, tahun 2022 sebesar 35,94. Peningkatan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat melalui APBN terhadap ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan cetak sawah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat.

k. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Sistem penyediaan air minum yang dikembangkan di Kabupaten Barito Selatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam menunjang kegiatan rumah tangga, komersial, sosial, pemerintahan dan lainnya. Rencana sistem pengembangan penyediaan air minum di Kabupaten Barito Selatan harus memperhatikan lokasi sumber mata air yang ada, sistem jaringan pipa PDAM yang telah melayani masyarakat, jumlah penduduk yang bersangkutan, dan keadaan topografi Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya di wilayah perdesaan juga dikembangkan SPAM Berbasis Masyarakat (SPAM BM) yang dikelola oleh KPSPAM. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi dua, meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

Capaian persentase penduduk berakses air minum dalam rentang waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi capaian. Capaian tahun 2017 sebesar 55,71 persen dari target 55,5 persen, capaian tahun 2018 sebesar 40,35 persen dari target 55,5 persen, capaian tahun 2019 sebesar 23,32 persen dari target 61,05 persen, capaian tahun 2020 sebesar 23,96 persen dari target 67,16 persen, capaian tahun 2021 sebesar 50,35 persen dari target 73,87 persen dan capaian tahun 2022 menetap diangka 50,35 persen dari target 81,26 persen. Sedangkan target akses air minum layak yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen. Belum optimalnya capaian, salah satunya disebabkan Perusahaan PDAM yang seharusnya bisa mandiri dalam penanganan dan peningkatan kapasitas PDAM, masih bertumpu pada bantuan APBD Kabupaten, APBN dan DAK dalam rangka pembangunan dan peningkatan sarana prasarana PDAM, seperti jaringan pipa distribusi, instalasi pengolahan air serta Sambungan Rumah. Disamping itu sarana prasarana PAMSIMAS yang sudah terbangun di perdesaan tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan masyarakat karena masih sebatas kran umum dan memerlukan pengelolaan yang baik, biaya operasional dan pemasangan sambungan rumah. Sejak tahun 2022 melalui dana DAK dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP) pemerintah pusat membantu desa

PAMSIMAS yang sarana prasarananya dalam kategori berfungsi sebagian untuk dioptimalisasi.

l. Rasio Areal Kawasan Kumuh

Penetapan areal kawasan kumuh di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 294 Tahun 2014 yang berlokasi di Kelurahan Buntok Kota (Jalan Karau dan sekitarnya, Jalan Niaga dan sekitarnya, Jalan Veteran dan Pembangunan dan sekitarnya), Kelurahan Hilir Sper (Jalan Jelapat/Kawasan Kamper dan sekitarnya), Kelurahan Jelapat (Jalan Jelapat/Kawasan Jelapat dan sekitarnya).Selanjutnya pada Tahun 2021 areal kawasan kumuh di Kabupaten Barito Selatan direvisi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2021, yaitu meliputi Kawasan Kumuh Pahlawan Bawah, Kawasan Kumuh Veteran, Kawasan Kumuh Kamper, Kawasan Kumuh Jelapat, Kawasan Kumuh Bangkuang dan Kawasan Kumuh Rantau Kujang.

Persentase capaian penanganan areal Kawasan kumuh tahun 2017-2019 tidak terjadi penurunan yaitu masih sebesar 4 persen areal kumuh dan pada tahun 2020-2022 terjadi penurunan menjadi 0 persen.

m. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB diperoleh dari luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah ber HPL/HGB. Total luas lahan ber HPL/HGB adalah 16.500 Ha. Rasio capaian tahun 2017 sebesar 0,12 (1.991,55 Ha) dari target 0,96 (15.913 Ha), capaian tahun 2018 sebesar 0,12 (1.991,55 Ha) dari target 0,96 (15.913 Ha), capaian tahun 2019 sebesar 0,13 (2.100,45 Ha) dari target 0,97 (16.000 Ha), capaiantahun 2020 sebesar 0,20 (3.379,20 Ha) dari target 0,97 (16.000 Ha), capaian tahun 2021 sebesar 0,25 (4.176,15 Ha) dari target 1,00 (16.500 Ha) dan capaian tahun 2022 masih tetap sebesar 0,25 (4.176,15 Ha) dari target 1,00 (16.500 Ha).

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

   Pada tahun 2022, persentase rumah layak huni kurang lebih sebesar 86%. Rehabilitasi Rumah berdasarkan program kegiatan SKPD yaitu program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Peningkatan Kualitas Swakelola dengan sumber dana dari APBD dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari TA. 2017 sd 2022 sebanyak 96 unit.

   Rehabilitasi Rumah berdasarkan program kegiatan SKPD yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sumber dana APBN dilaksanakan Oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah dimana Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi pendamping pelaksana kegiatan tersebut dari TA. 2017 sd 2022 sebanyak 1.850 Unit dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sumber dana Wold Bank dari tahun 2018 sd 2019 sebanyak 299 Unit.

   Seluruhnya merupakan upaya pencapaian target RPJMD terhadap kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Barito Selatan dimana berdasarkan data dari Tim Nasional Penanganan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2016 masih terdapat 7005 Rumah Tidak Layak Huni dari 33.367 unit rumah yang ada di kabupaten Barito Selatan.

   Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

   a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih;
   b. Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan;
   c. Tempat Pemakaman Umum belum terkelola dengan baik;
   d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan belum terkelola dengan baik;
   e. Masih tingginya angka backlog;
   f. Belum optimalnya pelayanan jaringan air bersih/minum permukiman;
   g. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman;
   h. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

i. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan – kegiatan yang ada di Bidang Perumahan;
j. Belum selesainya Penyusunan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
k. Belum selesainya Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
l. Belum diriviewnya dokumen RP2KPKP dan RP3KP;
m. Belum adanya masterplan penataan bantaran/sempadan sungai.

5. Pertanahan

Indikator kinerja berupa persentase ketersediaan lahan yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, selama periode tahun 2017 sampai dengan 2022, dengan kondisi akhir periode Renstra tahun 2017-2022, diharapkan penyertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mencapai target sebesar 100%.

Target capaian Renstra Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang mengacu pada target sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 sebesar 80,75% dengan realisasi capaian kinerja tahun 2017-2022 adalah sebesar 0,82%, dengan jumlah persil yang telah disertifikat sebanyak 298 persil tanah aset Pemerintah Daerah.

Rencana sertifikasi Tanah di tahun 2022 adalah sebanyak 92 Persil, sementara sampai dengan Maret 2022 telah dilakukan pengukuran sebanyak 46 persil. Kegiatan tersebut masih belum dapat dilaporkan ke dalam capaian kinerja karena masih dalam proses.

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pertanahan antara lain:

a. Banyak bidang tanah non-produktif dengan pemilik tidak berada di tempat, banyak pula bidang tanah yang tidak jelas kepemilikannya
b. Masih banyak ditemui tumpang tindih surat kepemilikan
c. Banyaknya lokasi tanah yang berada di wilayah kawasan hutan sehingga sulit untuk dilakukan pembuatan kepemilikan sertifikat tanah
d. Kurang singkronnya peta RTRWK perda no 4 tahun 2014 dengan fungsi dan pemanfaatan lahan yang berkembang di masyarakat saat ini

e. Kurangnya fasilitas pendukung dan SDM yang berkompeten menangani masalah pertanahan

6. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat antara lain:

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mencapai 70%, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) sebesar 75%, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota 80%, Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 80 %, Persentase Penegakan PERDA sebesar 85%.

7. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban KDRT, karang taruna, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pembinaan.

Capaian kinerjanya dilihat dari Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari tahun 2017 tercapai hanya 75%, 2018 hanya tercapai 80%sedangkan tahun 2019,2020,2021 dan 2022 tercapai 100%.

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian kinerja tahun 2022 urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dilihat dari indikator Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) capaian kinerja 65%, Persentase LSM Aktif 45%, Persentase LPM berprestasi 65%, Persentasi PKK Aktif 80%, Persentase Posyandu Aktif 30%, Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 80% dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 80%.

9. Tenaga Kerja

   Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja antara lain:

   a. Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun di Kabupaten Barito Selatan jumlahnya cenderung mengalami fluktuatif mulai dari tahun 2017 ada 5 kasus kemudian di tahun 2018 menurun menjadi 6 kasus, ditahun 2019 menurun lagi menjadi 2 kasus, pada tahun 2020 naik menjadi 4 kasus, pada tahun 2021 meningkat drastis menjadi 11 kasus yang mana semua sengketa Pengusaha-Pekerja Per tahun yang mana semua kasusnya terselesaikan dan capaian tahun 2022 menurun lagi menjadi 8 kasus.
   b. Jumlah besaran kasus yang diselsesaikan dengan perjanjian (PB) di Kabupaten Barito Selatan cenderung mengalami fluktuatif mulai dari tahun 2017 sebanyak 3 kasus yang telah terelesaikan, ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6 kasus sedangkan ditahun 2019 tidak ada kasus, ditahun 2020 meningkat menjadi 4 kasus, di tahun 2021 besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) 5 kasus dan di tahun 2022 tidak ada kasus.
   c. Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan pemerintahan daerah hanya ada ditahun 2017 sedangkan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak ada kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan pemerintahan.
   d. Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 30 orang, ditahun 2018 tenaga kerja yang mendapat pelatihan sebanyak 30 orang ditahun 2019 menurun menjadi 20 orang dan tahun 2020 dan tahun 2021 menurun menjadi 15 orang disebabkan anggaran yang terbatas dan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 adanya pandemi covid 19 dan tahun 2022 tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sebanyak 30 orang.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

    Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah terus mengalami peningkatan terakhir tahun 2022 dari 3.451 PNS yang ada

di pemerintah Daerah Kab Barsel 53,06 % adalah perempuan , Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD periode 2019-2024 sebanyak 10 orang perempuan atau 40%, Partisipasi perempuan di lembaga swasta 86%, Rasio KDRT mengalami peningkatan dari target 0,25 menjadi 2, Partisipasi angkatan kerja perempuan dari 40,50% menjadi 36% artinya mengalami penurunan, Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum untuk tahun 2022 sudah tertangani 100%.

Pada tahun 2022 Persentase partisipasi Rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,15 dari target 2,10, Ratio Akseptor KB sebesar 75% dari target 86%, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun sebesar 75,27% dari target 90%, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 1,83 dari target 2,18, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 16,18 dari target 12,00, Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 10,86 dari target 25%, Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 84,6 dari target 88,40%, Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB, sebesar 82,9% dari target 90,60%, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB sebesar 74,91 dari target 83,50%, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan, Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) yang ber-KB mandiri, dan Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa.

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

a. Rendahnya partisipasi kader koordinator KB untuk mensosialisasikan program KB kepada masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.
b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana. Data tahun 2021-2022 menunjukkan persentase

Pasangan Usia Subur dalam penggunaan peralatan pengendalian kelahiraan (implant dan suntikan) sebesar 75%.

c. Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan program KB.

d. Masih banyak usia remaja di yang belum mendapatkan pendidikan dan penyuluhan serta fasilitasi dalam program dan kegiatan Keluarga Berencana yang ditinjau dari cakupan PIK remaja dikarenakan minimnya anggaran.

11. Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pangan Pertanian, Perikanan dan Kelautan antara lain:

1) Rendahnya produktivitas tanaman pangan;
2) Diversifikasi yang belum berjalan secara progresuf sehingga tekanan kebutuhan terhadap beras sebagai bahan pangan utama semakin besar;
3) Alih fungsi lahan pangan ke non pangan yang belum terkendali dengan baik terutama pada lahan sawah;
4) Sistem agribisnis dan jiwa kewirausahaan petani yang belum berjalan baik;
5) Keseimbangan ekosistem yang terganggu, sehingga sering terjadi serangan hama/penyakit;
6) Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian dan perikanan masih kurang dan relatif terbatas;
7) Rendahnya kemampuan sumber daya manusia pelaku utama untuk menghasilkan produk yang berdaya saing;
8) Terbatasnya sarana pendukung di sekitar kawasan sentra perikanan;
9) Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur dlama melaksanakan fungsi pelayan teknis maupun non teknis;
10) Kurang optimalnya upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan sebagai akibat dari rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya pelaksanaan operasional pengawasan aparat pemerintah.

12. Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain:

a. Penurunan lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), akibat Penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran dari usaha/dan atau kegiatan masyarakat, dimana belum terkelolanya limbah domestik dari pemukiman
b. Penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
c. Penurunan tutupan hutan, dimana tingginya tingkat erosi, akibat meningkatnya lahan terbuka.
d. Belum Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terbitnya PP 22 Tahun 2021 adanya kewajiban penyusunan RPPMA, RPPMU dan RPPMAL dan diintegrasikan dalam RPPLH yang terkendala minimnya anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
e. Data untuk penyusunan penyusunan RPPMA, RPPMU masih minim
f. Tidak adanya anggaran yang memadai untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan Hidup
g. Peningkatan Sampah dan Limbah B3 yang diakibatkan oleh Pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan peningkatan volume sampah, mengakibatkan adanya sampah yang belum terangkut ke TPA, dimana kurangnya sarana dan tenaga kebersihan yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA
h. Rendahnya kesadaran masyarakat melakukan 3R, dan kurangnya sosialisasi kepadamasyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dengan 3R
i. Masih kurangnya jumlah BANK Sampah di Kab. Barito Selatan, dan kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya BANK Sampah dan tidak tersedianya dana untuk pembangunan BANK Sampah baru

j. Tidak tersedianya sarana pemusnahan limbah B3 diKabupaten Barito Selatan, dimana tingginya biaya pemusnahan limbah B3 karena harus dikirim kedaerah lain untuk pemusnahan.

k. Rendahnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan/izin Lingkungan, dan kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan/izin Lingkungan.

13. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

Capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan dilihat dari indikator Rasio Penduduk ber- KTP per Satuan Penduduk capaian kinerja 99,98% dari target 100% , Rasio bayi berakte capaian kinerja 95,38% dari target 88,50%, Rasio pasangan berakte nikah capaian kinerja 80,06% dari target 45%, Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi data tersedia, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan mulai tahun 2011, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) capaian kinerja 99,98% dari target 100% dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran capaian kinerja 95,03% dari target 93%. Dilihat dari capaian kinerja administrasi kependudukan yang berkaitan rasio pasangan berakte nikah yang capaian hanya 80,06% hal ini dikarena pasangan yang nikah tidak diakui oleh Negara. Agar supaya diakui oleh Negara pasangan harus nikah ulang melalui sidang isbat perkawinan baik melalui KUA maupun pencatatan sipil. Hal itu memerlukan anggaran untuk melaksanakannya.

14. Perhubungan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain:

a. Masalah transportasi terutama yang berkaitan dengan lalu lintas disetiap kota di Indonesia memang sering menjadi hal yang sering dihadapi, baik oleh para pengguna jalan maupun pemerintahan kota

yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Masalah transportasi sekarang ini disebabkan karena sarana dan prasarana transportasi yang tersedia tidak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat akan tranportasi. Rasio Jumlah arus penumpang angkutan umum pada Tahun 2017 sebesar 27,420 orang tahun 2019 sebesar 39,504 orang pada tahun 2019 sebesar 18,304 pada tahun 2020 sebesar 13,100 orang, pada tahun 2021 sebesar 16,586 orang dan pada tahun 2022 sebesar 19,360 orang. Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seluruh negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi yang telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakanarus penumpang angkutan umum, dan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi kegitan pada skala tertentu.

b. Realisasi rasio ijin trayek Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan sepanjang tahun 2017-2021, pada tahun 2017 sebesar 1.325 Orang, tahun 2018 sebesar 1.235 Orang, tahun 2019 sebesar 1.120 Orang, tahun 2020 sebesar 310 Orang, tahun 2021 sebesar 25 orang dan ditahun 2022 meningkat sebesar 66 orang. Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seluruh negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi yang telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakanrasio ijin trayek , dan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi kegitan pada skala tertentu.
c. Jumlah uji kir angkutan umum pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari 255 unit meningkat sebesar 281 unit, pada tahun 2019 tidak ada uji kir angkutan umum dikarenakan alat uji tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pengujian, pada tahun 2020 sebesar 220 unit pada tahun 2021 meningkat sebesar 690 unit dan pada tahun 2022 turun sebesar 91 unit.

d. Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Barito Selatan sepanjang tahun 2017 – 2021 adalah 0 % dikarenakan tidak tersedia anggaran dari APBD Kabupaten Barito Selatan pemasang rambu dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi dan Pusat dan berada di ruas jalan Nasional dan jalan Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2022 Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Barito Selatan dapat di realisasikan sebanyak 111 unit.

e. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2017 sebesar 0,058, tahun 2018 sebesar 0,053, tahun 2019 sebesar 0,049, tahun 2020 sebesar 0,052, tahun 2021 sebesar 0,05 dan tahun 2022 sebesar 0,65 rendahnya rasio tersebut dipengaruhi dengan adanya Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 538 tahun 2013 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten Barito Selatan.

f. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di daerah kota Buntok pada tahun 2017 sebanyak 15,840, tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 21,820, pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 10,774, pada tahun 2021 sebanyak 10,931 dan pada tahun 2022 turun sebanyak 89,17. Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seluruh negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi yang telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan pada skala tertentu.

15. Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Tahun 2021 belum bisa melaksanakan urusan

Pemerintahan Statistik Sektoral termasuk persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon karena keterbatasan anggaran, baru akhir Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dapat menyiapkan aplikasi statistik dan baru Tahun 2022 mulai dioperasikan. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon pada tahun 2022 sebesar 87,38%.

b. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 sebesar 68,12 %.

16. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

a. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional;
b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
c. Masih kurangnya tingkat profesionlisme SDM Aparatur dan SDM Koperasi dan UKM;
d. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
e. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi dan UKM;
f. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UKM;
g. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
h. Kurangnya inovasi produk ;
i. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UKM;
j. Kesadaran SDM Koperasi dan UKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah;
k. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah dari Koperasi dan UKM;
l. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
m. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UKM dalam tertib hukum dan tertib niaga;

n. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi dampak globalisasi.

17. Penanaman Modal

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal antara lain:

a. Sarana/fasilitas yang menunjang pelayanan perizinan masih kurang memadai, diantaranya : jaringan internet kurang maksimal, tidak tersedianya ruang konsultasi, dan belum tersedianya fasilitas untuk disabilitas;
b. Masih kurangnya koordinasi dari instansi-instansi teknis dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
c. Belum tersedianya MPP (Mall Pelayanan Publik);
d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) handal merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah pelaksana kegiatan yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis memadai yang bisa didapatkan dari adanya pelatihan;
e. Masih kurangnya jumlah tenaga PNS/ASN;
f. Kesulitan dalam koordinasi untuk kegiatan pengawasan dengan dinas teknis;
g. Masih terbatasnya upaya pengembangan peningkatan investasi mengingat sangat minimnya dana yang diberikan untuk promosi investasi daerah.

18. Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan antara lain:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia/Aparatur yang masih minim;
b. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengembangan kepariwisataan;
c. Belum maksimalnya pengembangan potensi wisata dan terbatasnya SDM Kepariwisataan;
d. Belum maksimalnya promosi pariwisata;

e. Masih kurang pendanaan terkait pemeliharaan Stadion Batuah, Stadion Sanggu, Stadion Danau Sadar dan GOR Manunggal;
f. Masih kurangnya sarana dan prasarana Olahraga yang ada di sekolah untuk kegiatan pembinaan anak usia dini;
g. Belum terlaksananya pembinaan olahraga prestasi sebagai upaya penjaringan atlit usia dini secara sistematis dan berkelanjutan;
h. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan olahraga tradisional;
i. Pembinaan atlit-atlit berbakat yang masih sangat kurang terkoordinir dengan baik;
j. Ekspose dan promosi potensi budaya dan obyek wisata yang dimiliki yang hingga kini masih terkendala teknis;
k. Pengelolaan, Pemeliharaan, Penataan dan Identifikasi Benda-Benda Museum masih kurang.

19. Perpustakaan dan Kearsipan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:

a. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Barito Selatan rentang waktu 2017-2022 cukup fluktuatif dimana pada tahun 2017 berjumlah 6.820 hal tidak mencapai target yang di tentukan yaitu 18.012, tetapi pada tahun 2018 jumlah pengunjung perpustakaan derah mengalami kenaikan menjadi 7.801 orang. Pada tahun 2019 mengalami penurunan pengujung perpustakaan menjadi 5.500, tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebanyak 7.818 orang dan terjadi penurunan ditahun berikutnya 2021 sebanyak 2.495 orang, tahun 2022 meningkat kembali sebanyak 3386 orang.
b. Pada tahun 2017 Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 32.767 telah mencapai target yang ditentukan dari 22.568 buku, pada tahun berikutnya mengalami penurunan jumlah buku menjadi 31.412 atau sebanyak 1.355 buku, hal ini sama pada tahun 2019 dan 2020, pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 33.718 atau setara dengan 2.306 koleksi buku dan di tahun 2022 tidak tejadi penambahan atau menetap di angka 33.718 koleksi buku.

c. Rasio perpustakaan persatuan penduduk pada tahun 2017 sebanyak 0,56% hal ini telah mencapai target yang ditentukan, tahun 2018 – 2019 sebanyak 0,59%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 0,03% atau menjadi 0,62% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun berikutnya 2021 sebanyak 0,65% pada tahun berikutnya 2022 tidak terjadi perubahan dan menetap di angka 0,65%.

d. Tahun 2017 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun sebanyak 568,33 telah mencapai target yang ditentukan sebanyak 397,08 jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 650,08 atau 81,75 orang kemudin mengalami penurunan di tahun 2019 458,33 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 sebanyak 651,50 atau setara dengan 193,17 orang. Pada tahun 2021 terjadi penurunan secara siknifikan menjadi 207,92 atau sebanyak 443,58 orang pada tahun 2022 terjadi kenaikan siknifikan sebesar 282,17.

e. Pada tahun 2017 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah telah sesuai target yang ditentukan 28.757, sebaliknya terjadi penurunan drastis pada rentang tahun 2018-2022 dimana pada tahun 2022 jumlah judul buku menjadi sebesar 16.973 pada perpustakaan daerah Kabupaten Barito Selatan.

f. Tahun 2017 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat sebanyak 8 orang hal ini telah mencapai target yang di tentukan kemudian mengalami penambahan jumlah pada tahun 2018-2021 dengan total sebanyak 16 orang dan ditahun 2022 terjadi penurunan drastis dimana total Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat manjadi sebanyak 4 orang.

20. Perdagangan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain:

a. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional;

b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;

c. Masih kurangnya tingkat profesionlisme SDM Aparatur dan SDM Perdagangan;
d. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
e. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengelolaan Bidang Perdagangan;
f. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;
g. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
h. Belum adanya Dana terkait Data yang khusus menginformasikan secara luas Ketersediaan Bahan Pokok dari Perdagangan ;
i. Masih rendahnya SDM Perdagangan dalam tertib hukum dan tertib niaga.

21. Perindustrian

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain:

a. Pembinaan pengusaha/perajin IKM masih belum maksimal dan belum menyentuh secara keseluruhan ke jenis/cabang industri binaan karena terbatasnya dana yang tersedia dan SDM pada bidang IKM yang masih kurang/terbatas;
b. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional;
c. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
d. Masih kurangnya tingkat profesionlisme SDM Aparatur dan SDM IKM;
e. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
f. Bantuan uasaha ekonomi produktif dari dana perbantuan (APBN) berupa mesin peralatan pengolah rotan yang masih belum dapat dimanfaatkan oleh pengusaha/perajin secara optimal dikarenakan kesulitan modal biaya operasional seperti bahan baku (rotan batangan) dan biaya operator mesin peralatan.

22. Perencanaan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perencanaan antara lain:

Indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD merupakan suatu komitmen daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui program kerja PD. Capaian penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tidak sesuai dengan harapan, perubahan program sering terjadi, hal ini menunjukkan tidak konsistennya penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, tidak konsistennya penjabaran tersebut adalah karena sebagian besar perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan tidak berpedoman pada Renstra sehingga program yang dilaksanakan cenderung berubah-ubah yang mengakibatkan keberhasilan atau capaian suatu program tidak dapat diukur selama periode RPJMD. Faktor lain yang mempengaruhi tidak konsistennya jumlah program RPJMD dengan Program RKPD adalah perubahan regulasi dari Permendagri No.13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepmendagri 050-050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

23. Keuangan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Keuangan antara lain:

a. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD;
b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah atau masih dibawah 90% pasca wabah Pendemi Covid-19;
c. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Kabupaten Barito Selatan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

d. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap;
e. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi;
f. Belum Maksimalnya Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menyebabkan rendahnya Rasio Pendapatan daerah terhadap APBD ditengah situasi pasca wabah Pendemi Covid-19 sehingga perekonomian belum stabil;
g. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya integrasi e-planning dan e-budgeting;
h. Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik;
i. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
j. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;
k. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
l. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
m. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih terbatas.

24. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Kepegawaian antara lain:

a. Rata –rata Lama Pegawai Mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tujuan dari pendidikan dan pelatihan kepada ASN untuk mewujudkan kualitas SDM aparatur yang Kompeten dan Profesional.Di Kabupaten Barito Selatan Rata-rata lama pegawai

mendapatkan pendidkan dan pelatihan adalah 3 bulan, ditahun 2017 Kepegawaian tidak melaksanakan pendidkan dan pelatihan dikarenakan anggaran tidak tersedia dan ditahun 2020 karena adanya pademi covid-19 di tahun 2022 Kepegawaian juga tidak melaksanakan Pendidikan dan pelatihan karena anggaran yang tidak tersedia.

b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami penurunan mulai tahun 2017 sebesar 88% dan turun ditahun 2018 sebesar 64% naik lagi ditahun 2019 sebesar 82% kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi covid-19 dan ditahun 2022 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal berada di angka 60,4%.
c. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural jumlah pertahunnya tidak terlalu signifikan.
d. Jumlah Jabatan Pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan tidak terlalu siknifikan dari tahun ketahun mulai dari tahun 2017 sebanyak 27 orang kemudian ditahun 2018 sebanyak 27 orang dan terakhir ditahun 2022 ada sebanyak 27 orang.
e. Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah cenderung mengalami kenaikan dari tahun ketahun mulai tahun 2017 sebanyak 126 orang dan ditahun 2022 sebanyak 128 orang.
f. Jumlah pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintahan mengalami penurunan dari tahun 2017 ada sebanyak 2.207 orang, pada tahun 2018 menurun menjadi 2.194 orang, kemudian ditahun 2019 turun 2.193 orang, ditahun 2020 menurun menjadi 1940 orang dan ditahun 2021 menjadi 1.915 orang. Pada tahun 2021 diadakan nya peneriman CPNS sehingga jumlah pemangku Jabatan Fungsional tertentu kembali meningkat sebanyak 2.023 orang.

25. Pengawasan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pengawasan antara lain:

a. Jumlah Tindak lanjut temuan cendrung fluktuatif mulai tahun 2017 sebanyak 74,25%, Tahun 2018 sebanyak 72,96% ditahun 2019 sebanyak 72,01% ditahun 2020 sebanyak 71,62% ditahun 2021 sebanyak 76,62% dan ditahun 2022 sebanyak 74,44% dikarenakan banyaknya temuan yang tidak ditindak lanjuti.
b. Persentase pelanggaran pegawai mengalami jumlah fluktuatif dari tahun ke tahun mulai tahun 2017 sebanyak 15%, Tahun 2018 sebanyak 20% ditahun 2019 sebanyak 10% ditahun 2020 sebanyak 25% ditahun 2021 sebanyak 5% dan ditahun 2022 persentase pelanggaran pegawai berada di angka 0%.
c. Jumlah temuan BPK cenderung menurun dari tahun 2017 dari sebanyak 23 temuan, ditahun 2018 sebanyak 20 temuan dan tahun 2017 sebanyak 17 temuan ditahun 2020 sebanyak 12 temuan, tahun 2021 sebanyak 9 temuan dan ditahun 2022 sebanyak 3 temuan.

2.9 Dukungan Untuk Ibukota Negara (IKN) Baru

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sudah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) dengan nama Nusantara bisa dilaksanakan.

Proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung sampai 2045. Mengacu buku saku pemindahan IKN, tahapan pembangunan ibu kota baru dilakukan pada 2020-2024, yakni membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan di area utama IKN. Kemudian pemindahan ASN/PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR.Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti air hingga energi untuk 500 ribu penduduk di tahap awal.

2.9.1. Food Estate

Salah satu program utama Pemerintah Pusat yang merupakan program strategis pembangunan pertanian nasional dan dukungan untuk IKN adalahProgram Food Estate yang berada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Program tersebut bertujuan untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon

laporan Food and Agriculture Organization (FAO). Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Program Food Estate dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan dalam negeri yang juga dilandasi upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan dan pengembangan ekonomi yang fokus kepada masyarakat sebagai bagian penanganan pandemi covid-19.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensukseskan program ini sangat besar, tetapi tidak mengurangi komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap ekosistem gambut di Kalimantan Tengah sebagaimana telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang disusul dengan penetapan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/684/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 s/d 2050.

Rencana kegiatan food estate di lokasi eks-PLG merupakan tantangan tersendiri bagi kita semua mengingat kegagalan dimasa lalu, sehingga diperlukan integritas dan komitmen dalam pelaksanaanya. Peran masyarakat baik yang terdampak langsung, tokoh adat, serta pemerhati lingkungan yang ada di Prov. Kalteng sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan saran/masukan/pendapat/ tanggapan serta informasi terhadap gambaran permasalahan di lapangan baik ekonomi maupun lingkungan terkait rencana food estate, sehingga nantinya dapat diambil keputusan guna merumuskan suatu kebijakan yang tepat dan konkret karena berlandaskan dengan fakta dan objektifitas (Evidence Based) dengan semangat pembangunan berketanjutan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau pada khususnya dan Prov. Kalteng pada umumnya untuk Kalteng Makin Berkah.

Terkait hal tersebut, walaupun Kabupaten Barito Selatan tidak termasuk dalam area Program Food Estate namun Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

(DKPPP) Kab. Barito Selatan siap mendukung program tersebut. Hal ini telah dilakukan pengecekkan rencana lokasi pengembangan food estate di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas sesuai intruksi Bupati Barsel serta menindaklanjuti surat Sekda Kalteng tertanggal 18 Mei 2021 terkait tindak lanjut pengembangan food estate berbasis korporasi petani.

Berdasarkan hasil pengecekan dilapangan, masih tersedia lahan seluas 50 hektar yang berada di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas.Luas lahan 50 hektar ini, akan ditanam padi, jagung dan tanaman hortikultura serta dibuat kolamserta juga akan dikembangkan peternakan ayam petelur sebanyak 1.500 ekor yang akan diusulkan ke Kementerian Pertanian RI.

Lokasi ini nantinya dapat menjadi tempat pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani yang paling layak dari aspek teknis, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang disesuaikan dengan potensi. Diharapkan lokasi tersebut dapat menjadi percontohan bagi petani lainnya untuk mengembangkan agribisnis dan lokasi tersebut dapat di jadikan tempat agrowisata.

Diharapkan kedepannya (jangka panjang) kita siap sebagai daerah pendukung program food estate bahkan terlibat langsung didalamnya dengan potensi lahan dan sumber daya yang ada. Yang juga pada saatnya nanti kita bisa mengembangkan wilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi seperti infrastruktur jalan dan jembatan guna terbukanya akses jalan yang dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi hasil pertanian dan lainnya.

2.10 Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024

Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menyepakati tanggal Pilkada Serentak pada Tanggal 27 November 2024.Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Barito Selatan pada 2024 membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan rencananya akan menyediakan Dana Hibah kepada penyelenggara pemilu yang besarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan upaya untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro dan kerangkaan pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024. Penyusunan RKPD pada dasarnya bertujuan salah satunya untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan, perencanaan dengan penganggaran antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Gambaran kerangka ekonomi makro yang memberikan perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Barito Selatan secara luas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Kerangka daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2024. Rancangan kerangka ekonomi daerah juga memuat penjelasan yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Telaah Ekonomi Global

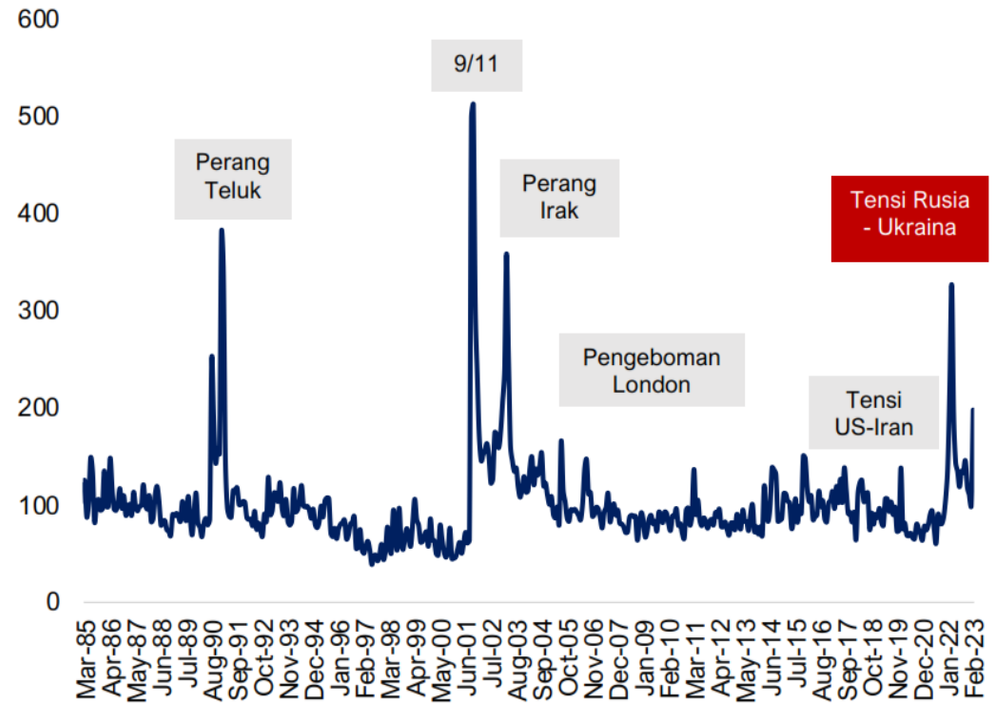
Ekonomi global berpotensi lebih baik dari prakiraan seiring penghapusan zero covid policy di China. Sementara itu, inflasi global menurun secara gradual dipengaruhi perlambahan ekonomi global dan perbaikan gangguan rantai pasokan, meskipun tetap di level tinggi seiring harga energi dan pangan yang belum turun signifikan akibat terus berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan kebijakan moneter ketat di negara-negara maju.

Beberapa kondisi global dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2024 di antaranya :

1. Ketidakpastian masih tinggi

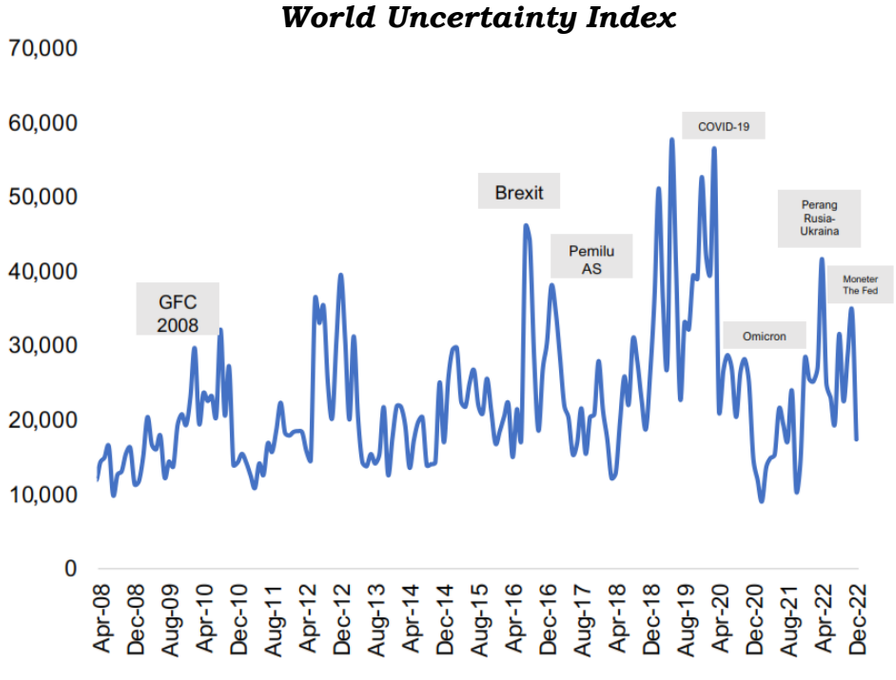
   Resiko telah bergeser dari Pandemi Covid-19 ke kondisi ketidakpastian seiring dengan tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Dampak *spillover* yang timbul dari ketidakpastian tersebut mendorong resiko pada prospek ekonomi global ke depan.

Gambar 3.1
Geopolitical Risk (GPR) Index



Sumber : matteoiacoviello (2023).

Gambar 3.2
World Uncertainty Index

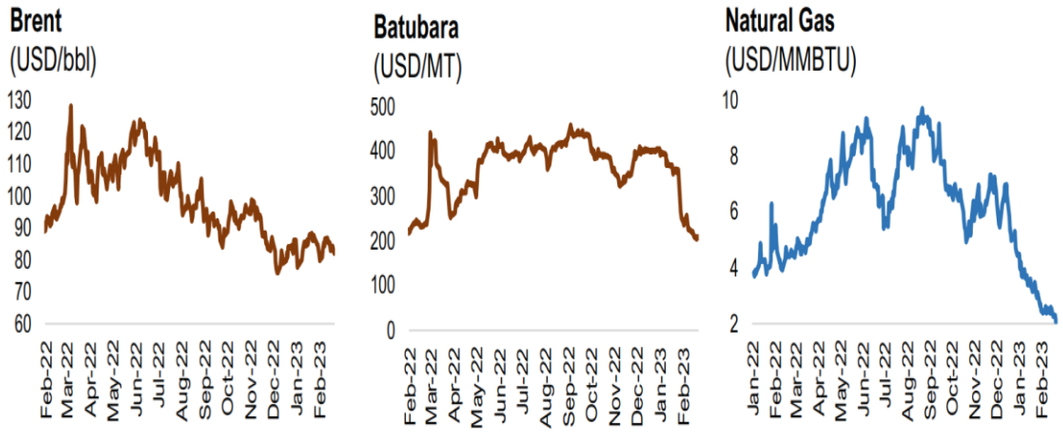


Sumber : Ahir, Bloom, dan Furceri (2022).

2. Harga Komoditas Mulai Terkoreksi

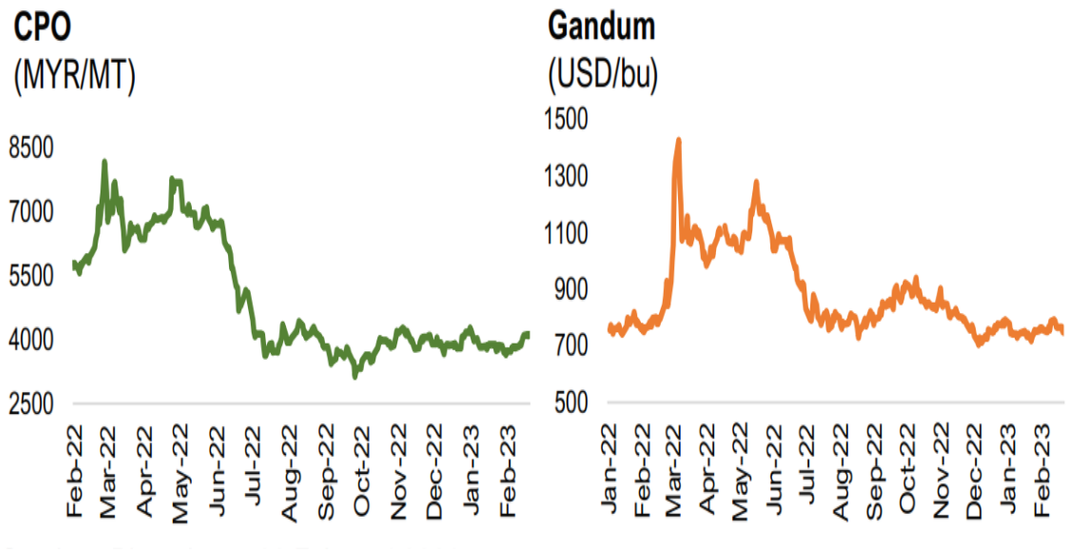
   Harga beberapa komoditas telah menunjukkan tren penurunan setelah sebelumnya mengalami kenaikan selama tahun 2020-2022. Harga komoditas pada tahun 2023 diperkirakan tidak akan setinggi tahun 2022.

Gambar 3.3
Perkembangan Harga Komoditas Energi



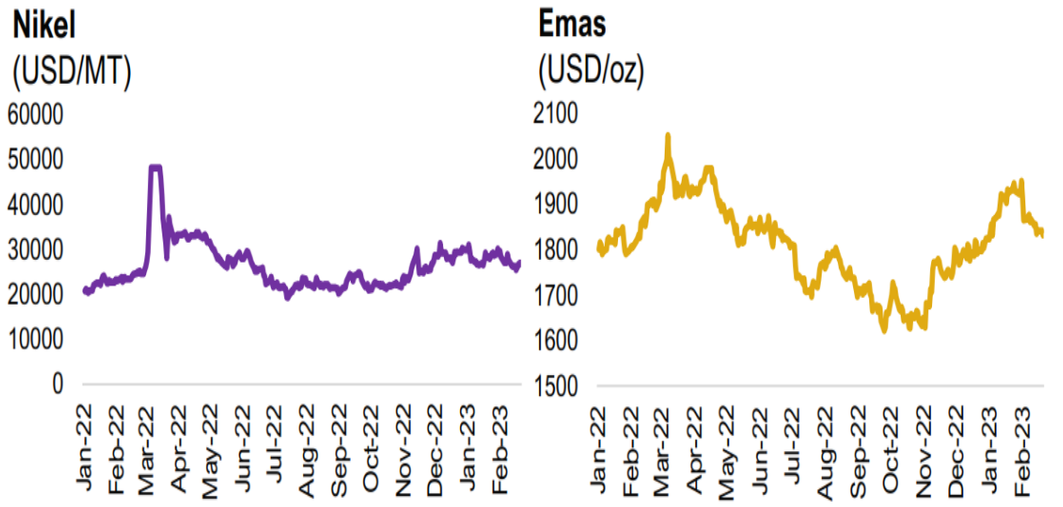
Sumber : Bloomberg (2023)

Gambar 3.4
Perkembangan Harga Komoditas Pangan



Sumber : Bloomberg (2023)

Gambar 3.5
Perkembangan Harga Komoditas Logam

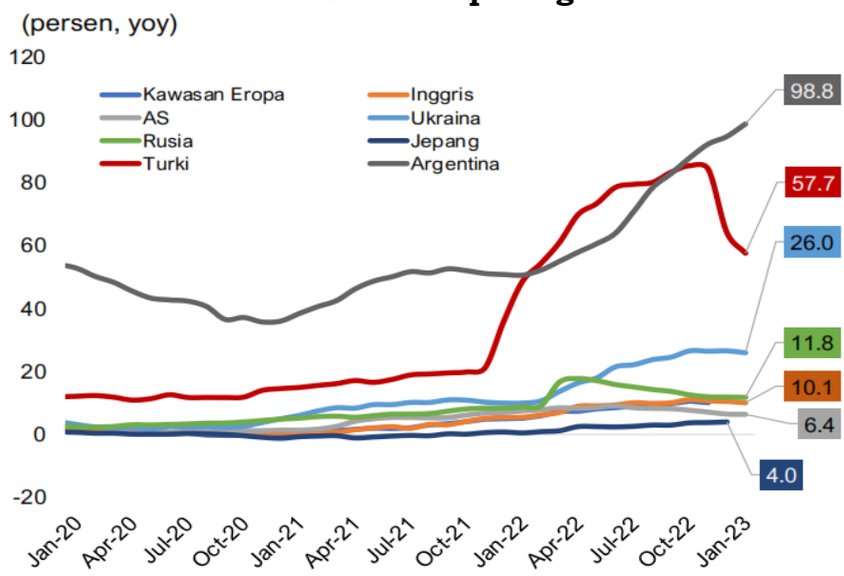


Sumber : Bloomberg (2023)

3. Tekanan Inflasi

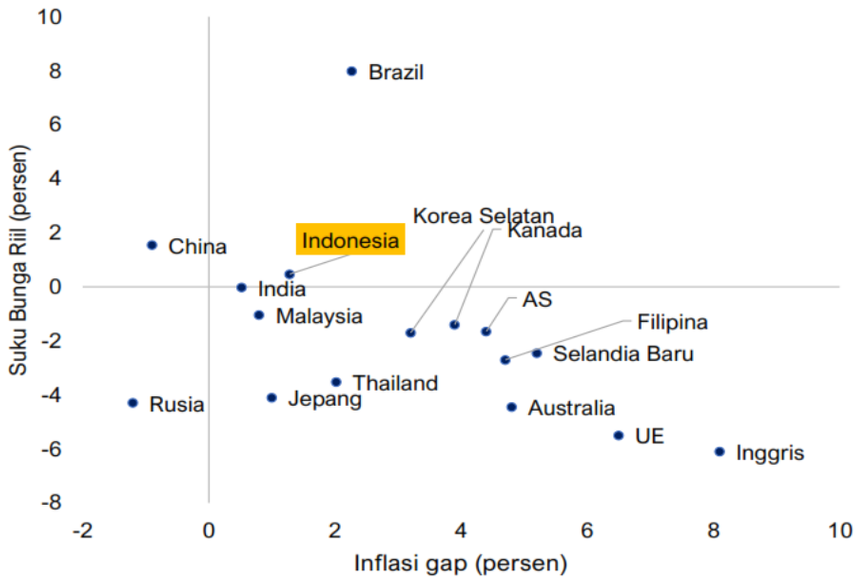
   Tekanan inflasi masih cukup tinggi walaupun pada beberapa negara sudah menunjukkan sinyal penurunan. Selain itu, inflasi gap juga semakin menyempit seiring dengan respons kebijakan fiskal dan moneter.

Gambar 3.6
Inflasi Beberapa Negara



Sumber : Bloomberg (2023)

Gambar 3.7
Inflasi Gap vs Suku Bunga Riil

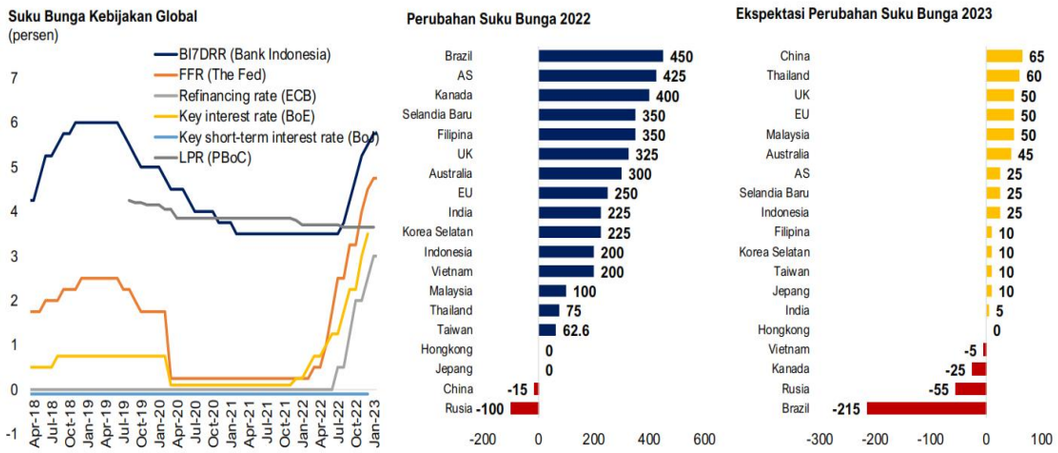


Sumber : Bloomberg (2023)

4. Kebijakan Suku Bunga Bank Sentral

   Sebagian besar bank sentral global diprakirakan masih tetap menaikkan suku bunga kebijakan sebagai bentuk upaya pengendalian tekanan inflasi, namun tidak seagresif tahun 2022. Fokus utama bank sentral saat ini adalah mengembalikan inflasi inti ke targetnya.

Gambar 3.8
Kebijakan Suku Bunga Bank Sentral Global

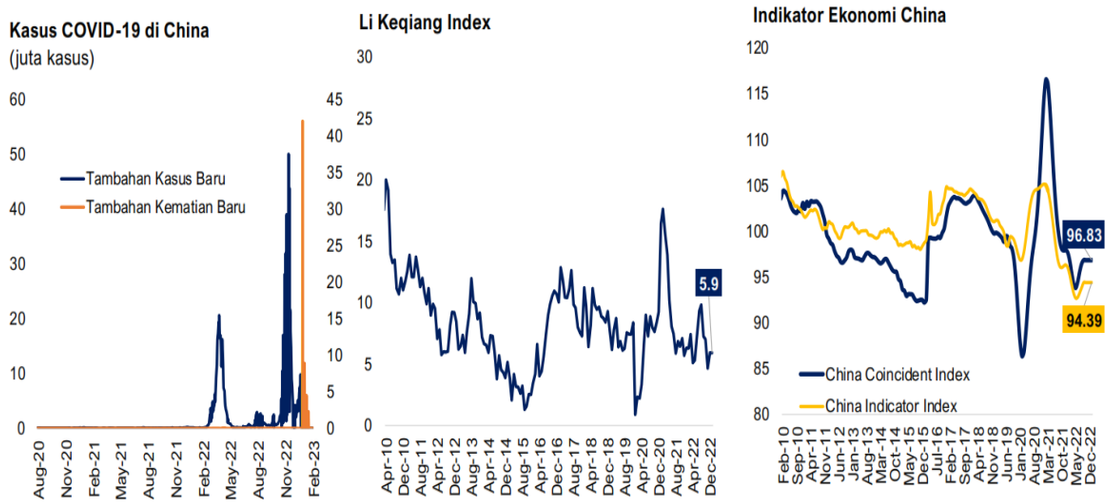


Sumber : Bloomberg (2023)

5. Pembukaan Kembali Ekonomi China

   Pelonggaran kembali kebijakan pembatasan lockdown di China memberikan sinyal positif bagi prospek ekonomi ke depan terutama dalam ruang lingkup ekonomi Asia. Namun, pelonggaran tersebut juga akan memberikan risiko terkait potensi kembali meningkatnya Kasus COVID-19 di China.

Gambar 3.9
Perkembangan Kasus Covid-19 di China, Li Keqiang Index dan Indikator Ekonomi China

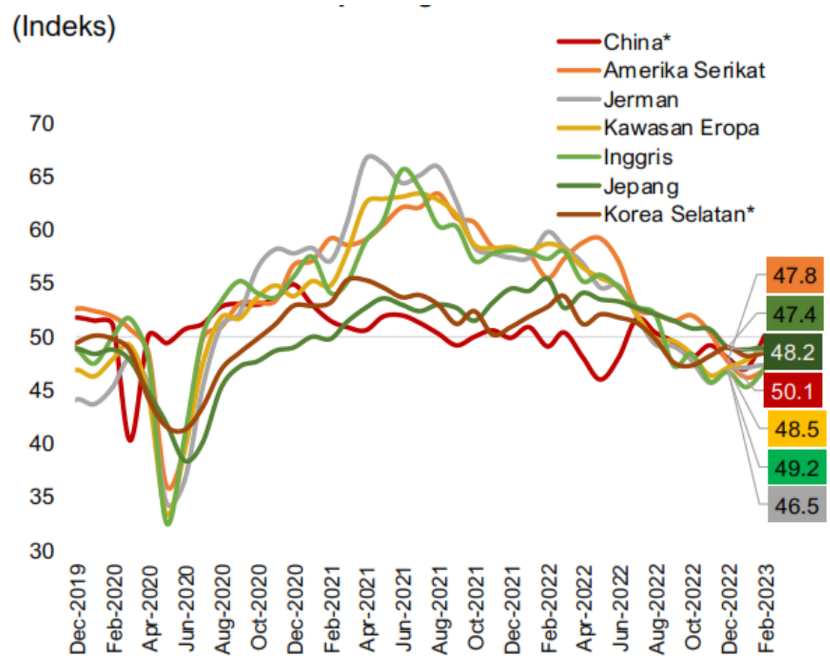


Sumber : Bloomberg (2023)

6. Manufaktur Menunjukkan Kinerja Memburuk

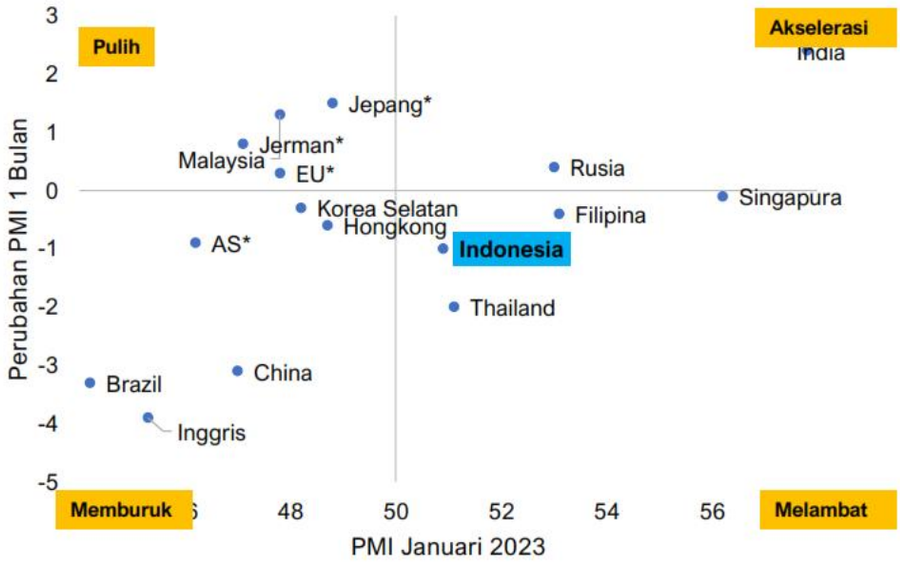
Aktivitas manufaktur beberapa negara menunjukkan perlambatan tercermin dari *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur yang mengalami penurunan dan berada di zona kontraksi.

Gambar 3.10
PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber : Bloomberg (2023)

Gambar 3.11
Kinerja PMI Manufaktur Global Desember 2022



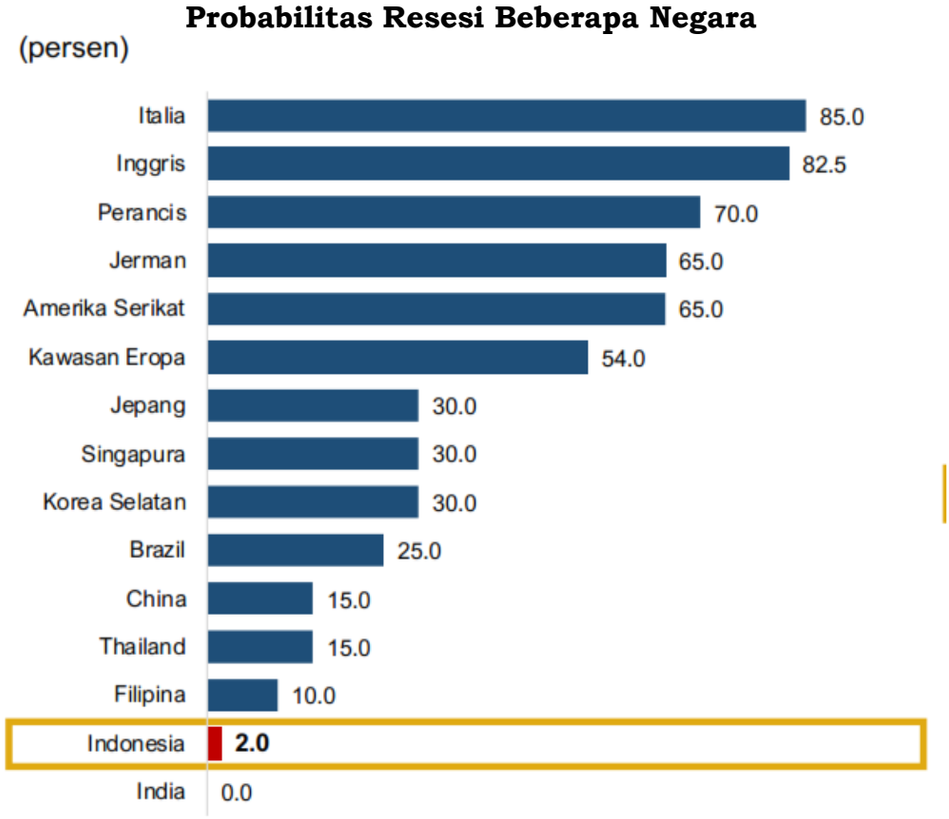
Sumber : Bloomberg (2023)

3.1.2 Telaah Ekonomi Nasional

IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di tengah perlambatan global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023 yang dirilis Selasa, 11 April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2 pp), dan outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%.

Sejalan dengan IMF, World Bank menurunkan proyeksi secara signifikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring dengan adanya risiko resesi. Namun ekonomi Indonesia relatif tangguh terhadap risiko resesi di tahun 2023.

Gambar 3.12
Probabilitas Resesi Beberapa Negara



Sumber : Bloomberg (2023)

Sementara untuk tahun 2024, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari pertumbuhan di tahun 2023.

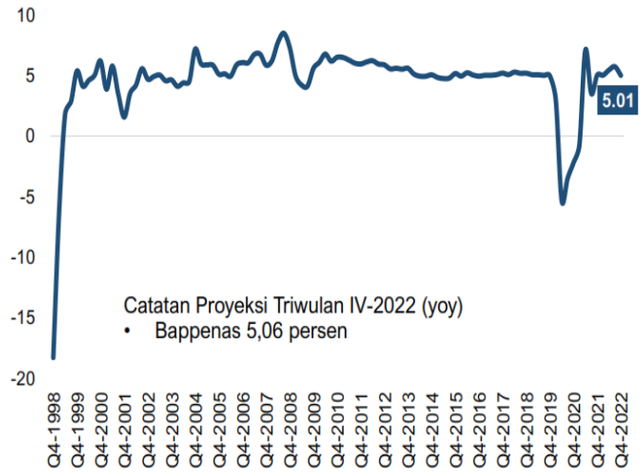
Gambar 3.13
Probabilitas Resesi Beberapa Negara

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2023 dan 2024								
	IMF (JAN 23)		WB (JAN 23)		ADB (DES 22)		OECD (NOV 22)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
World	**2,9**	**3,1**	**1,7**	**2,7**	-	-	**2,2**	**2,7**
Major Economies	**1,2**	**1,4**	**0,5**	**1,6**	-	-	-	-
Amerika Serikat	1,4	1,0	0,5	1,6	-	-	0,5	1,0
Euro Area	0,7	1,6	0,0	1,6	-	-	0,5	1,4
Jepang	1,8	0,9	1,0	0,7	-	-	1,8	0,9
Emerging Markets	**4,0**	**4,2**	**3,4**	**4,1**	-	-	-	-
China	5,2	4,5	4,3	5,0	4,3	-	4,6	4,1
Indonesia	**4,8**	**5,1**	**4,8**	**4,9**	**4,8**	-	**4,7**	**5,1**
Vietnam	-	-	6,3	6,5	6,3	-	-	-
Thailand	3,7	3,6	3,6	3,7	4,0	-	-	-
Malaysia	4,4	4,9	4,0	3,9	4,3	-	-	-
Filipina	5,0	6,0	5,4	5,9	6,0	-	-	-
Brazil	1,2	1,5	0,8	2,0	-	-	1,2	1,4
India	6,1	6,8	6,6	6,1	7,2	-	5,7	6,9

Sumber : WEO IMF Jan 2023, GEP WB Jan 2023, ADO-ADB Dec 2022, OECD Report Nov 2022

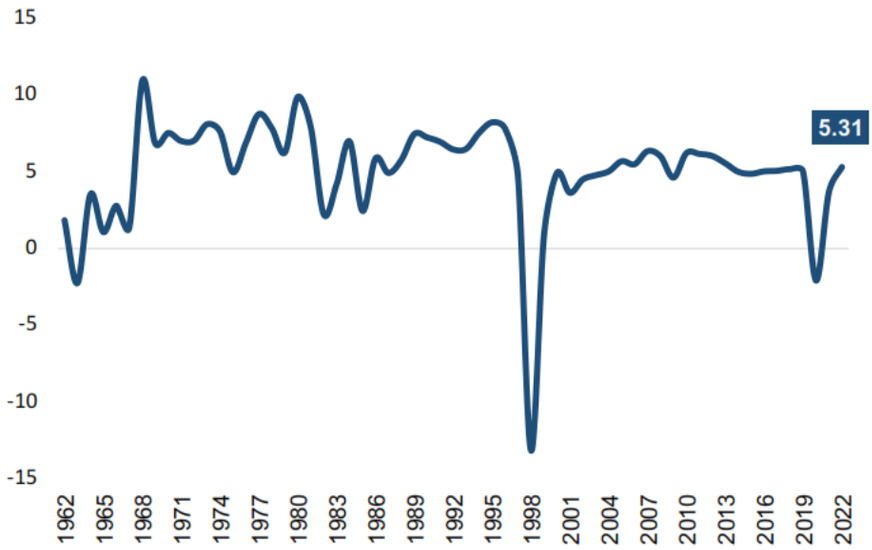
Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh secara impresif pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen. Realisasi ini sejalan dengan proyeksi Bappenas, dimana hampir semua komponen mendekati angka realisasi. Semakin terkendalinya kasus Covid-19 karena tegasnya penanganan pandemi oleh Pemerintah serta peningkatan aktivitas masyarakat pada triwulan IV-2022 mendukung realisasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

Gambar 3.14
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan (persen)



Sumber : BPS (2023)

Gambar 3.15
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahunan (persen)



Sumber : BPS (2023)

Sejalan dengan proyeksi IMF, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan penguatan. Sebagian besar indikator makro ekonomi menunjukkan perbaikan ditengah kondisi risiko tekanan global. Sebagian besar indikator utama investasi terus melanjutkan penguatan. Sampai dengan Maret 2023, PMI Manufaktur Indonesia konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut, di saat PMI Manufaktur global masih di zona kontraktif. PMI Manufaktur mampu bertahan di zona ekspansi sejak triwulan IV-2021. Hal ini menunjukkan kuatnya pemulihan aktivitas manufaktur di Indonesia dibandingkan negara lain yang tengah mengalami penurunan.

Di sisi konsumsi, hampir semua indikator utama konsumsi mampu bertahan pada tren perbaikan di tengah kenaikan inflasi. Indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen masih tinggi, dengan inflasi yang relatif moderat di tingkat 5,0% (yoy). Posisi eksternal Indonesia juga tetap sehat, didukung neraca perdagangan yang membukukan surplus dalam 35 bulan berturut-turut. Sejalan dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara tumbuh baik dibarengi dengan belanja negara yang lebih berkualitas. Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. Dengan kontribusi permintaan domestik yang besar, berbagai upaya untuk

mengendalikan inflasi agar tetap berada pada level moderat menjadi sangat krusial untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023 (turun 0,1 poin persentase/pp dibanding proyeksi Januari), kemudian membaik ke level 3,0% di 2024 (turun 0,1 pp). Momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun, kini meredup seiring terjadinya gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang persisten tinggi. Proyeksi inflasi global 2023-2024 naik 0,4 pp dan 0,6 pp menjadi 7,0% dan 4,9%.

Gambar 3.16
Perkembangan Indikator Ekonomi Indonesia Tahun 2022

Indikator Konsumsi	Q1-21	Q2-21	Q3-21	Q4-21	Q1-22	Q2-22	Q3-22	Q4-22
Penjualan Mobil (persen, yoy)	-21.0	758.7	110.7	62.3	41.1	2,5	21,0	11,6
Penjualan Motor (persen, yoy)	-17.6	268.6	32.5	64.8	-2.4	-14,9	4,1	24,1
Indeks Keyakinan Konsumen	88.0	104.4	84.3	116.8	114.6	123,4	121,7	119,7
Indeks Penjualan Ritel	182.3	215.5	190.1	204.2	205.0	234,2	200,6	207,5
Impor Barang Konsumsi (persen, yoy)	16.6	31.5	54.9	50.1	11.7	5,0	-4,1	-13,9
Kredit Konsumsi (persen, yoy)	-1.1	2.0	3.0	4.7	6,1	7,0	9,2	9,4
M2 (persen, yoy)	10.1	10.5	8.1	11.8	13.0	12,1	9,4	8,3
Inflasi (persen, yoy)	1.4	1.5	1.6	1.8	2.3	3.8	5,2	5,5
Indikator Investasi	**Q1-21**	**Q2-21**	**Q3-21**	**Q4-21**	**Q1-22**	**Q2-22**	**Q3-22**	**Q4-22**
Kredit Investasi (persen, yoy)	-4.3	-0.4	0.4	4.0	5,6	10.8	10.7	12,0
Kredit KMK (persen, yoy)	-5.1	0.3	2.8	6.3	7.7	12.9	12.3	12,2
Kredit Properti (persen, yoy)	4.3	5.3	5.7	4.8	5,9	5.0	6,5	8,3*
Impor Barang Modal (persen, yoy)	11.5	29.1	16.0	26.6	30.7	21.3	44,1	15,0
Impor Bahan Baku (persen, yoy)	9.9	57.8	53.6	56.4	33.4	27.7	34,2	1,5
Konsumsi Semen Domestik (persen, yoy)	-0.2	12.2	3.3	3.3	15.2	-2.4	-6.6	-11,9*
Belanja Modal Pemerintah (persen, yoy)	186.2	45.2	32.7	4.3	-45.3	1.8	5.8	9,4
PMI Manufacturing	52.1	54.5	45.3	54.9	52.1	51,0	52,2	51,0
Indikator Pengeluaran Pemerintah	**Q1-21**	**Q2-21**	**Q3-21**	**Q4-21**	**Q1-22**	**Q2-22**	**Q3-22**	**Q4-22**
Belanja Pegawai (persen, yoy)	-2.6	20.5	-13.0	2,7	2,2	-1,7	11,6	4,6
Belanja Barang (persen, yoy)	81.3	77.8	12.2	7,0	-33,1	-12,5	-14,8	-24,5
Bantuan Sosial (persen, yoy)	16.6	-59.8	-30.0	25.2	-64,0	81,3	25,2	128,4
Indikator Ekspor Impor	**Q1-21**	**Q2-21**	**Q3-21**	**Q4-21**	**Q1-22**	**Q2-22**	**Q3-22**	**Q4-22**
Ekspor (persen, yoy)	17.2	55.9	50.9	45.6	35,1	39,0	27,3	8,0
Impor (persen, yoy)	10.8	50.2	47.0	50.4	31,0	24,6	31,4	1,9

Sumber : Gaikindo, AISI, BI, BPS, OJK, IHS Markit, ASI, Kemenkeu (2023)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk beberapa negara maju dan berkembang utama secara umum menunjukkan perlambatan di tahun 2023 dan kembali membaik di tahun 2024. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat diproyeksi tumbuh 1,6% (2023) dan 1,1% (2024), sedangkan Eropa diproyeksikan tumbuh 0,8% (2023) dan 1,4% (2024). Kegagalan sistem perbankan AS dan Eropa menambah ketidakpastian terhadap outlook kedua kawasan yang sudah mendapat tekanan berat dari inflasi dan pengetatan moneter yang agresif. Sementara itu, India

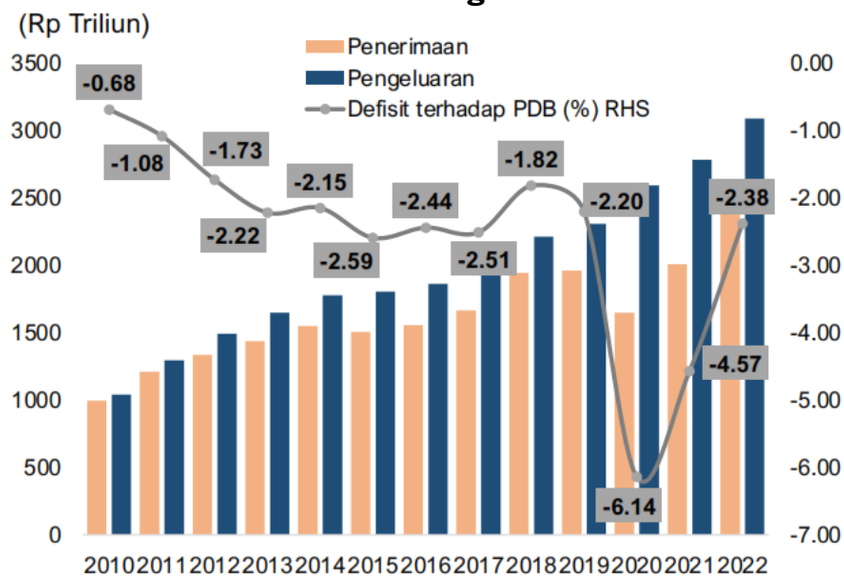
diproyeksikan tumbuh 5,9% (2023) dan 6,3% (2024), serta Tiongkok diproyeksikan tumbuh 5,2% (2023) dan 4,5% (2024). Pembukaan kembali Tiongkok memberi daya dorong pemulihan ekonomi domestiknya di tahun 2023, tetapi tekanan struktural termasuk krisis sektor properti masih membayangi prospek Tiongkok di tahun-tahun berikutnya.

Ke depan, IMF melihat berbagai risiko perekonomian global masih dominan dengan potensi hard landing jika risiko semakin ekskalatif. Risiko utama berasal dari tekanan sektor keuangan, tekanan utang, ekskalasi perang di Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang persisten tinggi, serta fragmentasi geoekonomi. Beberapa rekomendasi kebijakan dari IMF untuk negara-negara dalam menavigasi perekonomian global yang semakin menantang antara lain: (1) Kebijakan pengetatan moneter dapat berlanjut dengan tetap menjaga stabilitas keuangan; (2) Dukungan fiskal terus diprioritaskan untuk melindungi kelompok paling rentan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; (3) Pentingnya penguatan kebijakan struktural dan kerja sama multilateral demi mewujudkan perekonomian global yang lebih resilien.

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang pruden namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global. Meski demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi.

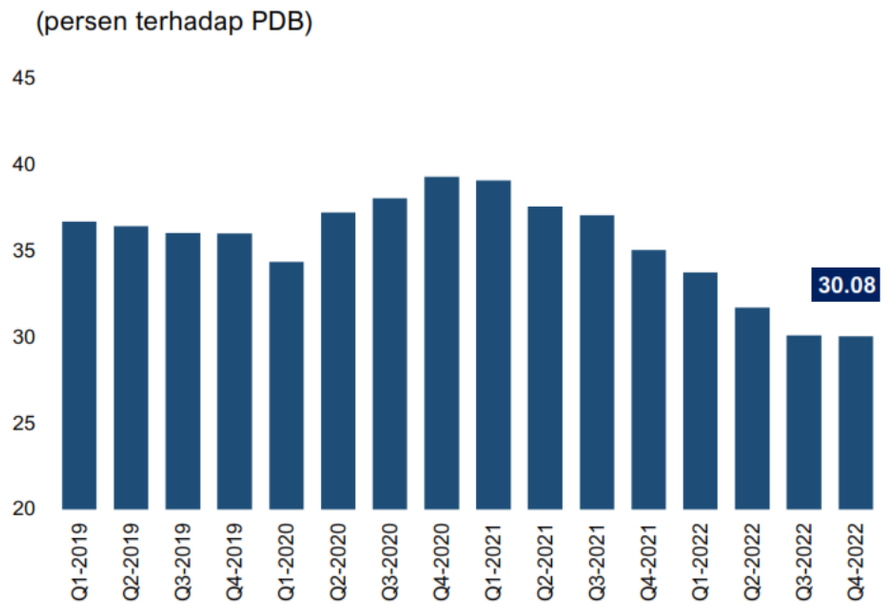
Defisit APBN Tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3 persen yakni 2,38 persen, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 4,57 persen. Selain itu, utang luar negeri Indonesia tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,08 persen pada Q4-2022, jauh di bawah standar internasional sebesar 60 persen terhadap PDB.

Gambar 3.17
Peneriman dan Pengeluaran APBN



Sumber : Kemenkeu (2023)

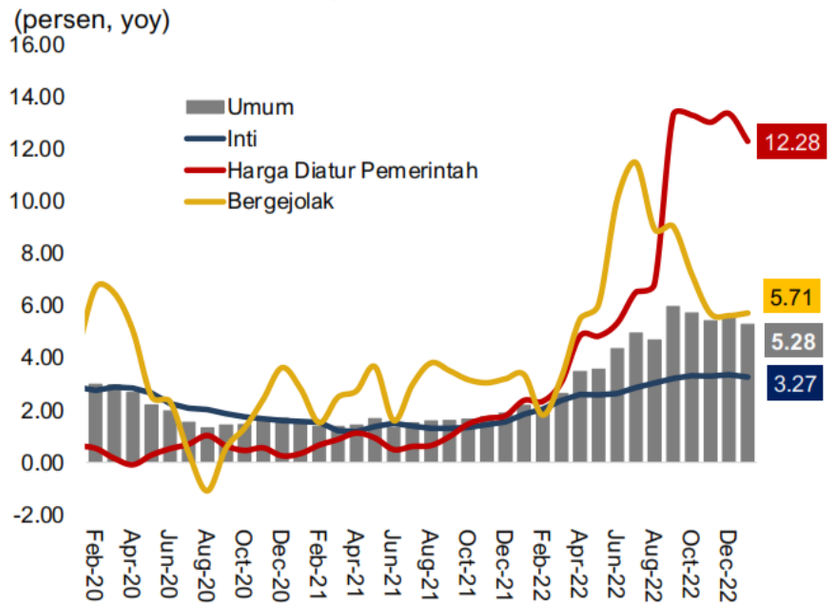
Gambar 3.16
Rasio Utang Luar Negeri



Sumber : Bank Indonesia (2023)

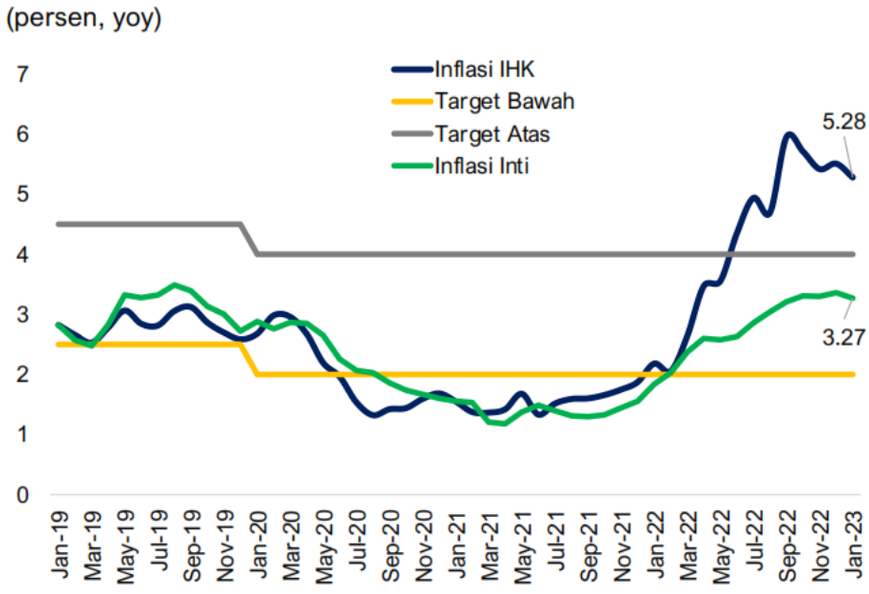
Inflasi Indonesia pada Januari 2023 relatif terkendali walaupun masih di atas target Bank Indonesia. Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh tingginya peningkatan inflasi komponen harga diatur pemerintah sebagai dampak dari kenaikan harga BBM sejak September 2022. Bank Indonesia menargetkan akan mengembalikan inflasi inti ke target BI pada paruh pertama tahun 2023.

Gambar 3.18
Inflasi Berdasarkan Komponen



Sumber : Bank Indonesia (2023)

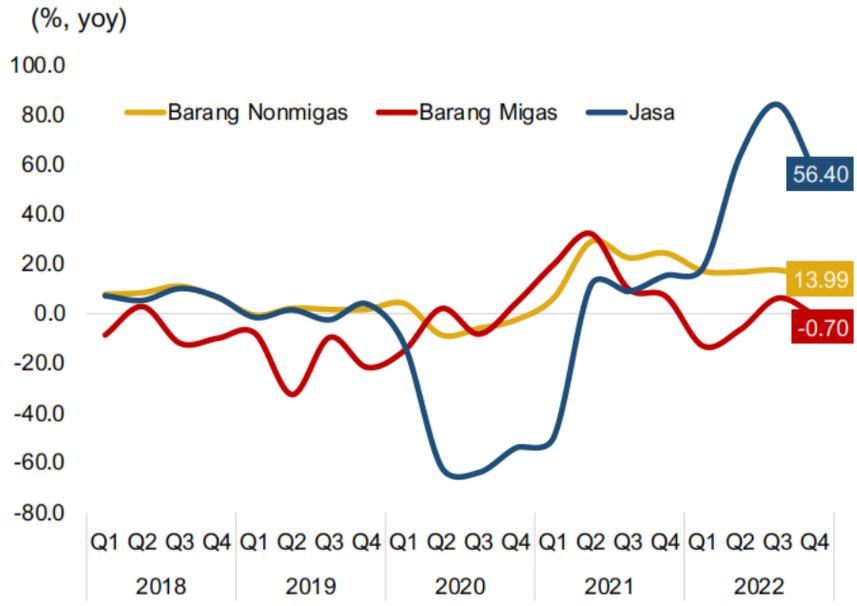
Gambar 3.19
Inflasi dan Target Inflasi



Sumber : Bank Indonesia (2023)

Ekspor jasa menunjukkan performa yang tinggi, seiring dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Sementara itu, ekspor nonmigas tumbuh dengan tren yang melambat, didukung oleh harga komoditas lemak dan minyak hewan/nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja yang masih tinggi, meskipun ada tren penurunan di beberapa komoditas.

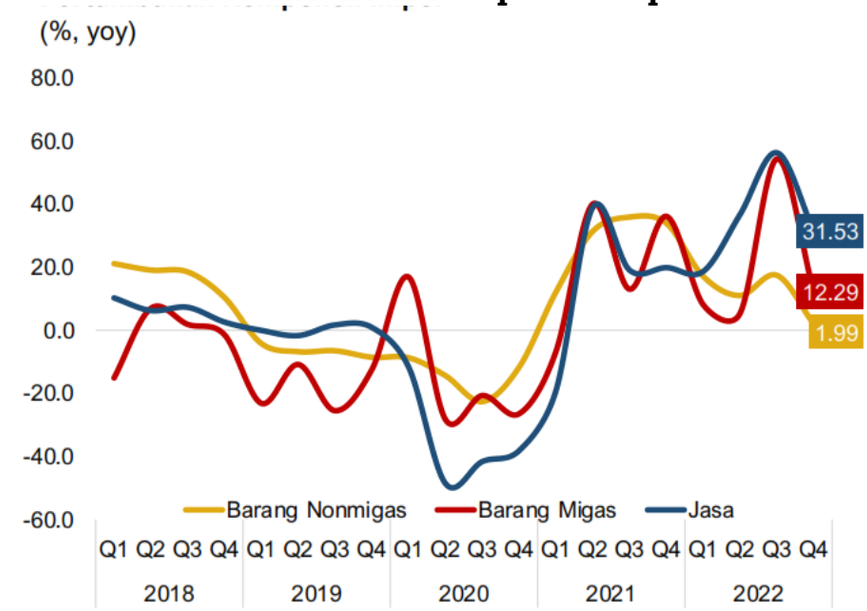
Gambar 3.20
Pertumbuhan Komponen Ekspor



Sumber : BPS (2023)

Seiring dengan PMI manufaktur Indonesia yang ekspansif selama tahun 2022, komoditas utama impor Indonesia selama tahun 2022 masih didominasi oleh impor bahan baku/penolong dan barang modal seperti mesin dan peralatan mekanis, mesin dan peralatan elektrik, kendaraan dan bagiannya. Impor jasa pada triwulan IV-2022 didorong oleh kenaikan wisatawan domestik yang berwisata ke luar negeri.

Gambar 3.21
Pertumbuhan Komponen Impor



Sumber : BPS (2023)

Normalisasi harga komoditas global pada triwulan IV-2022 mendorong perlambatan pertumbuhan ekspor Indonesia. Ekspor HS 27 pada triwulan IV-2022 tumbuh dua digit namun melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang tetap tinggi didorong oleh tetap tingginya harga batu bara di tengah perlambatan komoditas lainnya. Diperkirakan tren ini akan berlanjut di 2023.

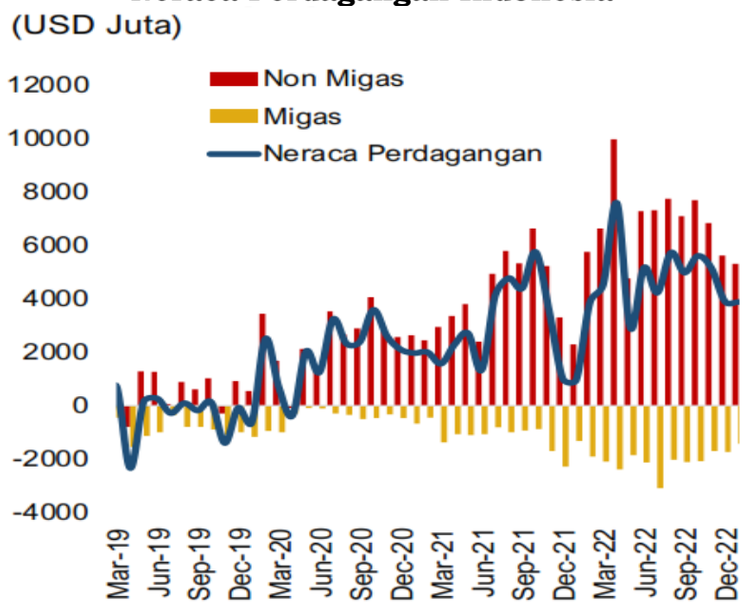
Gambar 3.22
10 Komoditas Non Migas dengan share terbesar pada tahun 2022

No.	10 Komoditas (HS)	Nilai (Juta USD)					Pertumbuhan (persen, yoy)				
		Q4-21	Q1-22	Q2-22	Q3-22	Q4-22	Q4-21	Q1-22	Q2-22	Q3-22	Q4-22
1	Bahan bakar mineral (27)	14,750.56	12,171.56	19,767.74	20,083.83	18,976.92	114.9	42.1	98.8	69.5	28.7
2	Lemak dan minyak hewan/nabati (15)	8,878.49	7,914.77	7,221.83	11,068.69	8,999.12	29.2	13.7	1.4	12.2	1.4
3	Mesin dan perlengkapan elektrik (85)	3,216.96	3,307.24	3,510.83	3,990.70	3,744.36	17.1	23.8	21.9	32.6	16.4
4	Bijih logam terak, dan abu (26)	1,970.98	2,442.61	2,733.20	2,740.76	2,383.36	31.8	168.2	80.5	40.2	20.9
5	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	1,185.04	2,449.28	1,250.19	1,088.18	1,516.40	-5.8	115.4	-25.5	-23.2	28.0
6	Nikel dan barang daripadanya (75)	466.82	902.59	1,559.79	1,670.19	1,845.10	137.3	325.8	574.4	346.1	295.3
7	Pulp dari kayu (47)	947.65	796.15	778.92	1,086.52	1,039.94	50.0	12.9	1.1	26.1	9.7
8	Timah dan barang daripadanya (80)	846.70	632.66	828.99	487.85	439.27	193.0	81.4	52.3	-30.5	-48.1
9	Barang dari besi dan baja (73)	538.96	464.46	475.41	407.10	411.41	102.9	57.5	38.3	-4.2	-23.7
10	Pupuk (31)	185.43	134.49	452.48	372.29	218.50	20.5	0.1	78.9	28.0	17.8

Sumber : BPS (2023)

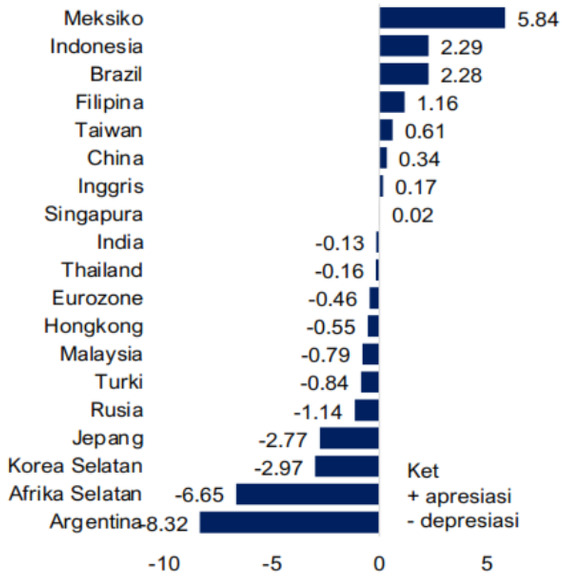
Stabilitas eksternal Indonesia cukup terjaga yang tercermin dari stabilisasi nilai tukar rupiah dengan neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus cukup tinggi dan cadangan devisa yang masih di atas batas aman.

Gambar 3.23
Neraca Perdagangan Indonesia



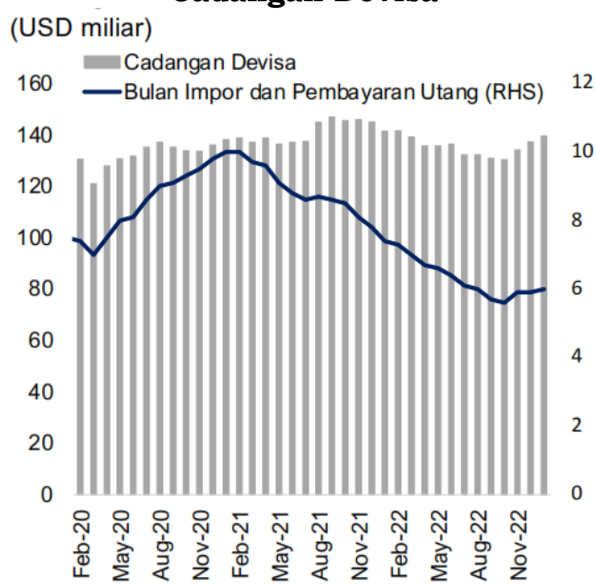
Sumber : CEIC (2023)

Gambar 3.24
Perubahan Nilai Tukar Rupiah (YTD)



Sumber : Bloomberg (2023)

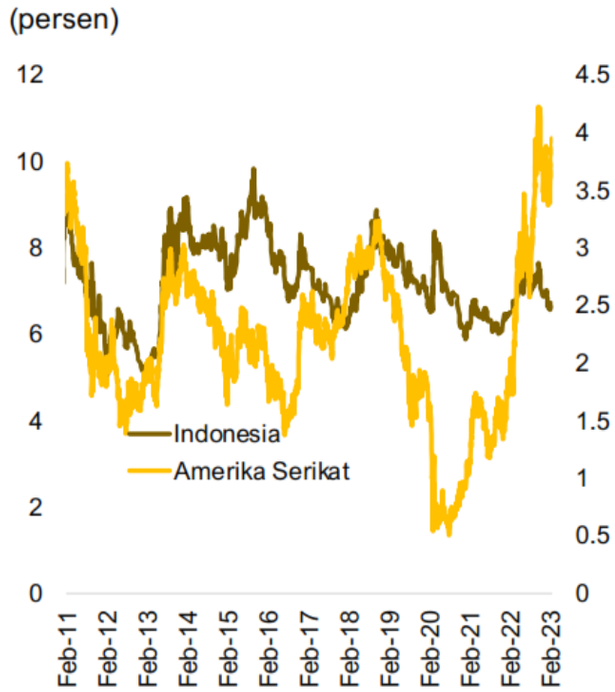
Gambar 3.25
Cadangan Devisa



Sumber : Bank Indonesia (2023)

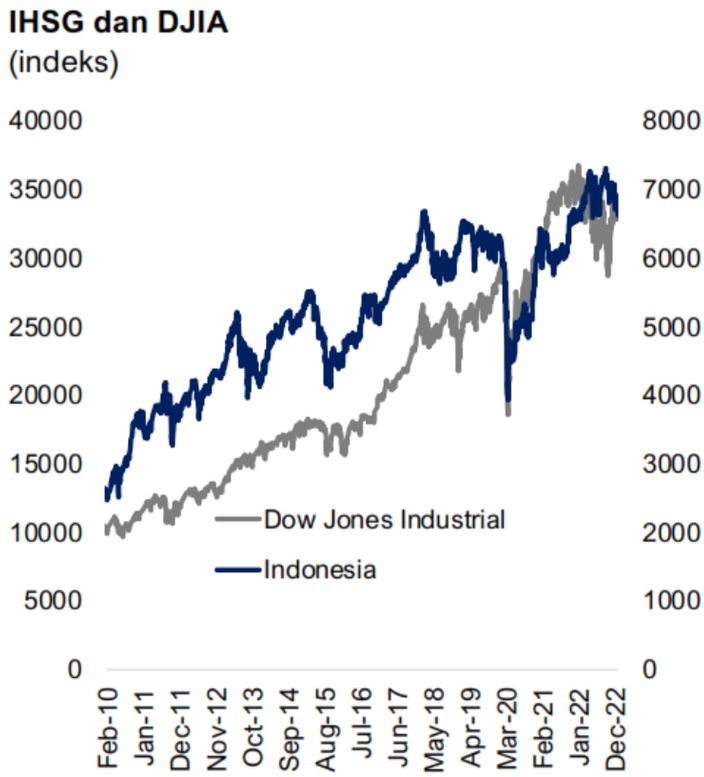
Pengetatan kebijakan moneter global mempengaruhi pasar keuangan domestik. Hal tersebut tercermin dari spread SUN 10Y dengan UST 10Y yang kembali melebar. Di samping itu, kinerja pasar modal memiliki tren yang terus meningkat seiring dengan terkendalinya aliran modal asing di pasar domestik.

Gambar 3.26
UST10Y dan SUN 10Y



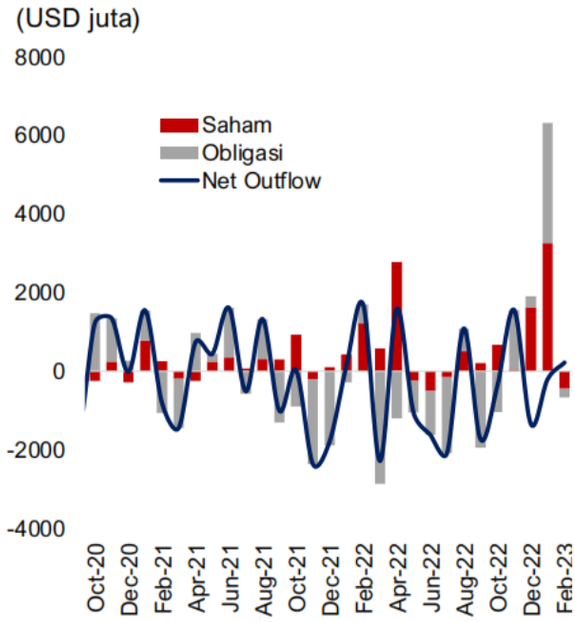
Sumber : Bank Indonesia (2023)

Gambar 3.27
IHSG dan DJIA



Sumber : Bank Indonesia (2023)

Gambar 3.28
Aliran Modal Asing Indonesia

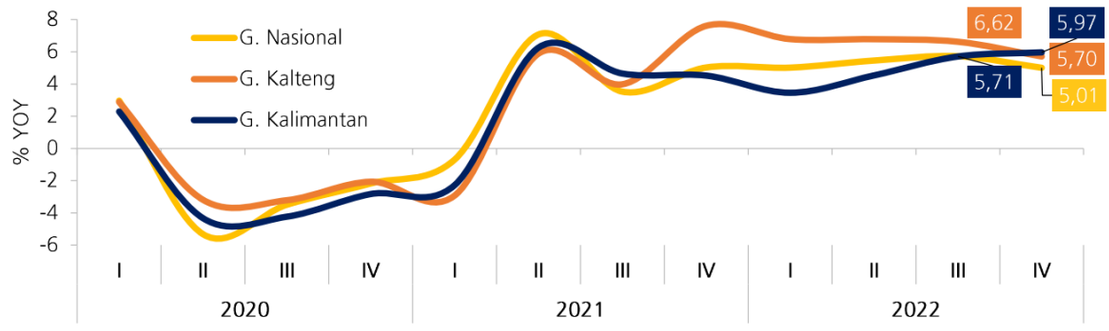


Sumber : Bank Indonesia (2023)

3.1.3 Telaah Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

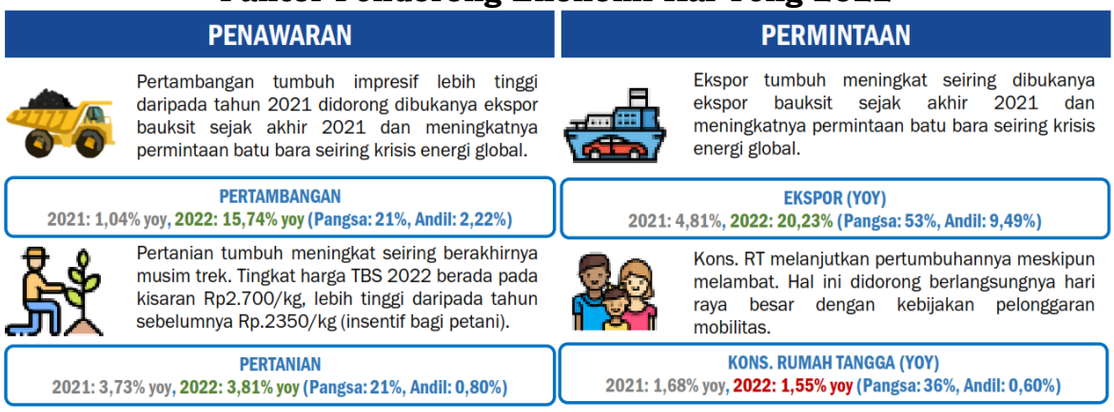
Pada TW-IV 2022, ekonomi Kalteng tumbuh 5,70% (yoy), meskipun melambat dari TW-III 6,62% (yoy) namun berada di atas pertumbuhan nasional. Masuknya puncak panen TBS dan kebijakan pembebasan pungutan ekspor CPO mendorong peningkatan pertumbuhan pertanian serta menjaga pertumbuhan industri pengolahan. Inflasi bulanan Kalteng menurun didorong deflasi kelompok transportasi dampak turunnya harga angkutan udara seiring normalisasi permintaan dan harga avtur.

Gambar 3.29
Pertumbuhan Ekonomi Kal-Teng (% YoY)



Sumber : Bank Indonesia (2023)

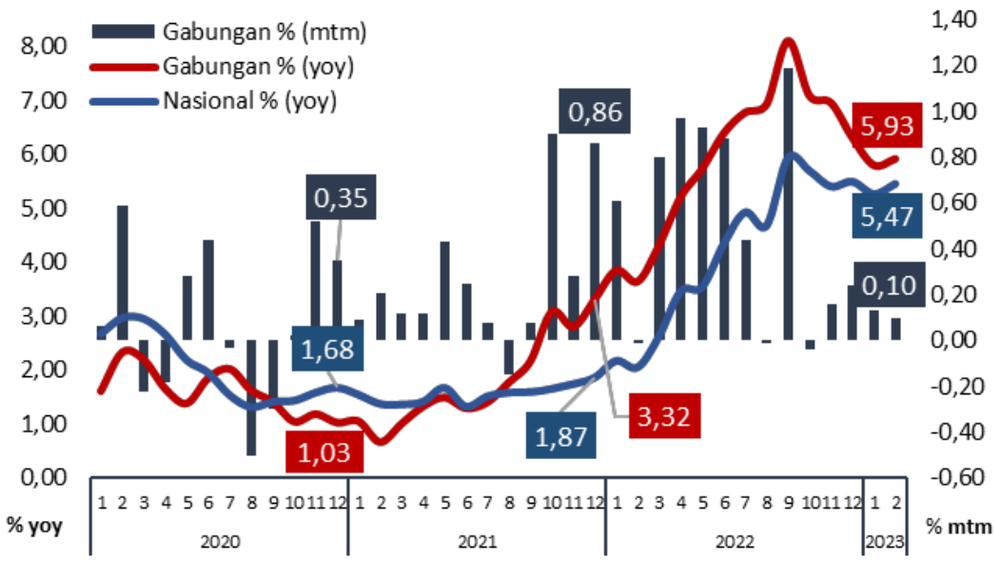
Gambar 3.30
Faktor Pendorong Ekonomi Kal-Teng 2022



Sumber : Bank Indonesia (2023)

Sementara itu. Inflasi gabungan Palangka Raya dan Sampit tercatat sebesar 0,10%, menurun dari bulan lalu 0,13% (mtm). Penurunan inflasi didorong deflasi kelompok transportasi dampak turunnya harga angkutan udara seiring normalisasi permintaan dan harga avtur. Inflasi masih terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan sumbangan inflasi dari beras akibat keterbatasan pasokan dan transmisi kenaikan harga rokok respons kenaikan kebijakan cukai, namun dengan tekanan yang menurun seiring gencarnya upaya pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

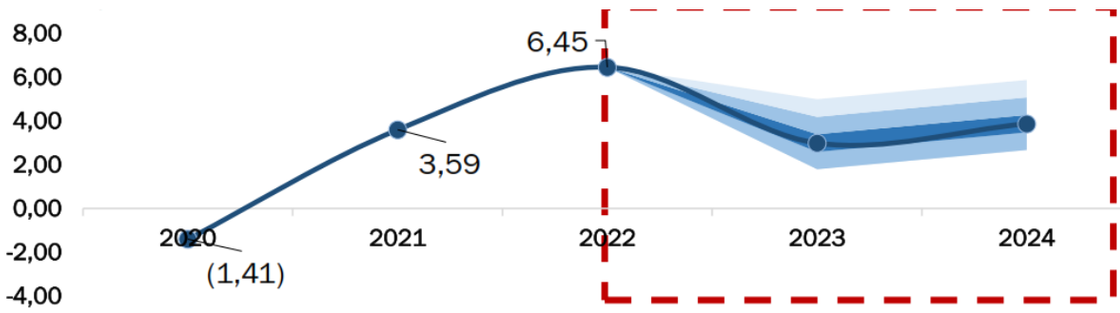
Gambar 3.31
Inflasi Kal-Teng



Sumber : Bank Indonesia (2023)

Pada tahun 2023, ekonomi Kalteng diperkirakan akan tumbuh melambat dibandingkan tahun 2022 seiring prakiraan perlambatan sektor pertambangan akibat prakiraan perlambatan produksi batu bara dan larangan ekspor bauksit. Pada tahun 2024, ekonomi Kalteng akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2023 seiring dengan prakiraan perbaikan sektor pertanian dan industri pengolahan. Kualitas pemupukan yang lebih baik sejalan dengan normalisasi harga pupuk diprakirakan meningkatkan produksi Tandan Buah Segar (TBS).

Gambar 3.32
Pertumbuhan Ekonomi Kal-Teng



Sumber : Bank Indonesia (2023)

Gambar 3.33
Outlook Kal-Teng 2023

Faktor Pendorong ▲	Faktor Penahan ▼
• Peningkatan mobilitas mendukung ketersediaan tenaga kerja pemanen TBS • NTP Perkebunan tetap tinggi dan masih di atas 120% menjadi insentif bagi petani • Berakhirnya *zero covid policy* dan penurunan kasus covid di Tiongkok • Implementasi B35 Februari 2023 diprakirakan meningkatkan permintaan CPO sekitar 2 jt metric ton • Peningkatan pagu belanja modal • Pelaksanaan MICE secara luring pasca penghapusan PPKM	• Produksi batu bara diprakirakan melambat seiring dibukanya kran impor dari Australia dan peningkatan produksi Tiongkok • Pelemahan harga batu bara menjadi disinsentif bagi produsen • Produksi bauksit diprakirakan melanjutkan penurunan secara signifikan yang telah berlangsung sejak triwulan III-2022 • Penerapan kebijakan rasio ekspor CPO satu banding enam pada Januari 2023 • Prakiraan meningkatnya produksi CPO dari Malaysia

Sumber : Bank Indonesia (2023)

Gambar 3.34
Outlook Kal-Teng 2024

Faktor Pendorong ▲	Faktor Penahan ▼
• Produktivitas TBS diprakirakan akan lebih baik seiring kualitas pemupukan yang lebih baik pada tahun 2023 sejalan normalisasi harga pupuk • Batu bara diprakirakan masih akan meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas mitra dagang utama dan ekonomi global yang diprakirakan kembali meningkat pada tahun 2024 • Konsumsi perdagangan masyarakat diprakirakan meningkat pada masa tahun politik	• Realisasi belanja modal APBN, APBD, maupun swasta diprakirakan akan cenderung tumbuh melambat memasuki masa tahun politik

Sumber : Bank Indonesia (2023)

Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah mengendalikan inflasi. Bank Indonesia memprediksikan bahwa tekanan inflasi keseleruhan pada tahun 2023 akan menurun. Akan tetapi Provinsi Kalimantan Tengah tetap harus mewaspadai akan adanya resiko kenaikan inflasi yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya kebijakaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat.
2. Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang dipengaruhi oleh tetap tingginya harga minyak global.
3. Kenaikan harga rokok akibat target penyesuaian cukai 10 persen.
4. El-Nino diperkirakan terjadi pada Triwulan kedua tahun 2023, yang berpotensi mengakibatkan kekeringan pada persawahan.
5. Panen padi untuk periode tanam Oktober-Maret tahun ini diperkirakan membaik.

Gambar 3.35
Proyeksi Inflasi Kal-Teng



Sumber : Bank Indonesia (2023)

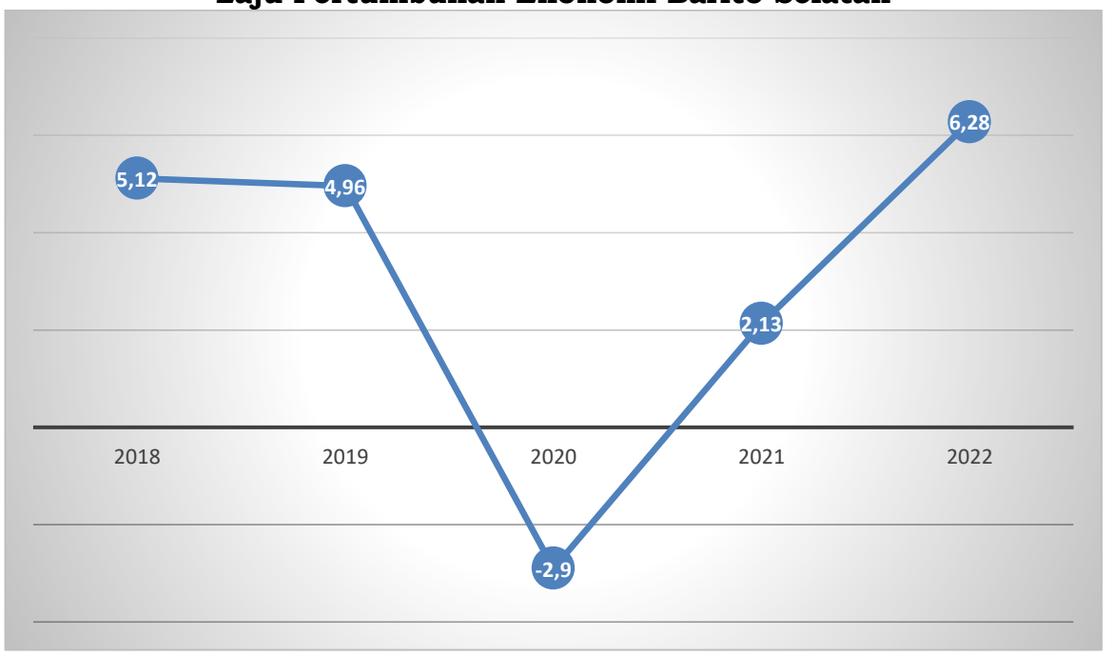
3.1.4 Telaah Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Indikator ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi dan kesempatan lapangan kerja. Struktur ekonomi yang dibangun oleh sektor-sektor produksi bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Sektor dengan nilai tambah yang besar menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 adalah Rp8.131,63 milyar rupiah atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,28 persen di tahun 2022. Hal ini merupakan sinyal positif karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan sempat mengalami kontraksi hingga menyentuh angka -2,90 persen sebagai dampak dari merebaknya pandemi Covid-19. Seiring dengan pulihnya ekonomi dunia, pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan

berangsur pulih dan bisa mengalami pertumbuhan yang positif menjadi 2,13 persen. Hal ini kemudian berlanjut lagi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Barito Selatan pada Tahun 2022 yang melesat ke angka 6,28 persen (data BPS Barsel, 2023). Diprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Barito Selatan di Tahun 2023 juga akan berada di level yang positif seperti tahun 2022 di kisaran 5-6 persen.

Gambar 3.36
Laju Pertumbuhan Ekonomi Barito Selatan



Sumber : BPS Barito Selatan (2023)

Tahun 2022 PDRB atas dasar harga berlaku, sektor pertambangan memberi sumbangan yang terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu Sebesar 1.087,95, kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor pertanian 803,77 dan sektor transportasi pergudangan 486,04 bisa dilihat pada tabel 3.1 dan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Barito Selatan (persen) 2018-2022 bisa dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3. 1
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	736,8	770,24	782,94	770,02	803,77
2	Pertambangan dan Penggalian	1 015,3	1 072,08	905,15	959,63	1 087,95
3	Industri Pengolahan	231,7	239,63	237,88	241,27	258,50

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,1	2,24	2,46	2,61	2,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,2	5,84	6,11	6,55	6,80
6	Konstruksi	259,3	277,72	246,88	218,67	232,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	321,5	338,45	343,99	348,12	357,15
8	Transportasi dan Pergudangan	483,7	483,35	465,52	448,90	486,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	77,9	82,33	81,23	82,61	86,78
10	Informasi dan Komunikasi	60,5	65,52	77,12	83,27	85,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	177,7	185,97	201,69	211,74	212,29
12	Real Estat	84,8	89,26	91,25	91,28	92,05
13	Jasa Perusahaan	0,7	0,72	0,66	0,61	0,61
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	252,4	270,81	283,50	298,02	292,49
15	Jasa Pendidikan	267,1	285,04	297,50	309,81	318,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106,5	116,20	141,03	186,64	206,59
17	Jasa Lainnya	77,6	81,73	75,71	71,28	72,17
PDRB Kabupaten Barito Selatan		4 160,9	4367,13	4240,61	4331,03	4602,95

Catatan/Note: *)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2023

Tabel 3. 2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,29	4,54	1,65	-1,65	4,38
2	Pertambangan dan Penggalian	3,97	5,59	-15,57	6,02	13,37
3	Industri Pengolahan	0,20	3,42	-0,73	1,43	7,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,48	6,57	9,58	6,04	0,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,28	12,52	4,60	7,26	3,81
6	Konstruksi	5,69	7,09	-11,10	-11,43	6,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	5,29	1,64	1,20	2,59
8	Transportasi dan Pergudangan	8,66	-0,08	-3,69	-3,57	8,27

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,41	5,71	-1,34	1,70	5,05
10	Informasi dan Komunikasi	5,13	8,26	17,69	7,99	3,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,59	4,65	8,45	4,99	0,26
12	Real Estat	5,43	5,31	2,23	0,03	0,85
13	Jasa Perusahaan	5,45	6,69	-7,66	-7,89	0,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,37	7,28	4,69	5,12	-1,86
15	Jasa Pendidikan	8,73	6,71	4,37	4,14	2,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,86	9,02	21,37	32,34	10,69
17	Jasa Lainnya	5,42	5,32	-7,36	-5,86	1,25
PDRB Kabupaten Barito Selatan		**5,12**	**4,96**	**-2,90**	**2,13**	**6,28**

Catatan/Note: *)Angka Sementara
**)Angka Sangat Sementara

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2023

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Pendapatan daerah pada tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp 1.108.341.453.794,00 Pendapatan Daerah tersebut apabila kita bandingkan dengan proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp1.256.854.916.756,00 maka terlihat terjadi penurunan sebesar Rp148.513.462.962,00

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelompok/Komponen besar yaitu: 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2)Pendapatan Transfer; dan 3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan

daerah yang sah mengalami kenaikan. Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp95.011.948.673,00 bertambah sebesar Rp5.917.906.354,00 dibanding dengan target tahun 2023 yaitu sebesar Rp89.094.042.319,00.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis Pendapatan yaitu : 1)Pajak Daerah; 2)Retribusi Daerah; 3)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1.1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari : a)Pajak Hotel; b)Pajak Restoran; c)Pajak Hiburan; d)Pajak Reklame; e)Pajak Penerangan Jalan; f)Pajak Air Tanah C; g)Pajak Sarang Burung Walet; h)Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; i)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); j)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendapatan Pajak Daerah pada ABPD Tahun 2024 sebesar Rp23.006.250.000,00 naik sebesar Rp 575.650.000,00 dibandingkan dengan target pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp22.430.600.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2023.
2) Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp 4.950.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2023.
3) Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp 21.250.000,00 atau naik sebesar Rp16.250.000,00 dengan yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp5.000.000,00.
4) Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2023 .
5) Pajak Penerangan Jalan dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp735.000.000,00 dengan yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp7.265.000.000,00.

6) Pajak Parkir Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.

7) Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 atau naik sebesar Rp24.400.000,00 dengan yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp600.000,00.

8) Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 atau turun sebesar Rp250.000.000,00 dengan yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00.

9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan sebesar Rp2.810.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2023.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2023.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2023.

1.2. Retribusi Daerah

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu : 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d) Retribusi PKB – Sepeda Motor Roda 2; e)Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; f) Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran g) Retribusi Pelayanan Pasar – Kios.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b) Retribusi Tempat Pelelangan; c) Retribusi Terminal; d) Retribusi Tempat Khusus Parkir; ; e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; f) Hewan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan h) Retribusi Rumah Potong Hewan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b) Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi; dan c) Retribusi Izin Usaha Perikanan Kepada Orang pribadi.

Pendapatan Retribusi Daerah pada ABPD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp 7.040.448.673,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 42.000.008,00 dibandingkan dengan target pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp6.998.448.665,00.

Retribusi Jasa Umum mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp 3.076.448.673,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp376.474.923,00 dibandingkan dengan Target pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp2.669.973.750,00. Dengan rincian sebagai berikut :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 289.611.750,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun Anggaran 2023.
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp77.100.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun Anggaran 2023.
3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun Anggaran 2023.
4) Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.412.736.923,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp334.474.923,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.078.262.000,00.
5) Retribusi PKB – Sepeda Motor Roda 2 Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp87.000.000,00 atau naik sebesar 2.000.000,00 dengan yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp85.000.000,00.
6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 atau naik sebesar 40.000.000,00 dengan yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp40.000.000,00.

Jenis Retribusi Jasa Usaha pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 2.452.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Target Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.163.474.915,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp711.474.915,00 Dengan rincian sebagai berikut :

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp782.874.915,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.182.874.915,00.
2) Retribusi Tempat Pelelangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023.
3) Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.500.000,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar 7.500.000,00.
4) Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023.
5) Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023.
6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp76.900.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.673.100.000,00.
7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun Anggaran 2024dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Retribusi Perizinan Tertentu pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.512.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp377.000.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.135.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp390.000.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.000.000,00 .
2) Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi sebesar Rp2.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp.8.000.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000,00.
3) Retribusi Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi sebesar Rp10.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000,00.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.500.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.290.739.200,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.209.260.800,00.

Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Target tersebut bersumber terutama dari penerimaan Hasil Deviden PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan besaran pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah merupakan salah satu dari Objek Pendapatan Daerah khususnya dari kelompok Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Hasil Penjualan Aset lainnya; 2) Penerimaan Jasa Giro; 3) Pendapatan Bunga Deposito; 4)Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Lainnya; 5)Pendapatan Denda Pajak Daerah; 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah; 7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 8) Pendapatan dari BLUD; dan9) Pendapatan dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Target Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp52.465.250.000,00 bertambah sebesar Rp 3.009.517.146,00 dari target tahun 2023 yaitu sebesar Rp49.455.732.854,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dianggarkan tahun 2024 sebesar Rp354.474.923,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.144.025.077,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp498.500.000,00.
2) Penerimaan Jasa Giro dianggarkan tahun 2024 sebesar Rp900.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.
3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Lainnya tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 5.885.347.605.
4) Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan mengalami kenaikan Rp40.000.000,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.000.000,00.
5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023;
6) Pendapatan dari Pengembalian tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp880.427.472,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.569.572.528,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.450.000.000,00.
7) Pendapatan dari BLUD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.649.725.540,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.350.274.460,00.

8) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau turun sebesar Rp303.975.395,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.303.975.395,00.

9) Pendapatan Bunga Tabungan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00 atau naik sebesar Rp34.517.001,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp240.482.999,00

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp 1.005.982.821.174,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp145.336.239.141,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.151.319.060.315,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp956.268.104.908,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp154.235.272.092,00 atau dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.110.503.377.000,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp956.268.104.908,00 yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Pada APBD Tahun Anggaran 2024, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp956.268.104.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum.

   Pada APBD Tahun Anggaran 2024, Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp320.441.981.771,00

   Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp6.223.664.000,00
b) Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp4.845.285.000,00
c) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, (SDA) Minyak Bumi. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp359.618.000,00
d) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Royalty. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp303.358.746.771,00
e) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pada APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp4.341.112.000,00
f) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp1.313.556.000,00.

2. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp535.152.039.000,00 terdiri dari:

a) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp350.456.168.000,00
b) DAU yang ditentukan penggunaannya pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp184.695.871.000,00 Dengan rincian sebagai berikut:
    1) Penggajian Formasi PPPK Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.439.184.000,00.
    2) Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.400.000.000,00.
    3) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 47.636.177.000,00.
    4) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 47.770.622.000,00.

5) Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 62.449.888.000,00.

3. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

   Pada RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih belum dianggarkan karena masih menungu peraturan menteri keuangan tentang TKDD (Transfer ke daerah dan dana desa)tahun 2024.

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

   Pada APBD Tahun Anggaran 2024, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp100.674.084.137,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan pada Tahun 2024 adalah:

   a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar Rp 21.413.620.000,00.
   b. Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp57.691.675.137,00
   c. Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp 20.113.244.000,00.
   d. BOK Dinas sebesar Rp 5.517.629.000,00.
   e. BOK Puskesmas sebesar Rp 12.219.262.000,00.
   f. BOK KB sebesar Rp 2.376.353.000,00.
   g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK sebesar Rp 318.370.000,00.
   h. Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp 542.600.000,00.
   i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp 594.575.000,00.

b. Dana Desa

Pendapatan Dana Desa pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp70.868.305.000,00 atau sama dengan Tahun Anggaran 2023.

2) Transfer antar-Daerah

Pendapatan Transfer antar-Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp49.714.716.266,10 atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.899.032.951,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.815.683.315,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.346.683.947,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp9.095.130.175,00 dengan proyeksi APBD Tahun 2023 sebesar Rp16.441.814.122,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp 4.346.683.947,00.

2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Tabel 3.3
Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2024

Jenis Penerimaan	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Persentase Kenaikan/ (turun)
Pendapatan Asli Daerah	**89.094.042.319,00**	**95.011.948.673,00**	**7%**
Pajak Daerah	22.430.600.000,00	23.006.250.000,00	3%
Retribusi Daerah	6.998.448.665,00	7.040.448.673,00	1%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.209.260.800,00	12.500.000.000,00	22%
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	49.455.732.854,00	52.465.250.000,00	6%
Pendapatan Transfer	**1.151.319.060.315,00**	**1.005.982.821.174,10**	**-13%**
Transfer Pemerintah Pusat	1.110.503.377.000,00	956.268.104.908,00	-14%
Transfer Antar Daerah	40.815.683.315,00	49.714.716.266,10	22%
Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	**16.441.814.122,00**	**7.346.683.947,00**	**-55%**
Pendapatan Hibah	3.383.500.000,00	4.346.683.947,00	28%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.058.314.122,00	**3.000.000.000,00**	-77%

JUMLAH PENDAPATAN	**1.256.854.916.756,00**	**1.108.341.453.794,10**	**-12%**

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan

3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

A. Kebijakan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan belanja daerah tahun 2024 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a)pendidikan; b)kesehatan; c)pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e)lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olahraga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertanian; d) kehutanan; e) energi dan sumberdaya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian; dan h) transmigrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kebijakan belanja daerah tetap diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur, dan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2024 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah (AMH dan APS).
4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan secara bertahap, menjadi 10 persen sesuai perintah Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost, regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
    a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan internet);
    b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
    c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas,

program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

6) Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10 persen dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.
7) Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Alokasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai Rp1.145.341.453.794,10 atau turun sebesar Rp95.413.462.960,90 bila dibandingkan dengan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.240.754.916.755,00.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer.

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai Rp829.995.681.488,60 atau naik sebesar Rp35.593.947.384,60 bila dibandingkan dengan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp794.401.734.104,00. Belanja Operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai dapat berupa belanja untuk gaji dan tunjangan, serta biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana belanja pegawai yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung selama ini, dan/atau juga termasuk belanja untuk honorarium tim pelaksana kegiatan, uang lembur, serta untuk pembayaran honor/biaya pegawai non PNS sebagaimana belanja pegawai pada Belanja Langsung. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp491.760.410.042,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.468.724.737,00 atau 8 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp456.291.685.305,00.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai Rp299.175.679.766,60 naik sebesar Rp24.227.547.477,60 atau 9 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp274.948.132.289,00

c. Belanja Bunga.

Belanja bunga pada Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

d. Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.Belanja subsidi yang akan diberikan kepada PDAM pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai Rp1.000.000.000,00 turun sebesar Rp2.183.742.010,00 atau 69 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp3.183.742.010,00.

e. Belanja Hibah.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai Rp33.059.591.680,00 turun sebesar Rp21.918.582.820,00 atau 40 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp54.978.174.500,00.

f. Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
2) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2024 masih sama dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00.

2. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal diperkirakan mencapai Rp140.913.395.361,10 turun sebesar Rp126.252.417.371,90 atau 47 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp267.165.812.733,00.

3. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Tidak Terduga diperkirakan mencapai Rp15.000.000.000,00 turun sebesar Rp896.195.452,00 atau 6 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.896.195.452,00.

4. Belanja transfer.

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Transfer diperkirakan mencapai Rp 159.432.376.944,40 turun sebesar Rp3.858.797.521,60 atau 2 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp163.291.174.466,00. Belanja transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai Rp3.004.669.867,30 turun sebesar Rp1.572.234.998,70 atau 34 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.576.904.866,00, terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah

desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mencapai Rp156.427.707.077,10 turun sebesar Rp2.286.562.522,90 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp158.714.269.600,00.

c. Dana Desa

Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp70.868.305.000,00.

d. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp85.559.402.077,10

Prakiraan target belanja daerah tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Perkiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2024

Jenis Belanja	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	%
BELANJA OPERASI	**794.401.734.104,00**	**829.995.681.488,60**	**4%**
Belanja Pegawai	**456.291.685.305,00**	**491.760.410.042,00**	**8%**
Belanja Barang dan Jasa	**274.948.132.289,00**	**299.175.679.766,60**	**9%**
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	**3.183.742.010,00**	**1.000.000.000,00**	**-69%**
Belanja Hibah	**54.978.174.500,00**	**33.059.591.680,00**	**-40%**
Belanja Bantuan Sosial	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**0,00**
BELANJA MODAL	**267.165.812.733,00**	**140.913.395.361,10**	**-47%**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**15.896.195.452,00**	**15.000.000.000,00**	**-6%**
BELANJA TRANSFER	**163.291.174.466,00**	**159.432.376.944,40**	**-2%**
Belanja Bagi Hasil	**4.576.904.866,00**	**3.004.669.867,30**	**-34%**
Belanja Bantuan Keuangan	**158.714.269.600,00**	**156.427.707.077,10**	**-1%**
Dana Desa	-	**70.868.305.000,00**	**0,00**
Alokasi Dana Desa	-	**85.559.402.077,10**	**0,00**
JUMLAH BELANJA	**1.240.754.916.755,00**	**1.145.341.453.794,10**	**-8%**

B. SURPLUS/DEFISIT

Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan kebijakan Defisit sebesar Rp37.000.000.000,00. Defisit tersebut nantinya akan ditutupi dengan surplus pembiayaan netto yang mengalami kelebihan sebesar Rp37.000.000.000,00.

3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; dan b) Pengeluaran Pembiayaan.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); 2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 3) Penerimaan Pinjaman Daerah; 4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; 5) Penerimaan Piutang Daerah; dan 6) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan diperkirakan mencapai Rp50.000.000.000,00 yang bersumber dari Silpa sebesar Rp50.000.000.000,00.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp13.000.000.000,00, yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp13.000.000.000,00.
2. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp0,00, dan
3. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp0,00

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp50.000.000.000,00, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp13.000.000.000,00,00, dengan

demikian Pembiayaan Netto pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.000.000.000,00.

C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Anggaran yang direncanakan pada Tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp37.000.000.000,00, sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan surplus sebesar Rp37.000.000.000,00, maka dengan demikian pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2024 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2024

III	PEMBIAYAAN	APBD 2023	APBD 2024
	a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**50.000.000.000,00**
	SiLPA	0,00	50.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0,00**	**50.000.000.000,00**
	b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**16.100.000.000,00**	**13.000.000.000,00**
	Penyertaan Modal Daerah	16.100.000.000,00	13.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**16.100.000.000,00**	**13.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO		**16.100.000.000,00**	**37.000.000.000,00**
SURPLUS/DEFISIT		**(16.100.000.000,00)**	**(37.000.000.000,00)**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**0,00**

Secara keseluruhan, proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dari sisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Proyeksi/Target Struktur APBD Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD 2023	PROYEKSI APBD 2024
4	**Pendapatan Asli Daerah**	**89.094.042.319,00**	**95.011.948.673,00**
4.1	Pajak Daerah	22.430.600.000,00	23.006.250.000,00
4.1.01	Retribusi Daerah	6.998.448.665,00	7.040.448.673,00
4.1.02	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.209.260.800,00	12.500.000.000,00
4.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	49.455.732.854,00	52.465.250.000,00
4.1.04			
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.151.319.060.315,00**	**1.005.982.821.174,00**

4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.110.503.377.000,00	956.268.104.908,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	40.815.683.315,00	49.714.716.266,10
4.3			
4.3.01	**Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**16.441.814.122,00**	**7.346.683.947,00**
4.3.03	Pendapatan Hibah	3.383.500.000,00	4.346.683.947,00
4.3.04	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.058.314.122,00	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.256.854.916.756,00**	**1.108.341.453.794,10**
5	**BELANJA OPERASI**	**794.401.734.104,00**	**829.995.681.488,60**
5.1	Belanja Pegawai	456.291.685.305,00	491.760.410.042,00
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	274.948.132.289,00	299.175.679.766,60
5.1.02	Belanja Bunga	0,00	0,00
5.1.03	Belanja Subsidi	3.183.742.010,00	1.000.000.000,00
5.1.04	Belanja Hibah	54.978.174.500,00	33.059.591.680,00
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.1.06	**BELANJA MODAL**	**267.165.812.733,00**	**140.913.395.361,10**
5.2	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15.896.195.452,00**	**15.000.000.000,00**
5.3	**BELANJA TRANSFER**	**163.291.174.466,00**	**159.432.376.944,40**
5.4.02	**JUMLAH BELANJA**	**1.240.754.916.755,00**	**1.145.341.453.794,10**
6	**PEMBIAYAAN**	**APBD 2023**	**APBD 2024**
6.1	**a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**50.000.000.000,00**
6.1.04	SiLPA	0,00	50.000.000.000,00
6.1.04	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	**0,00**	**50.000.000.000,00**
6.2			
6.2.02	**b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**16.100.000.000,00**	**13.000.000.000**
6.2.03	Penyertaan Modal Daerah	16.100.000.000,00	13.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**16.100.000.000,00**	**13.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO		**16.100.000.000,00**	**37.000.000.000,00**
SURPLUS/DEFISIT		**(16.100.000.000,00)**	**(37.000.000.000,00)**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**0,00**

C. Pagu Belanja Per Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran Belanja per Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada

kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minumum (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung yang dimaksudkan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah akumulasi dari: 1) Belanja Pegawai untuk honorarium tim, uang lembur, honor non PNS dan lainnya; 2) Belanja Barang dan Jasa; dan 3) Belanja Modal.

Pada tahun Anggaran 2024 pagu belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.145.341.453.794,10 turun sebesar Rp95.413.462.960,90 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.240.754.916.755,00.

Untuk pagu Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.145.341.453.794,10 Diuraikan dan di rinci ke masing-masing Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Rincian Pagu Belanja per Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2024	SELISIH (LEBIH/KURANG)
1	Dinas Pendidikan	282.869.345.669,00	289.028.249.373,00	6.158.903.704,00
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	176.879.618.652,00	187.293.241.501,00	10.413.622.849,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	230.296.806.781,00	153.649.165.028,10	(76.647.641.752,90)
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.476.550.672,00	12.525.742.212,00	49.191.540,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.359.987.446,00	11.811.493.296,00	1.451.505.850,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.511.674.063,00	5.618.699.221,00	107.025.158,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan	97.161.255.072,00	98.635.850.811,10	1.474.595.739,10

NO	PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2023	TAHUN 2024	SELISIH (LEBIH/KURANG)
	Masyarakat dan Desa			
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.698.263.549,00	4.698.263.549,00	-
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.752.124.251,00	7.245.053.093,00	(507.071.158,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	27.513.787.750,00	24.249.159.018,00	(3.264.628.732,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	12.035.442.989,00	12.658.798.386,00	623.355.397,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.034.667.466,00	6.024.129.696,00	(10.537.770,00)
13	Dinas Perhubungan	13.657.800.549,00	8.172.041.924,00	(5.485.758.625,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.079.685.002,00	7.793.362.066,00	713.677.064,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.187.893.217,00	6.146.792.174,00	(1.041.101.043,00)
16	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	11.245.208.422,00	7.147.155.308,00	(4.098.053.114,00)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.474.934.110,00	3.364.247.610,00	(110.686.500,00)
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	9.073.372.817,00	9.085.405.957,00	12.033.140,00
19	Sekretariat Daerah	57.576.662.092,00	38.184.045.242,00	(19.392.616.850,00)
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.186.708.027,00	34.358.612.782,00	(4.828.095.245,00)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	8.899.570.704,00	9.902.994.136,00	1.003.423.432,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	144.569.968.015,00	159.738.248.570,30	15.168.280.555,30
23	Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM	6.645.921.863,00	5.611.171.719,00	(1.034.750.144,00)
24	Inspektorat	9.003.965.736,00	10.801.791.971,60	1.797.826.235,60
25	Kecamatan Dusun Hilir	3.048.880.093,00	3.172.275.615,00	123.395.522,00
26	Kecamatan Dusun Selatan	6.608.767.499,00	6.392.503.632,00	(216.263.867,00)
27	Kecamatan Dusun Utara	3.797.502.726,00	3.628.294.902,00	(169.207.824,00)
28	Kecamatan Gunung Bintang Awai	3.065.373.168,00	4.041.768.168,00	976.395.000,00
29	Kecamatan Jenamas	3.297.274.039,00	3.348.000.000,00	50.725.961,00
30	Kecamatan Karau Kuala	3.417.800.192,00	3.763.789.692,00	345.989.500,00
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	26.328.104.124,00	7.251.107.141,00	(19.076.996.983,00)
	J U M L A H	**1.240.754.916.755,00**	**1.145.341.453.794,10**	(95.413.462.960,90)

Adapun pagu Belanja per Perangkat Daerah menurut urusan yang dibagi berdasarkan (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (3)Urusan Pemerintahan Pilihan; (4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (7) Unsur Kewilayahan; (8) Unsur Pemerintahan Umum; dengan rincian sebagai berikut :

1. **Urusan Pemerintahan yang Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

   Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp667.948.659.365,10 atau sebesar 58,32% dari total belanja langsung, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

   a. **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

      Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp289.028.249.373,00, atau 25,24% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

   b. **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

      Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp187.293.241.501,00,00 atau 16,35% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

   c. **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

      Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp153.649.165.028 atau 13,42% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

   d. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

      Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp12.301.362.212 atau 1,07% dari total plafon anggaran

Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp17.430.192.517,00 atau 1,52% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan 2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.246.448.734,00 atau 0,72% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp178.602.235.904,10 atau sebesar 15,59% dari total Belanja Daerah, meliputi 18 (Delapan belas) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.560.383.549,00 atau 0,40% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp212.831.000,00 atau 0,02% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp18.920.313.584,00 atau 1,65% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp224.380.000,00 atau 0,02% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp12.658.798.386,00 atau 1,11% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.024.129.696,00 atau 0,53% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp90.389.402.077,10 atau 7,89% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.032.222.093,00 atau 0,61% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.172.041.924,00 atau 0,71% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.403.362.066,00, atau 0,65% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.635.876.437,00 atau 0,58% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.146.792.174,00, atau 0,54% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan

Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.747.455.308,00 atau 0,50% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp230.000.000,00, atau 0,02% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00, atau 0,01% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp720.000.000,00 atau 0,06% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.292.351.010,00 atau 0,29% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp71.896.600,00, atau 0,01% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

3. Urusan Pilihan

Plafon sementara Belanja Daerah Urusan Pilihan adalah sebesar Rp8.595.954.954,00 atau sebesar 0,75% dari total Belanja Daerah, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.100.200.000,00, atau 0,10% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

UrusanPemerintahan Bidang Pariwisata pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar RP679.700.000,00, atau 0,06% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.228.645.434,00, atau 0,37% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.326.162.020,00, atau 0,12% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.123.367.500,00, atau 0,10% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp137.880.000,00, atau 0,01% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp72.542.658.024,00 atau 6,33% dari total plafon anggaran Belanja Daerah, yang termasuk dalam Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah :

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan. pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp38.184.045.242,00 atau 3,33% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan. pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp34.358.612.782,00, atau 3,00% dari total plafon anggaran Belanja Daerah.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp175.252.414.425,30, atau 15,30% dari total plafon anggaran Belanja Daerah, yang termasuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan adalah :

a. Perencanaan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp9.487.994.136,00, atau

0,83% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

b. Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp159.738.248.570,30, atau 13,95% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

c. Kepegawaian dan Diklat

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.611.171.719,00 atau 0,49% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

d. Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp415.000.000,00 atau 0,04% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.600.975.736,00, atau 0,73% dari total plafon anggaran Belanja Daerah, yang termasuk dalam Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah :

a. Inspektorat

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp10.801.791.971,60, atau 0,94% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

7. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp24.346.632.009, atau 2,13% dari total plafon anggaran Belanja Daerah, yang termasuk dalam Unsur Kewilayahan adalah :

a. Kecamatan Dusun Hilir

Kecamatan Dusun Hilir pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.172.275.615,00.

b. Kecamatan Dusun Selatan

Kecamatan Dusun Selatan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.392.503.632,00.

c. Kecamatan Dusun Utara

Kecamatan Dusun Utara pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.628.294.902,00.

d. Kecamatan Gunung Bintang Awai

Kecamatan Gunung Bintang Awai pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.041.768.168,00.

e. Kecamatan Jenamas

Kecamatan Jenamas pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.348.000.000,00.

f. Kecamatan Karau Kuala

Kecamatan Karau Kuala pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.763.789.692,00.

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Pemerintahan Umum pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.251.107.141,00 atau 0,63% dari total plafon anggaran Belanja Daerah. Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya untuk Rekapitulasi Belanja per Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 adalah seperti ditunjukan pada tabel 3.8 berikut ini

Tabel 3.8

Rekapitulasi Belanja per Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024

No	Urusan	Jumlah Pagu	Proporsi (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	289.028.249.373,00	25,24%	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	187.293.241.501,00	16,35%	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	153.649.165.028,10	13,42%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.301.362.212,00	1,07%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.618.699.221,00	0,49%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.811.493.296,00	1,03%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.246.448.734,00	0,72%	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.560.383.549,00	0,40%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	212.831.000,00	0,02%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	18.920.313.584,00	1,65%	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	224.380.000,00	0,02%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.658.798.386,00	1,11%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.024.129.696,00	0,53%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	90.389.402.077,10	7,89%	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.032.222.093,00	0,61%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.172.041.924,00	0,71%	DINAS PERHUBUNGAN
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.403.362.066,00	0,65%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.635.876.437,00	0,58%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.146.792.174,00	0,54%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.747.455.308,00	0,50%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	230.000.000,00	0,02%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Urusan	Jumlah Pagu	Proporsi (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	160.000.000,00	0,01%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	720.000.000,00	0,06%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.292.351.010,00	0,29%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	71.896.600,00	0,01%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.100.200.000,00	0,10%	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	679.700.000,00	0,06%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.228.645.434,00	0,37%	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.326.162.020,00	0,12%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.123.367.500,00	0,10%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	137.880.000,00	0,01%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
32	SEKRETARIAT DAERAH	38.184.045.242,00	3,33%	SEKRETARIAT DAERAH
33	SEKRETARIAT DPRD	34.358.612.782,00	3,00%	SEKRETARIAT DPRD
34	PERENCANAAN	9.487.994.136,00	0,83%	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
35	KEUANGAN	159.738.248.570,30	13,95%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
36	KEPEGAWAIAN	5.611.171.719,00	0,49%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	415.000.000,00	0,04%	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
38	INSPEKTORAT DAERAH	10.801.791.971,60	0,94%	INSPEKTORAT
39	KECAMATAN	3.172.275.615	0,28%	KECAMATAN DUSUN HILIR
40	KECAMATAN	6.392.503.632	0,56%	KECAMATAN DUSUN SELATAN
41	KECAMATAN	3.628.294.902	0,32%	KECAMATAN DUSUN UTARA
42	KECAMATAN	4.041.768.168	0,35%	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
43	KECAMATAN	3.348.000.000	0,29%	KECAMATAN JENAMAS
44	KECAMATAN	3.763.789.692	0,33%	KECAMATAN KARAU KUALA
45	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.251.107.141,00	0,63%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH	**1.145.341.453.794,10**	**100%**	

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan.

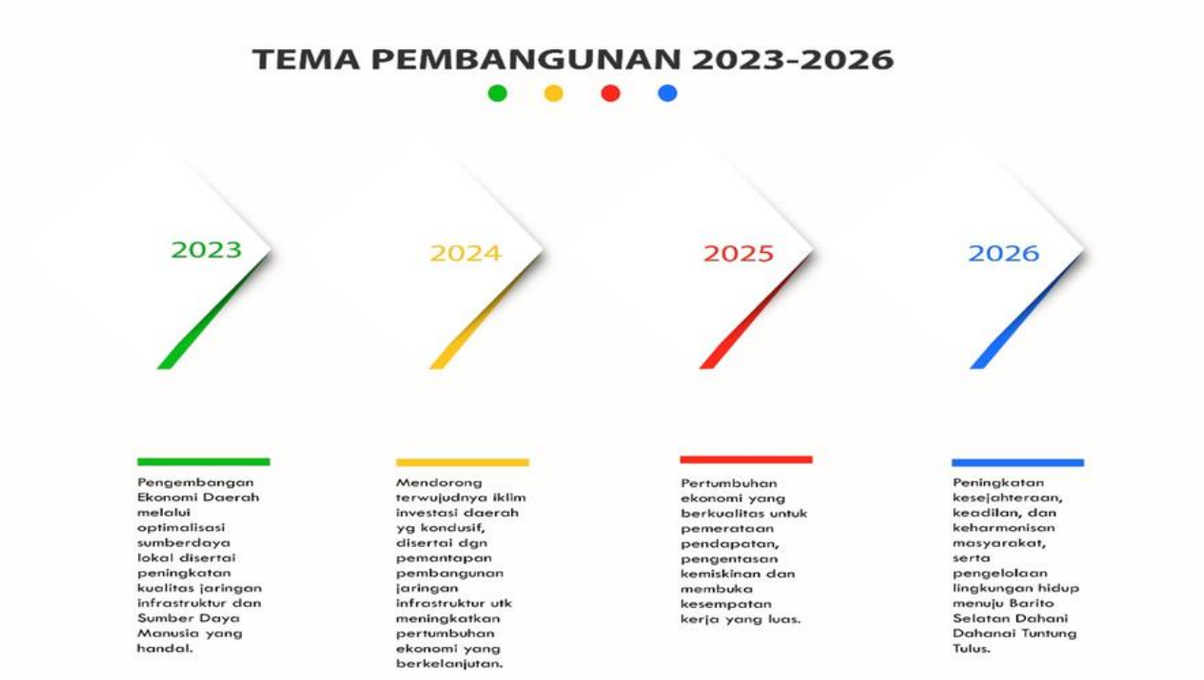
Secara umum telah dirumuskan sebanyak Enam (Enam) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 15 (Lima Belas) sasaran Pembangunan pada RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagai berikut:

1) **Tujuan pertama adalah** “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
   1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.
   1.2. Meningkatnya konektivitas wilayah.

2) **Tujuan Kedua adalah** "Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan", terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
   2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
   2.2. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.
3) **Tujuan Ketiga adalah** "Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat", terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu:
   3.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
   3.2. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.
   3.3. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
   3.4. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.
4) **Tujuan Keempat adalah** "Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan", terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan yaitu:
   4.1. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan.
5) **Tujuan Kelima adalah** "Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif", terdiri dari tiga (tiga) sasaran pembangunan yaitu :
   5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel.
   5.2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.
   5.3. Meningkatnya pengembangan e-goverment menuju smart city.
6) **Tujuan Keenam adalah** "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia", terdiri dari dua (dua) sasaran pembangunan yaitu :
   6.1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan.
   6.2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   6.3. Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagai berikut :

Gambar 4.1



Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut:

1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2023 :
"Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal".

1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2024 :
"Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yg kondusif, disertai dgn pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan".

1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2025 :
"Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas".

1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2026 :
"Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup menuju Barito Selatan Dahani Dahanai Tuntung Tulus".

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Tema dari RKP 2024 adalah: **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, Pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan prioritas, yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
   a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
   b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
   e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
   - MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
   - MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
   - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
   - MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
   - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
   b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
   - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten kota: 95%/75%/65%;
   b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
   c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;

d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.

7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
   Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Ibu Kota Nusantara;
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu: 1

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
3. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
4. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah; dan
5. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diatas, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 adalah:

“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yg kondusif, disertai dgn pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.

Berdasarkan Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan tersebut diatas, maka ditetapkanlah 8 (delapan) arah kebijakan Kabupaten Barito Selatan di Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

4. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan;
5. Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah;
6. Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif;
7. Peningkatan Pelayanan Publik; dan
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik.

Berikut ini adalah Program masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan:

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan, yaitu :

a. Program pengelolaan pendidikan;
b. Program pengembangan kurikulum;
c. Program pengendalian perizinan pendidikan;
d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Dinas Kesehatan, yaitu :

a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Yaitu :

a. program pengelolaan sumber daya air (SDA);
b. program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
c. program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
d. program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
e. program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;

f. program pengembangan permukiman;
g. program penataan bangunan gedung;
h. program penataan bangunan dan lingkungannya;
i. program penyelenggaraan jalan;
j. program pengembangan jasa konstruksi;
k. program penyelenggaraan penataan ruang.

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu:

a. Program pengembangan perumahan;
b. Program kawasan permukiman;
c. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
d. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:
   1) Program Penanggulangan Bencana;
   2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu:
   1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
   2) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

a. Program Pemberdayaan Sosial;
b. Program Rehabilitasi Sosial;
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
d. Program Penanganan Bencana;
e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu:

a. Program Penempatan Tenaga Kerja;
b. Program Hubungan Industrial;
c. Program Perencanaan Tenaga Kerja.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
b. Program Perlindungan Perempuan;
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
f. Program Perlindungan Khusus Anak;

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu:

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
b. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
c. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
d. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
b. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
c. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
d. Program Penatagunaan Tanah;
e. Program Pengelolaan Izin Lokasi;

f. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
g. Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan;
i. Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan.

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH;
g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
j. Program Pengelolaan Persampahan.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

a. Program Pendaftaran Penduduk;
b. Program Pencatatan Sipil;
c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
d. Pengelolaan Profil Kependudukan;

7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;
b. Program Penataan Desa;
c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
d. Program Peningkatan Kerjasama Desa.

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

a. Program Pengendalian Penduduk;
b. Program pembinaan keluarga berencana (KB);
c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan, yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
b. Program Pengelolaan Pelayaran.

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

a. Program Aplikasi dan Informatika;
b. Program Informasi dan Komunikasi Publik.

11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
g. Program Pengembangan (UMKM).

12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. Program Promosi Penanaman Modal;
c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan, yaitu:

a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu:

a. Program Pengembangan Kebudayaan;
b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
d. Program Pengelolaan Permuseuman.

17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu:

a. Program Pembinaan Perpustakaan.

18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu:

a. Program pengelolaan arsip;
b. Program perlindungan dan penyelamatan arsip.

III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu:

a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
b. Program pengembangan perikanan tangkap;
c. Program Pengawasan Sumber Daya kelautan Dan Perikanan;
d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan, yaitu:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
b. Program Pemasaran Pariwisata
c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu :

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
b. Program Penyediaan Dan Pengembangan PraSarana Pertanian;
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
e. Program Perizinan Usaha Pertanian;
f. Program Penyuluhan Pertanian.

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;

e. Program Pengembangan Ekspor;

f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;

b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;

c. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :

a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

a. **Sekretariat Daerah**, yaitu:

1) Program Perekonomian dan Pembangunan;

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

b. **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, yaitu:

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yaitu:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. KEUANGAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yaitu:

a. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

3. KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yaitu:

a. Program Kepegawaian Daerah

4. PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Inspektorat Daerah, yaitu:

a. Program penyelenggaraan pengawasan;
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

VII. UNSUR KEWILAYAHAN

Kecamatan, yaitu:

a. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
b. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
e. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

4.2.1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Pada sub Bab terdahulu telah diuraikan berkaitan dengan prioritas Nasional, Sasaran dan Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024. Hubungan dari masing-masing Prioritas Pembangunan tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Hubungan dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PRIORITAS KABUPATEN BARITO SELATAN
Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat	Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Pelayanan Publik
Penguatan Daya Saing Usaha	Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan
Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok	Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif
Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi		
Pelaksanaan Pemilu 2024		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik
Pembangunan Ibu Kota nusantara	Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni	Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah

4.2.2. Inovasi Daerah

Inovasi teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian transformasi ekonomi yang terjadi dalam pembangunan. Bersama-sama dengan peningkatan level pendapatan dan peningkatan struktur ekonomi, inovasi teknologi menandai perubahan kinerja ekonomi dari berbasis sektor primer (pertanian) menjadi berbasis sektor sekunder (industri pengolahan) yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Sebuah daerah yang menginginkan tercapainya kesejahteraan masyarakat harus dapat menumbuhkan basis perekonomian yang mampu terus berkembang. Hal ini dapat didukung oleh kemampuan daerah dalam menciptakan daya saing produktif. Disinilah pengembangan inovasi menjadi sangat penting. Adanya inovasi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan bagi pengembangan wilayah agar memiliki keunggulan ekonomi melalui produk dan komoditas yang berdaya saing.

Kabupaten Barito Selatan sebagai bagian dari pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerah sebagai upaya untuk peningkatan daya saing daerah. Kabupaten Barito Selatan sebagai daerah pertanian, perikanan dan perkebunan dalam skala regional perlu menekankan faktor daya saing sebagai elemen utama dalam pembangunan wilayahnya. Dalam tataran inisiasi, pengembangan inovasi daerah memerlukan adanya kajian peluang pengembangan melalui kesiapan dukungan instrumen kebijakan sebagai dasar implementasi.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus mendorong pengembangan inovasi pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Inovasi diyakini suatu jembatan untuk mencapai target pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Selatan 2023-2026. Inovasi juga diyakini akan menjadi pendekatan baru dalam menyelasaikan pelayanan publik, tatakelola, dan reformasi birokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang melayani.

Inovasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan amanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menyusun Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Inovasi di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Inovasi di Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mencoba melakukan penguatan Sistem Inovasi Daerah dari sisi kelembagaan, jejaring, dan mekanisme pengembangan inovasi di Kabupaten Barito Selatan. Hal ini didasari bahwa pengembangan inovasi di suatu daerah hanya akan berhasil jika adanya pelibatan seluruh aktor pembangunan dan masyarakat.

Pengembangan inovasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang masuk ke dalam inovasi pelayanan publik dan tatakelola dilaksanakan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (OPD). Terdapat 3 (tiga) jalur pengembangan inovasi di OPD yaitu (1) Inovasi yang dikembangkan langsung oleh OPD sesuai dengan kebutuhan dan terencanakan dalam dokumen penganggaran, (2) Inovasi yang dikembangkan oleh peserta pelatihan kepemimpinan, (3) Inovasi yang dikembangkan oleh individu ASN untuk mempermudah tatalaksana.

Pengembangan inovasi di Kabupaten Barito Selatan menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam Pemerintah Kabupaten Barito Selatan maupun luar pemerintah. Budaya inovasi yang belum membumi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyebabkan semangat pengembangan inovasi belum sama. Adanya perbedaan pemahan inovasi antar lembaga dan individu terkait konsep pengembangan inovasi juga menjadi tantangan pengembangan inovasi di Kab. Kabupaten Barito Selatan. Pengembangan inovasi di pemerintah Kabupaten Barito Selatan setidaknya mengalami empat tantangan besar sebagai berikut:

1. Belum tersedianya dokumen perencanan pengembangan inovasi.
   Perencanaan dan pengembangan inovasi tata kelola dan pelayanan publik di Kabupaten Barito Selatan belum berdasarkan perencanaan berjangka. Belum tersedianya dokumen makro yang mengatur

pengembangan inovasi menyebabkan belum adanya konektifitas satu inovasi dengan inovasi lainnya.

2. Belum adanya sistem pengelola inovasi berbasis IT.

   Potensi duplikasi inovasi sangat mungkin terjadi akibat belum adanya sistem satu pintu yang memonitor perencanaan dan pengembangan inovasi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Belum terbentuknya atau tidak adanya aplikasi yang memonitor mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga evaluasi inovasi menyebabkan inovasi sangat mungkin terduplikasi yang menyebabkan inovasi berbiaya tinggi.

3. Belum terbangun budaya berinovasi

   Budaya berinovasi belum terbentuk dan tersebar secara luas di Kabupaten BaritoSelatan. Di instansi pemerintah, inovasi belum menjadi budaya sehingga tuntutan berinovasi belum cepat dapat lakukan. Perubahan bahkan masih menjadi sebuah permasalah di instansi pemerintah yang telah nyaman dengan kondisi lama dan resisten terhadap perubahan.

4. Kompetensi inovasi yang rendah

   Kompetensi sumber daya manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kompetensi seorang inovator atau pengelola inovasi. Pengembangan SDM masih minim mengarah terhadap peningkatan kompetensi inovasi.

Pengembangan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengembangan inovasi daerah memiliki sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. Penguatan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
b. Peningkatan Pelayanan Publik;
c. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
d. Peningkatan daya saing Daerah.

Pengelolaan inovasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan dilakukan secara inovatif guna menciptakan lingkungan dan budaya inovasi yang berkelanjutan. Pengelolaan inovasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan ditingkatkan mulai dari hulu sampai hilir. Pengelolaan dan pengembangan inovasi dengan pemanfaatan sistem terintegrasi dapat dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan yaitu pengusulan

inovasi, penetapan inovasi, monitoring, dan evaluasi inovasi sesuai dengan alur pengeloaan inovasi pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

Program penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. Pengembangan sistem pengelolaan inovasi daerah;
2. Pemetaan dan invetarisasi inovasi daerah;
3. Pengembangan inovasi tata kelola dan pelayanan publik Pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah;
4. Penguatan kompetensi inovasi pengelola inovasi daerah;
5. Promosi dan pameran inovasi daerah; dan
6. Sinergitas pengembangan inovasi Kabupaten.

Adapun daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan yang saat ini terdata dan terdaftar oleh Bappeda Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 2

Daftar Inovasi Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

NO	NAMA INOVASI	SUMBER INOVASI
1	Sistem Informasi Geospasial (SIGERA)	BAPPEDA
2	Sistem Informasi Data Statistik Sektoral (SIMDATIK)	Diskominfo
3	Layanan Cloud Data Pemerintah Kab. Barito Selatan	Diskominfo
4	Layanan Portal Barito Selatan	Diskominfo
5	Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SiDeKa)	Diskominfo
6	Sistem Layanan Penilaian Kinerja ASN Pemerintah Kab. Barito Selatan secara elektronik	Diskominfo
7	Layanan Bank Sampah Berbasis Elektronik	Diskominfo
8	Layanan Sistem Informasi Usaha Kecil dan Menengah (SiUcil)	Diskominfo
9	Layanan Helpdesk Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	Diskominfo
10	Layanan Tanda Tangan Elektronik (eSign)	Diskominfo

NO	NAMA INOVASI	SUMBER INOVASI
11	Layanan Sistem Posyandu Elektronik (ePosyandu)	Diskominfo
12	Layanan Buku Tamu Digital	Diskominfo
13	Layanan Sistem Informasi Wisata Barito Selatan	Diskominfo
14	Jemput Bola Perekaman KTP-el sepenuh hati (JEBOL PETI)	Disdukcapil
15	Fasilitasi Sidang Isbat Keliling (SI SIBAT KELING)	Disdukcapil
16	Layanan Dokumen 3 in 1	Disdukcapil
17	Layanan Dokumen 6 in 1	Disdukcapil
18	Selesai Nikah Dokumen Komplit Data Valid (SENI KULIT DAN TALI)	Disdukcapil
19	Capil Masal	Disdukcapil
20	Sistem Informasi Dukcapil untuk semua (SIDUTA)	Disdukcapil
21	Pembayaran Tagihan PDAM melalui BETANG MOBILE BANK KALTENG	PDAM
22	Optimalisasi Pencatatan Water Meter Pelanggan berbasis Sistem Biling	PDAM
23	Mesin Pembersih Rotan	Masyarakat
24	Pestisida Nabati dari Ekstrak Kulit Cempedak	ASN
25	Pengelolaan Bantuan Sosial Satu Atap untuk masyarakat di Kab. Barsel (BASUMAN)	ASN
26	Analisa Penataan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi	ASN
27	Pembentukan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD	ASN
28	Optimalisasi Pembangunan Perkuatan Tebing Penahan Tanah Longsor Berbasis Teknologi Crane di Bantaran Sungai Barito Kab. Barito Selatan	ASN
29	Ruang Multimedia Kantor Kecamatan	ASN
30	Jenamas Marketplace Order	ASN
31	Aplikasi Bos Pendidikan (APBOSDIK)	Dinas Pendidikan
32	Smart Presensi	Dinas Pendidikan

Sumber : Bappeda Kab. Barito Selatan, 2023.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah serta arah kebijakan prioritas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dengan prioritas program beserta indikator kinerja program dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah pada RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut :

1. **Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah**,

2. **Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**,

   Konsep Pelaksanaan Program :

   1) Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Jumlah penduduk miskin ekstrem di kabupaten Barito Selatan tahun 2022 sebesar 7.235 keluarga atau 32.359 individu) Sumber data dari Satgas P3KE Pusat dan TNP2K Kemenko PMK tahun 2022) Target Nasional Kemiskinan Esktrem Tahun 2024 sebesar 0%;
   2) Angka Prevalensi Stunting untuk tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan sebesar 17,88). Target Nasional tahun 2024 Angka Prevalensi Stunting sebesar 14%;
   3) Angka Prevalensi Stunting 2022 dai Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan pada saat Publikasi Stunting 20 Desember 2022 sebesar 16,97%;
   4) Pemberian makanan tambahan dan suplemen peningkatan gizi;
   5) Penyediaan air minum, pendidikan, dan bantuan sosial;
   6) Program pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis;
   7) Peningkatan kualitas penggunaan DAK dan Dana Desa dalam upaya penanganan stunting;
   8) Penajaman intervensi Bansos seperti PKH, Kartu Sembako, bantuan untuk lansia, disabilitas, mekanisme penyaluran subsidi, serta meningkatkan peran Pemda melalui program Padat Karya dan BLT Desa;

9) Optimalisasi tenaga pendamping dalam pemutakhiran data penerima manfaat;
10) Pemanfaatan Regsosek untuk perbaikan basis data Bansos, subsidi, dan berbagai program bantuan Pemerintah bagi masyarakat lainnya.

3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,**

Konsep Pelaksanaan Program :

1) Peningkatan pelayanan kualitas melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan;
2) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan sarpras sekolah, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta pendidikan vokasi;
3) Peningkatan kualitas keluarga sejahtera;
4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan;
5) Peningkatan Pelayanan Sosial;
6) Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender;
7) Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

4. **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan,**

Konsep Pelaksanaan Program :

1) Peningkatan Daya Beli Masyarakat;
2) Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha;
3) Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan;
4) Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5) Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan;
6) Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;
7) Pengendalian laju alih fungsi lahan;
8) Pemberian bantuan Pemerintah sektor pertanian yang tepat sasaran;
9) Penguatan tata kelola logistik nasional;
10) Pengawasan harga dan operasi pasar;

11) Optimalisasi peran APBD untuk pengendalian inflasi daerah.

5. **Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah**,

   Konsep Pelaksanaan Program :

   1) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis;
   2) Pemantapan infrastuktur dasar jalan, jembatan, fasus dan fasum demi membuka keterisolasian daerah dan konektivitas wilayah;
   3) Akses jaringan struktur prasarana dan sarana; transportasi darat, transportasi air, udara yang terkoneksi dengan pusat produksi/PUD yang memadai antar desa dan kecamatan dan ibukota kabupaten;
   4) Peningkatan akses jaringan telekomunikasi hingga desa-desa;
   5) Pengembangan inovasi infrastruktur prasarana dasar;
   6) Optimalisasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk Peningkatan Infrastuktur Daerah.

6. **Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**,

   Konsep Pelaksanaan Program :

   1) Kemudahan Usaha dan Investasi;
   2) Harmonisasi Peraturan untuk Memberi Kepastian Hukum;
   3) Optimalisasi DAK fisik dan Non Fisik untuk fasilitasi Penanaman Modal;
   4) Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan dan bencana;
   5) Mengurangi ancaman bencana melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan drainase dan pengelolaan sampah perkotaan , dan normalisasi sungai;
   6) Mitigasi bencana untuk mengurangi kerentanan, baik sosial, ekonomi, fisik maupun lingkungan.

7. **Peningkatan Pelayanan Publik**,

   Konsep Pelaksanaan Program :

   1) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada sisi tata laksana pelayanan publik;

2) Peningkatan efektifitas manajemen pemerintahan dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, pencegahan korupsi, dan penerapan SAKIP;
3) Memaksimalkan potensi pengembangan inovasi di daerah dalam rangka melahirkan ide – ide baru dan brilian demi mewujudkan reformasi birokrasi, keterbukaan publik, kemudahan mengakses informasi potensi SDA di daerah, serta menghadapi era industri 4.0.

8. **Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**,

Konsep Pelaksanaan Program :

1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kaidah dan prinsip Pemilu mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisiensi;
2) Penyiapan Alokasi Anggaran Dan Realisasi Dana Hibah Untuk Pemilihan Umum 2024 Serta Koordinasi Dengan Penyelenggara Pemilu;
3) Penyiapan dukungan anggaran utk penyusunan Rancangan Akhir Perda RPJPD Kab Barsel 2025 s.d 2045, Rancangan Awal Teknokratik RPJMD Kab Barsel 2025 s.d 2030.

Selain berdasarkan Program Prioritas Daerah diatas, dalam proses Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, Pemerintah Barito Selatan menjalankan prosedur-prosedur perencanaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, antara lain Musrenbang Kecamatan, Musrenbang RKPD, penelaahan Pokok-pokok Pikiran dan Usulan SKPD yang semuanya

diinput dan di entry ke dalam aplikasi SIPD. Kemudian disusun Rencana Kerja yang disertai dengan pendanaan untuk masing-masing Perangkat Daerah yang secara lengkap disajikan sebagaimana Tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2024
Kabupaten Barito Selatan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**289,028,249,373.00**							**0.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**289,028,249,373.00**							**0.00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**244,272,498,173.00**				**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Dinas Pendidikan***
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						206.092.214,00	(Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					106.092.214,00	(Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*					100.000.000,00	(Dinas Pendidikan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						239.549.014.359,00	(Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO				Peningkatan Pelayanan Publik		-	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					239.222.014.359,00	(Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*					120.000.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*					90.000.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*					20.000.000,00	(dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						12.000.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*					75.000.000,00	(Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						600.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					600.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						435.000.000,00	(dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN), (sanggu, KAB. BARITO SELATAN), (barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)*		*0*	*0*		220.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					90.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*					125.000.000,00	(barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.099.891.600,00	(buntok, KAB. BARITO SELATAN), (sanggu, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					25.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					199.891.600,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					30.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)*					300.000.000,00	(buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					50.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0*	*0*		450.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*					45.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						400.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Rantau Kujang, Jenamas)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						140.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*							*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					260.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN), (Rantau Kujang, Jenamas)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.917.500.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN), (barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					12.000.000,00	(barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					255.500.000,00	(barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					1.650.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.000.000,00	(Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN), (Pendang, KAB. BARITO SELATAN), (Bangkuang, KAB. BARITO SELATAN), (sanggu, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN), (dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN), (BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn.			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					28.000.000,00	(dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)*					12.000.000,00	(sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					25.000.000,00	(BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					-	(Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN), (Bangkuang, KAB. BARITO SELATAN), (Pendang, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*

	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					-	(Bangkuang, KAB. BARITO SELATAN), (Pendang, KAB. BARITO SELATAN), (BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Persentase Pemenuhan SPM pendidikan (%)***				***100***	**44,152,338,700.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Pendidikan***
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						23.395.778.200,00	(barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)*		*0*	*0*		1.000.000.000,00	(Desa Tabatan, Jenamas), (Rantau Kujang, Jenamas), (rantau bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas), (Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir), (SDN Salat Baru, Karau Kuala), (Desa Talio, Karau Kuala), (Desa Talio, Karau Kuala, Karau Kuala), (Desa Muara Arai, Karau Kuala), (SDN 1 Tarusan, Dusun Utara), (Desa Kayumban, Kayumban, Kec. Gn. Bintang Awai), (gagutur, Gagutur, Kec. Gn. Bintang Awai), (Kelurahan Hilir Sper, Dusun Selatan), (Dusun Selatan, Dusun Selatan), (sababilah, Sababilah, Kec. Dusun Selatan), (Parigi, Kalahien, Kec. Dusun Selatan), (Danau Jutuh	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan* *Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)*					250.000.000,00	(Malitin RT.02, Karau Kuala), (Desa Tampijak, Karau Kuala), (Desa Babai, Karau Kuala), (Jelapat, Jelapat, Kec. Dusun Selatan), (Dusun Selatan, Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)*					505.658.970,00	(dusun hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						36.700.000,00	(Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*							*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*					533.729.420,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-		*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)*					2.275.324.750,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-		*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*					131.994.000,00	(Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-		*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*					13.193.057.500,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOS Kinerja, DAK Non Fisik-BOS Reguler, Dana Transfer Umum-Dana*					-		*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)*					124.994.960,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-		*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)*					100.000.000,00	(barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-		*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*					100.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-		*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*					1.260.000.000,00	(barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-		*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)*					390.797.680,00	(Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-		*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)*					818.520.920,00	(Kabupaten Barito Selatab, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-		*Dinas Pendidikan*

	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*					705.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)*		*0*	*0*		120.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Dinas Pendidikan* *Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*					1.850.000.000,00	(Rangga Ilung, Jenamas), (Desa Kalanis Murung, Kalanis, Kec. Dusun Hilir), (kalanis, Kalanis, Kec. Dusun Hilir), (Desa Babai, Karau Kuala), (Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala), (Desa Salat Baru, Salat Baru, Kec. Karau Kuala), (Tarusan, Tarusan, Kec. Dusun Utara), (SDN Hulu Tampang, Hulu Tampang, Kec. Dusun Utara), (Tabak kanilan, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai), (Mabuan, Mabuan, Kec. Dusun Selatan), (Penda Asam, Penda Asam,	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						11.199.592.500,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Sungai Telang, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN), (Bintang Kurung, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (SMPN 2 Karau Kuala, Karau Kuala), (Malitin RT.02, Karau Kuala), (SMPN Satap 3 Karau Kuala, Karau Kuala), (Desa Bintang Kurung, Karau Kuala), (SMPN 1 Karau Kuala, Karau		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)*					450.000.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (SMPN Satap 3 Karau Kuala, Karau Kuala), (SMPN 2 Karau Kuala, Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Dinas Pendidikan*

1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*					80.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*					799.057.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*					700.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*					1.461.600.000,00	(Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*					145.000.000,00	(Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*					6.623.662.500,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOS Reguler, Dana Transfer Umum-Dana*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*					115.635.500,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*					426.545.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*					131.948.000,00	(Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito selatan, KAB. BARITO	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*					191.144.500,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						75.000.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						9.282.008.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Patas I, KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Jenamas, Rantau Kujang, Kec. Jenamas), ((Kel Rantau Kujang, Kec. Jenamas), Rantau Kujang, Kec. Jenamas), (Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala), ((Kel Pendang, Kec. Dusun Utara), Pendang, Kec. Dusun Utara), ((Kel Pendang, Kec.Dusun Utara) , Pendang, Kec. Dusun Utara), ((Desa Patas I, Kec.Gunung Bintang Awai) , Patas I, Kec. Gn. Bintang Awai), (DUSUN SELATAN, Buntok Kota, Kec. Dusun			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*					500.000.000,00	((Kel Rantau Kujang, Kec. Jenamas), Rantau Kujang, Kec. Jenamas), ((Kel Pendang, Kec. Dusun Utara), Pendang, Kec. Dusun Utara), ((Desa Patas I, Kec.Gunung Bintang Awai) , Patas I, Kec. Gn.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*					100.000.000,00	((Kel Pendang, Kec.Dusun Utara) , Pendang, Kec. Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)*					302.600.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*					500.000.000,00	(Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)*					325.000.000,00	(Patas I, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*

1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)*					200.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)*					2.250.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*					100.768.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)*					621.700.000,00	(Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)*					1.556.940.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOP PAUD, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)*					150.000.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*					200.000.000,00	(barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*					475.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)*					950.000.000,00	(Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*					300.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)*					750.000.000,00	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*

	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						274.960.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (sababilah, KAB. BARITO SELATAN), (barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), ((Kel.Buntok Kota, Kec.Dusun Selatan) , Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan), ((Kelurahan Buntok Kota, Kec.Dusun Selatan) , Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan), ((Desa Sababilah, Kec.Dusun Selatan)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*					75.000.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*					39.960.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*					85.000.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*					50.000.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*					25.000.000,00	(barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*					-	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (sababilah, KAB. BARITO SELATAN), ((Kelurahan Buntok Kota, Kec.Dusun Selatan) , Buntok Kota, Kec.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***Persentase kurikulum yang dikembangkan (%)***				***100***	**324,727,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Pendidikan***
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						24.727.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya*					24.727.000,00	(Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						300.000.000,00	(barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)*					300.000.000,00	(barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase Tenaga Guru yang Tersediakan di Satuan Pendidikan (%)***				***78***	**118,685,500.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Pendidikan***
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						118.685.500,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*					59.342.750,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*					59.342.750,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
5.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	***Persentase Perizinan Pendidikan yang dikendalikan (%)***				***100***	**160,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Pendidikan***
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						160.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi*					160.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Pendidikan Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pendidikan*
	J U M L A H							**289.028.249.373,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**187,293,241,501.00**							**0.00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**187,293,241,501.00**							**0.00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**134,826,019,901.00**				**Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Dinas Kesehatan***
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						385.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. Wr. Soeprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	140.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. Wr. Soeprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	60.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	15.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	40.000.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	10.000.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						70.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						85.051.458.884,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Kesehatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						84.816.458.884,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Kesehatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*892.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						75.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						70.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Karyawan lingkup Dinas Kesehatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						90.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						170.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						170.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						184.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						60.000.000,00				Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Kesehatan*

	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*		*0*	*0*		100.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*4*	24.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						733.166.557,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Ke Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Kalahien, Sababilah, Pendang, Bantai Bambure, Tabak Kanilan, Patas I., KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	7.500.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	70.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	8.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	20.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*10*	6.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	73.666.557,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*25*	478.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Ke Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Kalahien, Sababilah, Pendang, Bantai Bambure, Tabak Kanilan, Patas I., KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	20.000.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						80.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*					30.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1*	50.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.751.120.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	7.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	315.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					10.429.120.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*12*	50.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN) *(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR Seprapto Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					21.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					50.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						37.350.274.460,00	(RSUD Jaraga Sasameh Buntok, Dusun Selatan), (UPTD Puskesmas Buntok, Dusun Selatan)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*					37.350.274.460,00	(RSUD Jaraga Sasameh Buntok, Dusun Selatan), (UPTD Puskesmas Buntok, Dusun Selatan)	*Pendapatan dari BLUD*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Kesehatan*
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Capaian Layanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)***				***100***	**50,721,865,995.00**		***Pendapatan dari BLUD***		**Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Dinas Kesehatan***

	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						7.865.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas, KAB. BARITO SELATAN), (Desa di Dusun Selatan, Jenamas, Dusun Hilir, Karau Kuala, Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas di Wilayah Kab. Barito Selatan (Khususnya Mengkatip, Jenamas, Bangkuang, Pendang, Patas i, Buntok), KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751 , KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Kesehatan, KAB. BARITO SELATAN), (Pustu/Poskesdes Kelurahan / Desa Di wilayah Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO			Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)*		*0*	*0*		200.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)*					1.300.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1*	3.010.000.000,00	*(Puskesmas Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)*					655.000.000,00	(Desa di Dusun Selatan, Jenamas, Dusun Hilir, Karau Kuala, Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Pustu/Poskesdes Kelurahan / Desa Di wilayah Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Kesehatan*

	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)*					800.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Kesehatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)*					1.900.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751 , KAB. BARITO	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.277.005.995,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Posyandu, Puskesmas Wilayah Barsel, KAB. BARITO SELATAN), (RSUD Jaraga Sasameh, KAB. BARITO SELATAN), (54 Pustu, 84 Poskesdes dan 2 Polindes, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Terpilih, KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas, KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751 , KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa			Peningkatan Pelayanan Publik, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*					838.120.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*					253.760.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751 , KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*

1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*					422.425.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*					637.295.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*					622.500.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*					471.020.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751 , KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*					372.170.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751 , KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*					502.940.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*					421.220.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)*					150.800.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751 , KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*					374.093.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)*					263.000.600,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*

1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)*					90.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)*					1.634.925.000,00	(Posyandu, Puskesmas Wilayah Barsel, KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*					165.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)*					100.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)*					150.833.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)*		*0*	*0*		70.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)*		*0*	*0*		50.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)*					374.910.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	10.000.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah						50.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751 , KAB. BARITO SELATAN)						-	

		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)*					35.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)*					5.182.635.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas*					50.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	600.000.000,00	(RSUD Jaraga Sasameh, KAB. BARITO SELATAN) *(RSUD, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	17.323.237.395,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas, KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN) *(KAB. BARITO SELATAN)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)*					716.000.000,00	(54 Pustu, 84 Poskesdes dan 2 Polindes, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*

	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*					20.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)*					50.000.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*					109.732.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)*					75.016.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)*					90.374.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						62.000.000,00				Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		*0*	*0*		62.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						517.860.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)*					60.000.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*

	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*		*0.00*	*0.00*	*12*	397.860.000,00	(Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*					60.000.000,00	(Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase capaian SDM Kesehatan yang memenuhi Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)***				***90***	**1,080,361,605.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Kesehatan***
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						1.030.361.605,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN), (RSUD Jaraga Sasameh Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*					980.361.605,00	(RSUD Jaraga Sasameh Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*					50.000.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00	(Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO						-	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*					50.000.000,00	(Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751, KAB.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*

4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase Pelaksanaan Persediaan Farmasi, alkes dan makanan minuman (%)***				***100***	**444,994,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Kesehatan***
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						60.000.000,00	(Semua Apotik, toko Obat di Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*					60.000.000,00	(Semua Apotik, toko Obat di Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						20.000.000,00							-	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)*		*0*	*0*		20.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						364.994.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751 , KAB. BARITO SELATAN)						-	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						364.994.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN), (Kantor Dinas Kesehatan Jl. WR. Soeprapto Desa Sanggu 73751 , KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(KAB. BARITO SELATAN)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, Dana Transfer Umum-Dana*				*0.00*		*Dinas Kesehatan*
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (%)***				***90***	**220,000,000.00**		***DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Kesehatan***
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN)						-	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)*					70.000.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN)						-	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)*					100.000.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN)						-	

	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*					50.000.000,00	(Puskesmas Jenamas, Mengkatip, Bangkuang, Babai, Baru, Buntok, Sababilah, Kalahien, Pendang, Bantai Bambure, Patas I, Tabak Kanilan., KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kesehatan*
	J U M L A H							**187.293.241.501,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**153,649,165,028.10**							**46,203,500,000.00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**153,649,165,028.10**							**46,203,500,000.00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100,00***	**17,209,277,028.10**				**Peningkatan Pelayanan Publik**			**18,690,000,000.00**	***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			500.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	150.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	250.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	25.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	25.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	25.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	25.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	50.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	75.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	50.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	75.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.948.324.661,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			8.325.000.000,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*94.00*	8.273.324.661,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*94.00*	7.600.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD						450.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			450.000.000,00	

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*2.00*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		*0.00*	*0.00*	*6.00*	25.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*6.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	25.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*18.00*	25.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*18.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	150.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*12.00*	200.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						215.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			220.000.000,00	
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	20.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	25.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	50.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*3.00*	50.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	20.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*3.00*	20.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*7.00*	75.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*7.00*	75.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	25.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelavanan Publik		*1.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						570.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			570.000.000,00	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	160.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	160.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	10.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	10.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	15.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	15.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	10.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	150.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*10.00*	150.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	75.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*10.00*	75.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*20.00*	150.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*20.00*	150.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						793.812.367,10	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			900.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	25.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	65.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*3.00*	90.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	20.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*3.00*	20.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	200.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*3.00*	200.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	58.812.367,10	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	60.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	10.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	10.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	50.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*5.00*	50.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*25.00*	325.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*25.00*	400.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	10.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	20.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.600.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			4.950.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	380.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	450.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.650.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	3.500.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*20.00*	-	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*40.00*	300.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*7.00*	70.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*10.00*	200.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	500.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*5.00*	500.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.115.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			2.555.000.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	5.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	5.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	900.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*12.00*	900.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	110.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*4.00*	150.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	1.100.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*5.00*	1.500.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						617.140.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			670.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	150.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	150.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.140.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			40.000.000,00	

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*13.00*		*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*13.00*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	250.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*5.00*	250.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	30.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*10.00*	30.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	50.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*2.00*	50.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	100.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	100.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	-	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	50.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)***				***35,87***	**11,700,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah**			**1,000,000,000.00**	***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah						7.550.000.000,00	(Desa Sanggu, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN),			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			1.000.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)*		*0*	*0*		50.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.01.0086	Revitalisasi Danau						-	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)			Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	

		Jumlah Danau yang Direvitalisasi (Danau)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)*					1.400.000.000,00	(Desa Sanggu, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Jenamas, Jenamas), (Sungai Rambo, Muara Arai, Kec. Karau Kuala), (Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara), (Marawan Lama, Kec. Dusun Utara), (Dusun Selatan), (Sababilah, Kec. Dusun Selatan), (Sanggu, Kec. Dusun Selatan), (Kalahien, Kec. Dusun Selatan), (Pararapak, Kec. Dusun Selatan), (Sungai Huruk Kecil, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan), (Sungai Kutapi, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan), (Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan), (Sungai Huruk Besar, Tanjung Jawa, Kec.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)*					-	(Kecamatan Jenamas, Tampulang, Kec. Jenamas)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03.02.2.01.0104	Pembangunan Check Dam	*Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit)*					-	(Desa Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)*					4.000.000.000,00	(Desa Muka Haji, Kec. G. b. Awai, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Sungai Telang, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Kec. G. B. Awai, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas), (Tampulang, Kec. Jenamas), (RT.020 RW.007 Kelurahan Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala), (Desa Bundar, Bundar, Kec. Dusun Utara), (Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara), (RT. 01, Gn. Bintang Awai), (Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai), (Sire, Kec. Gn. Bintang Awai), (Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan), (RT.01,02,03, Danau Sadar, Kec. Dusun Selatan), (Kalahien, Kec. Dusun Selatan), (Sungai Huruk Besar, Sungai Huruk Kecil, Sungai Kutapi, Tanjung Jawa, Kec. Dusun	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)*		*0*	*0*		850.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)*		*0*	*0*		50.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	1.000.000.000,00	*(Desa Wayun, Kec. G.B. Awai, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah		*1.00*	1.000.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun*		*0*	*0*		50.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						4.150.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Tampulang, Kec. Jenamas), (Rantau Bahuang, Kec. Jenamas), (Pendang, Kec. Dusun Utara), (Reong, Kec. Dusun Utara), (Desa Wayun, Wayun, Kec. Gn. Bintang Awai), (Danau Sadar, Kec. Dusun Selatan), (Mabuan, Kec. Dusun Selatan), (Kalahien, Kec. Dusun Selatan), (Desa Kalahien, Kalahien, Kec. Dusun Selatan), (Pararapak, Kec. Dusun Selatan), (Teluk			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)*					-	(Desa Wayun, Wayun, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)*					1.000.000.000,00	(Tampulang, Kec. Jenamas), (Rantau Bahuang, Kec. Jenamas), (Pendang, Kec. Dusun Utara), (Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)*					-	(Desa Wayun, Wayun, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)*					1.950.000.000,00	(Pendang, Kec. Dusun Utara), (Reong, Kec. Dusun Utara), (Danau Sadar, Kec. Dusun Selatan), (Desa Kalahien, Kalahien, Kec. Dusun Selatan), (Pararapak, Kec. Dusun Selatan), (Teluk Mampun, Kec. Dusun	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)*					-	(Mabuan, Kec. Dusun Selatan), (Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)*					500.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.02.0031	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	*Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi (Kawasan Rawa)*					100.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	*Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya (DI)*					200.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.02.0033	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	*Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan (DI)*					-	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)*					400.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%) (%)***				***52,35***	**17,950,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**17,040,000,000.00**	***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***

	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						17.950.000.000,00	(Desa Pararapak, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Tarusan, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Bakota, Kec. Dusun Hilir, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Bambaler, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa bantai Bambure, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Babai, Karau Kuala), (Desa Teluk Betung, Teluk Betung, Kec. Karau Kuala), (Pendang, Dusun Utara), (Desa Sei.			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			17.040.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	1.450.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan		*1.00*	540.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	*Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)*		*0.00*	*0.00*	*1000*	5.400.000.000,00	(Desa bantai Bambure, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Tarusan, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO SELATAN), (Desa Pararapak, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Bakota, Kec. Dusun Hilir, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Bambaler, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan		*1000*	10.000.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						11.100.000.000,00	(Desa Teluk Betung, Teluk Betung, Kec. Karau Kuala), (Desa Sei. Paken, Sei Paken,			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			6.500.000.000,00	

			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		*0.00*	*0.00*	*3062.00*		*(Kab.Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*3062.00*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi*					-	(Pendang, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Persentase ketersediaan sarpras persampahan (sapras yang sudah terbangun/kebutuhan sarpras di daerah) (%)***				***80,00***	**150,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00	(Kel. Pendang, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Penda Asam, Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)			Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	*Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan*					150.000.000,00	(Kel. Pendang, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Penda Asam, Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak (%) (%)***				***66,73***	**2,450,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**4,503,000,000.00**	***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.450.000.000,00	(Desa Marawan Lama, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Parigi, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO SELATAN)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			4.503.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari)*		*0.00*	*0.00*	*1175*	-	(Desa Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Marawan Lama, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Parigi, Kec. Dusun Selatan, KAB. *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan		*1175*	600.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	250.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan		*2.00*	450.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar*		*0.00*	*0.00*	*629*	2.200.000.000,00	(Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan		*629*	3.453.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						-	(KAB. BARITO SELATAN)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	

			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					**80,00**	**1,300,000,000.00**				**Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah**			**1,500,000,000.00**	
			Persentase drainase dalam kondisi baik (%)							***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.300.000.000,00	(Desa kalahien, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Marawan Lama, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Baru, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kel. Jelapat, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Gang Tempe Jl. Pembangunan, Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan)			Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			1.500.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)*	*0.00*	*0.00*	*1000*		1.300.000.000,00	(Desa kalahien, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Marawan Lama, Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Baru, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kel. Jelapat, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Gang Tempe Jl. Pembangunan, Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah		*1000*	1.500.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
7.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**					**1,50**	**5,780,000,000.00**				**Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah**			**0.00**	
			Persentase kawasan strategis yang memiliki infrastruktur permukiman dalam kondisi baik (%)							***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						5.780.000.000,00	(Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN),			Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana			-	
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)*					5.780.000.000,00	(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kel.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
8.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					**1,80**	**13,966,000,000.00**				**Peningkatan Pelayanan Publik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah**			**0.00**	
			Persentase bangunan gedung yang telah ber-IMB (%)							***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan						13.966.000.000,00	(Kecamatan Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN),			Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif,			-	

1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	*Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)*					15.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan*					10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif*					10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)*					2.300.000.000,00	(Desa Tampulang, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Danau Masura Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kec. G. B. Awai, KAB. BARITO SELATAN), (Kel. Bangkuang, Kec. Karau Kuala, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kec. Dusun Hilir, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Jenamas, Jenamas, Jenamas), (Kelurahan Rantau Kujang, Jenamas, Rantau Kujang, Kec. Jenamas), (Kantor Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir), (Pendang, Kec. Dusun Utara), (Reong, Dusun Utara, Reong, Kec. Dusun Utara), (Desa Reong, Reong, Kec. Dusun Utara), (Desa Baruang RT.01, 02, 03, Baruang, Kec. Gn. Bintang Awai), (Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan), (Kelurahan Jelapat, Jelapat, Kec. Dusun Selatan), (Kelurahan Jelapat, Dusun Selatan, Jelapat, Kec. Dusun Selatan), (Buntok Kota, Kec.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala*					-	(KAB. BARITO SELATAN), (Pendang, Kec. Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)*					20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	*Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis)*					30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*					11.026.000.000,00	(Desa Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	*Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*					505.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
9.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Persentase bangunan sesuai dengan RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan) (%)***				***1,50***	**20,544,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah**			**0.00**	***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						20.544.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala), (Pendang, Kec. Dusun Utara), (Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai, Gn. Bintang Awai), (Tabak Kanilan, Kec. Gn.			Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)*					40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata*					20.000.000.000,00	(Buntok, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala), (Pendang, Kec. Dusun Utara), (Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai, Gn. Bintang Awai), (Tabak Kanilan, Kec. Gn.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*					454.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
10.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase Jalan dalam kondisi baik (%)***				***37,57***	**58,759,888,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah**			**0.00**	***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						58.759.888.000,00	(Kec. Karau Kuala, KAB. BARITO SELATAN), (Kec. G. B. Awai, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Jenamas, KAB. BARITO SELATAN), (Kec. Jenamas, KAB. BARITO SELATAN), (Tersebar di 6 Kecamatan (menyesuaikan lokasi prioritas DAK), KAB. BARITO SELATAN), (Tersebar di 6 kecamatan, KAB.			Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						1.550.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Tersebar di 6 Kecamatan (menyesuaikan lokasi prioritas DAK), KAB. BARITO SELATAN), (Tersebar di 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO SELATAN), (Mangkatip-Dadahup, Dusun Hilir), (Desa Mahajandau-Sei Jaya-Bakota, Dusun Hilir), (Desa Maruga, Dusun Utara), (Kecamatan Dusun			Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	

			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	*Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (KM)*					4.000.000.000,00	(Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Hilir, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Jenamas, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Karau Kuala, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun (KM)*					3.809.888.000,00	(Kec. Jenamas, KAB. BARITO SELATAN), (Kab. Barito Selatan,	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)*					29.500.000.000,00	(Kec. Jenamas, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Penda Asam, KAB. BARITO SELATAN), (Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN), (Kec. Dusun Hilir: Kec.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)*					1.800.000.000,00	((Desa danau Ganting, Dusun Selatan), Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)*					500.000.000,00	(Tersebar di 6 (enam) Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)*					16.000.000.000,00	((Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas), Jenamas), ((Jalan Kertak Hamparang Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir), Dusun Hilir), ((Sungai Lunuk Desa Mahajandau, Dusun Hilir), Dusun Hilir), ((RT, 19, RT.15, dan RT.16 Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala), Karau Kuala), ((Bantai Bambure, Dusun Utara), Dusun Utara), (Desa Tarusan dan Desa Panarukan, Tarusan, Kec. Dusun Utara), (Maruga, Kec. Dusun Utara), ((RT 003-004, Gn. Bintang Awai), Gn. Bintang Awai), ((Bintang Ara, Gn. Bintang Awai), Gn. Bintang Awai), ((Patas I RT.05/06, Gn. Bintang Awai), Gn. Bintang Awai), ((Bintang ara, Gn. Bintang Awai), Gn. Bintang Awai), (Jembatan Datu Bajingkit Desa Baru, Baru, Kec. Dusun Selatan), (Desa	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)*					600.000.000,00	(Tersebar di 6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Jalan Desa malitin menuju PT.MUTU, Malitin, Kec. Karau	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)*					1.000.000.000,00	(Tersebar di 6 (enam) Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
11.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase badan usaha/masyarakat yang mendapatkan sertifikat keahlian (%)***				***50,00***	**1,400,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**1,030,500,000.00**	***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						425.000.000,00	(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			425.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	*Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	20.000.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	20.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi*		*0.00*	*0.00*	*100*	75.000.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	75.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						65.000.000,00				Peningkatan Pelayanan Publik			65.000.000,00	

			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	*Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan*		*0.00*	*0.00*	*2*	20.000.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	20.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.01.0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	*Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga)*		*0.00*	*0.00*	*2*	10.000.000,00	*(Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	10.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	25.000.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan*		*0.00*	*0.00*	*1*	10.000.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	10.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*100.00*	200.000.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	200.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						402.700.000,00				Peningkatan Pelayanan Publik			107.200.000,00	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Lavanan Informasi Jasa Konstruksi	*Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)*		*0.00*	*0.00*	*10*	25.000.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelavanan Publik		*0.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	310.500.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelavanan Publik		*0.00*	15.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	*Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*3*	25.000.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelavanan Publik		*0.00*	25.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	*Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)*		*0.00*	*0.00*	*10*	42.200.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelavanan Publik		*0.00*	42.200.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)						104.000.000,00				Peningkatan Pelavanan Publik			30.000.000,00	
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	*Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	29.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	15.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	75.000.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	15.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						468.300.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			468.300.000,00	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						63.300.000,00				Peningkatan Pelayanan Publik			63.300.000,00	

			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		*0.00*	*0.00*	*25*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	*Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha*		*0.00*	*0.00*	*2*	385.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelavanan Publik		*0.00*	385.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	*Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	20.000.000,00	*(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	20.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
12.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW (%)***				***50,00***	**2,440,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik**			**2,440,000,000.00**	***Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						1.770.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO			Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			1.770.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota*		*0.00*	*0.00*	*37*	1.730.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO *(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif		*38*	1.730.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat*		*0.00*	*0.00*	*1*	40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif		*2*	40.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						140.000.000,00				Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	*Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang*		*0*	*0*		140.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						530.000.000,00	(Desa Sababilah dan Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO SELATAN), (KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik			670.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*		*0.00*	*0.00*	*87*	530.000.000,00	(Desa Sababilah dan Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN), (KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO *(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*88*	670.000.000,00	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
	JUMLAH							**153.649.165.028,10**							46.203.500.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS PERUMAHAN, KAWASANAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12,301,362,212.00**							**26,214,062,000.00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**12,301,362,212.00**							**26,214,062,000.00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**8,806,362,212.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**12,174,062,000.00**	***Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan***
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						39.465.640,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			47.000.000,00	
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*4.00*	*4.00*	*4.00*	35.165.640,00	*(Sababilah, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*4*	37.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0*	*0*		4.300.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			10.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*3.00*	*3.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*					*3*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.678.424.412,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			5.250.000.000,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0*	*0*		4.506.670.212,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			5.000.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*40.00*	*42.00*	*42.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*					*42.00*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	171.754.200,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*1*	250.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						35.689.500,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	4.036.500,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*1.00*	20.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						19.559.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			30.000.000,00	

		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1.00*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12.094.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			50.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1.00*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					95.426.520,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			335.000.000,00	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					37.490.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			150.000.000,00	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*4.00*	*2.00*	*1.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*3.00*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					34.387.520,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			35.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*2*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					23.549.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			150.000.000,00	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		*1.00*	*2.00*	*3.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*10*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.750.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			489.750.000,00	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			12.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*2*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			35.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*4*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			15.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*4*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			25.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*4*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					24.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			34.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*4.00*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					18.750.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			18.750.000,00	

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0*	*0*		-		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	150.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*2.00*	250.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik		*1*	100.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						45.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			2.025.240.000,00	
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*		-	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik		*1*	450.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*		-	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*3*	100.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*3.00*	*2.00*	25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*12.00*	250.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*24.00*	*1.00*	20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik		*6*	125.240.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*		-	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*3*	1.100.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.473.412.390,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			3.730.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	3.997.500,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*2*	10.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						958.814.890,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik			1.200.000.000,00	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*12.00*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*2*	*1*	*1*	10.600.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*2*	20.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	2.500.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*12*	2.500.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144.193.750,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			197.072.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*4*	*4*	*4*	39.193.750,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*4*	40.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*4*	*4*	*2*	70.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Publik		*4*	95.072.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1*	*1*	*1*	35.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Sababilah, Kec. Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*1*	62.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase Warganegara korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warganegara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni (%)***				***100***	**310,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**3,120,000,000.00**	***Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan***
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						65.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			290.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	*Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	-	(KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Peningkatan Pelayanan Publik		*1*	100.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	*Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Peningkatan Pelayanan Publik		*1*	50.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*

	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	25.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	40.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	-	(KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Peningkatan Pelayanan Publik		*1*	100.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						225.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Rangga Ilung, Kec. Jenamas),			Peningkatan Pelayanan Publik			2.780.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)*		*0.00*	*1.00*		-	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Peningkatan Pelayanan Publik		*941.00*	1.000.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	210.000.000,00	(Tampijak, Kec. Karau Kuala), (Pendang, Kec. Dusun Utara), (Kayumban RT 001-005, Gn. Bintang Awai), (Hilir Seper, Kec. Dusun Selatan), (Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan), (Muara Talang, Kec. Dusun Selatan), (Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan), (Baru, Kec. Dusun Selatan), (Penda Asam, Kec. Dusun Selatan) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelayanan Publik		*135.00*	1.000.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	15.000.000,00	(Bintang Ara, Kec. Gn. Bintang Awai), (Hilir Seper, Kec. Dusun Selatan) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Peningkatan Pelayanan Publik		*2*	780.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						-							-	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)*		*0*	*0*		-		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus	*Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)*		*0*	*0*		-		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			50.000.000,00	

	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*		*2*	*2*	*2*	20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Bariito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	Peningkatan Pelayanan Publik		*2*	50.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani (%)***				***0,14***	**625,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**820,000,000.00**	***Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan***
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						100.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			100.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	100.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan		*1*	100.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						525.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			720.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)*		*0.00*	*1*	*4*	90.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan		*10*	220.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	*Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	400.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan		*4*	400.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	35.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan		*1*	100.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***Menurunnya jumlah status permukiman kumuh (Indeks)***				***Kumuh Menengah***	**590,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**4,000,000,000.00**	***Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan***
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						590.000.000,00				Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			4.000.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)*		*0.00*	*3*	*4*	590.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah		*200*	4.000.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*

5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)***				***67,50***	**1,970,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah**			**6,100,000,000.00**	***Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan***
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						1.970.000.000,00				Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			6.100.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)*		*1*	*2*	*2*	170.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah		*2*	300.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*		*4*	*4*	*4*	1.400.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah		*4*	5.000.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan*		*2*	*2*	*2*	50.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah		*2*	100.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	350.000.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah		*2.00*	700.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**224,380,000.00**							**395,000,000.00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**224,380,000.00**							**395,000,000.00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***persentase jumlah penanganan konflik pertanahan (%)***				***50***	**42,710,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**60,000,000.00**	***Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan***
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						42.710.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			60.000.000,00	
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		*1*	*1*	*1*	40.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik		*1*	50.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan*
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.710.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan Pelayanan Publik			10.000.000,00	

			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*1*	*1*	*1*		*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)***				***1,5***	**0.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan***
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						-	(Rikut Jawu Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Sababilah, Kec. Dusun Selatan)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)*					-	(Rikut Jawu Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Sababilah, Kec. Dusun Selatan)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
3.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat (%)***				***0,19***	**80,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**150,000,000.00**	***Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan***
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			150.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	*Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	60.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Publik		*1*	100.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	20.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Publik		*1.00*	50.000.000,00	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)*					-	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
4.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	***Persentase Pemanfataan Tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)***				***80***	**94,670,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**170,000,000.00**	***Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan***
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah						94.670.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			170.000.000,00	
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah						14.670.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Publik			20.000.000,00	

			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara						80.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Publik			150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
5.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						**7,000,000.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**15,000,000.00**	
			persentase kesesuaian penatagunaan tanah terhadap RTRW (%)				***15***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***						***Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan***
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						7.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			15.000.000,00	
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						7.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Publik			15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan*
	J U M L A H							**12.525.742.212,00**							26.609.062.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11,811,493,296.00**							**0.00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11,811,493,296.00**							**0.00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)***				***1***	**7,105,373,846.00**				**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran***
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.270.373.846,00	(KAB. BARITO SELATAN), (BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					6.180.373.846,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*					15.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*					10.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*					45.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						635.000.000,00	(buntok, KAB. BARITO SELATAN), (BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					40.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					25.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					30.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						250.000.000,00	(buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*							*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					40.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*					250.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN), (BUNTOK, Dusun Selatan)							-	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					15.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					120.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*					15.000.000,00	(BUNTOK, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)							-	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					25.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					25.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%)***				***1 Tahun***	**2,887,275,100.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**				**0.00**	***Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran***
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.431.466.100,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				-	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*					420.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)*					573.446.100,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)*					168.020.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*

	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*					270.000.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						1.455.809.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)*					179.422.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*					184.467.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*					1.091.920.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana (%)***				***1 Tahun***	**1,818,844,350.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***					**0.00**	***Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran***
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.818.844.350,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya*					138.328.000,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*					104.057.900,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal*					501.609.300,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)*					1.074.849.150,00	(BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*
	J U M L A H							**11.811.493.296,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5,618,699,221.00**							**320,000,000.00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5,618,699,221.00**							**320,000,000.00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**4,006,015,621.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.377.020,00	(kabupaten barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*					25.377.020,00	(kabupaten barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.810.203.991,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					1.787.134.091,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*					23.069.900,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						108.842.960,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					50.000.000,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*					8.842.960,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*					50.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						381.341.650,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (kecamatan dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN), (kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					5.012.650,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					35.000.000,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					7.289.000,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					5.040.000,00	(kecamatan dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					79.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelavanan Publik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*					250.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						300.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)				Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					300.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						820.250.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)				Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					5.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					99.250.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					716.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelavanan Publik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						560.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN)				Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*					300.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnva	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					10.000.000,00	(Kota Buntok, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelavanan Publik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*				250.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***1. Persentase Penanganan Pra Bencana. 2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana. 3. Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan. 4. Persentase pendampingan penanganan pasca bencana. 5. Terselenggaranya SDM terampil. 6. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan (%)***				***100***	**1,317,765,750.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**320,000,000.00**	***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					320.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			320.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)*	*0.00*	*0.00*	*1*	300.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif		*0.00*	300.000.000,00	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*	*0.00*	*0.00*	*131606.00*	20.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN) *(daerah rawan bencana, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif		*0.00*	20.000.000,00	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					397.765.750,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)*				20.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)*				242.765.750,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)*				30.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelavanan Publik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	*Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dokumen)*				25.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)*				80.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						360.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN), (daerah terdampak bencana di dalam kabupaten barito selatan hibah mesin untuk desa kalahien dan desa mabuan , KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*					230.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*					130.000.000,00	(daerah terdampak bencana di dalam kabupaten barito selatan hibah mesin untuk desa kalahien dan desa mabuan , KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						240.000.000,00	(kec. dusun selatan kec. dusun utara kec. gunung bintang awai kec. karau kuala kec. dusun hilir kec. jenamas, KAB. BARITO SELATAN), (Kec. Dusun Selatan - Desa Pamait - Desa Pararapak - Desa Sanggu Kec. Dusun Utara - Kelurahan Pendang - Desa Majundre - Desa Tamparak - Desa Sungai Telang Kec. Dusun Hilir - Kelurahan Mengkatip - Desa Batilap - Desa Batampang - Desa Mahajandau - Desa Sungai Jaya, KAB. BARITO SELATAN), (kota			Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana*					100.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Kec. Dusun Selatan - Desa Pamait - Desa Pararapak - Desa Sanggu Kec. Dusun Utara - Kelurahan Pendang - Desa Majundre - Desa Tamparak - Desa Sungai Telang Kec. Dusun Hilir - Kelurahan Mengkatip - Desa Batilap - Desa Batampang - Desa Mahajandau - Desa Sungai Jaya, KAB. BARITO	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia*					40.000.000,00	(kec. dusun selatan kec. dusun utara kec. gunung bintang awai kec. karau kuala kec. dusun hilir kec. jenamas, KAB.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*					100.000.000,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase layanan Respon cepat (Respon Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran (%)***				***100***	**294,917,850.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						294.917.850,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif			-	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	294.917.850,00	(kota buntok, KAB. BARITO SELATAN) *(seluruh wilayah kabupaten Barito Selatan yang mengalami kejadian KARHUTLA, KAB.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif		*0.00*	-	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
	J U M L A H							**5.618.699.221,00**							320.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8,246,448,734.00**							**0.00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**8,246,448,734.00**							**0.00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**6,482,348,734.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					50.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.262.348.734,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					4.127.348.734,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*					50.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*					85.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						25.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					25.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						80.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*					40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						685.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*					60.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					115.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*					400.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.105.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					5.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					90.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*					15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					995.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						260.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					50.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

	1.06.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					75.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					70.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					50.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi						15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)*					15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Prosentase PMKS yang Meningkat Kemampuannya (%)***				***85,05***	**234,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)						142.500.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	*Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)*					142.500.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						91.500.000,00	(Kabupaten Barito Selatan , KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)*					33.500.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)*					58.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan , KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi (%)***				***24,71***	**726,300,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						201.200.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*					97.200.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*					25.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*					30.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota*					49.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						525.100.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*					525.100.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (KPM) (%)***				***80,05***	**529,800,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						50.000.000,00	(Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota*					50.000.000,00	(Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						479.800.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)*					100.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota*					180.800.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*					149.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*					50.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Prosentase Korban Bencana yang ditangani (%)***				***63***	**133,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***

	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					108.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Muara Talang, Dusun Selatan)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)* *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*		*0*	*0*		30.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* *Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*					78.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					25.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*					25.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Prosentase Taman Makam yang dipelihara (%)***				***100***	**141,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						141.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)*					141.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**90,389,402,077.10**							**0.00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**90,389,402,077.10**							**0.00**	
1.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Prosentase Desa Berkembang (%)***				***75***	**70,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah**			**0.00**	***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						70.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Tabak Kanilan RT. 06, Gn. Bintang Awai), (Desa Wayun, Gn. Bintang Awai), (Desa Muka Haji, Gn. Bintang Awai), (RT.02,RW.01, Gn. Bintang Awai), (Bintang Ara, Gn.			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa						70.000.000,00				Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		*0*	*0*				*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Prosentase Desa yang Bekerjasama (Mou, Perjanjian Kerjasama) (%)***				***20***	**100,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang**			**0.00**	***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						100.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang			-	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)*					100.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Prosentase Aparatur Desa Terlatih (%)***				***58***	**88,919,402,077.10**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						88.919.402.077,10	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)*					200.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)*					200.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)*					85.559.402.077,10	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)*					1.460.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)*					200.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)*					150.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)*					100.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)*					300.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						600.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)*					150.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif (%)***				***54***	**1,300,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang**			**0.00**	***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.300.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)*					100.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*					150.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)*					100.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*					-	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)*					100.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*					150.000.000,00	(Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)*					100.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*					600.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*
	J U M L A H							**98.635.850.811,10**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4,560,383,549.00**							**1,933,030,000.00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4,560,383,549.00**							**1,933,030,000.00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (%)***				***4***	**4,022,613,549.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**774,850,000.00**	
			Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)				***80***									***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok , KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.029.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					2.820.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*					20.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*					189.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						15.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*100*	*1*	*2*		*(Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*				*0.00*		*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12.071.149,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*100*	*95*	*1*	12.071.149,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN) (Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*2*	-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						193.931.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok , KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan , KAB. BARITO SELATAN)						150.000.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					6.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		46.847.000,00		*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*2*	*1*	*95*	10.000.000,00	(Buntok , KAB. BARITO SELATAN) *(Dususn Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*100*	-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					4.900.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					9.980.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*10*	116.204.000,00	(Barito Selatan , KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*11*	150.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*					30.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						626.578.400,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)						534.900.000,00	

	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					10.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*95*	*0.00*	*1*	82.578.400,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN) *(Dususn Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*2*	-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*34.00*	534.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN) *(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*34.00*	534.900.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.950.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						29.950.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*9*	27.950.000,00	*(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*9*	27.950.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*43*	2.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN) *(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*44*	2.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					1.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.01.2.13	Penataan Organisasi						55.083.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			60.000.000,00	
	2.07.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*10*	55.083.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*11*	60.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Indeks Perencanaan Tenaga Kerja (%)***				***80***	**70,000,000.00**		***DANA UMUM***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**75,000,000.00**	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						70.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			75.000.000,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	70.000.000,00	*(Semua Kecamatan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan		*1*	75.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**90,760,000.00**				**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**905,000,000.00**	

			Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)				***80***			***DANA UMUM***						***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						55.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			745.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*250.00*	35.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN) *(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan		*300.00*	685.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)*		*80.00*	*75.00*	*5.00*	20.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN) *(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan		*6.00*	60.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						10.760.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			50.000.000,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)*		*80.00*	*75.00*	*6.00*	10.760.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan		*7.00*	50.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						10.000.000,00				Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)*		*0*	*0*		10.000.000,00		*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			110.000.000,00	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)*		*80*	*75*	*1*	15.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN) *(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan		*2*	110.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***80***	**187,000,000.00**		***DANA UMUM***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**15,000,000.00**	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						47.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			15.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja						15.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	

			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi						*DANA UMUM*						*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*					10.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan*					12.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*		*0.00*	*0.00*	*20*	10.000.000,00	*(Semua Kecamatan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan		*25*	15.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00				Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	*Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku*		*0*	*0*		10.000.000,00		*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						100.000.000,00	(Kab. barsel, KAB. BARITO SELATAN), (Kab. Barsel, KAB.			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*					15.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*					15.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*					70.000.000,00	(Kab. barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00				Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya*		*0*	*0*		10.000.000,00		*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	*Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)*		*0*	*0*		10.000.000,00		*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	*Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)*		*2.00*	*1.00*	*8*	10.000.000,00	*(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah		*10*	-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***80***	**190,010,000.00**		***DANA UMUM***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**163,180,000.00**	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						58.180.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok , KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			68.180.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*		*0.00*	*0.00*	*10*	5.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN) *(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan		*15*	20.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)*					5.000.000,00	(Buntok , KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*		*0.00*	*0.00*	*5*	48.180.000,00	*(Semua Kecamatan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan		*6*	48.180.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						131.830.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok , KAB. BARITO SELATAN)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			95.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)*		*0.00*	*0.00*		78.950.200,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*1*	79.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)*					37.879.800,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	*Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)*		*0.00*	*0.00*	*85*	7.500.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN) *(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*85*	8.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)*		*0.00*	*0.00*	*4*	7.500.000,00	(Buntok , KAB. BARITO SELATAN) *(Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*5*	8.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**137,880,000.00**							**30,000,000.00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**137,880,000.00**							**30,000,000.00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana (%)***				***80***	**30,000,000.00**		***DANA UMUM***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						30.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)*					30.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**30,000,000.00**		***DANA UMUM***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**30,000,000.00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00	(eks. UPT Baruang (Desa Wungkur Baru) eks. UPT Gagutur (Desa Marga Jaya) Eks UPT Sarimbuah (Desa Ruhing Raya) Eks UPT Malungai (Desa Malungai), KAB. BARITO SELATAN), (Eks. UPT Baruang (Desa Wungkur Baru) Eks UPT Gagutur (Desa Marga Jaya), KAB. BARITO			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			30.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	*Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)*		*0.00*	*0.00*	*2*	30.000.000,00	(Eks. UPT Baruang (Desa Wungkur Baru) Eks UPT Gagutur (Desa Marga Jaya), KAB. BARITO SELATAN), (eks. UPT Baruang (Desa Wungkur Baru) eks. UPT Gagutur (Desa Marga Jaya) Eks UPT Sarimbuah (Desa Ruhing Raya) Eks UPT Malungai (Desa Malungai), KAB. *(Semua Kecamatan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*1*	30.000.000,00	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**77,880,000.00**		***DANA UMUM***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	

	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						77.880.000,00	(Kab. barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)*					37.880.000,00	(Kab. barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)*		*0*	*0*		40.000.000,00		*DANA UMUM*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	J U M L A H							**4.698.263.549,00**							1.963.030.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7,245,053,093.00**							**0.00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**212,831,000.00**							**0.00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Point KLA (poin)***				***800***	**50,000.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000,00	(Jln Pelita Raya Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan)						-	
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					50.000,00	(Jln Pelita Raya Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan/Memiliki Focal Point PUG (%)***				***100***	**15,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
			Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan/Memiliki Focal Point PUG (%)				***100***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***						***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00	(Provinsi, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*					7.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*					8.000.000,00	(Provinsi, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*

3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan (%)***				***100***	**32,125,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						100.000,00	(Kecamatan/Kelurahan/ Desa, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*					100.000,00	(Kecamatan/Kelurahan/ Desa, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						22.025.000,00	(Provinsi, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan/Kelurahan/ Desa, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)*					22.000.000,00	(Kecamatan/Kelurahan/ Desa, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*					25.000,00	(Provinsi, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*					10.000.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Jumlah Persentase Pelatihan Usaha Perempuan (Orang) (%)***				***100***	**85,050,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00	(Kabupaten dan Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						75.000.000,00	(Kabupaten dan Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*					25.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*					25.000,00	(Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*					10.000.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Dokumen Hasil Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan (Dokumen)***				***1***	**10,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00	(Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**20,100,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000,00	(Kabupaten/Kecamatan/ Desa, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000,00	(Kabupaten/Kecamatan/ Desa, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						20.000.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*					10.000.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase Pelayanan Kasus Tindak Kekerasan Anak (%) (%)***				***38,20***	**50,506,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	*Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota (Dokuman)*					10.000.000,00	(Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						40.456.000,00	(Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)*					40.456.000,00	(Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000,00	(Provinsi / Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	*Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (Orang)*					50.000,00	(Provinsi / Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**7,032,222,093.00**							**0.00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4,456,869,093.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	

										PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.485.743.093,00	(Buntok, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					3.344.043.093,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*					141.700.000,00	(Buntok, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						335.000.000,00	(Buntok, Kabbupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					65.000.000,00	(Buntok, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*					255.000.000,00	(Buntok, Kabbupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.14.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)*					15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						450.926.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					70.926.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						380.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.100.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*					130.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					20.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					100.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					20.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.01.2.13	Penataan Organisasi						100.000,00	(UPTD PPA Alamat Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.14.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)*					100.000,00	(UPTD PPA Alamat Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Angka kelahiran Total Fertility rate (TFR) (%)***				***2,20***	**159,200,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						45.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (15 Kampung KB, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan / desa, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*					10.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal						10.000.000,00	(Kecamatan / desa, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal (Kegiatan)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	*Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*					25.000.000,00	(15 Kampung KB, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						114.200.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (15 Kampung KB, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	*Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)*					10.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	*Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)*					10.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)*					94.200.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%) (%)***				***7,40***	**731,553,000.00**		***DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						240.850.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)*					240.850.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOKB-KB, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						344.800.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (93 Desa/Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)*					269.800.000,00	(93 Desa/Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*

	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	*Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)*					75.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						145.903.000,00	(14 Faskes, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)*					12.600.000,00	(14 Faskes, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)*					122.703.000,00	(14 Faskes, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	*Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)*					100.000,00	(14 Faskes, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	*Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kab/Kota)*					10.500.000,00	(14 Faskes, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**1,684,600,000.00**		***DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1.474.550.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (86 Desa 7 Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN), (Seluruh Desa Stunting yang Ditetapkan, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir), (Dusun Selatan, Pararapak, Kec. Dusun Selatan), (Desa Pararapak Kecamatan Dusun Selatan, Pararapak, Kec. Dusun					-	
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)						180.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Seluruh Desa Stunting yang Ditetapkan, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)*					1.254.300.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOKB-KB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*					10.050.000,00	(86 Desa 7 Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*					100.000,00	(Dusun Selatan, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)*					30.100.000,00	(Buntok, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir), (Desa Pararapak Kecamatan Dusun Selatan, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						210.050.000,00	(Kabupaten, Provinsi, Nasional, Luar Wilayah, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok dan Palangka Raya, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan/Desa, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Palangka Raya, Luar Wilayah, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, Dalam Provinsi dan Luar provinsi, Luar wilayah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi						20.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, Dalam Provinsi dan Luar provinsi, Luar wilayah, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)*					170.050.000,00	(Palangka Raya, Luar Wilayah, KAB. BARITO SELATAN), (Kecamatan/Desa, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten, Provinsi, Nasional, Luar Wilayah, KAB. BARITO SELATAN)	*DAK Non Fisik-BOKB-KB, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Laporan)*					20.000.000,00	(Buntok dan Palangka Raya, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan*
	J U M L A H							**7.245.053.093,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18,920,313,584.00**							**0.00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**18,920,313,584.00**							**0.00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***80***	**18,130,313,584.00**				**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						265.000.000,00	(Di 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, Dusun Selatan)						-	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					150.000.000,00	(Buntok, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*					115.000.000,00	(Di 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.607.713.584,00	(Di 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok Kota, Dusun Selatan)						-	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					14.482.713.584,00	(Di 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					50.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran*					75.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						65.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)						-	
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					65.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						446.600.000,00	(Di 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*					421.600.000,00	(Di 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*					25.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*

	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.784.000.000,00	(Di 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok Kota, Dusun Selatan)						-	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					20.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					200.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*					1.333.000.000,00	(Di 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					25.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					6.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					50.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					150.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						350.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)						-	
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					250.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					100.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						432.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)						-	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					2.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					180.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					250.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						180.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)						-	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)						-	

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					70.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					100.000.000,00	(Buntok Kota, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	***Persentase terlaksananya program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan (%)***				***20***	**50,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa pararapak, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)*					50.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Kontribusi penguatan cadangan pangan (%) (%)***				***22***	**491,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						296.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)*					262.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)*					34.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						195.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)*					170.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)*					25.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Penanganan daerah rawan pangan (%) (%)***				***17***	**224,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						60.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						60.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						164.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)							-	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*					164.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%) (%)***				***20***	**25,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**				**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)							-	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)*					25.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5,328,845,434.00**								**0.00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1,100,200,000.00**								**0.00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun) (Ton/Tahun)***				***6965.76***	**301,600,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**				**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						100.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kelurahan Rantau Kujang, Rantau Kujang, Kec. Jenamas), (Desa Rantau bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas), (Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir), (Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan), (Desa Tanjung Jawa,							-	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	*Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)*					20.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)*					50.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kelurahan Rantau Kujang, Rantau Kujang, Kec. Jenamas), (Desa Rantau bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas), (Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir), (Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan), (Desa Tanjung Jawa,	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)*					30.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*

	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						151.600.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Pendang, Dusun Utara), (Tarusan, Pendang , Bundar dan Maruga, Dusun Utara), (Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara), (Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan), (Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)						-	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)*					96.600.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Pendang, Dusun Utara), (Tarusan, Pendang , Bundar dan Maruga, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)*					30.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	*Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)*					25.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara), (Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan), (Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						40.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Pinungku, Lehai, Kec. Dusun Hilir)						-	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)*					40.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	*Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)*					10.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) (Ton/Tahun)***				***9118.61***	**568,600,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						328.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Mahajandau, Dusun Hilir), (Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir), (Pendang,Bundar, Talekoi, Rampa Mea dan Tamparak Layung, Dusun Utara), (Talekoi, Dusun Utara), (Bundar, Kec. Dusun Utara), (Desa Teluk Mampun,						-	

	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)*					280.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Mahajandau, Dusun Hilir), (Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir), (Pendang,Bundar, Talekoi, Rampa Mea dan Tamparak Layung, Dusun Utara), (Talekoi	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)*					20.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Bundar, Kec. Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	*Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)*					28.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						240.600.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas), (Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir), (Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)						-	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*					20.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)*					78.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas), (Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)*					49.800.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)*					17.800.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	*Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)*					40.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						35.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (Ha)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%) (%)***				***100***	**100,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						100.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)*					100.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun) (Ton/Tahun)***				***3626.19***	**130,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						25.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)*					25.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						58.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit)*					58.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						47.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)*					20.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*					27.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4,228,645,434.00**							**0.00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1,921,544,834.00**				**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	

			Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				***19.30***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***					***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						345.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Marawan Baru, Dusun Utara), (Desa Gunung Rantau, Dusun Utara), (Reong, Marawan Lama dan Bantai Bambure, Dusun Utara), (Tarusan dan Pendang, Dusun Utara), (Desa Kalahien, Dusun Selatan), (Desa Tanjung Jawa, Dusun Selatan), (Teluk Mampun, Dusun Selatan), (Desa Teluk					-	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*					195.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Marawan Baru, Dusun Utara), (Reong, Marawan Lama dan Bantai Bambure, Dusun Utara), (Tarusan dan Pendang, Dusun Utara), (Desa Kalahien, Dusun Selatan), (Teluk Mampun, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)*					150.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Gunung Rantau, Dusun Utara), (Desa Teluk Mampun, Dusun Selatan), (Desa Tanjung Jawa, Dusun Selatan), (Desa Kalahien, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						393.130.200,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Maruga dan Bundar, Dusun Utara), (Tarusan, Tamparak Layung, Talekoi, Bantai Bambure, Rampa Mea dan Maruga, Dusun Utara), (Rampa Mea, Talekoi, Hulu Tampang, Bantai Bambure dan Rampa Mea, Dusun Utara), (Desa Pamangka, Dusun Selatan), (Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa,						-	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)*					172.300.200,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Rampa Mea, Talekoi, Hulu Tampang, Bantai Bambure dan Rampa Mea, Dusun Utara), (Tarusan, Tamparak Layung, Talekoi, Bantai Bambure, Rampa Mea dan Maruga, Dusun Utara), (Desa Pamangka, Dusun Selatan), (Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa,	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)*					80.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					- *Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*

	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))*					140.830.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Maruga dan Bundar, Dusun Utara), (Desa Pamangka, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						130.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Maruga, Pendang , Bantai Bambure, Danau Bambure, Bundar, Marawan Baru dan Rampa Mea, Dusun Utara), (Malungai Raya, Gn. Bintang Awai), (Desa Ngurit, Gn. Bintang Awai), (Pamangka, Kec. Dusun Selatan), (Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan), (Desa Pararapak, Pararapak						-	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)*					100.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Maruga, Pendang , Bantai Bambure, Danau Bambure, Bundar, Marawan Baru dan Rampa Mea, Dusun Utara), (Malungai Raya, Gn. Bintang Awai), (Desa Ngurit, Gn. Bintang Awai), (Pamangka, Kec. Dusun Selatan), (Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan), (Desa Pararapak, Pararapak.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)*					30.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						617.595.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Selatan, Dangka, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)*					182.670.000,00	(Dusun Selatan, Dangka, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)*					45.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)*					389.925.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*

	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						435.819.634,00	(kab.barito selatan,dusun selatan, dusun utara, gunung bintang awai, KAB. BARITO SELATAN), (D3 Suka Karya Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas), (Reong,Bantai Bambure, Talekoi, Danau Bambure, Hulu Tampang, Panarukan dan Marawan Baru, Dusun Utara), (Talekoi, Rampa Mea, Marawan Baru, Maruga dan Tamparak Layung, Dusun Utara), (Marawan Lama, Kec. Dusun Utara), (Marawan Baru, Kec. Dusun Utara), (Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara), (Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara), (Malungai Raya, Kec. Gn. Bintang Awai), (Desa Tanjung jawa, Dusun Selatan), (Sanggu, Kec. Dusun						-	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)*					435.819.634,00	(kab.barito selatan,dusun selatan, dusun utara, gunung bintang awai, KAB. BARITO SELATAN), (D3 Suka Karya Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas), (Talekoi, Rampa Mea, Marawan Baru, Maruga dan Tamparak Layung, Dusun Utara), (Reong,Bantai Bambure, Talekoi, Danau Bambure, Hulu Tampang, Panarukan dan Marawan Baru, Dusun Utara), (Marawan Lama, Kec. Dusun Utara), (Marawan Baru, Kec. Dusun Utara), (Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara), (Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara), (Malungai Raya, Kec. Gn. Bintang Awai), (Desa Tanjung jawa, Dusun Selatan), (Sanggu, Kec. Dusun	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan***				***3***	**251,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						100.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Talekoi, Kec. Dusun Utara), (Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara), (Kalahien, Kec. Dusun Selatan), (RT I, RT II, dan RT III Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)						-	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						40.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kalahien, Kec. Dusun Selatan), (RT I, RT II, dan RT III Desa Telang Andrau, Telang Andrau,						-	

			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*					60.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Talekoi, Kec. Dusun Utara), (Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						151.000.000,00	(barito selatan, dusun hilir, dusun utara, KAB. BARITO SELATAN), (6 kecamtan, KAB. BARITO SELATAN), (UPT-BPP, Karau Kuala), (Marawan Lama - Duruyan, Dusun Utara), (Reong, Bundar, Talekoi, Marawan Lama, Bantai Bambure dan Tamparak, Dusun Utara), (Persawahan Duruyan Ranjak, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara), (jalan Usaha Tani Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara), (Marawan Baru, Kec. Dusun Utara), (Kayumban RT 004, Gn. Bintang Awai), (Desa Pararapak., Pararapak,						-	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*					100.000.000,00	(6 kecamtan, KAB. BARITO SELATAN), (Reong, Bundar, Talekoi, Marawan Lama, Bantai Bambure dan Tamparak, Dusun Utara), (Persawahan Duruyan Ranjak, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara), (jalan Usaha Tani Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara), (Marawan Baru, Kec. Dusun Utara), (Desa Pararapak., Pararapak. Kec. Dusun	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*					51.000.000,00	(barito selatan, dusun hilir, dusun utara, KAB. BARITO SELATAN), (UPT-BPP, Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase populasi hewan yang telah di vaksin (%)***				***15***	**100,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)*					50.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*

	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						50.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)*					50.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Penanganan OPT tanaman pangan dan hortikultura yang tertanggulangi akibat bencana (%)***				***10***	**20,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						20.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Pararapak., Pararapak, Kec. Dusun Selatan)						-	
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)*					20.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa Pararapak., Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi (%)***				***100***	**30,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	*Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)*					30.000.000,00	(6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase kelompok tani yang naik kelas (pemula, lanjut, madya, utama)***				***10***	**1,906,100,600.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan***
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						1.906.100.600,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara), (Desa Pamangka, Dusun Selatan), (Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan), (Desa tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan), (Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan), (Desa Telang Andrau, Telang Andrau						-	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)*					1.420.909.800,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						178.838.000,00	(6 kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara), (Desa Pamangka, Dusun Selatan)						-	

			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)*					306.352.800,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Desa tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan), (Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan), (Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan), (Desa Telang Andrau., Telang Andrau, Kec.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan*
	J U M L A H							**24.249.159.018,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12,658,798,386.00**							**0.00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**12,658,798,386.00**							**0.00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**5,666,798,386.00**				**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						230.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	100.000.000,00	(Sanggu, KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	70.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.977.447.536,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*41.00*	3.747.447.536,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*6.00*	180.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*

	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran*		*0.00*	*0.00*	*19.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						55.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	30.000.000,00	*(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						179.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*42.00*	79.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*6.00*	90.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						415.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*

	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	35.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	15.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	15.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	45.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*13.00*	40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*85.00*	190.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN *(Kab. Barito Selatan Dan Luar Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	35.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						740.350.850,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	2.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*7.00*	240.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*28.00*	498.350.850,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*5*	20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**400,000,000.00**				**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	
			Persentase jumlah perencanaan lingkungan hidup yang terlaksana (%)				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						-	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota						-	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						400.000.000,00							-	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						400.000.000,00							-	
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dlnas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**830,000,000.00**				**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	
			Persentase pencemaran yang dapat ditanggulangi (jumlah penanggulangan yang di lakukan/jumlah kasus pencemaran yang terjadi) (%)				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						640.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Parigi, Desa Kalahien, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Parigi, Kalahien, Kec. Dusun Selatan)						-	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						70.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						70.000.000,00	(Dusun Parigi, Desa Kalahien, KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Parigi, Kalahien, Kec. Dusun Selatan)						-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						500.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						95.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						70.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						95.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran						25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi						70.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**80,000,000.00**				**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	
			Persentase kehati yang terpelihara (%)				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						80.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan						20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**55,000,000.00**				**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	
			Persentase penanganan limbah B3 (%)				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						35.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3						25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	

	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)***				***40,63***	**155,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						155.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*		*0.00*	*0.00*	*7.00*	50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	55.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	*Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG**	***Persentase jumlah MHA, kearifan lokal yang telah ditetapkan (%)***				***25***	**56,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						28.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	28.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						28.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						28.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Lingkungan Hidup*
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase masyarakat yang peduli lingkungan hidup (%)***				***25***	**86,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						86.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	30.000.000,00	*(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	28.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	28.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase penghargaan terhadap pengelola lingkungan hidup (%)***				***25***	**30,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Lembaga)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dlnas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup (%) (%)***				***100***	**75,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						75.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	35.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dlnas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dlnas Lingkungan Hidup, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*

11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Volume timbulan sampah yang terangkut ke TPA (%)***				***74,59***	**5,225,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Lingkungan Hidup***
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						5.215.000.000,00	(Desa Sababilah, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*		*0.00*	*0.00*		4.425.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	500.000.000,00	*(Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*20.00*	60.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	*Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	*Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	*jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)*		*0.00*	*0.00*	*9025.00*	160.000.000,00	(Desa Sababilah, KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sababilah, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Dinas Lingkungan Hidup, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*	-	*Dinas Lingkungan Hidup*
	JUMLAH							**12.658.798.386,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6,024,129,696.00**							**0.00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**6,024,129,696.00**							**0.00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5,270,816,396.00**				**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	
			Persentase cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (%)				***98***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)				***98***									***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						121.300.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					2.100.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*					3.100.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*					2.100.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*					3.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*					2.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)*					33.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*					75.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.178.027.876,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	

	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					3.047.527.876,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*					105.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					4.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*					4.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*					2.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*					15.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						18.500.000,00	(Buntok Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*					2.000.000,00	(Buntok Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*		*0*	*0*		3.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					5.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					6.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*					2.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						113.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	

	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					50.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*					3.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*					2.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*					57.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*					-		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.167.588.520,00	(Luar Daerah dan Dalam Daerah Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					7.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		319.800.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*					7.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*					40.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		9.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					5.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)*					5.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					20.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		*0*	*0*		435.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*					318.788.520,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Luar Daerah dan Dalam Daerah Kabupaten, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan., KAB. BARITO SELATAN), (Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*					5.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*					5.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					7.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan., KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						438.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					7.500.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					172.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*					25.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					234.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.400.000,00	(Dukcapil Kabupaten dan 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					40.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*					40.700.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					13.000.000,00	(Dukcapil Kabupaten dan 6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					112.700.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					10.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (%)***				***99,08***	**221,663,300.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Persentase cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (%)				***99,08***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						149.663.300,00	(6 Kecamatan, 86 Desa/Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)*					149.663.300,00	(6 Kecamatan, 86 Desa/Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						67.000.000,00	(6 Kecamatan, 86 Desa/Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)*					67.000.000,00	(6 Kecamatan, 86 Desa/Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						5.000.000,00	(6 Kecamatan dan 86 Desa/Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)*					5.000.000,00	(6 Kecamatan dan 86 Desa/Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Cakupan penerbitan dokumen kependudukan atas pelaporan peristiwa penting (%)***				***98,03***	**265,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Cakupan penerbitan dokumen kependudukan atas pelaporan peristiwa penting (%)				***98,03***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						87.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						87.000.000,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						178.000.000,00	(6 Kecamatan/Desa/Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN), (6 Kecamatan/desa/kelurahan, KAB. BARITO							-	
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam*					105.000.000,00	(6 Kecamatan/desa/kelurahan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil*					73.000.000,00	(6 Kecamatan/Desa/Kelurahan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase akurasi database dan informasi kependudukan untuk kepentingan lembaga/ dinas/instansi pengguna data (%)***				***100***	**223,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**				**0.00**	***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
			Persentase akurasi database dan informasi kependudukan untuk kepentingan lembaga/ dinas/instansi pengguna data (%)				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						223.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik				-	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan*					113.000.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)*					110.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase ketersediaan buku data dan profil kependudukan (%)***				***Ada***	**43,650,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**				**0.00**	***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						43.650.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)							-	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)*					43.650.000,00	(Buntok Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

	J U M L A H	**6.024.129.696,00**		-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8,172,041,924.00**							**125,000,000.00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**8,172,041,924.00**							**125,000,000.00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**6,718,917,324.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Perhubungan***
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						85.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		50.000.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		5.000.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		5.000.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*0*	*0*		25.000.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.043.825.324,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					4.043.825.324,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						25.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0*	*0*		15.000.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					10.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						25.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

	2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		15.000.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)*					10.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						686.150.000,00				Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		7.000.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		50.000.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		75.000.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		50.000.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0*	*0*		7.500.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		*0*	*0*		496.650.000,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.758.942.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					10.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					181.396.600,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0*	*0*		1.567.545.400,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*

	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*					55.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					40.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase rambu-rambu jalan, marka jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik (%)***				***100***	**578,124,600.00**		***DANA UMUM***		**Peningkatan Pelayanan Publik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur**			**0.00**	***Dinas Perhubungan***
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						173.124.600,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO			Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)*					133.124.600,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)*					40.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						10.000.000,00	(Terminal Buntok Kota, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)*					10.000.000,00	(Terminal Buntok Kota, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						20.000.000,00	(Buntok Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*					20.000.000,00	(Buntok Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perhubungan*

	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						50.000.000,00	(UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) DISHUB Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)*					25.000.000,00	(UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) DISHUB Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)*		*0*	*0*		25.000.000,00		*DANA UMUM*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						255.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)*		*0*	*0*		130.000.000,00		*DANA UMUM*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)*					25.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)*		*0*	*0*		100.000.000,00		*DANA UMUM*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)*					70.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perhubungan*
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik (%)***				***100***	**875,000,000.00**		***DANA UMUM***		**Peningkatan Pelayanan Publik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur**			**125,000,000.00**	***Dinas Perhubungan***
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN), (Dermaga kelurahan Bangkuang., Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)*					150.000.000,00	(Dinas Perhubungan Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perhubungan*

	2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00				Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.15.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota*		*0*	*0*		100.000.000,00		*DANA UMUM*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						625.000.000,00	(UPTD Dermaga Pasar Lama Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Sungai Barito Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN), (Rantau Kujang, Jenamas), (UPTD Dermaga Rantau Kujang, Rantau Kujang, Kec. Jenamas), (Rantau Bahuang, Kec. Jenamas), (Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas), (Desa Teluk Timbau dan Dusun Muara Puning , Dusun Hilir), (Mengkatip, RT. 002 , Dusun Hilir), (Kelurahan Mengkatip RT. 006, Dusun Hilir), (Desa Batilap, Dusun Hilir), (di Depan Gereja GKE Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir), (Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir), (UPTD Dermaga Bangkuang, Karau Kuala), (UPTD Dermaga Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala), (Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara), (Dermaga Jelapat, Jelapat, Kec. Dusun			Peningkatan Pelayanan Publik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			125.000.000,00	
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	*Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)*					500.000.000,00	(UPTD Dermaga Pasar Lama Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Rantau Kujang, Jenamas), (Dermaga Jelapat, Jelapat, Kec.	*DANA UMUM*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	*Dinas Perhubungan*
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	*Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*20*	125.000.000,00	*(5 UPTD DERMAGA DISHUB KAB. BARSEL, KAB. BARITO SELATAN)*	*DANA UMUM*		Peningkatan Pelayanan Publik		*20*	125.000.000,00	*Dinas Perhubungan*
	JUMLAH							**8.172.041.924,00**							125.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7,793,362,066.00**							**0.00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**7,403,362,066.00**							**0.00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100%***	**4,162,162,066.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Komunikasi dan Informatika***
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						95.567.600,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					30.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*					10.567.600,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*					25.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.018.594.466,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					2.873.594.466,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*					110.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*

	2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*					15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran*					20.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						35.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					15.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					20.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						683.800.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					20.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					100.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*					25.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*					100.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					85.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					75.800.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					278.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						309.200.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					5.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*

	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					45.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					259.200.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					10.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi						10.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.16.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah (Dokumen)***				***4.000***	**2,220,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Komunikasi dan Informatika***
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.220.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)*					85.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)*					75.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)*					195.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)*		*0*	*0*		1.520.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)*					250.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	*Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)*					30.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						25.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Unit)*					40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Persentase Perangkat daerah yang mengimplemtasikan/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai Masterplan (%)***				***100***	**1,021,200,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**				**0.00** ***Dinas Komunikasi dan Informatika***
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						130.000.000,00	(Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				-
	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)*					30.000.000,00	(Kabupaten Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*					30.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)*					70.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						891.200.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				-
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*					80.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)*					240.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen)*					55.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)*					150.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah						75.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				-

			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	*Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (Dokumen)*					250.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)*					41.200.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**230,000,000.00**								**0.00**
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral (%)***				***100***	**230,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**				**0.00** ***Dinas Komunikasi dan Informatika***
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						230.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				-
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)*					100.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	*Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Orang)*					40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	*Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)*					40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	*Jumlah Infrastruktur Statistik (Unit)*					50.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**160,000,000.00**								**0.00**
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) (Perangkat Daerah)***				***30***	**160,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**				**0.00** ***Dinas Komunikasi dan Informatika***
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						160.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				-
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)*					40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				-

			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)*					40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)*					40.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Komunikasi dan Informatika*
	J U M L A H							**7.793.362.066,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6,146,792,174.00**							**0.00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**6,146,792,174.00**							**0.00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**4,844,192,174.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.722.743.174,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					3.722.743.174,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						25.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*					25.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						41.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					6.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*					25.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*					10.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						383.860.200,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					7.800.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					60.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.063.200,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					40.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					3.997.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					20.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					249.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						631.438.800,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					3.302.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					130.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					498.136.800,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.150.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					20.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					10.150.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					10.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase kebijakan terkait penanaman modal yang terlaksana (%)***				***100***	**240,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	

	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)*					200.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)*					40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu*
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Persentase promosi penanaman modal yang terfasilitasi (%)***				***100***	**120,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						120.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)*					120.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (%)***				***100***	**335,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						335.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN), (KAB.						-	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*					40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)*					140.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)*					75.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan PTSP, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko						80.000.000,00	(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase pelaku usaha yang taat pada aturan (%)***				***100***	**582,600,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif**			**0.00**	***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						582.600.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)*					40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)*					442.600.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan*					100.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**25,000,000.00**		***Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*					25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
	J U M L A H							**6.146.792.174,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6,467,455,308.00**							**372,680,000.00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**5,747,455,308.00**							**226,440,000.00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4,617,455,308.00**				**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**91,440,000.00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN), (KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		25.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan* *Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*					10.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.297.002.445,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0*	*0*		3.439.642.445,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*					632.800.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					224.560.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kab.Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.19.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					15.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						103.452.863,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			91.440.000,00	
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						91.452.863,00							91.440.000,00	

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*0.10*		*(KAB.BARSEL, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*0.00*		*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						152.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN), (Kab.Barsel, KAB. BARITO			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					1.500.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					127.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*					15.000.000,00	(Kab.Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					8.500.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					15.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**500,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**135,000,000.00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader						480.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			135.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	*Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*					170.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	*Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*30*	25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*0.00*	25.000.000,00	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi						175.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	*Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan*		*0.00*	*0.00*		110.000.000,00	(Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN) *(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*0.00*	110.000.000,00	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)*					20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**630,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (SABABILAH,DANAU SADAR, BUNTOK, KAB. BARITO			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar*					60.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)*					140.000.000,00	(SABABILAH,DANAU SADAR, BUNTOK, KAB. BARITO SELATAN), (KAB.BARITO SELATAN, KAB.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*					50.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						260.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)*					60.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)*					150.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota						-	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	*Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)*					50.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						30.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)*					30.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						90.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (kab. Baritp Seatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)*					50.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Dokumen)*					40.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**720,000,000.00**							**146,240,000.00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**539,524,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***					**146,240,000.00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						164.384.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)*		*0*	*0*		164.384.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						375.140.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			146.240.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)*					25.140.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)*		*0.00*	*0.00*		350.000.000,00	*(Kab. Barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*0.00*	146.240.000,00	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**53,700,000.00**							**0.00**	

										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						53.700.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*					53.700.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**46,776,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***					**0.00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						46.776.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)*		*0*	*0*		46.776.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
4.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	***Jumlah Benda Bersejarah Yang Terkumpul Dalam Museum (Buah)***				***70***	**80,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***					**0.00**	***Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan***
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						80.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara*					80.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**679,700,000.00**							**0.00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**679,700,000.00**							**0.00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Jumlah kunjungan wisatawan (orang)*** ***(Orang)*** ***Jumlah kunjungan wisatawan (orang)*** ***(Orang)***				***54564*** ***54564***	**225,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*** ***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan*** ***Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan***
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						200.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (Kab.Barito Selatan, KAB. BARITO			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*					60.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						120.000.000,00	(Kab.Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)*					20.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	*Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)*					25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**240,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						240.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)*					25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)*					20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)*					135.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)*					60.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	***Persentase Capaian PAD (%)***				***2,11***	**75,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	***Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan***

	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ						75.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif*					25.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	*Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*		*0*	*0*		50.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**139,700,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan**			**0.00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						44.700.000,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)*					30.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)*					14.700.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						95.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	*Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)*					45.000.000,00	(Kab. Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan*
	J U M L A H							**7.147.155.308,00**							372.680.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3,364,247,610.00**							**0.00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3,292,351,010.00**							**0.00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**3,087,464,510.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Peningkatan Kualitas Sumber**			**0.00**	***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.293.800,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					9.005.600,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		*0*	*0*		8.288.200,00		*DANA UMUM*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.282.090.230,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					2.282.090.230,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						16.540.500,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					16.540.500,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						21.845.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					14.945.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*					6.900.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						241.750.880,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					7.120.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.055.380,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)							*DANA UMUM*						*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*					4.386.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*					96.171.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					6.751.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					11.204.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					98.063.500,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						463.109.100,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					9.697.500,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					162.949.200,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					290.462.400,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						44.835.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					17.700.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*					13.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					14.135.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Jumlah pengunjung perpustakaan dalam setahun (%)***				***0,33***	**204,886,500.00**		***DANA UMUM***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						136.451.400,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						30.368.500,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service						*DANA UMUM*						*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*		*0*	*0*		35.794.000,00		*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi*					40.780.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*					23.361.500,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*					6.147.400,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						68.435.100,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*					40.682.900,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*					27.752.200,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**71,896,600.00**							**0.00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase PD menerapkan arsip secara baku sesuai standar kearsipan***				***32***	**71,896,600.00**		***DANA UMUM***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						25.264.500,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Dusun Selatan)						-	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota*					25.264.500,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						19.672.100,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*					19.672.100,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						26.960.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						26.960.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	

			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota							*DANA UMUM*						*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	J U M L A H							**3.364.247.610,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6,635,876,437.00**							**0.00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**6,635,876,437.00**							**0.00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**6,008,572,117.00**				**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana**			**0.00**	***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.804.687.988,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN), (DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					3.660.999.188,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					143.688.800,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						89.847.500,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					39.847.500,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*					50.000.000,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						803.405.694,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)						-	

	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					16.000.000,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*					83.504.978,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					54.026.206,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					55.000.000,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*					594.874.510,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						49.760.000,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*					49.760.000,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.180.012.935,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					19.050.000,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					67.762.935,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					1.093.200.000,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80.858.000,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					32.750.000,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					48.108.000,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase koperasi aktif (%) (%)***				**22**	**47,899,780.00**		***DANA UMUM***		**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**			**0.00**	***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						47.899.780,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)*					37.199.780,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)*					10.700.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**10,016,800.00**				**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**			**0.00**	

			Presentase Koperasi yang melaksanakan RAT (%)				***20***			***DANA UMUM***						***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.016.800,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)*					10.016.800,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Presentase SDM Koperasi dan UMKM yang bersetifikat (%)***				***20***	**50,000,000.00**		***DANA UMUM***		**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Dava Manusia.**			**0.00**	***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)*					50.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%) (%)***				***20***	**92,999,880.00**		***DANA UMUM***		**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Dava Manusia.**			**0.00**	***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						92.999.880,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	*Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)*					92.999.880,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Presentase Usaha Mikro dan Kecil yang aktif (%)***				***18***	**151,387,860.00**		***DANA UMUM***		**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Dava Manusia.**			**0.00**	***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						151.387.860,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	

	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)*					41.650.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)*					77.427.200,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	*Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)*					12.499.660,00		*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)*					19.811.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Presentase Usaha Mikro (dari mikro ke kecil) (Kecil ke menengah) (%)***				***20***	**275,000,000.00**		***DANA UMUM***		**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Dava Manusia.**			**0.00**	***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						275.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN DAN LUAR DAERAH, KAB. BARITO SELATAN), (Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)						-	
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)*					275.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN DAN LUAR DAERAH, KAB. BARITO SELATAN), (Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2,449,529,520.00**							**0.00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**1,326,162,020.00**							**0.00**	

1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					**33,000,000.00**				**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**			**0.00**	
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi (%)			***100***			***DANA UMUM***						***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					33.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)*				33.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					**163,868,500.00**				**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**			**0.00**	
			Persentase sarana perdagangan yang dimanfaatkan (%)			***79.4***			***DANA UMUM***						***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***

	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						118.975.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (kabupaten barito selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara), (Desa Bantai Bambure Kecamatan Dusun Utara, Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara), (Desa						-	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)*					118.975.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						44.893.500,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)*					44.893.500,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang harganya stabil (Laporan)***				***96***	**718,658,630.00**		***DANA UMUM***		**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Dava Manusia.**			**0.00**	***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						624.046.500,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)*					624.046.500,00	(6 Kecamatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						94.612.130,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	

	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*					69.612.130,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*					25.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Alat Ukur yang sudah ditera (%)***				***70***	**224,366,690.00**		***DANA UMUM***		**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**			**0.00**	***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						224.366.690,00	(Kab.Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)*					175.066.750,00	(Kab.Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)*					37.299.940,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	*Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)*					12.000.000,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**186,268,200.00**				**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Dava Manusia.**			**0.00**	
										DANA UMUM						
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						186.268.200,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)*					186.268.200,00	(KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1,123,367,500.00**							**0.00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Industri (Dokumen)***				***12***	**204,000,000.00**		***DANA UMUM***		**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Dava Manusia.**			**0.00**	***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						204.000.000,00							-	

	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilavahan Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*					14.000.000,00		*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*					25.000.000,00		*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*					165.000.000,00		*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Presentase Industri yang terdaftar di aplikasi SINAS***				***3***	**919,367,500.00**		***DANA UMUM***		**Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,**			**0.00**	***Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan***
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						919.367.500,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN), (Kab.Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN), (KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (kab.barito selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Major Project) dan Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Mewujudkan			-	

	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*					919.367.500,00	(DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN), (Kab.Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (DISDAGKOP UKM, KAB. BARITO SELATAN), (KAB.BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (kab.barito selatan, KAB.	*DANA UMUM*					-	*Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
	J U M L A H							**9.085.405.957,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**38,184,045,242.00**							**0.00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**38,184,045,242.00**							**0.00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**30,066,586,622.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	
			Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)				***100***									***Sekretariat Daerah***
			Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)				***100***									***Sekretariat Daerah***
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.050,00				Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		30.000.050,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.413.715.084,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0*	*0*		7.413.715.084,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.413.497.500,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*0*	*0*		669.697.500,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*		*0*	*0*		2.743.800.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.882.170.610,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN), (Sekretariat daerah, KAB. BARITO SELATAN), (Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN), (Sekretariat Daerah, KAB. BARITO						-	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					448.602.190,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*

	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					251.417.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					498.210.200,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					1.283.672.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					1.951.570.000,00	(Sekretariat daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*					448.699.220,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.000.000.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN), (Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)*					-	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					1.000.000.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.387.941.278,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					53.991.800,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					1.032.726.978,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						582.450.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					1.718.772.500,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.232.465.800,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN), (Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					110.990.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*					1.476.020.550,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					341.800.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					2.303.655.250,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					1.000.000.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.919.541.300,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN), (Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)*					1.037.870.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)*					800.000.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						81.671.300,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						895.000.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)*					258.000.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)*					267.000.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)*					370.000.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1.892.255.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)*					606.809.898,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)*					631.832.650,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)*					653.612.452,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***1. Persentase Hasil Pelayanan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat 2. Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.***				***100***	**6,061,331,950.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Sekretariat Daerah***
			1. Persentase Hasil Pelayanan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat 2. Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Sekretariat Daerah***
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						1.457.884.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)*		*0*	*0*		300.000.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*

	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		998.884.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						4.080.847.950,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)*					2.101.527.950,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian*					553.000.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*					1.426.320.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						522.600.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)*					249.658.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)*					72.810.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)*					200.132.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**2,056,126,670.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Mewujudkan Pertumbuhan**			**0.00**	

			1. Persentase Hasil Koordinasi Perekonomian yang terlaksana 2. Persentase Paket Barang/Jasa yang di tender/ seleksikan 3. Persentase Hasil Koordinasi Administrasi Pembangunan yang terlaksana				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Sekretariat Daerah***
			1. Persentase Hasil Koordinasi Perekonomian yang terlaksana 2. Persentase Paket Barang/Jasa yang di tender/ seleksikan 3. Persentase Hasil Koordinasi Administrasi Pembangunan yang terlaksana				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Sekretariat Daerah***
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						849.571.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)							-	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)*					513.511.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)*					274.500.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)*					61.560.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						534.417.710,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)							-	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)*					219.999.930,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)*					131.117.940,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)*					183.299.840,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						555.212.960,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)							-	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)*					136.291.068,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						129.661.492,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	

			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)*					289.260.400,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						116.925.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*					26.048.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian*					16.570.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan*					74.307.000,00	(Sekretariat Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Sekretariat Daerah*
	J U M L A H							**38.184.045.242,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**34,358,612,782.00**							**0.00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**34,358,612,782.00**							**0.00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***95***	**23,315,061,027.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**		**0.00**	***Sekretariat DPRD***
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*					7.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*					5.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.664.710.755,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					2.361.210.755,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					300.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*					3.500.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.120.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					4.120.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						209.181.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					159.900.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						49.281.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.138.117.500,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					100.043.500,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					300.560.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*					133.800.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					123.011.500,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					230.762.500,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					249.940.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.350.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*					250.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*					800.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					300.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.307.674.198,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					19.643.200,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					600.550.998,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.970.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					1.667.510.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						750.306.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					99.995.500,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*					100.782.500,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*					60.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					40.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					449.528.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.13	Penataan Organisasi						4.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)*					4.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						11.030.361.574,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)*					9.899.004.574,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)*					860.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)*					271.357.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						3.844.590.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						1.351.620.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sekretariat DPRD*
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)*					2.492.970.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan yang ditetapkan (%)***				***95***	**11,043,551,755.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Sekretariat DPRD***
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						750.069.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)*					550.129.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)*					199.940.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						3.452.607.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)*					714.672.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)*					545.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)*					155.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)*		*0*	*0*		2.037.935.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						3.768.285.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)*					1.509.210.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)*					2.259.075.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						3.072.590.755,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*					3.033.060.755,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Sekretariat DPRD*
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						39.530.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sekretariat DPRD*
	J U M L A H							**34.358.612.782,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9,902,994,136.00**							**15,000,000.00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**9,487,994,136.00**							**15,000,000.00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**6,449,337,136.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						85.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)*					20.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.699.824.136,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					4.437.224.136,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					185.600.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*					21.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*					15.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*					31.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						130.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					120.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						43.500.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						30.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*							*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*					13.500.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						715.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					55.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					40.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*					35.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					50.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					50.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					450.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*					35.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*					50.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						561.013.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					10.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					381.013.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*					20.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					150.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					30.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					30.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					75.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					30.000.000,00	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***1. Persentase dokumen perencanaan yang direviu oleh inspektorat, 2. Persentase ketepatan waktu penetapan/pembuatan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Persentase perangkat daerah yang menyerahkan dokumen/laporan untuk hasil pengendalian dan***				***100***	**1,094,767,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**15,000,000.00**	***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***

	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						750.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (6 Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KAB.			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			15.000.000,00	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)*		*1*	*1*	*1*	15.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN) *(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*1*	15.000.000,00	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)*					55.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)*					55.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)*					120.000.000,00	(6 Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*					505.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						140.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Buntok, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*					30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)*					70.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)*					40.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						204.767.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)*					114.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						90.767.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (%)***				***100***	**1,943,890,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						593.990.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN), (KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (BARITO SELATAN, KAB. BARITO			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*					45.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*					30.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang*					35.000.000,00	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)*		*0*	*0*		50.000.000,00			*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*					100.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*					110.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*					55.000.000,00	(BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)*					168.990.000,00	(BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						510.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)*					150.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)*					150.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						839.900.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)*					31.150.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)*					7.150.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)*					150.150.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)*					280.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN), (Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)*					36.000.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)*					7.150.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)*					255.150.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)*					73.150.000,00	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**415,000,000.00**							**0.00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan (%)***				***100***	**415,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***					**0.00**	***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)*					25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						60.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)*					30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)*					30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						330.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)*					330.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*
	J U M L A H							**9.902.994.136,00**							15.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**159,738,248,570.30**							**0.00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**159,738,248,570.30**							**0.00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**45,280,390,560.00**				**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan**		**0.00**	***Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah***
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						260.798.900,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		56.722.600,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		45.316.400,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		51.050.200,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		51.823.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)*		*0*	*0*		55.886.700,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						35.103.847.672,00	(KAB. BARITO SELATAN), (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						34.578.750.192,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					186.739.680,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*					188.357.800,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*		*0*	*0*		150.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						227.424.950,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*					169.307.050,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*		*0*	*0*		58.117.900,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						66.805.143,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)*					66.805.143,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						612.703.250,00	(KAB. BARITO SELATAN), (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*0*	*0*		80.000.750,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*					462.702.500,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*					70.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						645.382.860,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					41.579.800,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					110.526.700,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		66.375.360,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					60.795.750,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					40.808.500,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0*	*0*		75.297.500,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					249.999.250,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						872.615.200,00	(KAB. BARITO SELATAN), (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*					600.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					121.371.700,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					151.243.500,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.003.142.885,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0*	*0*		70.463.500,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0*	*0*		444.909.385,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					487.770.000,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.133.784.500,00	(KAB. BARITO SELATAN), (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					75.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*DANA UMUM*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					6.000.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					58.784.500,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.13	Penataan Organisasi						353.885.200,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	

	5.02.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)*					206.740.700,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)*					147.144.500,00	(BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Indeks)***				***WTP***	**109,777,760,827.30**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang**			**0.00**	***Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah***
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.623.492.980,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)*					50.000.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)*					46.300.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*					125.473.350,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*					118.178.400,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*					45.291.250,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*					45.481.200,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						200.000.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)						*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)*					210.000.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)*					131.696.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)*					423.303.930,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)*					118.721.350,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)*					109.047.500,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						1.010.151.100,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		169.995.200,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)*					14.999.780,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)*					129.999.700,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)*		*0*	*0*		139.919.820,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*		*0*	*0*		49.978.800,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan*					119.946.600,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*					110.318.400,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*		*0*	*0*		124.992.860,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)*					149.999.940,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						1.425.170.200,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)*		*0*	*0*		150.439.880,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*		*0*	*0*		424.734.920,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						130.945.020,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)		*0*	*0*				*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)*		*0*	*0*		262.629.810,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*					162.678.170,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)*		*0*	*0*		70.063.140,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		223.679.260,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						105.718.946.547,30				Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		10.845.971.680,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	*Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)*		*0*	*0*		1.000.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)*		*0*	*0*		70.868.305.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)*		*0*	*0*		20.000.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)*		*0*	*0*		3.004.669.867,30		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Tersedianya data BMD (Laporan / Dokumen)***				***9***	**1,754,126,770.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan**			**0.00**	***Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah***
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.754.126.770,00	(BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN), (BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)*					134.915.800,00	(BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)*					427.645.100,00	(BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)*		*0*	*0*		499.999.950,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)*		*0*	*0*		214.059.380,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*					114.569.800,00	(BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)*					111.647.560,00	(BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		151.289.280,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)*		*0*	*0*		49.999.900,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)*					50.000.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase Capaian PAD (%)***				***100***	**2,925,970,413.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Peningkatan Pelayanan Publik, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang**			**0.00**	***Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah***
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.925.970.413,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)*					75.050.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		475.602.850,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)*					81.522.650,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)*		*0*	*0*		761.375.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)*					118.303.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)*					75.000.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)*					142.232.500,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)*					50.000.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)*					50.000.000,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		720.009.960,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)*					12.262.450,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		318.888.103,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)*					45.723.900,00	(BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*
	J U M L A H							**159.738.248.570,30**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5,611,171,719.00**							**155,000,000.00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5,611,171,719.00**							**155,000,000.00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**3,600,071,719.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**155,000,000.00**	***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya***
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.854.071.719,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			155.000.000,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					2.746.371.719,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*50*	107.700.000,00	*(Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	155.000.000,00	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*0*	*0*		12.000.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						260.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		12.000.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*					200.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						322.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0*	*0*		106.000.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					216.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0*	*0*		12.000.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***1. Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi 2. Persentase jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instasi pemerintah 3. Persentase jumlah jabatan administrasi pada instasi pemerintah 4. Persentase Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 5. Persentase Tingkat Disiplin ASN 6. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal 7. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan***				***100***	**2,011,100,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						233.800.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)*					46.900.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)*		*0*	*0*		12.000.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						12.000.000,00				Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)*					138.900.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						36.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				-
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						1.662.400.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				-
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)*					1.197.400.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)*					325.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (Dokumen)*					60.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)*					30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						78.900.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik				-

	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)*					42.900.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)*					12.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	J U M L A H							**5.611.171.719,00**							155.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**10,801,791,971.60**							**0.00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**10,801,791,971.60**							**0.00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**7,951,791,971.60**							**0.00**	***Inspektorat***
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						195.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					65.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*					65.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*					65.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.376.191.971,60	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					5.273.015.971,60	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					103.176.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					50.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						700.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					100.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*					600.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*

	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						820.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Luar Daerah dan Dalam Daerah, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					110.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*					120.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					120.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					20.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					100.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					350.000.000,00	(Luar Daerah dan Dalam Daerah, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						560.600.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					50.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					175.800.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					334.800.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						250.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*					150.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					100.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Indeks)***				***WTP***	**2,450,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***					**0.00**	***Inspektorat***

			Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan (%)				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Inspektorat***
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.950.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)*					150.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)*					400.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)*					100.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)*					150.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)*					550.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)*					300.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)*					300.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						500.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)*					100.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)*					400.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***1. Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina SPIP 2. Tingkat Maturitas SPIP (%)***				***30 PD***	**400,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***					**0.00**	***Inspektorat***
			Level APIP (Level)				***4***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Inspektorat***
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						100.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*					100.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*

	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						300.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)						-	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*					100.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*					100.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*					100.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Inspektorat*
	JUMLAH							**10.801.791.971,60**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,172,275,615.00**							**0.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,172,275,615.00**							**0.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana***				***100***	**2,358,397,615.00**				**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Kecamatan Dusun Hilir***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir), (Mengkatip Kecamatan Dusun hilir, Dusun Hilir)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*		3.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir) *(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*					6.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*					5.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)*					40.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.812.372.615,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)						-	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					1.718.872.615,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*					1.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						75.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*					5.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*					3.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*					500.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*					5.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*					4.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.800.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)						-	
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)*					3.800.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*					33.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						209.225.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir), (Mengkartip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)						-	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					4.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27.225.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*							*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					23.000.000,00	(Mengkartip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					155.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						246.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)							-	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					3.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					69.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					174.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Kecamatan Dusun Hilir*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana***				***100***	**15,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**				**0.00**	***Kecamatan Dusun Hilir***
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)							-	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*					5.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)							-	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*					10.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				-	*Kecamatan Dusun Hilir*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)***				***100***	**575,290,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**				**0.00**	***Kecamatan Dusun Hilir***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						33.835.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)			Peningkatan Pelayanan Publik				-	

	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilavah Keria Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*					10.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*					23.835.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						518.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					168.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					350.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						23.455.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)						-	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*					23.455.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%)***				***100***	**23,088,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Kecamatan Dusun Hilir***
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						18.500.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)						-	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilavah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*					14.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)*					4.500.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						4.588.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)						-	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*					4.588.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)***				***100***	**115,500,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Kecamatan Dusun Hilir***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						115.500.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)						-	

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan*					5.500.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)*					110.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)***				***100***	**85,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Kecamatan Dusun Hilir***
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						85.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)						-	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)*					10.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)*					10.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)*					5.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)*					5.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)*					38.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas*					7.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)*					10.000.000,00	(Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Hilir*
	J U M L A H							**3.172.275.615,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6,392,503,632.00**							**0.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**6,392,503,632.00**							**0.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**5,192,503,632.00**				**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Kecamatan Dusun Selatan***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					15.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*					6.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.011.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					4.000.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*					6.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*

	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					3.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						2.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)*					2.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						93.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan), (Kantor Kecamatn Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					30.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)*					3.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*					60.000.000,00	(Kantor Kecamatn Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						397.817.632,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan), (Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan, Dusun Selatan), (Kantor Kecamatan Dusun Selatan & Kelurahan,			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					7.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan & Kelurahan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					40.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					34.817.632,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan Kelurahan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					4.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)						-	

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					287.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan & Kelurahan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)*					30.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.686.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun selatan & Kelurahan, Dusun Selatan), (Kantor Kecamatan Dusun Selatan & Kelurahan,			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					1.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan & Kelurahan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					85.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun selatan & Kelurahan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					493.686.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan & Kelurahan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan & Kelurahan , Dusun Selatan), (Kantor Kecamatan Dusun selatan & Kelurahan, Dusun			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					25.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan & Kelurahan , Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					15.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun selatan & Kelurahan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Selatan*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana***				***100***	**8,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Kecamatan Dusun Selatan***
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						4.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)						-	

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan				-	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)*					4.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Kecamatan Dusun Selatan*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)***				***100***	**1,019,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**				**0.00**	***Kecamatan Dusun Selatan***
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						640.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan & Kelurahan, Dusun Selatan), (Kantor Kelurahan Jelapat, Jelapat, Kec. Dusun Selatan), (Kantor Kelurahan Jelapat , Jelapat, Kec. Dusun Selatan), (Kantor Kelurahan Hilir Seper, Hilir Seper, Kec. Dusun Selatan), (Kantor Kelurahan Buntok Kota,			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan				-	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)*					40.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan & Kelurahan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					167.000.000,00	(Kantor Kelurahan Jelapat , Jelapat, Kec. Dusun Selatan), (Kantor Kelurahan Hilir Seper, Hilir Seper, Kec. Dusun Selatan), (Kantor Kelurahan Buntok Kota, Buntok Kota, Kec.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					433.000.000,00	(Kantor Kelurahan Jelapat, Jelapat, Kec. Dusun Selatan), (Kantor Kelurahan Hilir Seper, Hilir Seper, Kec. Dusun Selatan), (Kantor Kelurahan Buntok Kota, Buntok Kota, Kec.	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						379.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan				-	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)*					329.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*					50.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						-	*Kecamatan Dusun Selatan*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**10,000,000.00**				**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**				**0.00**	

			persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***						***Kecamatan Dusun Selatan***
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan), (Kantor kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilavah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*					5.000.000,00	(Kantor kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Kecamatan Dusun Selatan*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan (%)***				***100***	**136,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Kecamatan Dusun Selatan***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						136.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)*					136.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Kecamatan Dusun Selatan*
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)***				***100***	**27,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Kecamatan Dusun Selatan***
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						27.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan), (KAntor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan			-	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)*					6.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)*					5.000.000,00	(KAntor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*					6.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				-	*Kecamatan Dusun Selatan*
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)						-	

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kecamatan Dusun Selatan*
	J U M L A H							**6.392.503.632,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,628,294,902.00**							**216,000,000.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,628,294,902.00**							**216,000,000.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3,009,131,902.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**16,000,000.00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						33.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)			Peningkatan Pelayanan Publik			16.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		10.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		5.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		5.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		*5000000*	*5000000*	*5000000*	3.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara) *(KECAMATAN DUSUN UTARA, KAB. BARITO SELATAN)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik		*5000000*	-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.963.731.902,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					1.913.731.902,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		50.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						308.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					18.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*		*0*	*0*		200.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*					40.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*					50.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						75.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		30.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*					15.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					20.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						84.000.000,00				Peningkatan Pelayanan Publik			-	

	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)*		*0*	*0*		84.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						- *Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						275.600.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)			Peningkatan Pelayanan Publik				-
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						- *Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					32.800.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						- *Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*					20.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						- *Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0*	*0*		217.800.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						- *Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						259.800.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)			Peningkatan Pelayanan Publik				-
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0*	*0*		259.800.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						- *Kecamatan Dusun Utara*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**30,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						30.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)			Peningkatan Pelayanan Publik				-
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*					30.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik				- *Kecamatan Dusun Utara*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**503,200,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**200,000,000.00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						203.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)						200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)*					3.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						- *Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)						200.000.000,00	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*200000000*	*200000000*			*(Kantor Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)*	*DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan*				*20000000 0*		*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						300.200.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)						-	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)*					5.000.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Utara*
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0*	*0*		295.200.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Dusun Utara*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**54,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						54.000.000,00				Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		*0*	*0*		54.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**110,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						110.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)*					110.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**31,853,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						31.853.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)*					31.853.000,00	(Kantor Kecamatan Dusun Utara, Dusun Utara)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Dusun Utara*
	JUMLAH							**3.628.294.902,00**							216.000.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4,041,768,168.00**							**0.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**4,041,768,168.00**							**0.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**3,538,694,168.00**				**Peningkatan Pelayanan Publik, Penurunan Angka Stunting**			**0.00**	***Kecamatan Gunung Bintang Awai***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung BIntang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai), (Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn.			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		3.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*					3.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		4.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		6.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.878.667.468,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					1.785.907.468,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					92.760.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						290.500.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					2.500.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*					20.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					36.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					2.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					30.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					200.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.100.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					1.100.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						247.526.700,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					3.987.800,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					87.338.900,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*					20.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						136.200.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)						-	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana***				***100***	**118,381,500.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Kecamatan Gunung Bintang Awai***
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						40.890.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)						-	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)*					40.890.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						77.491.500,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)						-	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*					77.491.500,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)***				***100***	**90,773,500.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik, Penurunan Angka Stunting**			**0.00**	***Kecamatan Gunung Bintang Awai***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						90.773.500,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)						-	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)*					90.773.500,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Meningkatnya Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)***				***100***	**50,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik, Penurunan Angka Stunting**			**0.00**	***Kecamatan Gunung Bintang Awai***
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						50.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)						-	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*					50.000.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*

5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)***				***100***	**243,919,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber**			**0.00**	***Kecamatan Gunung Bintang Awai***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						243.919.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)						-	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)*					243.919.000,00	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, Kec. Gn. Bintang Awai)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					-	*Kecamatan Gunung Bintang Awai*
	J U M L A H							**4.041.768.168,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
KECAMATAN JENAMAS KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,348,000,000.00**							**0.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,348,000,000.00**							**0.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,658,000,000.00**				**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	
			Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)				***75***									***Kecamatan Jenamas***
			1. Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi 2. Persentase jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instasi pemerintah 3. Persentase jumlah jabatan administrasi pada instasi pemerintah 4. Persentase Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 5. Persentase Tingkat Disiplin ASN 6. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal 7. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan				***50***								***Kecamatan Jenamas***
			1. Persentase dokumen perencanaan yang direviu oleh inspektorat, 2. Persentase ketepatan waktu penetapan/pembuatan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Persentase perangkat daerah yang menyerahkan dokumen/laporan untuk hasil pengendalian dan				***100***								***Kecamatan Jenamas***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*					3.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*		3.000.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*					3.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.503.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN), (Jenamas, Jenamas)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					1.500.000.000,00	(Jenamas, Jenamas)	*DANA UMUM*					-	*Kecamatan Jenamas*

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*					3.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					3.000.000,00	(Buntok, KAB. BARITO SELATAN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						85.000.000,00	(Jenamas, Jenamas)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					50.000.000,00	(Jenamas, Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*					35.000.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						420.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN), (Jenamas, Jenamas), (Jenamas)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					10.000.000,00	(Jenamas, Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					30.000.000,00	(Jenamas, Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*					15.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					15.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)*					10.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					40.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		*0.00*	*0.00*	*1*	300.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN) *(buntok, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*0.00*	-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00	(Jenamas)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*					50.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					50.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						385.000.000,00	(Jenamas)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00	(Jenamas)						-	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					45.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					335.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.000.000,00	(Jenamas)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*					50.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*					10.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					15.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					50.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					25.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana***				***100***	**125,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Kecamatan Jenamas***
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						100.000.000,00	(Jenamas)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*10*	100.000.000,00	(Jenamas) *(jenamas, Jenamas)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						25.000.000,00	(Jenamas)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)*					25.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (%)***				***100***	**440,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Kecamatan Jenamas***
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						240.000.000,00	(Rantau Kujang, Kec. Jenamas)			Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	

	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*					15.000.000,00	(Rantau Kujang, Kec. Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	200.000.000,00	(Rantau Kujang, Kec. Jenamas) *(Rantau Kujang, Rantau Kujang, Kec. Jenamas)*	*DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan*		Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah		*0.00*	-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					25.000.000,00	(Rantau Kujang, Kec. Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						150.000.000,00	(Jenamas)			Peningkatan Pelayanan Publik, Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah			-	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0.00*	*0.00*		150.000.000,00	(Jenamas) *(Rantau Kujang, Jenamas)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*0.00*	-	*Kecamatan Jenamas*
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						50.000.000,00	(Jenamas)			Perbaikan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infastruktur Daerah, Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	
	7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)*					50.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					-	*Kecamatan Jenamas*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)*** ***Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)***				***100*** ***1***	**15,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*** ***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pemerintahan**			**0.00**	***Kecamatan Jenamas*** ***Kecamatan Jenamas***
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						15.000.000,00	(Jenamas)						-	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		*0.00*	*0.00*		15.000.000,00	(Jenamas) *(jenamas, KAB. BARITO SELATAN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik		*0.00*	-	*Kecamatan Jenamas*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***1. Persentase Hasil Pelayanan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat 2. Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.***				***100***	**110,000,000.00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Kecamatan Jenamas***

			1. Persentase Hasil Pelayanan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat 2. Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.				***100***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***					***Kecamatan Jenamas***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						110.000.000,00	(Jenamas)						-	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*		110.000.000,00	(Jenamas)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik		*0.00*	-	*Kecamatan Jenamas*
	J U M L A H							**3.348.000.000,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,763,789,692.00**							**0.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**3,763,789,692.00**							**0.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2,782,600,192.00**				**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	
			Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)				***100***									***Kecamatan Karau Kuala***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		2.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala* *Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.816.238.192,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					1.750.061.192,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*					66.177.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						16.610.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*					5.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					11.610.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						317.612.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		5.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*					41.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					6.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0*	*0*		45.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					200.612.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*					20.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						296.800.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala,Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala), (Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*					37.950.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*					158.850.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala,Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala), (Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)*					-	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						311.590.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*					1.905.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					41.485.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					268.200.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.750.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*					10.500.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*					6.370.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					4.880.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*					-	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana***				***100***	**75,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Kecamatan Karau Kuala***
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	

	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)*					75.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)***				***100***	**618,944,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan**			**0.00**	***Kecamatan Karau Kuala***
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						355.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)*					5.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					220.405.220,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					129.594.780,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						168.944.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)*					168.944.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						95.000.000,00	(Bangkuang, Karau Kuala, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*					45.000.000,00	(Bangkuang, Karau Kuala, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)*		*0*	*0*		50.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Penurunan Angka Stunting Dan Kemiskinan			-	*Kecamatan Karau Kuala*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%)***				***100***	**55,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Kecamatan Karau Kuala***

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						55.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)*					55.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)***				***100***	**134,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Kecamatan Karau Kuala***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						134.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)*					134.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (%)***				***100***	**98,245,500.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Kecamatan Karau Kuala***
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						98.245.500,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)* *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)*		*0*	*0*		57.750.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala* *Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)*					5.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)*					10.000.000,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)*					25.495.500,00	(Kab. Barito Selatan, Karau Kuala, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Kecamatan Karau Kuala*
	J U M L A H							**3.763.789.692,00**							-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra PD	REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**7,251,107,141.00**							**0.00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**7,251,107,141.00**							**0.00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (%)***				***100***	**3,576,107,141.00**				**Peningkatan Pelayanan Publik**			**0.00**	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						115.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*					20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*					20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*					10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*					20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*					20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*					15.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.656.107.141,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*					2.536.107.141,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*					100.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*					10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik				-
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik				-
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*					10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*					15.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						330.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik				-
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*					300.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik				- *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik				-
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik				-

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*					15.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						405.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*					350.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.13	Penataan Organisasi						10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Pelayanan Publik			-	
	8.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Pelayanan Publik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (%)***				***100***	**1,273,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.273.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*					1.000.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*					100.000.000,00		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*					73.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN**	***Capaian efektifitas penguatan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik***				***100***	**220,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						220.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun*					40.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di						80.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan						*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (%) (%)***				***100***	**163,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						163.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun*					25.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang*					35.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*					30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*					30.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						43.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)***				***100***	**20,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						20.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat*					10.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*					5.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani) (%)***				***100***	**1,999,000,000.00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik**			**0.00**	***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.999.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	*Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang*					50.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	*Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*					100.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta*					59.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*					1.790.000.000,00	(KAB. BARITO SELATAN)	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik			-	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*
	J U M L A H							**7.251.107.141,00**							-	

Sesuai dengan Pasal 178 Permendagri 86 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga menerima dan menelaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Barito Selatan. Permintaan pokok-pokok pikiran DPRD ini disampaikan melalui surat Bupati Barito Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan Nomor: P-050/89/LP3-Bapp/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, perihal Permintaan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Barito Selatan sebagai bahan penyusunan RPKD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

DPRD Kabupaten Barito Selatan kemudian menyampaikan Pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Bupati Barito Selatan melalui Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor: 170/155/DPRD/2023. Selain menyampaikan melalui surat, Pokok-pokok Pikiran DPRD ini juga di input oleh para anggota DPRD melalui aplikasi SIPD yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan selaku verifikator usulan di SIPD, dengan jumlah 1.112 usulan, dengan semua usulan dilanjutkan oleh verifikator untuk ditelaah oleh Perangkat Daerah tujuan dari Pokok-Pokok Pikiran tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 5.2

Rekap Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

No.	ANGGOTA DEWAN		JUMLAH USULAN			
	KODE	NAMA	JUMLAH	PENDING	DITOLAK	DILANJUTKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	01	Ir. M. FARID YUSRAN, MM	50	-	-	50
2	02	Hj. NYIMAS ARTIKA	36	-	-	36
3	03	Hj. ENUNG IRAWATI	62	-	-	62
4	04	HERMANES, SE	44	-	-	44
5	05	ENSILAWATIKA WIJAYA	45	-	-	45
6	06	TAMARZAM	51	-	-	51
7	07	TRI WAHYUNI	33	-	-	33
8	08	H. RADEN SUDARTO, SH	72	-	-	72
9	09	JARLIANSYAH	31	-	-	31
10	10	Hj. ANI MAHRITA	44	-	-	44
11	11	RINTO RAHMAN, S.Pd	31	-	-	31
12	12	AKHMAD JUMADI, SM	42	-	-	42

13	13	RUSINAH	38	-	-	38
14	14	NURUL HIKMAH	44	-	-	44
15	15	BHASKAROGRA BASUKI DWIATMAJA, SM	44	-	-	44
16	16	H. ZAINAL KHAIRUDDIN, SP	22	-	-	22
17	17	RIDA SRI AHLINA	41	-	-	41
18	18	ADIYAT NUGRAHA	38	-	-	38
19	19	H. SUDIARTO, SE	96	-	-	96
20	20	Ir. RAHMATO RAHMAN	35	-	-	35
21	21	MUHAMMAD RIZKI ASTRYA P.S	27	-	-	27
22	22	IDARIANI, SE	45	-	-	45
23	23	PUTRI SITI ROHMAWATI	44	-	-	44
24	24	IDEHAM	48	-	-	48
25	25	Drs. Zainal Abidin	49	-	-	49
JUMLAH			**1.112**	**-**	**-**	**1.112**

Sumber: https://www.sipd.go.id

Ke 1.112 usulan pokok pikiran DPRD tersebut tersebar ke 16 Perangkat Daerah Tujuan dengan rincian sebagaimana tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3
Rekap Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024
Sesuai Perangkat Daerah Tujuan

No.	KODE SKPD	URAI SKPD	JUMLAH USULAN			
			JUMLAH	PENDING	DITOLAK	DILANJUTKAN
1	1.01.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Pendidikan	106	-	-	106
2	1.02.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Kesehatan	49	-	-	49
3	1.03.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	379	-	-	379
4	1.04.2.10.0.0 0.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	47	-	-	47
5	1.05.0.00.0.0 0.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5	-	-	5
6	1.06.2.13.0.0 0.01.0000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81	-	-	81
7	2.08.2.14.0.0 0.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	-	-	1
8	2.09.3.25.3.2 7.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	134	-	-	134
9	2.11.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	1	-	-	1
10	2.15.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Perhubungan	21	-	-	21

11	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	-	-	12
12	2.19.3.26.2.22.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	3	-	-	3
13	3.30.2.17.3.31.01.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4	-	-	4
14	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	267	-	-	267
15	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	-	-	1
16	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	-	-	1
JUMLAH			**1.112**	**-**	**-**	**1.112**

Sumber: https://www.sipd.go.id

Adapun ke 1.112 usulan Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut bisa dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5.4
Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : Ir. M. FARID YUSRAN, MM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Belum ada ruang guru dan kekurangan komputer untuk SD di Desa Dangka.	Guru dan siswa SD di Desa Dangka.	Diperlukan ruang guru dan pengadaan komputer agar pembelajaran di SD Desa Dangka dapat lebih efektif dan efisien.	Pembangunan ruang guru dan pengadaan komputer agar pembelajaran di SD Desa Dangka dapat lebih efektif dan efisien.	(Desa Dangka., Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Murung Paken mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan agar dapat digunakan kembali.	Siswa, guru, dan staf SDN Murung Paken.	Usulan ini bertujuan untuk merehabilitasi gedung SDN Murung Paken sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan pembelajaran.	Rehab gedung SDN Murung Paken akan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki lingkungan belajar siswa.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi SD Kunjung di Desa Telang Andrau	Murid-murid SD Kunjung di Desa Telang Andrau	SD Kunjung di Desa Telang Andrau membutuhkan perbaikan dan rehabilitasi untuk memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa.	infrastruktur sekolah yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menarik minat siswa untuk bersekolah di SD Kunjung.	(Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Gedung sekolah yang rusak dan tidak layak digunakan, menghambat kualitas pendidikan siswa.	Siswa SMP di Desa Muara Ripung dan sekitarnya,	Gedung SMP merupakan fasilitas pendidikan yang penting bagi anak-anak di desa tersebut.	Perbaikan dan perawatan harus dilakukan secara berkala untuk mempertahankan kualitas gedung SMP.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Gedung Pos Kesehatan Masyarakat Desa Murung Paken mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan agar dapat digunakan kembali.	Masyarakat Desa Murung Paken dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan.	Usulan ini bertujuan untuk merehabilitasi gedung Puskesmas Desa Murung Paken sehingga dapat digunakan kembali untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Rehab gedung Puskesdes Desa Murung Paken akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan masyarakat di Desa Pararapak dapat terancam jika Pustu dan Poskesdes tidak berfungsi dengan baik.	Masyarakat Desa Pararapak yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Pustu dan Poskesdes.	Permintaan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan di Desa Pararapak, yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).	Kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama, oleh karena itu perbaikan fasilitas kesehatan akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.	(Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Poskesdes Telang Andrau dan pengadaan fasilitas ruangan serta perlengkapan alat pada RT II	Penduduk Desa Telang Andrau yang membutuhkan fasilitas kesehatan	Poskesdes Telang Andrau di RT II membutuhkan rehabilitasi dan peralatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.	poskesdes yang direhabilitasi dan dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan medis yang memadai, akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi warga Desa Telang Andrau, khususnya di RT II.	(RT.II, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tidak adanya bidan desa selama 1 tahun yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan	Masyarakat Desa Danau Masura yang membutuhkan layanan kesehatan	. Usulan ini bertujuan untuk menempatkan seorang bidan desa di Desa Danau Masura sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.	Ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kriteria untuk menjadi bidan desa dan dukungan pihak terkait dalam menempatkan bidan desa di Desa Danau Masura.	(Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (12 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Warga Desa Pararapak masih kesulitan mendapatkan akses air bersih yang memadai, sehingga kesehatan dan sanitasi warga dapat terganggu.	Warga Desa Pararapak yang kesulitan mendapatkan akses air bersih.	Permintaan untuk membangun sistem air bersih di Desa Pararapak melalui pemasangan jaringan PDAM dari Kalahien.	Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu pemasangan jaringan PDAM akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.	(Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Akses jalan antar Desa Telang Andrau dan Desa Pamangka di RT II kurang baik	Penduduk Desa Telang Andrau dan Desa Pamangka yang membutuhkan akses jalan yang lebih baik	Akses jalan antar Desa Telang Andrau dan Desa Pamangka di RT II perlu diperbaiki agar dapat menghubungkan dua desa dengan lebih baik.	pembuatan akses jalan antar Desa Telang Andrau dan Desa Pamangka pada RT II dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga di kedua desa, sehingga dapat membuka akses ekonomi dan meningkatkan kegiatan sosial antar desa.	(RT.II, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan antar Desa Murung Paken - Danau Masura belum sepenuhnya terhubung dan membutuhkan perbaikan agar dapat dilalui dengan baik.	Masyarakat Desa Murung Paken dan sekitarnya.	Usulan ini bertujuan untuk memperbaiki jalan antar Desa Murung Paken - Danau Masura sehingga dapat digunakan dengan lancar dan aman.	Peningkatan jalan akan mempermudah mobilitas masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan potensi wisata setempat	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan dari simpang tiga Dangka menuju Telang Andrau RT II dalam kondisi rusak dan tidak layak	Penduduk Desa Telang Andrau dan sekitarnya yang menggunakan jalan dari simpang tiga Dangka menuju Telang Andrau RT II	Jalan dari simpang tiga Dangka menuju Telang Andrau RT II membutuhkan pengerasan dan pengaspalan agar lebih mudah dilalui dan mengurangi resiko kecelakaan.	pengerasan dan pengaspalan jalan dari simpang tiga Dangka menuju Telang Andrau RT II akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sehingga dapat membuka akses ekonomi dan meningkatkan kegiatan sosial.	(RT.II, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan dari ujung jalan Got Pret Tomang simpang tiga Majundre Telang Andrau RT I menuju RT II mengalami kerusakan dan membutuhkan peningkatan.	Masyarakat di Desa Telang Andrau khususnya di RT I dan RT II yang menggunakan jalan Got Pret Tomang simpang tiga Majundre sebagai akses utama.	usulan ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur jalan di Desa Telang Andrau dengan memperbaiki jalan dari ujung jalan Got Pret Tomang simpang tiga Majundre Telang Andrau RT I menuju RT II.	Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat di Desa Telang Andrau dan juga dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.	(RT.I dan RT.II, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Dangka - Gagutur melewati Desa Marga Jaya belum selesai dibangun.	Warga Desa Dangka dan Desa Marga Jaya.	Jalan yang belum selesai dibangun dapat mengganggu aktivitas masyarakat Desa Dangka dan Desa Marga Jaya.	perbaikan jalan Desa Dangka - Gagutur melalui Desa Marga Jaya akan membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mobilitas barang di wilayah tersebut.	(Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan umum di Desa Murung Paken belum memiliki penerangan yang memadai sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat di malam hari.	Masyarakat Desa Murung Paken dan pengguna jalan umum di malam hari.	Usulan ini bertujuan untuk membangun jalan umum agar dapat memberikan penerangan yang cukup di malam hari.	Jalan umum di Desa Murung Paken kurang terang pada malam hari dan membutuhkan penerangan agar dapat digunakan dengan aman.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Keterbatasan aksesibilitas dapat mempengaruhi perekonomian lokal dan kegiatan sosial.	masyarakat Desa Muara Ripung dan sekitarnya yang mengakses jalan menuju jalan Provinsi Kalahien seberang	Desa Muara Ripung terletak di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.	Pembangunan jalan menuju jalan Provinsi Kalahien seberang dapat memperbaiki pelayanan publik dan kemudahan mobilitas masyarakat.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang buruk dapat menyebabkan kesulitan dalam transportasi dan mobilitas masyarakat.	Masyarakat Desa Muara Ripung dan Desa Danau Masura yang mengakses jalan tersebut	Jalan tersebut merupakan akses penting untuk menghubungkan Desa Muara Ripung dengan Desa Danau Masura.	Diperlukan dana yang cukup besar untuk melakukan rehabilitasi jalan tersebut.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Masyarakat yang memerlukan akses jalan menuju wilayah Telang Andrau.Jalan Desa Dangka - Telang Andrau dalam kondisi buruk dapat menghambat mobilitas masyarakat dan aksesibilitas menuju wilayah Telang Andrau.	masyarakat yang memerlukan akses jalan menuju wilayah Telang Andrau.	Jalan Desa Dangka - Telang Andrau memerlukan perbaikan agar dapat memenuhi standar aksesibilitas dan mobilitas yang memadai.	Dalam hal ini, diasumsikan bahwa perbaikan jalan Desa Dangka - Telang Andrau akan membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mobilitas barang di wilayah tersebut.	(Dangka, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan badan jalan Desa Masura menuju Muara Ripung merupakan kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Kelompok sasaran dari pembangunan badan jalan Desa Masura menuju Muara Ripung adalah seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah Desa Masura dan sekitarnya, serta para pelaku ekonomi dan wisata yang mengandalkan aksesibilitas yang baik untuk mengembangkan usaha mereka.	Jalan yang diusulkan melalui wilayah yang cukup terpencil. Pembangunan jalan ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas antar wilayah, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan ekonomi daerah.	Dengan dibangunnya jalan yang lebih baik, dapat meningkatkan aksesibilitas ke wilayah tersebut dan mendukung perekonomian lokal melalui sektor wisata dan tambak udang.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tidak adanya jalan yang menghubungkan Desa Muara Ripung dengan Buntok Seberang, menghambat aksesibilitas masyarakat dan perdagangan.	Masyarakat Desa Muara Ripung dan Buntok Seberang.	Pembangunan jalan tersebut dapat membuka akses perdagangan antar desa dan mempermudah mobilitas masyarakat.	Diperlukan pembebasan lahan untuk membangun jalan tersebut.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (9 Usulan)								
1	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kondisi rumah masyarakat di Desa Dangka yang tidak layak huni dapat mempengaruhi kesehatan dan keamanan masyarakat.	Masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni di Desa Dangka.	Bedah rumah masyarakat Desa Dangka bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.	Dengan kondisi rumah yang lebih layak huni, masyarakat di Desa Dangka diharapkan dapat lebih produktif dan kreatif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.	(Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rumah di RT I, RT II, dan RT III Desa Telang Andrau perlu direhabilitasi karena kondisinya yang sudah mengkhawatirkan.	Masyarakat di RT I, RT II, dan RT III Desa Telang Andrau yang rumahnya membutuhkan rehabilitasi.	usulan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada warga Desa Telang Andrau yang membutuhkan untuk merehabilitasi rumah mereka.	Diharapkan bantuan rehab rumah dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memiliki rumah yang lebih layak huni.	(RT I, RT II, dan RT III Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rumah masyarakat yang tidak layak huni, menghambat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	masyarakat Desa Muara Ripung yang rumahnya tidak layak huni.	Program bedah rumah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya tahan rumah terhadap bencana alam.	Diperlukan dana dan tenaga untuk melakukan bedah rumah tersebut.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Desa ini belum memiliki akses listrik yang memadai, sehingga masyarakat sulit untuk mengakses pelayanan publik dan aktivitas sehari-hari.	Masyarakat Desa Murung Paken	Usulan ini bertujuan untuk mengalirkan listrik ke Desa Murung Paken sehingga masyarakat dapat memperoleh akses listrik yang memadai.	Pengadaan listrik akan membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan publik dan meningkatkan produktivitas usaha mereka.	(Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jalan umum di Desa Murung Paken belum memiliki penerangan yang memadai sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat di malam hari.	masyarakat	Keterbatasan penerangan jalan umum di malam hari dapat mengganggu keselamatan masyarakat yang melintas.	Penerangan Jalan Umum (Tenaga Surya) akan meningkatkan keselamatan masyarakat yang melintas di malam hari dan memudahkan mobilitas masyarakat di sekitar wilayah tersebut.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kekurangan pencahayaan di sepanjang jalan yang melewati Desa Dangka dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan menghambat mobilitas pada malam hari.	Masyarakat yang menggunakan jalan di sepanjang Desa Dangka pada malam hari.	Dibutuhkan pemasangan lampu PJU sepanjang jalan yang melewati Desa Dangka untuk memperbaiki aksesibilitas dan keamanan bagi masyarakat.	pencahayaan yang memadai di sepanjang jalan yang melewati Desa Dangka dapat membantu meningkatkan keamanan dan mobilitas masyarakat pada malam hari.	(Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kurangnya fasilitas di komplek pemakaman dapat mengganggu kenyamanan dan kesopanan masyarakat saat melakukan upacara pemakaman.	Masyarakat Desa Pararapak yang akan melakukan upacara pemakaman.	Permintaan untuk membangun ruang tunggu di komplek pemakaman Desa Pararapak.	Ruang tunggu di komplek pemakaman dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi keluarga yang menghadiri pemakaman, serta memberikan penghormatan yang layak bagi orang yang telah meninggal.	(Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kurangnya penerangan jalan dan gang dalam RT II dan RT III Desa Telang Andrau	Penduduk Desa Telang Andrau yang membutuhkan penerangan jalan dan gang yang memadai	Penerangan jalan dan gang yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi warga Desa Telang Andrau di malam hari.	penerangan jalan dan gang dalam di RT II dan RT III dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan warga di malam hari, serta mencegah tindak kriminalitas.	(RT.II dan RT.III, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat membutuhkan bantuan sertifikasi lahan untuk memperoleh hak atas tanah yang mereka miliki.	Masyarakat di Desa Telang Andrau yang belum memiliki sertifikat tanah.	usulan ini bertujuan untuk membantu masyarakat Desa Telang Andrau dalam mendapatkan sertifikasi lahan untuk meningkatkan hak kepemilikan mereka atas tanah yang mereka miliki.	Dengan adanya bantuan sertifikasi lahan, diharapkan masyarakat Desa Telang Andrau dapat memiliki hak kepemilikan yang jelas atas tanah mereka dan dapat menjadikan tanah mereka sebagai aset yang lebih bernilai.	(Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (6 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor BPD desa mengalami kerusakan dan tidak representatif, menghambat pelayanan publik di desa.	Pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik di desa. Anggota BPD desa yang membutuhkan fasilitas kantor yang layak.	Kantor BPD desa merupakan pusat kegiatan pemerintahan desa dan pusat koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.	Diperlukan dukungan dan kerja sama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan dana yang cukup untuk perbaikan dan perawatan kantor BPD desa.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor desa yang rusak dan tidak layak digunakan, menghambat kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Pemerintah Desa Muara Ripung, masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa.	Kantor desa merupakan pusat pelayanan dan pengambilan keputusan bagi masyarakat.	Diperlukan dana yang cukup besar untuk melakukan rehabilitasi kantor desa.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Murung Paken mendapatkan tunjangan yang kurang memadai.	Anggota BPD Desa Murung Paken.	Usulan ini bertujuan untuk memberikan kenaikan tunjangan bagi anggota BPD Desa Murung Paken sehingga dapat memotivasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.	Terdapat dana yang cukup untuk memberikan kenaikan tunjangan dan tidak mengganggu anggaran desa secara keseluruhan	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Insentif yang rendah dapat mengurangi motivasi dan kinerja BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terhambat.	Anggota BPD Desa Pararapak yang bertugas untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.	Permintaan untuk menaikkan insentif bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pararapak.	Menaikkan insentif BPD dapat meningkatkan motivasi anggota BPD dalam bekerja dan memberikan dampak positif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.	(Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tunjangan yang diberikan kepada BPD di Desa Dangka tidak sesuai dengan UMK sehingga dapat mempengaruhi kinerja dan motivasi anggota BPD.	Anggota BPD di Desa Dangka.	BPD merupakan lembaga yang terdiri dari perwakilan masyarakat di Desa Dangka dan bertugas memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan di desa.	Kenaikan tunjangan BPD sesuai dengan UMK dapat memotivasi para anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kinerja lembaga BPD.	(Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Besaran insentif yang diberikan kepada Mantir Adat di Desa Murung Paken belum memadai dan tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban.	Mantir Adat di Desa Murung Paken.	Usulan ini bertujuan untuk memberikan kenaikan insentif bagi Mantir Adat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mendorong kinerja yang lebih baik.	Terdapat dana yang cukup untuk memberikan kenaikan insentif dan tidak mengganggu anggaran desa secara keseluruhan.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (1 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Ibu-ibu di Desa Pararapak belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata boga yang sehat dan bergizi, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman tentang nutrisi dan dampak kesehatannya.	Ibu-ibu di Desa Pararapak yang ingin meningkatkan pengetahuan tentang tata boga sehat dan bergizi.	Pelatihan tentang tata boga dapat membantu ibu-ibu Desa Pararapak dalam memilih bahan makanan yang sehat dan bergizi, serta cara memasak dan mengolahnya dengan benar.	Diperlukan biaya untuk menyediakan fasilitas pelatihan dan mengundang ahli gizi atau koki yang berpengalaman. Lokasi: Desa Pararapak.	(Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit jengkol, porang, dan singkong unggul yang kurang memadai, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas pertanian di daerah tersebut.	. Masyarakat yang berkecimpung dalam produksi tanaman jengkol, porang, dan singkong unggul yang membutuhkan bantuan bibit agar dapat meningkatkan produktivitas tanaman.	Bantuan bibit jengkol, porang, dan singkong unggul diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.	Asumsi bahwa bibit jengkol, porang, dan singkong unggul yang diusulkan dapat tumbuh dengan baik di daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat.	(Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Warga Desa Pararapak membutuhkan tambahan sumber penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.	Warga Desa Pararapak yang membutuhkan tambahan sumber penghasilan.	Ternak babi dan ikan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga Desa Pararapak.	Diperlukan biaya untuk membeli bibit ikan dan ternak babi serta memberikan pelatihan tentang cara beternak yang baik dan benar.	(Desa Pararapak., Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kurangnya sarana dan prasarana pertanian yang memadai, terutama traktor lotari bagi kelompok tani RT I, RT II dan RT III Desa Telang Andrau, sehingga dapat menghambat produktivitas dan efektivitas pertanian di daerah tersebut.	Kelompok tani RT I, RT II, dan RT III Desa Telang Andrau yang membutuhkan traktor lotari untuk mempermudah kegiatan pertanian.	Pengadaan traktor lotari bagi kelompok tani RT I, RT II, dan RT III Desa Telang Andrau diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas pertanian di daerah tersebut.	Asumsi bahwa traktor lotari dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas pertanian di Desa Telang Andrau, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.	(RT I, RT II, dan RT III Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kondisi chekdam/irigasi yang rusak dapat mengganggu produktivitas pertanian dan mengancam ketahanan pangan masyarakat di Desa Pararapak.	Petani di Desa Pararapak yang mengandalkan irigasi sekunder untuk kegiatan pertanian.	Permintaan untuk memperbaiki chekdam atau irigasi sekunder yang longsor di Desa Pararapak.	Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat, oleh karena itu perbaikan infrastruktur irigasi akan membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat.	(Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Titian kayu yang digunakan untuk akses ke lahan pertanian di Desa Pararapak rusak atau lapuk sehingga menyulitkan petani dalam mengangkut hasil panen dan bahan-bahan pertanian.	Petani di Desa Pararapak yang menggunakan titian kayu untuk akses ke lahan pertanian mereka.	Titian kayu yang rusak atau lapuk dapat menyebabkan risiko kecelakaan bagi petani dan menghambat produktivitas usaha tani.	Diperlukan biaya untuk membangun atau memperbaiki titian kayu yang rusak atau lapuk.	(Desa Pararapak., Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Wilayah perkebunan nanas di Desa Pararapak sering mengalami genangan air yang berlebihan saat musim hujan, sehingga menghambat produktivitas dan kualitas tanaman.	Petani nanas di Desa Pararapak.	Pengeringan air dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, serta mencegah timbulnya penyakit pada tanaman akibat kelebihan air.	Diperlukan biaya untuk membangun atau memperbaiki sistem pengeringan air di wilayah perkebunan nanas Desa Pararapak.	(Desa Pararapak., Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
3.30.2.17.3.31.01.0000 - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tidak tersedianya peralatan pengadaan tepung tapioka yang memadai, sehingga dapat menghambat kegiatan produksi tepung tapioka dan mengganggu kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan produksi tepung tapioka sebagai sumber penghasilan.	masyarakat	Bantuan peralatan pengadaan tepung tapioka diharapkan dapat memperbaiki ketersediaan peralatan produksi, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang berkecimpung dalam produksi tepung tapioka.	Asumsi bahwa peralatan pengadaan tepung tapioka yang diusulkan akan mempermudah dan meningkatkan produktivitas produksi tepung tapioka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.	(Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (7 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	nsentif RT/RW sebesar Rp 150.000/bulan dinilai kurang memadai untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan RT/RW.	RT/RW di Desa Telang Andrau yang menerima insentif sebesar Rp 150.000/bulan.	usulan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja ketua RT/RW di Desa Telang Andrau dengan memberikan insentif yang lebih besar dari yang saat ini diberikan.	Dengan insentif yang lebih besar, diharapkan ketua RT/RW akan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.	(Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Desa Pararapak belum memiliki ambulance, sehingga kesulitan dalam memberikan pertolongan pertama pada warga yang membutuhkan dalam keadaan darurat.	Warga Desa Pararapak, terutama yang membutuhkan pertolongan darurat.	Ambulance sangat penting dalam memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat, seperti kecelakaan atau sakit yang membutuhkan penanganan cepat.	Biaya pengadaan ambulance dapat diakomodasi oleh anggaran desa atau bantuan dari pihak luar.	(Desa Pararapak., Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja dan langgar di Desa Dangka membutuhkan bantuan hibah untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan gedung.	Gereja dan langgar di Desa Dangka.	Bantuan hibah untuk gereja dan langgar di Desa Dangka bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat.	Dengan adanya bantuan hibah untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung gereja dan langgar, umat agama di Desa Dangka dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Dangka, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja Katolik Santo Petros RT II Desa Telang Andrau membutuhkan rehabilitasi berat agar dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh jemaat.	Jemaat di Gereja Katolik Santo Petros RT II Desa Telang Andrau.	usulan ini bertujuan untuk memperbaiki bangunan Gereja Katolik Santo Petros yang sudah mengalami kerusakan di RT II Desa Telang Andrau.	Diharapkan rehab Gereja Katolik Santo Petros dapat meningkatkan fasilitas keagamaan di Desa Telang Andrau dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan di daerah tersebut.	(RT II Desa Telang Andrau., Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Isra Mi&raj di Desa Murung Paken memerlukan biaya untuk penyelenggaraan yang tidak tercukupi oleh anggaran desa.	Masyarakat Desa Murung Paken yang merayakan Isra Mi&raj.	Usulan ini bertujuan untuk mengumpulkan bantuan/sumbangan dari masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Isra Mi&raj	Terdapat kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang bersedia memberikan bantuan/sumbangan untuk kegiatan Isra Mi&raj di Desa Murung Paken.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Langgar Ar-Rahmat RT II Desa Telang Andrau membutuhkan pemasangan keramik dan pelapon agar lebih layak digunakan sebagai tempat ibadah.	Jamaah di Langgar Ar-Rahmat RT II Desa Telang Andrau.	Pengadaan atau pemasangan keramik dan pelapon Langgar Ar-Rahmat RT II Desa Telang Andrau: usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keindahan Langgar Ar-Rahmat di RT II Desa Telang Andrau dengan mengadakan pengadaan atau pemasangan keramik dan pelapon.	Dengan pengadaan atau pemasangan keramik dan pelapon, diharapkan Langgar Ar-Rahmat dapat menjadi tempat ibadah yang lebih nyaman dan indah bagi masyarakat Desa Telang Andrau.	(T II Desa Telang Andrau., Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tempat ibadah di Desa Pararapak mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan untuk dapat digunakan kembali.	Warga Desa Pararapak yang beragama Kristen, Katholik, dan Islam.	Tempat ibadah yang baik dan layak dapat meningkatkan kualitas dan kenyamanan dalam beribadah.	Diperlukan biaya untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi pada tempat ibadah yang rusak atau lapuk.	(Desa Pararapak., Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : Hj. NYIMAS ARTIKA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Halaman SDN Tabatan tidak rata dan tidak layak untuk digunakan sebagai area bermain siswa.	Siswa, guru, dan pihak sekolah.	Penyiringan dan penimbunan halaman akan meningkatkan kualitas lingkungan belajar siswa.	Kondisi lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak ada pelabuhan yang memadai di SDN Tabatan. Ukuran pelabuhan dan jembatan saat ini kurang memadai untuk menampung lalu lintas kapal	siswa, Guru, serta masyarakat lainnya	Pembangunan pelabuhan dan jembatan akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan orang.	Pembangunan pelabuhan dan jembatan dapat meningkatkan mobilitas	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada puskesmas pembantu di Desa Tabatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.	Masyarakat Desa Tabatan dan pihak kesehatan.	Pembangunan puskesmas pembantu akan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Adanya fasilitas kesehatan yang memadai dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (14 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Abrasi yang terjadi di Desa Tampulang menyebabkan erosi pinggir sungai dan mengancam pemukiman warga.	Warga Desa Tampulang yang tinggal di pinggir sungai yang terancam abrasi.	Abrasi yang terjadi di Desa Tampulang menyebabkan erosi pinggir sungai dan mengancam pemukiman warga.	Pembangunan siring cor beton dapat membantu mengurangi abrasi dan mengurangi risiko erosi pinggir sungai yang mengancam pemukiman warga.	(Tampulang, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sungai Jaya belum memiliki pengadaan air bersih atau sumur bor.	Penduduk desa Sungai Jaya yang kesulitan mendapatkan akses ke air bersih.	Pengadaan air bersih atau sumur bor sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk desa Sungai Jaya.	Diperlukan alokasi dana yang cukup untuk melakukan pengadaan air bersih atau sumur bor agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk desa.	(Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Akses jalan dari Kecamatan Jenamas ke Desa Rantau Bahuang belum memadai, sehingga sulit untuk diakses oleh masyarakat dan kendaraan.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pembangunan jalan desa akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas orang dan barang di daerah tersebut.	Adanya akses jalan yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Gali Timbun perluasan jalan Desa Bintang Kurung RT. 03 T:1.5M, L: 1.600M, (1M)	Masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Bintang Kurung dan terdampak langsung oleh kegiatan gali timbun.	Kegiatan gali timbun dilakukan sebagai bagian dari perluasan jalan Desa Bintang Kurung untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Lokasi gali timbun akan dipilih dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul.	Dengan adanya perluasan jalan Desa Bintang Kurung melalui kegiatan gali timbun, aksesibilitas masyarakat akan meningkat dan dapat meningkatkan perekonomian wilayah setempat.	(RT. 03 T:1.5M, L: 1.600M, (1M), Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Rantau Bahuang kurang memadai dan perlu dibeton.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pembangunan siring cor beton akan meningkatkan daya tahan jalan dan mengurangi kerusakan.	Adanya jalan yang berkualitas dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi dan mobilitas masyarakat.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan di RT 09 dan RT 10 Dusun Bakota mungkin perlu ditingkatkan kualitasnya.	Penduduk Dusun Bakota yang menggunakan jalan tersebut.	Peningkatan kualitas jalan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di Dusun Bakota.	Diperlukan alokasi dana yang cukup untuk meningkatkan kualitas jalan agar dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat.	(RT 09 dan RT 10 Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan tembus Desa Rantau Bahuang ke perbatasan Kecamatan Paminggir HSU Kalsel belum memadai dan perlu diperbaiki.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pengecoran jalan tembus akan meningkatkan kapasitas jalan dan memudahkan akses ke daerah tersebut.	Adanya jalan tembus yang memadai dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan gantung di Desa Sungai Jaya mungkin mengalami kerusakan atau kekurangan perawatan.	Penduduk desa Sungai Jaya yang menggunakan jembatan gantung.	Jembatan tersebut penting untuk menghubungkan antara dua sisi desa Sungai Jaya yang terpisah oleh sungai.	Kondisi jembatan tersebut belum diketahui, namun perlu dilakukan pengecekan dan perawatan secara rutin agar terhindar dari kemungkinan kerusakan yang dapat membahayakan pengguna.	(Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan penyebrangan Desa Mahajandau di Sei Lunuk mungkin mengalami kerusakan atau kekurangan perawatan.	Penduduk desa Mahajandau yang menggunakan jembatan penyebrangan Sei Lunuk.	Jembatan tersebut penting untuk menghubungkan antara dua sisi desa Mahajandau yang terpisah oleh sungai Sei Lunuk.	Kondisi jembatan tersebut belum diketahui, namun perlu dilakukan pengecekan dan perawatan secara rutin agar terhindar dari kemungkinan kerusakan yang dapat membahayakan pengguna.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan umum Sungai Hamsi di Desa Rantau Bahuang belum memadai dan perlu direnovasi.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pembangunan jembatan cor beton akan meningkatkan kapasitas jembatan dan mengurangi risiko kecelakaan.	Pembangunan jembatan yang memadai dapat meningkatkan konektivitas dan keamanan transportasi.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Pakat Pahari 2 (500 Juta) Kelurahan Mengkatip. Kebutuhan dana dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pembangunan jalan lanjutan dan pengelolaannya.	Masyarakat yang tinggal di sekitar Kelurahan Mengkatip dan membutuhkan akses jalan yang lebih baik.	Pembangunan jalan lanjutan di Pakat Pahari 2 dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di Kelurahan Mengkatip.	Dengan adanya pembangunan jalan lanjutan, masyarakat di Kelurahan Mengkatip akan memiliki aksesibilitas yang lebih baik untuk beraktivitas sehari-hari.	(Jalan Pakat Pahari 2 Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Siring Beton Jalan Desa Bintang Kurung, ukuran T: 1m, P: 500m (1M)	Masyarakat Desa Bintang Kurung	Pembangunan siring beton dilakukan sebagai bagian dari perbaikan infrastruktur jalan Desa Bintang Kurung untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan meminimalkan dampak banjir.	Dengan adanya pembangunan siring beton di jalan Desa Bintang Kurung, aksesibilitas masyarakat akan meningkat dan dapat meningkatkan perekonomian wilayah setempat.	(Desa Bintang Kurung, Bintang Kurung, Kec. Karau Kuala)	
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tidak ada jembatan yang memadai untuk menghubungkan Desa Rantau Bahuang dan Kecamatan Jenamas melalui Sungai Murung Kerangka.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pembangunan jembatan beton penghubung akan meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses ke daerah tersebut.	Adanya jembatan yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi dan pertumbuhan ekonomi.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Titian Pertanian sepanjang 900 Meter Dusun Bakota menuju perkebunan sawit.	Masyarakat setempat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit dan jalan baru yang dibangun. Pemilik lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit atau dilalui oleh jalan baru. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan jalan dan eksploitasi perkebunan sawit.	Jalan atau titian sepanjang 900 meter akan dibangun dari Dusun Bakota menuju perkebunan sawit dengan tujuan memudahkan transportasi dan pengangkutan hasil perkebunan.	Pembangunan jalan atau titian dan eksploitasi perkebunan sawit akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Masyarakat setempat akan mendapatkan manfaat dari pembangunan jalan baru dan perkebunan sawit, seperti kesempatan kerja dan penghasilan tambahan.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan titian tani sepanjang 800 meter di Desa Mahajandau mungkin dalam kondisi rusak atau belum beraspal.	Penduduk desa Mahajandau yang menggunakan jalan titian tani.	Jalan titian tani adalah akses penting bagi petani di desa Mahajandau untuk mengangkut hasil pertanian mereka.	Diperlukan perbaikan dan pengaspalan jalan titian tani untuk memastikan kelancaran transportasi barang dan meningkatkan kesejahteraan petani desa Mahajandau	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan usaha tani di RT.04 Desa Tabatan tidak memadai dan kurang layak untuk digunakan.	Pelaku usaha tani	Pembangunan lanjutan jalan usaha tani akan meningkatkan aksesibilitas transportasi dan memudahkan pengangkutan hasil panen.	Adanya aksesibilitas transportasi yang memadai dapat meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan pelaku usaha tani.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Tidak ada pelabuhan yang memadai di Desa Rantau Bahuang.	Pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah	Pembangunan pelabuhan akan meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses ke daerah tersebut.	Pembangunan pelabuhan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (16 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Desa Tampulang membutuhkan Alkah kuburan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pemakaman warga.	Warga Desa Tampulang yang memerlukan tempat pemakaman.	Alkah kuburan yang telah ada sudah tidak cukup memenuhi kebutuhan warga.	Pembangunan/Perluasan Alkah kuburan akan memudahkan aksesibilitas dan ketersediaan tempat pemakaman untuk warga Desa Tampulang.	(Tampulang, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gedung serbaguna di Desa Tabatan tidak layak untuk digunakan karena rusak atau tidak memadai.	Masyarakat Desa Tabatan dan pihak pemerintah.	Penyiringan gedung serbaguna akan meningkatkan kualitas dan fungsionalitas gedung.	Adanya gedung serbaguna yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial dan budaya di masyarakat.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Halaman masjid Nurrul Huda di Desa Mahajandau perlu penataan ulang.	Penduduk desa Mahajandau yang memanfaatkan halaman masjid Nurrul Huda.	Halaman masjid Nurrul Huda adalah tempat berkumpul dan beribadah bagi masyarakat desa Mahajandau.	Diperlukan perawatan dan penataan ulang halaman masjid untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Keterbatasan lahan untuk kuburan Muslimin di Mesjid Jami Nurusalihin di Rt. 03 Desa Rantau Bahuang.	Muslimin di Desa Rantau Bahuang.	sulan pembuatan dan penimbunan alkah Kuburan Muslimin di Mesjid Jami Nurusalihin di Rt. 03 Desa Rantau Bahuang.	Tidak tersedianya lahan yang cukup untuk pemakaman Muslimin di Mesjid Jami Nurusalihin dapat mengganggu aktivitas pemakaman secara umum di desa tersebut.	(Rt. 03 Desa Rantau Bahuang., Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Langgar Baiturrahman di Kelurahan Mengkatip membutuhkan pelebaran teras.	Warga dan jamaah Langgar Baiturrahman di Kelurahan Mengkatip.	Langgar Baiturrahman di Kelurahan Mengkatip membutuhkan pelebaran teras.	Teras langgar Baiturrahman di Kelurahan Mengkatip kurang memadai dan membutuhkan perluasan agar dapat menampung lebih banyak jamaah.	(Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Lanjutan oembangunan langgar Fathul Jannah (100Juta) Desa Batilap.	Masyarakat setempat yang akan menggunakan fasilitas langgar Fathul Jannah.	Pembangunan langgar Fathul Jannah sebesar 100 juta rupiah dilakukan sebagai upaya meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan di Desa Batilap.	Dengan adanya langgar Fathul Jannah yang baru, masyarakat setempat akan memiliki fasilitas keagamaan yang lebih baik dan memudahkan kegiatan keagamaan di Desa Batilap.	(Desa Batilap, Batilap, Kec. Dusun Hilir)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pagar keliling Gke Eka Harap dan pembangunan pasturi di Desa Mahajandau	Penduduk desa Mahajandau	Pagar keliling dan pasturi adalah fasilitas penting untuk keperluan ibadah dan keseharian masyarakat desa Mahajandau.	Diperlukan pengawasan dan pemeliharaan secara rutin untuk memastikan pagar keliling dan pasturi dapat digunakan dengan baik.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan teras Masjid Besar Nurul Iman di Kelurahan Mengkatip belum selesai dan membutuhkan penyelesaian	Warga dan jamaah Masjid Besar Nurul Iman di Kelurahan Mengkatip.	Masjid Besar Nurul Iman di Kelurahan Mengkatip membutuhkan penyelesaian pembangunan teras.	Pembangunan teras Masjid Besar Nurul Iman di Kelurahan Mengkatip belum sepenuhnya didanai atau terdapat masalah teknis dalam pembangunan yang menyebabkan terhentinya proyek.	(Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	Kebutuhan dana dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk perluasan lahan pekuburan dan pengelolaannya.	Keluarga yang membutuhkan tempat pemakaman bagi anggota keluarga mereka di Dusun Bakota. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam perluasan lahan pekuburan dan pengelolaannya seperti pemerintah setempat, pengelola pekuburan, dan pengembang lahan.	Perluasan lahan pekuburan akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tempat pemakaman bagi masyarakat di Dusun Bakota.	Dengan adanya perluasan lahan pekuburan, masyarakat di Dusun Bakota akan memiliki tempat pemakaman yang cukup untuk anggota keluarga mereka.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	pembangunan gudang Masjid penyimpanan alat-alat mubillr. Masjid Dusun Bakota.	Pengurus masjid dan jemaah yang menggunakan alat-alat mubiller yang disimpan di gudang. Masyarakat setempat yang tinggal di sekitar masjid dan gudang masjid. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan gudang masjid.	Gudang masjid akan dibangun sebagai tempat penyimpanan alat-alat mubiller seperti sajadah, mukena, Al-Quran, dan perlengkapan kebersihan.	Dengan adanya gudang masjid, penyimpanan dan pengelolaan alat-alat mubiller akan lebih teratur dan efektif.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	pembangunan gudang Masjid penyimpanan alat-alat mubillr. Masjid Dusun Bakota.	Pengurus masjid dan jemaah yang menggunakan alat-alat mubiller yang disimpan di gudang. Masyarakat setempat yang tinggal di sekitar masjid dan gudang masjid. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan gudang masjid.	Gudang masjid akan dibangun sebagai tempat penyimpanan alat-alat mubiller seperti sajadah, mukena, Al-Quran, dan perlengkapan kebersihan.	Dengan adanya gudang masjid, penyimpanan dan pengelolaan alat-alat mubiller akan lebih teratur dan efektif.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
12	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Mahajandau belum memiliki jaringan listrik, sehingga mengakibatkan penduduk desa kesulitan dalam mendapatkan sumber energi listrik.	Penduduk desa Mahajandau yang belum memiliki akses ke listrik.	Pembangunan jaringan listrik dapat memberikan akses ke sumber energi listrik yang sangat dibutuhkan oleh penduduk desa, serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.	Diperlukan alokasi dana yang cukup untuk membangun jaringan listrik dan memastikan pemeliharaannya agar dapat berfungsi secara optimal.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
13	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Sungai Jaya belum memiliki jaringan listrik, sehingga mengakibatkan penduduk desa kesulitan dalam mendapatkan sumber energi listrik.	Penduduk desa Sungai Jaya yang belum memiliki akses ke listrik.	Pembangunan jaringan listrik dapat memberikan akses ke sumber energi listrik yang sangat dibutuhkan oleh penduduk desa, serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.	Diperlukan alokasi dana yang cukup untuk membangun jaringan listrik dan memastikan pemeliharaannya agar dapat berfungsi secara optimal.	(Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
14	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Tampulang belum memiliki jaringan listrik PLN sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari warga.	Warga Desa Tampulang yang memerlukan listrik untuk kegiatan sehari-hari.	Belum adanya jaringan listrik PLN di Desa Tampulang.	Pembangunan jaringan listrik PLN akan meningkatkan aksesibilitas sumber daya energi dan membantu meningkatkan produktivitas warga.	(Tampulang, Kec. Jenamas)	
15	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tidak ada akses listrik yang memadai di Desa Tabatan.	Masyarakat Desa Tabatan dan pihak PLN.	Pembangunan fasilitas listrik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memungkinkan pengembangan usaha dan industri.	Adanya akses listrik yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	-	-	Pembuatan sumur Bor di Masjid di Dusun Bakota. Kebutuhan dana dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pembuatan, pemeliharaan, dan pengelolaan sumur bor.	Pengurus masjid dan jemaah yang akan menggunakan air sumur bor untuk kebutuhan ibadah dan kegiatan di masjid. Masyarakat setempat yang tinggal di sekitar masjid dan area tempat pembuatan sumur bor. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembuatan, pemeliharaan, dan pengelolaan sumur bor.	Sumur bor akan dibuat sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan ibadah dan kegiatan di Masjid Dusun Bakota.	Dengan adanya sumur bor, Masjid Dusun Bakota akan memiliki sumber air bersih yang cukup untuk kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : Hj. ENUNG IRAWATI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Gedung sekolah di Desa Murung Paken mengalami kerusakan atap yang menyebabkan masalah pada saat hujan.	Siswa dan guru di Desa Murung Paken yang terganggu oleh kondisi atap gedung sekolah.	Gedung sekolah di Desa Murung Paken digunakan sebagai tempat belajar mengajar.	Perbaikan harus dilakukan segera untuk memastikan keselamatan siswa dan guru.	(Gedung sekolah di Desa Murung Paken, Kabupaten Buntok, Kalimantan Tengah, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Gedung sekolah mengalami kerusakan dan atap bocor, berpotensi mengganggu proses belajar mengajar dan mengancam keselamatan siswa dan guru.	Siswa dan guru di sekolah yang terdampak.	Perlu dilakukan perbaikan ringan pada atap gedung sekolah agar tidak bocor dan dapat digunakan dengan aman.	Anggaran terbatas sehingga perbaikan yang dilakukan hanya perbaikan ringan.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Permasalahan: Kurangnya keamanan dan keselamatan di lingkungan sekolah akibat tidak adanya pagar pengaman.	Siswa-siswi TK, SD-1, SD-2, SD-3, dan SMP di Desa Kalahien yang membutuhkan pagar sekolah yang aman dan nyaman.	Pembuatan pagar sekolah bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan siswa-siswi TK, SD-1, SD-2, SD-3, dan SMP dalam belajar. Pagar yang aman dan nyaman dapat mencegah akses masuk orang yang tidak berkepentingan ke dalam area sekolah dan meningkatkan keselamatan siswa-siswi dari kejahatan.	Dengan adanya pagar sekolah yang aman dan nyaman, siswa-siswi di Desa Kalahien dapat belajar dengan tenang dan aman.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kurangnya fasilitas meubelair yang memadai di SMP 6 Desa Tanjung Jawa yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar	Siswa dan guru SMP 6 Desa Tanjung Jawa	Pengadaan meubelair kelas dan kantor SMP 6 Desa Tanjung Jawa.	Dengan tersedianya fasilitas meubelair yang memadai, kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar dapat meningkat.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kurangnya fasilitas rumah dinas bagi guru P3K SMP 6 Desa Tanjung Jawa yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kinerja guru	Guru P3K SMP 6 Desa Tanjung Jawa	Pembangunan rumah dinas guru P3K SMP 6 Desa Tanjung Jawa.	Dengan tersedianya fasilitas rumah dinas yang memadai, kualitas hidup guru dapat meningkat dan dapat berdampak pada kinerja guru dalam proses belajar mengajar.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Permasalahan yang dihadapi dalam rehabilitasi bangunan sekolah TK di Desa Danau Masura adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan renovasi atau perbaikan bangunan yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, sulitnya mencari bahan bangunan yang berkualitas dan terjangkau juga menjadi faktor yang memperumit proses rehabilitasi bangunan sekolah tersebut	Guru dan Siswa	Rehabilitasi bangunan sekolah TK di Desa Danau Masura dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di desa tersebut.	Rehabilitasi bangunan sekolah TK di Desa Danau Masura dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di desa tersebut	(TK Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Postu Desa Murung Paken mengalami kerusakan dan kurang representatif, menghambat pelayanan kesehatan dan keamanan di desa.	Masyarakat Desa Murung Paken	Postu Desa Murung Paken merupakan pusat kegiatan layanan kesehatan di desa.	Perbaikan dan perawatan harus dilakukan secara berkala untuk mempertahankan kualitas postu desa.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Postu di desa mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.	Masyarakat di desa yang memanfaatkan postu.	Perlu dilakukan perbaikan pada postu untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Perbaikan postu dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kurangnya tenaga kesehatan di Desa Teluk Mampun.	Masyarakat Desa Teluk Mampun.	Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan perawat yang dapat memberikan pelayanan kesehatan di Desa Teluk Mampun.	Tenaga kesehatan perawat akan disediakan oleh pihak pemerintah atau lembaga kesehatan setempat.	(Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (29 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah persawahan di Desa Kalahien sering mengalami banjir pada saat musim hujan karena tidak adanya cekdam dan tanggul siring cor yang memadai.	Petani dan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah persawahan Desa Kalahien.	Daerah persawahan di Desa Kalahien merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat setempat. Namun, sering kali terjadi banjir saat musim hujan karena tidak adanya cekdam dan tanggul siring cor yang memadai untuk menahan aliran air sehingga membuat tanaman padi yang ditanam rusak dan menghambat hasil panen.	Dengan dibangunnya cekdam dan tanggul siring cor yang memadai, daerah persawahan di Desa Kalahien akan terhindar dari banjir dan petani dapat lebih produktif dalam menghasilkan panen padi yang berkualitas. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat dan memajukan sektor pertanian di Desa Kalahien.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan PDAM yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan masyarakat Desa Tanjung Jawa kesulitan dalam mendapatkan pasokan air bersih dan sehat.	masyarkat	Perbaikan jaringan PDAM dapat meningkatkan akses masyarakat Desa Tanjung Jawa terhadap air bersih dan sehat, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	Perbaikan jaringan PDAM dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya tarik investasi di Desa Tanjung Jawa.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya drenase di pemukiman Desa Kalahien menyebabkan terjadinya banjir saat musim hujan.	Warga pemukiman di Desa Kalahien.	Pemukiman di Desa Kalahien mengalami banjir saat musim hujan akibat kurangnya drenase yang baik.	Dengan adanya drenase yang baik, warga pemukiman dapat terhindar dari banjir saat musim hujan.	(Desa Kalahien., Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Usulan rehab kantor BPD sudah tidak layak Desa Danau Masura	Masyarakat	kantor BPD, usulan rehab dilakukan karena kondisi bangunan yang sudah tidak memadai untuk kegiatan operasional BPD.	Kantor BPD di Desa Danau Masura sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk digunakan. Oleh karena itu, rehabilitasi kantor BPD sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh BPD di Desa Danau Masura.	(Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Beberapa desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan menghadapi masalah aksesibilitas dan transportasi karena kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Salah satu proyek pembangunan jalan yang masih perlu dilanjutkan dan direkonstruksi yaitu Lanjutkan Jalan B.A. Tidja (Kaladan Menuju Desa Talio)	Masyarakat	Jalan B.A. Tidja dari Kaladan menuju Desa Talio: Jalan ini belum selesai dibangun dan masih banyak bagian yang rusak. Jalan ini penting untuk memudahkan akses masyarakat dari Desa Kaladan ke Desa Talio, serta mempermudah akses transportasi barang dan jasa.	Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan dan rekonstruksi jalan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antar desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan	(Jalan B.A. Tidja dari Kaladan menuju Desa Talio, Karau Kuala)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Beberapa desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan menghadapi masalah aksesibilitas dan transportasi karena kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Salah satu proyek pembangunan jalan yang masih perlu dilanjutkan dan direkonstruksi yaitu Lanjutkan Jalan Menuju Desa Muara Arai	Masyarakat	Jalan menuju Desa Muara Arai Jalan ini penting untuk memudahkan akses masyarakat dari Desa Muara Arai ke pusat kota, serta mempermudah akses transportasi barang dan jasa.	Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan dan rekonstruksi jalan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antar desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan	(Jalan Menuju Desa Muara Arai, Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Beberapa desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan menghadapi masalah aksesibilitas dan transportasi karena kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Salah satu proyek pembangunan jalan yang masih perlu dilanjutkan dan direkonstruksi yaitu Lanjutkan Pembangunan Jalan Desa Teluk Telaga Menuju Desa Talio	Masyarakat	Jalan Desa Teluk Telaga menuju Desa Talio: Jalan ini belum selesai dibangun dan mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Jalan ini penting untuk memudahkan akses masyarakat dari Desa Teluk Telaga ke Desa Talio, serta mempermudah akses transportasi barang dan jasa.	Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan dan rekonstruksi jalan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antar desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan	(Jalan Desa Teluk Telaga Menuju Desa Talio, Teluk Telaga, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Beberapa desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan menghadapi masalah aksesibilitas dan transportasi karena kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Salah satu proyek pembangunan jalan yang masih perlu dilanjutkan dan direkonstruksi yaitu Rekontruksi Jalan Penghubung Desa Kalanis Menuju Desa Telang Baru	Masyarakat	Jalan Penghubung Desa Kalanis menuju Desa Telang Baru: Jalan ini membutuhkan rekonstruksi karena kondisinya yang rusak parah. Jalan ini penting untuk memudahkan akses masyarakat dari Desa Kalanis ke Desa Telang Baru, serta mempermudah akses transportasi barang dan jasa	Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan dan rekonstruksi jalan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antar desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan	(Jalan Penghubung Desa Kalanis Menuju Desa Telang Baru, Dusun Hilir)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dalam beberapa lingkungan di Kelurahan Buntok Kota, terdapat beberapa gang (jalan kecil) yang membutuhkan rehabilitasi seperti Gang Barito Raya I di Jalan Barito Raya,	Masyarakat	Gang Barito Raya I: Gang ini terletak di Jalan Barito Raya Kelurahan Buntok Kota. Gang ini membutuhkan rehabilitasi karena kondisinya yang sudah sangat buruk, dengan banyak lubang dan kerusakan di permukaannya. Kondisi gang ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melewatinya.	Rehabilitasi gang tersebut akan mengurangi risiko kecelakaan dan membantu memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Buntok Kota.	(Gang Barito Raya I di Jalan Barito Raya,, Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dalam beberapa lingkungan di Kelurahan Buntok Kota, terdapat beberapa gang (jalan kecil) yang membutuhkan rehabilitasi seperti Gang Barito Raya II di Jalan Barito Raya	Masyarakat	Gang Barito Raya II: Gang ini terletak di Jalan Barito Raya Kelurahan Buntok Kota. Gang ini membutuhkan rehabilitasi karena kondisinya yang sudah sangat buruk, dengan banyak lubang dan kerusakan di permukaannya. Kondisi gang ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melewatinya.	Rehabilitasi gang tersebut akan mengurangi risiko kecelakaan dan membantu memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Buntok Kota.	(Gang Barito Raya II di Jalan Barito Raya, Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dalam beberapa lingkungan di Kelurahan Buntok Kota, terdapat beberapa gang (jalan kecil) yang membutuhkan rehabilitasi seperti Gang Jelawat di Jalan Padat Karya.	Masyarakat	Gang Jelawat: Gang ini terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Buntok Kota. Gang ini membutuhkan rehabilitasi karena kondisinya yang sudah sangat buruk, dengan banyak lubang dan kerusakan di permukaannya. Kondisi gang ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melewatinya.	Rehabilitasi gang tersebut akan mengurangi risiko kecelakaan dan membantu memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Buntok Kota.	(Gang Jelawat di Jalan Padat Karya., Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dalam lingkungan di Kelurahan Hilir Sper terdapat beberapa gang (jalan kecil) yang membutuhkan rehabilitasi seperti Gang Ibunda 3 Kelurahan Hilir Sper	Masyarakat	Gang ini membutuhkan rehabilitasi karena kondisinya yang sudah sangat buruk, dengan banyak lubang dan kerusakan di permukaannya. Kondisi gang ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melewatinya.	Rehabilitasi gang tersebut akan mengurangi risiko kecelakaan dan membantu memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Hilir Sper.	(Gang Ibunda 3 Kelurahan Hilir Sper, Hilir Seper, Kec. Dusun Selatan)	
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dalam lingkungan di Kelurahan Hilir Sper terdapat beberapa gang (jalan kecil) yang membutuhkan rehabilitasi seperti Gang Ibunda 5 Kelurahan Hilir Sper	Masyarakat	Gang ini membutuhkan rehabilitasi karena kondisinya yang sudah sangat buruk, dengan banyak lubang dan kerusakan di permukaannya. Kondisi gang ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melewatinya.	Rehabilitasi gang tersebut akan mengurangi risiko kecelakaan dan membantu memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Hilir Sper.	(Gang Ibunda 5 Kelurahan Hilir Sper, Hilir Seper, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dalam lingkungan di Kelurahan Hilir Sper terdapat beberapa gang (jalan kecil) yang membutuhkan rehabilitasi seperti Gang Melati Jalan Jaya Karsa Kelurahan Hilir Sper	Masyarakat	Gang ini membutuhkan rehabilitasi karena kondisinya yang sudah sangat buruk, dengan banyak lubang dan kerusakan di permukaannya. Kondisi gang ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melewatinya.	Rehabilitasi gang tersebut akan mengurangi risiko kecelakaan dan membantu memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Hilir Sper.	(Gang Melati Jalan Jaya Karsa Kelurahan Hilir Sper, Hilir Seper, Kec. Dusun Selatan)	
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dalam lingkungan di Kelurahan Hilir Sper terdapat beberapa gang (jalan kecil) yang membutuhkan rehabilitasi seperti Gang Saka Panuk Jalan Pelita Raya Kelurahan Hilir Sper	Masyarakat	Gang ini membutuhkan rehabilitasi karena kondisinya yang sudah sangat buruk, dengan banyak lubang dan kerusakan di permukaannya. Kondisi gang ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melewatinya.	Rehabilitasi gang tersebut akan mengurangi risiko kecelakaan dan membantu memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Hilir Sper	(Gang Saka Panuk Jalan Pelita Raya Kelurahan Hilir Sper, Hilir Seper, Kec. Dusun Selatan)	
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan dan jembatan di Desa Tanjung Jawa yang rusak dan sempit yang dapat menghambat aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	masyarakat	Lanjutan jalan dan jembatan 160 m Desa Tanjung	Dengan tersedianya jalan dan jembatan yang baik, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dapat meningkat sehingga dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan desa yang menghubungkan Desa Danau Masura dan Desa Muara Ripung masih dalam kondisi yang kurang baik, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan dan masyarakat.	Masyarakat di Desa Danau Masura dan Desa Muara Ripung, pengendara kendaraan, dan petani yang mengangkut hasil pertanian.	Peningkatan jalan desa bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mempermudah pengangkutan hasil pertanian.	Dengan adanya jalan desa yang lebih baik, masyarakat di Desa Danau Masura dan Desa Muara Ripung diharapkan dapat mengakses layanan dan fasilitas yang lebih baik dan pengangkutan hasil pertanian dapat dilakukan dengan lebih efektif.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan menuju SMA kurang baik dan kurang aman bagi pengguna jalan, terutama para siswa dan guru yang setiap hari melalui jalan tersebut.	Siswa dan guru di SMA Desa Tanjung Jawa, serta masyarakat Desa Tanjung Jawa yang menggunakan jalan tersebut.	Peningkatan jalan menuju SMA dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para siswa dan guru dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan memudahkan masyarakat Desa Tanjung Jawa dalam melakukan mobilitas.	Peningkatan jalan menuju SMA dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan daya tarik investasi di wilayah tersebut.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang belum selesai dapat mengganggu mobilitas masyarakat dan menghambat perkembangan ekonomi lokal.	Masyarakat Desa Teluk Mampun dan Desa Penda Asam yang menggunakan jalan tersebut.	Usul lanjutan rekonstruksi / peningkatan jalan Desa Teluk Mampun - Desa Penda Asam	Pembangunan jalan yang lebih baik dapat meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.	(Desa Teluk Mampun - Desa Penda Asam, sepanjang 1,1 km., Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang menghubungkan Desa Muara Ripung dengan provinsi masih dalam kondisi yang kurang baik, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan dan masyarakat.	Masyarakat di Desa Muara Ripung dan sekitarnya, pengendara kendaraan, dan petani yang mengangkut hasil pertanian.	Peningkatan jalan menuju provinsi bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mempermudah pengangkutan hasil pertanian.	Dengan adanya jalan yang lebih baik, masyarakat di Desa Muara Ripung dan sekitarnya diharapkan dapat mengakses layanan dan fasilitas yang lebih baik dan pengangkutan hasil pertanian dapat	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang rusak dan berlubang di antara Desa Murung Paken dan Danau Masura membuat transportasi menjadi tidak lancar dan tidak aman.	Masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi rute tersebut.	Diperlukan perbaikan dan peningkatan jalan agar transportasi menjadi lebih lancar dan aman.	Peningkatan jalan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara Desa Murung Paken dan Danau Masura.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang sempit dan tidak beraspal membuat akses transportasi di Desa Kalahien terbatas.	Masyarakat Desa Kalahien yang tinggal di sekitar sungai cor dan rentan terkena banjir.	Peningkatan jalan barito Desa Kalahien ditujukan untuk meningkatkan kondisi jalan dan memudahkan akses transportasi masyarakat. Jalan yang lebih baik akan meningkatkan akses ke pasar dan tempat usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.	Peningkatan jalan barito akan meningkatkan akses ke pasar dan tempat usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.	(Jalan Barito, Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kelurahan Buntok Kota, terdapat beberapa gang (jalan kecil) yang membutuhkan rehabilitasi. Gang tersebut antara lain Gang Gamang Ladar 2 di Rt 44 Jalan Pahlawan Atas	Masyarakat	Gang Gamang Ladar 2: Gang ini terletak di Rt 44 Jalan Pahlawan Atas Kelurahan Buntok Kota. Gang ini membutuhkan rehabilitasi karena kondisinya yang sudah sangat buruk, dengan banyak lubang dan kerusakan di permukaannya.	Rehabilitasi gang tersebut akan mengurangi risiko kecelakaan dan membantu memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Buntok Kota.	(Gang Gamang Ladar 2 di Rt 44 Jalan Pahlawan Atas, Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang rusak dan berlubang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.	Masyarakat Desa Kalahien yang menggunakan jalan pemuda arah pasar dan jalan barito yang rusak.	Lanjutan cor jalan pemuda arah pasar Desa Kalahien bertujuan untuk memperbaiki jalan yang rusak dan memudahkan akses masyarakat dalam beraktivitas. Jalan yang lebih baik akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.	Jalan yang lebih baik akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.	(Jalan Pemuda, Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan jalan teluk mampun 100 m Desa Teluk Mampun	Masyarakat	Lanjutan jalan teluk mampun 100 m Desa Teluk Mampun	Pembangunan jalan sepanjang 100 meter di Desa Teluk Mampun dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah mobilitas masyarakat desa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama untuk kegiatan pertanian.	(Desa teluk mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Permasalahan: Dalam beberapa lingkungan di Kelurahan Buntok Kota, terdapat beberapa gang (jalan kecil) yang membutuhkan rehabilitasi. Gang tersebut antara lain, Gang Jati Indah di Jalan Barito Raya	Masyarakat	Gang Jati Indah: Gang ini terletak di Jalan Barito Raya Kelurahan Buntok Kota. Gang ini membutuhkan rehabilitasi karena kondisinya yang sudah sangat buruk, dengan banyak lubang dan kerusakan di permukaannya. Kondisi gang ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melewatinya.	Rehabilitasi gang tersebut akan mengurangi risiko kecelakaan dan membantu memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Buntok Kota.	(Gang Jati Indah di Jalan Barito Raya, Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan)	
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Permasalahan: Jalan menuju Dusun Parigi rusak dan tidak layak dilalui kendaraan sehingga menghambat mobilitas warga.	Kelompok Sasaran: Warga Dusun Parigi Desa Kalahien dan masyarakat Desa Kalahien lainnya yang menggunakan jalan tersebut.	Jalan menuju Dusun Parigi merupakan jalan utama yang menghubungkan Dusun Parigi dengan wilayah lain di Desa Kalahien.	Dengan adanya jalan yang layak, mobilitas warga dapat meningkat sehingga aktivitas ekonomi dan sosial dapat terus berjalan.	(Dusun Kalanis, Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan jalan dari Danau Masura menuju Dusun Parigi sepanjang 7 km adalah biaya yang cukup besar untuk pembangunan jalan yang cukup panjang. Selain itu, adanya tanah milik pribadi atau hutan yang harus dilewati dalam pembangunan jalan juga menjadi faktor yang mempersulit pembangunan jalan tersebut.	Masyarakat	pembuatan jalan dari Danau Masura menuju Dusun Parigi sepanjang 7 km dilakukan untuk memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas antara Dusun Parigi dengan wilayah sekitarnya.	Pembuatan jalan dari Danau Masura menuju Dusun Parigi sepanjang 7 km dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari	(Danau Masura menuju Dusun Parigi sepanjang 7 km, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Permasalahan yang dihadapi dalam perbaikan cor jalan antar desa Danau Masura - Muara Ripung adalah terbatasnya anggaran untuk melakukan perbaikan jalan yang cukup panjang. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrem seperti hujan dan banjir juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi jalan, sehingga memerlukan biaya yang lebih besar untuk melakukan perbaikan secara berkala.	Masyarakat	Perbaikan cor jalan antar desa Danau Masura - Muara Ripung, dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan mempermudah mobilitas masyarakat serta pengangkutan hasil pertanian.	Perbaikan cor jalan antar desa Danau Masura - Muara Ripung dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan kedua desa tersebut agar dapat dilalui dengan lebih mudah dan aman	(Desa Danau Masura - Muara Ripung, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan bantuan bedah rumah bagi warga miskin di Desa Danau Masura adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Selain itu, sulitnya menentukan prioritas dalam memberikan bantuan juga menjadi faktor yang mempersulit proses memberikan bantuan bedah rumah tersebut. Selain itu, adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi rumah warga yang beragam juga memerlukan penanganan yang berbeda-beda dan membutuhkan biaya yang cukup besar.	Masyarakat	Bantuan bedah rumah bagi warga miskin di Desa Danau Masura diberikan untuk membantu warga yang membutuhkan dalam hal perbaikan atau renovasi rumah mereka agar bisa tinggal di rumah yang lebih layak huni.	Bantuan bedah rumah bagi warga miskin di Desa Danau Masura diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	(Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Beberapa masyarakat di Desa Muara Ripung masih memiliki kondisi rumah yang tidak layak huni dan tidak mampu memperbaikinya sendiri.	Masyarakat Desa Muara Ripung yang tidak mampu dan memiliki kondisi rumah yang tidak layak huni.	Program bedah rumah bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah warga yang tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup mereka.	Dengan kondisi rumah yang lebih layak huni, masyarakat di Desa Muara Ripung diharapkan dapat lebih produktif dan kreatif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dusun Parigi Desa Kalahien belum memiliki penerangan listrik sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat pada malam hari dan menghambat kemajuan perekonomian.	Masyarakat Dusun Parigi Desa Kalahien	Dusun Parigi Desa Kalahien merupakan daerah terpencil yang sulit dijangkau dan belum teraliri listrik sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam menjalankan aktivitas mereka terutama pada malam hari.	Dengan adanya penerangan listrik, masyarakat Dusun Parigi Desa Kalahien dapat lebih produktif dan mengembangkan perekonomian mereka dengan lebih baik. Selain itu, akan memberikan kemudahan dalam akses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.	(Dusun Parigi, Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kerusakan kabel listrik di Desa Tanjung Jawa yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan mempengaruhi ketersediaan listrik di masyarakat	masyarakat	Perbaikan kabel listrik Desa Tanjung Jawa	Dengan perbaikan kabel listrik yang baik, masyarakat dapat merasa aman dan terhindar dari bahaya kebakaran serta ketersediaan listrik dapat terjaga.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	sebagian besar warga Desa Murung Paken belum memiliki akses listrik PLN, sehingga mempersulit aktivitas sehari-hari.	Warga di Desa Murung Paken yang belum memiliki akses listrik PLN.	Diperlukan pemasangan listrik PLN di rumah-rumah warga untuk memudahkan aktivitas sehari-hari.	Pemasangan listrik PLN dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Saat ini, Desa Muara Ripung belum memiliki kantor desa yang memadai untuk melaksanakan pelayanan masyarakat secara optimal.	Pemerintah desa dan masyarakat Desa Muara Ripung.	Pembangunan kantor desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa Muara Ripung.	Dengan adanya kantor desa yang memadai, pelayanan masyarakat di Desa Muara Ripung dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Tidak adanya kantor Badan Permusyawaratan Desa di Desa Teluk Mampun.	Warga Desa Teluk Mampun.	Pembangunan kantor Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat.	Biaya pembangunan kantor Badan Permusyawaratan Desa akan diambil dari APBD atau dana desa.	(Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Murung Paken merasa gaji atau tunjangan yang mereka terima saat ini tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban.	Anggota BPD dan Ketua RT di Desa Murung Paken.	Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan gaji atau tunjangan yang diterima oleh anggota BPD dan Ketua RT agar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban.	Anggota BPD dan Ketua RT di Desa Murung Paken saat ini menerima gaji atau tunjangan yang tidak seimbang dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya fasilitas dan sarana di balai basarah agama hindu Desa Kalahien, termasuk dapur dan ruangan.	Pengurus balai basarah agama hindu Desa Kalahien	Usulan pembangunan dapur dan ruangan di balai basarah agama hindu Desa Kalahien untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat setempat.	Diharapkan dengan adanya fasilitas yang memadai, pengurus balai basarah agama hindu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat setempat.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya pasokan listrik PLN yang stabil di Desa Murung Paken mengakibatkan warga sering mengandalkan mesin genset untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Namun, sering kali terjadi kerusakan pada accu mesin genset sehingga warga kesulitan mendapatkan sumber listrik alternatif.	Warga Desa Murung Paken yang mengandalkan mesin genset sebagai sumber listrik alternatif.	Usulan ini bertujuan untuk memperbaiki accu mesin genset agar bisa digunakan kembali sebagai sumber listrik alternatif yang handal.	warga membutuhkan mesin genset sebagai sumber listrik alternatif.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dermaga yang rusak menghambat aktivitas nelayan di Desa Kalahien.	Nelayan di Desa Kalahien.	Dermaga merupakan infrastruktur penting bagi nelayan di Desa Kalahien yang memanfaatkannya untuk aktivitas penangkapan ikan.	Dengan adanya dermaga yang baik, aktivitas penangkapan ikan nelayan dapat meningkat sehingga kesejahteraan nelayan juga dapat meningkat.	(Desa Kalahien, Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Bantuan mesin peruntuk padi 4 buah Desa Teluk Mampun	Masyarakat	Bantuan mesin peruntuk padi 4 buah Desa Teluk Mampun dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen,	Dengan adanya bantuan mesin peruntuk padi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa	(Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Permintaah masin peruntuk padi dan traktor 4 buah Desa Teluk Mampun	masyarakat	masyarakat membutuhkan masin peruntuk padi dan traktor untuk meningkatkan produksi pertanian	Desa Teluk Mampun memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan membutuhkan mesin peruntuk padi dan traktor untuk membantu dalam kegiatan pertaniannya.	(Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan usaha tani yang belum memadai dapat menghambat aktivitas para petani dan potensial pengembangan usaha tani di Desa Tanjung Jawa.	Kelompok tani karya bersama dan masyarakat Desa Tanjung Jawa yang menggunakan jalan tersebut.	Pembuatan titian jalan usaha tani yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas petani di Desa Tanjung Jawa, serta memperbaiki kondisi ekonomi lokal melalui potensi pengembangan usaha tani.	Pembuatan titian jalan usaha tani dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan potensi pengembangan usaha tani di Desa Tanjung Jawa.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kurangnya alat dan mesin pertanian, khususnya mesin padi yang dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.	Petani Desa Kalahien	Usulan pengadaan mesin padi untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.	Diharapkan dengan adanya mesin padi baru, dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi padi dan kualitas hasil panen.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kurangnya pasokan air untuk pertanian dapat menghambat produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat	Petani dan masyarakat Desa Teluk Mampun	usul Pembangunan Cekdam untuk irigasi pertanian, sebanyak 8 Pintu, yang terdiri dari 2 Cekdam yang besar dan 6 Cekdam yang kecil	Pembangunan cekdam dapat meningkatkan pasokan air untuk pertanian dan meningkatkan produktivitas pertanian lokal.	(Desa Teluk Mampun., Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tidak adanya objek wisata di bawah jembatan Kalahien yang dapat memperkenalkan keindahan alam dan budaya Desa Kalahien kepada wisatawan.	Wisatawan dan masyarakat setempat	Usulan pembangunan objek wisata di bawah jembatan Kalahien untuk memperkenalkan keindahan alam dan budaya Desa Kalahien kepada wisatawan.	Diharapkan dengan adanya objek wisata baru, dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan pendapatan bagi masyarakat setempat.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (7 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Kurangnya tunjangan bagi anggota BPD Desa Kalahien yang dapat menghambat kinerja dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat setempat.	Anggota BPD Desa Kalahien	Usulan penambahan tunjangan untuk anggota BPD Desa Kalahien untuk meningkatkan kinerja dan partisipasi mereka dalam pembangunan masyarakat setempat.	Diharapkan dengan peningkatan tunjangan, anggota BPD akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan desa.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Permasalahan: Hansip di Desa Kalahien belum mendapatkan gaji/ensintif yang layak sehingga kurangnya motivasi dalam menjalankan tugas.	Kelompok Sasaran: Hansip di Desa Kalahien.	Keterangan: Hansip merupakan pihak yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Kalahien	Dengan adanya gaji/ensintif yang layak, motivasi hansip dalam menjalankan tugas dapat meningkat sehingga keamanan dan ketertiban di Desa Kalahien dapat terjaga dengan baik.	(Desa Kalahien., Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Rumah Ibadah Islam, Kristen, dan Hindu Desa Danau Masura Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan bantuan untuk rumah ibadah Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Danau Masura adalah keterbatasan dana yang tersedia. Selain itu, ada juga masalah terkait dengan lokasi rumah ibadah yang sulit dijangkau, sehingga memerlukan biaya yang lebih besar untuk membangun atau memperbaiki rumah ibadah tersebut.	Masyarakat	Bantuan rumah ibadah Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Danau Masura dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di desa tersebut.	Bantuan untuk rumah ibadah Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Danau Masura diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan di desa tersebut	(Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kekurangan dana untuk pengembangan dan perawatan gereja katolik Desa Kalahien.	Pihak gereja katolik Desa Kalahien	Usulan bantuan dana hibah untuk pembangunan dan perawatan gereja katolik Desa Kalahien.	Diharapkan dengan adanya bantuan dana hibah, pihak gereja katolik dapat meningkatkan kualitas fasilitas gereja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaatnya.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kondisi plafon mesjid yang rusak dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan para jamaah yang melakukan ibadah di dalamnya.	Jamaah dan pengurus mesjid di Desa Tanjung Jawa.	Bantuan plafon mesjid dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para jamaah saat beribadah, serta memperbaiki kondisi fasilitas umum yang penting bagi kegiatan keagamaan.	Bantuan plafon mesjid dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Jawa.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pagar kuburan muslim yang rusak atau tidak memadai dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan keluarga yang berkunjung ke kuburan tersebut.	Keluarga dan masyarakat muslim di Desa Tanjung Jawa yang berkunjung ke kuburan tersebut.	Pembuatan pagar kuburan muslim yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi keluarga yang berkunjung ke kuburan tersebut, serta memperbaiki kondisi fasilitas umum yang penting bagi kegiatan keagamaan.	Pembuatan pagar kuburan muslim dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Jawa.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rukun Kematian di Desa Murung Paken tidak memiliki mesin genset sebagai sumber listrik alternatif saat terjadi pemadaman listrik.	Pengurus Rukun Kematian di Desa Murung Paken.	Usulan ini bertujuan untuk membeli mesin genset sebagai sumber listrik alternatif bagi Rukun Kematian Desa Murung Paken.	Rukun Kematian di Desa Murung Paken saat ini tidak memiliki mesin genset sebagai sumber listrik alternatif saat terjadi pemadaman listrik.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : HERMANES, SE

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Gedung SDN dan Rumah Dinas SDN di Desa Majundre memerlukan peremajaan dan perbaikan.	Siswa SDN dan Guru, Karyawan SDN	Gedung SDN dan Rumah Dinas SDN di Desa Majundre memerlukan peremajaan dan perbaikan karena sudah tua dan rusak.	Kondisi bangunan yang buruk dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan oleh SDN.	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kondisi perumahan guru SDN di Desa Gunung Rantau yang memprihatinkan	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Perumahan guru SDN di Desa Gunung Rantau membutuhkan rehab berat karena kondisinya yang tidak layak huni, sehingga perlu segera diperbaiki agar dapat digunakan kembali oleh para guru SDN.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perihal rehab gedung SDN dan TK Tiga Putri Desa Maruga serta SDN Dusun Batukol.	Siswa, guru, dan staf SDN dan TK Tiga Putri Desa Maruga serta SDN Dusun Batukol.	Gedung-gedung tersebut membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan mengajar.	Gedung-gedung tersebut sudah cukup tua dan perlu direnovasi. Siswa, guru, dan staf perlu lingkungan belajar dan mengajar yang aman dan nyaman.	(SDN dan TK Tiga Putri Desa Maruga serta SDN Dusun Batukol., Maruga, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Talekoi belum memiliki jaringan internet yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran online.	Murid, guru, dan staf SDN Talekoi.	Dibutuhkan akses internet yang stabil dan cepat agar pembelajaran online dapat berjalan lancar dan efektif.	Dalam era digital, akses internet merupakan kebutuhan yang penting bagi dunia pendidikan.	(SDN Talekoi, Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Poskesdes di Desa Majundre memerlukan rehabilitasi total agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.	Poskesdes di Desa Majundre memerlukan rehabilitasi total agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.	Poskesdes di Desa Majundre memerlukan rehabilitasi total karena sudah tua dan rusak, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.	Dengan melakukan rehabilitasi total pada Poskesdes, kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Majundre.	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kekurangan tenaga kesehatan di Desa Gunung Rantau	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Desa Gunung Rantau membutuhkan penambahan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di sana.	Penempatan tenaga kesehatan di Desa Gunung Rantau	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (12 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penampungan dan penyaluran air bersih di Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih	Masyarakat Desa Tarusan.	Rehabilitasi penampungan dan penyaluran air bersih akan memastikan ketersediaan air bersih yang memadai bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya penyakit akibat kurangnya ketersediaan air bersih.	Rehabilitasi penampungan dan penyaluran air bersih dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	(Desa Tarusan., Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Bangun jembatan baru di Sungai Sunsang yang menghubungkan Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau. Kelompok	Masyarakat Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau	Jembatan di Sungai Sunsang perlu dibangun untuk mempermudah akses antara Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Sungai Sunsang Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Bundar dan Majundre masih dalam kondisi berlubang dan berdebu, sehingga menyulitkan mobilitas warga desa.	Warga Desa Bundar dan Majundre.	Dibutuhkan pengerasan jalan agar warga desa dapat dengan mudah beraktivitas dan mengangkut barang.	Kondisi jalan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas warga desa.	(Desa Bundar dan Majundre, Bundar, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Gopried Tumang di Desa Majundre membutuhkan peningkatan agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman.	Masyarakat Desa Majundre yang membutuhkan akses jalan yang baik.	Jalan Gopried Tumang di Desa Majundre memerlukan peningkatan karena kondisinya sudah rusak dan tidak memadai untuk dilalui.	Dengan peningkatan jalan, akses transportasi ke dan dari Desa Majundre dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.	(Jalan Gopried Tumang Desa Majundr, Majundre, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Simpang Pendang menuju Dusun Teluk Mantarem perlu dibangun atau diperbaiki menjadi salah satu skala prioritas pembangunan di tahun Anggaran 2024.	Masyarakat Dusun Teluk Mantarem	Jalan Simpang Pendang menuju Dusun Teluk Mantarem membutuhkan pembangunan/perbaikan.	Masyarakat Dusun Teluk Mantarem mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Masyarakat Dusun Teluk Mantarem Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan yang menghubungkan Desa Tarusan dan Desa Panarukan mengalami kerusakan dan membutuhkan pembangunan untuk menghubungkan kedua desa tersebut.	Masyarakat Desa Tarusan dan Desa Panarukan	Pembangunan jembatan akan mempermudah aksesibilitas antara kedua desa tersebut, dan memungkinkan masyarakat desa Tarusan dan desa Panarukan untuk lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, dan berdagang.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat keterhubungan antara desa, serta meningkatkan perekonomian lokal.	(Desa Tarusan dan Desa Panarukan, Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan dalam Desa Gunung Rantau RT.005 yang memprihatinkan	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Jalan dalam Desa Gunung Rantau RT.005 membutuhkan rekonstruksi agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman oleh pengguna jalan.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan	(RT.005 Desa Gunung Rantau, Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya sarana publik yang memadai di Desa Gunung Rantau	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Jembatan SUNGSANG Desa Gunung Rantau mengalami kerusakan dan perlu direkonstruksi agar dapat digunakan kembali dan tidak membahayakan pengguna jalan.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lokasi pembangunan jalan penghubung antara Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau salah ditentukan.	Masyarakat Desa Marawan Lama.	Jalan penghubung antara Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau rusak parah, tetapi titik nol pembangunan ditetapkan di Desa Gunung Rantau	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama mengajukan usulan pembangunan melalui Reses DPRD dan Musrenbang Desa/Kecamatan dan Kabupaten.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Membangun jalan baru dari Bambanen menuju Danau Lelek Marawan Lama	Masyarakat Desa Marawan Lama.	Jalan baru dari Bambanen menuju Danau Lelek Marawan Lama perlu dibangun	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Bambanen menuju Danau Lelek Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perbaikan jalan dari KM.6 Desa Bundar hingga Dusun Batukol Desa Maruga.	Warga Desa Maruga dan pengguna jalan.	Jalan di Desa Maruga membutuhkan perbaikan untuk mempermudah mobilitas.	Perbaikan jalan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.	(Dusun Batukol Desa Maruga - KM.6 Desa Bundar, Maruga, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tidak ada jembatan yang melintasi Sungai Tapen Maruga dan Sungai Tapen Patei Maruga.	Masyarakat Desa Maruga yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik, terutama untuk mengakses wilayah-wilayah di seberang sungai.	Wilayah Desa Maruga terbagi oleh Sungai Tapen Maruga dan Sungai Tapen Patei Maruga, yang dapat mempersulit mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Belum adanya kantor BPD Desa Talekoi sehingga kegiatan administrasi desa kurang terstruktur.	Staf BPD Desa Talekoi dan warga desa yang membutuhkan layanan administrasi.	Dibutuhkan kantor BPD Desa Talekoi agar kegiatan administrasi desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien.	Dibutuhkan kantor BPD Desa Talekoi agar kegiatan administrasi desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Kantor Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Rehabilitasi kantor desa akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat saat melakukan administrasi di kantor desa	Rehabilitasi kantor desa dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan alat musik untuk Karang Taruna BINTANG MUDA di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan anggaran.	Anggota Karang Taruna BINTANG MUDA di Gunung Rantau.	arang Taruna BINTANG MUDA adalah organisasi kepemudaan di Gunung Rantau.	arang Taruna BINTANG MUDA adalah organisasi kepemudaan di Gunung Rantau.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya sarana publik yang memadai di Desa Gunung Rantau	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Desa Gunung Rantau membutuhkan pembangunan baru balai basarah &ERAI PAKAT& sebagai sarana publik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial dan budaya.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Irigasi Cetak Sawah Tanggul Isin yang baru/telah dikerjakan pada periode lalu perlu diurus.	: Petani Desa Marawan Lama	Irigasi Cetak Sawah Tanggul Isin yang baru/telah dikerjakan pada periode lalu perlu diurus	Dibutuhkan penyelesaian cetak sawah agar seluruh lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal.	(Sawah Tanggul Isin Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Petani di Desa Gunung Rantau memerlukan bantuan mesin perontok padi Power Treheser agar dapat meningkatkan efisiensi dalam proses panen.	Petani di Desa Gunung Rantau.	Proses perontokan padi yang dilakukan secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Dengan bantuan mesin, petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses panen	Proses perontokan padi yang dilakukan secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Dengan bantuan mesin, petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses panen	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Ketersediaan lahan pertanian di Desa Talekoi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan taraf hidup petani.	Petani dan masyarakat Desa Talekoi.	Diperlukan pembuatan persawahan skala prioritas untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.	Pembuatan persawahan skala prioritas dapat membantu meningkatkan produksi pertanian, mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan dari luar desa, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Talekoi.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	alan Usaha Tani di RT.001 Desa Gunung Rantau perlu dicor beton agar lebih tahan lama	: Warga Desa Gunung Rantau yang bekerja di sektor pertanian	alan Usaha Tani yang berlumpur dan licin saat hujan dapat mempersulit warga dalam menga	Dengan pengaspalan jalan, warga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan mereka.	(RT.001 Desa Gunung Rantau, Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	eningkatan Jalan Usaha Tani RT.004 Desa Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan anggaran.	Masyarakat di RT.004 Desa Gunung Rantau yang membutuhkan akses jalan yang lebih baik.	RT.004 Desa Gunung Rantau membutuhkan peningkatan jalan usaha tani untuk memudahkan transportasi dan pengiriman hasil pertanian.	Dengan pengaspalan jalan, warga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan mereka.	(T.004 Desa Gunung Rantau, Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani di Persawahan Duruyan Ranjak belum dibuat sehingga sulit untuk mengangkut hasil panen ke tempat penjualan	Petani di Persawahan Duruyan Ranjak	Jalan Usaha Tani yang belum dibuat memiliki panjang sekitar 1,5 km.	Dibutuhkan pembangunan Jalan Usaha Tani agar petani dapat mengangkut hasil panen dengan mudah dan lebih efisien.	(Persawahan Duruyan Ranjak Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan pasar Desa Marawan Lama perlu direhabilitasi dan menjadi skala prioritas pembangunan.	Masyarakat Desa Marawan Lama	: Pelabuhan pasar Desa Marawan Lama membutuhkan rehabilitasi.	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Desa Talekoi belum memiliki BTS Telkomsel, sehingga akses internet dan sinyal telepon masih terbatas.	Warga Desa Talekoi yang menggunakan layanan telepon seluler dan internet.	Dibutuhkan adanya BTS Telkomsel agar warga Desa Talekoi dapat memiliki akses internet dan sinyal telepon yang memadai.	Infrastruktur telekomunikasi yang memadai dapat mendukung perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat desa	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (14 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	bat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHM KATOLIK di Gunung Rantau.	memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Desa Maruga belum memiliki ambulans yang dapat digunakan dalam keadaan darurat.	Masyarakat Desa Maruga yang membutuhkan akses transportasi medis dalam keadaan darurat.	Belum adanya ambulans di Desa Maruga dapat mempersulit proses penanganan medis dalam keadaan darurat.	Pembelian ambulans dapat meningkatkan kemampuan penanganan medis dan keselamatan masyarakat Desa Maruga.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya tempat ibadah bagi jemaat GKE SINAI di Gunung Rantau.	Jemaat GKE SINAI Gunung Rantau.	Perlu dibangun pembangunan baru untuk gereja tersebut.	Tidak ada cukup ruang di gereja yang ada saat ini untuk menampung jumlah jemaat yang ada.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional Keagamaan Kelompok Yasinan AN-NUR di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota Kelompok Yasinan AN-NUR di Gunung Rantau.	Kelompok Yasinan AN-NUR adalah kelompok keagamaan di Gunung Rantau yang memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	Operasional keagamaan Kelompok Yasinan AN-NUR memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional Keagamaan SHA GKE di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHA GKE di Gunung Rantau.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHA GKE di Gunung Rantau.	Operasional keagamaan SHA GKE memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional keagamaan TKA-TP AL-QURâ€™AN MIDAUL KHAIRIAH di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota TKA-TP AL-QURâ€™AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	Anggota TKA-TP AL-QURâ€™AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	Anggota TKA-TP AL-QURâ€™AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Masjid NURUL MUTTAQIN di Gunung Rantau terhambat oleh keterbatasan anggaran	jamaah masjid Nurul Muttaqin Desa unung Rantau	Masjid NURUL MUTTAQIN adalah sebuah proyek pembangunan masjid di Gunung Rantau yang membutuhkan dukungan finansial dan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan proyek tersebut.	Pembangunan Masjid NURUL MUTTAQIN di Gunung Rantau penting untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat sekitar.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehabilitasi gereja Katholik SANTO PETRUS belum selesai.	Umat Katholik yang beribadah di gereja tersebut.	Perlu dilanjutkan rehabilitasi untuk gereja tersebut.	Adanya kerusakan pada bangunan gereja yang membutuhkan perbaikan.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehabilitasi langgar NURUL IMAN masih dalam proses.	Jamaah langgar NURUL IMAN Gunung Rantau.	Perlu dilanjutkan rehabilitasi untuk langgar tersebut.	Kerusakan pada langgar membutuhkan perbaikan agar bisa digunakan kembali.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	rumah ibadah di Desa Talekoi mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	Pemuka agama, jemaat, dan masyarakat Desa Talekoi.	Diperlukan perbaikan rumah ibadah agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	Diperlukan perbaikan rumah ibadah agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rumah Ibadah Kristen dan Katholik di Desa Maruga membutuhkan bantuan hibah untuk pemeliharaan dan pembangunan.	Umat Kristen dan Katolik di Desa Maruga yang menggunakan rumah ibadah tersebut.	Rumah Ibadah Kristen dan Katholik di Desa Maruga membutuhkan pemeliharaan dan pembangunan agar dapat terus berfungsi dengan baik.	Bantuan hibah dapat membantu pemeliharaan dan pembangunan rumah ibadah, sehingga dapat terus digunakan dan memberikan manfaat bagi umat Kristen dan Katolik di Desa Maruga.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
12	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Tarusan belum memiliki akses listrik PLN, sehingga masyarakat masih menggunakan sumber listrik alternatif yang kurang efektif dan kurang terjamin keamanannya.	Masyarakat Desa Tarusan.	Ketersediaan listrik PLN di Desa Tarusan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, belajar, dan mengakses informasi	Ketersediaan listrik PLN dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membuka peluang baru dalam bidang perekonomian.	(Desa Tarusan., Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
13	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemasangan jaringan listrik di Desa Maruga.	Warga Desa Maruga.	Desa Maruga belum memiliki akses listrik yang memadai.	Pemasangan jaringan listrik akan memberikan dampak positif bagi warga dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Desa Maruga terletak di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
14	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemasangan Jaringan Listrik Ke Kampung Desa Majundre	Masyarakatt Desa majundre	Kampung Desa Majundre belum memiliki jaringan listrik sehingga warga sulit mendapatkan akses listrik untuk kebutuhan sehari-hari.	Pemasangan Jaringan Listrik Ke Kampung Desa Majundre	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : ENSILAWATIKA WIJAYA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kebutuhan pembangunan pagar beton di SD Negeri Reong sepanjang 250 meter menjadi prioritas yang perlu diselesaikan.	iswa, guru, staf, dan pengunjung SD Negeri Reong. Keterangan: Pembangunan pagar beton bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di lingkungan sekolah.	Pembangunan pagar beton bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di lingkungan sekolah.	Pagar beton dapat mengurangi akses masuk orang yang tidak diinginkan ke dalam lingkungan sekolah.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kondisi perumahan guru SDN di Desa Gunung Rantau yang memprihatinkan	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Perumahan guru SDN di Desa Gunung Rantau membutuhkan rehab berat karena kondisinya yang tidak layak huni, sehingga perlu segera diperbaiki agar dapat digunakan kembali oleh para guru SDN.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan pagar di SMPN Satu Satap 6 Dusun Utara Desa Reong diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah.	Siswa, guru, staf, dan pengunjung SMPN Satu Satap 6 Dusun Utara Desa Reong.	Pembangunan pagar bertujuan untuk membatasi akses ke dalam lingkungan sekolah, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi kebisingan dari lalu lintas.	Pagar dapat mencegah akses masuk orang yang tidak diinginkan ke dalam lingkungan sekolah.	(SMPN Satu Satap 6 Dusun Utara Desa Reong., Reong, Kec. Dusun Utara)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perawatan Postu dan Polindes di 2 unit desa Reong menjadi prioritas yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.	Masyarakat desa Reong yang memerlukan layanan kesehatan di Postu dan Polindes.	Perawatan bertujuan untuk menjaga fasilitas kesehatan tetap berfungsi dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat.	Perawatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Postu dan Polindes.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kekurangan tenaga kesehatan di Desa Gunung Rantau	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Desa Gunung Rantau membutuhkan penambahan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di sana.	Penempatan tenaga kesehatan di Desa Gunung Rantau	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (10 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kemungkinan longsor dan erosi tebing di Desa Bundar dapat mengancam keselamatan dan kelestarian lingkungan di sekitar sungai.	Warga Desa Bundar dan pihak pemerintah setempat.	Pembangunan siring tebing/bronjong (500 m) bertujuan untuk mengurangi risiko longsor dan erosi di sekitar sungai serta memperkuat tebing sungai.	Pemerintah setempat sudah memperhitungkan anggaran dan teknis pelaksanaan pembangunan siring tebing/bronjong dan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi.	(Bundar, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan menuju Desa Bundar yang rusak dan sulit dilalui.	Warga yang tinggal di daerah RT.02 RW.01 dan Desa Bundar.	Jalan sepanjang 2 km akan ditingkatkan kualitasnya agar lebih mudah dilalui.	Peningkatan kualitas jalan akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di daerah RT.02 RW.01 dan Desa Bundar.	(RT.02 RW.01, Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang rusak atau tidak terawat di daerah Lintas Marawan Baru ke Mantarem.	Pengguna jalan yang melintasi daerah tersebut.	Jalan sepanjang 3 km akan dibangun atau diperbaiki dengan bahan cor untuk meningkatkan kualitas jalan.	Pembangunan atau perbaikan jalan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan di daerah tersebut.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan yang menghubungkan Desa Tarusan dan Desa Panarukan mengalami kerusakan dan membutuhkan pembangunan untuk menghubungkan kedua desa tersebut.	Masyarakat Desa Tarusan dan Desa Panarukan	Pembangunan 3 unit jembatan penghubung bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah transportasi antara Desa Tarusan dan Desa Panarukan.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat keterhubungan antara desa, serta meningkatkan perekonomian lokal.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan dalam Desa Gunung Rantau RT.005 yang memprihatinkan	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Jalan dalam Desa Gunung Rantau RT.005 (4 m x 2000 m) membutuhkan rekonstruksi agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman oleh pengguna jalan.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan	(Desa Gunung Rantau RT.005 menuju Marawan Lama, Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang buruk di Desa Bundar bisa menyebabkan kesulitan akses dan transportasi.	Warga Desa Bundar dan pihak pemerintah setempat.	Pengecoran jalan selama 2 km bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah transportasi di Desa Bundar.	Pemerintah setempat sudah memperhitungkan anggaran dan teknis pelaksanaan pekerjaan pengecoran jalan.	(Bundar, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang buruk di Desa Tarusan bisa menyebabkan kesulitan akses dan transportasi.	Warga Desa Tarusan dan pihak pemerintah setempat.	Peningkatan jalan selama 3 km bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah transportasi di Desa Tarusan.	Pemerintah setempat sudah memperhitungkan anggaran dan teknis pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan.	(Desa Taruisan menuju Mampaing, Tarusan, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perbaikan jalan lintas Reong ke Kelurahan Pendang sepanjang 13 km menjadi prioritas yang perlu diselesaikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang buruk.	Masyarakat yang sering menggunakan jalan tersebut untuk keperluan transportasi dan perdagangan.	Perbaikan jalan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, memperbaiki kondisi jalan, dan meningkatkan keamanan dalam perjalanan.	Perbaikan jalan dapat meningkatkan mobilitas dan perdagangan masyarakat.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan Dalam Desa Gunung Rantau Rt. 05 4m X 700m diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di desa tersebut	Masyarakat desa Gunung Rantau yang memerlukan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.	Rekonstruksi jalan bertujuan untuk memperbaiki jalan yang rusak dan tidak layak dilalui sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di desa.	Rekonstruksi jalan dapat meningkatkan kemudahan akses dan pertumbuhan ekonomi di desa tersebut.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jembatan Sungsang 4m X 10m diperlukan untuk memperbaiki jembatan yang rusak dan tidak aman dilalui.	Masyarakat desa Gunung Rantau yang memerlukan akses yang aman melintasi sungai.	Rekonstruksi jembatan bertujuan untuk memperbaiki jembatan yang rusak dan tidak aman sehingga dapat meningkatkan keamanan dan aksesibilitas masyarakat desa.	Rekonstruksi jembatan dapat meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi di desa tersebut.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Desa Tarusan yang rusak dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.	Pegawai dan warga Desa Tarusan serta pihak pemerintah setempat.	Rehabilitasi kantor Desa Tarusan bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan kondisi kantor Desa Tarusan untuk memudahkan pelayanan publik.	Rehabilitasi kantor desa dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kurangnya infrastruktur pelayanan publik di Desa Marawan Baru.	Warga Desa Marawan Bar	Pembangunan Baru Kantor BPD Desa Marawan Baru	Pembangunan kantor BPD dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembangunan Balai Desa Reong diperlukan untuk meningkatkan fasilitas umum dan pelayanan publik di desa tersebut.	Masyarakat Desa Reong yang membutuhkan fasilitas publik untuk berbagai kegiatan.	Pembangunan Balai Desa bertujuan untuk menyediakan ruang pertemuan dan fasilitas umum untuk masyarakat desa, seperti ruang rapat, ruang olahraga, dan ruang perpustakaan.	Pembangunan Balai Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya di desa.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Reong diperlukan untuk meningkatkan fasilitas umum dan pelayanan publik di desa tersebut.	Masyarakat Desa Reong yang membutuhkan fasilitas publik untuk berbagai kegiatan.	Pembangunan Gedung Serba Guna bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pertemuan, seminar, dan acara sosial budaya.	Pembangunan Gedung Serba Guna dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya di desa.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan baru Balai Basarah &Erai Hapakat& Gunung Rantau diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa akan ruang pertemuan dan kegiatan sosial budaya.	Masyarakat desa Gunung Rantau yang memerlukan ruang pertemuan dan kegiatan sosial budaya.	Pembangunan Balai Basarah bertujuan untuk menyediakan ruang pertemuan dan kegiatan sosial budaya untuk masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial budaya.	Pembangunan Balai Basarah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (9 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kurangnya pasokan ikan di Desa Bundar bisa membatasi potensi bisnis perikanan di daerah tersebut.	Petani ikan dan pengusaha perikanan di Desa Bundar dan pihak pemerintah setempat.	Pengadaan bibit ikan dan keramba apung bertujuan untuk meningkatkan pasokan ikan dan potensi bisnis perikanan di Desa Bundar.	Pemerintah setempat sudah memperhitungkan anggaran dan teknis pelaksanaan pengadaan bibit ikan dan keramba apung.	(Bundar, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kurangnya sumber daya ikan di daerah RT.01, RT.02, dan RT.03.	Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan atau memiliki usaha perikanan di daerah RT.01, RT.02, dan RT.03.	Sebanyak 50 buah keramba ikan akan disediakan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan di daerah RT.01, RT.02, dan RT.03.	Pengadaan keramba ikan akan meningkatkan hasil tangkapan ikan dan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan atau memiliki usaha perikanan di daerah RT.01, RT.02, dan RT.03.	(RT.01, RT.02, dan RT.03., Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kurangnya sumber pendapatan bagi kelompok tani di daerah tersebut.	Tiga kelompok tani yang dipilih untuk menerima bantuan ternak ayam petelur.	Tiga kelompok tani akan diberikan bantuan ternak ayam petelur sebanyak 700 ekor.	Bantuan ternak ayam petelur dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi kelompok tani dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Petani di Desa Gunung Rantau memerlukan bantuan mesin perontok padi Power Treheser agar dapat meningkatkan efisiensi dalam proses panen.	Petani di Desa Gunung Rantau.	Proses perontokan padi yang dilakukan secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Dengan bantuan mesin, petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses panen	Proses perontokan padi yang dilakukan secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Dengan bantuan mesin, petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses panen	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kurangnya lahan pertanian di daerah RT.03 RW.01.	Petani di daerah RT.03 RW.01.	ahan seluas 200 hektar akan dibuat untuk keperluan pertanian.	Pembuatan lahan pertanian baru akan meningkatkan produktivitas pertanian di daerah RT.03 RW.01.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kurangnya lahan untuk pertanian di Desa Bundar bisa menyebabkan kurangnya produksi dan pendapatan petani.	Petani di Desa Bundar dan pihak pemerintah setempat.	Permintaan cetak sawah bertujuan untuk meningkatkan luasan lahan pertanian dan produksi di Desa Bundar.	Pemerintah setempat sudah memperhitungkan anggaran dan teknis pelaksanaan pekerjaan cetak sawah.	(Bundar, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani di RT.001 Desa Gunung Rantau perlu dicor beton agar lebih tahan lama	: Warga Desa Gunung Rantau yang bekerja di sektor pertanian	alan Usaha Tani yang berlumpur dan licin saat hujan dapat mempersulit warga dalam menga	Dengan pengaspalan jalan, warga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan mereka.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk kegiatan pertanian	Petani atau pelaku usaha pertanian di daerah tersebut.	Gedung baru akan dibangun untuk menyimpan alat pertanian,	Pembangunan gedung untuk alat pertanian dapat memudahkan dan meningkatkan produktivitas kegiatan pertanian di daerah tersebut.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT.004 Desa Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan anggaran.	Masyarakat di RT.004 Desa Gunung Rantau yang membutuhkan akses jalan yang lebih baik.	RT.004 Desa Gunung Rantau membutuhkan peningkatan jalan usaha tani untuk memudahkan transportasi dan pengiriman hasil pertanian.	Dengan pengaspalan jalan, warga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan mereka.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sinyal yang lemah atau tidak stabil di daerah RT.02 RW.01.	Warga yang tinggal di daerah RT.02 RW.01.	Tower penguat sinyal akan dibangun di daerah RT.02 RW.01 untuk meningkatkan kualitas sinyal telepon seluler dan internet.	Tower penguat sinyal dapat meningkatkan kualitas sinyal secara signifikan di daerah RT.02 RW.01.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kurangnya pilihan tempat wisata di Desa Bundar yang bisa membatasi potensi pariwisata di daerah tersebut.	Warga Desa Bundar dan pihak pengembang wisata setempat.	Pembangunan wisata bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan penghasilan di Desa Bundar.	Pengembang wisata setempat sudah memperhitungkan potensi keuntungan dari investasi pembangunan wisata di Desa Bundar.	(Bundar, Kec. Dusun Utara)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (14 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional Keagamaan Kelompok Yasinan AN-NUR di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota Kelompok Yasinan AN-NUR di Gunung Rantau.	Kelompok Yasinan AN-NUR adalah kelompok keagamaan di Gunung Rantau yang memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	Operasional keagamaan Kelompok Yasinan AN-NUR memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional Keagamaan SHA GKE di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHA GKE di Gunung Rantau.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHA GKE di Gunung Rantau.	Operasional keagamaan SHA GKE memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional Keagamaan SHM Katolik di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHM KATOLIK di Gunung Rantau.	memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional keagamaan TKA-TP AL-QUR&AN MIDAUL KHAIRIAH di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota TKA-TP AL-QUR&AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	Anggota TKA-TP AL-QUR&AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	Anggota TKA-TP AL-QUR&AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan baru Pastori Gereja Gke &Sinai& Gunung Rantau diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa akan tempat ibadah yang memadai.	Masyarakat desa Gunung Rantau yang memerlukan tempat ibadah yang memadai.	Pembangunan gereja bertujuan untuk menyediakan tempat ibadah yang memadai bagi masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kualitas spiritual dan religius masyarakat.	Pembangunan gereja dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Masjid NURUL MUTTAQIN di Gunung Rantau terhambat oleh keterbatasan anggaran	jamaah masjid Nurul Muttaqin Desa unung Rantau	Masjid NURUL MUTTAQIN adalah sebuah proyek pembangunan masjid di Gunung Rantau yang membutuhkan dukungan finansial dan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan proyek tersebut.	Pembangunan Masjid NURUL MUTTAQIN di Gunung Rantau penting untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat sekitar.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Rumah Ibadah 6 unit di Desa Reong diperlukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat desa yang memerlukan tempat ibadah.	Masyarakat Desa Reong yang memerlukan tempat ibadah.	Pembangunan Rumah Ibadah bertujuan untuk menyediakan tempat ibadah yang memadai bagi masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas spiritual dan religius masyarakat.	Pembangunan Rumah Ibadah (6 unit) dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan TK-TPA Desa Reong diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak di desa tersebut.	Anak-anak di Desa Reong yang memerlukan akses pendidikan dan pengajaran yang memadai.	Pembangunan TK-TPA bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang memadai bagi anak-anak di desa, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di desa.	Pembangunan TK-TPA dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di masa depan.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehabilitasi gereja Katholik SANTO PETRUS belum selesai.	Umat Katholik yang beribadah di gereja tersebut.	Perlu dilanjutkan rehabilitasi untuk gereja tersebut.	Adanya kerusakan pada bangunan gereja yang membutuhkan perbaikan.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehabilitasi langgar NURUL IMAN masih dalam proses.	Jamaah langgar NURUL IMAN Gunung Rantau.	Perlu dilanjutkan rehabilitasi untuk langgar tersebut.	Kerusakan pada langgar membutuhkan perbaikan agar bisa digunakan kembali.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
11	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.	Warga yang tinggal di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN.	Jaringan listrik PLN akan dipasang di daerah tersebut agar warga dapat memperoleh akses listrik yang lebih mudah.	Pemasangan jaringan listrik PLN dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan ekonomi di daerah tersebut.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
12	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Tarusan belum memiliki akses listrik PLN, sehingga masyarakat masih menggunakan sumber listrik alternatif yang kurang efektif dan kurang terjamin keamanannya.	Masyarakat Desa Tarusan.	Ketersediaan listrik PLN di Desa Tarusan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, belajar, dan mengakses informasi	Ketersediaan listrik PLN dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membuka peluang baru dalam bidang perekonomian. (Prioritas)	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
13	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kemungkinan kurangnya akses listrik yang memadai di Desa Bundar sebelum ekspansi jaringan PLN dilakukan.	Warga Desa Bundar dan pihak PLN.	Perluasan jaringan PLN bertujuan untuk memberikan akses listrik yang lebih baik dan memadai bagi warga Desa Bundar.	PLN sudah memperhitungkan potensi keuntungan dari investasi perluasan jaringan PLN di Desa Bundar.	(Bundar, Kec. Dusun Utara)	
14	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemasangan PLN di dalam Desa Reong menjadi prioritas untuk memperbaiki akses listrik yang kurang memadai.	Masyarakat Desa Reong yang memerlukan akses listrik yang memadai.	Pemasangan PLN bertujuan untuk meningkatkan akses listrik dan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.	Pemasangan PLN dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Reong.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : TAMARZAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Keterbatasan ruang kelas di SD Pamangka yang tidak mencukupi kebutuhan siswa.	Siswa SD Pamangka yang membutuhkan ruang kelas yang mencukupi kebutuhan belajar	Pembangunan/penambahan ruang kelas di SD Pamangka bertujuan untuk menyediakan ruang kelas yang mencukupi kebutuhan belajar siswa.	Dengan adanya ruang kelas yang mencukupi, kualitas pendidikan di SD Pamangka dapat meningkat, siswa dapat belajar dengan nyaman dan optimal, dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.	(Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tidak adanya perumahan yang layak untuk guru SD Pamangka	: Guru SD Pamangka yang membutuhkan perumahan yang layak	Rehab perumahan guru SD Pamangka bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi guru SD Pamangka sehingga dapat menunjang kinerja dan kualitas pengajaran guru	: Dengan adanya perumahan yang layak bagi guru SD Pamangka, kualitas pengajaran guru dapat meningkat, mengurangi beban biaya hidup guru, dan dapat memperkuat kinerja pendidikan di SD Pamangka.	(Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	bahwa pembangunan edung TK baru tersebut dilakukan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan memadai untuk anak-anak usia TK di desa Sanggu	anak-anak usia TK di desa Sanggu	bahwa gedung TK yang dibangun di desa Sanggu terdiri dari 2 ruang kelas, 1 ruang guru, dan 2 WC.	bahwa pembangunan edung TK baru tersebut dilakukan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan memadai untuk anak-anak usia TK di desa Sanggu	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	bahwa pembangunan gedung TK baru tersebut dilakukan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan memadai untuk anak-anak usia TK di desa Sanggu	anak-anak usia TK di desa Sanggu	bahwa gedung TK yang dibangun di desa Sanggu terdiri dari 2 ruang kelas, 1 ruang guru, dan 2 WC.	bahwa pembangunan gedung TK baru tersebut dilakukan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan memadai untuk anak-anak usia TK di desa Sanggu	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	pembangunan tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi anak-anak usia TK di desa Gunung Rantau	anak-anak usia TK di desa Gunung Rantau	Gedung TK yang dibangun di desa Gunung Rantau terdiri dari 2 ruang kelas, 1 kantor kepala sekolah, dan 1 WC.	bahwa pembangunan gedung TK baru tersebut dilakukan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan memadai untuk anak-anak usia TK di desa Gunung Rantau	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	TK/PAUD Karya Bersama Desa Danau Ganting memerlukan alat bermain yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak.	Anak-anak yang bersekolah di TK/PAUD Karya Bersama Desa Danau Ganting.	Alat bermain merupakan salah satu fasilitas penting dalam pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keceriaan anak-anak.	Dengan pengadaan alat bermain yang memadai, maka anak-anak yang bersekolah di TK/PAUD Karya Bersama Desa Danau Ganting dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan menyenangkan.	(Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Desa Danau Ganting membutuhkan ambulance untuk meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan	Masyarakat Desa Danau Ganting	Ketersediaan ambulance di desa tersebut sangat penting untuk memudahkan akses	Ketersediaan ambulance di desa tersebut sangat penting untuk memudahkan akses dan memberikan layanan kesehatan yang cepat dan efektif kepada warga yang membutuhkan.	(Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehab berat polindes Desa Tanjung Jawa	Penduduk Desa Tanjung Jawa yang memerlukan layanan kesehatan dari polindes tersebut.	Polindes merupakan sarana pelayanan kesehatan primer yang penting bagi masyarakat Desa Tanjung Jawa, namun kondisi bangunan yang kurang baik dapat mengganggu pelayanan kesehatan yang diberikan.	Dengan dilakukannya rehabilitasi bangunan Polindes, maka masyarakat Desa Tanjung Jawa dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (14 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sungai Huruk Besar, Huruk Kecil, dan Sungai Kutapi perlu dibersihkan karena mengalami penumpukan sampah yang mengganggu lingkungan hidup dan transportasi masyarakat sekitar.	Sungai Huruk Besar, Huruk Kecil, dan Sungai Kutapi perlu dibersihkan karena mengalami penumpukan sampah dan limbah yang mengganggu lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar.	Sungai merupakan sumber air yang penting bagi masyarakat, namun apabila terdapat penumpukan sampah dapat berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan	Dengan dilakukannya pembersihan sungai, maka masyarakat sekitar dapat memperoleh lingkungan yang lebih bersih dan melancarkan transportasi masyarakat	((Sungai Huruk Besar, Huruk Kecil dan Sungai Kutapi), Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Keterbatasan akses air bersih di Dusun Bambaler, yang menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci, dan minum.	Masyarakat Dusun Bambaler.	Pembuatan sumur bor 10 paket serta profil tandon bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Dusun Bambaler.	Masyarakat Dusun Bambaler membutuhkankses air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Keterbatasan sarana air bersih di Desa Danau Ganting dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kelompok Sasaran: Masyarakat Desa Danau Ganting	Masyarakat Desa Danau Ganting	Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, namun keterbatasan sarana air bersih dapat memicu terjadinya berbagai penyakit.	Dengan pengadaan sarana air bersih, maka kesehatan masyarakat dapat terjaga dan terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak layak.	(Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan air bersih yang terbatas dapat mengancam kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada akses air bersih.	Masyarakat yang belum terlayani jaringan air bersi	Pengadaan PDAM meliputi pembangunan jaringan air bersih, pembangunan bangunan pompa dan instalasi pengolahan air.	Dengan adanya jaringan air bersih, kesehatan masyarakat dapat terjaga, produktivitas pertanian dan kelautan dapat meningkat, serta aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya akses ke air bersih dapat menyebabkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup yang buruk.	Penduduk di Desa Muara Ripung.	Pengelolaan air yang tidak baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mempengaruhi kesehatan manusia.	Pengadaan fasilitas air bersih akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup tanpa menyebabkan dampak negatif pada lingkungan atau kesehatan manusia.	(Desa Muara Ripung., Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta peluang ekonomi terbatas.	Masyarakat	Pembuatan jalan baru akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta membuka peluang ekonomi baru.	Proyek pembuatan jalan dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat waktu.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta peluang ekonomi terbatas.	Penduduk Desa Muara Ripung.	Perbaikan jalan akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta membuka peluang ekonomi baru.	Proyek perbaikan jalan dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat waktu.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Infrastruktur jembatan gantung yang belum sempurna dapat membahayakan keselamatan warga dan kendaraan yang melewatinya.	Warga Desa Sanggu dan pengguna jalan yang melewati jembatan gantung yang memerlukan akses yang aman dan nyaman.	Pembangunan jembatan gantung bertujuan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan dan meningkatkan aksesibilitas warga Desa Sanggu.	Pembangunan jembatan gantung akan memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan mobilitas penduduk Desa Sanggu.	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Danau Ganting ke Buntok memerlukan perbaikan karena kondisinya yang rusak dan berlubang.	Masyarakat yang tinggal di sekitar jalan Danau Ganting dan Buntok.	Jalan merupakan akses transportasi penting bagi masyarakat, namun kondisi jalan yang buruk dapat mengganggu mobilitas dan keselamatan masyarakat.	Dengan dilakukannya perbaikan jalan, maka mobilitas dan keselamatan masyarakat dapat meningkat dan akses transportasi dapat menjadi lebih baik.	(Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Mangku Sari dari Danau Ganting menuju Sababilah memerlukan perbaikan karena kondisinya yang rusak dan berlubang.	Masyarakat yang menggunakan jalan Mangku Sari dan Sababilah.	Jalan merupakan akses transportasi penting bagi masyarakat, namun kondisi jalan yang buruk dapat mengganggu mobilitas dan keselamatan masyarakat.	Dengan dilakukannya perbaikan jalan, maka mobilitas dan keselamatan masyarakat dapat meningkat dan akses transportasi dapat menjadi lebih baik	(Desa Ganting, Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan menuju Desa Sanggu yang rusak dan tidak terawat dapat menghambat mobilitas dan aktivitas masyarakat setempat.	Warga Desa Sanggu dan pengguna jalan yang memerlukan jalan yang baik dan terawat untuk mobilitas dan aktivitas sehari-hari.	Perbaikan jalan menuju Desa Sanggu bertujuan untuk meningkatkan mobilitas dan aktivitas sehari-hari warga setempat.	Perbaikan jalan menuju Desa Sanggu dapat meningkatkan mobilitas dan aktivitas sehari-hari warga setempat.	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang rusak dan berlubang menghambat mobilitas dan transportasi, serta menimbulkan biaya tambahan dalam perbaikan kendaraan.	Masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, khususnya petani dan pedagang yang memanfaatkan akses tersebut untuk kegiatan ekonomi mereka.	Perbaikan jalan meliputi perbaikan aspal atau pengerasan jalan dengan material yang lebih baik dan perbaikan drainase.	Perbaikan jalan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, meningkatkan kegiatan ekonomi dan mengurangi biaya perbaikan kendaraan.	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kerusakan jembatan dapat mempengaruhi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat serta berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.	Masyarakat yang menggunakan jalan dan jembatan tersebut, khususnya petani dan nelayan yang memanfaatkan akses tersebut untuk kegiatan ekonomi mereka.	Rehabilitasi jembatan termasuk perbaikan struktur jembatan, penggantian material yang rusak, dan perbaikan akses jalan menuju jembatan.	Dengan rehabilitasi jembatan, mobilitas masyarakat akan meningkat dan akses ke pasar serta kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tidak ada jalan yang memadai dari Desa Pamangka ke Desa Telang Andrau.	Masyarakat Desa Pamangka dan Desa Telang Andrau yang membutuhkan akses jalan yang memadai.	Jalan Barinjing (5 KM) yang dibangun akan menjadi akses transportasi yang penting untuk kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.	Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah tersebut.	(Jalan Barinjing Desa Pamangka, Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Keterbatasan penerangan jalan di dalam desa dapat mempengaruhi keselamatan dan mobilitas masyarakat pada malam hari	Masyarakat yang tinggal di dalam Desa Danau Ganting.	Penerangan jalan merupakan aspek penting dalam keselamatan dan mobilitas masyarakat, terutama pada malam hari.	Dengan pengadaan penerangan jalan yang memadai, maka keselamatan dan mobilitas masyarakat dapat terjaga pada malam hari dan keamanan dapat ditingkatkan.	(Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kurangnya penerangan jalan umum di Desa Sanggu dapat mengganggu keselamatan warga dan kendaraan yang melewati jalan tersebut.	Warga Desa Sanggu dan pengguna jalan yang memerlukan penerangan jalan umum untuk keselamatan.	Pengadaan penerangan jalan umum bertujuan untuk meningkatkan keselamatan warga dan kendaraan yang melewati jalan tersebut.	Penerangan jalan umum dapat meningkatkan keselamatan warga dan kendaraan yang melewati jalan tersebut.	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Monumen Banteng Hitam situs sejarah perjuangan yang belum diperbaiki dan diterangi dapat mengurangi nilai sejarah dan keindahan lokasi tersebut.	Masyarakat yang tertarik dengan sejarah dan keindahan alam, khususnya Monumen Banteng Hitam sebagai situs sejarah perjuangan.	Perbaikan dan penerangan Monumen Banteng Hitam situs sejarah perjuangan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai sejarah dan keindahan lokasi tersebut.	Perbaikan dan penerangan Monumen Banteng Hitam situs sejarah perjuangan dapat meningkatkan nilai sejarah dan keindahan lokasi tersebut.	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (1 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	alat pompa air untuk upaya pemadam kebakaran.	Warga desa Danau Ganting	alat pompa air untuk pemadam kebakaran akan membantu dalam memadamkan api dan meminimalisasi kerugian akibat kebakaran.	alat pompa air untuk pemadam kebakaran akan membantu dalam memadamkan api dan meminimalisasi kerugian akibat kebakaran.	(Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Usulan)								
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keterbatasan alat perbengkelan di Desa Sanggu yang dapat menghambat pengembangan usaha dan perbaikan kendaraan masyarakat setempat.	masyarakat Desa Sanggu yang berkecimpung di bidang perbengkelan dan memerlukan bantuan alat perbengkelan untuk mengembangkan usaha.	Bantuan alat perbengkelan bertujuan untuk membantu pengembangan usaha dan perbaikan kendaraan masyarakat setempat.	Bantuan alat perbengkelan akan meningkatkan pengembangan usaha dan perbaikan kendaraan masyarakat setempat	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya fasilitas publik di Dusun Bambaler, sehingga masyarakat kesulitan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial.	Masyarakat Dusun Bambaler.	Pembuatan papan plang selamat datang di Dusun Bambaler bertujuan untuk meningkatkan citra dan kebanggaan masyarakat Dusun Bambaler terhadap wilayah mereka.	Pembuatan papan plang selamat datang di Dusun Bambaler dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap wilayah mereka.	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tidak adanya balai adat di Desa Pamangka	Masyarakat Desa Pamangka yang memerlukan tempat untuk kegiatan adat dan sosial	: Pembangunan Balai Adat akan memberikan tempat yang nyaman dan representatif untuk kegiatan adat dan sosial masyarakat di Desa Pamangka	Dengan adanya Balai Adat, masyarakat di Desa Pamangka dapat memperkuat kebudayaan dan menjaga tradisi adat serta meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan sosial.	(Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tidak adanya sarana Balai Adat di Desa Sanggu dapat menghambat kegiatan sosial dan budaya masyarakat setempat.	Masyarakat Desa Sanggu yang memerlukan sarana Balai Adat untuk kegiatan sosial dan budaya.	Pembangunan Balai Adat bertujuan untuk memberikan sarana kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat Desa Sanggu.	Balai Adat Desa Sanggu dapat meningkatkan kegiatan sosial dan budaya masyarakat setempat.	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (14 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kurangnya peralatan tangkap ikan yang memadai, yang dapat mempengaruhi hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.	Masyarakat nelayan di daerah tersebut.	Bantuan alat tangkap ikan seperti rengge, lunta, dan panggilar bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.	Peralatan tangkap ikan yang memadai dapat meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keterbatasan sarana transportasi di daerah tersebut, yang dapat menghambat aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam mengembangkan perekonomian.	Masyarakat nelayan di daerah tersebut.	Kapal motor/kelotok kapasitas 15 orang bertujuan untuk membantu mobilitas dan aksesibilitas masyarakat nelayan dalam mengembangkan perekonomian, seperti mencari tempat memancing yang lebih jauh atau mengangkut hasil tangkapan ke pasar.	Masyarakat nelayan membutuhkan sarana transportasi yang memadai untuk mengembangkan perekonomian mereka, terutama untuk mencari tempat memancing yang lebih jauh atau mengangkut hasil tangkapan ke pasar.	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan di Desa Muara Ripung kesulitan dalam meningkatkan hasil tangkapan mereka.	Nelayan di Desa Muara Ripung.	Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem sungai dan mengurangi jumlah ikan yang dapat ditangkap di masa depan.	Bantuan alat tangkap ikan akan meningkatkan hasil tangkapan nelayan tanpa merusak ekosistem sungai atau mengurangi jumlah ikan yang dapat ditangkap di masa depan.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Keterbatasan alat mesin dalam panen padi yang dapat mempengaruhi hasil produksi padi petani.	Petani yang bercocok tanam padi di daerah tersebut	Mesin panen padi merupakan alat yang penting untuk membantu petani dalam memperoleh hasil panen yang maksimal	Dengan pengadaan mesin panen padi, maka petani dapat meningkatkan hasil produksi padi dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kurangnya akses dan harga pupuk yang tinggi menjadi kendala dalam pengembangan usaha semangka tanpa biji.	: Petani semangka tanpa biji di Desa Pamangka	Pengadaan pupuk bersubsidi untuk tanaman semangka tanpa biji akan membantu mengatasi kendala akses dan harga pupuk yang tinggi sehingga petani dapat mengembangkan usaha semangka tanpa biji dengan lebih baik.	Dengan adanya pupuk bersubsidi, petani semangka tanpa biji dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan	(Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha semangka tanpa biji di Desa Pamangka.	Masyarakat Desa Pamangka yang ingin mengembangkan usaha semangka tanpa biji.	Pelatihan pengembangan usaha semangka tanpa biji bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha semangka tanpa biji.	Dengan adanya pelatihan pengembangan usaha semangka tanpa biji, masyarakat Desa Pamangka dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pengembangan usaha semangka tanpa biji sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta meningkatkan perekonomian Desa	(Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Usaha semangka tanpa biji di Desa Pamangka belum berkembang dan peralatan serta modal yang terbatas menjadi kendala dalam pengembangannya.	: Penduduk Desa Pamangka yang ingin mengembangkan usaha semangka tanpa biji	Bantuan peralatan dan permodalan akan diberikan untuk membantu pengembangan usaha semangka tanpa biji di Desa Pamangka	Dengan adanya bantuan peralatan dan permodalan, penduduk Desa Pamangka dapat meningkatkan produksi dan kualitas semangka tanpa biji sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memperkuat perekonomian Desa Pamangka.	(Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Keterbatasan ternak sapi yang dapat mempengaruhi produksi susu dan daging sapi masyarakat	Masyarakat Desa Tanjung Jawa	Ternak sapi merupakan sumber pangan yang penting bagi masyarakat, namun keterbatasan jumlah ternak sapi dapat mempengaruhi produksi susu dan daging sapi	Dengan pengadaan ternak sapi, maka produksi susu dan daging sapi dapat ditingkatkan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pangan yang lebih cukup.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kurangnya sumber daya dan modal untuk mengembangkan peternakan, sehingga sulit untuk memperoleh keuntungan yang memadai dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Sanggu.	Masyarakat Desa Sanggu yang berkecimpung di bidang peternakan dan perlu dukungan dalam bentuk bantuan ternak.	Bantuan ternak bertujuan untuk meningkatkan produksi peternakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sanggu.	Bantuan ternak akan meningkatkan produksi peternakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sanggu.	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan pertanian yang belum dimanfaatkan di Bantai Sarunai dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produksi pertanian, namun masih memerlukan pembukaan lahan yang memadai.	Masyarakat Desa Sanggu yang berkecimpung di bidang pertanian dan memerlukan dukungan dalam pembukaan lahan.	Pembukaan lahan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki perekonomian masyarakat Desa Sanggu.	Pembukaan lahan pertanian akan meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki perekonomian masyarakat Desa Sanggu.	(Bantai Sanurai, Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tidak adanya bibit karet yang cukup di Desa Pamangka	Masyarakat Desa Pamangka yang ingin membudidayakan karet	Pengadaan bibit karet merupakan salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Pamangka	Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat Desa Pamangka melalui budidaya karet.	(Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan TOGA I di Desa Pamangka belum diaspal sehingga membutuhkan pengerasan	Masyarakat Desa Pamangka yang menggunakan jalan tersebut untuk kegiatan sehari-hari.	Jalan TOGA I adalah jalan utama di Desa Pamangka yang digunakan untuk transportasi dan kegiatan ekonomi	Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi jalan dan meningkatkan aksesibilitas di Desa Pamangka.	(Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan yang sulit dilalui pada musim hujan dapat menghambat aktivitas pertanian dan transportasi hasil pertanian.	Petani yang memanfaatkan jalan tersebut untuk mengangkut hasil pertanian.	Pembuatan titian jalan usaha tani meliputi pembuatan jalan yang terbuat dari material yang lebih kuat dan tahan air, serta pembenahan drainase.	Pembuatan titian jalan usaha tani dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kerugian akibat kerusakan hasil pertanian.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kurangnya infrastruktur irigasi membatasi produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.	Petani di Desa Muara Ripung.	Pembangunan infrastruktur irigasi yang tidak diperhitungkan dengan baik dapat berdampak pada kerentanan terhadap bencana dan lingkungan alami.	Pembangunan infrastruktur irigasi akan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan minimal dampak negatif pada lingkungan atau kerentanan terhadap bencana.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (7 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Belum adanya kesepakatan dan batas yang jelas antara Desa Sanggu dengan Desa Sababilah serta Penda Asam dapat menimbulkan konflik antar desa.	Pemerintah Desa Sanggu, Desa Sababilah, dan Penda Asam yang memerlukan kesepakatan dan perjanjian yang jelas dalam menentukan batas wilayah.	Menyelesaikan batas desa bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik antar desa dan memastikan pemerintahan yang efektif dan aman.	Penyelesaian batas desa akan meminimalisir terjadinya konflik antar desa dan meningkatkan pemerintahan yang efektif dan aman di Desa Sanggu, Desa Sababilah, dan Penda Asam.	(Sanggu, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	: Gereja GKE I Katolik di Desa Pamangka membutuhkan perbaikan dan rehabilitasi	Masyarakat Katolik di Desa Pamangka dan sekitarnya yang membutuhkan tempat ibadah yang layak.	Gereja GKE I Katolik di Desa Pamangka adalah tempat ibadah penting bagi umat Katolik di wilayah tersebut	Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi gereja dan meningkatkan kualitas fasilitas ibadah di Desa Pamangka.	(Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Keterbatasan akses listrik di Dusun Bambaler, yang menyebabkan kesulitan dalam penggunaan alat-alat listrik seperti lampu dan peralatan rumah tangga.	Masyarakat Dusun Bambaler.	Pengadaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) lengkap dengan aki dan inverter bertujuan untuk memberikan sumber listrik alternatif bagi masyarakat Dusun Bambaler yang masih terbatas akses listrik.	Masyarakat Dusun Bambaler membutuhkan sumber listrik alternatif dan akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya fasilitas publik di Dusun Bambaler, sehingga masyarakat kesulitan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial.	Masyarakat Dusun Bambaler.	Pengadaan kursi plastik 100 buah bertujuan untuk memberikan fasilitas penunjang yang memadai untuk kenyamanan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.	Kegiatan sosial yang diadakan membutuhkan fasilitas penunjang seperti kursi.	(Dusun Bambalere, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya fasilitas publik di Dusun Bambaler, sehingga masyarakat kesulitan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial.	Masyarakat Dusun Bambaler.	Pengadaan tenda ukuran 3x6 meter untuk kegiatan sosial masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat Dusun Bambaler dalam menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pertemuan, rekreasi, dan lain-lain.	Pengadaan tenda dapat membantu masyarakat Dusun Bambaler dalam menyelenggarakan kegiatan sosial.	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Langgar Darussalam memerlukan bantuan untuk perbaikan dan pengembangan fasilitasnya.	Masyarakat yang membutuhkan tempat ibadah di Desa Danau Ganting.	: Langgar Darussalam merupakan tempat ibadah yang penting bagi masyarakat Desa Danau Ganting, namun kondisi fasilitasnya memerlukan perbaikan dan pengembangan.	Dengan diberikannya bantuan untuk Langgar Darussalam, maka masyarakat Desa Danau Ganting dapat memperoleh tempat ibadah yang lebih baik dan nyaman.	(Desa Danau Ganting, Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan langgar di Desa Pamangka belum selesai dan membutuhkan bantuan untuk diselesaikan.	Masyarakat Desa Pamangka yang membutuhkan fasilitas ibadah yang memadai.	Pembangunan langgar merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat Desa Pamangka karena berperan sebagai tempat ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya	Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas ibadah di Desa Pamangka.	(Pamangka, Kec. Dusun Selatan)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : TRI WAHYUNI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	penyiringan dan penimbunan halaman SDN Tabatan. Halaman SDN Tabatan tidak rata dan tidak layak untuk digunakan sebagai area bermain siswa.	Siswa, guru, dan pihak sekolah.	Penyiringan dan penimbunan halaman akan meningkatkan kualitas lingkungan belajar siswa.	Kondisi lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Usulan pengadaan Meubelair untuk SD Dusun Bakota sebagai Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Guru dan Murid.	Kelompok sasaran dari usulan pengadaan meubelair untuk SD Dusun Bakota adalah siswa-siswi di SD Dusun Bakota, serta guru dan staf sekolah yang bertugas di sana.	Usulan pengadaan meubelair untuk SD Dusun Bakota bertujuan untuk memperbaiki kondisi meja dan kursi yang sudah tua, rusak, dan tidak ergonomis, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kesehatan siswa saat belajar. Selain itu, pengadaan meubelair yang memadai juga dapat meningkatkan motivasi siswa dan kualitas pembelajaran di SD Dusun Bakota.	Asumsi dari usulan pengadaan meubelair untuk SD Dusun Bakota adalah bahwa dengan pengadaan meja dan kursi yang baru, ergonomis, dan memadai, kondisi belajar siswa akan menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dan kualitas pembelajaran di SD Dusun Bakota.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Usulan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dusun Bakota.	Kelompok sasaran dari usulan rehabilitasi ruang kelas SD Dusun Bakota adalah siswa-siswi di SD Dusun Bakota, serta guru dan staf sekolah yang bertugas di sana.	Ruang kelas SD Dusun Bakota memerlukan rehabilitasi untuk memperbaiki kondisi bangunan yang rusak dan kurang terawat, serta untuk memperbaiki fasilitas dan aksesibilitas agar siswa dan staf sekolah dapat belajar dan bekerja dengan nyaman dan aman.	Asumsi dari usulan rehabilitasi ruang kelas SD Dusun Bakota adalah bahwa dengan melakukan rehabilitasi, kondisi ruang kelas akan menjadi lebih baik dan lebih memadai untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dan staf sekolah, serta meningkatkan kualitas pendidikan di SD Dusun Bakota. Selain itu, diharapkan juga bahwa rehabilitasi ini dapat membantu memperbaiki citra sekolah di mata masyarakat dan pemerintah setempat	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembuatan TK Paud di Desa Sungai Jaya	Kelompok sasaran dari usulan pembuatan TK Paud di Desa Sungai Jaya adalah anak-anak usia dini yang tinggal di Desa Sungai Jaya dan belum memiliki akses pendidikan pra-sekolah.	Pembuatan TK Paud diharapkan dapat memberikan akses pendidikan pra-sekolah bagi anak-anak di Desa Sungai Jaya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan mereka.	Adanya anak-anak usia dini yang cukup banyak di Desa Sungai Jaya yang membutuhkan akses pendidikan pra-sekolah.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	usulan pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Tabatan. Tidak ada puskesmas pembantu di Desa Tabatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.	Masyarakat Desa Tabatan dan pihak kesehatan.	Pembangunan puskesmas pembantu akan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Adanya fasilitas kesehatan yang memadai dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (12 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Usulan pembuatan siring cor beton untuk menahan abrasi di Desa Tampulang. Abrasi yang terjadi di Desa Tampulang menyebabkan erosi pinggir sungai dan mengancam pemukiman warga.	Warga Desa Tampulang yang tinggal di pinggir sungai yang terancam abrasi.	Abrasi yang terjadi di Desa Tampulang menyebabkan erosi pinggir sungai dan mengancam pemukiman warga.	Pembangunan siring cor beton dapat membantu mengurangi abrasi dan mengurangi risiko erosi pinggir sungai yang mengancam pemukiman warga.	(Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Usulan dibuatkan sumur bor bagi warga masyarakat desa sungai Jaya. Desa Sungai Jaya belum memiliki pengadaan air bersih atau sumur bor.	Penduduk desa Sungai Jaya yang kesulitan mendapatkan akses ke air bersih.	Pengadaan air bersih atau sumur bor sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk desa Sungai Jaya.	Diperlukan alokasi dana yang cukup untuk melakukan pengadaan air bersih atau sumur bor agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk desa.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan penyebrangan Desa Mahajandau di Sei Lunuk mungkin mengalami kerusakan atau kekurangan perawatan.	Penduduk desa Mahajandau yang menggunakan jembatan penyebrangan Sei Lunuk.	Jembatan tersebut penting untuk menghubungkan antara dua sisi desa Mahajandau yang terpisah oleh sungai Sei Lunuk.	Kondisi jembatan tersebut belum diketahui, namun perlu dilakukan pengecekan dan perawatan secara rutin agar terhindar dari kemungkinan kerusakan yang dapat membahayakan pengguna.	(Desa mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan umum Sungai Hamsi di Desa Rantau Bahuang belum memadai dan perlu direnovasi.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pembangunan jembatan cor beton akan meningkatkan kapasitas jembatan dan mengurangi risiko kecelakaan.	Pembangunan jembatan yang memadai dapat meningkatkan konektivitas dan keamanan transportasi.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Desa Teluk Timbau. Permasalahan mendasar yang terjadi pada pelebaran jalan desa Teluk Timbau adalah masalah pembebasan lahan. Kemungkinan adanya sejumlah penduduk yang tidak bersedia melepaskan lahan mereka untuk kepentingan pelebaran jalan dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek ini.	Kelompok sasaran yang terdampak oleh pelebaran jalan ini adalah penduduk yang memiliki lahan di sekitar jalan desa Teluk Timbau. Selain itu, masyarakat yang menggunakan jalan ini sebagai akses transportasi juga akan terdampak oleh proyek pelebaran jalan ini.	Pelebaran jalan desa Teluk Timbau membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, anggaran yang tersedia terbatas sehingga sulit untuk memenuhi semua kebutuhan dalam proyek pelebaran jalan tersebut.	Asumsi yang dapat dibuat adalah bahwa pelebaran jalan desa Teluk Timbau akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kemudahan akses bagi warga desa Teluk Timbau. Namun, proyek ini juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti pengurangan lahan pertanian dan dampak lingkungan yang dapat terjadi akibat pelaksanaan proyek.	(Desa Teluk Timbau, Teluk Timbau, Kec. Dusun Hilir)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Gg. Nurul Abidin Desa Teluk Timbau.	Warga Desa Teluk Timbau	Jalan Gang Nurul Abidin terletak di Desa Teluk Timbau, yang merupakan sebuah desa kecil di daerah pedesaan. Jalan ini menjadi akses utama untuk warga sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bersekolah, bekerja, dan berbelanja. Namun, kondisi jalan yang rusak parah membuat akses menjadi sulit dan tidak nyaman.	Dengan adanya peningkatan jalan, akses warga menjadi lebih mudah dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga. Selain itu, pengusaha lokal juga akan mendapatkan manfaat karena akses jalan yang baik dapat mempermudah pengiriman barang dagangan mereka. Peningkatan jalan diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Teluk Timbau.	(Gg. Nurul Abidin, Teluk Timbau, Kec. Dusun Hilir)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	usulan agar dibangun jalan Daduhup menuju Bakota dan Dibuatkan Jembatan Penyembrangam ke Desa Sungai Jaya. Jalan yang tersedia saat ini menuju Bakota dan Desa Sungai Jaya mungkin sulit dilalui oleh kendaraan besar dan mudah mengalami kerusakan, sehingga akses transportasi menjadi terbatas.	Masyarakat yang tinggal di sekitar Daduhup dan Desa Sungai Jaya serta memiliki kepentingan untuk mengakses Bakota atau Desa Sungai Jaya. Pelaku usaha atau pengusaha yang beroperasi di wilayah Daduhup dan Desa Sungai Jaya serta membutuhkan akses transportasi yang lebih mudah dan cepat.	Pembangunan jalan yang lebih baik dan aman diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.	Adanya potensi ekonomi dan pertumbuhan yang cukup besar di wilayah Daduhup dan Desa Sungai Jaya sehingga pembangunan jalan dan jembatan menjadi perlu dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan lanjutan pengecoran Jalan Tembus menuju Perbatasan Kecamatan Paminggir HSU Kalsel 7 KM.	Masyarakat yang tinggal di sekitar jalan tembus menuju perbatasan Kecamatan Paminggir Hulu serta memiliki kepentingan untuk mengakses wilayah tersebut. Pelaku usaha atau pengusaha yang beroperasi di wilayah tersebut serta membutuhkan akses transportasi yang lebih mudah dan cepat.	Dengan adanya jalan yang baru, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Adanya potensi ekonomi dan pertumbuhan yang cukup besar di wilayah tersebut sehingga pengecoran jalan menjadi perlu dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan pembangunan jembatan di sungai Bangkal atau jembatan menuju lahan pertanian warga masyarakat dan menuju kecamatan.	Kelompok sasaran usulan pembangunan jembatan adalah masyarakat sekitar yang menggunakan jalan menuju ke kecamatan, petani yang mengakses lahan pertanian melalui sungai, dan masyarakat yang ingin mengakses ke fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan puskesmas.	Pembangunan jembatan diharapkan dapat mempermudah akses transportasi antara kecamatan dan desa-desa sekitar serta mempermudah akses petani ke lahan pertanian.	Peningkatan aksesibilitas transportasi dan akses ke lahan pertanian dapat meningkatkan produktivitas petani dan perekonomian masyarakat di sekitar sungai Bangkal.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan pembangunan jembatan Sungai Murung Kerangka Beton Penghubung Rantau Bahuang ke Kecamatan Jenamas. Tidak ada jembatan yang memadai untuk menghubungkan Desa Rantau Bahuang dan Kecamatan Jenamas melalui Sungai Murung Kerangka.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pembangunan jembatan beton penghubung akan meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses ke daerah tersebut.	Adanya jembatan yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi dan pertumbuhan ekonomi.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan pembangunan Siring Cor Beton Bertulang Jalan Desa Rantau Bahuang 1000 Meter. Akses jalan dari Kecamatan Jenamas ke Desa Rantau Bahuang belum memadai, sehingga sulit untuk diakses oleh masyarakat dan kendaraan.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pembangunan jalan desa akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas orang dan barang di daerah tersebut.	Adanya akses jalan yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	(Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan perbaikan/ peningkatan Jalan Dusun Bakota khususnya di RT 09 dan RT 10. Jalan di RT 09 dan RT 10 Dusun Bakota mungkin perlu ditingkatkan kualitasnya.	Penduduk Dusun Bakota yang menggunakan jalan tersebut.	Peningkatan kualitas jalan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di Dusun Bakota.	Diperlukan alokasi dana yang cukup untuk meningkatkan kualitas jalan agar dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (3 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	Pendalaman tanggul pertanian Desa Teluk Timbau	Petani yang memiliki lahan pertanian di sekitar tanggul tersebut. Masyarakat desa yang bergantung pada hasil panen dari lahan pertanian tersebut.	Desa Teluk Timbau merupakan daerah yang subur dan banyak dihuni oleh petani. Tanggul pertanian di desa tersebut memiliki peran penting dalam menjaga lahan pertanian dari banjir dan memperoleh hasil panen yang maksimal. Namun, tanggul tersebut sudah tua dan kurang terawat sehingga memerlukan perbaikan.	Dengan adanya pendalaman tanggul pertanian, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir dan memperkuat tanggul agar lebih tahan lama. Hal ini dapat mempertahankan produktivitas lahan pertanian dan meningkatkan hasil panen petani. Selain itu, dengan peningkatan pengetahuan petani dalam menjaga keberlangsungan tanggul, dapat mencegah kerusakan yang lebih lanjut dan menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan produksi pertanian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.	(Desa Teluk Timbau, Teluk Timbau, Kec. Dusun Hilir)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	pembangunan Jalan titian Cor Beton 800 Meter dengan tinggi 1,5M dan lebar 3M.	Penduduk desa Mahajandau yang menggunakan jalan titian tani.	Jalan titian tani adalah akses penting bagi petani di desa Mahajandau untuk mengangkut hasil pertanian mereka.	Diperlukan perbaikan dan pengaspalan jalan titian tani untuk memastikan kelancaran transportasi barang dan meningkatkan kesejahteraan petani desa Mahajandau	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	usulan lanjutan Jalan Usaha Tani di RT.04 Desa Tabatan. Jalan usaha tani di RT.04 Desa Tabatan tidak memadai dan kurang layak untuk digunakan.	Pelaku usaha tani dan masyarakat Desa Tabatan yang menggunakan jalan tersebut.	Pembangunan lanjutan jalan usaha tani akan meningkatkan aksesibilitas transportasi dan memudahkan pengangkutan hasil panen.	Adanya aksesibilitas transportasi yang memadai dapat meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan pelaku usaha tani.	(Desa tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan SDN Tabatan beserta Jembatan/titiannya ukuran 30 M. Tidak ada pelabuhan yang memadai di SDN Tabatan. Ukuran pelabuhan dan jembatan saat ini kurang memadai untuk menampung lalu lintas kapal	siswa, Guru, serta masyarakat lainnya	Pembangunan pelabuhan dan jembatan akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan orang.	Pembangunan pelabuhan dan jembatan dapat meningkatkan mobilitas	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Usulan Pembangunan Pelabuhan Desa Rantau Bahuang. Tidak ada pelabuhan yang memadai di Desa Rantau Bahuang.	Pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah	Pembangunan pelabuhan akan meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses ke daerah tersebut.	Pembangunan pelabuhan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Usulan segera dibangun pelabuhan Dusun Bakota.	Masyarakat Dusun Bakota	Pembangunan Pelabuhan	Pembangunan pelabuhan akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, akan ada tantangan dalam pembangunan pelabuhan seperti biaya yang tinggi, dampak lingkungan, dan proses regulasi yang memakan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang matang dan koordinasi yang baik dengan pemerintah dan stakeholder terkait untuk menjamin keberhasilan pembangunan pelabuhan.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (10 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Keterbatasan lahan untuk kuburan Muslimin di Mesjid Jami Nurusalihin di Rt. 03 Desa Rantau Bahuang.	Muslimin di Desa Rantau Bahuang.	Usulan pembuatan dan penimbunan alkhub Kuburan Muslimin di Mesjid Jami Nurusalihin di Rt. 03 Desa Rantau Bahuang.	Tidak tersedianya lahan yang cukup untuk pemakaman Muslimin di Mesjid Jami Nurusalihin dapat mengganggu aktivitas pemakaman secara umum di desa tersebut.	(RT.03 Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan Lanjutan Penimbunan Alqah Perkuburan desa Mahajandau	Warga Desa Mahajandau yang membutuhkan tempat pemakaman untuk keluarga mereka. Pengurus pemakaman Desa Mahajandau.	Alqah Perkuburan Desa Mahajandau adalah tempat pemakaman utama di desa tersebut dan memiliki peran penting bagi masyarakat desa. Namun, kondisi tanah yang tidak rata dan kurang stabil serta kurangnya ruang yang tersedia untuk pemakaman menjadi kendala utama dalam penguburan jenazah.	Dengan adanya penimbunan Alqah Perkuburan, diharapkan dapat memudahkan proses penguburan dan memberikan lebih banyak ruang untuk pemakaman. Selain itu, dengan meningkatkan sanitasi dan kebersihan di sekitar area pemakaman, dapat meminimalkan risiko penyebaran penyakit. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan membantu menjaga tradisi pemakaman yang layak dan bermartabat di Desa Mahajandau.	(Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan pembangunan / Perluasan Alkah 30 x 50 Meter. Desa Tampulang membutuhkan Alkah kuburan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pemakaman warga.	Warga Desa Tampulang yang memerlukan tempat pemakaman.	Alkah kuburan yang telah ada sudah tidak cukup memenuhi kebutuhan warga.	Pembangunan/Perluasan Alkah kuburan akan memudahkan aksesibilitas dan ketersediaan tempat pemakaman untuk warga Desa Tampulang.	(Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan Pembangunan Siring Alkah pekuburan desa Sungai Jaya.	Kelompok sasaran dari usulan pembangunan Siring Alqah Pekuburan Desa Sungai Jaya adalah masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang dimakamkan di pekuburan tersebut, serta masyarakat yang sering mengunjungi pekuburan untuk berziarah.	Pembangunan siring diharapkan dapat memperbaiki drainase dan mencegah terjadinya genangan air di pekuburan.	Dukungan masyarakat untuk pembangunan siring dan pembiayaannya tersedia melalui APBD atau bantuan dari pemerintah pusat.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	Pembuatan gudang untuk Mesjid Dusun Bakota. pembangunan gudang Masjid penyimpanan alat-alat mubillr. Masjid Dusun Bakota.	&Pengurus masjid dan jemaah yang menggunakan alat-alat mubiller yang disimpan di gudang. Masyarakat setempat yang tinggal di sekitar masjid dan gudang masjid. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan gudang masjid.&	Gudang masjid akan dibangun sebagai tempat penyimpanan alat-alat mubiller seperti sajadah, mukena, Al-Quran, dan perlengkapan kebersihan.	Dengan adanya gudang masjid, penyimpanan dan pengelolaan alat-alat mubiller akan lebih teratur dan efektif.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	Rehab masjid Nurrul Huda di Desa Mahajandau perlu penataan ulang.	Penduduk desa Mahajandau yang memanfaatkan halaman masjid Nurrul Huda.	Halaman masjid Nurrul Huda adalah tempat berkumpul dan beribadah bagi masyarakat desa Mahajandau.	Diperlukan perawatan dan penataan ulang halaman masjid untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	Usulan penyiringan gedung serbaguna di desa Tabatan. Gedung serbaguna di Desa Tabatan tidak layak untuk digunakan karena rusak atau tidak memadai.	Masyarakat Desa Tabatan dan pihak pemerintah.	Penyiringan gedung serbaguna akan meningkatkan kualitas dan fungsionalitas gedung.	Adanya gedung serbaguna yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial dan budaya di masyarakat.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
8	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Tampulang belum memiliki jaringan listrik PLN sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari warga.	Warga Desa Tampulang yang memerlukan listrik untuk kegiatan sehari-hari.	Belum adanya jaringan listrik PLN di Desa Tampulang.	Pembangunan jaringan listrik PLN akan meningkatkan aksesibilitas sumber daya energi dan membantu meningkatkan produktivitas warga.	(Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas)	
9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tidak ada akses listrik yang memadai di Desa Tabatan.	Masyarakat Desa Tabatan dan pihak PLN.	Pembangunan fasilitas listrik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memungkinkan pengembangan usaha dan industri.	Adanya akses listrik yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	usulan segra dibangun jaringan Listrik untuk Desa Mahajandau.	Kelompok sasaran dari usulan pembangunan jaringan listrik di Desa Mahajandau adalah seluruh masyarakat Desa Mahajandau yang belum memiliki akses listrik.	Pembangunan jaringan listrik diharapkan dapat mempermudah akses listrik bagi seluruh masyarakat Desa Mahajandau, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.	Peningkatan akses listrik dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat Desa Mahajandau serta meningkatkan akses ke informasi dan teknologi melalui perangkat listrik seperti televisi dan komputer.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : H. RADEN SUDARTO, SH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (11 Usulan)								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rumah dinas guru SDN 3 Kalahien dalam kondisi rusak berat dan tidak layak huni.	Rumah Dinas Guru SDN 3 Kalahien	Rumah dinas guru dalam kondisi rusak berat dan tidak layak huni sehingga harus dihapuskan.	Tidak ada penghuninya dan tidak ada anggaran untuk memperbaikinya.	(SDN 3 Kalahien, Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bangunan SD Desa Murung Paken memerlukan rehab ringan untuk meningkatkan kondisi dan kualitasnya.	Masyarakat Desa Murung Paken	Perbaikan bangunan SD diperlukan agar siswa dan staf pendidikan dapat belajar dan mengajar dengan nyaman dan aman.	Dana yang cukup tersedia untuk melakukan perbaikan ringan pada bangunan SD.	(Desa Murung Paken., Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kurangnya fasilitas sekolah yang memadai dan aman bagi siswa serta kurangnya keamanan di sekitar area sekolah.	Siswa dan pengajar sekolah TK, SD dan SMP di Desa Kalahien.	Kebutuhan akan pagar sekolah agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman serta memperbaiki tata kelola keamanan di sekitar area sekolah.	Sekolah-sekolah di Desa Kalahien saat ini tidak memiliki pagar yang memadai dan keamanan di sekitar area sekolah kurang baik.	(Desa Kalahien., Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Masalah kurangnya fasilitas lapangan di beberapa sekolah di Desa Tanjung Jawa, yaitu SDN 1, SDN II, SMP-6, dan MI, yang memerlukan penimbunan lapangan.	SDN 1, SDN II, SMP-6, dan MI Desa Tanjung Jawa, untuk penimbunan lapangan sekolah.	SDN 1, SDN II, SMP-6, dan MI Desa Tanjung Jawa memerlukan penimbunan lapangan sekolah.	Penimbunan lapangan sekolah di SDN 1, SDN II, SMP-6, dan MI Desa Tanjung Jawa dapat meningkatkan kualitas fasilitas sekolah.	(SDN 1, SDN II, SMP-6, dan MI Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN 1 Tanjung Jawa, untuk pembangunan 2 unit kantor sekolah baru.	SDN 1 Tanjung Jawa, untuk pembangunan 2 unit kantor sekolah baru.	SDN 1 Tanjung Jawa memerlukan pembangunan 2 unit kantor sekolah baru.	Pembangunan 2 unit kantor sekolah baru di SDN 1 Tanjung Jawa dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekolah.	(SDN 1 Tanjung Jawa,, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Masalah kurangnya meubelir untuk siswa dan guru di SMP-6 Desa Tanjung Jawa yang memerlukan penyediaan meubelir baru.	Siswa dan guru SMP-6 Desa Tanjung Jawa, untuk penyediaan meubelir baru.	SMP-6 Desa Tanjung Jawa memerlukan penyediaan meubelir baru untuk siswa dan guru.	Penyediaan meubelir baru di SMP-6 Desa Tanjung Jawa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa.	(SMP-6 Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Masalah kurangnya perumahan dinas guru di SMPN-6 Tanjung Jawa yang memerlukan pembangunan 3 unit perumahan baru.	Guru SMPN-6 Tanjung Jawa, untuk pembangunan 3 unit perumahan dinas guru baru.	SMPN-6 Tanjung Jawa memerlukan pembangunan 3 unit perumahan dinas guru baru.	Diperlukan dana yang cukup besar untuk membangun 3 unit perumahan dinas guru baru di SMPN-6 Tanjung Jawa.	(SMPN-6 Tanjung Jawa., Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bangunan TK sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak layak untuk digunakan lagi.	Anak-anak usia dini dan orangtua yang ingin menyekolahkan anak mereka di TK Desa Danau Masura.	sul rehab berat bangunan TK Desa Danau Masura	Rehabilitasi berat bangunan TK akan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Desa Danau Masura serta memberikan lingkungan yang aman dan sehat untuk anak-anak belajar.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Masalah kurangnya alat bermain edukasi di TK Santa Maria Desa Tanjung Jawa yang memerlukan penyediaan alat bermain baru.	TK Santa Maria Desa Tanjung Jawa, untuk penyediaan alat bermain edukasi baru.	TK Santa Maria Desa Tanjung Jawa, untuk penyediaan alat bermain edukasi baru.	Penyediaan alat bermain edukasi baru di TK Santa Maria Desa Tanjung Jawa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak.	(TK Santa Maria Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Masalah kekurangan gedung sekolah di SMA-5 Tanjung Jawa yang memerlukan pembangunan 3 unit gedung baru.	SMA-5 Tanjung Jawa, untuk pembangunan 3 unit gedung baru.	SMA-5 Tanjung Jawa memerlukan pembangunan 3 unit gedung baru. adalah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	membangun 3 unit gedung baru di SMA-5 Tanjung Jawa.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Masalah ruang kelas MI yang memerlukan rehab berat di 4 lokal.	MI Desa Tanjung Jawa, untuk rehab berat ruang kelas di 4 lokal.	MI Desa Tanjung Jawa memerlukan rehab berat ruang kelas di 4 lokal.	Rehab berat ruang kelas di MI Desa Tanjung Jawa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Puskesdes Desa Murung Paken mengalami kerusakan atau tidak memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.	Masyarakat Desa Murung Paken yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari Puskesdes	Puskesdes adalah pusat pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa, sehingga membutuhkan bangunan yang layak dan memadai.	Dengan dilakukannya rehab bangunan Puskesdes, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat akan meningkat.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Masalah rehat total Polindes Desa Tanjung Jawa yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan.	Polindes Desa Tanjung Jawa, untuk perbaikan dan pemeliharaan Polindes.	Polindes Desa Tanjung Jawa memerlukan perbaikan dan pemeliharaan.	Perbaikan dan pemeliharaan Polindes Desa Tanjung Jawa dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kurangnya tenaga kesehatan di Desa Teluk Mampun.	Masyarakat Desa Teluk Mampun.	Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan perawat yang dapat memberikan pelayanan kesehatan di Desa Teluk Mampun.	Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan perawat yang dapat memberikan pelayanan kesehatan di Desa Teluk Mampun.	(Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (19 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya perawatan sungai Kutapi di Desa Tanjung Jawa	Warga dan Lingkungan Hidup di Desa Tanjung Jawa	Sungai Kutapi di Desa Tanjung Jawa tidak terawat dan dipenuhi dengan sampah serta tumbuhan yang menghambat aliran air. Pembersihan sepanjang 600 meter perlu dilakukan untuk mencegah banjir dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam menjaga kebersihan lingkungan.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingginya Tingkat Pencemaran Sungai Huruk Besar di Desa Tanjung Jawa	Warga dan Lingkungan Hidup di Desa Tanjung Jawa	Sungai Huruk Besar di Desa Tanjung Jawa telah tercemar oleh sampah dan limbah yang dibuang oleh penduduk setempat. Pembersihan sungai sepanjang 1000 meter perlu dilakukan untuk mengurangi pencemaran dan menjaga kebersihan lingkungan.	Masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sehingga menyebabkan sampah dan limbah dibuang sembarangan ke sungai.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingginya Tingkat Pencemaran Sungai Huruk Kecil di Desa Tanjung Jawa	Warga dan Lingkungan Hidup di Desa Tanjung Jawa	Sungai Huruk Kecil di Desa Tanjung Jawa juga mengalami pencemaran serupa dengan sungai Huruk Besar. Pembersihan sungai sepanjang 1000 meter perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah dampak negatif pada kesehatan masyarakat.	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan masih adanya perilaku buang sampah sembarangan di sekitar sungai.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Masalah akses infrastruktur di Desa Tanjung Jawa yang masih kurang memadai, sehingga perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur.	Warga Desa Tanjung Jawa yang memerlukan akses infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan air bersih.	Pengadaan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Desa Tanjung Jawa.	Pengadaan air bersih melalui PDAM dapat meningkatkan kesehatan warga dan kualitas hidup mereka.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tidak tersedianya WC umum di Dusun Parigi Desa Kalahien, yang menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.	Masyarakat di Dusun Parigi Desa Kalahien.	Pembangunan WC umum di Dusun Parigi Desa Kalahien diusulkan agar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama saat berada di luar rumah.	Dengan tersedianya WC umum, maka kebutuhan dasar masyarakat akan terpenuhi dan masyarakat dapat memperoleh keamanan dan kesehatan yang lebih baik.	(Dusun Parigi Desa Kalahien., Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Belum ada jalan yang menghubungkan Desa Danau Masura dengan Dusun Parigi, sehingga transportasi antarwilayah terhambat.	Warga Desa Danau Masura dan Dusun Parigi serta masyarakat yang melintasi jalan tersebut sebagai jalur transportasi.	pembangunan Jalan Danau Masura â€“ Dusun Parigi, sepanjang 7 KM	Pembangunan jalan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memudahkan aksesibilitas dan mobilitas warga, serta membuka potensi ekonomi baru dengan terbukanya akses transportasi.	(Jalan Danau Masura â€“ Dusun Parigi, sepanjang 7 KM., Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan dari Dusun Parigi ke Jalan Trans Nasional Provinsi mengalami kerusakan dan perlu ditingkatkan agar dapat dilalui dengan lancar	masyarakat Desa Kalahien	masyarakat Desa Kalahien yang memerlukan akses jalan yang baik untuk kegiatan sehari-hari dan juga pengusaha yang memerlukan akses jalan yang baik untuk distribusi barang	Dengan adanya peningkatan jalan, aktivitas ekonomi di Desa Kalahien dapat meningkat karena memudahkan distribusi barang dan akses transportasi.	(Lokasi kegiatan adalah dari Dusun Parigi ke Jalan Trans Nasional Provinsi., Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Danau Masura - Muara Ripung sudah rusak parah dan membutuhkan perbaikan untuk memastikan kelancaran transportasi warga.	Warga Desa Danau Masura dan sekitarnya yang menggunakan jalan tersebut sebagai jalur transportasi.	Usul peningkatan Jalan Desa Danau Masura - Muara Ripung, diselesaikan sekaligus tidak bertahap atau dalam hal tidak bisa sekaligus agar diperbaiki lokasi jalan yang benar-benar rusak	Peningkatan jalan akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga Desa Danau Masura dan sekitarnya, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.	(Jalan Desa Danau Masura - Muara Ripung., Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan desa yang menghubungkan Desa Danau Masura dan Desa Muara Ripung masih dalam kondisi yang kurang baik, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan dan masyarakat.	Masyarakat di Desa Danau Masura dan Desa Muara Ripung, pengendara kendaraan, dan petani yang mengangkut hasil pertanian.	Peningkatan jalan desa bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mempermudah pengangkutan hasil pertanian.	Dengan adanya jalan desa yang lebih baik, masyarakat di Desa Danau Masura dan Desa Muara Ripung diharapkan dapat mengakses layanan dan fasilitas yang lebih baik dan pengangkutan hasil pertanian dapat dilakukan dengan lebih efektif.	(Desa Muara Ripung menuju Desa Danau Masura, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan lintas Desa Murung Paken - Danau Masura dalam kondisi rusak atau sempit sehingga mempengaruhi aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta pengembangan ekonomi daerah	Masyarakat Desa Murung Paken dan sekitarnya yang membutuhkan akses jalan yang lebih baik.	Jalan lintas adalah jalan yang menjadi jalur utama penghubung antar wilayah atau desa, sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut.	Dengan dilakukannya peningkatan jalan lintas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akan meningkat, serta dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan lintas Desa Murung Paken - Danau Masura dalam kondisi rusak atau sempit sehingga mempengaruhi aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta pengembangan ekonomi daerah	Masyarakat Desa Murung Paken dan sekitarnya yang membutuhkan akses jalan yang lebih baik.	Jalan lintas adalah jalan yang menjadi jalur utama penghubung antar wilayah atau desa, sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut.	Dengan dilakukannya peningkatan jalan lintas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akan meningkat, serta dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang belum selesai dapat mengganggu mobilitas masyarakat dan menghambat perkembangan ekonomi lokal.	Masyarakat Desa Teluk Mampun dan Desa Penda Asam yang menggunakan jalan tersebut.	Usul lanjutan rekonstruksi / peningkatan jalan Desa Teluk Mampun - Desa Penda Asam	Pembangunan jalan yang lebih baik dapat meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.	(Desa Teluk Mampun - Desa Penda Asam, sepanjang 1,1 km., Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang menghubungkan Desa Muara Ripung dengan provinsi masih dalam kondisi yang kurang baik, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan dan masyarakat.	Masyarakat di Desa Muara Ripung dan sekitarnya, pengendara kendaraan, dan petani yang mengangkut hasil pertanian.	Peningkatan jalan menuju provinsi bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mempermudah pengangkutan hasil pertanian.	Dengan adanya jalan yang lebih baik, masyarakat di Desa Muara Ripung dan sekitarnya diharapkan dapat mengakses layanan dan fasilitas yang lebih baik dan pengangkutan hasil pertanian dapat	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang rusak dan sulit dilewati.	Masyarakat Desa Kalahien yang menggunakan jalan tersebut.	Kebutuhan akan perbaikan jalan agar masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan lebih mudah dan nyaman	Jalan tersebut dalam kondisi rusak dan sulit dilewati oleh kendaraan.	(Jalan Pemuda ke arah Pasar Desa Kalahien menuju ujung cor belakang PDAM, Desa Kalahien., Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang rusak dan sulit dilewati.	Masyarakat Desa Kalahien yang menggunakan jalan tersebut.	Kebutuhan akan perbaikan jalan agar masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan lebih mudah dan nyaman.	Jalan tersebut dalam kondisi rusak dan sulit dilewati oleh kendaraan.	(Jalan Desa Kalahien pinggir sungai Barito, Desa Kalahien., Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Masalah akses infrastruktur di Desa Tanjung Jawa yang masih kurang memadai, sehingga perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur.	Warga Desa Tanjung Jawa yang memerlukan akses infrastruktur yang memadai,	Peningkatan badan jalan Tanjung Jawa - Jl. Negara Pendang sepanjang 3000M.	Penambahan akses infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Tanjung Jawa.	(jalan Tanjung Jawa - Jl. Negara Pendang, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Masalah infrastruktur yang belum terpenuhi, seperti jalan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.	Masyarakat Desa Tajung Jawa dan sekitarnya yang memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi mereka.	Lanjutan jembatan cor beton Jalan antar Desa Tajung Jawa - Desa Teluk Mampun sepanjang 170M masih perlu diperbaiki untuk memudahkan aksesibilitas antar desa dan meningkatkan mobilitas penduduk.	Dengan adanya pembangunan dan peningkatan infrastruktur, akses dan mobilitas warga Desa Tanjung Jawa akan meningkat.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Masalah peningkatan badan jalan antara Desa Tanjung Jawa dan Desa Majundre yang memerlukan penimbunan badan jalan.	Masyarakat Desa Tanjung Jawa dan Desa Majundre, untuk peningkatan badan jalan antara kedua desa.	Peningkatan badan jalan antara Desa Tanjung Jawa dan Desa Majundre memerlukan penimbunan badan jalan.	Peningkatan badan jalan antara Desa Tanjung Jawa dan Desa Majundre dapat meningkatkan konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat.	(Desa Tanjung Jawa dan Desa Majundre, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Saat ini, akses transportasi dari Desa Muara Ripung menuju Buntok Seberang masih sangat terbatas. Kondisi jalan yang buruk dan minimnya transportasi publik menghambat mobilitas penduduk desa dan berdampak pada perekonomian masyarakat.	Kegiatan pembangunan jalan desa ini akan bermanfaat bagi seluruh penduduk Desa Muara Ripung, terutama bagi mereka yang memiliki usaha di sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, akses transportasi yang lebih baik juga akan meningkatkan mobilitas penduduk desa dan memperkuat konektivitas antara Desa Muara Ripung dengan Desa-Desa di sekitarnya.	Kegiatan ini akan melibatkan konstruksi jalan sepanjang sekitar 7 km, yang menghubungkan Desa Muara Ripung dengan Buntok Seberang. Selain itu, perlu juga dibangun beberapa infrastruktur pendukung seperti jembatan, drainase, dan penataan tepi jalan.	Pembangunan jalan desa ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan juga dapat menurunkan biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan.	(Kegiatan ini akan dilaksanakan di Desa Muara Ripung, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, dengan tujuan menuju Buntok Seberang., Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Beberapa masyarakat di Desa Muara Ripung masih memiliki kondisi rumah yang tidak layak huni dan tidak mampu memperbaikinya sendiri.	60 unit rumah Masyarakat Desa Muara Ripung yang tidak mampu dan memiliki kondisi rumah yang tidak layak huni.	Program bedah rumah bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah warga yang tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup mereka.	Dengan kondisi rumah yang lebih layak huni, masyarakat di Desa Muara Ripung diharapkan dapat lebih produktif dan kreatif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.	(Desa Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kondisi rumah masyarakat tidak mampu/miskin di Desa Danau Masura yang tidak layak huni.	Masyarakat tidak mampu/miskin di Desa Danau Masura yang memiliki rumah yang tidak layak huni.	Masyarakat tidak mampu/miskin di Desa Danau Masura membutuhkan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka agar dapat tinggal dengan lebih nyaman dan aman.	Dengan adanya program bedah rumah, kondisi rumah masyarakat tidak mampu/miskin di Desa Danau Masura dapat diperbaiki dan menjadi lebih layak huni.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Desa Murung Paken tidak memiliki akses listrik PLN dan memerlukan mesin genset untuk penerangan.	Penduduk Desa Murung Paken.	Ketersediaan mesin genset diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penerangan penduduk Desa Murung Paken yang tidak memiliki akses listrik PLN.	Dana yang cukup tersedia untuk membeli dan mengoperasikan mesin genset.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (11 Usulan)								
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Bangunan Kantor BPD sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak layak untuk digunakan lagi.	warga Desa Danau Masura	Kantor BPD adalah tempat berkumpul dan bekerja para anggota BPD dalam menjalankan tugasnya. Bangunan tersebut dapat mengalami kerusakan karena penggunaan yang intensif dan kurangnya perawatan.	Dengan direhabilitasi, Kantor BPD akan menjadi lebih aman dan nyaman bagi anggota BPD dan masyarakat umum yang memerlukan layanan BPD.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Teluk Mampun - Desa Penda Asam, sepanjang 1,1 km.	Anggota BPD dan Warga Desa Teluk Mampun.	Pembangunan kantor Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat.	Biaya pembangunan kantor Badan Permusyawaratan Desa akan diambil dari APBD atau dana desa.	(Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Saat ini, Desa Muara Ripung belum memiliki kantor desa yang memadai untuk melaksanakan pelayanan masyarakat secara optimal.	Pemerintah desa dan masyarakat Desa Muara Ripung.	Pembangunan kantor desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa Muara Ripung.	Dengan adanya kantor desa yang memadai, pelayanan masyarakat di Desa Muara Ripung dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.	(Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	BPD Desa Murung Paken kesulitan dalam mendapatkan dana untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai perwakilan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa.	BPD Desa Murung Paken yang membutuhkan dana untuk melaksanakan tugasnya.	BPD merupakan perwakilan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.	Dengan pengalokasian Dana Serap Aspirasi untuk BPD Desa Murung Paken, BPD dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan dapat lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat.	(Desa Murung Paken., Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	BPD Desa Murung Paken kurang mendapatkan pembinaan dan pelatihan terkait tugas dan fungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa.	BPD Desa Murung Paken yang membutuhkan pembinaan dan pelatihan terkait tugas dan fungsi.	BPD membutuhkan pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa.	Dengan adanya kegiatan pembinaan minimal satu kali bagi BPD Desa Murung Paken, BPD dapat memahami tugas dan fungsi dengan lebih baik dan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif.	(Desa Murung Paken., Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Honor/tunjangan yang tidak memadai untuk BPD Desa Kalahien dapat mengurangi motivasi dan semangat kerja mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas kerja mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan masyarakat di Desa Kalahien.	Anggota BPD Desa Kalahien, masyarakat Desa Kalahien, Pemerintah Daerah (instansi terkait/membidangi).	ditingkatkannya honor/tunjangan BPD Desa Kalahien, maka motivasi dan semangat kerja mereka akan meningkat	Dengan ditingkatkannya honor/tunjangan BPD Desa Kalahien, maka motivasi dan semangat kerja mereka akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas kerja mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan masyarakat di Desa Kalahien.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Percepatan penyelesaian penyusunan/pembentukan Peraturan Bupati tentang Dana Desa/Alokasi Dana Desa dapat mempercepat penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kalahien.	Masyarakat Desa Kalahien, Pemerintah Daerah (instansi terkait/membidangi).	Desa Kalahien merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Dusun Selatan	Dengan percepatan penyelesaian penyusunan/pembentukan Peraturan Bupati tentang Dana Desa/Alokasi Dana Desa, maka penggunaan dana desa dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Desa Kalahien.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tunjangan BPD Desa Murung Paken belum setara dengan perangkat desa.	anggota BPD Desa Murung Paken	Kenaikan tunjangan diperlukan untuk menjaga semangat dan motivasi anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat di desa.	Dana yang cukup tersedia untuk menaikkan tunjangan BPD.	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Honor/tunjangan yang tidak memadai untuk Mantir Adat Desa Kalahien dapat mengurangi motivasi dan semangat kerja mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas kerja mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin adat di Desa Kalahien.	Mantir Adat Desa Kalahien, masyarakat Desa Kalahien,	Usul Honor/tunjangan Mantir Adat Desa Kalahien ditingkatkan	Dengan ditingkatkannya honor/tunjangan Mantir Adat Desa Kalahien, maka motivasi dan semangat kerja mereka akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas kerja mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin adat di Desa Kalahien.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketimpangan insentif antara Ketua RT dengan anggota RT lainnya di Desa Kalahien.	Anggota RT di Desa Kalahien.	Anggota RT di Desa Kalahien hanya mendapatkan insentif ketika terdapat program yang diadakan dan tidak tetap, sedangkan Ketua RT menerima insentif tetap setiap bulan.	Insentif yang merata dapat memotivasi semua anggota RT untuk aktif dalam kegiatan di desa.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tidak adanya petugas di Pos Polisi Desa Kalahien, yang menyebabkan wilayah tersebut kurang terjaga keamanannya.	Masyarakat di Desa Kalahien.	Usulan agar terdapat minimal 1 (satu) orang polisi yang berjaga di Pos Polisi Desa Kalahien agar wilayah tersebut terjaga keamanannya.	Dengan adanya petugas di Pos Polisi Desa Kalahien, maka keamanan wilayah tersebut dapat lebih terjaga dan masyarakat merasa lebih aman.	(Lokasi: Dusun Parigi Desa Kalahien., Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (13 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Desa Tanjung Jawa mengandalkan tangkap ikan sebagai sumber penghasilan, namun sulitnya mencari ikan di perairan sekitar membutuhkan alat tangkap yang lebih baik, sehingga diperlukan pengadaan alat tangkap ikan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan masyarakat.	Masyarakat Desa Tanjung Jawa yang menjadi nelayan dan memiliki kebutuhan alat tangkap ikan.	engadaan 15 unit alat tangkap ikan untuk dipergunakan oleh masyarakat Desa Tanjung Jawa.	Adanya perairan yang cukup untuk dilakukan penangkapan ikan dan dukungan dari pemerintah desa dalam hal pelatihan penggunaan alat tangkap ikan yang baru.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Keterbatasan modal untuk membeli pupuk oleh kelompok tani, sehingga dapat mengganggu produktivitas dan kualitas hasil panen.	13 kelompok tani di Desa Tanjung Jawa yang membutuhkan bantuan subsidi pupuk.	Bantuan subsidi pupuk untuk 13 kelompok tani dengan jumlah 13 ton.	engan adanya subsidi pupuk, kelompok tani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau dan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Keterbatasan modal untuk membeli sapi ternak oleh kelompok tani, sehingga dapat mengganggu produktivitas dan kualitas hasil peternakan.	2 kelompok tani di Desa Tanjung Jawa yang membutuhkan bantuan pengadaan sapi ternak.	Pengadaan sapi ternak sebanyak 20 ekor untuk 2 kelompok tani di Desa Tanjung Jawa.	Dengan adanya sapi ternak, kelompok tani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil peternakan.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Keterbatasan sumber daya ternak ayam di Desa Tanjung Jawa menyebabkan sulitnya memenuhi permintaan pasar, sehingga diperlukan pengadaan ternak ayam untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat Desa Tanjung Jawa.	Masyarakat Desa Tanjung Jawa yang memiliki minat dan kemampuan untuk beternak ayam.	Pengadaan ternak ayam sebanyak 1000 ekor untuk dipelihara oleh masyarakat Desa Tanjung Jawa.	Ketersediaan lahan yang cukup untuk dipergunakan sebagai kandang ayam, ketersediaan sumber pakan yang memadai, dan adanya dukungan dari pemerintah desa dalam hal pelatihan dan pengawasan pengelolaan peternakan ayam.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Masyarakat Desa Tanjung Jawa masih menggunakan cara panen padi secara tradisional sehingga membutuhkan waktu yang lama dan hasil panen yang kurang maksimal, sehingga diperlukan pengadaan mesin panen padi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.	13 kelompok tani di Desa Tanjung Jawa.	Pengadaan 3 unit mesin panen padi untuk dipergunakan oleh 13 kelompok tani di Desa Tanjung Jawa.	Adanya lahan pertanian yang luas dan cocok untuk ditanami padi, ketersediaan sumber daya air yang cukup, dan adanya dukungan dari pemerintah desa dalam hal pelatihan dan pengawasan penggunaan mesin panen padi.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kurangnya alat pertanian di Desa Kalahien, terutama mesin perontok padi.	Petani di Desa Kalahien.	Petani di Desa Kalahien masih menggunakan cara tradisional dalam mengolah hasil panen sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas.	Pengadaan mesin perontok padi dapat meningkatkan produktivitas petani dan membantu mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam mengolah hasil panen.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Akses transportasi untuk mengangkut hasil panen dan bahan pertanian terhambat karena belum adanya jalan titian yang memadai.	Petani atau kelompok tani yang memiliki usaha pertanian di Desa Tanjung Jawa.	Pembuatan jalan titian sepanjang 200 meter yang menghubungkan antara lahan pertanian dengan akses jalan utama.	Pembuatan jalan titian usaha tani (200m)	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dua lokasi cekdam pada saluran sekunder untuk irigasi pertanian di Desa Kalahien mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki agar irigasi dapat berjalan dengan baik	petani di Desa Kalahien yang memerlukan irigasi yang baik untuk pertanian mereka	Cekdam merupakan bangunan kecil yang dibangun di atas aliran sungai untuk menampung air, sehingga air tersebut dapat dialirkan ke lahan pertanian. Dua lokasi cekdam di Desa Kalahien mengalami kerusakan pada saluran sekunder, yang menyebabkan pengurangan kapasitas air yang dapat dialirkan ke lahan pertanian.	Jika perbaikan saluran irigasi dilakukan, kapasitas air yang dapat dialirkan ke lahan pertanian akan meningkat, sehingga pertumbuhan tanaman dapat ditingkatkan.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan usaha tani di jalur sekunder di Desa Tanjung Jawa masih berupa tanah, sehingga sulit dilalui saat musim hujan dan mengganggu produktivitas pertanian.	Petani di Desa Tanjung Jawa yang memerlukan akses jalan yang memadai untuk dapat mengangkut hasil panen mereka.	Pembangunan cor beton pada jalan usaha tani jalur sekunder di Desa Tanjung Jawa sepanjang 2000 meter.	Dengan adanya jalan yang memadai, petani dapat mengangkut hasil panen mereka dengan lebih mudah dan produktivitas pertanian dapat meningkat.	(jalan usaha tani jalur sekunder di Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kurangnya pasokan air untuk pertanian dapat menghambat produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat	Petani dan masyarakat Desa Teluk Mampun	usul Pembangunan Cekdam untuk irigasi pertanian, sebanyak 8 Pintu, yang terdiri dari 2 Cekdam yang besar dan 6 Cekdam yang kecil	Pembangunan cekdam dapat meningkatkan pasokan air untuk pertanian dan meningkatkan produktivitas pertanian lokal.	(Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Masalah akses infrastruktur di Desa Tanjung Jawa yang masih kurang memadai, sehingga perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur.	Warga Desa Tanjung Jawa	Peningkatan jalan titian usaha tani sepanjang 600M untuk memudahkan mobilitas petani dalam mengangkut hasil pertanian.	Penambahan akses infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Tanjung Jawa.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Proses perontokan padi yang masih dilakukan secara manual memakan waktu dan tenaga yang cukup besar.	Petani di wilayah tertentu yang masih melakukan proses perontokan padi secara manual dan tidak memiliki mesin perontok padi sendiri.	Usul bantuan mesin perontok padi, sebanyak 4 unit.keuntungan petani.	Dengan adanya bantuan mesin perontok padi, proses perontokan padi dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan hemat tenaga. Dengan tersedianya mesin perontok padi, petani dapat memperoleh hasil panen dengan biaya produksi yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan keuntungan.	(Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tidak adanya akses jembatan yang memadai di Desa Tanjung Jawa	Warga dan Lingkungan Hidup di Desa Tanjung Jawa	Desa Tanjung Jawa membutuhkan akses jembatan penyeberangan tanggul sebanyak 6 buah untuk memudahkan akses masyarakat dan transportasi antarwilayah.	Kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam membangun infrastruktur transportasi sehingga menyulitkan akses masyarakat.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Dusun Parigi, Desa Kalahien.	Masyarakat di Dusun Parigi, Desa Kalahien.	Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Dusun Parigi dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar.	Pengadaan sumur bor dapat membantu masyarakat dalam memadamkan kebakaran dan mengurangi kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan.	(Dusun Parigi, Desa Kalahien., Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Permasalahan: Tidak adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah untuk pengamanan jembatan kalahien dari Kapal Batubara yang melintasi atau melewati jembatan tersebut, yang berpotensi menimbulkan bahaya.	Masyarakat di Desa Kalahien.	Usulan agar dilakukan pengawasan dari Pemerintah Daera	Usulan pengawasan dari Pemerintah Daerah dapat meminimalisir risiko keamanan jembatan dan pengguna jalan serta dapat mengoptimalkan penggunaan jembatan Kalahien untuk kepentingan perekonomian di wilayah tersebut.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dermaga di Desa Kalahien mengalami kerusakan sehingga menghambat aktivitas pelayaran, khususnya bagi nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.	Nelayan di Desa Kalahien.	Dermaga adalah bangunan yang dibangun di atas air untuk memudahkan proses pemuatan dan pembongkaran barang, serta memudahkan akses bagi kapal untuk berlabuh.	Jika dermaga diperbaiki atau direhabilitasi, aktivitas pelayaran, khususnya bagi nelayan dapat ditingkatkan dan mempermudah proses pemuatan dan pembongkaran barang.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tidak adanya akses signal yang memadai di Dusun Parigi Desa Kalahien, yang menyebabkan masyarakat sulit untuk terhubung dengan dunia luar.	Masyarakat di Dusun Parigi Desa Kalahien.	Pengadaan/pembangunan menara telekomunikasi atau akses signal di Dusun Parigi Desa Kalahien diusulkan agar masyarakat dapat terhubung dengan dunia luar.	Dengan tersedianya akses signal yang memadai, maka masyarakat dapat mengakses informasi, berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat, serta memperoleh keuntungan ekonomi dengan lebih baik.	(Dusun Parigi Desa Kalahien., Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (8 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dana bantuan hibah untuk rumah ibadah di Desa Kalahien masih kurang.	Pemuka agama dan jemaat di Desa Kalahien.	Rumah ibadah di Desa Kalahien belum mendapatkan bantuan hibah yang cukup sehingga belum dapat mengembangkan fasilitas dan layanan bagi jemaat.	Dengan adanya bantuan hibah yang cukup, rumah ibadah dapat memperbaiki dan meningkatkan fasilitas dan layanan untuk jemaat.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja Katolik di Desa Kalahien belum mendapatkan bantuan dana hibah.	Pemuka agama dan jemaat Gereja Katolik di Desa Kalahien.	Gereja Katolik di Desa Kalahien belum mendapatkan bantuan dana hibah sehingga kesulitan dalam mengembangkan fasilitas dan layanan bagi jemaat.	Dengan adanya bantuan dana hibah, Gereja Katolik dapat memperbaiki dan meningkatkan fasilitas dan layanan untuk jemaat.	(Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kondisi rumah ibadah agama Islam, Kristen, dan Hindu Kahariangan di Desa Danau Masura yang kurang baik dan perlu perbaikan.	Rumah ibadah agama Islam, Kristen, dan Hindu Kahariangan di Desa Danau Masura.	Rumah ibadah agama Islam, Kristen, dan Hindu Kahariangan di Desa Danau Masura memegang peranan penting sebagai tempat beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya.	Keberadaan rumah ibadah yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan dan menguatkan toleransi antar umat beragama di Desa Danau Masura.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Masalah biaya pendidikan siswa SD dan SLTP yang tidak mampu, sehingga memerlukan bantuan beasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan.	Siswa SD dan SLTP sebanyak 158 siswa yang tidak mampu secara finansial untuk membiayai pendidikan mereka.	Siswa SD dan SLTP sebanyak 158 siswa memerlukan bantuan beasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan	Pengurangan bea siswa SD dan SLTP di Desa Tanjung Jawa dapat meringankan beban biaya pendidikan orang tua siswa.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Banyak masyarakat yang belum memiliki akses listrik di rumah mereka karena biaya pemasangan listrik yang tinggi.	Masyarakat yang belum memiliki akses listrik	Akses listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern yang penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti penerangan, pengisian baterai perangkat elektronik, dan lain-lain.	Dengan adanya subsidi listrik, biaya pemasangan listrik dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.	(Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Murung Paken belum teraliri listrik PLN sehingga masyarakat kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan pengembangan ekonomi daerah terhambat.	Masyarakat Desa Murung Paken yang belum teraliri listrik PLN.	Listrik merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan pengembangan ekonomi daerah.	Dengan teralirinya listrik PLN ke Desa Murung Paken, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan pengembangan ekonomi daerah dapat terstimulasi.	(Desa Murung Paken., Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dusun Parigi di Desa Kalahien belum teraliri listrik sehingga menghambat aktivitas warga di malam hari, dan menghambat perkembangan ekonomi di daerah tersebut.	Masyarakat di Dusun Parigi Desa Kalahien.	Dusun Parigi adalah salah satu dusun yang ada di Desa Kalahien, namun hingga saat ini belum teraliri listrik.	Jika pemasangan jaringan listrik dilakukan, aktivitas warga di malam hari dapat ditingkatkan, dan akan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi di daerah tersebut.	(Dusun Parigi, Desa Kalahien, Kalahien, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tingginya angka pengangguran di Desa Teluk Mampun. Keterbatasan lapangan pekerjaan di Desa Teluk Mampun.	Masyarakat Desa Teluk Mampun yang mengalami pengangguran dan kesulitan mencari pekerjaan.	Usul terkait Perusahaan stockpile Batubara yang beroperasi/berada di Desa Tanjung Jawa, agar diberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Teluk Mampun.	Dengan adanya lapangan pekerjaan baru, tingkat pengangguran di Desa Teluk Mampun dapat menurun. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan, masyarakat Desa Teluk Mampun dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.	(Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : JARLIANSYAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Lanjutan Rehab Sekolah SD Desa Janggi	Siswa-siswa Sekolah Dasar (SD) di Desa Janggi yang pernah mengalami masalah dalam belajar, baik karena faktor lingkungan, psikologis, maupun keterampilan.	Program lanjutan rehabilitasi sekolah SD Desa Janggi merupakan program yang bertujuan untuk membantu siswa-siswa SD yang kesulitan dalam belajar.	Program lanjutan rehabilitasi sekolah SD Desa Janggi diharapkan dapat membantu siswa-siswa tersebut untuk dapat mengembangkan potensi mereka dengan baik dan meraih hasil belajar yang lebih baik di masa depan.	(sekolah SD Desa janggi, Janggi, Kec. Karau Kuala)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sekolah Dasar (SD) Desa Salat Baru.	Siswa dan siswi Sekolah Dasar (SD) di Desa Salat Baru Guru dan tenaga pendidik di SD Desa Salat Baru Orang tua/wali murid siswa dan siswi SD Desa Salat Baru	Orang tua/wali murid siswa dan siswi SD Desa Salat Baru berperan aktif dalam mendukung dan memantau proses belajar mengajar di sekolah.	Guru dan tenaga pendidik di SD Desa Salat Baru memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kurikulum.	(Sekolah Dasar (SD) Desa Salat Baru., Salat Baru, Kec. Karau Kuala)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehab Rumah Dinas Guru Desa Malitin	Guru-guru yang menempati rumah dinas di Desa Malitin. Kepala sekolah dan staf administrasi yang bekerja di sekolah yang sama.	Rumah dinas guru di Desa Malitin mungkin sudah cukup tua dan memerlukan perbaikan atau rehabilitasi.	Rehabilitasi rumah dinas guru di Desa Malitin akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan tinggal bagi para guru, serta meningkatkan produktivitas mereka dalam mengajar.	(Rumah Dinas Guru di Desa Malitin, Malitin, Kec. Karau Kuala)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru Puskesdes (Tempat Berobat,Rumah Bidan, Rumah Perawat)	Masyarakat Desa Salat Baru	Masyarakat desa membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, sehingga dengan adanya Puskesdes diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa.	Ketersediaan Puskesdes di setiap desa dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat desa.	(Puskesdes desa salat baru, Salat Baru, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Tenaga Medis Perawat/Bidan	Tenaga medis perawat dan bidan yang akan direkrut untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis pada sebuah lembaga kesehatan	Pengadaan tenaga medis perawat dan bidan bertujuan untuk memperkuat tenaga medis pada lembaga kesehatan atau rumah sakit sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Terdapat jumlah tenaga medis perawat dan bidan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan pada lembaga kesehatan	(Pustu / poskesdes Desa janggi, Janggi, Kec. Karau Kuala)	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Tenaga Medis/ Perawat Desa Malitin	Penduduk Desa Malitin yang membutuhkan layanan kesehatan: Kelompok ini mencakup seluruh penduduk Desa Malitin yang membutuhkan layanan kesehatan,	Kelompok ini memerlukan perawatan medis yang lebih intensif dan membutuhkan penanganan yang cepat.	Adanya peningkatan jumlah pasien yang membutuhkan layanan kesehatan: Dengan adanya penambahan tenaga medis/perawat di Desa Malitin, maka dapat diharapkan akan ada peningkatan jumlah pasien yang menggunakan layanan kesehatan di desa tersebut.	(Pustu desa malitin / poskesdes Desa malitin, Malitin, Kec. Karau Kuala)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (12 Usulan)								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Listrik Masuk Desa / PLN	Masyarakat Desa yang belum teraliri listrik PLN.	Listrik Masuk Desa adalah program dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membawa listrik ke desa-desa yang belum teraliri listrik PLN.	Infrastruktur listrik di desa masih terbatas sehingga dibutuhkan investasi yang signifikan untuk memperluas jaringan listrik.	(Desa malitin, Malitin, Kec. Karau Kuala)	
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Listrik Masuk Desa/ PLN	Penduduk di desa yang belum memiliki akses listrik dari PLN Sekolah dan fasilitas umum di desa yang membutuhkan listrik untuk beroperasi	Program listrik masuk desa atau PLN memasok listrik ke desa-desa yang belum memiliki akses listrik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan akses listrik yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup	Program listrik masuk desa juga dapat membantu mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya atau hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik desa.	(Desa janggi, Janggi, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyiringan dan Penimbunan Halaman Kantor Kelurahan Bangkuang.	Warga yang membutuhkan informasi atau layanan dari Kantor Kelurahan Bangkuang Pegawai Kantor Kelurahan Bangkuang Pengunjung atau tamu yang datang ke Kantor Kelurahan Bangkuang Masyarakat sekitar Kantor Kelurahan Bangkuang yang berpotensi memanfaatkan halaman kantor untuk kegiatan sosial dan budaya	Kantor Kelurahan Bangkuang adalah kantor pemerintahan yang bertanggung jawab atas wilayah Kelurahan Bangkuang	Penimbunan halaman kantor dilakukan dengan tujuan untuk memperluas atau memperindah bangunan kantor, atau untuk memudahkan akses kendaraan di sekitar kantor	(Halaman Kantor Kelurahan Bangkuang., Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Peningkatan Badan jalan P2D RT 01 s.d. RT 20 (jl Padang) Kelurahan Bangkuang.	Pengguna jalan yang melintasi wilayah tersebut seperti kendaraan bermotor, sepeda, dan pejalan kaki.	Peningkatan badan jalan P2D RT 01 s.d. RT 20 (jl Padang) Kelurahan Bangkuang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak dan tidak rata.	Peningkatan badan jalan dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas warga dan pengguna jalan yang melintasi wilayah tersebut.	(jalan P2D RT 01 s.d. RT 20 (jl Padang) Kelurahan Bangkuang., Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Penyiringan, Pembangunan dan Cor Beton jalan RT 16 s.d. RT 22 Kelurahan Bangkuang.	Warga/masyarakat yang tinggal di sekitar jalan RT 16 s.d. RT 22 Kelurahan Bangkuang dan pengguna jalan lainnya	Jalan tersebut telah mengalami kerusakan pada beberapa bagian akibat penggunaan yang intensif dan faktor cuaca.	Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan dan memberikan kemudahan akses bagi warga/masyarakat dan pengguna jalan lainnya.	(jalan RT 16 s.d. RT 22 Kelurahan Bangkuang., Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan siring timbun dan cor beton jalan menuju kantor KUA Kelurahan Bangkuang	Penduduk dan pengunjung yang menggunakan jalan menuju kantor KUA Kelurahan Bangkuang.	Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan bagi penduduk dan pengunjung yang menggunakan jalan tersebut.	Jalan menuju kantor KUA Kelurahan Bangkuang merupakan akses penting bagi masyarakat sekitar, karena kantor KUA adalah institusi yang memberikan layanan keagamaan yang diperlukan oleh masyarakat.	(Kantor KUA kelurahan bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Bundaran Simpang Tiga Kapolsek RT 22 Kelurahan Bangkuang.	Pengguna jalan yang melintasi simpang tiga tersebut, termasuk pengendara motor, mobil, dan angkutan umum.	Bundaran simpang tiga tersebut akan dibangun untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keamanan lalu lintas di sekitar wilayah tersebut.	Bundaran simpang tiga tersebut akan dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan marka jalan yang jelas.	(Bundaran Simpang Tiga Kapolsek RT 22 Kelurahan Bangkuang., Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Janggi Menuju Jalan PT MUTU	Masyarakat Desa Janggi dan pengguna jalan yang melintasi jalan penghubung tersebut.	Jalan penghubung Desa Janggi merupakan jalan utama yang menghubungkan Desa Janggi dengan jalan PT. MUTU	Peningkatan jalan penghubung Desa Janggi akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.	(Jalan Penghubung Desa Janggi Menuju jalan PT. MUTU, Janggi, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Malitin menuju jalan PT MUTU	Perusahaan PT MUTU yang memiliki akses jalan yang terhubung dengan jalan Desa Malitin. Penduduk Desa Malitin yang menggunakan jalan tersebut untuk kegiatan sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, berbelanja, dan lain sebagainya.	Jalan penghubung Desa Malitin merupakan jalan yang penting untuk menghubungkan Desa Malitin dengan jalan utama yang terhubung dengan kota atau wilayah lainnya. Jalan tersebut digunakan oleh banyak orang untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, berbelanja, dan lain sebagainya.	Peningkatan jalan penghubung Desa Malitin menuju jalan PT MUTU akan memberikan manfaat yang besar bagi penduduk Desa Malitin dan pengguna jalan lainnya. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.	(Jalan Desa malitin menuju PT.MUTU, Malitin, Kec. Karau Kuala)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Titian RT 01 Desa Janggi.	Peningkatan Jalan Titian di RT 01 Desa Janggi akan memberikan manfaat langsung kepada penduduk desa yang tinggal atau bekerja di sekitar jalan tersebut.	Jalan Titian merupakan jalan setapak yang digunakan oleh masyarakat desa untuk berjalan kaki atau mengendarai sepeda motor.	Adanya peningkatan jalan titian dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk sekitar, karena akses yang lebih mudah dan nyaman.	(RT. 01 Desa Janggi, Janggi, Kec. Karau Kuala)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyiringan dan Cor Beton Jl Kantor Pos s.d. Pasar Bangkuang RT 22	Kontraktor atau pekerja konstruksi yang bertanggung jawab untuk melakukan penyiraman dan cor beton di Jalan Kantor Pos s.d. Pasar Bangkuang RT 22.	Penyiraman dan cor beton merupakan bagian penting dalam proses pemeliharaan jalan, karena dapat memperpanjang umur jalan dan meningkatkan kualitasnya.	Kontraktor atau pekerja konstruksi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan penyiraman dan cor beton.	(Jalan Kantor Pos s.d. Pasar Bangkuang RT 22. kelurahan bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehab Dermaga Penyebrangan Desa Janggi	Pemerintah Desa Janggi Pihak pengelola transportasi penyeberangan di Dermaga Desa Janggi Masyarakat pengguna transportasi penyeberangan di Dermaga Desa Janggi	Dermaga penyebrangan Desa Janggi adalah salah satu sarana transportasi yang penting bagi masyarakat Desa Janggi dan sekitarnya.	Dengan adanya rehabilitasi dermaga penyebrangan Desa Janggi, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola transportasi dan pemerintah setempat.	(Dermaga penyebrangan desa janggi, Janggi, Kec. Karau Kuala)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Bantuan Alat Tangkap Ikan Untuk Masyarakat	Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan penangkapan ikan, terutama di wilayah pesisir dan perairan sungai.	Bantuan alat tangkap ikan yang dimaksudkan adalah berupa peralatan tangkap ikan yang ramah lingkungan, seperti jaring ikan, pancing, dan alat tangkap lainnya yang tidak merusak habitat ikan atau mengancam kelangsungan hidup spesies ikan.	Bantuan alat tangkap ikan ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah pesisir dan perairan sungai.	(Dusun Pinungku, Lehai, Kec. Dusun Hilir)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (2 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penambahan Bangunan Los Pasar Bangkuang.	Pemilik toko atau kios yang berada di dalam Los Pasar Bangkuang yang membutuhkan ruang tambahan untuk usaha mereka.	Tujuan penambahan bangunan di Pasar Bangkuang adalah untuk memenuhi kebutuhan ruang usaha yang semakin meningkat di kawasan tersebut.	Penambahan bangunan di Pasar Bangkuang akan menarik minat pedagang baru untuk bergabung dan membuka toko atau kios di pasar tersebut.	(Los Pasar Bangkuang., Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rehab Dermaga Bangkuang.	Masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas perekonomian yang terkait dengan kegiatan di dermaga Bangkuang.	Dermaga ini membutuhkan perbaikan dan rehabilitasi karena kondisi fisiknya yang sudah tua	Dengan adanya rehabilitasi dan perbaikan pada dermaga Bangkuang, aktivitas perekonomian di sekitar dermaga akan meningkat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.	(Dermaga kelurahan Bangkuang., Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (10 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Alat Pengeras Suara Majelis Taqlim Desa Janggi	Anggota Majelis Taqlim Desa Janggi Penduduk Desa Janggi yang ingin mengikuti kegiatan Majelis Taqlim	Alat Pengeras Suara (APS) digunakan untuk membantu memperjelas suara bacaan Al-Quran agar lebih mudah didengar oleh para peserta Majelis Taqlim.	Dengan adanya bantuan APS, diharapkan kegiatan belajar membaca Al-Quran di Desa Janggi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.	(Kelompok majelis Ta&lim desa janggi, Janggi, Kec. Karau Kuala)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Alat Pengeras Suara Mesjid Pinungku	Jamaah Mesjid Pinungku	Jamaah mesjid Pinungku merupakan kelompok sasaran utama dalam pemanfaatan alat pengeras suara mesjid. Dengan adanya alat pengeras suara, jamaah dapat mendengarkan khotbah dan ceramah dengan lebih jelas dan nyaman.	Dengan adanya alat pengeras suara, suara azan dan pengumuman mesjid dapat terdengar dengan lebih jelas dan menjangkau lebih banyak orang.	(Mesjid Dusun Pinungku kecamatan dusun hilir kabupaten barito selatan, Lehai, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Alat Tarbang Habsyi Dusun Pinungku	Masyarakat Dusun Pinungku	Bantuan alat tarbang Habsyi diberikan kepada masyarakat Dusun Pinungku sebagai bentuk dukungan untuk menjaga dan melestarikan tradisi keagamaan yang ada di masyarakat tersebut.	Bantuan alat tarbang Habsyi diberikan karena adanya asumsi bahwa masyarakat dan pengurus Habsyi di Dusun Pinungku kekurangan alat tarbang yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Habsyi dengan baik dan lancar.	(Kelompok Habsyi Dusun Pinungku kecamatan dusun hilir, Lehai, Kec. Dusun Hilir)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Dana Pengajian Muslimat th 2024	Kelompok Masyarakat Muslimat kelurahan bangkuang	Bantuan dapat diberikan kepada masyarakat Muslimat Kelurahan bangkuang yang aktif dalam kegiatan pengajian dan dakwah Islam di lingkungan sekitar.	kelompok-kelompok tersebut juga memiliki potensi yang besar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam ke masyarakat luas.	(Kelompok Pengajian Muslimat kelurahan bangkuang, Bangkuang, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Pengadaan Alat Rabbana Tarbang dan Habsyi Desa Janggi	Pimpinan-pimpinan majelis taklim, tokoh masyarakat, serta para guru agama yang ingin meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan di Desa Janggi melalui penggunaan alat Rabbana Tarbang dan Habsyi.	Habsyi adalah kegiatan bernyanyi dan mengumandangkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara bersama-sama di masjid atau musala. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecintaan umat muslim kepada Nabi Muhammad SAW serta mempererat tali persaudaraan antara sesama umat muslim.	Masyarakat Desa Janggi memiliki minat yang tinggi dalam kegiatan keagamaan seperti Rabbana Tarbang dan Habsyi.	(Kelompok Habsyi dan rabbana desa janggi, Janggi, Kec. Karau Kuala)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Rehap Mesjid AYATUL JANNAH Desa Malitin	Masyarakat Desa Malitin yang beragama Islam dan menggunakan Mesjid Ayatul Jannah sebagai tempat ibadah.	masyarakat Desa Malitin yang beragama Islam dan memiliki keterkaitan langsung dengan Mesjid Ayatul Jannah. Mereka merupakan pengguna mesjid dan menjadi sasaran utama dari program bantuan rehap mesjid.	Masyarakat Desa Malitin memiliki keinginan dan motivasi untuk mengembangkan Mesjid Ayatul Jannah sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.	(Mesjid Ayyatul Jannah Desa Malitin, Malitin, Kec. Karau Kuala)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Mesjid Desa Salat Baru	umat Muslim yang tinggal di Desa Salat Baru dan sekitarnya. Mesjid ini akan menjadi tempat ibadah bagi mereka dan juga menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti pengajian dan bimbingan agama.	Lokasi: Pembangunan mesjid ini akan dilakukan di Desa Salat Baru, Kecamatan karau kuala kabupaten barito selatan	Adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat dalam pembangunan mesjid ini.	(Mesjid Desa Salat Baru, Salat Baru, Kec. Karau Kuala)	
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pengadaan Baju Seragam Majelis Taqlim Desa Janggi	Anggota Majelis Taqlim Desa Janggi yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dari berbagai usia dan latar belakang sosial. Pengurus Majelis Taqlim Desa Janggi yang bertanggung jawab dalam pengadaan baju seragam.	Baju seragam akan digunakan saat kegiatan Majelis Taqlim seperti pengajian, tadarus, dan lain-lain.	Anggota Majelis Taqlim Desa Janggi memiliki keinginan untuk memiliki baju seragam yang seragam dan dapat memperkuat ikatan antar anggota.	(majelis ta&lim desa janggi, Janggi, Kec. Karau Kuala)	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehab Mushola Desa Malitin	Jamaah dan masyarakat Desa Malitin yang akan menggunakan fasilitas mushola setelah direhabilitasi.	Rehabilitasi mushola bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah dan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.	Jamaah dan masyarakat Desa Malitin akan merespons positif terhadap rehabilitasi mushola dan akan lebih aktif dalam menggunakan fasilitas tersebut.	(Mushola Desa Malitin, Malitin, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Siring Timbun Halaman Mesjid AYATUL JANNAH Desa Malitin.	Jamaah Mesjid AYATUL JANNAH di Desa Malitin dan masyarakat sekitar.	Siring Timbun Halaman Mesjid AYATUL JANNAH adalah sebuah proyek pembangunan siring atau saluran air di halaman mesjid tersebut. Proyek ini bertujuan untuk memudahkan aliran air hujan dan menghindari genangan air di halaman mesjid saat musim hujan.	Pembangunan siring di halaman mesjid akan memudahkan aliran air hujan dan menghindari genangan air di sekitar mesjid.	(mesjid ayatul jannah desa malitin, Malitin, Kec. Karau Kuala)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : Hj. ANI MAHRITA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Lapangan SD 3 Bantai Bambure belum memiliki lapisan paving, sehingga sulit digunakan terutama pada musim hujan.	Siswa, guru, dan masyarakat sekitar yang menggunakan lapangan.	Pembuatan lapisan paving diharapkan dapat meningkatkan kualitas lapangan sehingga lebih mudah digunakan dan lebih tahan lama.	Pembuatan paving lapangan dapat meningkatkan kesejahteraan siswa dan masyarakat sekitar.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rumah guru SD Desa Marawan Baru yang rusak.	Guru SD di Desa Marawan Baru.	Dibutuhkan rehab rumah guru SD Desa Marawan Baru agar dapat dihuni oleh guru dan membantu memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di sekolah.	Dengan adanya rumah guru yang layak, guru SD di Desa Marawan Baru dapat tinggal di tempat yang nyaman dan aman sehingga dapat fokus pada tugas mengajar.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rumah guru yang rusak dan tidak layak huni dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan kesejahteraan guru.	Guru dan siswa di Desa Gunung Rantau.	Rehabilitasi rumah guru untuk memperbaiki kondisi fisik dan memberikan kenyamanan bagi guru selama mengajar.	Dengan kondisi rumah guru yang lebih baik, guru dapat memberikan pengajaran yang lebih baik pula.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pagar sekolah SMPN Satap 6 Dusun Utara Reong yang ada saat ini mungkin tidak memadai atau rusak dan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan siswa dan staf sekolah.	Siswa, staf sekolah, dan masyarakat sekitar SMPN Satap 6 Dusun Utara Reong.	Pembangunan atau peningkatan pagar sekolah SMPN Satap 6 Dusun Utara Reong.	Adanya anggaran untuk membiayai proyek pembangunan pagar sekolah.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Desa Reong mungkin belum memiliki gedung TK-TPA yang memadai dan perlu dibangun untuk kegiatan pendidikan anak-anak usia dini di desa tersebut.	Anak-anak usia dini di Desa Reong dan orang tua mereka.	Pembangunan gedung TK-TPA di Desa Reong.	Adanya anggaran untuk membiayai proyek pembangunan gedung TK-TPA.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan bagi anak-anak usia dini di Desa Marawan Baru.	Anak-anak usia dini di Desa Marawan Baru beserta orang tua/wali.	Dibutuhkan pembangunan/peningkatan TK. Paud Kasih Bunda untuk memberikan pendidikan pada anak-anak usia dini di Desa Marawan Baru.	Dengan adanya TK. Paud Kasih Bunda, anak-anak usia dini di Desa Marawan Baru dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan mempersiapkan mereka untuk pendidikan yang lebih lanjut.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (16 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sungai Mantarem dan Sungai Lelek di Desa Marawan Lama perlu dibersihkan.	Masyarakat Desa Marawan Lama yang tinggal di sekitar Sungai Mantarem dan Sungai Lelek.	Pembersihan Sungai Mantarem dan Sungai Lelek bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai.	Dengan pembersihan sungai, masyarakat Desa Marawan Lama dapat menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir. Selain itu, lingkungan yang bersih dan sehat juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitar sungai.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan air bersih di Desa Bantai Bambure kurang memadai, sehingga memerlukan pembangunan sumur bor di 12 titik.	masyarakat Desa Bantai Bambure.	Pembangunan sumur bor di 12 titik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Desa Bantai Bambure.	Dengan adanya sumur bor yang memadai, masyarakat Desa Bantai Bambure dapat memenuhi kebutuhan air bersih mereka dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan hidup.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	WC umum di Desa Marawan Lama perlu dibangun atau ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	Masyarakat yang membutuhkan akses ke WC umum.	Desa Marawan Lama membutuhkan WC umum yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki WC di rumah mereka.	Dengan adanya WC umum yang memadai, masyarakat Desa Marawan Lama akan mendapatkan fasilitas sanitasi yang lebih baik.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Desa Tarusan dan Desa Panarukan tidak terhubung dengan jembatan penghubung, sehingga akses transportasi menjadi terhambat.	Warga Desa Tarusan dan Desa Panarukan, serta pengguna jalan umum yang melintasi kedua desa tersebut.	Perlu dibangun jembatan penghubung antara Desa Tarusan sampai Desa Panrukan.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat keterhubungan antara desa, serta meningkatkan perekonomian lokal.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	embangunan jalan di Desa Gunung Rantau belum selesai sehingga akses transportasi masih terbatas dan kurang memadai.	Masyarakat Desa Gunung Rantau dan pengunjung yang ingin mengakses desa tersebut.	Pembangunan jalan bertujuan untuk meningkatkan akses transportasi ke Desa Gunung Rantau sehingga masyarakat dan pengunjung dapat mengakses desa tersebut dengan lebih mudah dan cepat.	Dengan adanya pembangunan jalan yang selesai, akan tercipta konektivitas yang lebih baik dan aksesibilitas yang meningkat, sehingga ekonomi lokal dapat tumbuh dan berkembang.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan antara Desa Pendang dan Desa Reong mungkin rusak atau tidak layak dilalui dan perlu diperbaiki untuk memudahkan akses transportasi antara kedua desa.	Masyarakat Desa Pendang dan Desa Reong serta pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut.	Perbaikan jalan antara Desa Pendang dan Desa Reong.	Adanya anggaran untuk membiayai proyek perbaikan jalan.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Danau Lelek Kandris di Desa Marawan Lama kurang baik dan perlu dibangun atau ditingkatkan sepanjang 2km untuk meningkatkan aksesibilitas.	Masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.	Jalan Danau Lelek Kandris merupakan jalan utama yang digunakan oleh masyarakat Desa Marawan Lama untuk mengakses pusat kota, namun kondisinya kurang baik dan perlu dibangun atau ditingkatkan.	Pembangunan atau peningkatan jalan tersebut akan meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan mobilitas masyarakat di Desa Marawan Lama.	(Danau Lelek Kandris Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan di dalam Desa Marawan Lama perlu ditingkatkan atau dicor untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan.	Masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.	Jalan di dalam Desa Marawan Lama perlu ditingkatkan atau dicor untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan, terutama pada musim hujan ketika jalan berlumpur.	Dengan peningkatan atau pengerasan jalan di dalam Desa Marawan Lama, mobilitas masyarakat akan menjadi lebih mudah dan aman.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan di dalam Desa Tarusan menuju Mampaing RT.9 perlu ditingkatkan kualitasnya.	Warga Desa Tarusan yang tinggal di sekitar Jalan Mampaing RT.9 dan pengguna jalan umum yang melintasi jalan tersebut.	Perlu dilakukan peningkatan jalan di dalam Desa Tarusan menuju Mampaing RT.9 agar dapat dilalui dengan lebih mudah dan aman.	Terdapat anggaran yang cukup dan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan peningkatan jalan.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Marawan Baru menuju Mantarem yang rusak.	Masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi Marawan Baru menuju Mantarem.	Dibutuhkan perbaikan/pembangunan jalan Marawan Baru menuju Mantarem sejauh 5 km untuk memperbaiki aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi daerah tersebut.	Dengan adanya perbaikan jalan, masyarakat dan pengguna jalan dapat melakukan aktivitas dengan lebih mudah dan cepat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memudahkan distribusi barang dan jasa.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan penghubung belum memiliki lapisan aspal sehingga mudah rusak dan sulit dilalui terutama pada musim hujan.	Masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, termasuk pengguna jalan umum dan kendaraan barang.	Pengerasan aspal diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan dan kemudahan dalam transportasi.	Pengerasan aspal dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Reong menuju Mampaing sejauh 6km mungkin rusak atau tidak layak dilalui dan perlu diperbaiki atau dibangun untuk memudahkan akses transportasi.	Masyarakat Desa Reong dan Mampaing serta pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut.	Pembangunan atau perbaikan jalan Reong menuju Mampaing sejauh 6km.	Adanya anggaran untuk membiayai proyek pembangunan atau perbaikan jalan.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Reong menuju Marawan Baru mungkin rusak atau tidak layak dilalui dan perlu ditingkatkan untuk memudahkan akses transportasi antara keduanya.	Masyarakat Desa Reong dan Marawan Baru serta pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut.	Pembangunan atau peningkatan jalan Reong menuju Marawan Baru.	Adanya anggaran untuk membiayai proyek pembangunan atau peningkatan jalan.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan RT.5 di Desa Gunung Rantau memerlukan rekonstruksi karena kondisi jalan yang rusak dan berlubang.	Masyarakat di sekitar jalan RT.5 yang menggunakannya untuk beraktivitas.	Rekonstruksi jalan bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan RT.5 yang rusak sehingga masyarakat di sekitar jalan tersebut dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.	Dengan adanya rekonstruksi jalan RT.5, masyarakat di sekitar jalan tersebut akan merasa lebih aman dan nyaman saat beraktivitas sehingga produktivitas dan kesejahteraan mereka akan meningkat.	(RT.5, Desa Gunung Rantau, Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang menghubungkan RT.06 ke jalan kabupaten km20 - rampamea tidak memiliki jembatan sehingga sulit dilalui terutama pada musim hujan.	Masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, termasuk pengguna jalan umum dan kendaraan barang.	Pembangunan jembatan diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dalam transportasi dan memperbaiki aksesibilitas masyarakat.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jembatan yang rusak atau tidak memadai untuk digunakan oleh masyarakat Desa Gunung Rantau.	Masyarakat Desa Gunung Rantau, khususnya yang sering melewati jembatan Sungsang dalam kegiatan sehari-hari.	Jembatan Sungsang berfungsi sebagai penghubung antara wilayah-wilayah di Desa Gunung Rantau, sehingga perlu dibangun atau diperbaiki agar dapat digunakan dengan baik dan aman oleh masyarakat.	Masyarakat Desa Gunung Rantau sangat membutuhkan jembatan yang dapat digunakan dengan baik dan aman, sehingga pembangunan/peningkatan Jembatan Sungsang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa Reong mungkin belum memiliki balai desa yang memadai dan perlu dibangun untuk berbagai kegiatan desa.	Masyarakat Desa Reong.	Pembangunan balai desa di Desa Reong.	Adanya anggaran untuk membiayai proyek pembangunan balai desa.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor BPD Desa Bantai Bambure mengalami kerusakan atau kurang layak pakai sehingga memerlukan rehabilitasi atau pembangunan baru.	BPD Desa Bantai Bambure.	Kantor BPD Desa Bantai Bambure mengalami kerusakan atau kurang layak pakai sehingga perlu direhabilitasi atau dibangun kembali agar bisa berfungsi dengan baik.	Dengan adanya kantor BPD yang baik, maka pelayanan administrasi dan keuangan di Desa Bantai Bambure akan lebih efektif dan efisien.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor BPD Desa Marawan Baru yang kurang layak.	Masyarakat di Desa Marawan Baru yang memerlukan jasa keuangan.	Dibutuhkan pembangunan/perbaikan kantor BPD Desa Marawan Baru agar dapat memberikan layanan keuangan yang lebih baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.	Dengan adanya kantor BPD yang layak, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih aman dan nyaman, sehingga memperkuat perekonomian di Desa Marawan Baru.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Kepala desa dan staf kantor desa yang menggunakan bangunan tersebut, serta warga desa yang memerlukan pelayanan dari kantor desa	Perlu dilakukan rehab berat bangunan kantor kepala desa agar dapat digunakan kembali dengan aman dan nyaman.	Rehabilitasi kantor desa dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Halaman Balai Basarah di Desa Marawan Lama perlu dicor untuk meningkatkan aksesibilitas dan fungsi balai.	Masyarakat yang menggunakan Balai Basarah.	Halaman Balai Basarah di Desa Marawan Lama perlu dicor untuk meningkatkan aksesibilitas dan fungsi balai, terutama pada saat acara atau pertemuan masyarakat di balai tersebut.	Dengan adanya perbaikan pada halaman Balai Basarah, fungsi dan aksesibilitas balai akan meningkat, sehingga dapat lebih mudah digunakan untuk kegiatan masyarakat.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (7 Usulan)								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dengan adanya kantor BPD yang baik, maka pelayanan administrasi dan keuangan di Desa Bantai Bambure akan lebih efektif dan efisien.	Masyarakat peternak babi di Desa Bantai Bambure.	Bantuan hewan ternak babi diberikan untuk membantu masyarakat peternak babi di Desa Bantai Bambure dalam meningkatkan produktivitas ternak mereka.	Dengan adanya bantuan hewan ternak babi, maka masyarakat peternak babi di Desa Bantai Bambure akan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kelompok tani di Desa Marawan Baru kesulitan memperoleh pupuk untuk pertanian mereka.	Kelompok tani di Desa Marawan Baru.	Dibutuhkan pengadaan pupuk untuk kelompok tani di Desa Marawan Baru agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka.	Dengan adanya pupuk yang cukup, kelompok tani dapat meningkatkan produksi pertanian mereka, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Masyarakat peternak sapi di Desa Bantai Bambure membutuhkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas ternak mereka.	Masyarakat peternak sapi di Desa Bantai Bambure.	Bantuan hewan ternak sapi diberikan untuk membantu masyarakat peternak sapi di Desa Bantai Bambure dalam meningkatkan produktivitas ternak mereka.	Dengan adanya bantuan hewan ternak sapi, maka masyarakat peternak sapi di Desa Bantai Bambure akan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terbatasnya lahan pertanian di Desa Bantai Bambure dan kurangnya variasi tanaman yang ditanam, sehingga perlu dibuka kebun sawit.	Petani dan masyarakat Desa Bantai Bambure.	Pembukaan kebun sawit bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Desa Bantai Bambure dan memberikan alternatif tanaman yang lebih menguntungkan bagi petani.	Dengan adanya kebun sawit, petani di Desa Bantai Bambure dapat memanfaatkan lahan yang ada secara maksimal dan meningkatkan pendapatan mereka, serta meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Namun, perlu memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari kebun sawit agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan usaha tani di Desa Bantai Bambure kurang baik sehingga mempersulit aktivitas petani, sehingga perlu dibuatkan jalan usaha tani.	Petani dan masyarakat Desa Bantai Bambure.	Pembuatan jalan usaha tani bertujuan untuk memudahkan aktivitas petani di Desa Bantai Bambure dan meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut.	Dengan adanya jalan usaha tani yang baik, petani di Desa Bantai Bambure dapat lebih mudah mengakses lahan pertanian dan mempermudah aktivitas pertanian sehingga meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan hidup mereka.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi Titian jalan usaha Tani Desa Marawan Baru Sepanjang 150m	Desa Marawan Baru	Rehabilitasi titian sepanjang 150 meter dilakukan di Desa Marawan Baru untuk kelompok tani.	titian jalan usaha tani tidak layak digunakan sehingga perlu direhabilitasi.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Petani di Desa Bantai Bambure kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian, sehingga perlu diselenggarakan penyuluhan pertanian.	Petani di Desa Bantai Bambure.	Penyuluhan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani di Desa Bantai Bambure dalam bidang pertanian.	Dengan adanya penyuluhan pertanian yang baik, petani di Desa Bantai Bambure dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan hidup mereka.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
3.30.2.17.3.31.01.0000 - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar tradisional di Desa Bantai Bambure kurang memadai dan tidak mampu bersaing dengan pasar modern, sehingga perlu dibangun los pasar modern.	Pedagang dan pembeli di pasar Desa Bantai Bambure.	Pembangunan los pasar modern bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pasar di Desa Bantai Bambure.	Dengan adanya los pasar modern yang lebih baik, pedagang dapat menawarkan produk yang lebih berkualitas dan menarik, sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbelanja	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (9 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Balai Basarah Hindu di Desa Gunung Rantau perlu dibangun atau ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat Hindu di desa tersebut.	Masyarakat Hindu di Desa Gunung Rantau yang menggunakan Balai Basarah untuk beribadah dan kegiatan sosial lainnya.	Pembangunan atau peningkatan Balai Basarah bertujuan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat Hindu di Desa Gunung Rantau untuk beribadah dan kegiatan sosial lainnya.	Dengan adanya pembangunan atau peningkatan Balai Basarah, masyarakat Hindu di Desa Gunung Rantau akan merasa lebih terpenuhi kebutuhan ibadah dan kegiatan sosial mereka sehingga kesejahteraan mereka akan meningkat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Desa Reong mungkin belum memiliki rumah ibadah yang memadai dan perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat di desa tersebut.	Masyarakat Desa Reong yang beragama dan membutuhkan tempat ibadah.	Pembangunan rumah ibadah di Desa Reong.	Adanya anggaran untuk membiayai proyek pembangunan rumah ibadah.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja Katolik di Desa Bantai Bambure membutuhkan bantuan untuk perbaikan atau pembangunan gedung gereja.	Gereja Katolik di Desa Bantai Bambure.	Bantuan diberikan untuk membantu gereja Katolik di Desa Bantai Bambure dalam perbaikan atau pembangunan gedung gereja mereka.	Dengan adanya perbaikan atau pembangunan gedung gereja, maka gereja Katolik di Desa Bantai Bambure dapat memberikan pelayanan keagamaan yang lebih baik bagi umat Katolik di wilayah tersebut. Selain itu, gedung gereja yang layak dan aman juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap gereja dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sana.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja Protestan di Desa Marawan Lama memerlukan perbaikan.	Desa Marawan Lama	Rehab Gereja Protestan bertujuan untuk memperbaiki fasilitas ibadah yang rusak dan memberikan kenyamanan serta keamanan dalam beribadah bagi jemaat dan masyarakat Desa Marawan Lama.	Dengan adanya rehab gereja, jemaat dan masyarakat Desa Marawan Lama dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman. Selain itu, fasilitas gereja yang baik dapat menarik lebih banyak jemaat dan pengunjung.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	minimnya ruang publik untuk kegiatan masyarakat di Desa Bantai Bambure, sehingga perlu dibangun gedung serba guna/pertemuan yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya.	masyarakat umum dan berbagai kelompok kegiatan	Pembangunan Gedung Serba Guna/Pertemuan Desa Bantai Bambure: Permasalahan yang dihadapi adalah minimnya ruang publik untuk kegiatan masyarakat di Desa Bantai Bambure	dengan adanya gedung serba guna, kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik dan terorganisir.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pemuda di Desa Bantai Bambure membutuhkan alat tarbang maulid habsy untuk melakukan kegiatan keagamaan.	Pemuda di Desa Bantai Bambure.	Bantuan alat tarbang maulid habsy diberikan untuk membantu pemuda di Desa Bantai Bambure dalam melaksanakan kegiatan keagamaan mereka.	Dengan adanya bantuan alat tarbang maulid habsy, maka pemuda di Desa Bantai Bambure dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan lebih baik dan meningkatkan kesadaran keagamaan di masyarakat.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dari Desa Panarukan ke Desa Tarusan belum terhubung dengan jaringan listrik PLN/PLTU, sehingga belum dapat menikmati fasilitas listrik yang memadai.	Warga Desa Tarusan.	Perlu dilakukan pemasangan jaringan listrik PLN/PLTU dari arah Desa Panarukan ke Desa Tarusan.	Terdapat sumber listrik PLN/PLTU yang memadai untuk menyediakan listrik di kedua desa tersebut.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
8	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Reong mungkin belum memiliki akses listrik PLN dan perlu dibangun PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di desa tersebut.	Masyarakat Desa Reong.	Pembangunan PLN di Desa Reong.	Adanya anggaran untuk membiayai proyek pembangunan PLN.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jaringan listrik di Desa Bantai Bambure belum merata dan beberapa wilayah masih kekurangan tiang listrik.	Masyarakat yang tinggal di wilayah yang kekurangan tiang listrik.	Pembangunan tiang listrik diharapkan dapat memperbaiki jaringan listrik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Penambahan tiang listrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : RINTO RAHMAN, S.Pd

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Halaman SDN Tabatan belum dirapikan dan diperbaiki sehingga berpotensi mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa-siswi.	Siswa-siswi dan tenaga pengajar SDN Tabatan.	Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan lingkungan belajar mengajar di SDN Tabatan dengan merapikan dan memperbaiki halaman sekolah.	Dengan diperbaikinya halaman sekolah, diharapkan aktivitas belajar mengajar di SDN Tabatan dapat berjalan dengan lebih baik.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meubelair di SD Dusun Bakota sudah tua dan rusak sehingga tidak lagi nyaman digunakan oleh guru dan murid dalam proses pembelajaran.	SD Dusun Bakota sebagai pengguna meubelair dalam kegiatan belajar mengajar.	Pengadaan meubelair yang baik dan nyaman akan memudahkan proses belajar mengajar di SD Dusun Bakota.	Penyediaan fasilitas yang baik dan nyaman dapat menjadi daya tarik bagi calon murid dan guru baru untuk bergabung dengan SD Dusun Bakota.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Ruang kelas SD Dusun Bakota mengalami kerusakan dan memerlukan rehabilitasi agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar.	Murid-murid SD Dusun Bakota sebagai pengguna langsung ruang kelas dan meubelair yang direhabilitasi atau diganti.	Ruang kelas SD Dusun Bakota perlu direhabilitasi agar kondisi ruang belajar menjadi aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran.	Dengan dilaksanakannya rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair, diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan di SD Dusun Bakota.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Belum adanya TK. Paud di Desa Sungai Jaya membuat akses pendidikan anak usia dini terhambat.	Anak-anak usia dini di Desa Sungai Jaya dan orang tua mereka yang ingin memberikan pendidikan awal terbaik untuk anak-anak mereka.	Pembangunan TK. Paud di Desa Sungai Jaya dapat membantu meningkatkan taraf pendidikan anak-anak usia dini dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka dalam memulai pendidikan.	Dengan adanya TK. Paud, anak-anak usia dini di Desa Sungai Jaya akan memiliki dasar yang kuat untuk belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.	(Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Desa Tabatan belum memiliki akses yang mudah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga menyulitkan dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan.	Masyarakat Desa Tabatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan.	Usulan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat Desa Tabatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dengan membangun Puskesmas Pembantu di Desa Tabatan.	Dengan dibangunnya Puskesmas Pembantu di Desa Tabatan, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus berjalan jauh ke desa-desa lain.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (12 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Tampulang terletak di dekat Sungai Barito yang rawan terkena abrasi, terutama saat musim hujan dan banjir. Abrasi yang terjadi mengancam keberadaan rumah warga dan infrastruktur di sekitar sungai.	Warga Desa Tampulang dan infrastruktur yang terletak di sekitar Sungai Barito.	Siring cor beton merupakan struktur yang kuat dan tahan lama, sehingga dapat menahan tekanan air dan abrasi yang terjadi di sekitar sungai. Selain itu, siring dapat berfungsi sebagai pembatas antara sungai dan permukiman warga, sehingga mengurangi risiko banjir dan kerusakan akibat abrasi.	Dengan dibangunnya siring cor beton, risiko kerusakan akibat abrasi dan banjir di sekitar Sungai Barito dapat dikurangi. Warga Desa Tampulang dan infrastruktur di sekitar sungai akan merasa lebih aman dan nyaman tinggal di sana. Selain itu, infrastruktur yang terdapat di sekitar sungai akan lebih terjaga dan tahan lama.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sungai Jaya belum memiliki pengadaan air bersih atau sumur bor.	Penduduk desa Sungai Jaya yang kesulitan mendapatkan akses ke air bersih.	Pengadaan air bersih atau sumur bor sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk desa Sungai Jaya.	Diperlukan alokasi dana yang cukup untuk melakukan pengadaan air bersih atau sumur bor agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk desa.	(Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Banjir yang sering terjadi di Desa Tabatan yang dapat merusak bangunan Gedung Serbaguna. Kondisi ini memerlukan tindakan preventif seperti penyiringan gedung serbaguna.	Warga masyarakat yang menggunakan Gedung Serbaguna dan fasilitas umum di sekitarnya.	Gedung Serbaguna digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, budaya, dan olahraga masyarakat Desa Tabatan.	Dengan adanya penyiringan Gedung Serbaguna, diharapkan dapat menahan banjir dan melindungi bangunan tersebut dari kerusakan akibat genangan air.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Rantau Bahuang kurang memadai dan perlu dibeton.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pembangunan siring cor beton akan meningkatkan daya tahan jalan dan mengurangi kerusakan.	Adanya jalan yang berkualitas dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi dan mobilitas masyarakat.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan di Desa Mahajandau masih belum memadai, terutama saat musim hujan.	Pengguna jalan di Desa Mahajandau, terutama pengguna kendaraan bermotor dan pedagang.	Pembangunan jalan titian cor beton dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di Desa Mahajandau.	Pembangunan jalan titian cor beton dapat memperbaiki kondisi jalan dan memfasilitasi aktivitas penduduk, sehingga membawa dampak positif dalam pengembangan desa.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan di RT 09 dan RT 10 Dusun Bakota mungkin perlu ditingkatkan kualitasnya.	Penduduk Dusun Bakota yang menggunakan jalan tersebut.	Penduduk Dusun Bakota yang menggunakan jalan tersebut.	Diperlukan alokasi dana yang cukup untuk meningkatkan kualitas jalan agar dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat.	(Jalan di RT 09 dan RT 10 Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan tembus Desa Rantau Bahuang ke perbatasan Kecamatan Paminggir HSU Kalsel belum memadai dan perlu diperbaiki.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pengecoran jalan tembus akan meningkatkan kapasitas jalan dan memudahkan akses ke daerah tersebut.	Adanya jalan tembus yang memadai dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan umum Sungai Hamsi di Desa Rantau Bahuang belum memadai dan perlu direnovasi.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pembangunan jembatan cor beton akan meningkatkan kapasitas jembatan dan mengurangi risiko kecelakaan.	Pembangunan jembatan yang memadai dapat meningkatkan konektivitas dan keamanan transportasi.	(Sungai Hamsi, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang tidak baik dan sulit dilalui, terutama pada musim hujan.	Masyarakat Desa Rantau Bahuang, terutama yang memerlukan akses transportasi untuk beraktivitas sehari-hari atau untuk mengangkut hasil pertanian.	Usulan pembangunan jalan desa bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara Desa Rantau Bahuang dengan Kecamatan Jenamas.	Dengan pembangunan jalan desa yang baik, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai fasilitas umum.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya akses transportasi air yang memadai dan aman di Desa Tabatan karena belum ada pelabuhan dan jembatan yang memadai.	Warga Desa Tabatan dan masyarakat sekitar yang menggunakan transportasi air untuk beraktivitas.	Pelabuhan dan jembatan tersebut diusulkan untuk memudahkan akses transportasi air bagi masyarakat desa dan sekitarnya.	Dengan adanya pelabuhan dan jembatan yang memadai, akses transportasi air akan menjadi lebih aman dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan mobilitas masyarakat.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lantai jembatan gantung Sungai Lunuk sudah rusak dan tidak aman bagi pengguna.	Pengguna jembatan gantung Sungai Lunuk, terutama warga desa sekitar yang sering melintasinya.	Penggantian lantai jembatan dengan lantai kayu ulin dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jembatan.	Penggantian lantai jembatan dengan lantai kayu ulin dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan memfasilitasi mobilitas penduduk.	(Sungai Lunuk, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tidak ada jembatan yang memadai untuk menghubungkan Desa Rantau Bahuang dan Kecamatan Jenamas melalui Sungai Murung Kerangka.	Masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah.	Pembangunan jembatan beton penghubung akan meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses ke daerah tersebut.	Adanya jembatan yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi dan pertumbuhan ekonomi.	(Sungai Murung Kerangka, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (3 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dengan adanya penyiringan Gedung Serbaguna, diharapkan dapat menahan banjir dan melindungi bangunan tersebut dari kerusakan akibat genangan air.	Warga masyarakat di sekitar jalan Usaha Tani Rt. 04 dan petani yang menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut hasil pertanian.	Jalan Usaha Tani Rt. 04 merupakan akses utama bagi petani di Desa Tabatan untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar atau ke pemrosesan.	engan dilanjutkan pembangunan jalan Usaha Tani Rt. 04, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah mobilitas petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal	(RT.04 Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Sulitnya akses transportasi dan mobilitas penduduk dari Desa Dadahup ke Desa Bakota dan Sungai Jaya.	Warga masyarakat Desa Dadahup, Desa Bakota, dan Sungai Jaya yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik.	Pembangunan jalan dan jembatan penyeberangan akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga masyarakat Desa Dadahup, Desa Bakota, dan Sungai Jaya. Selain itu, pembangunan jalan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Dengan adanya jalan dan jembatan penyeberangan, aksesibilitas dan mobilitas warga masyarakat Desa Dadahup, Desa Bakota, dan Sungai Jaya akan meningkat, dan pembangunan infrastruktur tersebut dapat membuka	(Dadahup ke Dusun Bakota dan Sungai Jaya., Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Warga desa yang memiliki lahan pertanian kesulitan dalam mengangkut hasil panen mereka karena tidak adanya jembatan yang memadai.	Warga desa yang memiliki lahan pertanian dan membutuhkan akses jembatan yang memadai.	Pembangunan jembatan di Sungai Bangkal dapat memfasilitasi transportasi hasil panen warga desa dan meningkatkan kualitas hidup mereka.	Pembangunan jembatan dapat memperbaiki infrastruktur desa dan memfasilitasi aktivitas ekonomi warga, sehingga membawa dampak positif dalam pengembangan desa.	(Sungai Bangkal, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Tidak adanya pelabuhan di Dusun Bakota menghambat aktivitas perekonomian masyarakat yang berbasis perikanan	Masyarakat Dusun Bakota yang berprofesi sebagai nelayan dan pengusaha perikanan serta masyarakat yang membutuhkan akses transportasi air.	Dusun Bakota memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar namun tidak dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan infrastruktur pelabuhan.	Dengan dibangunnya pelabuhan di Dusun Bakota, akan memudahkan transportasi air bagi masyarakat dan pengusaha perikanan, serta meningkatkan potensi ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya perikanan yang lebih optimal.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Tidak ada pelabuhan yang memadai di Desa Rantau Bahuang.	Pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah	Pembangunan pelabuhan akan meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses ke daerah tersebut.	Pembangunan pelabuhan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (9 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Keterbatasan lahan untuk kuburan Muslimin di Mesjid Jami Nurusalihin di Rt. 03 Desa Rantau Bahuang.	Muslimin di Desa Rantau Bahuang.	Usulan pembuatan dan penimbunan alkah Kuburan Muslimin di Mesjid Jami Nurusalihin di Rt. 03 Desa Rantau Bahuang.	Tidak tersedianya lahan yang cukup untuk pemakaman Muslimin di Mesjid Jami Nurusalihin dapat mengganggu aktivitas pemakaman secara umum di desa tersebut.	(Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kompleks pemakaman di Desa Mahajandau sering tergenang air saat musim hujan, sehingga mengganggu upacara pemakaman dan merusak lingkungan pemakaman.	Warga desa yang memiliki anggota keluarga yang meninggal dan perlu melakukan upacara pemakaman di kompleks pemakaman tersebut.	Lanjutan penimbunan Alkah Desa Mahajandau dapat meningkatkan efisiensi upacara pemakaman dan menjaga lingkungan pemakaman agar tetap bersih dan terawat.	Dengan peningkatan infrastruktur kompleks pemakaman, warga desa dapat melaksanakan upacara pemakaman dengan lebih nyaman dan aman, serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pemakaman.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kompleks pemakaman di Desa Tampulang sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan pemakaman warga setempat.	Warga Desa Tampulang yang memiliki anggota keluarga yang meninggal dan perlu melakukan upacara pemakaman di kompleks pemakaman tersebut.	Dengan pembangunan atau perluasan kompleks pemakaman, warga Desa Tampulang dapat memiliki tempat yang layak untuk upacara pemakaman anggota keluarga mereka.	Dengan peningkatan infrastruktur kompleks pemakaman, warga Desa Tampulang dapat melaksanakan upacara pemakaman dengan lebih nyaman dan aman, serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pemakaman.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mesjid Nurul Huda di Desa Mahajandau sudah tua dan perlu direhabilitasi agar tetap dapat digunakan oleh warga desa.	Warga desa yang menggunakan Mesjid Nurul Huda untuk beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya.	Rehabilitasi Mesjid Nurul Huda dapat memperbaiki kondisi bangunan mesjid dan meningkatkan kenyamanan warga desa dalam beribadah.	Dengan rehabilitasi mesjid, warga desa dapat terus melaksanakan kegiatan keagamaan mereka dengan nyaman dan aman, serta memperkuat identitas dan kebersamaan dalam masyarakat.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Permasalahan yang dihadapi adalah adanya risiko banjir yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Kondisi sungai yang berada di pinggir pemakaman memperparah risiko banjir karena air yang meluap dapat merusak kawasan pemakaman dan juga menimbulkan gangguan bagi masyarakat.	sasaran dari usulan ini adalah masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya mereka yang berada di sekitar pemakaman Desa Sungai Jaya. Pembangunan siring Alkah diharapkan dapat melindungi kawasan pemakaman dan masyarakat dari risiko banjir.	embangunan siring Alkah di Desa Sungai Jaya diharapkan dapat mengalirkan air secara efektif dan mencegah banjir di daerah rawan banjir. Selain itu, pembangunan ini juga diharapkan dapat melindungi kawasan pemakaman dan lingkungan sekitar.	Dengan adanya pembangunan siring pekuburan, masyarakat akan memiliki tempat pemakaman yang aman dari banjir untuk anggota keluarga mereka.	(Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tidak adanya gudang untuk mesjid di Dusun Bakota menyulitkan pengelolaan barang-barang yang digunakan dalam kegiatan keagamaan	Pengurus mesjid dan jamaah mesjid di Dusun Bakota.	Mesjid di Dusun Bakota tidak memiliki gudang yang memadai untuk menyimpan barang-barang seperti sajadah, Al-Quran, dan perlengkapan keagamaan lainnya.	Dengan dibangunnya gudang untuk mesjid di Dusun Bakota, pengelolaan barang-barang keagamaan menjadi lebih mudah dan teratur, sehingga kegiatan keagamaan di mesjid dapat berjalan lebih baik dan lancar.	(dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
7	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Mahajandau belum memiliki jaringan listrik, sehingga mengakibatkan penduduk desa kesulitan dalam mendapatkan sumber energi listrik.	Penduduk desa Mahajandau yang belum memiliki akses ke listrik.	Pembangunan jaringan listrik dapat memberikan akses ke sumber energi listrik yang sangat dibutuhkan oleh penduduk desa, serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.	Diperlukan alokasi dana yang cukup untuk membangun jaringan listrik dan memastikan pemeliharaannya agar dapat berfungsi secara optimal.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
8	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Tabatan belum tersambung dengan jaringan listrik PLN sehingga menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama pada malam hari.	Masyarakat Desa Tabatan yang belum memiliki akses listrik PLN.	Usulan ini bertujuan untuk memberikan akses listrik PLN bagi masyarakat Desa Tabatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.	Dengan tersedianya akses listrik PLN di Desa Tabatan, diharapkan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Tampulang masih belum memiliki akses listrik yang memadai sehingga warga masih bergantung pada sumber penerangan yang tidak ramah lingkungan dan kurang efisien.	Warga Desa Tampulang yang saat ini masih belum memiliki akses listrik yang memadai.	Dengan segera membangun jaringan listrik PLN, warga Desa Tampulang dapat menikmati penerangan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas di desa tersebut.	Dengan adanya akses listrik yang memadai, warga Desa Tampulang dapat memanfaatkan alat elektronik dan teknologi yang membutuhkan akses listrik, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas di desa tersebut.	(Tampulang, Kec. Jenamas)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : AKHMAD JUMADI, SM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Usulan rehab total Puskes Dusun Bakota.	Masyarakat Dusun Bakota yang membutuhkan layanan kesehatan, termasuk anak-anak, dewasa, dan lansia.	Puskesdes Dusun Bakota merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Namun, kondisi bangunan dan fasilitas kesehatan yang buruk dapat mengganggu layanan kesehatan yang diberikan dan bahkan membahayakan keselamatan pasien dan petugas medis.	Rehabilitasi total Puskesdes Dusun Bakota akan meningkatkan kondisi bangunan dan fasilitas kesehatan, sehingga layanan kesehatan yang diberikan dapat berjalan lebih lancar dan memadai.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	usulan pembangunan POSYANDU Desa Tampulang.	Ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak di Desa Tampulang yang membutuhkan perhatian kesehatan yang lebih.	POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) adalah sebuah unit pelayanan kesehatan yang menyediakan berbagai jenis layanan kesehatan ibu dan anak, seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, pendidikan kesehatan, dan lain-lain. Saat ini, Desa Tampulang belum memiliki POSYANDU, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak.	Dengan adanya POSYANDU di Desa Tampulang, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian, masyarakat akan lebih aktif untuk datang ke POSYANDU untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan informasi tentang kesehatan ibu dan anak. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencegah terjadinya masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan POSYANDU dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Tampulang.	(Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (13 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Bakota tidak memiliki akses yang memadai ke sumber air bersih. Usulan Pembuatan sumur bor (air bersih) di Dusun Bakota. Sumber air yang ada di sekitar dusun cenderung tidak sehat dan tidak dapat diandalkan, karena tercemar oleh limbah industri dan limbah rumah tangga. Kurangnya akses ke air bersih dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernapasan.	Masyarakat Dusun Bakota, terutama mereka yang tinggal di daerah yang jauh dari sumber air bersih atau yang memiliki masalah kesehatan akibat akses yang terbatas ke air bersih.	Pembuatan sumur bor akan memberikan akses yang lebih baik ke air bersih untuk masyarakat Dusun Bakota. Sumur bor adalah jenis sumur yang ditembakkan menggunakan mesin bor, sehingga dapat mencapai air di kedalaman yang lebih dalam dan menghasilkan air bersih yang lebih sehat dan lebih andal. Proses pembuatan sumur bor harus dilakukan oleh tenaga ahli yang terampil dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kualitas air yang dihasilkan.	Pembuatan sumur bor akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Dusun Bakota dalam hal kesehatan dan kesejahteraan. Namun, pembuatan sumur bor juga memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga perlu diadakan kerja sama dan penggalangan dana dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, perawatan dan pemeliharaan sumur bor juga harus dijaga dengan baik agar tetap dapat memberikan akses yang andal ke air bersih bagi masyarakat Dusun Bakota.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembuatan siring di Gedung Serbaguna Desa Tabatan memerlukan beberapa pertimbangan dan permasalahan yang harus diatasi sebelum dilaksanakan. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul antara lain: Biaya pembangunan yang cukup besar. Masalah pembebasan lahan dan persetujuan dari masyarakat sekitar. Risiko banjir dan pengaruh lingkungan sekitar. Pemeliharaan dan perawatan yang membutuhkan biaya dan tenaga.	Kelompok sasaran dari pembuatan siring di Gedung Serbaguna Desa Tabatan adalah masyarakat Desa Tabatan dan pengunjung yang akan menggunakan gedung serbaguna tersebut.	Gedung Serbaguna Desa Tabatan adalah salah satu fasilitas publik yang berada di Desa Tabatan, yang digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti pertemuan, rapat, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Namun, gedung serbaguna ini masih belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, termasuk siring untuk memperlancar pengelolaan air di sekitar gedung serbaguna.	Pembangunan siring di Gedung Serbaguna Desa Tabatan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Tabatan dan pengunjung, karena akan mempermudah pengelolaan air di sekitar gedung serbaguna dan meminimalisir risiko banjir. Namun, perlu dilakukan sosialisasi dan pengumpulan dukungan dari masyarakat sekitar agar pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memperoleh persetujuan dari semua pihak terkait.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembuatan siring di Gedung Serbaguna Desa Tabatan memerlukan beberapa pertimbangan dan permasalahan yang harus diatasi sebelum dilaksanakan. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul antara lain: Biaya pembangunan yang cukup besar. Masalah pembebasan lahan dan persetujuan dari masyarakat sekitar. Risiko banjir dan pengaruh lingkungan sekitar. Pemeliharaan dan perawatan yang membutuhkan biaya dan tenaga.	Kelompok sasaran dari pembuatan siring di Gedung Serbaguna Desa Tabatan adalah masyarakat Desa Tabatan dan pengunjung yang akan menggunakan gedung serbaguna tersebut.	Gedung Serbaguna Desa Tabatan adalah salah satu fasilitas publik yang berada di Desa Tabatan, yang digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti pertemuan, rapat, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Namun, gedung serbaguna ini masih belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, termasuk siring untuk memperlancar pengelolaan air di sekitar gedung serbaguna.	Pembangunan siring di Gedung Serbaguna Desa Tabatan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Tabatan dan pengunjung, karena akan mempermudah pengelolaan air di sekitar gedung serbaguna dan meminimalisir risiko banjir. Namun, perlu dilakukan sosialisasi dan pengumpulan dukungan dari masyarakat sekitar agar pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memperoleh persetujuan dari semua pihak terkait.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	Usulan pembangunan gedung serbaguna Desa Tampulang.	Warga Desa, Pemerintah Desa Tampulang.	Desa Tampulang berencana membangun gedung serbaguna sebagai tempat untuk kegiatan sosial dan budaya bagi warga desa. Gedung serbaguna akan digunakan untuk berbagai jenis kegiatan seperti pertemuan, rapat, pesta, acara budaya, dan kegiatan lainnya yang melibatkan warga desa. Dalam merencanakan proyek ini, desa Tampulang perlu mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti ketersediaan dana, lokasi, dan penggunaan gedung.	Warga desa Tampulang akan memanfaatkan gedung serbaguna ini secara efektif untuk berbagai jenis kegiatan dan acara.	(Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan SD di Dusun Bakota mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga tidak dapat digunakan untuk melintas.	Masyarakat Dusun Bakota yang membutuhkan akses melintas jembatan, termasuk warga yang bekerja atau bersekolah di seberang sungai, serta kendaraan bermotor dan kendaraan roda dua.	Perbaikan jembatan SD meliputi pengerjaan beton yang retak, penggantian tiang penyangga yang rusak, penggantian bagian jalan yang aus dan berlubang, serta pengecatan ulang untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan akibat cuaca.	Asumsi dari perbaikan jembatan SD di Dusun Bakota adalah bahwa akses yang lebih baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bersekolah dan bekerja di wilayah seberang sungai. Selain itu, dengan adanya jembatan yang aman dan layak digunakan, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Dusun Bakota, karena akses transportasi yang lebih lancar akan memudahkan mobilitas barang dan jasa.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	usulan jalan desa Mahajandau - Sungai jaya	Kelompok sasaran dari usulan jalan desa Mahajandau - Sungai Jaya ini adalah masyarakat kedua desa yang membutuhkan akses jalan yang memadai untuk memperlancar aktivitas transportasi, khususnya dalam hal angkutan hasil pertanian dan perikanan. Selain itu, kelompok sasaran juga meliputi pengusaha dan pedagang yang membutuhkan akses jalan yang lebih baik untuk memasarkan produk mereka.	Usulan jalan desa Mahajandau - Sungai Jaya meliputi perbaikan dan pengembangan jalan dengan menggunakan bahan-bahan konstruksi yang berkualitas, serta pembangunan jembatan dan drainase yang memadai. Selain itu, perlu juga dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga kondisi jalan yang baik.	Anggaran yang cukup akan tersedia untuk melakukan perbaikan dan pengembangan jalan desa Mahajandau - Sungai Jaya.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan jalan masuk Desa Mahajandau - Mengkatip. Pembangunan jalan dapat membutuhkan sumber daya yang besar, seperti biaya dan material. Jika sumber daya yang tersedia terbatas, maka pembangunan jalan bisa terhambat.	Masyarakat Desa	Jalan yang menghubungkan Desa Mahajandau dan Mengkatip penting untuk memudahkan transportasi antar desa dan meningkatkan konektivitas di wilayah ini. Perlu dilakukan studi kelayakan dan perencanaan yang baik untuk memastikan pembangunan jalan dapat berjalan lancar.	Warga desa Mahajandau dan Mengkatip akan memanfaatkan jalan dengan baik dan memperhatikan pemeliharaan jalan.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan Kelanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tabatan. Kelanjutan pembangunan jalan usaha tani di Desa Tabatan memerlukan beberapa pertimbangan dan permasalahan yang harus diatasi sebelum dilaksanakan. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul antara lain: Biaya pembangunan yang cukup besar. Masalah pembebasan lahan dan persetujuan dari masyarakat sekitar. Risiko kerusakan jalan akibat cuaca atau penggunaan yang berlebihan. Pengelolaan dan perawatan jalan yang membutuhkan biaya dan tenaga.	Kelompok sasaran dari kelanjutan pembangunan jalan usaha tani di Desa Tabatan adalah petani dan pelaku usaha di Desa Tabatan yang memerlukan akses jalan yang memadai untuk mengangkut hasil pertanian dan barang dagangan.	Jalan usaha tani di Desa Tabatan merupakan jalur transportasi utama bagi petani dan pelaku usaha di desa tersebut untuk mengangkut hasil panen dan bahan baku. Pembangunan jalan usaha tani yang lancar dan terus berkelanjutan akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa.	Kelanjutan pembangunan jalan usaha tani di Desa Tabatan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa tersebut, karena akan mempermudah akses transportasi dan mengurangi biaya pengangkutan hasil pertanian serta memperkuat perekonomian masyarakat. Namun, perlu dilakukan sosialisasi dan pengumpulan dukungan dari masyarakat sekitar agar pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memperoleh persetujuan dari semua pihak terkait. Selain itu, perlu adanya perencanaan dan pengelolaan yang baik agar jalan usaha tani tersebut dapat bertahan lama dan berfungsi optimal.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan Pembangunan Jalan Tembus Rantau bahuang - paminggir. aat ini belum ada jalan yang langsung menghubungkan Rantau Bahuang dan Paminggir, sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan harus memutar jauh untuk bisa mencapai tujuan.	Kelompok sasaran dari pembangunan jalan tembus ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Rantau Bahuang dan Paminggir, termasuk petani, pedagang, dan warga umum yang ingin melakukan perjalanan ke wilayah tersebut.	Jalan tembus Rantau Bahuang - Paminggir akan menghubungkan dua wilayah tersebut dan memungkinkan aksesibilitas transportasi yang lebih baik. Diharapkan jalan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas umum.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk pembangunan jalan ini. Tidak adanya kendala berarti dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan. Adanya dukungan dari masyarakat sekitar dalam pembangunan jalan.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan Pembangunan Jalan Tembus Rantau bahuang - paminggir. aat ini belum ada jalan yang langsung menghubungkan Rantau Bahuang dan Paminggir, sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan harus memutar jauh untuk bisa mencapai tujuan.	Kelompok sasaran dari pembangunan jalan tembus ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Rantau Bahuang dan Paminggir, termasuk petani, pedagang, dan warga umum yang ingin melakukan perjalanan ke wilayah tersebut.	Jalan tembus Rantau Bahuang - Paminggir akan menghubungkan dua wilayah tersebut dan memungkinkan aksesibilitas transportasi yang lebih baik. Diharapkan jalan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas umum.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk pembangunan jalan ini. Tidak adanya kendala berarti dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan. Adanya dukungan dari masyarakat sekitar dalam pembangunan jalan.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	usulan Pembuatan Jalan Tembus ke Desa Mahajandau.	Masyarakat Desa Sungai Jaya dan Desa Mahajandau	Usulan pembuatan jalan tembus ke desa Mahajandau meliputi pembangunan jalan dengan menggunakan bahan-bahan konstruksi yang berkualitas, serta pembangunan jembatan dan drainase yang memadai. Selain itu, perlu juga dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga kondisi jalan yang baik.	Anggaran yang cukup akan tersedia untuk melakukan pembangunan jalan tembus ke desa Mahajandau.	(Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan Pembuatan Jembatan penghubung Desa Tampulang. Pembangunan jembatan penghubung dapat membutuhkan biaya yang sangat besar. Desa Tampulang mungkin tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai proyek ini.	Masyarakat Desa Tampulang	Desa Tampulang membutuhkan jembatan penghubung untuk menghubungkan daerah yang sulit dijangkau. Jembatan ini akan digunakan untuk akses warga desa ke tempat lain seperti pasar, pusat pelayanan kesehatan, sekolah, dan tempat penting lainnya. Dalam merencanakan proyek ini, desa Tampulang perlu mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti ketersediaan dana, lokasi, dan keamanan konstruksi.	Warga desa Tampulang akan memanfaatkan jembatan penghubung ini dengan baik untuk mempermudah akses mereka ke daerah lain.	(Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan Rehab Jembatan Gantung Desa Mahajandau. Pembangunan jalan dapat membutuhkan sumber daya yang besar, seperti biaya dan material. Jika sumber daya yang tersedia terbatas, maka pembangunan jalan bisa terhambat.	Masyarakat Desa Mahajandau	Jalan yang menghubungkan Desa Mahajandau dan Mengkatip penting untuk memudahkan transportasi antar desa dan meningkatkan konektivitas di wilayah ini. Perlu dilakukan studi kelayakan dan perencanaan yang baik untuk memastikan pembangunan jalan dapat berjalan lancar.	Warga desa Mahajandau dan Mengkatip akan memanfaatkan jalan dengan baik dan memperhatikan pemeliharaan jalan.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	-	Usulan Pembebasan Lahan kuburan di Dusun Bakota. Tidak adanya lahan kuburan yang memadai di Dusun Bakota. Sebagian besar lahan yang tersedia di Dusun Bakota sudah dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti perumahan atau pertanian. Tidak adanya alternatif lahan untuk penguburan yang layak dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat.	Masyarakat Dusun Bakota, terutama mereka yang membutuhkan lahan kuburan untuk keluarga mereka yang meninggal.	Pembebasan lahan kuburan akan memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat Dusun Bakota yang membutuhkan lahan kuburan. Pembebasan lahan harus dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, seperti izin dari pemerintah setempat dan kompensasi yang adil bagi pemilik tanah yang terkena dampak. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan aspek lingkungan dan sanitasi untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat.	Pembebasan lahan kuburan akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Dusun Bakota dalam hal penguburan yang layak dan aman bagi kesehatan. Namun, pembebasan lahan memerlukan biaya yang cukup besar, terutama untuk memberikan kompensasi bagi pemilik tanah yang terkena dampak. Oleh karena itu, perlu diadakan kerja sama dan penggalangan dana dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, dibutuhkan juga pengawasan dan pemeliharaan yang baik untuk memastikan keamanan dan kesehatan lingkungan di sekitar lahan kuburan.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Usulan Pembangunan Balai Adat di Desa Sungai Jaya.	Kelompok sasaran dari usulan pembangunan balai adat adalah masyarakat desa Sungai Jaya dan sekitarnya, khususnya kelompok yang masih melestarikan budaya dan tradisi adat di daerah tersebut. Selain itu, balai adat juga dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat desa Sungai Jaya dalam mengadakan acara seperti rapat, seminar, dan pertemuan lainnya.	Usulan pembangunan balai adat meliputi pembangunan gedung balai adat yang memiliki fasilitas yang memadai, seperti tempat duduk, panggung, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk mengadakan kegiatan adat. Selain itu, perlu juga dilakukan perawatan dan pemeliharaan gedung agar tetap terjaga keindahan dan keasrian bangunan.	Balai adat dapat menjadi sarana untuk melestarikan budaya dan tradisi adat di daerah tersebut serta meningkatkan kegiatan masyarakat dalam hal sosial dan ekonomi.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Masyarakat nelayan di Dusun Bakota mengalami kesulitan dalam memperoleh hasil tangkapan ikan yang memadai akibat minimnya alat tangkap yang mereka miliki. Beberapa masalah yang dihadapi adalah alat tangkap yang sudah usang, mahalnya biaya pembelian alat tangkap baru, dan minimnya ketersediaan alat tangkap yang ramah lingkungan.	Masyarakat nelayan di Dusun Bakota yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh alat tangkap ikan yang memadai, termasuk nelayan miskin, nelayan pemula, dan nelayan yang kurang mampu.	Pengadaan bantuan alat tangkap ikan meliputi pembelian jaring ikan, pancing, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, juga akan disertakan pelatihan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan agar masyarakat dapat menjaga keberlangsungan lingkungan laut dan kelangsungan hidup ikan.	Asumsi dari pengadaan bantuan alat tangkap ikan di Dusun Bakota adalah bahwa dengan adanya alat tangkap yang memadai, nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan dan pendapatannya. Selain itu, dengan pelatihan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, diharapkan masyarakat nelayan dapat memanfaatkan sumber daya laut secara lestari dan menjaga keberlangsungan sumber daya ikan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Dusun Bakota.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	usulan Pengadaan alat perlengkapan olahraga di Desa Tabatan	Masyarakat Desa Tabatan yang berminat untuk memulai usaha budidaya ikan	Pengadaan bibit ikan bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan dan mendukung perekonomian masyarakat Desa Tabatan Diharapkan dengan adanya pengadaan bibit ikan, masyarakat Desa Tabatan dapat memulai usaha budidaya ikan yang menguntungkan dan berkelanjutan	Masyarakat Desa Tabatan dapat mengakses modal untuk memulai usaha budidaya ikan.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
3	-	-	Usulan Biibit Ikan Tahuman dan Alat Perlengkapan Nelayan di Desa Sungai Jaya.	Masyarakat Desa Sungai Jaya.	Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan di Desa Sungai Jaya, diperlukan bantuan bibit ikan tahuman dan alat perlengkapan nelayan.	para nelayan di Desa Sungai Jaya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola bibit ikan tahuman, sehingga dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan mereka. Selain itu, diharapkan bahwa bantuan tersebut akan diapresiasi dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (3 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Usulan Bantuan Pelabuhan Masjid At-Taqwa di Dusun Bakota. Masyarakat di Dusun Bakota memiliki akses terbatas ke pelabuhan yang dapat digunakan untuk transportasi dan perdagangan. Keterbatasan ini mempengaruhi aktivitas perdagangan dan transportasi di wilayah tersebut dan dapat membatasi potensi ekonomi masyarakat.	Masyarakat di Dusun Bakota yang terkait dengan aktivitas perdagangan dan transportasi, termasuk nelayan, pedagang, dan pelaku usaha kecil dan menengah.	Pembuatan pelabuhan di Masjid At-Taqwa Dusun Bakota meliputi pembangunan dermaga dan fasilitas pendukung, seperti gudang penyimpanan dan fasilitas pemeliharaan kapal. Pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi dan perdagangan, memudahkan distribusi barang, serta mendukung potensi ekonomi masyarakat.	Asumsi dari pembuatan pelabuhan di Masjid At-Taqwa Dusun Bakota adalah bahwa dengan adanya pelabuhan yang baru, aktivitas perdagangan dan transportasi dapat meningkat, dan dengan demikian dapat meningkatkan potensi ekonomi masyarakat dan mengurangi biaya logistik. Selain itu, pelabuhan juga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah tersebut. Namun, pembangunan pelabuhan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Usulan Pembangunan Pelabuhan di RT.01 Rantau Kujang. Tidak adanya pelabuhan di RT 1 Rantau Kujang menyebabkan kesulitan akses untuk transportasi barang dan manusia. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan perdagangan dan pariwisata di RT 1 Rantau Kujang. Tidak adanya alternatif transportasi laut yang memadai untuk masyarakat di sekitar RT 1 Rantau Kujang.	Masyarakat di sekitar RT 1 Rantau Kujang, terutama para pelaku usaha dan wisatawan yang membutuhkan akses transportasi laut.	Pembangunan pelabuhan akan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk transportasi barang dan manusia. Selain itu, pelabuhan dapat digunakan sebagai tempat untuk kegiatan perdagangan dan pariwisata, seperti pelayaran wisata atau penangkapan ikan. Pembangunan pelabuhan harus mempertimbangkan lokasi yang strategis, fasilitas yang memadai, dan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna.	Pembangunan pelabuhan di RT 1 Rantau Kujang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar dalam hal akses transportasi laut dan pengembangan kegiatan perdagangan dan pariwisata. Namun, pembangunan pelabuhan memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga perlu diadakan kerja sama dan penggalangan dana dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari pembangunan pelabuhan dan cara untuk meminimalkan dampak tersebut.	(RT.01 Rantau Kujang, Rantau Kujang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Usulan Pembuatan Pelabuhan SDN Tabatan. Sulitnya masyarakat dan pengusaha mengakses wilayah sekitar karena akses transportasi yang terbatas.	Masyarakat yang tinggal di wilayah Tabatan yang akan diuntungkan dengan adanya pelabuhan untuk keperluan transportasi dan penangkapan ikan. Pengusaha dan nelayan yang beroperasi di wilayah tersebut dan membutuhkan pelabuhan yang memadai. Pemerintah setempat yang bertanggung jawab dalam membangun dan mengelola pelabuhan.	Pembangunan pelabuhan di wilayah Tabatan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi, memfasilitasi aktivitas perdagangan, dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pelabuhan yang memadai juga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di wilayah tersebut.	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan pelabuhan di wilayah Tabatan. Tidak adanya kendala dalam pembebasan lahan dan pembangunan pelabuhan. Adanya dukungan dari masyarakat setempat dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan di wilayah Tabatan.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Usulan)								
1	-	-	usulan Pembangunan Jaringan Sinyal HP. Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam usulan pembangunan jaringan sinyal hp adalah minimnya jangkauan jaringan sinyal yang ada di beberapa daerah, terutama di daerah pedalaman atau terpencil. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk melakukan komunikasi dan akses internet yang memadai, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial.	Kelompok sasaran dari usulan pembangunan jaringan sinyal hp ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau terpencil yang masih mengalami kesulitan dalam akses sinyal hp. Selain itu, kelompok sasaran juga meliputi pelaku usaha dan pengusaha di daerah tersebut yang membutuhkan akses komunikasi dan internet yang lebih baik untuk memajukan usaha mereka.	Usulan pembangunan jaringan sinyal hp meliputi pemasangan tower atau menara sinyal di daerah-daerah yang membutuhkan, pemasangan perangkat jaringan sinyal seperti BTS (Base Transceiver Station), dan pengadaan infrastruktur pendukung seperti generator listrik dan jaringan kabel.	Adanya dukungan dari masyarakat setempat dalam pembangunan jaringan sinyal hp di daerah-daerah tersebut.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
2.19.3.26.2.22.01.0000 - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (1 Usulan)								
1	-	-	usulan pengadaan penunjang olahraga (sepak Bola). Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengadaan penunjang olahraga (sepakbola) adalah kurangnya fasilitas olahraga yang memadai untuk memfasilitasi latihan dan pertandingan sepakbola bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan remaja. Kondisi lapangan yang kurang layak dan minimnya fasilitas seperti bola, pakaian olahraga, dan alat pelindung diri juga menjadi hambatan bagi pengembangan potensi olahraga masyarakat.	Kelompok sasaran dari usulan pengadaan penunjang olahraga (sepakbola) ini adalah anak-anak dan remaja yang tertarik dalam berolahraga sepakbola. Selain itu, kelompok sasaran juga meliputi pelatih dan pengurus tim sepakbola yang bertanggung jawab atas pengembangan potensi olahraga para pemain sepakbola.	Pengadaan penunjang olahraga (sepakbola) meliputi pengadaan lapangan sepakbola yang layak, bola sepakbola, pakaian olahraga, dan alat pelindung diri seperti pelindung kaki, lutut, dan siku. Selain itu, perlu juga dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi para pelatih dan pengurus tim sepakbola agar dapat memberikan pembinaan yang baik bagi para pemain.	Adanya dukungan dari masyarakat setempat dalam pengembangan olahraga sepakbola di daerah tersebut.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (17 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Ketersediaan tempat wudhu di Desa Tabatan yang masih minim dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk jamaah langgar Miftahul Jannah.	Masyarakat Desa Tabatan, khususnya para jamaah langgar Miftahul Jannah yang membutuhkan tempat wudhu yang memadai dan memenuhi syarat syariat Islam.	Langgar Miftahul Jannah merupakan tempat ibadah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat di Desa Tabatan. Saat ini, tempat wudhu yang tersedia hanya berupa dua keran air di halaman langgar yang kurang memadai dan tidak dapat menampung banyak orang secara bersamaan. Selain itu, kondisi keran air yang kurang terawat dan kotor seringkali menjadi kendala bagi masyarakat dalam melakukan wudhu yang bersih.	Dengan dibangunnya tempat wudhu yang memadai, masyarakat Desa Tabatan akan lebih mudah dan nyaman dalam melakukan wudhu sebelum melaksanakan ibadah di langgar Miftahul Jannah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas ibadah dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pembangunan tempat wudhu juga dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam beribadah dan mempererat tali silaturahmi.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Masjid At-Taqwa di Dusun Bakota mengalami kerusakan dan membutuhkan rehab total karena kondisinya yang sudah tidak layak digunakan. Beberapa masalah yang dihadapi adalah atap bocor, dinding retak, serta fasilitas di dalam masjid yang sudah tidak memadai.	Pengguna masjid At-Taqwa di Dusun Bakota, termasuk jamaah sholat, pengurus masjid, serta masyarakat sekitar yang menggunakan masjid untuk berbagai kegiatan keagamaan.	Rehabilitasi total masjid At-Taqwa meliputi perbaikan dan penggantian atap, perbaikan dinding, penambahan fasilitas seperti kamar mandi, tempat wudhu, AC, sound system, dan pencahayaan. Selain itu, juga akan dilakukan pengecatan ulang dan penataan ruangan agar masjid menjadi lebih nyaman dan indah.	Asumsi dari rehab total masjid At-Taqwa di Dusun Bakota adalah bahwa dengan adanya perbaikan yang dilakukan, akan meningkatkan kualitas dan kenyamanan dalam beribadah sehingga masyarakat akan lebih aktif dalam menggunakan masjid. Selain itu, diharapkan keberadaan masjid yang sudah baik juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat sekitar.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat di Dusun Bakota masih menggunakan pompa air tradisional untuk memperoleh akses air bersih yang cukup. Beberapa masalah yang dihadapi adalah efisiensi dan efektivitas pompa air yang rendah, biaya operasional yang tinggi, dan ketergantungan terhadap tenaga manusia.	Masyarakat di Dusun Bakota yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh akses air bersih, termasuk keluarga dengan kebutuhan air tinggi, nelayan, dan petani.	Bantuan mesin pompa air meliputi pengadaan mesin pompa air yang modern, bahan bakar, dan pelatihan penggunaan mesin pompa air untuk memperoleh akses air bersih yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, diharapkan bantuan ini dapat mengurangi biaya operasional dan ketergantungan terhadap tenaga manusia.	Asumsi dari bantuan mesin pompa air di Dusun Bakota adalah bahwa dengan adanya mesin pompa air yang modern, masyarakat dapat memperoleh akses air bersih yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, dengan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga manusia, diharapkan masyarakat dapat mengalokasikan waktu dan tenaganya untuk aktivitas produktif lainnya, seperti pertanian dan perikanan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Bakota serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan di wilayah tersebut.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan Kelanjutan Pembangunan di MAsjid Al-Mukarram Desa Tabatan. Kelanjutan pembangunan di Masjid Al-Mukarram Desa Tabatan memerlukan beberapa pertimbangan dan permasalahan yang harus diatasi sebelum dilaksanakan. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul antara lain: Biaya pembangunan yang cukup besar. Perizinan dan persetujuan dari pihak terkait, seperti pemerintah desa dan organisasi keagamaan. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis untuk melaksanakan pembangunan. Pengaruh cuaca dan kondisi lingkungan yang sulit diakses.	Kelompok sasaran dari kelanjutan pembangunan di Masjid Al-Mukarram Desa Tabatan adalah masyarakat Desa Tabatan dan semua pihak yang memerlukan sarana ibadah yang memadai dan layak.	Masjid Al-Mukarram Desa Tabatan merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat Desa Tabatan. Pembangunan yang terus berkelanjutan akan membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan serta pelayanan sosial di masjid tersebut.	Kelanjutan pembangunan di Masjid Al-Mukarram Desa Tabatan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa tersebut, karena akan memperbaiki fasilitas dan sarana ibadah, meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan, serta memberikan dampak positif pada lingkungan sosial masyarakat setempat. Namun, perlu dilakukan analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia dan teknis, serta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar pembangunan berjalan lancar dan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak terkait, seperti pemerintah desa, organisasi keagamaan, dan masyarakat, untuk menyukseskan program kelanjutan pembangunan di Masjid Al-Mukarram Desa Tabatan.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	usulan Pembangunan Masjid Desa Mahajandau.	Masyarakat Desa Mahajandau	Pembangunan masjid di Desa Mahajandau penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah dan aktivitas keagamaan. Diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat selama proses pembangunan.	Warga desa Mahajandau akan memanfaatkan masjid dengan baik dan memperhatikan pengelolaan dan pemeliharaan masjid.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan Pembangungan TPQ Nurul iman di Dusun bakota. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendidikan agama di Dusun Bakota.Tidak adanya tempat yang memadai untuk mengadakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan pengajian anak-anak. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.	Masyarakat Dusun Bakota, terutama anak-anak dan remaja yang membutuhkan pendidikan agama, serta orang tua yang ingin meningkatkan pengetahuan agama mereka.	Pembangunan TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran) Nurul Iman akan memberikan tempat yang memadai untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan agama. TPQ adalah sebuah lembaga pendidikan agama Islam untuk anak-anak yang bertujuan untuk mengajarkan Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Selain itu, TPQ juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya. Pembangunan TPQ harus mempertimbangkan lokasi yang strategis, fasilitas yang memadai, serta staf pengajar yang terampil dan terlatih.	Pembangunan TPQ Nurul Iman akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Dusun Bakota dalam hal pendidikan agama dan pengembangan kegiatan keagamaan. Namun, pembangunan TPQ memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga perlu diadakan kerja sama dan penggalangan dana dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, dukungan dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk menjaga keberlangsungan TPQ dan kegiatan keagamaan di wilayah tersebut.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan Pembangungan TPQ Nurul iman di Dusun bakota. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendidikan agama di Dusun Bakota.Tidak adanya tempat yang memadai untuk mengadakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan pengajian anak-anak. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.	Masyarakat Dusun Bakota, terutama anak-anak dan remaja yang membutuhkan pendidikan agama, serta orang tua yang ingin meningkatkan pengetahuan agama mereka.	Pembangunan TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran) Nurul Iman akan memberikan tempat yang memadai untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan agama. TPQ adalah sebuah lembaga pendidikan agama Islam untuk anak-anak yang bertujuan untuk mengajarkan Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Selain itu, TPQ juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya. Pembangunan TPQ harus mempertimbangkan lokasi yang strategis, fasilitas yang memadai, serta staf pengajar yang terampil dan terlatih.	Pembangunan TPQ Nurul Iman akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Dusun Bakota dalam hal pendidikan agama dan pengembangan kegiatan keagamaan. Namun, pembangunan TPQ memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga perlu diadakan kerja sama dan penggalangan dana dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, dukungan dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk menjaga keberlangsungan TPQ dan kegiatan keagamaan di wilayah tersebut.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan Pembangungan TPQ Nurul iman di Dusun bakota. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendidikan agama di Dusun Bakota.Tidak adanya tempat yang memadai untuk mengadakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan pengajian anak-anak. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.	Masyarakat Dusun Bakota, terutama anak-anak dan remaja yang membutuhkan pendidikan agama, serta orang tua yang ingin meningkatkan pengetahuan agama mereka.	Pembangunan TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran) Nurul Iman akan memberikan tempat yang memadai untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan agama. TPQ adalah sebuah lembaga pendidikan agama Islam untuk anak-anak yang bertujuan untuk mengajarkan Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Selain itu, TPQ juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya. Pembangunan TPQ harus mempertimbangkan lokasi yang strategis, fasilitas yang memadai, serta staf pengajar yang terampil dan terlatih.	Pembangunan TPQ Nurul Iman akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Dusun Bakota dalam hal pendidikan agama dan pengembangan kegiatan keagamaan. Namun, pembangunan TPQ memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga perlu diadakan kerja sama dan penggalangan dana dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, dukungan dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk menjaga keberlangsungan TPQ dan kegiatan keagamaan di wilayah tersebut.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan Pengadaan alat Sound System di Desa Rantau Bahuang.	Institusi pendidikan atau universitas yang membutuhkan sound system untuk acara seminar, presentasi, dan kuliah umum.Perusahaan atau organisasi yang membutuhkan sound system untuk acara pelatihan, konferensi, dan presentasi produk atau layanan.Komunitas atau organisasi masyarakat yang membutuhkan sound system untuk acara publik seperti pertunjukan seni atau kegiatan sosial.	Pengadaan sound system bertujuan untuk menyediakan sistem audio yang memadai dan berkualitas untuk keperluan acara-acara yang membutuhkan. Sound system yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas pengalaman acara dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, dengan memilih sound system yang efisien, pengguna dapat menghemat biaya jangka panjang.	Adanya anggaran yang memadai untuk pengadaan sound system.Tersedianya ruang atau tempat yang memungkinkan untuk menginstal sound system. Adanya dukungan dari pengguna sound system dalam pengoperasian dan perawatan sound system agar tetap berfungsi dengan baik.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan pengadaan bedah rumah di Desa Tabatan. Banyak rumah di Desa Tabatan yang kondisinya tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan dan renovasi yang cukup besar. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan dan kenyamanan penghuni, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Selain itu, kondisi rumah yang tidak layak huni juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.	Masyarakat Desa Tabatan yang rumahnya tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan dan renovasi yang cukup besar, khususnya keluarga yang kurang mampu dan tidak memiliki akses ke sumber daya yang memadai untuk melakukan perbaikan.	Di Desa Tabatan terdapat banyak rumah yang kondisinya sudah tua, tidak terawat dan tidak memadai sebagai tempat tinggal. Beberapa rumah bahkan sudah tidak layak huni dan memerlukan renovasi yang cukup besar. Kondisi ini menghambat kesejahteraan dan produktivitas masyarakat, serta memengaruhi kesehatan penghuni.	Dengan adanya pengadaan bedah rumah di Desa Tabatan, masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Rumah yang diperbaiki juga dapat memberikan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuninya. Hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pengadaan bedah rumah juga dapat memotivasi masyarakat untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi rumah dan lingkungannya.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	
11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan Penimbunan Alqah Pekuburan di RT.04 RW.02 Desa Tampulang. Pekuburan di RT. 04 RW.02 Desa Tampulang saat ini mengalami permasalahan yang cukup serius, yaitu banjir yang sering terjadi pada musim hujan dan menyebabkan lahan pemakaman tergenang air. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi keluarga yang berkunjung untuk berziarah dan juga dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penimbunan alqah pekuburan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.	Masyarakat Desa Tampulang yang memiliki keluarga yang telah meninggal dan dimakamkan di pekuburan RT. 04 RW.02 yang membutuhkan fasilitas yang layak untuk berziarah.	Pekuburan di RT. 04 RW.02 Desa Tampulang saat ini terletak di daerah yang rendah, sehingga sering tergenang air saat musim hujan. Hal ini membuat akses ke pemakaman menjadi sulit dan membuat lingkungan sekitar menjadi kurang nyaman untuk berkunjung. Selain itu, saat musim hujan, kuburan seringkali terendam air yang dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan sekitar dan memperburuk kondisi lingkungan yang ada.	Dengan penimbunan alqah pekuburan, keluarga yang berkunjung untuk berziarah akan merasa lebih nyaman dan akses ke pemakaman menjadi lebih mudah terutama pada musim hujan. Selain itu, penimbunan alqah juga dapat memperbaiki kondisi lingkungan sekitar dan membuat area pekuburan menjadi lebih bersih dan rapi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menghargai jasa para leluhur yang telah meninggal. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Tampulang dapat lebih memperhatikan dan memelihara lingkungan serta budaya yang ada di desanya.	(RT. 04 RW.02 Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Usulan Rehab Gereja desa Mahajandau.	Kelompok sasaran dari usulan rehab gereja ini adalah para jemaat gereja yang membutuhkan tempat ibadah yang aman dan layak huni. Selain itu, kelompok sasaran juga meliputi para pekerja gereja dan pengurus gereja yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan gereja.	Rehabilitasi gereja sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para jemaat gereja dan para pekerja gereja. Kebutuhan perbaikan ini termasuk perbaikan atap, dinding, lantai, listrik, dan instalasi air. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi para penyandang cacat dan lansia, serta meningkatkan fasilitas audio dan visual.	Anggaran yang cukup akan tersedia untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi gereja.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
13	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pemasangan listrik di Desa Tabatan memerlukan beberapa pertimbangan dan permasalahan yang harus diatasi sebelum dilaksanakan. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul antara lain: Biaya pemasangan listrik yang cukup besar. Keterbatasan sumber daya listrik di wilayah tersebut. Masalah teknis dalam instalasi listrik di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik. Perizinan dan persetujuan dari pihak terkait.	Kelompok sasaran dari pemasangan listrik di Desa Tabatan adalah masyarakat Desa Tabatan dan semua pihak yang memerlukan listrik untuk kegiatan sehari-hari, termasuk rumah tangga, pelaku usaha, dan pemerintah setempat.	Desa Tabatan merupakan salah satu desa yang belum terjangkau jaringan listrik, sehingga masyarakatnya masih menggunakan sumber energi alternatif seperti genset atau tenaga surya. Pemasangan listrik di Desa Tabatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan di daerah tersebut.	Pemasangan listrik di Desa Tabatan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Tabatan, karena akan mempermudah akses listrik untuk kebutuhan sehari-hari, meningkatkan produktivitas usaha, dan mendukung pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Namun, perlu dilakukan analisis kebutuhan listrik dan pemilihan sumber daya listrik yang tepat agar program ini dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, perlu adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak terkait untuk menyukseskan program pemasangan listrik di Desa Tabatan.	(Desa Tabatan, Tabatan, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	Usulan Pemasangan Listrik di Desa Mahajandau. esa Mahajandau mungkin tidak memiliki sumber daya listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Selain itu, biaya untuk membangun infrastruktur listrik mungkin juga mahal.	Masyarakat Desa Mahajandau	Desa Mahajandau memiliki kebutuhan untuk pemasangan listrik yang memadai bagi warga desa. Listrik dibutuhkan untuk penerangan, penggunaan alat elektronik dan sebagai sumber energi listrik bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Perlu dilakukan studi kelayakan dan perencanaan yang baik untuk memastikan pemasangan listrik dapat berjalan lancar.	Warga desa Mahajandau akan menggunakan listrik dengan baik dan memperhatikan pemeliharaan instalasi listrik.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
15	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	usulan pemasangan Listrik di Desa Sungai Jaya.	Masyarakat Desa Sungai Jaya.	Usulan pemasangan listrik di Desa Sungai Jaya meliputi pembangunan jaringan listrik dan pemasangan tiang listrik serta penyebaran kabel jaringan. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi tentang penggunaan listrik yang aman dan efisien.	Adanya kerjasama dengan perusahaan listrik yang menyediakan jaringan listrik dan perangkat pendukungnya.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
16	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	Usulan Pemasangan Listrik di Desa Tampulang. Saat ini, Desa Tampulang masih banyak yang belum memiliki akses listrik yang memadai. Padamnya listrik sering terjadi dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama di malam hari. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, serta menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di Desa Tampulang.	Masyarakat Desa Tampulang yang belum memiliki akses listrik yang memadai dan membutuhkan pemasangan listrik.	Desa Tampulang adalah desa yang masih tergolong terpencil dan belum sepenuhnya terhubung dengan infrastruktur listrik. Beberapa wilayah di desa masih mengandalkan sumber listrik yang tidak memadai, seperti genset atau lampu minyak tanah, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Hal ini tentu saja menyulitkan kegiatan sehari-hari dan pembangunan di desa.	Dengan pemasangan listrik yang memadai di Desa Tampulang, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama pada malam hari, seperti belajar, bekerja, dan membuka usaha. Selain itu, pemasangan listrik juga akan membuka peluang baru bagi pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Desa Tampulang dapat lebih maju dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.	(Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	-	-	Usulan Pengadaan Kegiatan Pasar Murah di Desa Sungai Jaya.	Masyarakat Desa Sungai Jaya	Usulan pengadaan kegiatan pasar murah di desa Sungai Jaya meliputi penyediaan berbagai bahan pangan dan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayuran. Selain itu, kegiatan pasar murah juga dapat diisi dengan acara promosi produk dan pertunjukan seni budaya lokal untuk menarik minat masyarakat.	Adanya dukungan dari masyarakat setempat untuk mengikuti dan mempromosikan kegiatan pasar murah tersebut.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : RUSINAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Mohon Bantuan Fasilitasi Sekolah	Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	Permohonan bantuan untuk memfasilitasi atau menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar-mengajar di sekolah.	Sekolah di Desa Telang Andrau mungkin membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa	(SD Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Mohon Bantuan Perehapan SD Desa Telang Andrau	Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	Permohonan bantuan untuk melakukan perbaikan atau renovasi pada bangunan Sekolah Dasar (SD) di Desa Telang Andrau.	Bangunan SD mengalami kerusakan atau kekurangan dalam beberapa aspek seperti infrastruktur, fasilitas pendukung, atau kondisi bangunan yang tidak memadai.	(SD Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penimbunan halaman di SD Pararapak	Siswa dan guru di SD Desa Pararapak	Penimbunan halaman di SD Desa Pararapak dilakukan untuk memperbaiki kondisi halaman yang berlubang dan tidak rata sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam beraktivitas di halaman sekolah	Tidak ada kendala teknis yang menghambat pelaksanaan penimbunan halaman, seperti masalah tanah atau kondisi cuaca yang tidak mendukung.	(SD Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehab Sekolah SD Murung Paken	Siswa dan Siswi SD Murung Paken Guru dan Staf Administrasi SD Murung Paken Orang Tua/Wali Murid Siswa SD Murung Paken	Mereka berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.	Program rehap sekolah di SD Murung Paken dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan.	(SD Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pergantian Bidan Desa Danau Masura	Warga Desa Danau Masura yang membutuhkan layanan kesehatan dari bidan desa.	Bidan desa yang sebelumnya bertugas di Desa Danau Masura telah pindah tugas sehingga diperlukan penggantian bidan desa yang baru.	etersediaan tenaga bidan desa yang memenuhi kualifikasi dan dapat bekerja dengan baik di Desa Danau Masura.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (11 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Pembuatan Sumur Bor	Masyarakat yang tinggal di daerah yang kekurangan akses air bersih Sekolah atau lembaga pendidikan yang membutuhkan pasokan air untuk keperluan sanitasi dan kebersihan	Sumur bor dibutuhkan untuk memperoleh pasokan air yang cukup dan terjamin kualitasnya	Lokasi sumur bor dapat diidentifikasi dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Mohon dibuat jaringan air bersih (PDAM)	Penduduk yang tinggal di wilayah yang belum memiliki akses ke jaringan air bersih.	Jaringan air bersih adalah sistem distribusi air bersih yang terdiri dari pipa-pipa, pompa-pompa, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk menyediakan air bersih ke rumah-rumah penduduk.	Masyarakat setempat memiliki kesadaran akan pentingnya penggunaan air bersih yang aman dan sehat.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Puskesdes mengalami kerusakan sehingga perlu segera direhap	Pasien yang telah dirawat di Poskesdes dan memerlukan perawatan lanjutan untuk pemulihan yang optimal.	Perehapan Puskesdes membuat gedung menjadi lebih baik dan orang yang berobat menjadi lebih aman dan nyaman	Tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung program rehabilitasi, termasuk anggaran dan peralatan medis yang memadai.	(Puskesdes Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	etersediaan tenaga bidan desa yang memenuhi kualifikasi dan dapat bekerja dengan baik di Desa Danau Masura.	Warga Desa Danau Masura yang menggunakan jalan tersebut untuk aktivitas sehari-hari.	Jalan Desa Danau Masura mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga membutuhkan perbaikan agar dapat dilewati dengan aman dan nyaman.	Adanya dana dan sumber daya yang cukup untuk melakukan perbaikan jalan yang diusulkan.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang mengalami kerusakan jalan sehingga perlu Siring Timbun Jalan bagian Hulu Desa Pararapak	Masyarakat	Diperlukan peningkatan siring timbun jalan bagian hulu Desa Pararapak agar akses ke wilayah tersebut menjadi lebih mudah dan lancar	Peningkatan jalan akan membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas bagi warga desa.	(jalan bagian hulu Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Badan Jalan Danau Masura ke Parigi Sepanjang 7Km	Warga Desa Danau Masura yang menggunakan jalan tersebut untuk aktivitas sehari-hari dan membutuhkan akses transportasi ke Parigi.	Jalan yang menghubungkan Desa Danau Masura ke kota Parigi sepanjang 7Km mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga membutuhkan perbaikan agar dapat dilewati dengan aman dan nyaman.	Adanya dana dan sumber daya yang cukup untuk melakukan perbaikan jalan yang diusulkan.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Perbaikan Jalan Menuju Muara Ripung, Murung Paken dan Masura.	Masyarakat desa muara ripung, desa danau masura dan masyarakat desa murung paken	Jalan menuju Muara Ripung, Murung Paken, dan Masura adalah jalan yang cukup penting untuk masyarakat setempat karena merupakan akses utama untuk menuju kawasan permukiman, pasar, dan tempat ibadah. Namun, kondisi jalan saat ini cukup rusak dan berlubang, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.	Perbaikan jalan menuju Muara Ripung, Murung Paken, dan Masura diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat setempat.	(Jalan Menuju Muara Ripung, Murung Paken dan Masura., Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan	Masyarakat	Permohonan untuk meningkatkan kondisi jalan beraspal yang menghubungkan Desa Dangka dengan Desa Telang Andrau.	Kondisi jalan beraspal mungkin tidak memadai, seperti berlubang, rusak, atau sempit sehingga menyulitkan akses masyarakat dan mempengaruhi mobilitas ekonomi.	(Jalan dari Desa Dangka ke Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Beraspal dari Desa Telang Andrau ke Desa Majundre	Masyarakat	Permohonan untuk meningkatkan kondisi jalan beraspal yang menghubungkan Desa Telang Andrau dengan Desa Majundre	Kondisi jalan beraspal mungkin tidak memadai, seperti berlubang, rusak, atau sempit sehingga menyulitkan akses masyarakat dan mempengaruhi mobilitas ekonomi.	(Jalan dari Desa Telang Andrau ke Desa Majundre, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Desa Telang Andrau	Masyarakat	Diperlukan peningkatan jalan desa Telang Andrau agar akses ke wilayah tersebut menjadi lebih mudah dan lancar	Peningkatan jalan akan membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas bagi warga desa.	(Jalan Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Masura Menuju Murung Paken	Orang-orang yang menggunakan Jalan Masura untuk kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman barang, perjalanan menuju ke sekolah, tempat kerja, ataupun aktivitas lainnya.	Peningkatan jalan tersebut akan meningkatkan aksesibilitas ke daerah Murung Paken, meningkatkan efisiensi transportasi barang dan orang, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.	Peningkatan jalan Masura akan mampu meningkatkan jumlah pengguna jalan dan volume transportasi di daerah tersebut.	(Jalan Masura Menuju Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (4 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu	Masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan dalam melakukan renovasi atau perbaikan rumah mereka.	Bedah rumah adalah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam melakukan perbaikan atau renovasi rumah mereka. Program ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan masyarakat umum.	Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk mencapai kesuksesan program bedah rumah.	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Mohon Batuan Bedah Rumah	Masyarakat	Permohonan bantuan untuk melakukan renovasi atau perbaikan pada rumah-rumah di Desa Telang Andrau	Rumah-rumah di Desa Telang Andrau mungkin mengalami kerusakan atau kekurangan dalam beberapa aspek seperti infrastruktur, sanitasi, atau kondisi rumah yang tidak memadai.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Usulan Untuk Rumah Tidak Layak Huni Desa Danau Masura	Warga Desa Danau Masura yang tinggal di rumah tidak layak huni.	Beberapa rumah di Desa Danau Masura tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan agar bisa digunakan dengan aman dan nyaman.	Adanya dana dan sumber daya yang cukup untuk melakukan perbaikan rumah-rumah yang diusulkan.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Mohon Bantuan Untuk Aliran Listrik Desa Danau Masura	Warga Desa Danau Masura yang belum memiliki akses listrik.	Desa Danau Masura belum teraliri listrik sehingga membutuhkan bantuan untuk mendapatkan akses listrik.	Adanya sumber daya dan teknologi yang memungkinkan pemasangan listrik di daerah yang diusulkan.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengadaan pompa air persiapan jika terjadi kebakaran hutan	Tim pemadam kebakaran yang bertugas dalam penanggulangan kebakaran hutan.	Pengadaan pompa air persiapan bertujuan untuk membantu tim pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran hutan dengan cara menyediakan sumber air yang cukup untuk memadamkan api.	Pengadaan pompa air persiapan dilakukan sebelum terjadi kebakaran hutan dan disimpan di dekat lokasi rawan kebakaran. Pompa air ini diasumsikan dapat bekerja dengan baik dan dapat dioperasikan oleh tim pemadam kebakaran yang terlatih.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (5 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Peningkatan Insentif RT	Masyarakat	Insentif RT dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warga desa Telang Andrau.	Meningkatkan insentif RT dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Murung Paken mendapatkan tunjangan yang kurang memadai.	Anggota BPD Desa Murung Paken.	Usulan ini bertujuan untuk memberikan kenaikan tunjangan bagi anggota BPD Desa Murung Paken sehingga dapat memotivasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.	Terdapat dana yang cukup untuk memberikan kenaikan tunjangan dan tidak mengganggu anggaran desa secara keseluruhan	(Desa Murung Paken., Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Bimtek BPD dan Perangkat Desa	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perangkat Desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Kaur Pembangunan, dan Kaur Kesra Tim pelaksana program pemerintah desa Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di desa	Bimtek BPD dan Perangkat Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.	Pelatihan yang terarah dan terstruktur dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan kapasitas anggota BPD dan perangkat desa dapat berdampak positif pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di desa	(Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Insentif BPD mohon dinaikkan	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Insentif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai pengakuan atas prestasi atau kinerja yang baik.	Kenaikan insentif bagi anggota BPD dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja anggota BPD untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa dan memperoleh hasil yang lebih baik.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Usulan Mohon Bantuan Pembangunan Kantor Desa Muara Ripung	Pemerintah Desa Muara Ripung sebagai pengguna utama kantor desa. Penduduk Desa Muara Ripung yang akan mendapatkan pelayanan administrasi dari kantor desa. Pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum yang akan berinteraksi dengan kantor desa.Kantor desa merupakan pusat administrasi yang berfungsi sebagai tempat melayani kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi seperti surat keterangan, permohonan izin, dan sebagainya.	Kantor desa merupakan pusat administrasi yang berfungsi sebagai tempat melayani kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi seperti surat keterangan, permohonan izin, dan sebagainya.	Pembangunan kantor desa yang baru akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi. Pembangunan kantor desa yang baru akan meningkatkan citra pemerintah desa di mata masyarakat.	(Desa Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Ternak Babi	Masyarakat	Bantuan sarana dan prasarana ternak babi dapat meningkatkan hasil produksi peternakan	Bantuan sarana dan prasarana ternak babi dapat meningkatkan hasil pruduksi peternakan dan meningkatkan penghasilan bagi warga	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Bibit Ternak	para petani atau peternak yang ingin memulai usaha peternakan, namun tidak memiliki modal atau bibit ternak yang cukup.	dibutuhkan dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan dalam bentuk anggaran dan kebijakan yang mendukung.	dibutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti ketersediaan air bersih, akses transportasi yang baik, serta fasilitas pendukung lainnya untuk memudahkan petani atau peternak dalam menjalankan usahanya	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan kelompok tani dalam pengolahan nanas parigi	Kelompok tani yang fokus pada budidaya dan pengolahan nanas parigi, terutama di daerah yang potensial untuk pertumbuhan tanaman tersebut.	Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dalam pengolahan nanas parigi menjadi produk bernilai tambah, seperti jus nanas, selai nanas, atau kue nanas.	Kelompok tani yang menjadi sasaran pelatihan ini sudah memiliki pengetahuan dasar tentang budidaya nanas parigi. Pelatihan ini juga diasumsikan akan diadakan di daerah yang mudah diakses oleh kelompok tani, dengan fasilitas yang memadai seperti aula atau ruangan yang dapat menampung peserta pelatihan dengan nyaman.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani Untuk Penanaman Sereh Wangi dan Madu Kelulut	Masyarakat	Kelompok tani dapat membantu meningkatkan produksi sereh wangi dan madu kelulut di Desa Telang Andrau.	Peningkatan produksi ini dapat membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa.	(Desa Telang Andrau., Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengusulan Kebun Jengkol	Masyarakat	Kebun jengkol dapat membantu meningkatkan produksi dan pendapatan petani di Desa Telang Andrau	Pengembangan kebun jengkol akan membuka peluang ekonomi baru bagi petani desa	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (7 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Belum tersedianya ambulance desa sehingga perlu untuk segera diadakan	Masyarakat Desa yang membutuhkan transportasi darurat untuk keperluan kesehatan.	Ambulans desa akan digunakan sebagai sarana transportasi darurat untuk keperluan kesehatan masyarakat Desa.	Terdapat tenaga medis atau relawan kesehatan yang siap untuk bekerja di ambulans desa.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Konsidi sinyal yang kurang baik sehingga perlu di bangun tower telkomsel / xl sehingga mendapat jaringan internet	Orang-orang yang tinggal atau bekerja di daerah yang tidak memiliki akses internet yang memadai.	Daerah yang dimaksud dapat berupa daerah terpencil, daerah yang jauh dari pusat kota, atau daerah yang sulit dijangkau oleh operator internet.	Di daerah tersebut terdapat infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan untuk membangun tower.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Aki Baru Untuk Kantor BPD Desa Murung Paken	Masyarakat	Bantuan Aki Baru Untuk Kantor BPD Desa Murung Paken berguna untuk menghidupkan lampu dan lain-lain	Desa Murung Paken masih belum mendapatkan listrik dari PLN sehingga harus menggunakan aki untuk menghidupkan lampu	(Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Aliran Listrik	Masyarakat, Bantuan aliran listrik dapat membantu mereka untuk memiliki akses yang lebih mudah terhadap listrik, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.	Mereka seringkali mengandalkan sumber listrik yang tidak stabil, seperti generator bensin atau lampu minyak tanah. Bantuan aliran listrik dapat membantu mereka untuk memiliki akses yang lebih mudah terhadap listrik yang stabil dan dapat diandalkan, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membantu meningkatkan produktivitas di daerah tersebut.	bahwa listrik adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan normal, akses yang mudah terhadap listrik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas seseorang.	(Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Aliran Listrik	Masyarakat Desa Muara Ripung	Aliran listrik yang stabil dan terjamin sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti penerangan, penggunaan alat rumah tangga, hingga kebutuhan medis.	Terdapat sumber daya listrik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, seperti sumber daya listrik terbarukan atau pembangkit listrik yang sudah ada.	(Desa Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Di Programkan Sertifikat Masal	Masyarakat	Permohonan untuk melakukan program sertifikat masal untuk masyarakat.	Masyarakat di suatu wilayah mungkin membutuhkan program sertifikat masal untuk memperoleh kepastian hukum terkait kepemilikan tanah atau properti yang dimilikinya.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehab Gereja Katolik	Masyarakat	Rehabilitasi Gereja Katolik dapat membantu memperbaiki kondisi tempat ibadah yang penting bagi masyarakat desa Telang Andrau.	Rehab gereja akan memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat desa	(Gereja Katolik Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : NURUL HIKMAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Mohon Bantuan Fasilitasi Sekolah	Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	Permohonan bantuan untuk memfasilitasi atau menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar-mengajar di sekolah.	Sekolah di Desa Telang Andrau mungkin membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa	(Sekolah di Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Mohon Bantuan Perehapan SD Desa Telang Andrau	Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	Permohonan bantuan untuk melakukan perbaikan atau renovasi pada bangunan Sekolah Dasar (SD) di Desa Telang Andrau.	Bangunan SD mungkin mengalami kerusakan atau kekurangan dalam beberapa aspek seperti infrastruktur, fasilitas pendukung, atau kondisi bangunan yang tidak memadai.	(SD Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penimbunan di SD Pararapak	Siswa dan orang tua siswa di SD Desa Pararapak	Penimbunan halaman di SD Desa Pararapak dilakukan untuk memperbaiki kondisi halaman yang berlubang dan tidak rata sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam beraktivitas di halaman sekolah	Tidak ada kendala teknis yang menghambat pelaksanaan penimbunan halaman, seperti masalah tanah atau kondisi cuaca yang tidak mendukung.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penimbunan di SD Pararapak	Siswa dan orang tua siswa di SD Desa Pararapak	Penimbunan halaman di SD Desa Pararapak dilakukan untuk memperbaiki kondisi halaman yang berlubang dan tidak rata sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam beraktivitas di halaman sekolah	Tidak ada kendala teknis yang menghambat pelaksanaan penimbunan halaman, seperti masalah tanah atau kondisi cuaca yang tidak mendukung.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehab Sekolah SD Murung Paken	Siswa dan Siswi SD Murung Paken Guru dan Staf Administrasi SD Murung Paken Orang Tua/Wali Murid Siswa SD Murung Paken	Mereka berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.	Program rehap sekolah di SD Murung Paken dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan.	(SD Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pergantian Bidan Desa Danau Masura	Warga Desa Danau Masura yang membutuhkan layanan kesehatan dari bidan	Bidan desa yang sebelumnya bertugas di Desa Danau Masura telah pindah tugas sehingga diperlukan penggantian bidan desa yang baru.	Ketersediaan tenaga bidan desa yang memenuhi kualifikasi dan dapat bekerja dengan baik di Desa Danau Masura.	(Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (12 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Pembuatan Sumur Bor	Masyarakat yang tinggal di daerah yang kekurangan akses air bersih Sekolah atau lembaga pendidikan yang membutuhkan pasokan air untuk keperluan sanitasi dan kebersihan	Sumur bor dibutuhkan untuk memperoleh pasokan air yang cukup dan terjamin kualitasnya	Lokasi sumur bor dapat diidentifikasi dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Mohon dibuat jaringan air bersih (PDAM)	Penduduk yang tinggal di wilayah yang belum memiliki akses ke jaringan air bersih.	Jaringan air bersih adalah sistem distribusi air bersih yang terdiri dari pipa-pipa, pompa-pompa, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk menyediakan air bersih ke rumah-rumah penduduk.	Masyarakat setempat memiliki kesadaran akan pentingnya penggunaan air bersih yang aman dan sehat.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehab poskesdes	Pasien yang telah dirawat di Poskesdes dan memerlukan perawatan lanjutan untuk pemulihan yang optimal.	Program rehabilitasi yang fokus pada perawatan medis untuk mengembalikan fungsi tubuh yang hilang akibat penyakit atau cedera.	Tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung program rehabilitasi, termasuk anggaran dan peralatan medis yang memadai.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Dangka - Gagutur melewati Desa Marga Jaya belum selesai dibangun.	Warga Desa Dangka dan Desa Marga Jaya.	Jalan yang belum selesai dibangun dapat mengganggu aktivitas masyarakat Desa Dangka dan Desa Marga Jaya.	perbaikan jalan Desa Dangka - Gagutur melalui Desa Marga Jaya akan membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mobilitas barang di wilayah tersebut	(Desa Dangka - Gagutur melalui Desa Marga Jaya, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Badan Jalan Danau Masura ke Parigi Sepanjang 7Km	Warga Desa Danau Masura yang menggunakan jalan tersebut untuk aktivitas sehari-hari dan membutuhkan akses transportasi ke Parigi.	Jalan yang menghubungkan Desa Danau Masura ke kota Parigi sepanjang 7Km mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga membutuhkan perbaikan agar dapat dilewati dengan aman dan nyaman.	Adanya dana dan sumber daya yang cukup untuk melakukan perbaikan jalan yang diusulkan.	(Jalan Danau Masura ke Parigi Sepanjang 7Km, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Perbaikan Jalan Menuju Muara Ripung, Murung Paken dan Masura.	Masyarakat desa muara ripung, desa danau masura dan masyarakat desa murung paken	Jalan menuju Muara Ripung, Murung Paken, dan Masura adalah jalan yang cukup penting untuk masyarakat setempat karena merupakan akses utama untuk menuju kawasan permukiman, pasar, dan tempat ibadah. Namun, kondisi jalan saat ini cukup rusak dan berlubang, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.	Perbaikan jalan menuju Muara Ripung, Murung Paken, dan Masura diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat setempat.	(desa muara ripung, desa danau masura dan masyarakat desa murung paken, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Beraspal dari Desa Dangka ke Desa Telang Andrau	Masyarakat	Permohonan untuk meningkatkan kondisi jalan beraspal yang menghubungkan Desa Dangka dengan Desa Telang Andrau.	Kondisi jalan beraspal mungkin tidak memadai, seperti berlubang, rusak, atau sempit sehingga menyulitkan akses masyarakat dan mempengaruhi mobilitas ekonomi.	(Desa Dangka dengan Desa Telang Andrau., Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Beraspal dari Desa Telang Andrau ke Desa Majundre	Masyarakat	Permohonan untuk meningkatkan kondisi jalan beraspal yang menghubungkan Desa Telang Andrau dengan Desa Majundre	Kondisi jalan beraspal mungkin tidak memadai, seperti berlubang, rusak, atau sempit sehingga menyulitkan akses masyarakat dan mempengaruhi mobilitas ekonomi.	(Desa Telang Andrau ke Desa Majundre, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Desa Telang Andrau	Masyarakat	Diperlukan peningkatan jalan desa Telang Andrau agar akses ke wilayah tersebut menjadi lebih mudah dan lancar	peningkatan jalan akan membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas bagi warga desa.	(Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Masura Menuju Murung Paken	Orang-orang yang menggunakan Jalan Masura untuk kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman barang, perjalanan menuju ke sekolah, tempat kerja, ataupun aktivitas lainnya.	Peningkatan jalan tersebut akan meningkatkan aksesibilitas ke daerah Murung Paken, meningkatkan efisiensi transportasi barang dan orang, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.	Peningkatan jalan Masura akan mampu meningkatkan jumlah pengguna jalan dan volume transportasi di daerah tersebut.	(Jalan Masura Menuju Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Siring Timbun Jalan bagian Hulu Desa Pararapak	Masyarakat	Diperlukan peningkatan jalan Desa Murung Paken agar akses ke wilayah tersebut menjadi lebih mudah dan lancar	Peningkatan jalan akan membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas bagi warga desa.	(Desa pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan Rehab Jalan Desa Danau Masura	Warga Desa Danau Masura yang menggunakan jalan tersebut untuk aktivitas sehari-hari.	Jalan Desa Danau Masura mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga membutuhkan perbaikan agar dapat dilewati dengan aman dan nyaman.	Adanya dana dan sumber daya yang cukup untuk melakukan perbaikan jalan yang diusulkan.	(Jalan Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu	Masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan dalam melakukan renovasi atau perbaikan rumah mereka.	Bedah rumah adalah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam melakukan perbaikan atau renovasi rumah mereka. Program ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan masyarakat umum.	Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk mencapai kesuksesan program bedah rumah.	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mohon Batuan Bedah Rumah	Masyarakat	Permohonan bantuan untuk melakukan renovasi atau perbaikan pada rumah-rumah di Desa Telang Andrau	Rumah-rumah di Desa Telang Andrau mungkin mengalami kerusakan atau kekurangan dalam beberapa aspek seperti infrastruktur, sanitasi, atau kondisi rumah yang tidak memadai.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kondisi rumah masyarakat di Desa Dangka yang tidak layak huni dapat mempengaruhi kesehatan dan keamanan masyarakat.	Masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni di Desa Dangka.	Bedah rumah masyarakat Desa Dangka bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. .	Dengan kondisi rumah yang lebih layak huni, masyarakat di Desa Dangka diharapkan dapat lebih produktif dan kreatif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari	(Desa Dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Usulan Untuk Rumah Tidak Layak Huni Desa Danau Masura	Warga Desa Danau Masura yang tinggal di rumah tidak layak huni.	Beberapa rumah di Desa Danau Masura tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan agar bisa digunakan dengan aman dan nyaman	erbaikan rumah dapat meningkatkan kondisi hunian dan kualitas hidup penduduk di Desa Danau Masura.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kekurangan pencahayaan di sepanjang jalan yang melewati Desa Dangka dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan menghambat mobilitas pada malam hari.	Masyarakat yang menggunakan jalan di sepanjang Desa Dangka pada malam hari.	Dibutuhkan pemasangan lampu PJU sepanjang jalan yang melewati Desa Dangka untuk memperbaiki aksesibilitas dan keamanan bagi masyarakat.	pencahayaan yang memadai di sepanjang jalan yang melewati Desa Dangka dapat membantu meningkatkan keamanan dan mobilitas masyarakat pada malam hari.	(Desa Dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pengadaan pompa air persiapan jika terjadi kebakaran hutan	Tim pemadam kebakaran yang bertugas dalam penanggulangan kebakaran hutan.	Pengadaan pompa air persiapan bertujuan untuk membantu tim pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran hutan dengan cara menyediakan sumber air yang cukup untuk memadamkan api.	Pengadaan pompa air persiapan dilakukan sebelum terjadi kebakaran hutan dan disimpan di dekat lokasi rawan kebakaran. Pompa air ini diasumsikan dapat bekerja dengan baik dan dapat dioperasikan oleh tim pemadam kebakaran yang terlatih.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Usulan)								
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek BPD dan Perangkat Desa	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perangkat Desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Kaur Pembangunan, dan Kaur Kesra Tim pelaksana program pemerintah desa Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di desa	Bimtek BPD dan Perangkat Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.	Pelatihan yang terarah dan terstruktur dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan kapasitas anggota BPD dan perangkat desa dapat berdampak positif pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di desa	(Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Usulan Mohon Bantuan Pembangunan Kantor Desa Muara Ripung	Pemerintah Desa Muara Ripung sebagai pengguna utama kantor desa. Penduduk Desa Muara Ripung yang akan mendapatkan pelayanan administrasi dari kantor desa. Pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum yang akan berinteraksi dengan kantor desa.Kantor desa merupakan pusat administrasi yang berfungsi sebagai tempat melayani kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi seperti surat keterangan, permohonan izin, dan sebagainya.	Kantor desa merupakan pusat administrasi yang berfungsi sebagai tempat melayani kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi seperti surat keterangan, permohonan izin, dan sebagainya.	Pembangunan kantor desa yang baru akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi. Pembangunan kantor desa yang baru akan meningkatkan citra pemerintah desa di mata masyarakat.	(Desa Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Insentif BPD mohon dinaikkan	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Insentif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai pengakuan atas prestasi atau kinerja yang baik.	Kenaikan insentif bagi anggota BPD dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja anggota BPD untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa dan memperoleh hasil yang lebih baik.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Usulan Naikan Intensif Aparat Desa Dangka	Aparat Desa Dangka	Kenaikan Intensif Aparat Desa dapat memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kinerja	Kenaikan Intensif Aparat Desa dapat memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kinerja	(Desa Dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Ternak Babi	Masyarakat	Bantuan sarana dan prasarana ternak babi dapat meningkatkan hasil pruduksi peternakan	Bantuan sarana dan prasarana ternak babi dapat meningkatkan hasil pruduksi peternakan dan meningkatkan penghasilan bagi warga	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Tani Untuk Penanaman Sereh Wangi dan Madu Kelulut	Masyarakat	Kelompok tani dapat membantu meningkatkan produksi sereh wangi dan madu kelulut di desa Telang Andrau.	peningkatan produksi ini dapat membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa.	(Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Bibit Ternak	para petani atau peternak yang ingin memulai usaha peternakan, namun tidak memiliki modal atau bibit ternak yang cukup.	dibutuhkan dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan dalam bentuk anggaran dan kebijakan yang mendukung.	dibutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti ketersediaan air bersih, akses transportasi yang baik, serta fasilitas pendukung lainnya untuk memudahkan petani atau peternak dalam menjalankan usahanya.	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan kelompok tani dalam pengolahan nanas parigi	Kelompok tani yang fokus pada budidaya dan pengolahan nanas parigi, terutama di daerah yang potensial untuk pertumbuhan tanaman tersebut.	Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dalam pengolahan nanas parigi menjadi produk bernilai tambah, seperti jus nanas, selai nanas, atau kue nanas.	Kelompok tani yang menjadi sasaran pelatihan ini sudah memiliki pengetahuan dasar tentang budidaya nanas parigi. Pelatihan ini juga diasumsikan akan diadakan di daerah yang mudah diakses oleh kelompok tani, dengan fasilitas yang memadai seperti aula atau ruangan yang dapat menampung peserta pelatihan dengan nyaman.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengusulan Kebun Jengkol	Masyarakat	Kebun jengkol dapat membantu meningkatkan produksi dan pendapatan petani di desa Telang Andrau	pengembangan kebun jengkol akan membuka peluang ekonomi baru bagi petani desa	(Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (11 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Murung Paken mendapatkan tunjangan yang kurang memadai.	Anggota BPD Desa Murung Paken.	Usulan ini bertujuan untuk memberikan kenaikan tunjangan bagi anggota BPD Desa Murung Paken sehingga dapat memotivasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.	Terdapat dana yang cukup untuk memberikan kenaikan tunjangan dan tidak mengganggu anggaran desa secara keseluruhan	(Desa Murung Paken., Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja Jemaat GKE Desa Dangka membutuhkan bantuan hibah untuk melakukan pembangunan gedung.	Jemaat Gereja GKE Desa Dangka.	Bantuan hibah untuk pembangunan Gereja Jemaat GKE Desa Dangka bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat.	Dengan adanya bantuan hibah untuk pembangunan Gereja Jemaat GKE Desa Dangka dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Desa Dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Aki Baru Untuk Kantor BPD Desa Murung Paken	Masyarakat	Bantuan Aki Baru Untuk Kantor BPD Desa Murung Paken berguna untuk menghidupkan lampu,	Desa Murung Paken masih belum mendapatkan listrik dari PLN sehingga harus menggunakan aki untuk menghidupkan lampu	(Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Aliran Listrik	Masyarakat, Bantuan aliran listrik dapat membantu mereka untuk memiliki akses yang lebih mudah terhadap listrik, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.	Mereka seringkali mengandalkan sumber listrik yang tidak stabil, seperti generator bensin atau lampu minyak tanah. Bantuan aliran listrik dapat membantu mereka untuk memiliki akses yang lebih mudah terhadap listrik yang stabil dan dapat diandalkan, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membantu meningkatkan produktivitas di daerah tersebut.	bahwa listrik adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan normal, akses yang mudah terhadap listrik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas seseorang.	(Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Aliran Listrik	Masyarakat desa muara ripung	Aliran listrik yang stabil dan terjamin sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti penerangan, penggunaan alat rumah tangga, hingga kebutuhan medis.	Terdapat sumber daya listrik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, seperti sumber daya listrik terbarukan atau pembangkit listrik yang sudah ada.	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Untuk Aliran Listrik Desa Danau Masura	Warga Desa Danau Masura yang belum memiliki akses listrik.	Desa Danau Masura belum teraliri listrik sehingga membutuhkan bantuan untuk mendapatkan akses listrik.	Adanya sumber daya dan teknologi yang memungkinkan pemasangan listrik di daerah yang diusulkan.	(Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon di bangun tower telkomsel / xl sehingga mendapat jaringan internet	Orang-orang yang tinggal atau bekerja di daerah yang tidak memiliki akses internet yang memadai.	Daerah yang dimaksud dapat berupa daerah terpencil, daerah yang jauh dari pusat kota, atau daerah yang sulit dijangkau oleh operator internet.	Di daerah tersebut terdapat infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan untuk membangun tower.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Di Programkan Sertifikat Masal	Masyarakat	Permohonan untuk melakukan program sertifikat masal untuk masyarakat.	Masyarakat di suatu wilayah mungkin membutuhkan program sertifikat masal untuk memperoleh kepastian hukum terkait kepemilikan tanah atau properti yang dimilikinya.	(Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pengadaan ambulance desa	Masyarakat Desa yang membutuhkan transportasi darurat untuk keperluan kesehatan.	Ambulans desa akan digunakan sebagai sarana transportasi darurat untuk keperluan kesehatan masyarakat Desa.	Terdapat tenaga medis atau relawan kesehatan yang siap untuk bekerja di ambulans desa.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Insentif RT	Masyarakat	Insentif RT dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warga desa Telang Andrau.	Meningkatkan insentif RT dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa.	(Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehab Gereja Khatolik	Masyarakat	Rehabilitasi gereja Khatolik dapat membantu memperbaiki kondisi tempat ibadah yang penting bagi masyarakat desa Telang Andrau.	Rehab gereja akan memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat desa	(Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : BHASKAROGRA BASUKI DWIATMAJA, SM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Gedung SDN dan Rumah Dinas SDN di Desa Majundre memerlukan peremajaan dan perbaikan.	Siswa SDN dan Guru, Karyawan SDN	Gedung SDN dan Rumah Dinas SDN di Desa Majundre memerlukan peremajaan dan perbaikan karena sudah tua dan rusak.	Kondisi bangunan yang buruk dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan oleh SDN.	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perihal rehab gedung SDN dan TK Tiga Putri Desa Maruga serta SDN Dusun Batukol.	Siswa, guru, dan staf SDN dan TK Tiga Putri Desa Maruga serta SDN Dusun Batukol.	Gedung-gedung tersebut membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan mengajar.	&Gedung-gedung tersebut sudah cukup tua dan perlu direnovasi. Siswa, guru, dan staf perlu lingkungan belajar dan mengajar yang aman dan nyaman.&	((SDN dan TK Tiga Putri Desa Maruga serta SDN Dusun Batukol., Maruga, Kec. Dusun Utara), Maruga, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perumahan Dinas Guru SDN memerlukan peremajaan dan perbaikan.	Guru SD di Desa Gunung Rantau	Perumahan guru SDN di Desa Gunung Rantau membutuhkan rehab berat karena kondisinya yang tidak layak huni, sehingga perlu segera diperbaiki agar dapat digunakan kembali oleh para guru SDN.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Talekoi belum memiliki jaringan internet yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran online.	Murid, guru, dan staf SDN Talekoi.	Dibutuhkan akses internet yang stabil dan cepat agar pembelajaran online dapat berjalan lancar dan efektif.	Dalam era digital, akses internet merupakan kebutuhan yang penting bagi dunia pendidikan.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Poskesdes di Desa Majundre memerlukan rehabilitasi total agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.	Poskesdes di Desa Majundre memerlukan rehabilitasi total agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.	Poskesdes di Desa Majundre memerlukan rehabilitasi total karena sudah tua dan rusak, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.	Dengan melakukan rehabilitasi total pada Poskesdes, kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Majundre.	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kekurangan tenaga kesehatan di Desa Gunung Rantau	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Desa Gunung Rantau membutuhkan penambahan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di sana.	Penempatan tenaga kesehatan di Desa Gunung Rantau	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (12 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penampungan dan penyaluran air bersih di Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih	Masyarakat Desa Tarusan.	Rehabilitasi penampungan dan penyaluran air bersih akan memastikan ketersediaan air bersih yang memadai bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya penyakit akibat kurangnya ketersediaan air bersih.	Rehabilitasi penampungan dan penyaluran air bersih dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Bangun jembatan baru di Sungai Sunsang yang menghubungkan Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau. Kelompok	Masyarakat Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau	Jembatan di Sungai Sunsang perlu dibangun untuk mempermudah akses antara Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Majundre. dan Bundar masih dalam kondisi berlubang dan berdebu, sehingga menyulitkan mobilitas warga desa.	Warga Desa Majundre. dan Bundar	Dibutuhkan pengerasan jalan agar warga desa dapat dengan mudah beraktivitas dan mengangkut barang.	Kondisi jalan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas warga desa.	(Jalan Desa Majundre. dan Bundar, Majundre, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Gopried Tumang di Desa Majundre membutuhkan peningkatan agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman.	Masyarakat Desa Majundre yang membutuhkan akses jalan yang baik.	Jalan Gopried Tumang di Desa Majundre memerlukan peningkatan karena kondisinya sudah rusak dan tidak memadai untuk dilalui.	Dengan peningkatan jalan, akses transportasi ke dan dari Desa Majundre dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Simpang Pendang menuju Dusun Teluk Mantarem perlu dibangun atau diperbaiki menjadi salah satu skala prioritas pembangunan di tahun Anggaran 2024.	Masyarakat Dusun Teluk Mantarem	Jalan Simpang Pendang menuju Dusun Teluk Mantarem membutuhkan pembangunan/perbaikan.	Masyarakat Dusun Teluk Mantarem mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan yang menghubungkan Desa Tarusan dan Desa Panarukan mengalami kerusakan dan membutuhkan pembangunan untuk menghubungkan kedua desa tersebut.	Masyarakat Desa Tarusan dan Desa Panarukan	Pembangunan jembatan akan mempermudah aksesibilitas antara kedua desa tersebut, dan memungkinkan masyarakat desa Tarusan dan desa Panarukan untuk lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, dan berdagang.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat keterhubungan antara desa, serta meningkatkan perekonomian lokal.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan dalam Desa Gunung Rantau RT.005 yang memprihatinkan	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Jalan dalam Desa Gunung Rantau RT.005 membutuhkan rekonstruksi agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman oleh pengguna jalan.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan	((RT.005 Desa Gunung Rantau), Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya sarana publik yang memadai di Desa Gunung Rantau	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Jembatan SUNGSANG Desa Gunung Rantau mengalami kerusakan dan perlu direkonstruksi agar dapat digunakan kembali dan tidak membahayakan pengguna jalan.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.	(Jembatan SUNGSANG, Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lokasi pembangunan jalan penghubung antara Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau salah ditentukan.	Masyarakat Desa Marawan Lama.	Jalan penghubung antara Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau rusak parah, tetapi titik nol pembangunan ditetapkan di Desa Gunung Rantau	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama mengajukan usulan pembangunan melalui Reses DPRD dan Musrenbang Desa/Kecamatan dan Kabupaten.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Membangun jalan baru dari Bambanen menuju Danau Lelek Marawan Lama	Masyarakat Desa Marawan Lama.	Jalan baru dari Bambanen menuju Danau Lelek Marawan Lama perlu dibangun	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Bambanen menuju Danau Lelek, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perbaikan jalan dari KM.6 Desa Bundar hingga Dusun Batukol Desa Maruga.	Warga Desa Maruga dan pengguna jalan.	Jalan di Desa Maruga membutuhkan perbaikan untuk mempermudah mobilitas.	Perbaikan jalan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tidak ada jembatan yang melintasi Sungai Tapen Maruga dan Sungai Tapen Patei Maruga.	Masyarakat Desa Maruga yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik, terutama untuk mengakses wilayah-wilayah di seberang sungai.	Wilayah Desa Maruga terbagi oleh Sungai Tapen Maruga dan Sungai Tapen Patei Maruga, yang dapat mempersulit mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Belum adanya kantor BPD Desa Talekoi sehingga kegiatan administrasi desa kurang terstruktur.	Staf BPD Desa Talekoi dan warga desa yang membutuhkan layanan administrasi.	Dibutuhkan kantor BPD Desa Talekoi agar kegiatan administrasi desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien.	Dibutuhkan kantor BPD Desa Talekoi agar kegiatan administrasi desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Kantor Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Rehabilitasi kantor desa akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat saat melakukan administrasi di kantor desa	Rehabilitasi kantor desa dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan alat musik untuk Karang Taruna BINTANG MUDA di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan anggaran.	Anggota Karang Taruna BINTANG MUDA di Gunung Rantau.	Karang Taruna BINTANG MUDA adalah organisasi kepemudaan di Gunung Rantau.	Karang Taruna BINTANG MUDA adalah organisasi kepemudaan di Gunung Rantau.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya sarana publik yang memadai di Desa Gunung Rantau	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Desa Gunung Rantau membutuhkan pembangunan baru balai basarah &ERAI PAKAT& sebagai sarana publik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial dan budaya.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Irigasi Cetak Sawah Tanggul Isin yang baru/telah dikerjakan pada periode lalu perlu diurus.	: Petani Desa Marawan Lama	Irigasi Cetak Sawah Tanggul Isin yang baru/telah dikerjakan pada periode lalu perlu diurus	Dibutuhkan penyelesaian cetak sawah agar seluruh lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Ketersediaan lahan pertanian di Desa Talekoi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan taraf hidup petani.	Petani dan masyarakat Desa Talekoi.	Diperlukan pembuatan persawahan skala prioritas untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.	Pembuatan persawahan skala prioritas dapat membantu meningkatkan produksi pertanian, mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan dari luar desa, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Talekoi.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Petani di Desa Gunung Rantau memerlukan bantuan mesin perontok padi Power Treheser agar dapat meningkatkan efisiensi dalam proses panen.	Petani di Desa Gunung Rantau.	Proses perontokan padi yang dilakukan secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Dengan bantuan mesin, petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses panen	Proses perontokan padi yang dilakukan secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Dengan bantuan mesin, petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses panen	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	eningkatan Jalan Usaha Tani RT.004 Desa Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan anggaran.	Masyarakat di RT.004 Desa Gunung Rantau yang membutuhkan akses jalan yang lebih baik.	RT.004 Desa Gunung Rantau membutuhkan peningkatan jalan usaha tani untuk memudahkan transportasi dan pengiriman hasil pertanian.	Dengan pengaspalan jalan, warga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan mereka.	(RT.004 Desa Gunung Rantau, Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani di Persawahan Duruyan Ranjak belum dibuat sehingga sulit untuk mengangkut hasil panen ke tempat penjualan	Petani di Persawahan Duruyan Ranjak	Jalan Usaha Tani yang belum dibuat memiliki panjang sekitar 1,5 km.	Dibutuhkan pembangunan Jalan Usaha Tani agar petani dapat mengangkut hasil panen dengan mudah dan lebih efisien.	(Persawahan Duruyan Ranjak, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani di RT.001 Desa Gunung Rantau perlu dicor beton agar lebih tahan lama	: Warga Desa Gunung Rantau yang bekerja di sektor pertanian	Jalan Usaha Tani yang berlumpur dan licin saat hujan dapat mempersulit warga dalam menga	Dengan pengaspalan jalan, warga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan mereka.	(RT.01 Desa Gunung Rantau, Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan pasar Desa Marawan Lama perlu direhabilitasi dan menjadi skala prioritas pembangunan.	Masyarakat Desa Marawan Lama	: Pelabuhan pasar Desa Marawan Lama membutuhkan rehabilitasi.	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Desa Talekoi belum memiliki BTS Telkomsel, sehingga akses internet dan sinyal telepon masih terbatas.	Warga Desa Talekoi yang menggunakan layanan telepon seluler dan internet.	Dibutuhkan adanya BTS Telkomsel agar warga Desa Talekoi dapat memiliki akses internet dan sinyal telepon yang memadai.	Infrastruktur telekomunikasi yang memadai dapat mendukung perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat desa	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (14 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Desa Maruga belum memiliki ambulans yang dapat digunakan dalam keadaan darurat.	Masyarakat Desa Maruga yang membutuhkan akses transportasi medis dalam keadaan darurat.	Belum adanya ambulans di Desa Maruga dapat mempersulit proses penanganan medis dalam keadaan darurat.	Pembelian ambulans dapat meningkatkan kemampuan penanganan medis dan keselamatan masyarakat Desa Maruga.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya tempat ibadah bagi jemaat GKE SINAI di Gunung Rantau.	Jemaat GKE SINAI Gunung Rantau.	Perlu dibangun pembangunan baru untuk gereja tersebut.	Tidak ada cukup ruang di gereja yang ada saat ini untuk menampung jumlah jemaat yang ada.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional Keagamaan Kelompok Yasinan AN-NUR di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota Kelompok Yasinan AN-NUR di Gunung Rantau.	Kelompok Yasinan AN-NUR adalah kelompok keagamaan di Gunung Rantau yang memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	Operasional keagamaan Kelompok Yasinan AN-NUR memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional Keagamaan SHA GKE di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHA GKE di Gunung Rantau.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHA GKE di Gunung Rantau.	Operasional keagamaan SHA GKE memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional Keagamaan SHM Katolik di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHM KATOLIK di Gunung Rantau.	memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional keagamaan TKA-TP AL-QURÃ¢â‚¬â„¢AN MIDAUL KHAIRIAH di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota TKA-TP AL-QURÃ¢â‚¬â„¢AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	Anggota TKA-TP AL-QURÃ¢â‚¬â„¢AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	Anggota TKA-TP AL-QURÃ¢â‚¬â„¢AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Masjid NURUL MUTTAQIN di Gunung Rantau terhambat oleh keterbatasan anggaran	jamaah masjid Nurul Muttaqin Desa unung Rantau	Masjid NURUL MUTTAQIN adalah sebuah proyek pembangunan masjid di Gunung Rantau yang membutuhkan dukungan finansial dan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan proyek tersebut.	Pembangunan Masjid NURUL MUTTAQIN di Gunung Rantau penting untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat sekitar.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehabilitasi gereja Katholik SANTO PETRUS belum selesai.	Umat Katholik yang beribadah di gereja tersebut.	Perlu dilanjutkan rehabilitasi untuk gereja tersebut.	Adanya kerusakan pada bangunan gereja yang membutuhkan perbaikan.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehabilitasi langgar NURUL IMAN masih dalam proses.	Jamaah langgar NURUL IMAN Gunung Rantau.	Perlu dilanjutkan rehabilitasi untuk langgar tersebut.	Kerusakan pada langgar membutuhkan perbaikan agar bisa digunakan kembali.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	rumah ibadah di Desa Talekoi mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	Pemuka agama, jemaat, dan masyarakat Desa Talekoi.	Diperlukan perbaikan rumah ibadah agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	Diperlukan perbaikan rumah ibadah agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rumah Ibadah Kristen dan Katholik di Desa Maruga membutuhkan bantuan hibah untuk pemeliharaan dan pembangunan.	Umat Kristen dan Katolik di Desa Maruga yang menggunakan rumah ibadah tersebut.	Rumah Ibadah Kristen dan Katholik di Desa Maruga membutuhkan pemeliharaan dan pembangunan agar dapat terus berfungsi dengan baik.	Bantuan hibah dapat membantu pemeliharaan dan pembangunan rumah ibadah, sehingga dapat terus digunakan dan memberikan manfaat bagi umat Kristen dan Katolik di Desa Maruga.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
12	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Tarusan belum memiliki akses listrik PLN, sehingga masyarakat masih menggunakan sumber listrik alternatif yang kurang efektif dan kurang terjamin keamanannya.	Masyarakat Desa Tarusan.	Ketersediaan listrik PLN di Desa Tarusan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, belajar, dan mengakses informasi	Ketersediaan listrik PLN dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membuka peluang baru dalam bidang perekonomian.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
13	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemasangan jaringan listrik di Desa Maruga.	Warga Desa Maruga.	Desa Maruga belum memiliki akses listrik yang memadai.	&Pemasangan jaringan listrik akan memberikan dampak positif bagi warga dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Desa Maruga terletak di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama.&	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
14	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemasangan Jaringan Listrik Ke Kampung Desa Majundre	Masyarakatt Desa majundre	Kampung Desa Majundre belum memiliki jaringan listrik sehingga warga sulit mendapatkan akses listrik untuk kebutuhan sehari-hari.	Pemasangan Jaringan Listrik Ke Kampung Desa Majundre	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : H. ZAINAL KHAIRUDDIN, SP

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pada saat musim hujan, jalan di Desa Tabatan sering tergenang air, sehingga akses transportasi menjadi sulit dan berpotensi merusak infrastruktur jalan.	Masyarakat di Desa Tabatan dan sekitarnya, serta para pengguna jalan yang melintas di wilayah tersebut.	Penyiringan dan penimbunan SD Tabatan akan memperbaiki kondisi jalan dan memfasilitasi akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.	Dengan kondisi jalan yang lebih baik, masyarakat dan pengunjung dapat mengakses wilayah tersebut dengan lebih mudah, meningkatkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Saat ini, masyarakat di Desa Tabatan tidak memiliki akses yang baik ke pelabuhan terdekat, sehingga mereka kesulitan dalam mengangkut barang dan bahan kebutuhan sehari-hari.	Masyarakat di Desa Tabatan dan sekitarnya, serta para pedagang yang beroperasi di wilayah tersebut.	Pembangunan pelabuhan SD Tabatan akan meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi kegiatan perdagangan antara Desa Tabatan dengan wilayah lainnya	Dengan adanya pelabuhan baru, jumlah pengunjung dan pengguna pelabuhan akan meningkat dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Desa Tabatan.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Pembantu (Pustu) di Dusun Bakota Desa Sungai Jaya mengalami kerusakan sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik.	Masyarakat di Dusun Bakota Desa Sungai Jaya dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan	Bantuan yang diberikan berupa biaya dan material untuk perbaikan Pustu.	Dengan perbaikan Pustu, masyarakat di Dusun Bakota Desa Sungai Jaya dan sekitarnya akan dapat menerima pelayanan kesehatan dengan baik, sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan baik pula.	(Dusun Bakota, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Aliran sungai di D3 Suka Karya tertutup oleh rumput dan kayu sehingga mengganggu kelancaran aliran air.	Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dan terdampak oleh kondisi aliran sungai yang terhambat.	Bantuan yang diberikan berupa biaya dan peralatan untuk membersihkan rumput dan kayu di sepanjang aliran sungai.	Dengan membersihkan aliran sungai, kelancaran aliran air akan meningkat, dan masyarakat dapat terhindar dari potensi bencana seperti banjir dan kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat dapat hidup lebih sehat dan nyaman di sekitar sungai yang bersih dan lancar.	(D3 Suka Karya, Tampulang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersumbatnya aliran sungai dari Desa Sungai Jaya ke arah kecamatan Jenamas oleh pohon dan rumput.	Masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai tersebut dan yang terdampak langsung oleh tersumbatnya aliran sungai.	Pembersihan aliran sungai merupakan langkah yang penting untuk menjaga aliran sungai tetap lancar dan mengurangi risiko banjir. Pohon dan rumput yang tumbuh di sekitar aliran sungai dapat menyebabkan tersumbatnya aliran sungai, sehingga perlu segera dibersihkan.	Dengan dilakukannya pembersihan aliran sungai, akan mengurangi risiko banjir dan menjaga kualitas lingkungan di sekitar aliran sungai. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai tersebut. Selain itu, juga akan membantu kelancaran aktivitas transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada aliran sungai tersebut.	(Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan PNPM RT 20 yang rusak dan tidak layak dilalui.	Masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan PNPM RT 20 dan yang sering menggunakan jalan tersebut.	Jalan yang rusak dapat mengganggu kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan jalan PNPM RT 20 sangat diperlukan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar dan aman.	Dengan dilakukannya perbaikan jalan PNPM RT 20, akan meningkatkan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas masyarakat di sekitar jalan tersebut. Hal ini dapat membantu memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar jalan tersebut, serta meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.	(RT. 20 Kelurahan Rantau Kujang, Rantau Kujang, Kec. Jenamas)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi jembatan Desa Mahajandau dapat meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan transportasi di sekitar wilayah tersebut.	Masyarakat lokal yang menggunakan jembatan tersebut, terutama dalam sektor pertanian dan perikanan.	Rehabilitasi jembatan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan memudahkan transportasi hasil pertanian dan perikanan ke pasar terdekat.	Dengan adanya rehabilitasi jembatan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperkuat sektor pertanian dan perikanan di Desa Mahajandau.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	rehab jalan langgar Baiturrahmat RT 03 Desa Rantau Bahuang.	Kelompok sasaran adalah masyarakat Desa Rantau Bahuang yang menggunakan Jalan Langgar Baiturrahmat RT 03 sebagai akses transportasi sehari-hari.	Jalan Langgar Baiturrahmat RT 03 merupakan salah satu jalan utama di Desa Rantau Bahuang yang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai akses transportasi sehari-hari.	Dengan adanya rehabilitasi jalan, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan tersebut.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (1 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Saat ini, wilayah Desa Tabatan tidak memiliki pencahayaan jalan yang memadai pada malam hari, sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan potensi kejahatan.	Masyarakat di Desa Tabatan dan sekitarnya, serta para pengguna jalan yang melintas di wilayah tersebut.	Pemasangan jaringan lampu di Desa Tabatan akan meningkatkan pencahayaan jalan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah tersebut.	Dengan kondisi jalan yang lebih terang, masyarakat dan pengunjung dapat melintas di wilayah tersebut dengan lebih aman dan nyaman.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengadaan keramba ikan sungai (budidaya ikan) di Desa Rantau Bahuang.	Kelompok sasaran adalah masyarakat Desa Rantau Bahuang yang memiliki minat dan potensi untuk melakukan budidaya ikan sungai dengan menggunakan keramba.	Budidaya ikan sungai dengan menggunakan keramba merupakan salah satu bentuk usaha pertanian yang dapat dilakukan di daerah yang memiliki sungai atau danau. Dalam budidaya ikan ini, keramba diisi dengan ikan yang diberi pakan secara teratur dan dipelihara hingga mencapai ukuran yang siap dipanen. Desa Rantau Bahuang merupakan daerah yang memiliki sungai dan potensi untuk melakukan budidaya ikan sungai dengan menggunakan keramba.	Dalam jangka panjang, budidaya ikan sungai dengan menggunakan keramba dapat berdampak positif pada lingkungan sekitar, karena dapat membantu menjaga kualitas air dan meningkatkan populasi ikan di sungai.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bantuan untuk peternakan sapi di D3 Suka Karya Desa Tampulang.	Masyarakat D3 Suka Karya	Bantuan untuk peternakan sapi dapat berupa berbagai hal seperti bantuan bibit sapi, pakan sapi, obat-obatan, peralatan peternakan dan pendampingan dalam manajemen peternakan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para peternak meningkatkan produktivitas dan kesehatan sapi, sehingga meningkatkan pendapatan peternak dan kualitas produk sapi yang dihasilkan.	Adanya bantuan dapat membantu meningkatkan produktivitas sapi, sehingga meningkatkan pendapatan peternak dan kualitas produk yang dihasilkan.	(D3 Suka Karya Desa Tampulang, Tampulang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Melanjutkan jalan usaha tani dari Desa Tabatan menuju Daduhup Food Estate dapat meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan transportasi produk pertanian Desa Tabatan ke pasar-pasar terdekat.	Masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani dan pengusaha pertanian di Desa Tabatan.	Pembangunan jalan dapat membantu mempercepat waktu dan biaya dalam transportasi hasil pertanian serta memberikan akses yang lebih mudah ke pasar-pasar terdekat.	Dengan adanya pembangunan jalan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat sektor pertanian di Desa Tabatan.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (10 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Alat Habsyi Masjid Nur Shalihin.	Kelompok sasaran adalah jamaah dan masyarakat Desa Rantau Bahuang yang menggunakan Masjid Nur Shalihin sebagai tempat ibadah.	Alat habsyi adalah alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi acara keagamaan seperti pengajian, tahlil, dan peringatan hari besar agama. Masjid Nur Shalihin di Desa Rantau Bahuang membutuhkan bantuan alat habsyi untuk meningkatkan kualitas acara keagamaan di masjid tersebut.	Dengan adanya alat habsyi, masyarakat di Desa Rantau Bahuang dapat mempertahankan dan melestarikan seni musik tradisional yang merupakan bagian dari budaya lokal mereka.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan alat Habsyi untuk Masjid Baiturahmat	Masyarakat Desa Rantau Bahuang	Habsyi merupakan salah satu bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Kegiatan ini biasanya dilakukan di masjid dengan menggunakan alat musik tradisional seperti rebana, hadrah, dan marawis. Mesjid Baiturrahmat di Desa Rantau Bahuang merupakan salah satu tempat di mana masyarakat setempat melakukan kegiatan Habsyi secara rutin.	Dengan adanya bantuan alat yang sesuai, masyarakat di Desa Rantau Bahuang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Habsyi yang dilakukan di Mesjid Baiturrahmat.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Belum adanya pelabuhan kubur Hindu Kaharingan di wilayah tersebut sehingga masyarakat Hindu Kaharingan kesulitan dalam memakamkan jenazah keluarga mereka secara layak.	Masyarakat Hindu Kaharingan di wilayah tersebut yang memerlukan sarana pelabuhan kubur untuk memakamkan jenazah keluarga mereka.	Pelabuhan kubur Hindu Kaharingan akan dibangun dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Pelabuhan ini akan menjadi sarana untuk memakamkan jenazah secara layak sesuai dengan adat dan kepercayaan masyarakat Hindu Kaharingan.	Dengan adanya pelabuhan kubur Hindu Kaharingan, masyarakat Hindu Kaharingan akan mendapatkan akses yang lebih baik dan lebih mudah dalam memakamkan jenazah keluarga mereka secara layak. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keamanan masyarakat, serta memperkuat identitas dan budaya masyarakat Hindu Kaharingan di wilayah tersebut.	(Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Daerah Sungai Jaya mengalami banjir yang mengakibatkan kerusakan dan kesulitan bagi masyarakat setempat.	Masyarakat yang terdampak banjir di daerah Sungai Jaya.	Bantuan yang diberikan berupa bantuan pangan, sandang, dan papan untuk kebutuhan sementara dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.	Dengan memberikan bantuan, masyarakat yang terdampak banjir dapat merasa terbantu dan kehidupan mereka dapat kembali berjalan dengan normal setelah banjir.	(Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Desa Tabatan belum memiliki alat sound yang memadai untuk digunakan dalam pengajian Al Habsyi an Nisa.	Desa Tabatan belum memiliki alat sound yang memadai untuk digunakan dalam pengajian Al Habsyi an Nisa.	Pemasangan alat sound yang memadai akan memudahkan penggunaan alat untuk pengajian dan meningkatkan kualitas suara pengajian tersebut.	engan adanya alat sound yang memadai, penggunaan alat akan meningkatkan kualitas pengajian dan menarik lebih banyak peserta.	(Tabatan, Kec. Jenamas)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kerusakan pada langgar Nurul Asikin Kel. Rantau Kujang yang membutuhkan perbaikan.	Jamaah yang menggunakan langgar Nurul Asikin Kel. Rantau Kujang dan masyarakat yang tinggal di sekitar langgar tersebut.	Langgar Nurul Asikin Kel. Rantau Kujang merupakan tempat ibadah yang sangat penting bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perbaikan langgar yang rusak sangat diperlukan agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman.	Dengan dilakukannya perbaikan langgar Nurul Asikin Kel. Rantau Kujang, akan meningkatkan kualitas tempat ibadah dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat di sekitar langgar tersebut. Selain itu, perbaikan juga dapat membantu memperbaiki citra positif dan menjaga hubungan antarwarga di lingkungan sekitar.	(Rantau Kujang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Masjid di Desa Sungai Jaya belum memiliki tower untuk adzan sehingga sulit bagi jamaah untuk mengetahui waktu shalat secara akurat.	Jamaah dan pengurus masjid di Desa Sungai Jaya.	Bantuan yang diberikan berupa biaya dan material untuk pembangunan tower masjid yang memadai. Tower ini akan dilengkapi dengan speaker untuk mengumandangkan adzan.	Dengan dibangunnya tower masjid yang memadai, jamaah dan pengurus masjid akan lebih mudah dalam mengetahui waktu shalat sehingga dapat meningkatkan keaktifan jamaah dalam beribadah di masjid. Selain itu, adzan yang terdengar dengan jelas dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, seperti mendorong semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama.	(Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tidak tersedianya langgar di Kelurahan Rantau Kujang sehingga masyarakat kesulitan untuk melakukan kegiatan keagamaan.	Jamaah yang memerlukan tempat ibadah di Kelurahan Rantau Kujang.	Langgar Nurul Asikin baru yang dibangun di Kelurahan Rantau Kujang akan memberikan tempat ibadah yang sangat penting bagi masyarakat.	Dengan dibangunnya langgar Nurul Asikin baru di Kelurahan Rantau Kujang, akan memper	(Rantau Kujang, Kec. Jenamas)	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tidak tersedianya peralatan Habsyi Al Muslimah Kelurahan Rantau Kujang	Komunitas Habsyi Al Muslimah Kelurahan Rantau Kujang yang membutuhkan peralatan tersebut.	Peralatan Habsyi Al Muslimah Kelurahan Rantau Kujang merupakan alat yang sangat penting dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Tidak tersedianya peralatan tersebut dapat mengganggu kelancaran kegiatan dan mengurangi kualitas acara.	Dengan tersedianya peralatan Habsyi Al Muslimah, akan meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan dan kebudayaan serta memperkuat hubungan sosial antar anggota komunitas Habsyi Al Muslimah Kelurahan Rantau Kujang	(Rantau Kujang, Kec. Jenamas)	
10	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemasangan jaringan listrik di Desa Mahajandau dapat meningkatkan kualitas hidup dan memudahkan aktivitas warga, terutama saat malam har	kses listrik yang memadai dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memudahkan aktivitas pada malam hari.	kses listrik yang memadai dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memudahkan aktivitas pada malam hari.	Dengan adanya akses listrik yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan efek positif pada sektor ekonomi dan pariwisata di Desa Mahajandau.	(Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : RIDA SRI AHLINA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Ketersediaan ruang bermain/ruang praktek sholat siswa Kelurahan Pendang yang kurang memadai	Siswa Madrasah Kelurahan Pendang.	Pembangunan ruang bermain/ruang praktek sholat siswa dengan ukuran Â± 5x7m.	Ruang bermain/ruang praktek sholat yang memadai akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan siswa.	(Pendang, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pagar Madrasah Kelurahan Pendang yang rusak dan perlu dibangun ulang agar lingkungan Madrasah menjadi lebih aman dan nyaman.	Lingkungan Madrasah Kelurahan Pendang.	Pembangunan pagar Madrasah dengan ukuran Â± 50 x 50m dengan bahan cor beton.	Pagar Madrasah yang rusak dapat membahayakan keselamatan dan keamanan siswa dan lingkungan sekitar.	(Pendang, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rumah guru yang rusak dan tidak layak huni dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan kesejahteraan guru.	Guru dan siswa di Desa Gunung Rantau.	Rehabilitasi rumah guru untuk memperbaiki kondisi fisik dan memberikan kenyamanan bagi guru selama mengajar.	Dengan kondisi rumah guru yang lebih baik, guru dapat memberikan pengajaran yang lebih baik pula.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak tersedianya rumah dinas bagi bidan di Desa Marawan Lama.	Bidan yang bertugas di Desa Marawan Lama.	Bidan sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketersediaan rumah dinas akan mempermudah bidan dalam menjalankan tugasnya dan mempercepat respon pada kasus-kasus darurat.	Tersedianya rumah dinas akan membuat bidan tetap tinggal di Desa Marawan Lama dan memperpanjang masa kerja bidan di desa tersebut.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (18 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tidak tersedianya saluran air bersih di Desa Marawan Lama sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.	Masyarakat Desa Marawan Lama.	Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tersedianya saluran air bersih dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	Dengan tersedianya saluran air bersih, masyarakat akan lebih mudah memenuhi kebutuhan air bersih dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Akses jalan masuk Gg RT 16 Kelurahan Pendang membutuhkan pembangunan jembatan kayu.	Warga Gg RT 16 Kelurahan Pendang	Akses jalan masuk Gg RT 16 memerlukan pembangunan jembatan kayu untuk mengatasi hambatan saat musim hujan dan memudahkan akses warga ke tempat lain (60 M X 1.5 M)	Jika jembatan tidak dibangun, maka akses warga ke tempat lain akan terhambat dan memperburuk kondisi jalan.	(Gg RT 16 Kelurahan Pendang, Pendang, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Akses jalan masuk Gg. Selaras RT 17 Kelurahan Pendang yang sempit dan membutuhkan pelebaran untuk mempermudah akses masyarakat.	Masyarakat RT 17 Kelurahan Pendang	Pelebaran akses jalan masuk Gg. Selaras RT 17	Akses jalan masuk yang sempit dapat menghambat aktivitas masyarakat dan memperburuk kondisi lingkungan jika sering terjadi kemacetan.	(g. Selaras RT 17, Pendang, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Akses jalan masuk RT 15 Kelurahan Pendang membutuhkan pembangunan jembatan kayu.	Warga RT 15 Kelurahan Pendang	Akses jalan masuk RT 15 memerlukan pembangunan jembatan kayu untuk mengatasi hambatan saat musim hujan dan memudahkan akses warga ke tempat lain (UK. 45 M)	Jika jembatan tidak dibangun, maka akses warga ke tempat lain akan terhambat dan memperburuk kondisi jalan.	(RT 15 Kelurahan Pendang, Pendang, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Desa Tarusan dan Desa Panarukan tidak terhubung dengan jembatan penghubung, sehingga akses transportasi menjadi terhambat.	Warga Desa Tarusan dan Desa Panarukan, serta pengguna jalan umum yang melintasi kedua desa tersebut.	Perlu dibangun jembatan penghubung antara Desa Tarusan sampai Desa Panrukan.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat keterhubungan antara desa, serta meningkatkan perekonomian lokal.	(Desa Tarusan dan Desa Panarukan,, Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Gang Bersama RT.13 Kelurahan Pendang membutuhkan rekonstruksi	Warga RT.13 Kelurahan Pendang yang menggunakan jalan tersebut.	Gang Bersama RT.13 Kelurahan Pendang kondisinya tidak baik dan membutuhkan rekonstruksi agar aman dan nyaman digunakan	Jika gang tersebut tidak segera diperbaiki, maka dapat membahayakan keselamatan warga dan merusak kendaraan yang melewatinya.	(Gang Bersama RT.13 Kelurahan Pendang, Pendang, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Gang Swadaya RT 6 mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan ulang.	Warga Desa Marawan Lama, khususnya yang tinggal di sekitar Gg. Swadaya RT 6.	Gang Swadaya RT 6 merupakan akses utama bagi warga untuk keluar masuk ke desa dan ke wilayah sekitarnya. Kerusakan gang dapat mengganggu mobilitas warga dan menghambat kegiatan ekonomi.	Perbaikan ulang Gg. Swadaya RT 6 dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di desa dan memudahkan akses bagi warga.	(Gang Swadaya RT 6, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan dalam Kelurahan Pendang yang berlubang dan membutuhkan perbaikan untuk meminimalkan risiko kecelakaan.	Masyarakat Kelurahan Pendang dan pengguna jalan.	Perbaikan jalan yang berlubang	Jalan yang rusak dan berlubang dapat membahayakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan	(Pendang, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan di dalam Desa Tarusan menuju Mampaing RT.9 perlu ditingkatkan kualitasnya.	Warga Desa Tarusan yang tinggal di sekitar Jalan Mampaing RT.9 dan pengguna jalan umum yang melintasi jalan tersebut.	Perlu dilakukan peningkatan jalan di dalam Desa Tarusan menuju Mampaing RT.9 agar dapat dilalui dengan lebih mudah dan aman.	Terdapat anggaran yang cukup dan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan peningkatan jalan.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Malungai Raya sampai KM 55 mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki untuk memastikan kelancaran transportasi dan keselamatan pengguna jalan.	Pengguna jalan umum yang melintasi jalan Malungai Raya sampai KM 55.	Perlu dilakukan perbaikan jalan Malungai Raya sampai KM 55 agar kondisinya menjadi lebih baik.	Perbaikan jalan Malungai Raya sampai KM 55, bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dan meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk masyarakat Desa Malungai Raya dan sekitarnya.	(jalan Malungai Raya sampai KM 55., Malungai Raya, Kec. Gn. Bintang Awai)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Marawan Lama-Jembatan Sungsang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.	Warga Desa Marawan Lama, khususnya yang menggunakan jalan tersebut sebagai akses keluar masuk dari desa.	Jalan ini merupakan akses utama dari desa ke wilayah sekitarnya. Rusaknya jalan dapat menghambat mobilitas warga dan mengganggu kegiatan ekonomi.	Perbaikan jalan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di desa dan memfasilitasi akses warga ke wilayah sekitarnya.	(Jalan Marawan Lama-menuju jembatan Sungsang, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan RT 4-8 Desa Marawan Lama belum tersedia penyiringan sehingga rawan longsor pada musim hujan.	Masyarakat yang menggunakan jalan RT 4-8 Desa Marawan Lama.	Penyiringan jalan sangat penting untuk mencegah longsor dan memperbaiki drainase sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan kerusakan pada jalan.	Dengan adanya penyiringan jalan, akses transportasi dan distribusi barang menjadi lebih lancar dan mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat.	(RT 4-8 Desa Marawan Lama., Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Simpang Pendang menuju Mantarem mengalami kerusakan dan tidak dapat dilalui dengan mudah.	Masyarakat Lama yang menggunakan jalan tersebut.	Rekonstruksi jalan Simpang Pendang menuju Mantarem agar jalan dapat dilalui dengan mudah.	Rekonstruksi jalan akan meningkatkan aksesibilitas ke daerah tersebut dan memudahkan masyarakat Desa Marawan Lama dalam beraktivitas.	(Jalan Simpang Pendang menuju Dusun Mantarem, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang belum tersambung antara Desa Gunung Rantau dan Marawan Lama dapat memperburuk aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.	Masyarakat di Desa Gunung Rantau dan Marawan Lama.	Pembangunan jalan untuk menyambungkan Desa Gunung Rantau dan Marawan Lama.	Dengan adanya jalan yang tersambung, mobilitas masyarakat dapat meningkat dan memudahkan aksesibilitas ke berbagai kebutuhan dan layanan.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang rusak dan sulit dilalui di daerah tersebut yang menghambat aktivitas transportasi dan distribusi barang.	Masyarakat Desa Marawan Baru dan sekitarnya	Masyarakat Desa Marawan Baru dan sekitarnya Keterangan: Pembangunan jalan baru lintas titik 0 dari Marawan Baru hingga Mantarem untuk mempermudah aktivitas transportasi dan distribusi barang.	Dengan adanya jalan baru yang dapat dilalui, akan meningkatkan aksesibilitas transportasi dan distribusi barang di daerah tersebut, serta dapat mendukung perkembangan ekonomi dan akses informasi masyarakat.	(titik 0 dari Marawan Baru-Mantarem, Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang rusak dan tidak terawat di RT 13 Desa Gunung Rantau dapat mempengaruhi aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.	Masyarakat di RT 13 Desa Gunung Rantau.	Rekonstruksi jalan untuk memperbaiki kondisi fisik dan memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di RT 13.	Dengan adanya jalan yang lebih baik, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di RT 13 dapat meningkat dan membantu aktivitas sehari-hari.	(RT 13 Desa Gunung Rantau, Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang rusak dan tidak terawat di RT 5 Desa Gunung Rantau dapat mempengaruhi aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.	Masyarakat di RT 5 Desa Gunung Rantau.	Rekonstruksi jalan untuk memperbaiki kondisi fisik dan memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di RT 5.	Dengan adanya jalan yang lebih baik, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di RT 5 dapat meningkat dan membantu aktivitas sehari-hari.	(RT 5 Desa Gunung Rantau., Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jembatan yang rusak atau tidak memadai untuk digunakan oleh masyarakat Desa Gunung Rantau.	Masyarakat Desa Gunung Rantau, khususnya yang sering melewati jembatan Sungsang dalam kegiatan sehari-hari.	Jembatan Sungsang berfungsi sebagai penghubung antara wilayah-wilayah di Desa Gunung Rantau, sehingga perlu dibangun atau diperbaiki agar dapat digunakan dengan baik dan aman oleh masyarakat.	Masyarakat Desa Gunung Rantau sangat membutuhkan jembatan yang dapat digunakan dengan baik dan aman, sehingga pembangunan/peningkatan Jembatan Sungsang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kurangnya penerangan jalan di sepanjang jalan yang menyebabkan kondisi jalan kurang aman di malam hari.	Pengguna jalan umum yang melintasi jalan tersebut, serta warga sekitar yang memerlukan penerangan jalan untuk keamanan lingkungan.	Perlu dilakukan pembuatan lampu penerangan jalan di sepanjang jalan tersebut.	Pembuatan lampu penerangan jalan, bertujuan untuk meningkatkan kemanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di malam hari.	(Desa Malungai Raya, Malungai Raya, Kec. Gn. Bintang Awai)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (7 Usulan)								
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Balai Desa Desa Marawan Lama mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan.	Masyarakat Desa Marawan Lama yang menggunakan Balai Desa.	Pembangunan ulang Balai Desa agar Balai Desa dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat.	Pembangunan ulang Balai Desa akan meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah desa.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Kepala desa dan staf kantor desa yang menggunakan bangunan tersebut, serta warga desa yang memerlukan pelayanan dari kantor desa	Perlu dilakukan rehab berat bangunan kantor kepala desa agar dapat digunakan kembali dengan aman dan nyaman.	Rehabilitasi kantor desa dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ibu-ibu PKK kurang memiliki keterampilan yang memadai untuk menghasilkan produk kreatif.	Ibu-ibu PKK yang ingin meningkatkan keterampilan dan menghasilkan produk kreatif.	Perlu dilakukan pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu PKK agar dapat menghasilkan produk kreatif yang dapat dijual atau digunakan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.	Pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu PKK, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ibu-ibu PKK dalam berbagai bidang, seperti keterampilan memasak, menjahit, dan lain-lain.	(Malungai Raya, Kec. Gn. Bintang Awai)	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ibu-ibu PKK membutuhkan peralatan rajut untuk meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk kreatif.	Ibu-ibu PKK yang ingin meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk kreatif.	Perlu Pengadaan peralatan Rajut untuk ibu-ibu PKK	Pengadaan peralatan rajut untuk ibu-ibu PKK, bertujuan untuk membantu ibu-ibu PKK dalam meningkatkan keterampilan rajut dan membuka peluang usaha baru.	(Malungai Raya, Kec. Gn. Bintang Awai)	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Karang Taruna membutuhkan tenda sebagai tempat berkumpul atau mengadakan kegiatan.	Anggota Karang Taruna yang membutuhkan tenda sebagai tempat berkumpul atau mengadakan kegiatan.	Perlu diberikan bantuan tenda untuk Karang Taruna agar dapat digunakan sebagai tempat berkumpul atau mengadakan kegiatan.	Bantuan tenda untuk Karang Taruna, bertujuan untuk membantu Karang Taruna dalam memfasilitasi kegiatan sosial masyarakat seperti acara bakti sosial, musyawarah, dan lain-lain.	(Malungai Raya, Kec. Gn. Bintang Awai)	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tidak adanya atau kondisi rusaknya Balai Basarah Hindu yang digunakan untuk berbagai kegiatan adat dan agama di Desa Gunung Rantau.	Masyarakat Desa Gunung Rantau, khususnya yang beragama Hindu dan berkecimpung dalam kegiatan adat dan agama.	Balai Basarah Hindu berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan upacara adat dan agama, sehingga perlu dibangun atau diperbaiki agar dapat digunakan dengan baik dan sesuai fungsinya.	Kegiatan adat dan agama di Desa Gunung Rantau masih sering dilaksanakan, sehingga pembangunan/peningkatan Balai Basarah Hindu akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tidak adanya fasilitas olahraga yang memadai di Desa Marawan Baru yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kebugaran masyarakat.	Karang Taruna Desa Marawan Baru	Pengadaan perlengkapan alat olahraga bulutangkis untuk Karang Taruna Desa Marawan Baru untuk memenuhi kebutuhan fasilitas olahraga masyarakat.	Dengan adanya fasilitas olahraga yang memadai, masyarakat di Desa Marawan Baru akan lebih termotivasi untuk berolahraga dan dapat mendukung kesehatan dan kebugaran mereka.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tidak adanya atau minimnya alat tangkap ikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Gunung Rantau.	Masyarakat Desa Gunung Rantau, khususnya yang berkecimpung dalam kegiatan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian.	Kegiatan penangkapan ikan merupakan mata pencaharian yang penting bagi sebagian masyarakat Desa Gunung Rantau, sehingga perlu diberikan bantuan alat tangkap ikan agar dapat meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan masyarakat.	Masyarakat Desa Gunung Rantau masih memiliki potensi untuk mengembangkan kegiatan penangkapan ikan, sehingga bantuan alat tangkap ikan akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Warga membutuhkan bibit dan pupuk untuk menanam tanaman jagung.	Warga yang membutuhkan bibit dan pupuk untuk menanam tanaman jagung.	Perlu diberikan bantuan bibit dan pupuk tanaman jagung untuk memenuhi kebutuhan warga dalam menanam tanaman jagung.	Bantuan bibit dan pupuk tanaman jagung, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Malungai Raya.	(Malungai Raya, Kec. Gn. Bintang Awai)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Sawah isin di Desa Marawan Lama belum dioptimalkan secara maksimal dalam penanaman tanaman padi.	Petani di Desa Marawan Lama yang memiliki lahan sawah isin.	Percetakan sawah isin (20 ha) di Desa Marawan Lama agar petani dapat memanfaatkan lahan sawah isin secara maksimal dalam penanaman tanaman padi.	Percetakan sawah isin akan meningkatkan produktivitas tanaman padi dan menghasilkan hasil panen yang lebih maksimal.	(Persawahan Isin, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani Desa Marawan Lama belum selesai dibangun dan membutuhkan kelanjutan pembangunan.	Warga Desa Marawan Lama, khususnya yang memiliki lahan pertanian di sepanjang jalan tersebut.	Jalan Usaha Tani merupakan akses utama bagi petani untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar dan tempat lainnya. Jalan yang belum selesai dibangun dapat menghambat mobilitas petani dan mengganggu kegiatan pertanian.	Lanjutan pembangunan jalan Usaha Tani dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan memfasilitasi kegiatan pertanian di desa.	(jalan Usaha Tani Desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani di Desa Marawan Lama-Duruyan tidak memiliki konstruksi yang kuat sehingga sulit dilalui oleh kendaraan dan menyulitkan petani dalam mengangkut hasil panen mereka	Petani dan masyarakat Desa Marawan Lama-Duruyan yang menggunakan jalan Usaha Tani.	Pemasangan cor beton pada jalan Usaha Tani agar jalan lebih kuat dan dapat dilalui oleh kendaraan dengan mudah.	Pemasangan cor beton akan meningkatkan aksesibilitas ke daerah tersebut dan memudahkan petani dalam mengangkut hasil panen mereka.	(Desa Marawan Lama-Duruyan, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menyimpan alat-alat pertanian yang dapat mempengaruhi hasil panen dan kualitasnya.	Petani di Desa Marawan Baru	Pembangunan gudang alat-alat pertanian untuk menyimpan alat-alat pertanian dan membantu meningkatkan hasil panen dan kualitasnya.	Dengan adanya gudang alat-alat pertanian yang memadai, dapat membantu meningkatkan hasil panen dan kualitasnya serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap alat-alat pertanian yang dimiliki petani.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan pasar Desa Marawan Lama rusak dan membutuhkan pembangunan ulang.	Pedagang dan pembeli di pasar Desa Marawan Lama.	Pelabuhan pasar merupakan sarana utama bagi pedagang dan pembeli untuk mengangkut barang dagangan. Rusaknya pelabuhan dapat menghambat aktivitas perdagangan dan mengurangi pendapatan pedagang.	Pembangunan ulang pelabuhan pasar dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan memfasilitasi kegiatan ekonomi di desa.	(Pelabuhan pasar, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (2 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	minimnya akses terhadap jaringan telekomunikasi, terutama akses internet.	warga Desa Marawan baru	Pembangunan menara telekomunikasi akan meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi.	Pembangunan menara telekomunikasi diharapkan dapat memperbaiki akses jaringan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tidak tersedianya akses telekomunikasi yang memadai di Desa Marawan Lama.	Masyarakat Desa Marawan Lama.	Akses telekomunikasi sangat penting untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan melakukan transaksi. Dengan tersedianya menara telekomunikasi, masyarakat dapat mengakses jaringan telekomunikasi dengan mudah dan mempercepat proses komunikasi.	Dengan tersedianya akses telekomunikasi yang memadai, masyarakat dapat meningkatkan akses informasi dan mempermudah proses komunikasi yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (2 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Marawan Lama belum memiliki akses listrik yang memadai.	Masyarakat Desa Marawan Lama.	Pemasangan jaringan listrik PLN/PLTU di Desa Marawan Lama agar masyarakat dapat menggunakan listrik dengan mudah dan memadai.	Pemasangan jaringan listrik akan meningkatkan kualitas hidup dan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Panarukan dan Desa Tarusan belum terhubung dengan jaringan listrik PLN/PLTU, sehingga belum dapat menikmati fasilitas listrik yang memadai.	Warga Desa Panarukan dan Desa Tarusan.	Perlu dilakukan pemasangan jaringan listrik PLN/PLTU dari arah Desa Panarukan ke Desa Tarusan.	Terdapat sumber listrik PLN/PLTU yang memadai untuk menyediakan listrik di kedua desa tersebut.	(Desa Panarukan dan Desa Tarusan., Tarusan, Kec. Dusun Utara)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : ADIYAT NUGRAHA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Mohon rehap SD telang andrau	Guru dan staf pendukung di SD Telang Andrau yang bekerja dalam kondisi yang tidak memadai dan tidak aman.	Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran bagi orang tua dan wali murid siswa di SD Telang Andrau. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya rehabilitasi dan renovasi bangunan sekolah agar siswa dan guru dapat belajar dan bekerja dalam kondisi yang aman dan nyaman.	Kondisi bangunan sekolah yang rusak dan tidak layak huni di SD Telang Andrau dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan siswa, guru, dan staf pendukung di sekolah.	(desa telang andrau, KAB. BARITO SELATAN)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penimbunan di SD Pararapak	Siswa dan orang tua siswa di SD Desa Pararapak	Penimbunan halaman di SD Desa Pararapak dilakukan untuk memperbaiki kondisi halaman yang berlubang dan tidak rata sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam beraktivitas di halaman sekolah.	Tidak ada kendala teknis yang menghambat pelaksanaan penimbunan halaman, seperti masalah tanah atau kondisi cuaca yang tidak mendukung.	(Desa pararpak, KAB. BARITO SELATAN)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rehab poskesdes	Pasien yang telah dirawat di Poskesdes dan memerlukan perawatan lanjutan untuk pemulihan yang optimal.	Program rehabilitasi yang fokus pada perawatan medis untuk mengembalikan fungsi tubuh yang hilang akibat penyakit atau cedera.	Tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung program rehabilitasi, termasuk anggaran dan peralatan medis yang memadai.	(Desa Pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan ambulance desa	Masyarakat Desa yang membutuhkan transportasi darurat untuk keperluan kesehatan.	Ambulans desa akan digunakan sebagai sarana transportasi darurat untuk keperluan kesehatan masyarakat Desa.	Terdapat tenaga medis atau relawan kesehatan yang siap untuk bekerja di ambulans desa.	(desa pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pergantian Bidan desa	Penduduk Desa Danau Masura Masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan	Bidan desa yang sebelumnya bertugas telah pindah atau mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga dibutuhkan penggantinya.	Warga desa mungkin memiliki harapan dan harapan yang berbeda tentang kualitas dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan desa baru.	(Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (10 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Pembuatan Sumur Bor	Masyarakat yang tinggal di daerah yang kekurangan akses air bersih Sekolah atau lembaga pendidikan yang membutuhkan pasokan air untuk keperluan sanitasi dan kebersihan	Sumur bor dibutuhkan untuk memperoleh pasokan air yang cukup dan terjamin kualitasnya	Lokasi sumur bor dapat diidentifikasi dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Mohon dibuat jaringan air bersih (PDAM)	Penduduk yang tinggal di wilayah yang belum memiliki akses ke jaringan air bersih.	Jaringan air bersih adalah sistem distribusi air bersih yang terdiri dari pipa-pipa, pompa-pompa, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk menyediakan air bersih ke rumah-rumah penduduk.	Masyarakat setempat memiliki kesadaran akan pentingnya penggunaan air bersih yang aman dan sehat.	(desa pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Jalan Pakat Sasameh Desa Murung Paken	Masyrakat	Diperlukan peningkatan jalan Desa Murung Paken agar akses ke wilayah tersebut menjadi lebih mudah dan lancar	peningkatan jalan akan membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas bagi warga desa.	(Jalan Pakat Sasameh Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Badan Jalan Danau Masura ke Parigi sebesar 7km	Masyarakat yang tinggal atau bekerja di sekitar Badan Jalan Danau Masura dan Parigi.	Badan Jalan Danau Masura merupakan jalan utama yang menghubungkan beberapa wilayah di sekitarnya, sedangkan Parigi adalah tujuan akhir dari jalan tersebut. Jarak antara Badan Jalan Danau Masura dan Parigi adalah sekitar 7km.	Kondisi jalan Badan Jalan Danau Masura cukup memadai untuk dilalui kendaraan bermotor.	(Desa danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Dangka Menuju Jalan Marga Jaya	Pemerintah setempat dan lembaga terkait yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan.	Jalan Dangka merupakan jalan utama yang menghubungkan beberapa wilayah penting di sekitar kota, termasuk Marga Jaya, yang merupakan pusat perdagangan dan pemerintahan.	Peningkatan jalan Dangka akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	(desa dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perbaikan jalan dari dangka ke telang andrau	Masyarakat sekitar yang memerlukan akses jalan yang baik untuk keperluan sehari-hari seperti berobat, bersekolah, dan lain sebagainya.	Jalan Dangka-Telang Andrau merupakan jalur penghubung antara beberapa desa dan kota, sehingga memiliki volume kendaraan yang cukup tinggi setiap harinya.	Perbaikan jalan yang dilakukan akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, serta mengurangi resiko kecelakaan.	(Desa Telang Andrau, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perbaikan jalan dari telang andrau ke majundre	Masyarakat yang menggunakan jalan dari Telang Andrau ke Majundre, termasuk pengendara mobil, sepeda motor, dan kendaraan umum.	Jalan dari Telang Andrau ke Majundre merupakan jalan yang penting untuk menghubungkan dua daerah tersebut	Perbaikan jalan dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal, dengan memfasilitasi aksesibilitas antara dua daerah tersebut dan memudahkan transportasi barang dan jasa.	(Desa telang andrau, KAB. BARITO SELATAN)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perbaikan jalan di dalam desa	Penduduk desa dan pengunjung yang menggunakan jalan di dalam desa tersebut.	Perbaikan jalan di dalam desa bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk desa serta memudahkan aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.	Perbaikan jalan di dalam desa akan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa dan mempermudah aksesibilitas ke fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, pasar, dan tempat ibadah.	(Desa telang andrau, KAB. BARITO SELATAN)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehab titian tani karena hampir semua rusak parah	pengguna utama titian tani untuk mengakses lahan pertanian atau peternakan.	Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi titian tani agar dapat digunakan kembali oleh petani dan peternak.	Lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang pertanian atau peternakan: Kelompok ini menjadi asumsi karena mereka dapat berperan sebagai mediator antara petani atau peternak dengan pemerintah daerah atau kontraktor	(desa pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	usulan jalan masura	Warga desa Masura yang menggunakan jalan tersebut untuk beraktivitas sehari-hari, seperti pergi ke pasar, ke sekolah, ke kantor, dan ke tempat ibadah.	Kerusakan pada jalan desa Masura menyebabkan terganggunya aktivitas warga dan memperburuk kondisi ekonomi desa.	Perbaikan jalan desa Masura dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa Masura dengan memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas mereka.	(Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu	Masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan dalam melakukan renovasi atau perbaikan rumah mereka.	Bedah rumah adalah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam melakukan perbaikan atau renovasi rumah mereka. Program ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan masyarakat umum.	Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk mencapai kesuksesan program bedah rumah.	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu	Masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan dalam melakukan renovasi atau perbaikan rumah mereka.	Bedah rumah adalah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam melakukan perbaikan atau renovasi rumah mereka. Program ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan masyarakat umum.	Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk mencapai kesuksesan program bedah rumah.	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerangan Lampu Jalan Sampai Sekarang Belum Nyala	Masyarakat yang menggunakan jalan tersebut	Penerangan lampu jalan yang belum nyala dapat menyebabkan bahaya bagi pengguna jalan, terutama pada malam hari	Petugas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan penerangan jalan bekerja secara efektif dan efisien	(desa dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya rumah warga di Desa Danau Masura yang tidak layak huni karena kondisi fisik yang buruk dan membutuhkan perbaikan.	Warga Desa Danau Masura yang memiliki rumah tidak layak huni.	Rumah yang tidak layak huni dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan penghuninya serta mempengaruhi kualitas hidup.	Perbaikan rumah dapat meningkatkan kondisi hunian dan kualitas hidup penduduk di Desa Danau Masura.	(Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Belum Mendapatkan Bantuan Bedah Rumah	Keluarga yang belum mendapatkan bantuan bedah rumah sebelumnya dan tidak memiliki akses atau informasi tentang program bantuan yang tersedia	Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, seperti pengangguran atau buruh kasar, yang sulit untuk memperbaiki rumah mereka karena keterbatasan finansial.	Keluarga yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau, sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan bedah rumah.	(desa dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Mohon program bedah rumah	masyarakat yang kurang mampu agar memiliki hunian yang layak dan sehat.	dari program bedah rumah ini meliputi perbaikan atau renovasi pada rumah yang meliputi perbaikan atap, dinding, lantai,	bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan ini akan dapat memanfaatkannya secara maksimal dan dapat merawat rumahnya dengan baik sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.	(Telang andrau, KAB. BARITO SELATAN)	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (1 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pengadaan pompa air persiapan jika terjadi kebakaran hutan	Tim pemadam kebakaran yang bertugas dalam penanggulangan kebakaran hutan.	Pengadaan pompa air persiapan bertujuan untuk membantu tim pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran hutan dengan cara menyediakan sumber air yang cukup untuk memadamkan api.	Pengadaan pompa air persiapan dilakukan sebelum terjadi kebakaran hutan dan disimpan di dekat lokasi rawan kebakaran. Pompa air ini diasumsikan dapat bekerja dengan baik dan dapat dioperasikan oleh tim pemadam kebakaran yang terlatih.	(Desa pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Usulan)								
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek BPD dan Perangkat Desa	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perangkat Desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Kaur Pembangunan, dan Kaur Kesra Tim pelaksana program pemerintah desa Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di desa	Bimtek BPD dan Perangkat Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.	Pelatihan yang terarah dan terstruktur dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan kapasitas anggota BPD dan perangkat desa dapat berdampak positif pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di desa.	(desa murung paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Usulan Mohon Bantuan Pembangunan Kantor Desa Muara Ripung	Pemerintah Desa Muara Ripung sebagai pengguna utama kantor desa. Penduduk Desa Muara Ripung yang akan mendapatkan pelayanan administrasi dari kantor desa. Pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum yang akan berinteraksi dengan kantor desa.Kantor desa merupakan pusat administrasi yang berfungsi sebagai tempat melayani kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi seperti surat keterangan, permohonan izin, dan sebagainya.	Kantor desa merupakan pusat administrasi yang berfungsi sebagai tempat melayani kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi seperti surat keterangan, permohonan izin, dan sebagainya.	Pembangunan kantor desa yang baru akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi. Pembangunan kantor desa yang baru akan meningkatkan citra pemerintah desa di mata masyarakat.	(Desa Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Naikan Insentif Aparat Desa	Aparat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun/Lingkungan, dan Staf Desa)	Aparat Desa adalah orang-orang yang bekerja di pemerintahan desa dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di desa.	Aparat Desa melakukan pekerjaan yang penting dan krusial dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di desa.	(desa dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Insentif BPD mohon dinaikkan	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Insentif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai pengakuan atas prestasi atau kinerja yang baik.	Kenaikan insentif bagi anggota BPD dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja anggota BPD untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa dan memperoleh hasil yang lebih baik.	(Desa pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan kelompok tani dalam pengolahan nanas parigi	Kelompok tani yang fokus pada budidaya dan pengolahan nanas parigi, terutama di daerah yang potensial untuk pertumbuhan tanaman tersebut.	Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dalam pengolahan nanas parigi menjadi produk bernilai tambah, seperti jus nanas, selai nanas, atau kue nanas.	Kelompok tani yang menjadi sasaran pelatihan ini sudah memiliki pengetahuan dasar tentang budidaya nanas parigi. Pelatihan ini juga diasumsikan akan diadakan di daerah yang mudah diakses oleh kelompok tani, dengan fasilitas yang memadai seperti aula atau ruangan yang dapat menampung peserta pelatihan dengan nyaman.	(Desa pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mohon bantuan bibit jengkol, bantuan pupuk sebanyak 450 Kg untuk pemupukan bibit jengkol yang ada hanya 80 batang, sehingga tidak seimbang	Petani atau pemilik lahan yang memiliki tanaman bibit jengkol dan mengalami kesulitan dalam memupuk tanaman tersebut.	Diperlukan bantuan pupuk sebanyak 450 Kg	Petani atau pemilik lahan mengalami kendala finansial sehingga memerlukan bantuan pupuk untuk memperbaiki pertumbuhan bibit jengkol.	(Telang andrau, KAB. BARITO SELATAN)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Bibit Ternak	para petani atau peternak yang ingin memulai usaha peternakan, namun tidak memiliki modal atau bibit ternak yang cukup.	dibutuhkan dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan dalam bentuk anggaran dan kebijakan yang mendukung.	dibutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti ketersediaan air bersih, akses transportasi yang baik, serta fasilitas pendukung lainnya untuk memudahkan petani atau peternak dalam menjalankan usahanya	(Muara Ripung, Muara Ripung, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelatihan kelompok tani dalam budidaya serei wangi dan budidaya madu kelulut	Petani atau masyarakat yang tertarik dalam budidaya serei wangi dan budidaya madu kelulut sebagai usaha tambahan atau usaha utama.	Pelatihan akan membahas topik-topik seperti pemilihan bibit atau koloni, persiapan lahan, teknik penanaman, perawatan tanaman atau koloni, hama dan penyakit, panen dan pengolahan produk.	Peserta juga diharapkan memiliki akses ke lahan yang cukup untuk budidaya serei wangi dan madu kelulut serta memiliki kemampuan untuk mengelola usaha tersebut setelah pelatihan selesai.	(telang andrau, KAB. BARITO SELATAN)	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mohon di bangun tower telkomsel / xl sehingga mendapat jaringan internet	Orang-orang yang tinggal atau bekerja di daerah yang tidak memiliki akses internet yang memadai.	Daerah yang dimaksud dapat berupa daerah terpencil, daerah yang jauh dari pusat kota, atau daerah yang sulit dijangkau oleh operator internet.	Di daerah tersebut terdapat infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan untuk membangun tower.	(desa pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (6 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Aki Baru Untuk Kantor BPD Desa Murung Paken	Masyarakat	Bantuan Aki Baru Untuk Kantor BPD Desa Murung Paken berguna untuk menghidupkan lampu,	Desa Murung Paken masih belum mendapatkan listrik dari PLN sehingga harus menggunakan aki untuk menghidupkan lampu	(Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Pembangunan Gereja Jemaat GKE Dangka	Jemaat GKE Dangka - Kelompok utama yang menjadi penerima manfaat langsung dari pembangunan gereja.	GKE Dangka adalah gereja yang berada di daerah Dangka dan saat ini sedang membutuhkan bantuan untuk membangun gedung gereja yang lebih besar dan layak huni.	Masyarakat sekitar akan mendukung pembangunan gereja dan tidak ada keberatan atau konflik yang signifikan terkait pembangunan	(desa dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Perbaikan rumah ibadah baik mesjid maupun gereja	Pengurus rumah ibadah Jemaat atau umat yang menggunakan rumah ibadah Pemerintah setempat	Jenis perbaikan yang dibutuhkan, misalnya renovasi atap, dinding, lantai, pintu, dan jendela.	Ada anggaran yang cukup untuk melakukan perbaikan Perbaikan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu aktivitas ibadah	(Desa pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehap rumah ibadah/ gereja katolik	Pengurus Gereja Katolik yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan bangunan gereja.	Rumah ibadah gereja Katolik perlu direhabilitasi untuk menjaga kondisi dan keamanannya serta meningkatkan kenyamanan bagi jemaat yang beribadah.	Jemaat gereja dan pengurus gereja memiliki kesadaran untuk menjaga kondisi dan keamanan bangunan gereja serta memiliki keinginan untuk meningkatkan kenyamanan bagi jemaat yang beribadah.	(Desa Telang Andrau, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Moho Bantuan Aliran Listrik	Masyarakat, Bantuan aliran listrik dapat membantu mereka untuk memiliki akses yang lebih mudah terhadap listrik, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membantu mengurangi kesenjanga	Mereka seringkali mengandalkan sumber listrik yang tidak stabil, seperti generator bensin atau lampu minyak tanah. Bantuan aliran listrik dapat membantu mereka untuk memiliki akses yang lebih mudah terhadap listrik yang stabil dan dapat diandalkan, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membantu meningkatkan produktivitas di daerah tersebut.	bahwa listrik adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan normal, akses yang mudah terhadap listrik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas seseorang.	(Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	mohon bantuan aliran listrik	Kelompok ini mencakup semua individu atau keluarga yang menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di rumah.	Aliran listrik juga sangat penting dalam dunia bisnis dan industri karena banyak mesin dan peralatan memerlukan daya listrik untuk beroperasi.	Ketersediaan aliran listrik yang andal sangat penting untuk menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.	(Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Mohon insentif untuk Ketua RT dinaikkan	Ketua RT	Ingin agar insentif Ketua RT dinaikkan	Ketua RT merasa bahwa insentif yang diberikan saat ini tidak cukup memadai untuk upaya dan waktu yang mereka habiskan dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai Ketua RT.	(telang andrau, KAB. BARITO SELATAN)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : H. SUDIARTO, SE

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Halaman sekolah yang becek dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan menyebabkan ketidaknyamanan bagi siswa dan staf sekolah. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kebersihan, serta dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah.	Kelompok sasaran adalah siswa dan staf sekolah yang menggunakan halaman sekolah tersebut. Selain itu, pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat sekitar juga harus menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam memperbaiki kondisi halaman sekolah dan lingkungan di sekitarnya.	Untuk memperbaiki kondisi halaman sekolah yang becek, dibutuhkan perbaikan atau pengerasan dengan menggunakan material yang memadai. Hal ini memerlukan biaya dan sumber daya yang memadai. Sekolah perlu mengalokasikan dana dan mengembangkan rencana untuk memperbaiki halaman sekolah dan memastikan kebersihan dan kenyamanan lingkungan di sekitar sekolah.	Siswa dan staf yang terkena dampak langsung dari kondisi halaman sekolah yang becek dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di sekolah. Halaman sekolah yang becek mungkin disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, atau faktor teknis seperti drainase yang tidak memadai. Sekolah mungkin tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk memperbaiki halaman sekolah sendiri.	(SD 03 Kelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi perumahan guru SDN 1 Desa Mahajandau dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: Biaya rehabilitasi perumahan yang cukup besar dan sulit dijangkau oleh para guru di SDN 1 Desa Mahajandau. Pembangunan dapat mengganggu aktivitas mengajar dan belajar di SDN 1 Desa Mahajandau. Keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya lokal untuk melaksanakan rehabilitasi perumahan guru.	Kelompok sasaran dari rehabilitasi perumahan guru SDN 1 Desa Mahajandau adalah para guru yang mengajar di SDN 1 Desa Mahajandau dan keluarga mereka, serta masyarakat sekitar yang memiliki kepentingan terhadap kualitas pendidikan di desa.	Rehabilitasi perumahan guru SDN 1 Desa Mahajandau bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian para guru, sehingga dapat memberikan dampak positif pada proses mengajar dan belajar di SDN 1 Desa Mahajandau. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di desa.	Beberapa asumsi yang dapat diambil terkait rehabilitasi perumahan guru SDN 1 Desa Mahajandau adalah: Adanya dukungan dan partisipasi aktif dari para guru, masyarakat, dan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi perumahan guru SDN 1 Desa Mahajandau. Dapat diperoleh sumber daya yang cukup untuk membiayai rehabilitasi perumahan guru. Dapat diatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam rehabilitasi perumahan seperti gangguan aktivitas mengajar dan belajar dan keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya lokal.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi total SDN 1 Desa Mahajandau dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: Biaya rehabilitasi total yang cukup besar dan sulit dijangkau oleh pihak sekolah atau masyarakat sekitar. Pembangunan dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya lokal untuk melaksanakan rehabilitasi total.	Kelompok sasaran dari rehabilitasi total SDN 1 Desa Mahajandau adalah murid-murid SDN 1 Desa Mahajandau dan para guru yang mengajar di sekolah tersebut, serta masyarakat sekitar yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan anak-anak di desa.	SDN 1 Desa Mahajandau merupakan sekolah dasar negeri yang berada di Desa Mahajandau. Rehabilitasi total SDN 1 Desa Mahajandau bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan di sekolah tersebut, sehingga dapat memberikan dampak positif pada proses belajar mengajar dan prestasi anak-anak di Desa Mahajandau.	Beberapa asumsi yang dapat diambil terkait rehabilitasi total SDN 1 Desa Mahajandau adalah: Adanya dukungan dan partisipasi aktif dari pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi total SDN 1 Desa Mahajandau. Dapat diperoleh sumber daya yang cukup untuk membiayai rehabilitasi total sekolah. Dapat diatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam rehabilitasi total seperti gangguan aktivitas belajar mengajar dan keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya lokal.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rumah jabatan korwil bisa mengalami kerusakan fisik karena faktor usia, kondisi alam sekitar, atau kurangnya perawatan. Hal ini bisa mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan bagi penghuni rumah jabatan, sehingga perlu adanya rehab atau perbaikan.	Kordinator Wilayah Kelurahan Mengkatip	Rehab Rumah Jabatan Korwil Kelurahan Mengkatip	Kondisi bangunan yang memburuk: Asumsi utama adalah bahwa kondisi fisik bangunan rumah jabatan Korwil sudah memburuk dan tidak lagi layak huni. Kondisi bangunan yang buruk dapat mengancam keselamatan penghuni dan merusak kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, rehab rumah jabatan Korwil menjadi sangat penting untuk memperbaiki kondisi bangunan tersebut.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantuan meja kursi untuk SMP 1 Atap di Desa Mahajandau dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: Biaya pembelian meja kursi yang cukup besar dan sulit dijangkau oleh pihak sekolah atau masyarakat sekitar. Distribusi meja kursi yang tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan di SMP 1 Atap. Pengadaan meja kursi yang kurang awet dan tidak tahan lama.	Kelompok sasaran dari bantuan meja kursi SMP 1 Atap di Desa Mahajandau adalah murid-murid SMP 1 Atap dan para guru yang mengajar di sekolah tersebut, serta masyarakat sekitar yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan anak-anak di desa.	SMP 1 Atap merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berada di Desa Mahajandau. Bantuan meja kursi bertujuan untuk meningkatkan fasilitas belajar mengajar di sekolah tersebut dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi para murid dan guru.	Beberapa asumsi yang dapat diambil terkait bantuan meja kursi SMP 1 Atap di Desa Mahajandau adalah: Adanya dukungan dan partisipasi aktif dari pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam pengadaan meja kursi SMP 1 Atap di Desa Mahajandau. Dapat diperoleh sumber daya yang cukup untuk membiayai pembelian meja kursi dan distribusinya yang merata dan sesuai kebutuhan. Dapat diatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengadaan meja kursi seperti ketersediaan barang yang berkualitas dan awet.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	WC di sekolah yang mengalami kerusakan parah hingga runtuh mengakibatkan kondisi sanitasi yang tidak layak. Hal ini berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit dan memberikan dampak negatif pada kesehatan siswa dan tenaga pendidik. Selain itu, kondisi WC yang rusak juga dapat mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah secara keseluruhan.	Kelompok sasaran adalah siswa dan staf sekolah yang menggunakan WC tersebut. Selain itu, pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat sekitar juga harus menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam memperbaiki kondisi WC dan sanitasi di sekolah tersebut.	Untuk memperbaiki kondisi WC yang rusak, dibutuhkan perbaikan atau penggantian fasilitas yang rusak, seperti pipa air, toilet, wastafel, dan sebagainya.	WC sekolah yang rusak mungkin disebabkan oleh faktor usia bangunan, kurangnya perawatan dan pemeliharaan, atau kekurangan dana untuk perbaikan dan penggantian fasilitas.	(WC SEKOLAH SMPN 01 Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (8 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan rumah paramedis puskesmas mungkin mengalami kerusakan yang signifikan karena usia bangunan atau faktor lainnya. Kerusakan ini dapat menyebabkan keamanan dan kesehatan penghuni rumah menjadi terancam dan perlu untuk diperbaiki.	Paramedis di Kelurahan Mengkatip	Rehab rumah dinas paramedis yang ada 2 pintu di Kelurahan Mengkatip	Bangunan yang sudah lama dibangun cenderung mengalami kerusakan dan keausan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja bangunan serta dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan penghuni bangunan tersebut.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mess Perawat yang telah berusia lama dan sering digunakan oleh banyak orang mungkin mengalami kerusakan struktural atau masalah lain pada fasilitas seperti kamar mandi, toilet, listrik, dan air. Hal ini membutuhkan perbaikan dan pembaruan agar mess dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh para perawat.	Perawat yang ada di Kelurahan Mengkatip	Rehab Mess Perawat yang ada 3 pintu di Kelurahan Mengkatip	Dengan direhabilitasi, Mess Perawat akan menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi para perawat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka selama tinggal di sana.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Plafon yang sudah tua atau rusak dapat mengancam keselamatan pengunjung dan karyawan Puskesmas. Plafon yang retak atau berlubang dapat memungkinkan air hujan masuk ke dalam bangunan dan merusak lantai, dinding, atau peralatan medis.	Masyarakat Kelurahan Mengkatip	Rehab Plafon total UGD Puskesmas Kelurahan Mengkatip	Beberapa Puskesmas yang sudah berdiri bertahun-tahun biasanya mengalami kerusakan atau keausan pada bangunan dan fasilitasnya. Renovasi berat perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan fisik yang memburuk agar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas yang sudah berusia tua biasanya mengalami kerusakan pada struktur bangunan, seperti atap yang bocor, dinding yang retak, dan lantai yang rusak. Renovasi berat diperlukan untuk memperbaiki dan memperkuat struktur bangunan agar aman dan nyaman untuk digunakan.	Masyarakat Desa Batampang	Renovasi Berat Puskesmas Batampang	Masyarakat membutuhkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan melakukan renovasi berat Puskesmas, diharapkan masyarakat akan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik.	(Desa Batampang, Batampang, Kec. Dusun Hilir)	
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas yang sudah berusia tua biasanya mengalami kerusakan pada struktur bangunan, seperti atap yang bocor, dinding yang retak, dan lantai yang rusak. Renovasi berat diperlukan untuk memperbaiki dan memperkuat struktur bangunan agar aman dan nyaman untuk digunakan.	Masyarakat Desa Batilap	Renovasi Berat Puskesmas Desa Batilap	Masyarakat membutuhkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan melakukan renovasi berat Puskesmas, diharapkan masyarakat akan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik.	(Desa Batilap, Batilap, Kec. Dusun Hilir)	
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas yang sudah berusia tua biasanya mengalami kerusakan pada struktur bangunan, seperti atap yang bocor, dinding yang retak, dan lantai yang rusak. Renovasi berat diperlukan untuk memperbaiki dan memperkuat struktur bangunan agar aman dan nyaman untuk digunakan.	Masyarakat Desa Teluk Timbau	Renovasi berat puskesmas Teluk Timbau	Renovasi berat Puskesmas dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan, baik dari segi jumlah dan kualitas layanan yang disediakan.	(Desa Teluk Timbau, Teluk Timbau, Kec. Dusun Hilir)	
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Salah satu permasalahan yang mungkin menjadi dasar diperlukannya rehab total Puskesmas Pembantu adalah bangunan yang sudah tua dan rusak. Jika bangunan tersebut tidak dirawat secara teratur, maka akan menyebabkan kerusakan yang semakin parah, seperti retak pada dinding atau atap yang bocor. Hal ini dapat membahayakan keselamatan penghuni dan pasien yang datang untuk berobat.	Masyarakat desa Sungai Jaya	Rehab total puskesmas pembantu desa Sungai Jaya	Puskesmas Pembantu di Desa Sungai Jaya mungkin sudah berusia lama dan telah mengalami kerusakan yang parah. Hal ini dapat membahayakan keselamatan penghuni dan pasien yang datang untuk berobat. Oleh karena itu, rehab total diperlukan untuk memperbaiki bangunan agar menjadi lebih aman dan nyaman digunakan.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kekurangan tenaga medis di Desa Mahajandau dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: Ketersediaan pelayanan kesehatan yang terbatas bagi masyarakat Desa Mahajandau. Peningkatan risiko penyakit dan kematian akibat kurangnya tenaga medis yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Kurangnya tenaga medis dapat menghambat program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.	Kelompok sasaran dari kekurangan tenaga medis di Desa Mahajandau adalah seluruh masyarakat desa yang memerlukan pelayanan kesehatan, serta pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan lembaga kesehatan.	Kekurangan tenaga medis di Desa Mahajandau disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain minimnya jumlah tenaga medis yang tersedia, minimnya insentif yang ditawarkan, serta minimnya fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Mahajandau.	Beberapa asumsi yang dapat diambil terkait kekurangan tenaga medis di Desa Mahajandau adalah: Adanya dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah dan lembaga kesehatan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga medis yang tersedia di Desa Mahajandau. Dapat diperoleh sumber daya yang cukup untuk membiayai insentif bagi tenaga medis yang bekerja di Desa Mahajandau. Dapat diatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga medis seperti ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (44 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	PDAM yang belum diperbaiki juga memiliki masalah pada infrastrukturnya. Misalnya, pipa yang bocor, kapasitas air yang tidak mencukupi, instalasi air yang kurang terawat, atau peralatan pengolahan air yang kurang efektif. Infrastruktur yang buruk dapat mengganggu ketersediaan air dan kualitas air yang dihasilkan.	Masyarakat Desa	Dikarenakan fungsi PDAM yang tidak optimal maka PDAM perlu pembenahan agar bisa dinikmati seluruh masyarakat Desa Babai. Penambahan jaringan juga sangat diperlukan.	permintaan air di daerah tersebut cukup tinggi sehingga PDAM perlu melakukan pembenahan untuk meningkatkan kapasitas produksi air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	(Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan siring batu atau bronjong dapat membantu melindungi lingkungan dari kerusakan akibat erosi tanah dan banjir yang dapat menyebabkan pencemaran air dan udara. Hal ini dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperkuat ketahanan lingkungan.	Masyarakat Desa	ukuran kurang lebih 80 Meter	Asumsi dasar pembuatan siring batu atau bronjong di Desa Babai adalah bahwa daerah tersebut memiliki kondisi medan yang tidak stabil, sehingga rawan terjadi erosi tanah, banjir, dan longsor.	(RT. 08 di Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sungai Jaya mengalami keterbatasan penerangan di malam hari, sehingga menyulitkan aktivitas warga dan potensi keamanan menjadi berkurang.	Warga Desa Sungai Jaya yang tinggal di daerah yang minim penerangan atau memiliki akses jalan yang minim penerangan.	bantuan Peneragan di Desa Sungai Jaya. Desa Sungai Jaya merupakan desa yang terletak di daerah pedesaan dan memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Namun, infrastruktur penerangan di desa tersebut masih terbilang minim, terutama di jalan-jalan kecil yang seringkali gelap di malam hari. Hal ini menyulitkan aktivitas warga seperti pulang kerja, aktivitas malam hari, dan kegiatan lainnya. Selain itu, minimnya penerangan di desa ini juga berpotensi meningkatkan tingkat kejahatan di wilayah tersebut.	Masyarakat di Desa Sungai Jaya menyadari pentingnya penerangan yang memadai dan siap untuk berpartisipasi dalam program bantuan penerangan. Tidak ada hambatan teknis atau administratif yang signifikan dalam pelaksanaan program bantuan penerangan di Desa Sungai Jaya. Anggaran yang diberikan untuk program bantuan penerangan cukup untuk memenuhi kebutuhan penerangan di Desa Sungai Jaya.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan pasar di Desa Babai dapat memastikan ketersediaan produk dan barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat setempat, yang mungkin sulit untuk ditemukan di daerah sekitar Desa Babai.	Masyarakat Desa Babai	Pembangunan Pasar di Desa Babai	embuatan pasar di Desa Babai dapat memberikan peluang bagi pengusaha lokal untuk membuka bisnis baru dan memperluas jaringan bisnisnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan perekonomian Desa Babai dan mengurangi tingkat pengangguran.	(Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Akses jalan dari Desa Mahajandau menuju Desa Sungai Jaya belum memadai sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, berdagang, dan lain sebagainya. Jalan yang belum memadai tersebut dapat menyebabkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan menyulitkan transportasi barang.	Masyarakat Desa Mahajandau dan Desa Sungai Jaya, terutama mereka yang membutuhkan akses jalan yang baik dan lancar untuk melakukan aktivitas sehari-hari.	Pembuatan badan jalan Mahajandau menuju SUngai Jaya. Pembuatan badan jalan Desa Mahajandau menuju Desa Sungai Jaya diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat antar desa tersebut. Jalan yang baik dan lancar dapat memudahkan transportasi dan distribusi barang serta meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Proses pembuatan badan jalan dapat meliputi perbaikan jalan yang rusak, pengaspalan, pembuatan jalan baru, dan lain sebagainya.	Asumsi pertama adalah tersedianya anggaran yang cukup untuk membiayai pembuatan badan jalan. Asumsi kedua adalah adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam menjaga keberlangsungan pemeliharaan jalan. Asumsi ketiga adalah adanya tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dalam pembuatan badan jalan.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Akses transportasi yang buruk dari Jenamas ke Desa Rantau Bahuang menyebabkan kesulitan dalam mobilitas penduduk dan transportasi barang, serta menghambat perkembangan ekonomi di daerah tersebut.	Penduduk dan pengusaha di Jenamas dan Desa Rantau Bahuang yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik.	Jenamas merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Desa Rantau Bahuang adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan tersebut. Jalan yang menghubungkan Jenamas dengan Desa Rantau Bahuang saat ini masih berupa jalan tanah yang berlubang dan rusak, sehingga seringkali tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, terutama pada musim hujan.	Dengan dibangunnya jalan yang lebih baik dan layak dari Jenamas ke Desa Rantau Bahuang, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta transportasi barang di daerah tersebut, sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa pembangunan jalan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan dan keamanan jalan yang dibangun.	(Kelurahan Rantau Kujang, Rantau Kujang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Biaya pembangunan yang cukup besar dan sulit dijangkau oleh petani kecil di Desa Mahajandau. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dapat menimbulkan konflik dengan pemilik lahan atau masyarakat sekitar. Kondisi topografi dan tanah yang tidak stabil dapat mempersulit proses pembangunan jalan.	Kelompok sasaran dari pembangunan jalan pertanian di Bengkel Batuah Cakar Ayam/Ramat Beton Desa Mahajandau adalah petani yang memiliki lahan pertanian di sekitar Bengkel Batuah Cakar Ayam/Ramat Beton dan masyarakat Desa Mahajandau yang memerlukan akses jalan yang lebih baik.	Jalan Pertanian bengkel batuah Cakar Ayam /Ramat Beton Desa Mahajandau. Bengkel Batuah Cakar Ayam/Ramat Beton adalah lokasi pembangunan jalan pertanian yang berada di Desa Mahajandau. Pembangunan jalan pertanian ini bertujuan untuk mempermudah akses transportasi bagi petani dan masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.	Adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar dalam pembangunan jalan pertanian. Dapat diperoleh sumber daya yang cukup untuk membiayai pembangunan jalan pertanian. Dapat diatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pembangunan jalan pertanian seperti konflik lahan dan kondisi topografi dan tanah yang sulit.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, pembangunan beberapa jembatan di Desa Babai menjadi sebuah tuntutan. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.	Masyarakat Desa	Pembuatan Jembatan PAM di RT, 19, RT.15, dan RT.16 Desa Babai	Adanya dukungan dari pemerintah dalam pembangunan jembatan di Desa Babai. Dukungan tersebut dapat berupa anggaran, regulasi, dan bantuan teknis untuk memastikan pembangunan jembatan berjalan dengan baik.	(RT, 19, RT.15, dan RT.16 Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Desa-desa yang terletak di daerah terpencil sering mengalami kesulitan untuk terhubung dengan desa-desa lainnya atau pusat kota. Pembangunan jalan antar desa dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat distribusi barang dan jasa.	Masyarakat Desa Babai	Pembuatan Jalan Desa Babai menuju Desa Teluk Betung Sampai Pematang dengan panjang 1,5 KM dan Lebar 3 Meter Desa Babai	Dengan adanya jalan antar desa yang baik, distribusi barang dapat dilakukan secara lebih efisien dan murah, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.	(Desa Babai menuju Desa Teluk Betung, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Desa Sungai Jaya tidak memiliki jalan penghubung yang baik dengan daerah sekitarnya, sehingga menyulitkan transportasi barang dan orang serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.	Masyarakat Desa Sungai Jaya, pengusaha, dan pelaku ekonomi lokal yang bergantung pada transportasi untuk menjalankan bisnis mereka.	Jalan Penghubung antar desa Sungai Jaya - Desa Mahajandau, Desa Sungai Jaya - Tampulang menghubungkan ke Kuala Kapuas. Desa Sungai Jaya terletak di daerah yang terpencil dan akses jalan menuju ke daerah sekitarnya sangat terbatas dan sulit dilalui. Hal ini menyulitkan transportasi barang dan orang serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Pengusaha dan pelaku ekonomi lokal juga kesulitan untuk mengirim barang dan produk mereka ke daerah sekitarnya karena kurangnya infrastruktur jalan yang memadai.	Pembuatan jalan penghubung yang memadai dapat membuka akses dan meningkatkan koneksi Desa Sungai Jaya dengan daerah sekitarnya, serta membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, asumsi yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalan penghubung tersebut serta kemungkinan adanya resistansi dari masyarakat lokal dalam hal pengambilan lahan untuk pembangunan jalan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan jalan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Desa yang memiliki infrastruktur jalan yang belum memadai atau belum terhubung dengan jalan raya utama, seringkali mengalami keterbatasan sarana transportasi. Jembatan atau titian yang dibangun dapat memperkuat konektivitas desa dengan daerah lainnya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.	Masyarakat Desa	Pembuatan Jembatan/ Titian untuk sarana penyebrangan dari Puskesmas ke batang sungai di Desa Babai	Pembuatan jembatan atau titian penyebrangan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan, sehingga dapat membantu mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	(RT. 18 Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	esa Babai mungkin memiliki kebutuhan untuk transportasi lokal, seperti mengangkut hasil pertanian atau barang-barang dari dan ke desa-desa sekitar, yang membutuhkan jembatan atau titian sebagai jalur transportasi yang lebih aman dan efektif.	Masyarakat Desa	Pembuatan jembatan/titian sepanjang 200 Meter di RT. 16 Desa Babai	Adanya kebutuhan yang mendesak atau permintaan masyarakat yang kuat terhadap pembangunan jembatan atau titian, yang dapat memperkuat motivasi dan komitmen pemerintah dan pihak terkait untuk melaksanakan pembangunan tersebut.	(RT. 16 Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Gang di desa seringkali memiliki kondisi yang buruk, sulit dilalui, dan tidak memadai untuk kendaraan. Hal ini menyebabkan akses transportasi menjadi sulit, khususnya bagi masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan.	Masyarakat Desa Babai RT. 04	Peningkatan Gang RT.04 di Desa Babai	Meningkatkan aksesibilitas: Penyediaan jalan yang baik dan layak dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan meningkatnya aksesibilitas, maka dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	(RT 04 Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Gang Kakau di RT. 24 Jalan Kaladan di Kelurahan Hilir Sper membutuhkan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di sana.	Warga yang tinggal di RT. 24 Jalan Kaladan di Kelurahan Hilir Sper, terutama yang menggunakan gang Kakau sebagai akses menuju rumah mereka.	Peningkatan Gang Kakau RT.24 Jalan kalandan di Kelurahan Hilir Sper	Penyebab gang Kakau yang berlubang dan sempit adalah karena minimnya perawatan dan pemeliharaan oleh pemerintah setempat. Peningkatan gang Kakau dapat meningkatkan kualitas hidup dan keamanan warga di sekitar area tersebut.	(Gg. Kakau RT. 24 Jalan Kaladan Kelurahan Hilir Sper, KAB. BARITO SELATAN)	
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Gang Keluarga di RT. 07 Desa Talio membutuhkan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di sana. Gang tersebut saat ini kondisinya rusak, sehingga sulit untuk dilalui oleh warga, terutama pada saat hujan.	Warga yang tinggal di RT. 07 Desa Talio, terutama yang menggunakan Gang Keluarga sebagai akses menuju rumah mereka.	Peningkatan gang Keluarga RT.07 Desa Talio	Penyebab Gang Keluarga yang rusak parah adalah karena minimnya perawatan dan pemeliharaan oleh pemerintah setempat. Peningkatan Gang Keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup dan keamanan warga di sekitar area tersebut. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam perbaikan Gang Keluarga dapat mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan kualitas hasilnya.	(Gg. Keluarga RT.07 di Desa Talio, Talio, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa RT.05-06 di Desa Sungai Jaya memiliki kondisi yang buruk dan sulit dilalui, sehingga menghambat akses dan mobilitas masyarakat setempat.	Masyarakat Desa Sungai Jaya, khususnya mereka yang tinggal di sekitar Jalan Desa RT.05-06 dan sering menggunakan jalan tersebut.	Peningkatan Jalan Desa RT.05 - 06 dengan volume 600 Meter di Desa Sungai Jaya. Jalan Desa RT.05-06 di Desa Sungai Jaya memiliki panjang sekitar 600 meter dan kondisinya buruk, berlubang dan berbatu sehingga sulit dilalui. Hal ini menghambat akses dan mobilitas masyarakat yang memerlukan akses jalan tersebut untuk beraktivitas sehari-hari, seperti menuju ke tempat kerja, sekolah, atau ke pusat kesehatan.	Peningkatan jalan Desa RT.05-06 dapat meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat setempat, sehingga memudahkan kegiatan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, asumsi yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan jalan tersebut serta kemungkinan adanya resistensi dari masyarakat lokal dalam hal pengambilan lahan untuk perbaikan jalan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula dampak jangka panjang dari perbaikan jalan terhadap perekonomian lokal dan kemandirian masyarakat dalam memelihara jalan tersebut agar tetap terjaga dengan baik.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa RT.09-10 di Desa Sungai Jaya memiliki kondisi yang buruk dan sulit dilalui, sehingga menghambat akses dan mobilitas masyarakat setempat.	Masyarakat Desa Sungai Jaya, khususnya mereka yang tinggal di sekitar Jalan Desa RT.09-10 dan sering menggunakan jalan tersebut	Jalan Desa RT.09-10 di Desa Sungai Jaya memiliki panjang sekitar 375 meter dan kondisinya buruk, berlubang dan berbatu sehingga sulit dilalui. Hal ini menghambat akses dan mobilitas masyarakat yang memerlukan akses jalan tersebut untuk beraktivitas sehari-hari, seperti menuju ke tempat kerja, sekolah, atau ke pusat kesehatan.	Peningkatan jalan Desa RT.09-10 dapat meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat setempat, sehingga memudahkan kegiatan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, asumsi yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan jalan tersebut serta kemungkinan adanya resistensi dari masyarakat lokal dalam hal pengambilan lahan untuk perbaikan jalan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula dampak jangka panjang dari perbaikan jalan terhadap perekonomian lokal dan kemandirian masyarakat dalam memelihara jalan tersebut agar tetap terjaga dengan baik.	(Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir., Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa RT.09-10 di Desa Sungai Jaya memiliki kondisi yang buruk dan sulit dilalui, sehingga menghambat akses dan mobilitas masyarakat setempat.	Masyarakat Desa Sungai Jaya, khususnya mereka yang tinggal di sekitar Jalan Desa RT.09-10 dan sering menggunakan jalan tersebut	Jalan Desa RT.09-10 di Desa Sungai Jaya memiliki panjang sekitar 375 meter dan kondisinya buruk, berlubang dan berbatu sehingga sulit dilalui. Hal ini menghambat akses dan mobilitas masyarakat yang memerlukan akses jalan tersebut untuk beraktivitas sehari-hari, seperti menuju ke tempat kerja, sekolah, atau ke pusat kesehatan.	Peningkatan jalan Desa RT.09-10 dapat meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat setempat, sehingga memudahkan kegiatan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, asumsi yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan jalan tersebut serta kemungkinan adanya resistensi dari masyarakat lokal dalam hal pengambilan lahan untuk perbaikan jalan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula dampak jangka panjang dari perbaikan jalan terhadap perekonomian lokal dan kemandirian masyarakat dalam memelihara jalan tersebut agar tetap terjaga dengan baik.	(Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir., Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Kertak Hamparang di Kelurahan Mengkatip memiliki akses yang terbatas dan sulit dilalui karena tidak adanya jembatan yang menghubungkan kedua sisi jalan yang terpisah oleh sungai. Akibatnya, warga yang tinggal di sekitar jalan ini kesulitan untuk mengakses fasilitas umum seperti pasar, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah. Selain itu, kendaraan yang ingin melintasi jalan ini harus memutar jauh, menghabiskan waktu dan biaya lebih banyak.	Warga yang tinggal di sekitar Jalan Kertak Hamparang di Kelurahan Mengkatip. Kendaraan yang melintasi jalan ini.	Pembangunan jembatan di Jalan Kertak Hamparang dapat memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas di wilayah tersebut, meningkatkan kualitas hidup warga, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di sekitar jalan ini. Namun, perlu diperhatikan juga dampak lingkungan yang mungkin timbul selama proses pembangunan jembatan, seperti kerusakan alam sekitar, gangguan kebisingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat selama pelaksanaan proyek pembangunan jembatan.	Pembangunan jembatan di Jalan Kertak Hamparang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta kendaraan di sekitar jalan ini. Dengan adanya jembatan, warga dapat lebih mudah dan cepat mengakses fasilitas umum, serta kendaraan dapat melintasi jalan ini dengan lebih efisien.	(Jalan Kertak Hamparang Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan sungai Lunuk di Desa Mahajandau mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat digunakan lagi. Hal ini membuat aksesibilitas ke dan dari Desa Mahajandau terganggu, terutama bagi warga yang membutuhkan akses ke fasilitas dan sumber daya penting di sekitarnya. Selain itu, juga bisa menghambat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.	Masyarakat Desa Mahajandau yang membutuhkan aksesibilitas ke dan dari desa, termasuk pekerja, pelajar, pengusaha, dan orang yang membutuhkan akses ke fasilitas dan sumber daya penting di sekitarnya.	Jembatan sungai Lunuk merupakan jembatan penghubung penting di Desa Mahajandau yang menghubungkan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Rehabilitasi jembatan ini diperlukan untuk memperbaiki kerusakan dan memastikan kembali fungsi jembatan yang aman dan dapat digunakan. Proses rehab jembatan ini dapat meliputi perbaikan struktur, penggantian material, dan perbaikan akses jalan ke jembatan	Asumsi pertama adalah anggaran untuk rehab jembatan sudah tersedia atau bisa diperoleh dengan mudah. Asumsi kedua adalah adanya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam memperbaiki jembatan. Asumsi ketiga adalah adanya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk memperbaiki jembatan dan menjaga keberlangsungan pemeliharaannya.	(Sungai Lunuk Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan yang menuju kesekolahan di RT 17 Desa Rantau Kujang nmengalami kerusakan sehingga membutuhkan rehab.	Siswa, guru, dan masyarakat yang tinggal di RT 17 Kelurahan Rantau Kujang dan membutuhkan akses ke sekolah tersebut.	Kelurahan Rantau Kujang merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Jembatan yang menghubungkan RT 17 Kelurahan Rantau Kujang dengan sekolah di daerah tersebut mengalami kerusakan, seperti kayu yang lapuk, terdapat lubang dan retak-retak, sehingga membuat akses ke sekolah menjadi sulit dan berbahaya terutama pada musim hujan.	Dengan direhabilitasinya jembatan yang menghubungkan RT 17 Kelurahan Rantau Kujang dengan sekolah, diharapkan dapat memudahkan akses dan mobilitas siswa, guru, dan masyarakat yang membutuhkan akses ke sekolah tersebut, serta mengurangi risiko kecelakaan akibat kondisi jembatan yang buruk. Selain itu, perbaikan jembatan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas ke fasilitas umum lainnya. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa rehabilitasi jembatan harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	(RT 17 Kelurahan Rantau Kujang, Rantau Kujang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan yang rusak atau tidak terawat dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Jembatan yang tidak stabil atau lemah dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal.	Masyarakat Desa Babai	Rehab Jebatan PAM Panjang 175 Meter dan Lebar 2 Meter di Desa Babai	jika diasumsikan bahwa jembatan di Desa Babai mengalami kerusakan atau sudah tua, maka beberapa alasan mengapa perbaikan dan rehabilitasi jembatan diperlukan misalnya ka jembatan di Desa Babai rusak atau tidak terawat, hal tersebut dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan seperti pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Jembatan yang tidak stabil atau lemah dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal.	(RT 01 di Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan titian jembatan panjang 125 M di RT. 09 Gg. Rajawali Desa Babai.	Masyarakat Desa	Pembuatan titian jembatan panjang	jembatan titian tersebut sangat berguna bagi masyarakat sekitar	(RT. 09 Gg. Rajawali Desa Babai., KAB. BARITO SELATAN)	
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Permasalahan yang mendasari perbaikan jalan yang rusak berat sepanjang 150 meter adalah adanya jalan yang tidak lagi layak dan aman untuk dilalui. Hal ini dapat mengganggu mobilitas dan aksesibilitas masyarakat serta mengakibatkan kerusakan pada kendaraan.	Kelompok sasaran dari perbaikan jalan yang rusak berat ini adalah masyarakat yang membutuhkan akses jalan yang aman dan layak, serta para pengendara yang sering melintasi jalan tersebut. Selain itu, perbaikan jalan yang rusak juga akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan industri yang membutuhkan akses jalan yang lancar dan cepat.	Kegiatan perbaikan jalan yang rusak berat ini meliputi berbagai tahap mulai dari perencanaan, pengadaan material, hingga pelaksanaan. Pelaksanaan perbaikan jalan yang rusak berat ini harus dilakukan dengan baik dan benar, serta memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan para pekerja dan pengguna jalan. Setelah perbaikan jalan selesai, perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin agar jalan tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal.	Asumsi dari perbaikan jalan yang rusak berat ini adalah akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan dalam berkendara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.	(Di Wilayah Balai Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Puskesmas seringkali berada di wilayah yang sulit dijangkau, terutama di daerah pedesaan yang jalan dan aksesnya kurang baik. Jika tidak ada jembatan titian yang memadai, maka akses menuju puskesmas menjadi sulit dan menyulitkan bagi masyarakat sekitar.	Masyarakat kelurahan mengkatip	Rehab jembatan/ titian menuju puskesmas Kelurahan Mengkatip	Jembatan titian diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan masyarakat sekitar dalam mengakses layanan kesehatan yang disediakan oleh puskesmas, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
44	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Selain anggaran yang terbatas, proses rehabilitasi jembatan juga memerlukan sumber daya seperti tenaga ahli, bahan bangunan, dan peralatan yang memadai. Keterbatasan sumber daya ini bisa menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi jembatan.	Masyarakat Desa Babai	Rehab Jembatan sepanjang 200 Meter dan lebar 1 Meter di RT. 01Desa Babai	Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan memperbaiki kondisi infrastruktur jembatan yang rusak.	(RT 01 Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (8 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kurangnya alat tangkap ikan yang dimiliki oleh warga Kelurahan Rantau Kujang menyebabkan penurunan hasil tangkapan dan penghasilan nelayan di daerah tersebut.	Warga Kelurahan Rantau Kujang yang berprofesi sebagai nelayan atau memiliki usaha perikanan.	Kelurahan Rantau Kujang merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Kelurahan ini memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan atau memiliki usaha perikanan. Namun, banyak warga di daerah tersebut yang masih menggunakan alat tangkap tradisional yang kurang efektif dan tidak ramah lingkungan.	Dengan memberikan bantuan alat tangkap ikan yang modern dan ramah lingkungan kepada warga Kelurahan Rantau Kujang, diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan dan penghasilan nelayan di daerah tersebut. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di daerah tersebut. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa pemberian bantuan harus disertai dengan pendidikan dan pelatihan bagi warga mengenai penggunaan alat tangkap yang baik dan benar serta pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.	(Kelurahan Rantau Kujang, Rantau Kujang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nelayan di Desa Rantau Bahuang kurang memiliki akses dan peralatan yang memadai untuk menangkap ikan, sehingga mengalami kesulitan dalam mencari nafkah dan memperoleh hasil tangkapan yang cukup.	Nelayan di Desa Rantau Bahuang yang membutuhkan bantuan alat untuk menangkap ikan.	banyak dari nelayan di desa ini kurang memiliki akses dan sarana alat tangkap ikan yang memadai, seperti jaring ikan atau perahu yang baik, sehingga produksi ikan yang dihasilkan menjadi rendah dan berdampak pada kesejahteraan hidup mereka.	Dengan diberikan bantuan alat tangkap ikan yang memadai kepada nelayan di Desa Rantau Bahuang, diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas nelayan dalam menangkap ikan, serta mengurangi penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan sumber daya laut. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa bantuan harus diberikan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nelayan, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	(Desa Rantau bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Petani ikan di Desa Mahajandau mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan karamba, bibit, dan pakan untuk usaha budidaya ikan mereka. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitas usaha budidaya ikan di daerah tersebut.	Petani ikan di Desa Mahajandau yang ingin memperoleh bantuan karamba, bibit, dan pakan untuk usaha budidaya ikan mereka. Pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan seperti pemerintah, LSM, atau organisasi swadaya masyarakat.	Desa Mahajandau memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah budidaya ikan yang produktif, namun petani ikan di sana mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan karamba, bibit, dan pakan untuk usaha mereka. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitas usaha budidaya ikan di daerah tersebut. Bantuan tersebut dapat berupa karamba, bibit ikan yang unggul, dan pakan ikan yang berkualitas.	Pemerintah dan LSM memiliki dana dan sumber daya yang cukup untuk memberikan bantuan kepada petani ikan di Desa Mahajandau. Petani ikan di Desa Mahajandau memiliki kemauan dan keterampilan untuk mengelola usaha budidaya ikan mereka dengan baik jika diberikan bantuan yang cukup.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Petani ikan di Desa Mahajandau mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan karamba, bibit, dan pakan untuk usaha budidaya ikan mereka. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitas usaha budidaya ikan di daerah tersebut.	Petani ikan di Desa Mahajandau yang ingin memperoleh bantuan karamba, bibit, dan pakan untuk usaha budidaya ikan mereka. Pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan seperti pemerintah, LSM, atau organisasi swadaya masyarakat.	Desa Mahajandau memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah budidaya ikan yang produktif, namun petani ikan di sana mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan karamba, bibit, dan pakan untuk usaha mereka. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitas usaha budidaya ikan di daerah tersebut. Bantuan tersebut dapat berupa karamba, bibit ikan yang unggul, dan pakan ikan yang berkualitas.	Pemerintah dan LSM memiliki dana dan sumber daya yang cukup untuk memberikan bantuan kepada petani ikan di Desa Mahajandau. Petani ikan di Desa Mahajandau memiliki kemauan dan keterampilan untuk mengelola usaha budidaya ikan mereka dengan baik jika diberikan bantuan yang cukup.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan lagi mengalami kerusakan dan kemunduran, baik karena faktor alam seperti erosi, degradasi tanah, atau faktor manusia seperti pembukaan lahan atau urbanisasi. Kondisi ini dapat mengakibatkan hilangnya sumber daya pertanian dan kehilangan mata pencaharian bagi petani, serta dapat berdampak pada ketersediaan pangan di daerah tersebut.	Kelompok sasaran utama adalah petani atau pemilik lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan lagi. Selain itu, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya mengembalikan produktivitas lahan pertanian tersebut.	Untuk mengembalikan produktivitas lahan pertanian yang tidak digunakan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penanaman tanaman yang tepat, penggunaan pupuk organik, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Dalam hal ini, diperlukan juga dukungan dan bantuan dari pihak pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pelatihan, modal, dan peralatan yang diperlukan untuk mengembalikan produktivitas lahan pertanian. Selain itu, dapat juga dilakukan promosi dan pengembangan pasar untuk memasarkan hasil panen dari lahan pertanian tersebut. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat lokal, serta dapat meningkatkan ketersediaan pangan di daerah tersebut.	Lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi lingkungan, perubahan kebijakan, atau perubahan kondisi sosial ekonomi di daerah tersebut. Tidak semua petani atau pemilik lahan memiliki sumber daya atau kemampuan untuk mengembalikan produktivitas lahan pertanian yang tidak digunakan. Kondisi lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan mata pencaharian petani, serta dapat mempengaruhi ketersediaan pangan di daerah tersebut.	(Jalan Pakat Pahari 1 Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan seluas 2 hektar yang perlu dibersihkan mungkin mengalami penumpukan sampah, rumput liar, atau hutan belukar. Kondisi ini dapat mengurangi produktivitas lahan, mempengaruhi estetika lingkungan, dan meningkatkan risiko kebakaran atau kecelakaan di daerah tersebut.	Kelompok sasaran utama adalah pemilik lahan yang memerlukan pembersihan, seperti pemerintah, pemilik tanah swasta, atau lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, masyarakat lokal dan sukarelawan juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembersihan lahan.	Pembersihan lahan seluas 2 hektar dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemotongan rumput, penebangan pohon, dan pengangkutan sampah. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembersihan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Selain itu, dapat juga dilakukan promosi dan pengembangan program pembersihan lahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan nilai estetika dan produktivitas lahan tersebut.	Lahan seluas 2 hektar yang perlu dibersihkan mungkin terbengkalai atau tidak terawat dalam waktu yang lama. Tidak semua pemilik lahan memiliki sumber daya atau kemampuan untuk membersihkan lahan tersebut. Pembersihan lahan yang tidak terawat memerlukan biaya dan sumber daya yang memadai.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Sawah yang terletak di daerah yang sulit dijangkau dapat menghambat akses petani untuk memasuki sawah dan melakukan aktivitas pertanian. Hal ini dapat menghambat produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	Kelompok sasaran utama adalah para petani yang membutuhkan akses yang lebih mudah dan aman ke sawah mereka. Selain itu, pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal juga dapat menjadi kelompok sasaran yang terlibat dalam upaya pembuatan jalan titian ini.	Pembuatan jalan titian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasangan batu-batu kecil, pengaspalan, atau penambahan tanah pada daerah yang tidak rata. Dalam hal ini, dapat dilibatkan petugas pembangunan jalan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau dapat juga dilakukan melalui aksi sukarelawan dari masyarakat lokal. Pembuatan jalan titian dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan aksesibilitas petani ke sawah, dan mengurangi risiko kecelakaan terkait dengan kegiatan pertanian. Selain itu, pembuatan jalan titian juga dapat memberikan manfaat untuk memperkuat konektivitas masyarakat di daerah tersebut dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi daerah.	Pembuatan jalan titian yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kecelakaan yang terkait dengan kegiatan pertanian.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jika lahan sawah tidak dibersihkan dengan baik, maka dapat menjadi tempat berkembang biak bagi serangga dan hama yang dapat menyebar penyakit pada tanaman padi.	Masyarakat Desa Babai	Pembersihan Lahan Sawah di Desa Babai	Pembersihan lahan sawah secara teratur dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi dan meningkatkan hasil panen.	(Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Pelabuhan Batang dapat memudahkan aksesibilitas dan mobilitas barang maupun manusia ke daerah lain. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Babai	Masyarakat Desa Babai	Pembuatan Pelabuhan Batang di RT. 02 Desa Babai	engan adanya Pelabuhan Batang, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat. Hal ini karena pelabuhan dapat memfasilitasi arus barang dan jasa yang lebih lancar, Pelabuhan tersebut juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk melakukan aktifitas.	(RT. 02 Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kelurahan Mengkatip merupakan daerah pesisir yang memiliki potensi ekonomi melalui sektor perikanan dan kelautan. Namun, akses transportasi dan sarana pendukung yang memadai masih menjadi kendala utama bagi pengembangan sektor tersebut.	Warga Kelurahan Mengkatip, terutama nelayan yang membutuhkan akses transportasi dan sarana pendukung di daerah tersebut.	Pembuatan pelabuhan umum di depan Gereja GKE Kelurahan Mengkatip dapat memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas di wilayah tersebut serta memberikan dampak positif bagi sektor perikanan dan kelautan, seperti peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Selain itu, pelabuhan umum ini juga dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan lain-lain. Biaya pembangunan pelabuhan umum tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, organisasi sosial, dan donatur swasta. Dalam pembangunan pelabuhan umum, perlu diperhatikan juga aspek keselamatan dan keamanan, serta keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemeliharaannya.	Pembuatan pelabuhan umum di depan Gereja GKE Kelurahan Mengkatip dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di daerah pesisir serta mendukung kegiatan sosial dan keagamaan di gereja tersebut.	(di Depan Gereja GKE Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kelurahan Mengkatip merupakan daerah pesisir yang memiliki potensi ekonomi melalui sektor perikanan dan kelautan. Namun, akses transportasi dan sarana pendukung yang memadai masih menjadi kendala utama bagi pengembangan sektor tersebut. Selain itu, Gereja GKE di Kelurahan Mengkatip juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang membutuhkan akses yang mudah bagi jemaat dan pengunjung.	Warga Kelurahan Mengkatip, terutama nelayan dan jemaat Gereja GKE yang membutuhkan akses transportasi dan sarana pendukung di daerah tersebut.	Pembuatan pelabuhan umum di depan Gereja GKE Kelurahan Mengkatip dapat memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas di wilayah tersebut serta memberikan dampak positif bagi sektor perikanan dan kelautan, seperti peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Selain itu, pelabuhan umum ini juga dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan di gereja, seperti kegiatan bakti sosial dan acara gereja. Biaya pembangunan pelabuhan umum tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, organisasi sosial, dan donatur swasta. Dalam pembangunan pelabuhan umum, perlu diperhatikan juga aspek keselamatan dan keamanan, serta keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemeliharaannya.	Pembuatan pelabuhan umum di depan Gereja GKE Kelurahan Mengkatip dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di daerah pesisir serta mendukung kegiatan sosial dan keagamaan di gereja tersebut.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pasar Desa Mahajandau mengalami kerusakan dan kekurangan fasilitas yang memadai sehingga menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Selain itu, kondisi pelabuhan yang buruk dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat.	Masyarakat Desa Mahajandau dan sekitarnya yang menggunakan pelabuhan Pasar Desa Mahajandau sebagai tempat bongkar muat barang dan sebagai akses transportasi laut.	Pembuatan atau rehab pelabuhan Pasar Desa Mahajandau diperlukan untuk memperbaiki kondisi pelabuhan yang buruk dan memadai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Pelabuhan yang baik dan lengkap dapat meningkatkan efisiensi transportasi laut dan meningkatkan potensi perekonomian di daerah tersebut. Proses pembuatan atau rehab pelabuhan dapat meliputi perbaikan dermaga, pembangunan gudang barang, pengadaan alat bongkar muat, dan lain sebagainya.	Asumsi pertama adalah tersedianya anggaran yang cukup untuk membiayai pembuatan atau rehab pelabuhan. Asumsi kedua adalah adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam menjaga keberlangsungan pemeliharaan pelabuhan. Asumsi ketiga adalah adanya tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dalam pembuatan atau rehab pelabuhan.	(Desa Mahajandau Kecamatan Dusun Hilir., Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sungai Jaya memiliki akses terbatas terhadap teknologi telekomunikasi dan internet, sehingga sulit untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang lain secara online.	Masyarakat Desa Sungai Jaya, khususnya pelajar, pengusaha, dan pekerja yang membutuhkan akses internet untuk kepentingan pendidikan, bisnis, dan pekerjaan.	Desa Sungai Jaya merupakan daerah yang terpencil dan jauh dari pusat kota, sehingga infrastruktur telekomunikasi dan internet belum tersedia secara merata di seluruh wilayah. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi bisnis online. Selain itu, pelajar juga kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran secara online, sedangkan pengusaha dan pekerja sulit untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa koneksi internet yang stabil.	Peningkatan akses telekomunikasi dan internet di Desa Sungai Jaya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka peluang bisnis baru, dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Namun, asumsi yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan internet di daerah tersebut serta kemungkinan adanya resistansi dari masyarakat lokal dalam menggunakan teknologi baru.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (25 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Areal makam di Desa Mahajandau mengalami penimbunan siring sehingga mengganggu fungsi dan kenyamanan bagi pengunjung dan keluarga yang sedang berkunjung ke makam. Penimbunan siring ini juga dapat berdampak pada kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat.	Pengunjung dan keluarga yang berkunjung ke makam di Desa Mahajandau, serta masyarakat sekitar yang terdampak oleh penimbunan siring.	Penimbunan siring areal makam muslim di Desa Mahajandau. Areal makam di Desa Mahajandau merupakan tempat yang dihormati dan dijadikan sebagai tempat ziarah oleh masyarakat setempat. Namun, dengan adanya penimbunan siring, maka kondisi lingkungan sekitar makam menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Penimbunan siring dapat menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit.	Asumsi pertama adalah adanya kesadaran dari masyarakat dan pihak terkait untuk memperbaiki kondisi siring di areal makam. Asumsi kedua adalah tersedianya anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan siring di areal makam. Asumsi ketiga adalah adanya kerja sama antara pihak desa dan masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar areal makam.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan untuk Baju dan Kerudung seragam ibu Yasinan langgar Baiturrahmah Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas.	ibu Yasinan langgar Baiturrahmah	Bantuan Baju dan kerudung tersebut digunakan untuk ibu-ibu yasinan dalam melaksanakan acara yasinan.	Dengan diberikan bantuan baju dan kerudung yang sesuai dengan tradisi agama kepada ibu-ibu yang sering mengikuti kegiatan Yasinan di lingkungan mereka, diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan mereka selama kegiatan Yasinan. Selain itu, dengan penampilan yang baik dan sesuai dengan tradisi agama, diharapkan dapat meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan dalam kegiatan Yasinan. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian dengan tradisi agama yang berlaku, serta tidak menimbulkan ketergantungan atau ketergantungan pada bantuan tersebut.	(Desa RAntau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan untuk kelompok yasinan di Desa Babai	Masyarakat Desa Babai / kelompok yasinan Darul Mutaqqin Desa Babai	Bantuan	Bantuan yang diberikan pada kelompok yasinan dapat membantu menjaga keberagaman budaya beragama di masyarakat.	(Kelompok Yasinan Darul Mutaqqin Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan untuk Majelis Zikir dan Shalawat di Desa Babai	Majelis Zikir dan Shalawat di Desa Babai	Bantuan untuk Majelis Zikir dan Shalawat di Desa Babai	Bantuan yang diberikan pada kelompok untuk Majelis Zikir dan Shalawat di Desa Babai dapat membantu memperkuat hubungan sosial antara masyarakat dan kelompok-kelompok agama.	(Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Desa Babai mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk menyediakan tenda dan kursi untuk acara masyarakat. Ini dapat mencakup anggaran terbatas atau keterbatasan fisik dalam hal jumlah tenda dan kursi yang tersedia. Dengan tersedianya kursi dan tenda, acara tersebut dapat menjadi lebih nyaman bagi peserta, sehingga mereka dapat lebih menikmati acara tersebut.	Masyarakat Desa Babai	Masyarakat desa Babai meminta tenda dan kursi untuk melaksanakan acara-acara yang ada di Desa Babai.	desa Babai mungkin membutuhkan kursi dan tenda untuk acara-acara seperti upacara adat, pertemuan masyarakat, perayaan hari raya, atau acara-acara sosial lainnya.	(RT. 11 Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Desa Sungai Jaya belum memiliki tempat yang representatif untuk kegiatan kebudayaan dan adat istiadat masyarakat setempat.	Masyarakat Desa Sungai Jaya, khususnya mereka yang aktif dalam menjaga dan mempromosikan kebudayaan dan adat istiadat lokal.	Pembuatan Balai Adat untuk Desa Sungai Jaya. Desa Sungai Jaya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang kaya, namun belum memiliki tempat yang representatif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan budaya dan adat istiadat. Saat ini, kegiatan-kegiatan tersebut sering dilaksanakan di ruang terbuka atau di balai desa yang tidak cukup besar dan representatif.	Pembuatan balai adat dapat menjadi pusat kegiatan kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Desa Sungai Jaya yang akan memperkuat rasa kebersamaan dan mempromosikan kebudayaan dan adat istiadat setempat. Namun, asumsi yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk membangun balai adat tersebut serta kemungkinan adanya resistansi dari masyarakat lokal dalam hal pengambilan lahan untuk pembangunan balai adat. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula dampak jangka panjang dari pembangunan balai adat terhadap keberlanjutan dan pelestarian kebudayaan dan adat istiadat setempat.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja GKE Kaharap di Desa Mahajandau membutuhkan lebih banyak pastori untuk melayani jemaat di daerah tersebut. Masalahnya adalah sulitnya menemukan pastori yang memiliki kualifikasi yang tepat dan mau melayani di daerah terpencil seperti Mahajandau.	Gereja GKE Kaharap di Desa Mahajandau Calon pastori yang berminat untuk melayani di daerah terpencil seperti Mahajandau.	Gereja GKE Kaharap di Desa Mahajandau mengalami kekurangan pastori yang dapat membimbing dan melayani jemaat dengan baik. Kekurangan ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan pertumbuhan spiritual jemaat. Selain itu, Mahajandau merupakan daerah terpencil yang sulit dijangkau dan memiliki tantangan khusus dalam pelayanan gereja.	Calon pastori tidak tertarik untuk melayani di daerah terpencil seperti Mahajandau karena alasan kesulitan akses dan minimnya fasilitas. Gereja GKE Kaharap di Desa Mahajandau mungkin kesulitan untuk menarik dan mempertahankan pastori yang memiliki kualifikasi yang tepat untuk melayani di daerah terpencil.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	kehadiran mushola di daerah yang rawan lonsor dapat memicu kerusakan lingkungan yang lebih luas. Jika suatu bencana lonsor terjadi, material bangunan dari mushola dapat menjadi penyebab tambahan kehancuran pada area sekitarnya.	Masyarakat Desa Babai	Masyarakat Desa Babai mengusulkan untuk pemindahan langgar/mushola karena ditempat yang ada rawan terkena longsor.	Jika langgar atau mushola terletak di daerah yang rawan bencana alam atau kecelakaan, maka pemindahan ke lokasi yang lebih aman dapat menjadi pilihan yang tepat untuk memastikan keamanan jamaah dan lingkungan sekitar.	(RT. 01, Babai, Kec. Karau Kuala)	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kelurahan Mengkatip merupakan daerah yang memiliki akses yang sulit dan terbatas, terutama di daerah pesisir yang terpisah oleh sungai. Hal ini menyebabkan kendaraan darat tidak bisa melintasi sungai tersebut dan mengakibatkan kesulitan dalam melakukan transportasi darurat, seperti mengangkut pasien atau korban kecelakaan ke rumah sakit terdekat.	Warga Kelurahan Mengkatip, khususnya mereka yang membutuhkan transportasi darurat, seperti pasien atau korban kecelakaan.	Pembangunan bangunan untuk transportasi ambulan speedboat di Kelurahan Mengkatip merupakan solusi alternatif untuk memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas di wilayah tersebut. Dalam pembangunan bangunan tersebut, perlu diperhatikan juga aspek keselamatan dan keamanan, serta keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemeliharaannya. Bantuan pembangunan bangunan untuk transportasi ambulan speedboat di Kelurahan Mengkatip dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, organisasi sosial, dan donatur swasta. Hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi warga setempat terutama pada situasi darurat.	Pembangunan bangunan untuk transportasi ambulan speedboat di Kelurahan Mengkatip dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat waktu tanggap darurat kesehatan pada pasien atau korban kecelakaan di daerah tersebut.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kelurahan Mengkatip merupakan daerah yang padat penduduknya, namun fasilitas rumah ibadah yang tersedia masih terbatas. Hal ini menyulitkan umat GPDI (Gereja Protestan di Indonesia) yang tinggal di wilayah tersebut untuk beribadah dan mengadakan kegiatan sosial keagamaan. Selain itu, kondisi bangunan rumah ibadah yang sudah ada juga kurang memadai dan membutuhkan perbaikan.	Umat GPDI yang tinggal di Kelurahan Mengkatip. Gereja Protestan di Indonesia (GPDI) setempat yang membutuhkan bantuan pembangunan rumah ibadah.	Pembangunan rumah ibadah GPDI di Kelurahan Mengkatip dapat memenuhi kebutuhan umat dalam beribadah dan mengadakan kegiatan keagamaan yang lebih efektif dan efisien. Dalam pembangunan rumah ibadah tersebut, perlu diperhatikan juga aspek keselamatan dan keamanan, serta keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemeliharaannya. Bantuan pembangunan rumah ibadah GPDI di Kelurahan Mengkatip dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, organisasi sosial, dan donatur swasta.	Bantuan pembangunan rumah ibadah GPDI di Kelurahan Mengkatip dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas fasilitas rumah ibadah bagi umat GPDI di wilayah tersebut. Dengan adanya rumah ibadah yang memadai, umat GPDI dapat lebih mudah dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan sosial.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Langgar Baiturrahmah di Desa Rantau Bahuang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	Masyarakat Desa Rantau Bahuang yang membutuhkan tempat ibadah yang layak dan membutuhkan tempat untuk kegiatan sosial dan keagamaan.	Langgar Baiturrahmah merupakan sebuah tempat ibadah umat Islam yang terletak di Desa Rantau Bahuang, Kabupaten Barito Seltan. Namun, langgar ini mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	Dengan diberikan bantuan perbaikan dan renovasi pada Langgar Baiturrahmah di Desa Rantau Bahuang, diharapkan dapat memberikan tempat ibadah yang layak bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan tersebut. Selain itu, dengan keberadaan langgar yang baik dan terawat, diharapkan juga dapat mempererat hubungan dan solidaritas antara masyarakat setempat. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa bantuan harus diberikan dengan tepat dan transparan, serta tidak menimbulkan ketergantungan atau ketergantungan pada bantuan tersebut.	(Desa Rantau Bahuang, Rantau Bahuang, Kec. Jenamas)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Masjid di Desa Sungai Jaya mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat.	Masyarakat Desa Sungai Jaya yang menggunakan masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi masjid seperti pengurus masjid dan donatur.	Masjid di Desa Sungai Jaya mengalami kerusakan pada beberapa bagian, seperti atap yang bocor, dinding yang retak, dan lantai yang rusak. Hal ini dapat mengganggu aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat setempat yang menggunakan masjid sebagai tempat berkumpul dan beribadah. Oleh karena itu, perlu dilakukan rehabilitasi dan perbaikan pada masjid agar dapat kembali digunakan secara optimal.	Rehabilitasi masjid di Desa Sungai Jaya dapat meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat serta memperbaiki tampilan fisik masjid yang merupakan landmark penting di desa. Namun, asumsi yang perlu dipertimbangkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk rehab masjid serta adanya pengawasan dan pemeliharaan yang baik dari pihak pengurus masjid dan masyarakat setempat agar masjid tetap dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pengurus masjid dan donatur dalam hal pengumpulan dan penggunaan dana untuk rehab masjid.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
13	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Masjid di Kelurahan Mengkatip memiliki teras yang sempit dan tidak memadai untuk menampung jamaah yang ingin berkumpul atau menunggu waktu sholat. Hal ini menyulitkan bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah dan juga mengurangi kenyamanan dan keamanan di sekitar masjid.	Jamaah masjid di Kelurahan Mengkatip yang membutuhkan ruang lebih untuk berkumpul dan menunggu waktu sholat.	Pelebaran teras masjid di Kelurahan Mengkatip dapat memenuhi kebutuhan jamaah dalam beribadah dan mengadakan kegiatan keagamaan yang lebih efektif dan efisien. Dalam pelebaran teras tersebut, perlu diperhatikan juga aspek keselamatan dan keamanan, serta keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemeliharaannya. Biaya pelebaran teras masjid tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, organisasi sosial, dan donatur swasta.	Pelebaran teras masjid kurang lebih 150 juta di Kelurahan Mengkatip dapat meningkatkan kapasitas dan kenyamanan tempat ibadah bagi jamaah masjid. Dengan adanya teras yang lebih luas, jamaah dapat berkumpul dan menunggu waktu sholat dengan lebih nyaman dan aman.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Desa Sungai Jaya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama bahan makanan karena terbatasnya akses dan harga yang tinggi.	Masyarakat Desa Sungai Jaya, khususnya keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dan rentan terhadap kenaikan harga bahan makanan.	Bantuan Bahan sembako/ Pasar Murah di Desa Sungai Jaya. Desa Sungai Jaya terletak di daerah yang terpencil dan akses ke pasar dan pusat perbelanjaan yang lebih besar sangat terbatas. Harga bahan makanan di desa tersebut cenderung lebih tinggi daripada di daerah sekitarnya, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi lemah.	Bantuan bahan sembako atau pasar murah dapat membantu masyarakat Desa Sungai Jaya memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dapat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, asumsi yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program bantuan sembako atau pasar murah tersebut serta kemungkinan adanya penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam pendistribusian bantuan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula dampak jangka panjang dari program bantuan sembako atau pasar murah terhadap perekonomian lokal dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
15	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat yang membutuhkan bantuan peralatan tukang biasanya berasal dari kalangan ekonomi lemah yang tidak mampu membeli peralatan tersebut.	Masyarakat Desa Babai	Bantuan peralatan tukang untuk masyarakat Desa Babai	Bantuan peralatan tukang dapat membantu masyarakat yang kurang mampu meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka, sehingga dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.	(RT. 04 Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pekuburan di Desa Sungai Jaya belum memiliki siring atau saluran pembuangan yang memadai sehingga mengakibatkan genangan air di sekitar area pemakaman, yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan.	Masyarakat Desa Sungai Jaya, khususnya mereka yang memiliki kerabat atau keluarga yang telah meninggal dan dimakamkan di pekuburan Desa Sungai Jaya.	Pekuburan di Desa Sungai Jaya memiliki luas sekitar 20 x 30 meter dan belum dilengkapi dengan siring atau saluran pembuangan yang memadai sehingga ketika terjadi hujan, air dapat menggenang di sekitar area pemakaman. Hal ini mengakibatkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan, seperti meningkatnya risiko penyebaran penyakit dan menimbulkan bau yang tidak sedap.	Pembangunan siring atau saluran pembuangan di pekuburan Desa Sungai Jaya dapat meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar area pemakaman, sehingga memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, asumsi yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk membangun siring tersebut, serta perlu adanya pengawasan dan pemeliharaan yang baik dari pihak desa dan masyarakat setempat agar siring tetap berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan lainnya.	(Desa Sungai Jaya, Sungai Jaya, Kec. Dusun Hilir)	
17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan atau rehabilitasi gereja GKE di Desa Mahajandau Kecamatan Dusun Hilir yang membutuhkan biaya sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000.	Gereja GKE di Desa Mahajandau Kecamatan Dusun Hilir dan jemaatnya.	Gereja GKE di Desa Mahajandau Kecamatan Dusun Hilir membutuhkan pembenahan atau rehabilitasi karena kondisinya yang sudah tidak layak untuk digunakan. Anggaran sebesar Rp. 100.000.000 diperlukan untuk membiayai pembangunan atau rehabilitasi gereja tersebut.	Terdapat kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang layak dan representatif. Gereja GKE di Desa Mahajandau Kecamatan Dusun Hilir belum terawat dengan baik sehingga membutuhkan rehabilitasi atau pembenahan. Kemungkinan terdapat kendala dalam pengumpulan dana atau sumber pembiayaan untuk pembangunan atau rehabilitasi gereja GKE tersebut. Asumsi bahwa biaya sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000 sudah termasuk semua biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan atau rehabilitasi gereja tersebut, seperti biaya bahan bangunan, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya.	(Gereja GKE di Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	pembangunan langgar yang ada belum sepenuhnya bisa tercover karena masih ada hal-hal yang masih belum ada, dan diperlukannya penambahan dana untuk lanjutan pembangunan langgar/mushola di desa Babai.	Masyarakat Desa	usulan pokir Reses Anggota DPRD Kab. Barito Selatan	mushola/langgar tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang berada di SImpang 3 Desa Babai, maka diharapkan dapat terealisasi tambahan pembangunan tersebut.	(Simpang 3 di Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
19	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan lanjutan Langgar An&Nuur di Desa Mahajandau memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu, perlu diperhatikan kelayakan lingkungan sekitar dan izin dari pihak berwenang. Selain itu, sumber daya manusia dan material yang memadai juga harus tersedia untuk menyelesaikan proyek ini.	Kelompok sasaran dari proyek ini adalah masyarakat setempat yang akan menggunakan langgar untuk beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, proyek ini juga dapat menarik wisatawan dan dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal.	Pembangunan lanjutan Langgar An&Nuur di Desa Mahajandau bertujuan untuk memperbaiki fasilitas dan kondisi langgar yang mungkin sudah rusak atau tidak layak pakai. Pembangunan lanjutan dapat meliputi pembangunan struktur bangunan, atap, lantai, dinding, pintu, jendela, fasilitas sanitasi, dan tata ruang. Selain itu, juga dapat dilakukan penambahan fasilitas seperti ruang pertemuan, perpustakaan, tempat parkir, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan.	Asumsi dari proyek ini adalah bahwa anggaran dan sumber daya manusia yang cukup akan tersedia untuk menyelesaikan proyek ini. Selain itu, asumsi juga bahwa izin dari pihak berwenang dapat diperoleh dengan mudah dan bahwa proyek ini tidak akan menimbulkan dampak buruk pada lingkungan sekitar. Selain itu, asumsi juga bahwa masyarakat setempat akan mendukung dan memanfaatkan fasilitas langgar yang dibangun dengan baik.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembuatan pagar keliling cor beton halaman dan atap gereja di Kaharap Desa Mahajandau dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: Biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar dan atap gereja yang cukup besar, terutama jika harus menggunakan bahan yang berkualitas dan tahan lama. Kemungkinan adanya kendala teknis dalam pembuatan pagar dan atap gereja, seperti kesulitan dalam pengukuran dan pengecoran yang dapat mempengaruhi kualitas hasil akhir. Dapat memakan waktu yang cukup lama dalam pembuatan, yang dapat mengganggu kegiatan ibadah dan aktivitas di sekitar gereja.	Kelompok sasaran dari pembuatan pagar keliling cor beton halaman dan atap gereja di Kaharap Desa Mahajandau adalah seluruh jemaat gereja, pengurus gereja, serta pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan kontraktor.	Pembuatan pagar keliling cor beton halaman dan atap gereja di Kaharap Desa Mahajandau bertujuan untuk meningkatkan kualitas fisik bangunan gereja dan melindungi halaman gereja dari hewan ternak dan kerusakan akibat cuaca. Namun, proses pembuatan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti ketersediaan bahan, biaya, dan waktu.	Beberapa asumsi yang dapat diambil terkait pembuatan pagar keliling cor beton halaman dan atap gereja di Kaharap Desa Mahajandau adalah: Adanya dana yang cukup untuk membiayai pembuatan pagar keliling cor beton halaman dan atap gereja yang berkualitas dan tahan lama. Adanya kontraktor yang handal dan memiliki pengalaman dalam pembuatan pagar dan atap gereja yang dapat mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul. Pengaturan waktu pembuatan yang baik agar tidak mengganggu kegiatan ibadah dan aktivitas sekitar gereja.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	
21	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Perbaikan dan rehab masjid Nurul Huda di Desa Mahajandau akan memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu, proses perbaikan dan rehab harus memperhatikan keselamatan dan keamanan konstruksi agar tidak membahayakan umat yang beribadah di masjid. Sumber daya manusia dan material yang memadai juga harus tersedia untuk menyelesaikan proyek ini.	Kelompok sasaran dari proyek ini adalah umat Muslim di Desa Mahajandau dan sekitarnya yang akan menggunakan masjid untuk beribadah. Selain itu, proyek ini juga dapat menarik wisatawan dan dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal.	Proyek perbaikan dan rehab masjid Nurul Huda bertujuan untuk memperbaiki fasilitas dan kondisi masjid yang mungkin sudah rusak atau tidak layak pakai. Perbaikan dapat meliputi perbaikan struktur bangunan, perbaikan atap, lantai, dinding, pintu, jendela, dan fasilitas sanitasi seperti toilet dan wudhu. Selain itu, juga dapat dilakukan pembenahan tata ruang dan penambahan fasilitas seperti ruang pertemuan, perpustakaan, dan tempat parkir.	Asumsi dari proyek ini adalah bahwa anggaran dan sumber daya manusia yang cukup akan tersedia untuk menyelesaikan proyek ini. Selain itu, asumsi juga bahwa proses perbaikan dan rehab akan memperhatikan keselamatan dan keamanan konstruksi agar tidak membahayakan umat yang beribadah di masjid. Selain itu, asumsi juga bahwa izin dari pihak berwenang dapat diperoleh dengan mudah dan bahwa proyek ini tidak akan menimbulkan dampak buruk pada lingkungan sekitar.	(Desa Mahajandau, Mahajandau, Kec. Dusun Hilir)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Permasalahan yang mendasari pembangunan Betang Kedamangan adalah penurunan jumlah rumah adat Betang yang masih terpelihara di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan modernisasi dan urbanisasi telah mengakibatkan hilangnya sebagian besar rumah adat tradisional di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan Betang Kedamangan ini dapat menjadi salah satu upaya untuk melestarikan budaya dan warisan suku Dayak.	Kelompok sasaran dari pembangunan Betang Kedamangan adalah masyarakat setempat dan wisatawan yang datang untuk mengunjungi Betang Kedamangan. Dengan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat dan melestarikan budaya dan warisan suku Dayak.	dalam pembangunan Betang Kedamangan perlu memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian budaya serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam pembangunan juga harus melibatkan masyarakat setempat agar memiliki peran aktif dalam menjaga, merawat dan memperkenalkan warisan budaya suku Dayak pada generasi mendatang.	Asumsi dari pembangunan Betang Kedamangan adalah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan menarik wisatawan untuk datang dan mengunjungi Betang Kedamangan. Wisatawan yang datang ke Betang Kedamangan akan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat, seperti meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan budaya suku Dayak kepada masyarakat luas.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
23	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Permintaan tambahan tarub yang tidak dapat terpenuhi di Kelurahan Mengkatip.	Masyarakat Kelurahan Mengkatip yang membutuhkan tambahan tarub	Permintaan tambahan tarub kurang kebih berjumlah 8 tarub yang dibutuhkan di Kelurahan Mengkatip. taruf tersebut digunakan untuk acara-acra yang dilaksanakan di Kelurahan Mengkatip.	terdapat kebutuhan masyarakat yang khusus terhadap tenda tarub, mungkin karena lebih cocok atau lebih sesuai dengan tradisi atau kebiasaan lokal.	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	
24	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PHBI, meminta dana untuk hari-hari besar Islam untuk Desa Babai	Masyarakat desa Babai	Dana untuk hari-hari besar Islam	Desa Babai mungkin memiliki anggaran yang terbatas untuk mempersiapkan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya. Oleh karena itu, dana tambahan dapat membantu Desa Babai untuk mengadakan acara yang lebih meriah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.	(Desa Babai, Babai, Kec. Karau Kuala)	
25	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Uang pembinaan dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota KORWIL, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam mengelola wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini akan berdampak positif pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.	Korwil yang ada di Kelurahan Mengkatip	Uang pembinaan untuk Korwil di Kelurahan Mengkatip	Anggota KORWIL membutuhkan dukungan dan sumber daya yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif dan efisien. Uang pembinaan dapat membantu dalam membiayai program-program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kerja anggota KORWIL	(Kelurahan Mengkatip, Mengkatip, Kec. Dusun Hilir)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : Ir. RAHMATO RAHMAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kurangnya fasilitas perumahan yang layak bagi para guru, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di wilayah tersebut.	Guru-guru di Desa Marawan Baru	Proyek ini bertujuan untuk merehabilitasi perumahan guru di Desa Marawan Baru.	Rehabilitasi perumahan guru dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para guru, yang dapat berdampak positif pada kualitas pendidikan di Desa Marawan Baru.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (13 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kondisi sungai Jayo yang tercemar akibat sampah dan limbah domestik masyarakat.	Masyarakat desa Marawan Lama yang menggunakan sungai Jayo sebagai sumber air atau tempat aktivitas sehari-hari.	Sungai Jayo memiliki peran penting sebagai sumber air dan tempat aktivitas masyarakat di desa Marawan Lama.	Jika sungai Jayo dibersihkan secara teratur, maka kondisi sungai menjadi lebih bersih dan sehat sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya infrastruktur pengamanan tepi sungai Barito di Desa Marawan Lama dapat menyebabkan terjadinya erosi dan longsor yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat.	Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar tepi Sungai Barito di Desa Marawan Lama.	Sungai Barito merupakan salah satu sumber air utama dan tempat aktivitas masyarakat di Desa Marawan Lama. Pembuatan siring tepi sungai dapat mengurangi risiko erosi dan longsor yang dapat mengancam keselamatan masyarakat serta fasilitas umum di sekitar sungai.	Jika dilakukan pembuatan siring tepi sungai yang memadai di Desa Marawan Lama, maka risiko terjadinya erosi dan longsor dapat dikurangi sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar tepi Sungai Barito. Selain itu, infrastruktur pengamanan tepi sungai juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar sungai dan mempertahankan kelestariannya.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya infrastruktur pembuangan air di RT.06-RT.07 desa Marawan Lama yang dapat menyebabkan banjir dan genangan air.	Masyarakat di RT.06-RT.07 desa Marawan Lama yang terdampak banjir dan genangan air akibat kurangnya infrastruktur pembuangan air.	Infrastruktur pembuangan air yang memadai dapat mengurangi risiko banjir dan genangan air yang dapat merusak fasilitas dan kesehatan masyarakat.	ika dibangun saluran/parit pembuangan air yang memadai, maka risiko banjir dan genangan air di RT.06-RT.07 desa Marawan Lama dapat dikurangi sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dan terhindar dari risiko kesehatan.	(RT.06-RT.07 desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan dalam Desa Tarusan mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan agar dapat diakses dengan baik oleh masyarakat.	Masyarakat yang tinggal dan bekerja di Desa Tarusan serta masyarakat yang melewati jalan tersebut.	Jalan dalam Desa Tarusan merupakan akses utama yang menghubungkan Desa Tarusan dengan daerah sekitarnya. Peningkatan jalan akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat sehingga dapat mempercepat pengiriman barang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Peningkatan jalan dalam Desa Tarusan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Reong - Desa Mampaing masih dalam kondisi yang buruk, sehingga sulit dilalui dan mengganggu aktivitas masyarakat.	Masyarakat Desa Reong dan Mampaing	Pembangunan jalan Desa Reong - Desa Mampaing akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, terutama dalam hal transportasi barang dan jasa	Pembangunan jalan Desa Reong - Desa Mampaing memberikan potensi untuk pengembangan ekonomi.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Marawan Baru menuju Mantarem yang rusak.	Masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi Marawan Baru menuju Mantarem.	Dibutuhkan perbaikan/pembangunan jalan Marawan Baru menuju Mantarem sejauh 5 km untuk memperbaiki aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi daerah tersebut.	Dengan adanya perbaikan jalan, masyarakat dan pengguna jalan dapat melakukan aktivitas dengan lebih mudah dan cepat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memudahkan distribusi barang dan jasa.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan penghubung belum memiliki lapisan aspal sehingga mudah rusak dan sulit dilalui terutama pada musim hujan.	Masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, termasuk pengguna jalan umum dan kendaraan barang.	Jalan Desa Bantai Bambure ke jalan kabupaten, dan jalan penghubung jalan Provinsi Ampah Muara Teweh	Pengerasan aspal dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan yang menghubungkan RT.06 ke jalan kabupaten km20 - rampamea tidak memiliki jembatan sehingga sulit dilalui terutama pada musim hujan.	Masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, termasuk pengguna jalan umum dan kendaraan barang.	Pembangunan jembatan diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dalam transportasi dan memperbaiki aksesibilitas masyarakat.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.	(RT.06 Desa Bantai Bambure, Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan di RT.14 Kelurahan Pendang perlu direhabilitasi agar aman dan nyaman digunakan.	Masyarakat yang sering melewati jembatan RT.14 Kelurahan Pendang.	Jembatan RT.14 Kelurahan Pendang mengalami kerusakan dan mungkin berbahaya untuk digunakan.	Setelah direhabilitasi, jembatan RT.14 Kelurahan Pendang akan menjadi lebih aman dan nyaman digunakan oleh masyarakat yang melewatinya.	(Pendang, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan RT.1 dan RT.2 Kelurahan Pendang perlu direvitalisasi agar lebih baik dan nyaman digunakan.	Masyarakat yang tinggal di sekitar RT.1 dan RT.2 Kelurahan Pendang yang sering menggunakan jalan tersebut.	Jalan RT.1 dan RT.2 Kelurahan Pendang mengalami kerusakan yang cukup parah, seperti berlubang dan berdebu.	Setelah direvitalisasi, kondisi jalan RT.1 dan RT.2 Kelurahan Pendang akan menjadi lebih baik dan nyaman digunakan oleh masyarakat.	(RT.1 dan RT.2 Kelurahan Pendang, Pendang, Kec. Dusun Utara)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehab Gang Swadaya RT. 06 & 07 desa Marawan Lama	Penduduk di sekitar gang tersebut	Gang Swadaya RT.06 & 07 emiliki masalah dengan kondisi yang tidak terawat,	Penyediaan fasilitas yang lebih baik dan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sekitar gang tersebut.	(Gang Swadaya RT. 06 & 07 desa Marawan Lama, Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terkonstruksinya jalan dalam desa Marawan Lama	Penduduk desa Marawan Lama	Konstruksi jalan yang buruk dapat menyebabkan kesulitan bagi penduduk desa dalam akses transportasi dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.	Peningkatan kualitas jalan dapat meningkatkan aksesibilitas desa Marawan Lama dan memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduknya.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tidak adanya jembatan menghubungkan Desa Tarusan dan Desa Panarukan menghambat mobilitas masyarakat dan pengiriman barang.	Masyarakat yang tinggal dan bekerja di Desa Tarusan dan Desa Panarukan serta pengusaha dan pedagang yang melakukan pengiriman barang.	Pembangunan jembatan akan memudahkan akses dan mobilitas masyarakat antara Desa Tarusan dan Desa Panarukan serta mempercepat pengiriman barang. Selain itu, jembatan juga akan meningkatkan koneksi dan integrasi antara kedua desa.	Pembangunan jembatan penghubung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (1 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pembangunan Taman Desa desa Marawan Lama	Penduduk desa Marawan Lama	Pembangunan Taman Desa desa Marawan Lama sebagai tempat rekreasi dan tempat berkumpul bagi penduduk desa.	Penyediaan fasilitas yang lebih baik dan pengelolaan yang lebih efektif dapat meningkatkan manfaat taman desa sebagai tempat rekreasi dan tempat berkumpul bagi penduduk desa.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor BPD Desa Bantai Bambure mengalami kerusakan atau kurang layak pakai sehingga memerlukan rehabilitasi atau pembangunan baru.	BPD Desa Bantai Bambure.	Kantor BPD Desa Bantai Bambure mengalami kerusakan atau kurang layak pakai sehingga perlu direhabilitasi atau dibangun kembali agar bisa berfungsi dengan baik.	Dengan adanya kantor BPD yang baik, maka pelayanan administrasi dan keuangan di Desa Bantai Bambure akan lebih efektif dan efisien.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	minimnya ruang publik untuk kegiatan masyarakat di Desa Bantai Bambure, sehingga perlu dibangun gedung serba guna/pertemuan yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya.	masyarakat umum dan berbagai kelompok kegiatan	Pembangunan Gedung Serba Guna/Pertemuan Desa Bantai Bambure: Permasalahan yang dihadapi adalah minimnya ruang publik untuk kegiatan masyarakat di Desa Bantai Bambure	dengan adanya gedung serba guna, kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik dan terorganisir.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rehab berat bangunan Kantor Kepala Desa Tarusan untuk memperbaiki kondisi bangunan yang rusak dan tidak layak pakai sebagai tempat kerja pemerintahan desa.	Masyarakat Desa Tarusan	Perlu dilakukan rehab berat pada bangunan kantor untuk memperbaiki kondisi bangunan dan meningkatkan fungsionalitasnya sebagai pusat pemerintahan desa.	Rehabilitasi bangunan Kantor Kepala Desa Tarusan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintahan desa.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	urangnya akses pelayanan publik yang efisien dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di wilayah tersebut.	Masyarakat di Desa Marawan Baru	Pembangunan kantor BPD Desa Marawan Baru akan membantu pelayanan administratif masyarakat setempat dan memperkuat struktur pemerintahan desa.	pembangunan kantor BPD diharapkan akan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Desa Marawan Baru dan sekitarnya.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Keterbatasan alat tangkap ikan yang dimiliki nelayan di desa Marawan Lama.	Nelayan di desa Marawan Lama.	elayan merupakan salah satu sektor ekonomi utama di desa Marawan Lama yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan.	Jika nelayan mendapatkan bantuan jaring yang memadai, maka produksi tangkapan ikan akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat di desa Marawan Lama.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan usaha tani di Desa Bantai Bambure kurang baik sehingga mempersulit aktivitas petani, sehingga perlu dibuatkan jalan usaha tani.	Petani dan masyarakat Desa Bantai Bambure.	Pembuatan jalan usaha tani bertujuan untuk memudahkan aktivitas petani di Desa Bantai Bambure dan meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut.	Dengan adanya jalan usaha tani yang baik, petani di Desa Bantai Bambure dapat lebih mudah mengakses lahan pertanian dan mempermudah aktivitas pertanian sehingga meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan hidup mereka.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
3.30.2.17.3.31.01.0000 - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar tradisional di Desa Bantai Bambure kurang memadai dan tidak mampu bersaing dengan pasar modern, sehingga perlu dibangun los pasar modern.	Pedagang dan pembeli di pasar Desa Bantai Bambure.	Pembangunan los pasar modern bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pasar di Desa Bantai Bambure.	Dengan adanya los pasar modern yang lebih baik, pedagang dapat menawarkan produk yang lebih berkualitas dan menarik, sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbelanja	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (13 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja Katolik di Desa Bantai Bambure membutuhkan bantuan untuk perbaikan atau pembangunan gedung gereja.	Gereja Katolik di Desa Bantai Bambure.	Bantuan diberikan untuk membantu gereja Katolik di Desa Bantai Bambure dalam perbaikan atau pembangunan gedung gereja mereka.	Dengan adanya perbaikan atau pembangunan gedung gereja, maka gereja Katolik di Desa Bantai Bambure dapat memberikan pelayanan keagamaan yang lebih baik bagi umat Katolik di wilayah tersebut. Selain itu, gedung gereja yang layak dan aman juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap gereja dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sana.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jalan menuju kuburan di Kelurahan Pendang perlu perbaikan agar tidak berlubang dan licin.	Keluarga yang akan mengunjungi kuburan di Kelurahan Pendang.	Jalan menuju kuburan di Kelurahan Pendang juga mengalami kerusakan yang cukup parah, seperti berlubang dan licin.	Setelah diperbaiki, jalan menuju kuburan di Kelurahan Pendang akan menjadi lebih aman dan nyaman digunakan oleh masyarakat yang ingin mengunjungi kuburan.	(Pendang, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kondisi langgar Ar- Raudah yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan fasilitas.	Kondisi langgar Ar- Raudah yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan fasilitas tempat beribadah dan kegiatan keagamaan.	Langgar Ar- Raudah merupakan salah satu tempat ibadah yang penting bagi masyarakat muslim di RT.08 desa Marawan Lama.	Jika langgar Ar- Raudah direhabilitasi dan ditingkatkan fasilitasnya, maka masyarakat muslim di RT.08 desa Marawan Lama dapat lebih nyaman dan terpenuhi kebutuhan keagamaannya.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kondisi Masjid Nurul Yakin yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan fasilitas.	Masyarakat muslim di desa Marawan Lama yang memanfaatkan Masjid Nurul Yakin sebagai tempat beribadah dan kegiatan keagamaan.	Masjid Nurul Yakin merupakan salah satu pusat kegiatan keagamaan dan sosial di desa Marawan Lama.	Jika Masjid Nurul Yakin diberikan bantuan untuk perbaikan dan peningkatan fasilitas, maka masyarakat muslim di desa Marawan Lama dapat lebih nyaman dan terpenuhi kebutuhan keagamaannya.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya sarana olahraga dan kegiatan positif bagi remaja di desa Marawan Lama.	Anggota karang taruna dan remaja desa Marawan Lama.	Karang taruna adalah organisasi kepemudaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda melalui kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan budaya.	Jika terdapat alat olahraga yang memadai, maka anggota karang taruna dan remaja di desa Marawan Lama dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas diri dan kegiatan positif lainnya.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Langgar Polsek Pendang perlu direhabilitasi untuk memperbaiki kondisi bangunan agar layak digunakan.	Kepolisian dan masyarakat yang sering menggunakan Langgar Polsek Pendang.	Langgar Polsek Pendang mengalami kerusakan pada bangunan dan tidak layak digunakan.	Setelah direhabilitasi, Langgar Polsek Pendang akan menjadi lebih baik dan dapat digunakan kembali untuk kegiatan masyarakat.	(Pendang, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Masjid atas Desa Reong memerlukan perbaikan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi jemaah.	Jamaah Masjid atas Desa Reong	Rehabilitasi Masjid atas Desa Reong akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi jemaah.	rehabilitasi Masjid atas Desa Reong akan meningkatkan kualitas hidup	(Reong, Kec. Dusun Utara)	
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pagar kuburan masjid Al-Ihtihan Pendang perlu dibuat untuk memperindah dan memberi keamanan pada kuburan.	Pengurus masjid Al-Ihtihan Pendang dan keluarga yang memiliki kuburan di area tersebut.	Belum ada pagar kuburan masjid Al-Ihtihan Pendang sehingga kurang rapi dan kurang memberikan rasa aman pada pengunjung kuburan.	Setelah dibuatnya pagar kuburan masjid Al-Ihtihan Pendang, area kuburan akan menjadi lebih rapi dan memberikan rasa aman pada pengunjung kuburan.	(Pendang, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pemuda di Desa Bantai Bambure membutuhkan alat tarbang maulid habsy untuk melakukan kegiatan keagamaan.	Pemuda di Desa Bantai Bambure.	Bantuan alat tarbang maulid habsy diberikan untuk membantu pemuda di Desa Bantai Bambure dalam melaksanakan kegiatan keagamaan mereka.	Dengan adanya bantuan alat tarbang maulid habsy, maka pemuda di Desa Bantai Bambure dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan lebih baik dan meningkatkan kesadaran keagamaan di masyarakat.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Belum adanya akses listrik yang memadai di wilayah tersebut, yang dapat menghambat kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.	Masyarakat di Desa Marawan Baru dan sekitarnya	Proyek ini bertujuan untuk memasang jaringan listrik PLN di wilayah Marawan Baru â€“ Mantarem.	Setelah pemasangan jaringan listrik, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas mereka, dan wilayah tersebut menjadi lebih menarik bagi investasi di masa depan.	(Marawan Baru, Kec. Dusun Utara)	
11	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Tarusan tidak memiliki akses listrik PLN sehingga menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.	Masyarakat yang tinggal dan bekerja di Desa Tarusan serta pengusaha dan pedagang yang membutuhkan listrik untuk usaha mereka.	Pemasangan jaringan listrik akan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat di Desa Tarusan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan usaha mereka. Selain itu, akses listrik yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut.	Pemasangan jaringan listrik PLN dari arah Desa Panarukan ke Desa Tarusan akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan potensi untuk pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
12	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jaringan listrik di Desa Bantai Bambure belum merata dan beberapa wilayah masih kekurangan tiang listrik.	Masyarakat yang tinggal di wilayah yang kekurangan tiang listrik.	Pembangunan tiang listrik diharapkan dapat memperbaiki jaringan listrik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Penambahan tiang listrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.	(Bantai Bambure, Kec. Dusun Utara)	
13	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemasangan jaringan listrik PLN Desa Reong - Marawan Baru saat ini belum tersedia, sehingga akses listrik masih terbatas dan membatasi aktivitas masyarakat.	Pemasangan jaringan listrik PLN Desa Reong - Marawan Baru akan memberikan manfaat kepada masyarakat di kedua desa.	Pemasangan jaringan listrik PLN Desa Reong - Marawan Baru akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan potensi untuk pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.	Pemasangan jaringan listrik PLN Desa Reong - Marawan Baru akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat, serta memberikan potensi untuk pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.	(Reong, Kec. Dusun Utara)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : MUHAMMAD RIZKI ASTRYA P.S

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penimbunan halaman sekolah SDN 2 Tanjung Jawa	siswa dan guru - guru SDN 2 Tanjung Jawa	Halaman sekolah merupakan area yang sangat penting bagi kegiatan belajar mengajar dan juga untuk aktivitas fisik dan olahraga siswa.	Penimbunan dilakukan tanpa izin dari pihak sekolah dan/atau pemerintah setempat.	(Desa Tanjung Jawa, KAB. BARITO SELATAN)	
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya lembaga pendidikan di daerah tersebut atau terbatasnya kualitas pendidikan yang tersedia.	anak-anak usia dini di desa tersebut yang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Kelompok sasaran juga dapat meliputi orang tua dari anak-anak ini, masyarakat setempat, serta staf dan pengelola TK Al Munawarah yang akan dibangun.	TK Al Munawarah yang baru dibangun di Desa Teluk Mampun dapat menjadi sumber pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah tersebut. Selain itu, pembangunan TK ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat dengan menciptakan lapangan kerja untuk staf dan pengelola TK serta memberikan pilihan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di desa tersebut.	bahwa penduduk desa setempat mampu mengakses dan memanfaatkan layanan pendidikan yang tersedia di TK tersebut. Selain itu, asumsi lainnya adalah bahwa pembangunan TK ini akan diikuti dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan staf dan pengelola TK yang terampil dan terlatih.	(desa teluk mampun, KAB. BARITO SELATAN)	
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembanguan baru TK Al Munawarrah Desa Teluk Mampun	Anak-anak usia 3-6 tahun yang tinggal di Desa Teluk Mampun dan sekitarnya Orang tua atau wali murid dari anak-anak yang akan bersekolah di TK Al Munawarrah	Pembangunan baru TK Al Munawarrah bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di Desa Teluk Mampun dan sekitarnya, serta memberikan pilihan sekolah berkualitas bagi orang tua atau wali murid di wilayah tersebut	Pembangunan baru TK Al Munawarrah di Desa Teluk Mampun akan menarik minat orang tua atau wali murid untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut	(Desa Teluk Mampun, KAB. BARITO SELATAN)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (3 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Desa Teluk Mampun memiliki kebutuhan yang tinggi akan tenaga medis, terutama bidan dan perawat. Saat ini, jumlah tenaga medis di desa ini sangat terbatas sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesehatan dan mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak.	bidan dan perawat di Desa Teluk Mampun adalah seluruh penduduk desa.	desa ini hanya memiliki satu puskesdes yang memiliki jumlah tenaga medis yang terbatas.	Adanya fasilitas kesehatan yang memadai untuk menunjang pekerjaan tenaga medis bidan dan perawat.	(desa teluk mampun, KAB. BARITO SELATAN)	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan tenaga medis perawat dan Dokter di puskesmas Desa Penda Asam	Masyarakat yang tinggal di wilayah Puskesmas Desa Penda Asam.	Puskesmas Desa Penda Asam adalah puskesmas yang terletak di Desa Penda Asam, yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah tersebut. Puskesmas tersebut membutuhkan tambahan tenaga medis perawat dan dokter untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	Peningkatan jumlah tenaga medis akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Desa Penda Asam.	(Desa Penda Asam, KAB. BARITO SELATAN)	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan ambulance untuk Desa Penda Asam	Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terdekat yang dapat memberikan perawatan medis yang lebih lanjut	Saat ini, Desa Penda Asam belum memiliki ambulance sendiri untuk memberikan layanan kesehatan darurat kepada warganya	Dengan adanya ambulance, Puskesmas terdekat dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien dalam menangani pasien dari Desa Penda Asam.	(Desa Penda Asam, KAB. BARITO SELATAN)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (11 Usulan)								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pembuatan cekdam di desa teluk mampun sebanyak 8 titik uk. 21 m	masyarakat	pembuatan cekdam di desa teluk mampun sebanyak 8 titik uk. 21 m	pembuatan cekdam di desa teluk mampun sebanyak 8 titik uk. 21 m	(Desa Teluk Mampun kecamatan Dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan baru PDAM di Desa Tanjung Jawa dan peningkatan kapasitas 1 dtk/10 ltr	Masyarakat Desa Tanjung Jawa yang saat ini belum memiliki akses layanan air bersih dari PDAM	PDAM akan membangun infrastruktur baru di Desa Tanjung Jawa untuk memberikan akses layanan air bersih kepada masyarakat yang belum memiliki akses tersebut.	Masyarakat Desa Tanjung Jawa membutuhkan akses layanan air bersih dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	(Desa tanjung jawa, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Saat ini, Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk Mampun belum memiliki bangunan kantor permanen yang memadai. Kantor sementara yang digunakan saat ini terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan staf dan masyarakat desa.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Teluk Mampun, staf BPD, dan masyarakat desa.	BPD Teluk Mampun merupakan badan pemerintahan di tingkat desa yang memiliki tugas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. BPD Teluk Mampun terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih melalui pemilihan di tingkat desa.	Pembangunan kantor baru BPD Teluk Mampun akan meningkatkan kinerja BPD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa dan memenuhi kebutuhan staf dan masyarakat desa. Pembangunan kantor baru juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BPD dan memperkuat hubungan antara BPD dan masyarakat desa.	(Desa teluk mampun, KAB. BARITO SELATAN)	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Mohon bantuan pembuatan siring penahan longsor di Desa Tanjung Jawa	Masyarakat Desa Tanjung Jawa yang tinggal di daerah rawan longsor dan terancam bahaya saat musim hujan.	perlu dibangun sebuah siring penahan longsor untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga serta infrastruktur di Desa Tanjung Jawa.	Terdapat teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk merancang dan membangun siring penahan longsor di Desa Tanjung Jawa.	(Desa Tanjung Jawa, KAB. BARITO SELATAN)	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan WC untuk masyarakat Desa tanjung jawa (300 unit rumah tangga)	Penduduk Desa Tanjung Jawa yang tinggal di rumah tangga tanpa akses ke toilet yang layak dan sanitasi yang memadai.	Saat ini, sebagian besar penduduk Desa Tanjung Jawa belum memiliki akses ke toilet yang layak dan sanitasi yang memadai.	Masyarakat Desa Tanjung Jawa bersedia bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan WC dan sistem sanitasi di lingkungan mereka.	(Desa Tanjung Jawa, KAB. BARITO SELATAN)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cor jalan padat karya Desa Penda Asam sepanjang 1 KM	Masyarakat Desa Penda Asam	Jalan yang akan diperbaiki memiliki panjang 1 km	Adanya dukungan dan koordinasi dari pemerintah desa atau instansi terkait untuk memfasilitasi dan memonitor kegiatan tersebut	(Desa Penda Asam, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya pengawasan terhadap pengerjaan cor beton, sehingga kualitas cor beton tidak terjaga dengan baik.	Kelompok sasaran dari permasalahan cor beton jalan antar desa Teluk Mampun dan Desa Penda Asam adalah masyarakat setempat yang menggunakan jalan tersebut, terutama pengguna jalan yang berbasis di desa-desa tersebut, seperti petani, pedagang, dan masyarakat umum.	Jalan antar desa Teluk Mampun dan Desa Penda Asam merupakan jalan yang penting untuk menghubungkan kedua desa tersebut	ika permasalahan cor beton jalan antar desa Teluk Mampun dan Desa Penda Asam tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan kerusakan yang semakin parah dan meningkatkan biaya perawatan jalan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, kondisi jalan yang buruk dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat setempat, seperti transportasi hasil pertanian dan perdagangan barang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas cor beton jalan tersebut dan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat setempat dalam merawat jalan beton.	(desa teluk mampun, KAB. BARITO SELATAN)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan cor beton jalan antar desa Teluk mampun - Desa Penda Asam	Penduduk dan pengguna jalan di sekitar desa Teluk Mampun dan Desa Penda Asam yang akan memanfaatkan jalan tersebut setelah selesai dibangun.	Jalan antar desa Teluk Mampun - Desa Penda Asam sudah ada dan telah dibangun sebelumnya, namun masih memerlukan pekerjaan lanjutan pada cor betonnya agar lebih tahan lama dan aman untuk dilalui.	Pemerintah daerah setempat dan kontraktor atau pengembang yang terlibat dalam pekerjaan lanjutan cor beton jalan akan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kualitas jalan yang dibangun untuk kepentingan masyarakat yang akan menggunakannya.	(Desa Teluk Mampun, KAB. BARITO SELATAN)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan pembangunan jalan majundre - Tanjung Jawa - Teluk Mampun - Penda Asam (Prioritas)	Masyarakat yang tinggal di sekitar jalan yang akan dibangun dan terhubung oleh jalan tersebut, Pelaku usaha, seperti petani, nelayan, dan pedagang, yang akan mengakses pasar dan pelabuhan dengan mudah dan efisien melalui jalan yang dibangun	Pemerintah kabupaten/kota setempat yang akan memfasilitasi pembangunan jalan dan memastikan jalan tersebut dapat dioperasikan dengan baik, Dinas perhubungan dan pekerjaan umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan jalan dan pemeliharaannya di masa depan.	Diperlukan pemeliharaan jalan secara berkala agar jalan tersebut dapat tetap berfungsi dengan baik selama masa penggunaannya.	(Desa Tanjung jawa, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Desa dari 3 meter menjadi 4 meter	Masyarakat desa penda asam	Masyarakat desa yang menggunakan jalan tersebut: Pelebaran jalan desa dari 3 meter menjadi 4 meter akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa yang menggunakan jalan tersebut. Dengan lebar jalan yang lebih luas, kendaraan bermotor dapat melintas dengan lebih leluasa dan aman. Selain itu, pejalan kaki dan pengendara sepeda juga akan merasa lebih nyaman karena jalan yang lebih luas memberikan ruang yang cukup untuk berjalan.	perlu perhitungan yang matang dan pengelolaan anggaran yang baik dalam proses pelebaran jalan desa.	(Desa Penda asam, KAB. BARITO SELATAN)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Sambungan jalan induk desa Penda Asam menuju jalan provinsi	Masyarakat Desa Penda Asam dan wilayah sekitarnya yang menggunakan jalan induk tersebut untuk kegiatan sehari-hari.	Jalan induk yang menghubungkan Desa Penda Asam dengan jalan provinsi saat ini masih dalam kondisi rusak	Dengan adanya sambungan jalan induk yang baik dan lancar, masyarakat Desa Penda Asam dan wilayah sekitarnya akan lebih mudah untuk mengakses kota terdekat dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah mereka.	(Desa Penda Asam, KAB. BARITO SELATAN)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (1 Usulan)								
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bantuan bedah rumah di Desa Tanjung Jawa sebanyak 200 unit	Penduduk Desa Tanjung Jawa yang tinggal di rumah yang tidak layak huni atau rumah yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kondisi keamanan dan kesehatan.	diperkirakan sekitar 200 rumah memerlukan perbaikan untuk memenuhi standar keamanan dan kesehatan.	Bantuan bedah rumah diberikan secara gratis oleh pemerintah.	(Desa Tanjung Jawa, KAB. BARITO SELATAN)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Bangun Baru Kantor BPD Desa Teluk Mampun	Anggota BPD Desa Teluk Mampun Pemerintah Desa Teluk Mampun Masyarakat Desa Teluk Mampun	Bangunan kantor baru BPD Desa Teluk Mampun diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan tempat pertemuan yang efektif dan efisien bagi anggota BPD dan pemerintah desa. Bangunan ini juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah dan penentuan kebijakan desa	Anggota BPD dan pemerintah desa telah melakukan kajian dan analisis kebutuhan untuk mendesain bangunan kantor yang efektif dan efisien.	(Desa Teluk Mampun, KAB. BARITO SELATAN)	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Oleh karena itu, diperlukan adanya pos ronda yang dapat membantu mencegah terjadinya tindakan kejahatan tersebut. Namun, saat ini belum terdapat pos ronda di wilayah tersebut.	Warga Masyarakat Desa teluk mampun	Pembangunan Pos Kamling ini direncanakan akan dilakukan di lokasi yang strategis, yaitu di pinggir jalan utama masuk ke desa sehingga dapat mempermudah akses bagi petugas keamanan untuk melakukan pengawasan.	diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka.	(desa teluk mampun, KAB. BARITO SELATAN)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pembuatan cekdam di Desa Teluk Mampun sebanyak 8 Titik uk.21 m	Warga Desa Teluk Mampun Pemilik lahan di sekitar area cekdam Petani dan nelayan yang memanfaatkan air dari cekdam Pemerintah Desa Teluk Mampun Tim teknis yang akan melakukan pembangunan cekdam Kontraktor atau pelaksana pembangunan cekdam Lembaga pembiayaan yang mungkin terlibat dalam pembangunan cekdam	Pembangunan cekdam akan dilakukan dengan menggunakan bahan dan teknologi yang sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku.	Pembangunan cekdam akan membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat, khususnya sektor pertanian dan perikanan.	(Desa teluk Mampun, KAB. BARITO SELATAN)	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan tower Telekomunikasi (Prioritas) di Desa Tanjung Jawa	Pengguna telekomunikasi di Desa Tanjung Jawa dan sekitarnya, seperti penduduk, pengusaha, dan pelaku usaha kecil dan menengah. Pemerintah Desa Tanjung Jawa yang ingin meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi bagi warganya.	Pembangunan tower telekomunikasi bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi, termasuk internet, telepon seluler, dan layanan lainnya.	Pembangunan tower telekomunikasi di Desa Tanjung Jawa menjadi prioritas karena tingkat aksesibilitas layanan telekomunikasi yang masih rendah. Pembangunan tower telekomunikasi dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan sosial masyarakat di Desa Tanjung Jawa dan sekitarnya.	(Desa Tanjung jawa, KAB. BARITO SELATAN)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (5 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan pembangunan pagar kuburan RT.01 Desa Penda Asam	Warga masyarakat RT.01 Desa Penda Asam yang membutuhkan pembangunan pagar kuburan.	Tujuan pembangunan pagar kuburan adalah untuk memberikan sarana dan prasarana yang memadai bagi keluarga yang ingin melakukan pemakaman jenazah.	Masyarakat RT.01 Desa Penda Asam membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk pemakaman jenazah sehingga pembangunan pagar kuburan akan memberikan manfaat bagi mereka.	(Desa Penda Asam, KAB. BARITO SELATAN)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan rehab plafon Masjid Nurul Iman Desa Teluk Mampun	Pengurus Masjid Nurul Iman Desa Teluk Mampun Jamaah Masjid Nurul Iman Desa Teluk Mampun	Bantuan rehab plafon Masjid Nurul Iman Desa Teluk Mampun adalah bantuan yang ditujukan untuk perbaikan dan perawatan plafon di Masjid tersebut. Bantuan ini diberikan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jamaah yang menggunakan Masjid tersebut.	Pengurus Masjid Nurul Iman Desa Teluk Mampun memiliki keinginan dan kesulitan dalam mengumpulkan dana untuk perbaikan plafon Masjid.	(Desa Teluk Mampun, KAB. BARITO SELATAN)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Rehab plafon mesjid nurul iman desa teluk mampun	masyarakat	Merehabilitasi plafon masjid agar dapat digunakan dengan nyaman dan aman.Mengganti plafon yang rusak dengan bahan yang lebih tahan lama dan kuat (plafon gypsum), menghilangkan retakan pada plafon, dan melakukan perbaikan pada bagian struktur di atas plafon.	bahwa tenaga kerja yang diperlukan untuk rehab plafon dapat ditemukan dengan mudah di desa Teluk Mampun atau daerah sekitarnya, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi atau akomodasi tenaga kerja dari luar daerah.	(Desa teluk mampun kecamatan dusun selatan, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	bantuan untuk pembangunan menara Masjid Miftahul Jannah Desa Penda Asam	Pengurus Masjid dan Masyarakat Desa Penda Asam	Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki peran aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan masjid serta warga desa yang akan menjadi pengguna masjid.	Bantuan dalam bentuk dana, bahan bangunan, dan tenaga ahli untuk membangun menara masjid.	(Desa Penda Asam, KAB. BARITO SELATAN)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Pagaran Kuburan Muslimin Desa Tanjung Jawa	Muslimin yang membutuhkan tempat untuk memakamkan jenazah keluarga mereka	Pagar yang diperbaiki akan terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama seperti beton atau besi.	Kondisi pagar kuburan yang sudah rusak dapat membahayakan keluarga yang berkunjung untuk memakamkan jenazah	(DesaTanjung Jawa, KAB. BARITO SELATAN)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : IDARIANI, SE

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Mohon Bantuan Fasilitasi Sekolah	Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	Permohonan bantuan untuk memfasilitasi atau menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar-mengajar di sekolah.	Sekolah di Desa Telang Andrau mungkin membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Mohon Bantuan Perehapan SD Desa Telang Andrau	Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	Permohonan bantuan untuk melakukan perbaikan atau renovasi pada bangunan Sekolah Dasar (SD) di Desa Telang Andrau.	Bangunan SD mungkin mengalami kerusakan atau kekurangan dalam beberapa aspek seperti infrastruktur, fasilitas pendukung, atau kondisi bangunan yang tidak memadai.	(SD Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penimbunan di SD Pararapak	Siswa dan orang tua siswa di SD Desa Pararapak	Penimbunan halaman di SD Desa Pararapak dilakukan untuk memperbaiki kondisi halaman yang berlubang dan tidak rata sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam beraktivitas di halaman sekolah.	Tidak ada kendala teknis yang menghambat pelaksanaan penimbunan halaman, seperti masalah tanah atau kondisi cuaca yang tidak mendukung.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehab Sekolah SD Murung Paken	Siswa dan Siswi SD Murung Paken Guru dan Staf Administrasi SD Murung Paken Orang Tua/Wali Murid Siswa SD Murung Paken	Mereka berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.	Program rehap sekolah di SD Murung Paken dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan.	(Desa Murung Paken, KAB. BARITO SELATAN)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pergantian Bidan Desa Danau Masura	Warga Desa Danau Masura yang membutuhkan layanan kesehatan dari bidan	Bidan desa yang sebelumnya bertugas di Desa Danau Masura telah pindah tugas sehingga diperlukan penggantian bidan desa yang baru.	Ketersediaan tenaga bidan desa yang memenuhi kualifikasi dan dapat bekerja dengan baik di Desa Danau Masura.	(Desa Danau Masura, Danau Masura, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (16 Usulan)								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Moho Bantuan Aliran Listrik	Masyarakat desa muara ripung	Aliran listrik yang stabil dan terjamin sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti penerangan, penggunaan alat rumah tangga, hingga kebutuhan medis.	Terdapat sumber daya listrik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, seperti sumber daya listrik terbarukan atau pembangkit listrik yang sudah ada.	(Desa muara ripung, KAB. BARITO SELATAN)	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mohon Bantuan Untuk Aliran Listrik	Masyarakat desa danau masura	Aliran listrik yang stabil dan terjamin sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti penerangan, penggunaan alat rumah tangga, hingga kebutuhan medis.	Terdapat sumber daya listrik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, seperti sumber daya listrik terbarukan atau pembangkit listrik yang sudah ada.	(Desa Danau Masura, KAB. BARITO SELATAN)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Mohon dibuat jaringan air bersih (PDAM)	Penduduk yang tinggal di wilayah yang belum memiliki akses ke jaringan air bersih.	Jaringan air bersih adalah sistem distribusi air bersih yang terdiri dari pipa-pipa, pompa-pompa, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk menyediakan air bersih ke rumah-rumah penduduk.	Masyarakat setempat memiliki kesadaran akan pentingnya penggunaan air bersih yang aman dan sehat.	(Desa pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehab Gereja Khatolik	Masyarakat	Rehabilitasi gereja Khatolik dapat membantu memperbaiki kondisi tempat ibadah yang penting bagi masyarakat desa Telang Andrau.	Rehab gereja akan memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat desa.	(Gereja Khatolik Desa Telang Andrau., Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehab poskesdes	Pasien yang telah dirawat di Poskesdes dan memerlukan perawatan lanjutan untuk pemulihan yang optimal.	Program rehabilitasi yang fokus pada perawatan medis untuk mengembalikan fungsi tubuh yang hilang akibat penyakit atau cedera.	Tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung program rehabilitasi, termasuk anggaran dan peralatan medis yang memadai.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Moho Bantuan Aliran Listrik	Masyarakat, Bantuan aliran listrik dapat membantu mereka untuk memiliki akses yang lebih mudah terhadap listrik, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.	Mereka seringkali mengandalkan sumber listrik yang tidak stabil, seperti generator bensin atau lampu minyak tanah. Bantuan aliran listrik dapat membantu mereka untuk memiliki akses yang lebih mudah terhadap listrik yang stabil dan dapat diandalkan, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membantu meningkatkan produktivitas di daerah tersebut.	bahwa listrik adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan normal, akses yang mudah terhadap listrik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas seseorang.	(Desa Murung Paken, KAB. BARITO SELATAN)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Dangka - Gagutur melewati Desa Marga Jaya belum selesai dibangun.	Warga Desa Dangka dan Desa Marga Jaya.	Jalan yang belum selesai dibangun dapat mengganggu aktivitas masyarakat Desa Dangka dan Desa Marga Jaya.	perbaikan jalan Desa Dangka - Gagutur melalui Desa Marga Jaya akan membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan mobilitas barang di wilayah tersebut	(jalan Desa Dangka - Gagutur melalui Desa Marga Jaya, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Jalan Pakat Sasameh Desa Murung Paken	Masyrakat	Diperlukan peningkatan jalan Desa Murung Paken agar akses ke wilayah tersebut menjadi lebih mudah dan lancar	peningkatan jalan akan membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas bagi warga desa.	(Jalan Pakat Sasameh Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Badan Jalan Danau Masura ke Parigi Sebesar 7Km	Penduduk atau warga yang tinggal di sekitar wilayah jalan yang menghubungkan Danau Masura dan Parigi sepanjang 7km.	Jalan yang menghubungkan Danau Masura dan Parigi sepanjang 7km merupakan akses utama bagi penduduk dan juga akses transportasi untuk aktivitas perekonomian seperti pengangkutan barang dan jasa	Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi jalan tersebut agar lebih baik dan aman untuk pengguna jalan.	(Desa Danau Masura, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Mohon Bantuan Perbaikan Jalan Menuju Muara Ripung, Murung Paken dan Masura.	Masyarakat desa muara ripung, desa danau masura dan masyarakat desa murung paken	Jalan menuju Muara Ripung, Murung Paken, dan Masura adalah jalan yang cukup penting untuk masyarakat setempat karena merupakan akses utama untuk menuju kawasan permukiman, pasar, dan tempat ibadah. Namun, kondisi jalan saat ini cukup rusak dan berlubang, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.	Perbaikan jalan menuju Muara Ripung, Murung Paken, dan Masura diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat setempat.	(desa muara ripung, KAB. BARITO SELATAN)	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Beraspal dari Desa Dangka ke Desa Telang Andrau	Masyarakat	Permohonan untuk meningkatkan kondisi jalan beraspal yang menghubungkan Desa Dangka dengan Desa Telang Andrau.	Kondisi jalan beraspal mungkin tidak memadai, seperti berlubang, rusak, atau sempit sehingga menyulitkan akses masyarakat dan mempengaruhi mobilitas ekonomi.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Beraspal dari Desa Telang Andrau ke Desa Majundre	Masyarakat	Permohonan untuk meningkatkan kondisi jalan beraspal yang menghubungkan Desa Telang Andrau dengan Desa Majundre	Kondisi jalan beraspal mungkin tidak memadai, seperti berlubang, rusak, atau sempit sehingga menyulitkan akses masyarakat dan mempengaruhi mobilitas ekonomi.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Desa Telang Andrau	Masyarakat	Diperlukan peningkatan jalan desa Telang Andrau agar akses ke wilayah tersebut menjadi lebih mudah dan lancar	peningkatan jalan akan membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas bagi warga desa.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Masura Menuju Murung Paken	Orang-orang yang menggunakan Jalan Masura untuk kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman barang, perjalanan menuju ke sekolah, tempat kerja, ataupun aktivitas lainnya.	Peningkatan jalan tersebut akan meningkatkan aksesibilitas ke daerah Murung Paken, meningkatkan efisiensi transportasi barang dan orang, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.	Peningkatan jalan Masura akan mampu meningkatkan jumlah pengguna jalan dan volume transportasi di daerah tersebut.	(Desa Murung Paken, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Siring Timbun Jalan bagian Hulu Desa Pararapak	Masyarakat	Diperlukan peningkatan jalan Desa Murung Paken agar akses ke wilayah tersebut menjadi lebih mudah dan lancar	Peningkatan jalan akan membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas bagi warga desa.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Usulan Jalan Masura	Penduduk Desa Danau Masura yang kesulitan dalam akses transportasi menuju pusat kota atau daerah sekitar.	Usulan Jalan Desa Danau Masura bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak dan sulit dilalui agar memudahkan akses transportasi masyarakat serta mempercepat distribusi hasil produksi atau bahan baku.	Dengan dibangunnya jalan baru, akan memudahkan akses transportasi bagi masyarakat dan mempercepat distribusi hasil produksi atau bahan baku, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi desa.	(Desa Danau Masura, KAB. BARITO SELATAN)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mohon Batuan Bedah Rumah	Masyarakat	Permohonan bantuan untuk melakukan renovasi atau perbaikan pada rumah-rumah di Desa Telang Andrau	Rumah-rumah di Desa Telang Andrau mungkin mengalami kerusakan atau kekurangan dalam beberapa aspek seperti infrastruktur, sanitasi, atau kondisi rumah yang tidak memadai.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Usulan Untuk Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat Desa Danau Masura	Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau perkotaan seringkali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan layanan, sehingga mereka tidak mampu memperbaiki rumah mereka sendiri.	Kelompok sasaran ini memerlukan bantuan finansial dan teknis dalam memperbaiki rumah mereka, dan juga memerlukan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan.	(Desa Danau Masura, KAB. BARITO SELATAN)	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu	Masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan dalam melakukan renovasi atau perbaikan rumah mereka.	Bedah rumah adalah program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam melakukan perbaikan atau renovasi rumah mereka. Program ini dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan masyarakat umum.	Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk mencapai kesuksesan program bedah rumah.	(Desa muara ripung, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kondisi rumah masyarakat di Desa Dangka yang tidak layak huni dapat mempengaruhi kesehatan dan keamanan masyarakat.	Masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni di Desa Dangka.	Bedah rumah masyarakat Desa Dangka bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.	Dengan kondisi rumah yang lebih layak huni, masyarakat di Desa Dangka diharapkan dapat lebih produktif dan kreatif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.	(Desa Dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kekurangan pencahayaan di sepanjang jalan yang melewati Desa Dangka dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan menghambat mobilitas pada malam hari.	Masyarakat yang menggunakan jalan di sepanjang Desa Dangka pada malam hari.	Dibutuhkan pemasangan lampu PJU sepanjang jalan yang melewati Desa Dangka untuk memperbaiki aksesibilitas dan keamanan bagi masyarakat.	pencahayaan yang memadai di sepanjang jalan yang melewati Desa Dangka dapat membantu meningkatkan keamanan dan mobilitas masyarakat pada malam hari.	(Desa Dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pengadaan pompa air persiapan jika terjadi kebakaran hutan	Tim pemadam kebakaran yang bertugas dalam penanggulangan kebakaran hutan.	Pengadaan pompa air persiapan bertujuan untuk membantu tim pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran hutan dengan cara menyediakan sumber air yang cukup untuk memadamkan api.	Pengadaan pompa air persiapan dilakukan sebelum terjadi kebakaran hutan dan disimpan di dekat lokasi rawan kebakaran. Pompa air ini diasumsikan dapat bekerja dengan baik dan dapat dioperasikan oleh tim pemadam kebakaran yang terlatih.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Usulan)								
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek BPD dan Perangkat Desa	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perangkat Desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Kaur Pembangunan, dan Kaur Kesra Tim pelaksana program pemerintah desa Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di desa	Bimtek BPD dan Perangkat Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.	Pelatihan yang terarah dan terstruktur dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan kapasitas anggota BPD dan perangkat desa dapat berdampak positif pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di desa.	(Desa Murung Paken, KAB. BARITO SELATAN)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Usulan Mohon Bantuan Pembangunan Kantor Desa Muara Ripung	Pemerintah Desa Muara Ripung sebagai pengguna utama kantor desa. Penduduk Desa Muara Ripung yang akan mendapatkan pelayanan administrasi dari kantor desa. Pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum yang akan berinteraksi dengan kantor desa.	Kantor desa merupakan pusat administrasi yang berfungsi sebagai tempat melayani kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi seperti surat keterangan, permohonan izin, dan sebagainya.	Pembangunan kantor desa yang baru akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi. Pembangunan kantor desa yang baru akan meningkatkan citra pemerintah desa di mata masyarakat.	(Desa muara ripung, KAB. BARITO SELATAN)	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Murung Paken mendapatkan tunjangan yang kurang memadai.	Anggota BPD Desa Murung Paken.	Usulan ini bertujuan untuk memberikan kenaikan tunjangan bagi anggota BPD Desa Murung Paken sehingga dapat memotivasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.	Terdapat dana yang cukup untuk memberikan kenaikan tunjangan dan tidak mengganggu anggaran desa secara keseluruhan	(Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Usulan Naikan Intensif Aparat Desa Dangka	Aparat Desa Dangka	Kenaikan Intensif Aparat Desa dapat memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kinerja	Kenaikan Intensif Aparat Desa dapat memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kinerja	(Desa Dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (5 Usulan)								
1	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Mohon Bantuan Bibit Ternak	para petani atau peternak yang ingin memulai usaha peternakan, namun tidak memiliki modal atau bibit ternak yang cukup.	dibutuhkan dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan dalam bentuk anggaran dan kebijakan yang mendukung.	embutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti ketersediaan air bersih, akses transportasi yang baik, serta fasilitas pendukung lainnya untuk memudahkan petani atau peternak dalam menjalankan usahanya.	(desa muara ripung, KAB. BARITO SELATAN)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengusulan Kebun Jengkol	Masyarakat	Kebun jengkol dapat membantu meningkatkan produksi dan pendapatan petani di desa Telang Andrau	pengembangan kebun jengkol akan membuka peluang ekonomi baru bagi petani desa	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Ternak Babi	Masyarakat	Bantuan sarana dan prasarana ternak babi dapat meningkatkan hasil pruduksi peternakan	Bantuan sarana dan prasarana ternak babi dapat meningkatkan hasil pruduksi peternakan dan meningkatkan penghasilan bagi warga	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan kelompok tani dalam pengolahan nanas parigi	Kelompok tani yang fokus pada budidaya dan pengolahan nanas parigi, terutama di daerah yang potensial untuk pertumbuhan tanaman tersebut.	Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dalam pengolahan nanas parigi menjadi produk bernilai tambah, seperti jus nanas, selai nanas, atau kue nanas.	Kelompok tani yang menjadi sasaran pelatihan ini sudah memiliki pengetahuan dasar tentang budidaya nanas parigi. Pelatihan ini juga diasumsikan akan diadakan di daerah yang mudah diakses oleh kelompok tani, dengan fasilitas yang memadai seperti aula atau ruangan yang dapat menampung peserta pelatihan dengan nyaman.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani Untuk Penanaman Sereh Wangi dan Madu Kelulut	Masyarakat	Kelompok tani dapat membantu meningkatkan produksi sereh wangi dan madu kelulut di desa Telang Andrau.	peningkatan produksi ini dapat membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (8 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Peningkatan Insentif RT	Masyarakat	Insentif RT dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warga desa Telang Andrau.	Meningkatkan insentif RT dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja Jemaat GKE Desa Dangka membutuhkan bantuan hibah untuk melakukan pembangunan gedung.	Gereja Jemaat GKE Desa Dangka.	Bantuan hibah untuk pembangunan Gereja Jemaat GKE Desa Dangka bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat.	Dengan adanya bantuan hibah untuk pembangunan Gereja Jemaat GKE Desa Dangka dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Desa Dangka, Dangka, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Insentif BPD mohon dinaikkan	Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Insentif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai pengakuan atas prestasi atau kinerja yang baik.	Kenaikan insentif bagi anggota BPD dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja anggota BPD untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa dan memperoleh hasil yang lebih baik.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Aki Baru Untuk Kantor BPD Desa Murung Paken	Masyarakat	Bantuan Aki Baru Untuk Kantor BPD Desa Murung Paken berguna untuk menghidupkan lampu,	Desa Murung Paken masih belum mendapatkan listrik dari PLN sehingga harus menggunakan aki untuk menghidupkan lampu	(Desa Murung Paken, Murung Paken, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon di bangun tower telkomsel / xl sehingga mendapat jaringan internet	Orang-orang yang tinggal atau bekerja di daerah yang tidak memiliki akses internet yang memadai.	Daerah yang dimaksud dapat berupa daerah terpencil, daerah yang jauh dari pusat kota, atau daerah yang sulit dijangkau oleh operator internet.	Di daerah tersebut terdapat infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan untuk membangun tower.	(Desa pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Di Programkan Sertifikat Masal	Masyarakat	Permohonan untuk melakukan program sertifikat masal untuk masyarakat.	Masyarakat di suatu wilayah mungkin membutuhkan program sertifikat masal untuk memperoleh kepastian hukum terkait kepemilikan tanah atau properti yang dimilikinya.	(Desa Telang Andrau, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembuatan badan jalan Desa Telang Andrau Menuju Pamangka sepanjang 7km	Masyarakat	Permohonan untuk meningkatkan kondisi jalan beraspal yang menghubungkan Desa Pamangka dengan Desa Telang Andrau.	Kondisi jalan beraspal mungkin tidak memadai, seperti berlubang, rusak, atau sempit sehingga menyulitkan akses masyarakat dan mempengaruhi mobilitas ekonomi.	(jalan Desa Telang Andrau Menuju Pamangka sepanjang 7km, Telang Andrau, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pengadaan ambulance desa	Masyarakat Desa yang membutuhkan transportasi darurat untuk keperluan kesehatan.	Ambulans desa akan digunakan sebagai sarana transportasi darurat untuk keperluan kesehatan masyarakat Desa.	Terdapat tenaga medis atau relawan kesehatan yang siap untuk bekerja di ambulans desa.	(Desa Pararapak, Pararapak, Kec. Dusun Selatan)	
5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mohon Bantuan Pembuatan Sumur Bor	Masyarakat yang tinggal di daerah yang kekurangan akses air bersih Sekolah atau lembaga pendidikan yang membutuhkan pasokan air untuk keperluan sanitasi dan kebersihan	Sumur bor dibutuhkan untuk memperoleh pasokan air yang cukup dan terjamin kualitasnya	Lokasi sumur bor dapat diidentifikasi dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar	(Desa muara ripung, KAB. BARITO SELATAN)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : PUTRI SITI ROHMAWATI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Gedung SDN dan Rumah Dinas SDN di Desa Majundre memerlukan peremajaan dan perbaikan.	Siswa SDN dan Guru, Karyawan SDN	Gedung SDN dan Rumah Dinas SDN di Desa Majundre memerlukan peremajaan dan perbaikan karena sudah tua dan rusak.	Kondisi bangunan yang buruk dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan oleh SDN.	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kondisi perumahan guru SDN di Desa Gunung Rantau yang memprihatinkan	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Perumahan guru SDN di Desa Gunung Rantau membutuhkan rehab berat karena kondisinya yang tidak layak huni, sehingga perlu segera diperbaiki agar dapat digunakan kembali oleh para guru SDN.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perihal rehab gedung SDN dan TK Tiga Putri Desa Maruga serta SDN Dusun Batukol.	Siswa, guru, dan staf SDN dan TK Tiga Putri Desa Maruga serta SDN Dusun Batukol.	Gedung-gedung tersebut membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan mengajar.	&Gedung-gedung tersebut sudah cukup tua dan perlu direnovasi. Siswa, guru, dan staf perlu lingkungan belajar dan mengajar yang aman dan nyaman.&	((SDN dan TK Tiga Putri Desa Maruga serta SDN Dusun Batukol., Maruga, Kec. Dusun Utara), Maruga, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Talekoi belum memiliki jaringan internet yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran online.	Murid, guru, dan staf SDN Talekoi.	Dibutuhkan akses internet yang stabil dan cepat agar pembelajaran online dapat berjalan lancar dan efektif.	Dalam era digital, akses internet merupakan kebutuhan yang penting bagi dunia pendidikan.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Gunung Bintang Awai belum memiliki RSU tipe D, sehingga membutuhkan pengadaan lahan/tanah untuk persiapan pendirian RSU tersebut.	Masyarakat Kecamatan Gunung Bintang Awai yang memerlukan layanan kesehatan dan perawatan di RSU tipe D, serta pihak yang terkait dengan proses pengadaan lahan/tanah tersebut.	RSU tipe D dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas kepada masyarakat Kecamatan Gunung Bintang Awai, namun membutuhkan lahan/tanah yang memadai untuk dibangun.	Dengan adanya RSU tipe D di Kecamatan Gunung Bintang Awai, layanan kesehatan dan perawatan di wilayah tersebut dapat meningkat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan akses kesehatan. Selain itu, pengadaan lahan/tanah dapat menjadi tantangan terkait dengan perizinan dan anggaran yang diperlukan	(Gn. Bintang Awai)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Poskesdes di Desa Majundre memerlukan rehabilitasi total agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.	Poskesdes di Desa Majundre memerlukan rehabilitasi total agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.	Poskesdes di Desa Majundre memerlukan rehabilitasi total karena sudah tua dan rusak, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.	Dengan melakukan rehabilitasi total pada Poskesdes, kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Majundre.	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kekurangan tenaga kesehatan di Desa Gunung Rantau	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Desa Gunung Rantau membutuhkan penambahan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di sana.	Penempatan tenaga kesehatan di Desa Gunung Rantau	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (11 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penampungan dan penyaluran air bersih di Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih	Masyarakat Desa Tarusan.	Rehabilitasi penampungan dan penyaluran air bersih akan memastikan ketersediaan air bersih yang memadai bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya penyakit akibat kurangnya ketersediaan air bersih.	Rehabilitasi penampungan dan penyaluran air bersih dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Bangun jembatan baru di Sungai Sunsang yang menghubungkan Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau. Kelompok	Masyarakat Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau	Jembatan di Sungai Sunsang perlu dibangun untuk mempermudah akses antara Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Gopried Tumang di Desa Majundre membutuhkan peningkatan agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman.	Masyarakat Desa Majundre yang membutuhkan akses jalan yang baik.	Jalan Gopried Tumang di Desa Majundre memerlukan peningkatan karena kondisinya sudah rusak dan tidak memadai untuk dilalui.	Dengan peningkatan jalan, akses transportasi ke dan dari Desa Majundre dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Simpang Pendang menuju Dusun Teluk Mantarem perlu dibangun atau diperbaiki menjadi salah satu skala prioritas pembangunan di tahun Anggaran 2024.	Masyarakat Dusun Teluk Mantarem	Jalan Simpang Pendang menuju Dusun Teluk Mantarem membutuhkan pembangunan/perbaikan.	Masyarakat Dusun Teluk Mantarem mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan yang menghubungkan Desa Tarusan dan Desa Panarukan mengalami kerusakan dan membutuhkan pembangunan untuk menghubungkan kedua desa tersebut.	Masyarakat Desa Tarusan dan Desa Panarukan	Pembangunan jembatan akan mempermudah aksesibilitas antara kedua desa tersebut, dan memungkinkan masyarakat desa Tarusan dan desa Panarukan untuk lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, dan berdagang.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat keterhubungan antara desa, serta meningkatkan perekonomian lokal.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan dalam Desa Gunung Rantau RT.005 yang memprihatinkan	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Jalan dalam Desa Gunung Rantau RT.005 membutuhkan rekonstruksi agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman oleh pengguna jalan.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya sarana publik yang memadai di Desa Gunung Rantau	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Jembatan SUNGSANG Desa Gunung Rantau mengalami kerusakan dan perlu direkonstruksi agar dapat digunakan kembali dan tidak membahayakan pengguna jalan.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lokasi pembangunan jalan penghubung antara Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau salah ditentukan.	Masyarakat Desa Marawan Lama.	Jalan penghubung antara Desa Marawan Lama dan Desa Gunung Rantau rusak parah, tetapi titik nol pembangunan ditetapkan di Desa Gunung Rantau	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama mengajukan usulan pembangunan melalui Reses DPRD dan Musrenbang Desa/Kecamatan dan Kabupaten.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Membangun jalan baru dari Bambanen menuju Danau Lelek Marawan Lama	Masyarakat Desa Marawan Lama.	Jalan baru dari Bambanen menuju Danau Lelek Marawan Lama perlu dibangun	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perbaikan jalan dari KM.6 Desa Bundar hingga Dusun Batukol Desa Maruga.	Warga Desa Maruga dan pengguna jalan.	Jalan di Desa Maruga membutuhkan perbaikan untuk mempermudah mobilitas.	Perbaikan jalan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tidak ada jembatan yang melintasi Sungai Tapen Maruga dan Sungai Tapen Patei Maruga.	Masyarakat Desa Maruga yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik, terutama untuk mengakses wilayah-wilayah di seberang sungai.	Wilayah Desa Maruga terbagi oleh Sungai Tapen Maruga dan Sungai Tapen Patei Maruga, yang dapat mempersulit mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Belum adanya kantor BPD Desa Talekoi sehingga kegiatan administrasi desa kurang terstruktur.	Staf BPD Desa Talekoi dan warga desa yang membutuhkan layanan administrasi.	Dibutuhkan kantor BPD Desa Talekoi agar kegiatan administrasi desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien.	Dibutuhkan kantor BPD Desa Talekoi agar kegiatan administrasi desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kantor Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Kantor Desa Tarusan mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Rehabilitasi kantor desa akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat saat melakukan administrasi di kantor desa	Rehabilitasi kantor desa dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan alat musik untuk Karang Taruna BINTANG MUDA di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan anggaran.	Anggota Karang Taruna BINTANG MUDA di Gunung Rantau.	Karang Taruna BINTANG MUDA adalah organisasi kepemudaan di Gunung Rantau.	Karang Taruna BINTANG MUDA adalah organisasi kepemudaan di Gunung Rantau.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya sarana publik yang memadai di Desa Gunung Rantau	Masyarakat di Desa Gunung Rantau	Desa Gunung Rantau membutuhkan pembangunan baru balai basarah &ERAI PAKAT& sebagai sarana publik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial dan budaya.	Desa Gunung Rantau memiliki kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (6 Usulan)								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Petani di Desa Gunung Rantau memerlukan bantuan mesin perontok padi Power Treheser agar dapat meningkatkan efisiensi dalam proses panen.	Petani di Desa Gunung Rantau.	Proses perontokan padi yang dilakukan secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Dengan bantuan mesin, petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses panen	Proses perontokan padi yang dilakukan secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Dengan bantuan mesin, petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses panen	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Irigasi Cetak Sawah Tanggul Isin yang baru/telah dikerjakan pada periode lalu perlu diurus.	: Petani Desa Marawan Lama	Irigasi Cetak Sawah Tanggul Isin yang baru/telah dikerjakan pada periode lalu perlu diurus	Dibutuhkan penyelesaian cetak sawah agar seluruh lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Ketersediaan lahan pertanian di Desa Talekoi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan taraf hidup petani.	Petani dan masyarakat Desa Talekoi.	Diperlukan pembuatan persawahan skala prioritas untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.	Pembuatan persawahan skala prioritas dapat membantu meningkatkan produksi pertanian, mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan dari luar desa, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Talekoi.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	eningkatan Jalan Usaha Tani RT.004 Desa Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan anggaran.	Masyarakat di RT.004 Desa Gunung Rantau yang membutuhkan akses jalan yang lebih baik.	RT.004 Desa Gunung Rantau membutuhkan peningkatan jalan usaha tani untuk memudahkan transportasi dan pengiriman hasil pertanian.	Dengan pengaspalan jalan, warga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan mereka.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani di Persawahan Duruyan Ranjak belum dibuat sehingga sulit untuk mengangkut hasil panen ke tempat penjualan	Petani di Persawahan Duruyan Ranjak	Jalan Usaha Tani yang belum dibuat memiliki panjang sekitar 1,5 km.	Dibutuhkan pembangunan Jalan Usaha Tani agar petani dapat mengangkut hasil panen dengan mudah dan lebih efisien.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani di RT.001 Desa Gunung Rantau perlu dicor beton agar lebih tahan lama	Warga Desa Gunung Rantau yang bekerja di sektor pertanian	Jalan Usaha Tani yang berlumpur dan licin saat hujan dapat mempersulit warga dalam menga	Dengan pengaspalan jalan, warga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan mereka.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan pasar Desa Marawan Lama perlu direhabilitasi dan menjadi skala prioritas pembangunan.	Masyarakat Desa Marawan Lama	: Pelabuhan pasar Desa Marawan Lama membutuhkan rehabilitasi.	Pemerintah dan masyarakat Desa Marawan Lama mengajukan usulan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kecamatan.	(Marawan Lama, Kec. Dusun Utara)	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Desa Talekoi belum memiliki BTS Telkomsel, sehingga akses internet dan sinyal telepon masih terbatas.	Warga Desa Talekoi yang menggunakan layanan telepon seluler dan internet.	Dibutuhkan adanya BTS Telkomsel agar warga Desa Talekoi dapat memiliki akses internet dan sinyal telepon yang memadai.	Infrastruktur telekomunikasi yang memadai dapat mendukung perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat desa	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (14 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	bat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHM KATOLIK di Gunung Rantau.	memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Desa Maruga belum memiliki ambulans yang dapat digunakan dalam keadaan darurat.	Masyarakat Desa Maruga yang membutuhkan akses transportasi medis dalam keadaan darurat.	Belum adanya ambulans di Desa Maruga dapat mempersulit proses penanganan medis dalam keadaan darurat.	Pembelian ambulans dapat meningkatkan kemampuan penanganan medis dan keselamatan masyarakat Desa Maruga.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya tempat ibadah bagi jemaat GKE SINAI di Gunung Rantau.	Jemaat GKE SINAI Gunung Rantau.	Perlu dibangun pembangunan baru untuk gereja tersebut.	Tidak ada cukup ruang di gereja yang ada saat ini untuk menampung jumlah jemaat yang ada.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional Keagamaan Kelompok Yasinan AN-NUR di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota Kelompok Yasinan AN-NUR di Gunung Rantau.	Kelompok Yasinan AN-NUR adalah kelompok keagamaan di Gunung Rantau yang memberikan layanan kepada masyarakat setempat.	Operasional keagamaan Kelompok Yasinan AN-NUR memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional Keagamaan SHA GKE di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHA GKE di Gunung Rantau.	Anggota jemaat dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan keagamaan dari SHA GKE di Gunung Rantau.	Operasional keagamaan SHA GKE memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat setempat.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Operasional keagamaan TKA-TP AL-QUR&AN MIDAUL KHAIRIAH di Gunung Rantau terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.	Anggota TKA-TP AL-QUR&AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	Anggota TKA-TP AL-QUR&AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	Anggota TKA-TP AL-QUR&AN MIDAUL KHAIRIAH dan jemaah yang membutuhkan layanan keagamaan di Gunung Rantau.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pemasangan jaringan listrik di Desa Maruga.	Warga Desa Maruga.	Desa Maruga belum memiliki akses listrik yang memadai.	&Pemasangan jaringan listrik akan memberikan dampak positif bagi warga dan mempermudah aktivitas sehari-hari. Desa Maruga terletak di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama.&	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Masjid NURUL MUTTAQIN di Gunung Rantau terhambat oleh keterbatasan anggaran	jamaah masjid Nurul Muttaqin Desa unung Rantau	Masjid NURUL MUTTAQIN adalah sebuah proyek pembangunan masjid di Gunung Rantau yang membutuhkan dukungan finansial dan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan proyek tersebut.	Pembangunan Masjid NURUL MUTTAQIN di Gunung Rantau penting untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat sekitar.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehabilitasi gereja Katholik SANTO PETRUS belum selesai.	Umat Katholik yang beribadah	Perlu dilanjutkan rehabilitasi untuk gereja tersebut.	Adanya kerusakan pada bangunan gereja yang membutuhkan perbaikan.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rehabilitasi langgar NURUL IMAN masih dalam proses.	Jamaah langgar NURUL IMAN Gunung Rantau.	Perlu dilanjutkan rehabilitasi untuk langgar tersebut.	Kerusakan pada langgar membutuhkan perbaikan agar bisa digunakan kembali.	(Gunung Rantau, Kec. Dusun Utara)	
11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	rumah ibadah di Desa Talekoi mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	Pemuka agama, jemaat, dan masyarakat Desa Talekoi.	Diperlukan perbaikan rumah ibadah agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	Diperlukan perbaikan rumah ibadah agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.	(Talekoi, Kec. Dusun Utara)	
12	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rumah Ibadah Kristen dan Katholik di Desa Maruga membutuhkan bantuan hibah untuk pemeliharaan dan pembangunan.	Umat Kristen dan Katolik di Desa Maruga yang menggunakan rumah ibadah tersebut.	Rumah Ibadah Kristen dan Katholik di Desa Maruga membutuhkan pemeliharaan dan pembangunan agar dapat terus berfungsi dengan baik.	Bantuan hibah dapat membantu pemeliharaan dan pembangunan rumah ibadah, sehingga dapat terus digunakan dan memberikan manfaat bagi umat Kristen dan Katolik di Desa Maruga.	(Maruga, Kec. Dusun Utara)	
13	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Desa Tarusan belum memiliki akses listrik PLN, sehingga masyarakat masih menggunakan sumber listrik alternatif yang kurang efektif dan kurang terjamin keamanannya.	Masyarakat Desa Tarusan.	Ketersediaan listrik PLN di Desa Tarusan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, belajar, dan mengakses informasi	Ketersediaan listrik PLN dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membuka peluang baru dalam bidang perekonomian.	(Tarusan, Kec. Dusun Utara)	
14	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemasangan Jaringan Listrik Ke Kampung Desa Majundre	Masyarakatt Desa majundre	Kampung Desa Majundre belum memiliki jaringan listrik sehingga warga sulit mendapatkan akses listrik untuk kebutuhan sehari-hari.	Pemasangan Jaringan Listrik Ke Kampung Desa Majundre	(Majundre, Kec. Dusun Utara)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : IDEHAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (3 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Permintaan biaya siswa sd, sltp untuk 158 murid dan siswa.	siswa	Permintaan biaya siswa sd, sltp untuk 158 murid dan siswa	Permintaan biaya siswa sd, sltp untuk 158 murid dan siswa	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Mobile Siswa Dan Guru SMP Negeri 6	Guru dan Siswa	Mobile siswa dan guru SMP Negeri 6 dilakukan untuk memudahkan siswa dan guru dalam mengakses kegiatan belajar mengajar di sekolah	Siswa dan guru tersebut membutuhkan mobil untuk memudahkan transportasi ke sekolah	(SMP Negeri 6 Desa Tabjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Bermain Dalam Dan Luar Tk Santa Melania.	Guru dan Siswa	Pengadaan alat bermain dalam dan luar TK Santa Melania dilakukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan anak usia dini	Alat bermain tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di TK Santa Melania	(TK Santa Melania Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Permintaan Penambahan Tenaga Kesehatan Perawat.	Masyarakat	Perlu Penambahan Tenaga Kesehatan Perawat untuk dapat meningkatkan layanan kesehatan	Kurangnya tenaga kesehatan di Puskesmas Desa Teluk Mampun, terutama perawat. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan yang kurang optimal dan sulit dilakukan dengan efektif dan efisien	(Desa teluk mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (32 Usulan)								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Penimbunan / Penataan Lapangan Sepak Bola Desa Baru	Masyarakat	Penimbunan / Penataan Lapangan Sepak Bola Desa Baru	Penimbunan / Penataan Lapangan Sepak Bola Desa Baru	(Desa Baru, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan PDAM	Masyarakat	Pengadaan PDAM di Desa Tanjung Jawa merupakan salah satu proyek pembangunan yang bertujuan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat desa	Sumber air yang akan digunakan berasal dari sumber air yang sudah ada di desa	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan Cekdam Untuk Irigasi Pertanian, Sebanyak 8 Pintu, Yang Terdiri Dari 2 Cekdam Yang Besar dan 6 Cekdam Yang Kecil.	Masyarakat	kurangnya sumber air irigasi yang dapat digunakan oleh masyarakat petani di Desa Teluk Mampun. Hal ini menyebabkan produktivitas pertanian rendah dan tidak optimal.	Pembangunan Cekdam Untuk Irigasi Pertanian dapat meningkatkan pruduksi pertanian	(Desa Teluk mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan Gedung Badminton.	Masyarakat	Pembangunan Gedung Badminton.	Pembangunan Gedung Badminton.	(Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan Kantor BPD.	Masyarakat	Pembangunan Kantor BPD di perlukan untuk mamfasilitasi pelaksanaan administrasi dan kegiatan pertemuan	Pembangunan Kantor BPD di perlukan untuk mamfasilitasi pelaksanaan administrasi dan kegiatan pertemuan	(Desa Teluk mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan Perpustakaan Desa (Permanen)	Masyarakat	Pembangunan Perpustakaan Desa (Permanen)	Pembangunan Perpustakaan Desa (Permanen)	(Danau Sadar, Danau Sadar, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan Perumahan Dinas Guru 3 Unit Di Smpn-6.	Guru	Pembangunan perumahan dinas guru sebanyak 3 unit di SMPN-6 dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup guru dan memudahkan akses mereka ke sekolah	Pembangunan perumahan dapat meningkatkan kualitas hidup guru dan meningkatkan motivasi mereka dalam proses belajar mengajar	(SMPN-6 Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan Puskesdes Terpadu.	Masyarakat	Masyarakat butuh bangunan poskesdes terpadu	Masyarakat butuh bangunan poskesdes terpadu agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik	(Desa Penda Asam, Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembuatan Gedung Baru Sma-5 Tanjung Jawa 3 Unit.	Kepala Sokolah, Guru dan Siswa	Pembuatan gedung baru SMA-5 Tanjung Jawa sebanyak 3 unit dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan bagi siswa SMA di wilayah tersebut	Gedung baru tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SMA-5 Tanjung Jawa dan meningkatkan minat masyarakat untuk mengirimkan anak mereka ke sekolah tersebut	(SMA-5 Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembuatan Kantor Sekolah SDN 1 Tanjung Jawa 2 Unit.	Kantor Kepala Sekolah dan Guru	Pembuatan kantor sekolah SDN 1 Tanjung Jawa sebanyak 2 unit dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan administrasi di sekolah	lokasi pembangunan sudah disetujui dan dibutuhkan anggaran yang cukup untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan, seperti ruang kelas, ruang administrasi, perpustakaan, dan toilet.	(SDN 1 Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penimbunan Lapangan Sekolah. Di Empat Lokasi Yaitu : SDN 1, SDN 2, SMPN-6 Dan Madrasah Ibtidayah Desa Tanjung Jawa.	Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	Penimbunan Lapangan Sekolah. Di Empat Lokasi Yaitu : SDN 1, SDN 2, SMPN-6 Dan Madrasah Ibtidayah Desa Tanjung Jawa dilakukan untuk meningkatkan fasilitas olahraga siswa.	Penimbunan lapangan sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan siswa	(SDN 1, SDN 2, SMPN-6 Dan Madrasah Ibtidayah Desa Tanjung Jawa., Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelesaian Aula Gedung Kantor Pertemuan	Masyarakat	Penyelesaian Aula Gedung Kantor Pertemuan	Penyelesaian Aula Gedung Kantor Pertemuan	(Kantor Desa Danau sadar, Danau Sadar, Kec. Dusun Selatan)	
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehab Berat Ruang Kelas Di Madrasah Ibtidayah 4 Lokal	Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	Rehab berat ruang kelas di Madrasah Ibtidayah sebanyak 4 lokal dilakukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas belajar siswa	Ruang kelas tersebut membutuhkan perbaikan yang cukup besar karena kondisinya yang sudah rusak.	(Madrasah Ibtidayah Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehab Total Polindes Desa.	Masyarakat	Rehab total polindes desa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.	Polindes tersebut membutuhkan perbaikan yang cukup besar karena kondisinya yang sudah lama dan rusak	(Polindes Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembersihan sungai Huruk Besar, sungai Huruk Kecil, dan sungai Kutapi	Masyarakat	Pembersihan sungai Huruk Besar, sungai Huruk Kecil, dan sungai Kutapi dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan memperkuat daya dukung ekosistem lokal	Sungai-sungai tersebut membutuhkan pembersihan untuk mencegah banjir dan memperbaiki kualitas air	(Sungai Huruk Besar, sungai Huruk Kecil, dan sungai Kutapi, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembersihan Sungai Maketen Kurang Lebih 3 Kilometer.	Masyarakat	Sungai Maketen kurang lebih sepanjang 3 kilometer akan dibersihkan	Pembersihan sungai, jenis kontaminan yang harus diatasi, dan dampak lingkungan	(Sungai Maketen, Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)	
17	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan WC Untuk Poskesdes Desa Muara Talang.	Masyarakat	Pembuatan WC	Pembuatan WC Untuk Poskesdes Desa Muara Talang.	(Posekesdes Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan WC Untuk Sekolah SDN Muara Talang.	Guru dan Siswa	Pembuatan WC Untuk Sekolah SDN Muara Talang.	Pembuatan WC Untuk Sekolah SDN Muara Talang.	(SDN Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cor Beton Jalan Padat Karya Panjangnya 700 Meter.	Masyarakat	Cor Beton Jalan Padat Karya Panjangnya 700 Meter.	Jalan padat karya banyak rusak sehingga perlu di cor beton agar jalan menjadi lebih baik	(Jalan Padat karya panjang 700 meter, Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)	
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cor Beton Jalan Usaha Tani 2000 Meter	Masyarakat	12 Cor beton jalan usaha tani sepanjang 2000 meter dilakukan untuk memudahkan petani dalam mengakses kebun dan lahan pertanian mereka	Jalan usaha tani tersebut akan digunakan oleh kendaraan berat sehingga perlu dibangun dengan material yang kuat dan tahan lama.	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan jembatan cor beton jalan antar desa tanjung jawa â€“ desa teluk mampun 170 meter.	masyarakat	Lanjutan jembatan cor beton jalan antar desa tanjung jawa â€“ desa teluk mampun sepanjang 170 meter akan dibangun untuk mempermudah akses transportasi antar desa.	pembuatan jalan ini dapat meningkatkan konektivitas antara Tanjung Jawa dan daerah lain sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan peningkatan (penimbunan) badan jalan antar desa tanjung jawa â€“ desa majundre.	Masyarakat	Terdapat proyek untuk meningkatkan kualitas jalan antar desa yang sedang dilakukan, yang mencakup penimbunan badan jalan di antara Desa Tanjung Jawa dan Desa Majundre	Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan semua proyek tersebut mungkin cukup besar dan dapat menjadi masalah jika tidak ada anggaran yang cukup.	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Rekontruksi / Peningkatan Jalan Desa Teluk Mampun â€“Desa Penda Asam Sepanjang 1,1 KM Yang Belum Selesai.	Masyarakat	Masyarakat butuh peningkatan jalan antar desa agar memudahkan perjalanan dan meningkatkan ekonomi	Masyarakat butuh peningkatan jalan antar desa agar memudahkan perjalanan dan meningkatkan ekonomi	(Desa Teluk mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Titian Usaha Tani 600 Meter	Masyarakat	Lanjutan titian usaha tani sepanjang 600 meter dilakukan untuk memudahkan petani dalam mengakses kebun dan lahan pertanian mereka	Titian usaha tani sebelumnya sudah dibangun dan titian baru hanya merupakan kelanjutan dari titian lama	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutkan Aspal Jalan Yahya Tagan Kurang Lebih 2 Kilometer.	Masyarakat	Aspal jalan Yahya Tagan yang rusak akan dilanjutkan penimbunan selama kurang lebih 2 kilometer	Biaya yang diperlukan untuk proyek penimbunan jalan akan dinilai dan akan dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan	(Jalan Yahya Tagan Desa Penda Asam, Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)	
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Induk Dalam Desa Penda Asam.	Masyarakat	Pelebaran Jalan Induk Dalam Desa Penda Asam.	Pelebaran Jalan Induk Dalam Desa Penda Asam.	(Penda Asam, Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan badan Jalan Tanjung Jawa - Jalan Negara Pendang-Palangka raya 3000m	masyarakat	Pembuatan badan Jalan Tanjung Jawa - Jalan Negara Pendang- Palangka raya sepanjang 3000 meter dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.	Pembuatan jalan ini dapat meningkatkan konektivitas antara Tanjung Jawa dan daerah lain sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi	(Jalan Tanjung Jawa - Jalan Negara Pendang-Palangka raya 3000m, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Jalan Baru Karena Jalan Yang Ada Menuju Ke Desa Sudah Dekat Longsor.	Masyarakat	Pembuatan Jalan Baru Karena Jalan Yang Ada Menuju Ke Desa Sudah Dekat Longsor.	Pembuatan Jalan Baru Karena Jalan Yang Ada Menuju Ke Desa Sudah Dekat Longsor.	(Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Jalan Titian Usaha Tani 200 Meter	Masyarakat	Masyarakat butuh peningkatan jalan antar desa agar memudahkan perjalanan dan meningkatkan ekonomi	Masyarakat butuh peningkatan jalan antar desa agar memudahkan perjalanan dan meningkatkan ekonomi	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Jembatan Penyebrangan Tanggul Desa Tanjung Jawa 6 Buah	Masyarakat	Masyarakat butuh pembuatan jembatan penyebrangan tanggul agar memudahkan perjalanan dan meningkatkan ekonomi	Dengan dibangunnya jembatan penyebrangan tanggul akan memudahkan perjalanan masyarakat dan meningkatkan ekonomi mereka	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Yang Tenggelam Saat Banjir Antara Muara Talang Menuju Teluk Telaga.	Masyarakat	Perbaikan Jalan yang Tenggelam	Perbaikan Jalan yang Tenggelam	(Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Siring Tanah Longsor RT. 03 Panjangnya 350 Meter.	Masyarakat	Siring Tanah Longsor RT. 03 Panjangnya 350 Meter.	Siring Tanah Longsor RT. 03 Panjangnya 350 Meter.	(RT. 03, Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)	
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan (2 Usulan)								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bantuan Bedah Rumah Untuk Warga Yang Terkena Tanah Longsor.	Masyarakat	Bantuan Bedah Rumah Untuk Warga Yang Terkena Tanah Longsor.	Bantuan Bedah Rumah Untuk Warga Yang Terkena Tanah Longsor.	(Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pemasangan Tiang Listrik Jalan Padat Karya Dan Jalan Kurnain.	Masyarakat	Pemasangan tiang listrik akan dilakukan di Jalan Padat Karya dan Jalan Kurnain.	Poyek pemasangan tiang listrik akan membantu meningkatkan akses listrik bagi masyarakat di daerah pedesaan dan akan memerlukan biaya yang signifikan.	(Jalan Padat Karya dan Jalan Kurnain., Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (6 Usulan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan alat penangkap nelayan 15 unit	Masyarakat	total biaya untuk pembelian 15 unit alat penangkap nelayan adalah Rp 150 juta	setiap alat penangkap nelayan akan dibeli dengan harga Rp 10 juta.	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Bantuan Mesin Perontok Padi 4 Unit.	Masyarakat	kurangnya alat dan mesin pertanian yang memadai di Desa Teluk Mampun. Hal ini menyebabkan proses panen dan pengolahan hasil pertanian menjadi tidak efisien dan kurang produkti	bantuan mesin dapat meningkat produksi pertanian	(Desa Teluk mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengadaan mesin panen padi 3 unit:	masyarakat	total biaya untuk pembelian 3 unit mesin panen padi adalah Rp 150 juta.	setiap mesin panen padi akan dibeli dengan harga Rp 50 juta.	(Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Percetakan Sawah.	Masyarakat	Lokasi percetakan sawah di Desa Penda Asam	Tujuan dari percetakan sawah dan dampaknya terhadap lingkungan serta biaya yang diperlukan untuk proyek tersebut akan dievaluasi.	(Desa Penda asam, Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengadaan subsidi pupuk 13 ton untuk 13 kelompok tani	Masyarakat	Total ada 13 kelompok tani yang akan menerima subsidi pupuk, dengan total pupuk yang akan didistribusikan sebanyak 13 ton.	Setiap kelompok tani akan menerima 1 ton pupuk	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengadaan ternak sapi 20 ekor dan ternak ayam 1000 ekor	Masyarakat	Total biaya untuk pembelian 20 ekor sapi adalah Rp 300 juta, dan total biaya untuk pembelian 1000 ekor ayam adalah Rp 50 juta	setiap sapi akan dibeli dengan harga Rp 15 juta, sedangkan setiap ekor ayam akan dibeli dengan harga Rp 50 ribu.	(Desa tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (4 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Menara Mesjid Miftahul Janah RT. 03.	Masyarakat	Masyarakat butuh pembangunan menara mesjid agar suara sound system bisa lebih baik	Masyarakat butuh pembangunan menara mesjid agar suara sound system bisa lebih baik	(RT. 03 Desa Penda Asam, Penda Asam, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembuatan Menara Untuk Mesjid.	Masyarakat	Pembuatan Menara Untuk Mesjid.	Pembuatan Menara Untuk Mesjid.	(Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Diberikan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Desa Teluk Mampun Untuk Perusahaan Stockpile Batubara Yang Berada Di Desa Tanjung Jawa.	Masyarakat	masyarakat butuh pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup	minimnya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja di Desa Teluk Mampun. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang menganggur dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka	(Desa teluk mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Subsidi Listrik Untuk Pemasangan Listrik Bagi Masyarakat.	Masyarakat	subsidi listrik bagi masyarakat dapat meringankan biaya yang dibayarkan masyarakat untuk kebutuhan listrik	Masih banyaknya masyarakat di Desa Teluk Mampun yang belum memiliki akses listrik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti penerangan rumah dan usaha.	(Desa Teluk mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	

DAFTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NAMA ANGGOTA DEWAN : Drs. Zainal Abidin

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan (12 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5 ruangan di SDN Teluk Telaga belum dipasang keramik sehingga perlu adanya pengadaan keramik	Siswa dan Siswi serta Guru	SDN Teluk Telaga perlu pengadaan keramik untuk 3 ruang kelas, 1 ruang guru dan 1 ruang kantor	Pengadaan keramik di SDN Teluk Telaga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan	(SDN Teluk Telaga, Teluk Telaga, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Halaman SDN Teluk Mampun sering banjir dan becek sehingga perlu penimbunan halaman	Siswa, guru dan orang tua siswa SDN Teluk Mampun	Penimbunan halaman SDN Teluk Mampun dilakukan untuk memperbaiki kondisi halaman yang berlubang dan tidak rata sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam beraktivitas di halaman sekolah	Tidak ada kendala teknis yang menghambat pelaksanaan penimbunan halaman, seperti masalah tanah atau kondisi cuaca yang tidak mendukung.	(SDN Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah WC tersedia masih belum mencukupi di SDN dan SMP Desa Muara Talang sehingga perlu adanya penambahan	Kepala Sekolah, guru dan siswa	Perlu pembuatan WC di SDN dan SMP Desa Muara Talang agar sanitasi menjadi lebih baik dan lingkungan menjadi bersih dan nyaman	Perlu pembuatan WC di SDN dan SMP Desa Muara Talang agar sanitasi menjadi lebih baik dan lingkungan menjadi bersih dan nyaman	(SDN dan SMP Desa Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	SDN Teluk Telaga membutuhkan pembangunan pagar sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan siswa, guru, dan karyawan sekolah.	siswa, guru, dan karyawan sekolah.	SDN Teluk Telaga adalah sebuah sekolah dasar yang terletak di daerah padat penduduk. Sekolah ini memiliki siswa, guru, dan karyawan yang cukup banyak, sehingga keamanan dan keselamatan menjadi salah satu hal yang penting	Anggaran yang tersedia terbatas dan perlu dipertimbangkan agar pembangunan pagar dapat dilakukan tanpa mengganggu anggaran pendidikan di sekolah.	(SDN Teluk Telaga, Teluk Telaga, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Ruang kelas di Mts Desa Tanjung Jawa mengalami kerusakan sehingga perlu segera direhab	Siswa dan Siswi serta Guru di Mts Desa Tanjung Jawa	Mereka berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.	Program rehap ruang kelas di Mts Desa Tanjung Jawa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan	(Mts Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SMPN 6 Dusun Selatan Desa Tanjung Jawa masih mengalami kekurangan mobiler sehingga perlu adanya penambahan	Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	Permohonan bantuan untuk memfasilitasi atau menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar-mengajar di sekolah.	SMPN 6 Dusun Selatan Desa Tanjung Jawa membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa	(SMPN 6 Dusun Selatan Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SMPN 6 Dusun Selatan di Desa Tanjung Jawa masih perlu penambahan karena guru yang ada belum mencukupi	Guru dan Siswa	Jumlah guru yang perlu ditambahkan yaitu 4 guru negeri dan 1 guru honor	Dengan jumlah guru yang cukup akan meningkatkan kualitas pendidikan	(SMPN 6 Dusun Selatan di Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Halaman TK Santa Malinia Desa Tanjung Jawa sering banjir dan becek sehingga perlu siring timbun	Siswa, guru dan orang tua siswa di TK Santa Malinia	Penimbunan halaman di TK Santa Malinia dilakukan untuk memperbaiki kondisi halaman yang berlubang dan tidak rata sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam beraktivitas di halaman sekolah.	Tidak ada kendala teknis yang menghambat pelaksanaan penimbunan halaman, seperti masalah tanah atau kondisi cuaca yang tidak mendukung.	(TK Santa Malinia Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Honor guru TK Munawwarah masih kecil sehingga perlu ditambah untuk meningkatkan semangat kerja	Guru TK Munawwarah	Insentif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai pengakuan atas prestasi atau kinerja yang baik.	Kenaikan biaya honor bagi 3 guru TK Munawwarah bagi dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja dan memperoleh hasil yang lebih baik	(TK Munawwarah Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kurangnya peralatan bermain dan halaman yang sering banjir dan becek di TK Tekuk Telaga sehingga mempengaruhi hasil pembelajaran	Guru dan Siswa	Pengadaan peralatan bermain dan penimbunan halaman dapat meningkatkan kualitas pendidikan	Pengadaan peralatan bermain dan penimbunan halaman dapat meningkatkan kualitas pendidikan	(TK Tekuk Telaga, Teluk Telaga, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	TK Santa Malinia Desa Tanjung Jawa belum mempunyai peralatan bermain anak-anak yang cukup sehingga perlu penambahan	Guru dan siswa	Peralatan bermain anak-anak dapat mempermudah proses belajar mengajar dan hasil yang lebih baik	Peralatan bermain anak-anak dapat mempermudah proses belajar mengajar dan hasil yang lebih baik	(TK Santa Malinia Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Masih adanya anak yang putus sekolah di Desa Teluk Mampunsehingga perlu adanya program paket	Anak yang putus sekolah di Desa Teluk Mampun	Pengadaan program paket berupa paket A, B dan C di Desa Teluk Mampun	Dengan pengadaan program paket berupa paket A, B dan C anak yang putus sekolah tetap mendapatkan pendidikan	(Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (9 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat masih kekurangan air bersih	Masyarakat	Masyarakat masih kekurangan air bersih sehingga perlu 1 unit sumur bor	Dengan pengadaan sumur bor masyarakat akan mudah mendapatkan air bersih	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masalah genangan air pada musim hujan yang mempengaruhi aktivitas warga dan lingkungan sekitar.	Warga di daerah yang terkena dampak banjir karena masalah genangan air yang disebabkan oleh kurangnya drainase yang memadai.	Drainase adalah sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya.	Pembuatan drainase dapat mengurangi dampak banjir dan meningkatkan lingkungan yang lebih sehat dan aman untuk penduduk.	(Baru, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Belum tersedianya prasarana badminton sehingga perlu dibangunkan gedung badminton	Masyarakat	Antusias masyarakat yang tinggi pada olahraga badminton sehingga perlu dibangun prasarana gedung badminton	Pembangunan gedung badminton akan menambah Antusias masyarakat untuk berolahraga dengan aman dan nyaman	(Desa Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Puskesdes Muara Talang masih belum memiliki WC sehingga perlu segera dibangun	Masyarakat	Pembuatan WC di Puskesdes Muara Talang akan memiliki sanitasi yang baik sehingga masyarakat akan dapat berobat dengan nyaman	Pembuatan WC di Puskesdes Muara Talang akan memiliki sanitasi yang baik sehingga masyarakat akan dapat berobat dengan nyaman	(Puskesdes Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehab Puskesdes Desa Tanjung Jawa	Masyarakat	Rehab Puskesdes perlu dilakukan untuk memperbaiki bangunan tempat layanan kesehatan desa	Tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung program rehabilitasi, termasuk anggaran dan peralatan medis yang memadai.	(Puskesdes Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan desa yang lama banyak rusak dan dekat dengan longsor sehingga perlu pembuatan jalan desa yang baru	Masyarakat	Jalan desa yang lama banyak rusak dan dekat dengan longsor sehingga perlu pembuatan jalan desa yang baru	Pembuatan jalan desa yang baru akan memudahkan aktivitas warga sehari-hari	(Desa Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan titian Dusun Bambaler mengalami kerusakan sehingga perlu di cor beton	Orang-orang yang menggunakan Jalan titian itu untuk kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman barang, perjalanan menuju ke sekolah, tempat kerja, ataupun aktivitas lainnya.	Dengan cor beton titian akan memperbaiki dan memperkuat titian tersebut	cor beton titian akan memudahkan kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman barang, perjalanan menuju ke sekolah, tempat kerja, ataupun aktivitas lainnya dengan aman dan nyaman.	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	: Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas antara wilayah-wilayah yang terpisah karena tidak adanya jembatan yang memadai.	Warga yang memerlukan akses transportasi antar wilayah.	Jembatan adalah infrastruktur penting yang dapat memudahkan akses transportasi antar wilayah.	Pembangunan jembatan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.	(Jembatan Datu Bajingkit Desa Baru, Baru, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Muara Talang Menuju Teluk Telaga	Orang-orang yang menggunakan Jalan itu untuk kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman barang, perjalanan menuju ke sekolah, tempat kerja, ataupun aktivitas lainnya.	Peningkatan jalan tersebut akan meningkatkan aksesibilitas danmeningkatkan efisiensi transportasi barang dan orang, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.	Peningkatan jalan Muara Talang menuju Teluk Telaga akan mampu meningkatkan jumlah pengguna jalan dan volume transportasi di daerah tersebut.	(Jalan Muara Talang menuju Teluk Telaga, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2 Usulan)								
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Honor pengelola tempat pembuangan akhir sampah masih kecil sehingga perlu ditambah untuk meningkatkan semangat kerja	Pengelola tempat pembuangan akhir sampah	Insentif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai pengakuan atas prestasi atau kinerja yang baik.	Kenaikan insentif bagi pengelola tempat pembuangan akhir sampah dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja dan memperoleh hasil yang lebih baik	(Desa Baru, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya sarana olahraga sehingga perlu adanya bantuan untuk kelengkapan sarana olahraga	Masyarakat	Sarana olahraga yang dibutuhkan seperti 1 paket seragam, net dan bola voli untuk Karang Taruna	Dengan tersedianya sarana olahraga akan meningkatkan antusias masyarakat untuk ikut berolahraga	(Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
2.09.3.25.3.27.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (4 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Banyak dari penduduk yang berprofesi sebagai nelayan sehingga membutuhkan Bantuan bibit ikan dapat agar dapat meningkatkan hasil perikanan	Masyarakat	Bantuan bibit ikan dapat meningkatkan hasil perikanan	Bantuan bibit ikan dapat meningkatkan hasil perikanan dan membuat ekonomi masyarakat jadi lebih baik	(Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Banyak dari penduduk yang berprofesi sebagai nelayan sehingga membutuhkan sarana dan prasarana perikanan	Masyarakat	Sarana dan prasarana perikanan dapat meningkatkan hasil perikanan	Sarana dan prasarana perikanan dapat meningkatkan hasil perikanan dan membuat ekonomi masyarakat jadi lebih baik	(Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Belum tersedianya kolam ikan di Desa Teluk Telaga sehingga perlu diberikan bantuan dari pemerintah untuk Pembuatan kolam ikan dan bantuan bibit ikan dan pakan	Masyarakat	Pembuatan kolam ikan dan bantuan bibit ikan dan pakan dapat meningkatkan hasil perikanan di Desa Teluk Telaga	Pembuatan kolam ikan dan bantuan bibit ikan dan pakan dapat meningkatkan hasil perikanan di Desa Teluk Telaga	(Desa Teluk Telaga, Teluk Telaga, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Masalah genangan air pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau akan berpengaruh pada hasil pertanian sehingga perlu dibangun saluran irigasi	Masyarakat	Irigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengairi lahan pertanian	Pembuatan irigasi dapat membantu pengairan lahan pertanian sehingga dapat meningkat produksi pertanian	(Desa Teluk Telaga, Teluk Telaga, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mohon di bangun tower telkomsel / xl sehingga mendapat jaringan internet	Orang-orang yang tinggal atau bekerja di daerah yang tidak memiliki akses internet yang memadai.	Daerah yang dimaksud dapat berupa daerah terpencil, daerah yang jauh dari pusat kota, atau daerah yang sulit dijangkau oleh operator internet.	Di daerah tersebut terdapat infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan untuk membangun tower.	(Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
3.30.2.17.3.31.01.0000 - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (1 Usulan)								
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Halaman pasar banyak berlobang dan mengalami kerusakan sehingga perlu peningkatan cor beton	Masyarakat	Diperlukan peningkatan cor beton halaman pasar agar kegiatan di pasar menjadi lebih mudah dan lancar	Peningkatan jalan akan membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas bagi warga desa.	(Pasar Desa Baru, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah (20 Usulan)								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bangunan TPA Al Barkah mengalami kerusakan sehingga perlu untuk direhab berat	Guru dan Siswa	Dengan adanya bantuan hibah untuk rehab bangunan TPA Al Barkah dapat melaksanakan belajar mengajar dengan nyaman dan aman.	Dengan adanya bantuan hibah untuk rehab bangunan TPA Al Barkah dapat melaksanakan belajar mengajar dengan nyaman dan aman.	(TPA Al Barkah Desa Baru, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bangunan TPA Al Barkah mengalami kerusakan sehingga perlu untuk direhabilitasi	Guru dan Siswa	Dengan adanya bantuan hibah untuk rehab bangunan TPA Al Iman dapat melaksanakan belajar mengajar dengan nyaman dan aman.	Dengan adanya bantuan hibah untuk rehab bangunan TPA Al Iman dapat melaksanakan belajar mengajar dengan nyaman dan aman.	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Banyak warga yang berada di pinggiran Sungai Barito terkena bencana longsor	Masyarakat	Banyak warga yang berada di pinggiran Sungai Barito terkena bencana longsor sehingga perlu bantuan baik berupa sembako dan pembangunan rumah baru	Pengadaanbantuan baik berupa sembako dan pembangunan rumah baru akanmeringankan beban warga yang terkena bencana longsor	(Desa Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Belum tersedianya gedung serbaguna untuk kegiatan masyarakat	Masyarakat	Gedung serbaguna dapat digunakan masyarakat untuk acara hajatan, acara kematian dan lain-lain	Dengan adanya Gedung serbaguna masyarakat tidak perlu repot untuk mendirikan panggung dan tenda pada setiap acara kegiatan masyarakat	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Belum tersedianya tenda sehingga masyarakat harus meminjam tenda untuk kegiatan masyarakat	Masyarakat	Pengadaan tenda dapat digunakan masyarakat untuk acara hajatan, acara kematian dan lain-lain	Dengan pengadaan tenda masyarakat tidak perlu repot meminjam tenda pada setiap acara kegiatan masyarakat	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja di Desa Tanjung Jawa masih kekurangan WC sehingga perlu adanya penambahan	Masyarakat	Perlu pembuatan 5 WC untuk Gereja di Desa Tanjung Jawa	dengan adanya penambahan sanitasi yang baik masyarakat akan nyaman dalam melaksanakan ibadah di gereja	(Gereja di Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Gereja Katholik Desa Tanjung Jawa masih belum memiliki menara sehingga perlu mendapat hibah agar dapat segera dibangun	Masyarakat	Bantuan hibah untuk pembangunan menara Gereja Katholik Desa Tanjung Jawa bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat.	Dengan adanya bantuan hibah untuk menara Gereja Katholik Desa Tanjung Jawa dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Gereja Katholik Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kuburan Muslim Desa Tanjung Jawa masih belum memiliki pagar sehingga perlu untuk mendapatkan bantuan hibah agar dapat segera dibangun	Masyarakat	Dengan adanya bantuan hibah untuk pagar Kuburan Muslimin dapat menjadi batas antar perumahan warga dengan tempat pemakaman	Dengan adanya bantuan hibah untuk pagar Kuburan Muslimin dapat menjadi batas antar perumahan warga dengan tempat pemakaman	(Kuburan Muslim Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kusen dan Jendela Tempat Pengajian Al Qur&an Desa Teluk Mampun mengalami kerusakan sehinga perlu diganti	Guru dan siswa	Dengan adanya bantuan hibah akan digunakan untuk penggantian Kusen dan Jendela Tempat Pengajian Al Qur&an Desa Teluk Mampun	Dengan adanya bantuan hibah akan digunakan untuk penggantian Kusen dan Jendela Tempat Pengajian Al Qur&an Desa Teluk Mampun sehingga kegiatan belajar mengajar akan lebih baik	(Tempat Pengajian Al Qur&an Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mesjid Desa Muara Talang masih belum memiliki menara dan pagar sehingga perlu mendapat hibah agar dapat segera dibangun	Masyarakat	Bantuan hibah untuk pembangunan menara dan pagar Mesjid Desa Muara Talang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat.	Dengan adanya bantuan hibah untuk menara dan pagar Mesjid Desa Muara Talang dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Mesjid Desa Muara Talang, Muara Talang, Kec. Dusun Selatan)	
11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mesjid Desa Teluk Mampun masih belum memiliki plafon sehingga perlu banyuan hibah untuk pembuatan plafon	Masyarakat	Bantuan hibah untuk pembuatan plafon Mesjid Desa Teluk Mampun dengan ukuran 10m x 10m	Dengan adanya bantuan hibah untuk pembuatan plafon Mesjid Desa Teluk Mampun dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Mesjid Desa Teluk Mampun, Teluk Mampun, Kec. Dusun Selatan)	
12	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mesjid Miftahul Jannah Desa Teluk Telaga masih belum memiliki pagar sehingga perlu untuk mendapatkan bantuan hibah dapat segera dibangun	Masyarakat	Bantuan hibah untuk pembangunan pagar Mesjid Miftahul Jannah bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat.	Dengan adanya bantuan hibah untuk pagar Mesjid Miftahul Jannah dapat melaksanakan ibadah dengan aman.	(Mesjid Miftahul Jannah Desa Teluk Telaga, Teluk Telaga, Kec. Dusun Selatan)	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Mushalla As Syifa masih belum memiliki menara dan pagar sehingga perlu mendapat hibah agar dapat segera dibangun	Masyarakat	Bantuan hibah untuk pembangunan menara dan pagar Mushalla As Syifa bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat.	Dengan adanya bantuan hibah untuk menara dan pagar Mushalla As Syifa dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Mushalla As Syifa Desa Baru, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
14	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembuatan Siring Timbun Halaman Mesjid Al Mujahidin Desa Baru (Rp. 200.000.000)	Masyarakat	Bantuan hibah untuk pembangunan Mesjid Al Mujahidin bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat.	Dengan adanya bantuan hibah untuk siring timbun halaman Mesjid Al Mujahidin dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Mesjid Al Mujahidin Desa Baru, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
15	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembuatan Siring Timbun Lapangan Sepak Bola Rp. 500.000.000	Masyarakat	Penimbunan Lapangan Sepak Bola dilakukan untuk memperbaiki kondisi lapangan yang sering terendam banjir	Penimbunan Lapangan Sepak Bola diharapkan nantinya akan dapat digunakan untuk berolah raga tanpa terkendala oleh banjir	(Lapangan Sepak Bola Desa Baru, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
16	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Plafon Gereja Katolik Desa Tanjung Jawa mengalami rusak berat sehingga perlu segera di rehab agar masyarakat apat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	Masyarakat	Bantuan hibah untuk pembangunan Gereja Katolik Desa Tanjung Jawa bertujuan untuk rehab plafon yang rusak berat	Dengan adanya bantuan hibah untuk siring timbun halaman Mesjid Nurul Hikmah Desa Tanjung Jawa dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Gereja Katolik Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Plafon Mesjid Nurul Hikmah Desa Tanjung Jawa mengalami rusak berat sehingga perlu segera di rehab agar masyarakat apat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	Masyarakat	Bantuan hibah untuk pembangunan Mesjid Nurul Hikmah Desa Tanjung Jawa bertujuan untuk rehab plafon yang rusak berat	Dengan adanya bantuan hibah untuk siring timbun halaman Mesjid Nurul Hikmah Desa Tanjung Jawa dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Mesjid Nurul Hikmah Desa Tanjung Jawa, Tanjung Jawa, Kec. Dusun Selatan)	
18	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tanah kuburan muslimin semakin sempit sehingga perlu pelebaran dan pembersihan	Masyarakat	Tanah kuburan muslimin perlu pelebaran dan pembersihan	Tanah kuburan muslimin semakin sempit sehingga perlu pelebaran dan pembersihan	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
19	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	Masih banyak warga yang belum mendapatkan akses listrik	Masyarakat	Pengadaan 2 unit lampu tenaga surya 100 watt	Dengan Pengadaan 2 unit lampu tenaga surya 100 watt masyarakat bisa menggunakan listrik untuk menyalakan lampu dan lain-lain	(Dusun Bambaler, Baru, Kec. Dusun Selatan)	
20	-	-	Pembuatan Siring Timbun Halaman Mesjid Assa Adah (Rp. 200.000.000)	Masyarakat	Bantuan hibah untuk pembangunan Mesjid Assa Adah bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat.	Dengan adanya bantuan hibah untuk siring timbun halaman Mesjid Assa Adah dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman.	(Mesjid Assa Adah Desa Baru, Baru, Kec. Dusun Selatan)	

Selain melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga menerima aspirasi dari masyarakat untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 Februari 2023. Usulan-usulan prioritas yang disampaikan melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan ini kemudian diinput oleh Kecamatan melalui aplikasi SIPD, dengan usulan total berjumlah 570 usulan, dengan total jumlah pagu yang diusulkan sebesar Rp171.357.200.000,00. Usulan-usulan ini kemudian disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tupoksinya untuk ditelaah, apakah akan diterima atau ditolak untuk dimasukkan menjadi program dan kegiatan Perangkat Daerah Terkait tersebut di tahun 2024. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

DRAFT USULAN KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN DUSUN HILIR
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	STATUS DISETUJUI	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Dinas Pendidikan	-	-	Rehab Kantor Korwil dan Rumah Jabatan	(Mengkatip, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
2	Dinas Pendidikan	-	-	Lapangan SDN-3	(Mengkatip RT. 006, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
3	Dinas Pendidikan	-	-	WC Cor Beton SDN-1 Dusun Hilir	(Mengkatip RT. 003, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
4	Dinas Pendidikan	-	-	Rehab Total Perumahan Guru SD dan SMP	(Desa Batilap, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Gang	(Kelurahan Mengkatip RT. 005, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Membangun Baru Rumah Kopel / Barak 3 Pintu	(Mengkatip, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Gedung Serbaguna	(Desa Teluk Timbau . Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa Lehai menuju Ke Desa Damparan	(Desa Lehai - Damparan, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Mesjid Raudatussahalihi	(Desa Kalanis, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Jembatan Cor Beton Pakat Pahari 2	(Kelurahan Mengkatip, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Gang	(Kelurahan Mengkatip RT. 012, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Gang	(Kelurahan Mengkatip RT. 009, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehab Total Jembatan Kuning	(Kelurahan Mengkatip RT. 005, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Jembatan Jalan Umum	(Kelurahan Mengkatip RT. 010, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Jalan Pertanian Lunuk Tamiang	(Kelurahan Mengkatip RT. 010, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Jalan Titian Tani Baruh Parupuk	(Kelurahan Mengkatip RT. 011, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Titian Cor Beton Jalan Pertanian Pakat Pahari 1	(Kelurahan Mengkatip RT. 005, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan Baru Gedung Serba Guna Kelurahan	(Kelurahan Mengkatip, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Jalan Karya Manuntung Menuju Desa Lehai	(Kelurahan Mengkatip (seberang), Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pagar Kantor Kecamatan	(Kantor Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	

21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehab Kantor Kecamatan Dusun Hilir : Atap, Plapon, Lantai/ Keramik dan Instalasi Listrik	(Kantor Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Aula / Gedung Serba Guna Kantor Kecamatan	(Kantor Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peninggian dan Pergeseran Jalan Penghubung antar Desa Mangkatir dan Desa Lehai	(Desa Mangkatir-Desa Lehai, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Cor Beton RT. 0. 005 - RT. 0. 006	(Desa Batampang, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Batampang Menuju Batilap	(Desa Batampang-Desa Batilap, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Lanjutan Betung - Batilap	(Desa Batilap- Desa Teluk Betung, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Cor Jalan Desa Damparan - Teluk Timbau	(Desa Damparan - Desa Teluk Timbau, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Cor Jalan Desa Damparan - Lehai	(Desa Damparan - Desa Lehai, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Tembus Telang Baru Barito Timur	(Desa Kalanis (Barsel) ke Desa Telang Baru (Bartim), Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Desa Sungai Jaya	(Desa Sungai Jaya (RT. 005 dan RT. 006), Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Penghubung Antar Desa Sungai Jaya dan Mahajandau	(Wilayah Desa Sungai Jaya ke Wilayah Desa Mahajandau, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan RT. 001	(Sungai Lunuk Desa Mahajandau, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
33	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Bangun Baru Kantor Desa dan Aula serta Kantor BPD	(Desa Mangkatir, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
34	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Bangun Baru Kantor Desa Lehai	(Desa Lehai, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
35	Dinas Perhubungan	-	-	Pembuatan Pelabuhan Terapung	(Desa Teluk Timbau dan Dusun Muara Puning Dusun Hilir)	2 *	Ya	0,00	
36	Dinas Perhubungan	-	-	Pelabuhan Pasar Lama	(Kelurahan Mengkatip RT. 006, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
37	Dinas Perhubungan	-	-	Pelabuhan Gereja GKE Pandohop	(Kelurahan Mengkatip RT. 003, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
38	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rehab Dermaga UPTD Puskesmas Mengkatip	(Mengkatip, RT. 002 , Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
39	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rehab Total Pelabuhan Tambat Perahu	(Desa Batilap, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	Tower Telkomsel	(Desa Kalanis, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	

41	Sekretariat Daerah	-	-	Lanjutan Pembangunan Mesjid Baiturrahman Desa Mangkatir	(Desa Mangkatir, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
42	Sekretariat Daerah	-	-	Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Hikmah RT. 0. 003	(Desa Batampang, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
43	Sekretariat Daerah	-	-	Teras Mesjid Besar Nurul Iman	(Kelurahan Mengkatip RT. 008, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
44	Sekretariat Daerah	-	-	Pelebaran Teras Langgar Baiturrahmah	(Kelurahan Mengkatip RT. 011, Dusun Hilir)	1 *	Ya	0,00	
	JUMLAH							**0,00**	

DRAFT USULAN KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	STATUS DISETUJUI	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Dinas Pendidikan	-	-	Pengecoran Halaman SDN 1 Penda Asam	(Desa Penda Asam, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
2	Dinas Pendidikan	-	-	Pembuatan Pagar Keliling SDN 1 Penda Asam	(Desa Penda asam, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
3	Dinas Pendidikan	-	-	Rehab Gedung SDN Murung Paken	(Desa Murung Paken, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
4	Dinas Pendidikan	-	-	rehab berat ruangan kelas	(Desa Tanjung Jawa, Dusun Selatan)	4 Unit	Ya	0,00	
5	Dinas Pendidikan	-	-	Pembuatan gedung baru SMA 5 tanjung Jawa	(Desa Tanjung Jawa, Dusun Selatan)	3 Unit	Ya	0,00	
6	Dinas Pendidikan	-	-	Rehab Total SDN Mabuan	(Desa Mabuan, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	350.000.000,00	
7	Dinas Pendidikan	-	-	Pembuatan pagar PAUD WAT Takam	(Desa Tetei Lanan, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
8	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan pagar Beton sekolah SDN Dsea tetei lanan 100 M	(Desa Tetei Lanan, Dusun Selatan)	100 Meter	Ya	0,00	
9	Dinas Pendidikan	-	-	Rehab Berat Sekolah SD Desa Telang Andaru	(Desa Telang andrau, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
10	Dinas Pendidikan	-	-	Tambahan Ruang Guru dan Kepala Ruang Sekolah SMP satu atap	(Desa Dangka, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	400.000.000,00	
11	Dinas Pendidikan	-	-	Pembuatan Ruang Kantor SDN Dangka	(Desa Dangka, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	200.000.000,00	
12	Dinas Pendidikan	-	-	Parkiran Sekolah SDN Dangka Dan SMPN 1 Atap	(Desa Dangka, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	80.000.000,00	
13	Dinas Pendidikan	-	-	Pembuatan Pagar SDN Dangka	(Desa Dangka, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
14	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan Sanitasi WC SMP satu atap RT.01 RT.02	(Desa Dangka, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	50.000.000,00	
15	Dinas Pendidikan	-	-	Siring Timbun Lapangan Sekolah MIS Siratul Jannah	(Desa Baru, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	0,00	
16	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN , Gedung SMP Ruang Guru 6 X 8 M	(Desa Muara Talang, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	30.000.000,00	
17	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan Gedung RA AL-IKHSAN RT.03	(Desa Pamait, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
18	Dinas Pendidikan	-	-	Rehap Perumahan Guru SDN Pamangka	(Desa Pamangka, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	100.000.000,00	
19	Dinas Pendidikan	-	-	Pembuatan pagar keliling SDN 3 Kalahien	(Desa Kalahien, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	0,00	
20	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan perumahan Guru SMPN Satap 3	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	

21	Dinas Pendidikan	-	-	Pengadaan Mubiler SDN Madara	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Buah	Ya	0,00	
22	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan ruang kantor guru SDN Madara	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
23	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan ruang kantor Guru SDN Madara	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
24	Dinas Pendidikan	-	-	Program kartu pintar	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
25	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan Gedung Perpustakaan Milik Desa	(Desa Danau Sadar, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	0,00	
26	Dinas Kesehatan	-	-	Pembangunan Ruang Bersalin Puskesmas Sababilah	(Desa Sababilah, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
27	Dinas Kesehatan	-	-	Rehab gedung poskesdes Kelurahan jelapat	(Kelurahan Jelapat, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	50.000.000,00	
28	Dinas Kesehatan	-	-	Rehab Gedung Poskesdes	(Desa Murung Paken, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
29	Dinas Kesehatan	-	-	rehab Total Pustu Desa mabuan	(Desa Mabuan, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	150.000.000,00	
30	Dinas Kesehatan	-	-	Rehab poskesdes telang andaru sekaligus pengadaan fasilitasi ruangan perlengkapan medis	(Desa Telang Andrau, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
31	Dinas Kesehatan	-	-	Pembangunan wc Poskesdes 6 X 10 M	(Desa Muara Talang, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	260.000.000,00	
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan cor beton gg. Titian kayu pada Gg.pandai besi RT.40	(Kelurahan Buntok Kota, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	selang pemadam karet merah 2,5 inci RT.25 Jl. Agung 2,5 inch Panjang 300 meter	(Kelurahan Buntok Kota, Dusun Selatan)	1 Buah	Ya	8.000.000,00	
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan Siring Tanah Longsor dab Abrasi Jalan Karau RT.23 RW.03 P = 500 Meter L = Meter T = CM	(Kelurahan Buntok Kota, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Perbaikan dan Pengecoran Jalan Gang Damai RT.17 P = 166,7 Meter L = 3, 8 Meter T = 0,2 Meter	(Kelurahan Buntok Kota, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	0,00	
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehab Berat Kantor Kelurahan Buntok Kota dan Penambahan 1 (satu) ruangan Kantor	(Kelurahan Buntok Kota, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	400.000.000,00	
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Bantuan Rumah Ibadah	(Desa Sababilah, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Peningkatan Jalan Danau Sababilah	(Desa Sababilah, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Gg. Sawit	(Desa Sababilah, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Gg. Rezeki RT.01 RW.01 P 150 X 2 M	(Kelurahan Jelapat, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	0,00	
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Gang Lunuk RT.01 2 M X 200 M	(Kelurahan Jelapat, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	

42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Gang H.Nurman RT.01 4 M X 170 M	(Kelurahan Jelapat, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembungan Jalan Gg.Amanah RT.09	(Kelurahan Jelapat, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	150.000.000,00	
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembungan Jalan Gg.Usup RT.09 1.50 M X 64 M	(Kelurahan Jelapat, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	150.000.000,00	
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pemelaponan dan Pengeramikan Kantor Kelurahan Jelapat 10 M X 12 M	(Kelurahan Jelapat, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Pembangunan Gg menuju TKA/TPA Darussalam 90 M	(Desa Danau Ganting, Dusun Selatan)	90 Meter	Ya	0,00	
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembunganan gang tazkirah 320 M	(Desa Danau ganting, Dusun Selatan)	320 Meter	Ya	0,00	
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Perbaikan dan pengaspalan jalan desa danau ganting-buntok 3.5 KM	(Desa danau Ganting, Dusun Selatan)	3.500 Meter	Ya	0,00	
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pelebaran jalan padat karya	(Desa Penda asam, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	jalan poros desa dilanjutkan sampai keujung	(Desa Penda asam, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengadaan WC Buntok Seberang RT.022	(Kelurahan Hilir Sper, Dusun Selatan)	71 Buah	Ya	426.000.000,00	
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengadaan mesin Listrik dan Jaringan Instlasi Listrik Buntok Seberang RT.22	(Kelurahan hilir sper, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pemasangan Lampu Penerangan PLN di gg. Air mata dan Kuburan Umum RT.03	(Kelurahan Hilir Sper, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	0,00	
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Kontruksi Irigasi	(Desa Telum Mampun, Dusun Selatan)	8 Unit	Ya	0,00	
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengadaan listrik desa	(Desa Murung paken, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Normalisasi parit kiri kanan jalan lintas buntok-palangkaraya di wilayah Desa pararapak 15 KM	(Desa Pararapak, Dusun Selatan)	15.000 Meter	Ya	0,00	
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pemasangan PDAM Desa Pararapak	(Desa Pararapak, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Sumur bor persawahan mabaras	(Desa Mabuan, Dusun Selatan)	6 Unit	Ya	60.000.000,00	
59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Normalisasi tanggul 1&2 2000 M	(Desa Mabuan, Dusun Selatan)	2.000 Meter	Ya	200.000.000,00	
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Siring timbun rangka baja / bronjong 100 M	(Desa Mabuan, Dusun Selatan)	100 Meter	Ya	400.000.000,00	
61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Badan Jalan Desa 700 M	(Desa Danau Masura, Dusun Selatan)	700 Meter	Ya	0,00	
62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengerasan / Cor Beton Badan Jalan Anrat Desa Danau Masura-Muara Ripung 3 KM	(Desa Danau Masura, Dusun Selatan)	3.000 Meter	Ya	0,00	

63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	peningkatan jalan dari ujung jalan got tomang simpang tiga majundre telang andrau	(Desa Telang Andrau, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan akses jalan antar desa telang andrau dengan desa pamangka	(Desa Telang Andrau, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengerasan sekaligus pengaspalan jalan dari simpang tiga dangka menuju desa telang andrau RT.02	(Desa Telang Andrau, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Kantor Desa Muara Ripung	(Desa Muara Ripung, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	500.000.000,00	
67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembanguna Jalan Menuju Buntok Seberang 5 KM	(Desa Muara Ripung, Dusun Selatan)	5.000 Meter	Ya	250.000.000,00	
68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan Jalan Ke Pamakaman Muslim RT/RT.03	(Desa Dangka, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan Badan Jalan Desa Dangka - Telang Andrau	(Desa Dangka, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	150.000.000,00	
70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan Gg. Beton Berkah Pihan RT.01	(Desa Baru, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	0,00	
71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan Jembatan Titian RT.07	(Desa Baru, Dusun Selatan)	3 Unit	Ya	0,00	
72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan jembatan titian wardin RT.09 RW.03	(Desa Baru, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	0,00	
73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Muara Talang Menuju Teluk Telaga yang tenggelam saat Banjir 10 X 20 M	(Desa Muara Talang, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	40.000.000,00	
74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Sambungan Titian RT.04 Samoai Mesiid RT.03 dan RT.04	(Desa Pamait, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembersihan Sungai Wendu RT.04 200 M	(Desa Sanggu, Dusun Selatan)	200 Meter	Ya	0,00	
76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengaspalan Jalan Desa 3000 M	(Desa Sanggu, Dusun Selatan)	3.000 Meter	Ya	0,00	
77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembersihan Danau Sanggu dan Danau Malawen 4.000 M	(Desa Sanggu, Dusun Selatan)	4.000 Meter	Ya	0,00	
78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Jaringan Listrik Kelingkungan RT.01 dan RT.02 Desa Lembeng 1.5 KM	(Desa Lembeng, Dusun Selatan)	1.500 Unit	Ya	0,00	
79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Jl. Banjing Desa Pamangka-Desa Telang Andrau	(Desa Pamangka, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	100.000.000,00	
80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Tugu Lanjutan Jl. Tugu, Jl. Ampah-Buntok	(Desa Pamangka, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	1.000.000.000,00	
81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Cor Beton Gang Dua Lima	(Desa Kalahien, Dusun Selatan)	150 Meter	Ya	0,00	
82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengecoran jalan barito dari RT. 001 sampai RT. 007 1.5 KM	(Desa Kalahien, Dusun Selatan)	1.500 Meter	Ya	0,00	
83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengecoran jalan Pemuda dari arah pasar menuju ujung cor belakang PDAM 360 M	(Desa Kalahien, Dusun Selatan)	360 Meter	Ya	0,00	

84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Percetakan Sawah	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Jembatan Gang RT.004	(Desa Danau Sadar, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	0,00	
86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Gg. Tuntung Tulus RT.001	(Desa Danau Sadar , Dusun Selatan)	10 Unit	Ya	0,00	
87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Penyiringan Sungai/ Tabuk (Jl. Asmawai Agani) RT.01,02,03	(Desa Danau Sadar, Dusun Selatan)	4 Unit	Ya	0,00	
88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pemasangan Kanopi Aula Kantor Kecamatan Dusun Selatan dan pemasangan Paving stone	(Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	104.020.000,00	
89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Drainase limbah Rumah Tangga RT .07 0.5 M X 211.3 M	(Kelurahan Jelapat, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	90.000.000,00	
90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Drainase limbah Rumah Tangga RT .05 0.5 M X 98 M	(Kelurahan Jelapat, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	50.000.000,00	
91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Desa Danau Ganting-Desa Sababilah 4 KM	(Desa Danau Ganting, Dusun Selatan)	4.000 Meter	Ya	0,00	
92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangun Jalan Menuju Provinsi (Kalahien Seberang) 7 KM	(Desa Muara Ripung , Dusun Selatan)	7.000 Meter	Ya	3.000.000.000,00	
93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Peningkatan Jalan Rikut ulu Jawu	(Desa Sababilah, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jlan Soekarno-Hatta	(Desa Sababilah, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Pembuatan Jalan Antar Desa Teluk Mampun- Desa Penda Asam 1.100 M	(Desa Teluk Mampun, Dusun Selatan)	11.000 Meter	Ya	0,00	
96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Peningkatan jalan Antar Desa Murung Paken - Danau Masura	(Desa Murung Paken, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan peningkatan (Penimbunan) badan jalan antar desa Tanjung Jawa - Majundre	(Desa Tanjung Jawa, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengerasan Jalan katimpun 4 KM	(Desa Tetei Lanan, Dusun Selatan)	4.000 Meter	Ya	0,00	
99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Antar Desa Muara Ripung _ Danau Masura 180 M	(Desa Muara Ripung, Dusun Selatan)	180 Meter	Ya	1.500.000.000,00	
100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengerasan Jalan Dangka-Desa Marga Jaya	(Desa Dangka, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	2.000.000.000,00	
101	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Desa Lembeng bawah L 3 M X 1500 M	(Desa Lembeng, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	0,00	
102	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan jalan desa Menuju jalan Provinsi (Btk-P.Raya)	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
103	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengerasan Jalan Paulus gatong 4 KM	(Desa Tetei Lanan, Dusun Selatan)	4.000 Meter	Ya	0,00	

104	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	-	-	Pembuatan Sertifikat Gratis Untuk Masyarakat	(Desa Sanggu, Dusun Selatan)	1.000 Lembar	Ya	0,00	
105	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perehapan rumah masyarakat kurang mampu	(Desa Pararapak, Dusun Selatan)	100 Unit	Ya	0,00	
106	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Bangun Baru & Rehab Total Rumah Tidak Layak Huni	(Desa Mabuan, Dusun Selatan)	30 Unit	Ya	200.000.000,00	
107	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Bangunan Baru Untuk Warga Desa	(Desa Danau Masura, Dusun Selatan)	12 Unit	Ya	0,00	
108	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Bedah rumah untuk warga desa	(Desa Danau Masura, Dusun Selatan)	38 Unit	Ya	0,00	
109	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Berat Rumah Warga yang kurang mampu	(Desa Telang Andrau, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
110	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penimbunan TPU Raudatul Jannah Jl. Kaladan Ujung RT.24 Luas 4800M2	(Kelurahan Hilir Sper, Dusun Selatan)	4.800 Meter kubik	Ya	0,00	
111	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penerangan lampu Jalanan (Tenaga Surya)	(Desa Murung Paken, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
112	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	PJU Jalan Desa	(Desa Mabuan, Dusun Selatan)	16 Unit	Ya	60.000.000,00	
113	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pengadaan Listrik untuk penerangan jalan dan Gg dalam desa telang andrau	(Desa Telang Andrau, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
114	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pengadaan Listrik Tenaga Surya 120 Unit Dusun Bambaler	(Desa Baru, Dusun Selatan)	120 Unit	Ya	0,00	
115	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pemasangan Listrik Jl. Gapritomang RT.04	(Desa Sanggu, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
116	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pengadaan Lampu Jalan Kumbang Bernaung RT.04	(Desa Sanggu, Dusun Selatan)	40 Unit	Ya	0,00	
117	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembuatan Kantor BPD Desa Teluk Mampun 6 X 5 M	(Desa Teluk Mampun, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	0,00	
118	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembuatan Gedung Pelayanan PKK dan Posyandu/Lansia Serta POSBINDU	(Desa Pararapak, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	0,00	
119	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	rehab total Kantor Desa	(Desa Mabuan, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	250.000.000,00	
120	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	rehab total kantor BPD	(Desa Mabuan, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	150.000.000,00	

121	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Rehab Berat Gedung Kantor BPD	(Desa Danau Masura, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	0,00	
122	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Rehab Berat Kantor desa dari bangunan kayu menjadi beton ruang aula dan ruang kantor 3 bilik 10 x 10 M	(Desa Tetei Lanan, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	0,00	
123	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembangunan Kantor Desa Muara Talang 8 X 13 M	(Desa Muara Talang, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	100.000.000,00	
124	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembangunan Kantor BPD 6x8	(Desa Pamangka, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	20.000.000,00	
125	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembangunan Kantor BPD	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
126	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Rehap AULA Kantor Desa dab BPD	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Paket	Ya	0,00	
127	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembangunan Kantor Desa	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
128	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Rehab Kantor Desa Mangaris	(Desa Mangaris, Dusun Selatan)	Paket	Ya	300.000.000,00	
129	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembangunan Balai Pertemuan Milik Desa	(Desa Danau Sadar, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	50.000.000,00	
130	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Bantuan Untuk warga yang terkena longsor	(Desa Muara Talang, Dusun Selatan)	10 Orang	Ya	1.500.000.000,00	
131	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Pengadaan Tractor Mini dan Mesin Perontok Padi	(Desa Teluk Mampun, Dusun Selatan)	10 Unit	Ya	0,00	
132	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Pengadaan Traktor Lotari bagi kelompok tani	(Desa Telang Andrau, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
133	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengadaan Power treaser (perontok padi) untuk Gapoktan talian masangar Desa Kalahien	(Desa Kalahien, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	0,00	
134	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	Pengadaan Tossa untuk pengangkutan sampah wilayah Kelurahan Hilir Sper Jl. Melati RT.06	(Kelurahan Hilir Sper, Dusun Selatan)	5 Buah	Ya	125.000.000,00	
135	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	Pembuatan Tower Jaringan Telkomsel/Indosat 170 M	(Desa Tanjung Jawa, Dusun Selatan)	170 Meter	Ya	0,00	
136	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	Pembuatan gedung baru dan Rehab PAUD	(Desa Pararapak, Dusun Selatan)	2 Unit	Ya	0,00	
137	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	Pengembangan Wisata Desa	(Desa Danau sadar, Dusun Selatan)	Unit	Ya	1,00	

138	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	a. Tenis Meja b. Lapangan Bola Volly dan Sarana c. Alat Musik Keyboard Fasilitas Upacara Hari Besar Nasional	(Desa sababilah, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
139	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	Siring timbun lapangan sepak bola desa baru	(Desa Baru, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	0,00	
140	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	Pengadaan Peralatan Sanggar seni mapas Baya Kalahien	(Desa Kalahien, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
141	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	Pembangunan Pasar Desa	(Desa Madara, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
142	Sekretariat Daerah	-	-	Pagar Beton Keliling Mesjid	(Desa Teluk Telaga, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
143	Sekretariat Daerah	-	-	Pembangunan Rumah Tunggu di tempat Pemakaman muslim dan kristen	(Desa Pararapak, Dusun Selatan)	2 Unit	Ya	0,00	
144	Sekretariat Daerah	-	-	Pengadaan atau pemasangan keramik dan pemasangan pelapon lanngar Ar-Rahmat Desa Telang Andrau	(Desa Telang Andrau, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
145	Sekretariat Daerah	-	-	Rehab berat gereja katholik santo patros desa Telang Andrau	(Desa Telang andrau, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
146	Sekretariat Daerah	-	-	Bantuan Bangunan Gereja	(Desa Dangka, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	300.000.000,00	
147	Sekretariat Daerah	-	-	Parkiran Mesjid RT.02	(Desa Pamait, Dusun Selatan)	1 Paket	Ya	25.000.000,00	
148	Sekretariat Daerah	-	-	Bantuan untuk rumah ibadah	(Desa Sanggu, Dusun Selatan)	Unit	Ya	0,00	
149	Sekretariat Daerah	-	-	Plapon Gereja katolik Santa Sasila	(Desa Pamangka, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	50.000.000,00	
150	Sekretariat Daerah	-	-	Rehap Gereja Leluni	(Desa Pamangka, Dusun Selatan)	1 Unit	Ya	50.000.000,00	
	JUMLAH							**18.328.020.001,00**	

DRAFT USULAN KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN DUSUN UTARA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	STATUS DISETUJUI	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Dinas Pendidikan	-	-	Rehab SDN 1 Hulu Tampang	(Hulu Tampang, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	250.000.000,00	
2	Dinas Pendidikan	-	-	Bangun Kantor Perumahan SDN 2 dan Pagar Sekolah Tamparak	(Tamparak, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	160.000.000,00	
3	Dinas Pendidikan	-	-	Bangun Baru Gedung SDN 1 Tamparak	(Tamparak, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
4	Dinas Pendidikan	-	-	Rehab Berat Perumahan Guru SDN Gunung Rantau	(Gunung Rantau, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	100.000.000,00	
5	Dinas Pendidikan	-	-	Mobile SDN	(Tamparak Layung, Dusun Utara)	2 Paket	Ya	20.000.000,00	
6	Dinas Pendidikan	-	-	Pembuatan Pagar SDN	(Tamparak Layung, Dusun Utara)	100 Meter	Ya	200.000.000,00	
7	Dinas Pendidikan	-	-	Penimbunan Halaman Sekolah menggunakan Batako RA AL-Hidayah Pendang 5 m x 20 m	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	25.000.000,00	
8	Dinas Pendidikan	-	-	Ruang Bermain RA AL-Hidayah Pendang	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	80.000.000,00	
9	Dinas Pendidikan	-	-	Pengadaan Alat Praktek & Praga Olahraga SDN 2 Pendang	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	125.000.000,00	
10	Dinas Pendidikan	-	-	Penimbunan Halaman Sekolah menggunakan Batako SDN 2 Pendang	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	150.000.000,00	
11	Dinas Pendidikan	-	-	Toilet Guru dan Murid SDN 2 Pendang	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
12	Dinas Pendidikan	-	-	Bangunan Kantor SDN 2 Pendang	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	270.000.000,00	
13	Dinas Pendidikan	-	-	Bangunan Ruang Kelas SDN 2 Pendang	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	270.000.000,00	
14	Dinas Pendidikan	-	-	Rehab Ruangan Korwil Dusun Utara 9 X 9	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	50.000.000,00	
15	Dinas Pendidikan	-	-	Lantai Keramik Aula Korwil Dusun Utara 8 X 8	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	15.000.000,00	
16	Dinas Pendidikan	-	-	Plapon Aula Korwil Dusun Utara 8 X 8	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	15.000.000,00	
17	Dinas Kesehatan	-	-	Tenaga Medis Panarukan	(Panarukan, Dusun Utara)	2 Orang	Ya	36.000.000,00	
18	Dinas Kesehatan	-	-	Rehap POSTU Desa Rampa Mea	(Rampa Mea, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	300.000.000,00	
19	Dinas Kesehatan	-	-	Pembelian Ambulan Desa Maruga	(Maruga, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	250.000.000,00	
20	Dinas Kesehatan	-	-	Pembangunan/Perehapan Gedung POSKESDES 6m x 8m	(Majundre, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
21	Dinas Kesehatan	-	-	Poskesdes Pendang 7 m x 9 m	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	50.000.000,00	

22	Dinas Kesehatan	-	-	Poskesdes Majundre 7 m x 9 m	(Majundre, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
23	Dinas Kesehatan	-	-	Poskesdes M.Lama 6 m x 12 m	(Marawan Lama, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
24	Dinas Kesehatan	-	-	Poskesdes Tarusan 7 m x 9 m	(Tarusan, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
25	Dinas Kesehatan	-	-	Pustu Bundar 6 m x 12 m	(Bundar, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	300.000.000,00	
26	Dinas Kesehatan	-	-	Gedung Poliklinik 10 m x 15 m	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	2.500.000.000,00	
27	Dinas Kesehatan	-	-	Gedung Renap 9 m x 20 m	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	3.000.000.000,00	
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Panarukan-Montalat 7 KM	(Panarukan, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	PLN Panarukan	(Panarukan, Dusun Utara)	100 Rumah	Ya	300.000.000,00	
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Desa Bundar 2 KM RT. 02 RT. 01 Talekoi	(Talekoi, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan Tower RT. 02 RT. 01 Talekoi	(Talekoi, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	200.000.000,00	
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Desa Rampa Mea - Indrang Nanggu Hulu Tampang Sepanjang 13 KM)	(Rampa Mea, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.500.000.000,00	
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pemasangan Jaringan Listrik PLN dari Desa Ketapang (BARUT) Menuju Desa Hulu Tampang 10 Km	(Hulu Tampang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.500.000.000,00	
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Poros Desa Hulu Tampang Menuju Km 30 Jalan Raya (Desa Tapen Raya-Ampah) 15 km x 6 m	(Hulu Tampang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	3.000.000.000,00	
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Desa Marawan Lama 1 Km	(Marawan Lama, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Desa Marawan Lama 1 Km	(Marawan Lama, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Desa Marawan Lama 1,5 km	(Marawan Lama, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.500.000.000,00	
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Jembatan RT 06 Penghubung Jalan Propinsi Ampah Muara Teweh dari Jalan Desa ke jalan Kabupaten KM 20 - Pampamas	(Bantai Bambure, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengerasan /aspal Jalan Penghubung Jalan Propinsi Ampah Muara Teweh dari Jalan Desa ke jalan Kabupaten KM 20 - Pampamas 2 km	(Bantai Bambure, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	2.000.000.000,00	
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan P2DT Sungai Telang Simpang Tiga Majundre 4.800 m	(Sungai Telang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.500.000.000,00	
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Gudang Ruangan Panel PDAM Pendang 4 m x 7m	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pagar Keliling Instalasi PDAM Unit Pendang 35 m x 34 m	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	

43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehab Bangunan Rumah Dinas PDAM Pendang 6 m x 8 m	(Pendang, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	600.000.000,00	
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Perbaikan Jalan Akses Utama Desa & Jembatan Desa 0160 X 14 m Danau Bambure	(Danau Bambure, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	2.000.000.000,00	
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pemasangan Jaringan Listrik Danau Bambure	(Danau Bambure, Dusun Utara)	112 KK	Ya	1.000.000.000,00	
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Perbaikan Jalan Danau Bambure - Tamparak 15 KM	(Danau Bambure, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	5.000.000.000,00	
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pemasangan Jaringan PLN Hingan	(Hingan, Dusun Utara)	28 KK	Ya	750.000.000,00	
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengerasan Badan Jalan dari Desa Hingan s/d Km.6 Desa Bundar 6 KM	(Hingan, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	150.000.000,00	
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Buat Baru Gedung Aisintan Desa Marawan Baru	(Marawan Baru, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	90.000.000,00	
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Cor Jalan Pintas Desa Marawan Baru 3 KM	(Marawan Baru, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Buat Baru Kantor BPD Desa Marawan Baru	(Marawan Baru, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	350.000.000,00	
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehablitasi Kantor Desa, Balai Desa ,WC Kantor Desa Reong	(Reong, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	180.000.000,00	
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehablitasi Kantor Desa, Balai Desa ,WC Kantor Desa Reong	(Reong, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	180.000.000,00	
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehablitasi Kantor Desa, Balai Desa ,WC Kantor Desa Reong	(Reong, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	180.000.000,00	
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehablitasi Kantor Desa, Balai Desa ,WC Kantor Desa Reong	(Reong, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	180.000.000,00	
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jaringan Listerik /PLN Desa Gunung Rantau,Desa Reong	(Reong, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.500.000.000,00	
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan lintas jalan Desa ke Kecamatan, Jembatan Sei Panukup,Dusun Mantarem-Desa Marawan Baru 1,5 Km	(Reong, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.500.000.000,00	
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Perbaikan Jalan dari KM.6 Desa Bundar s/d Dusun Batukol Desa Maruga 20 KM	(Maruga, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	150.000.000,00	
59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pemasangan Jaringan PLN Maruga	(Maruga, Dusun Utara)	178 KK	Ya	1.000.000.000,00	
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Instansi Jaringan PLN 11 Km	(Majundre, Dusun Utara)	11 Km	Ya	500.000.000,00	
61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengaspalan Jalan Glofreid Tumang dari Simpang Desa Majundre dan Desa Sungai Telang 11 Km Majundre, Telang Andrau	(Majundre, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	35.000.000.000,00	
62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Bangun Baru Mushola	(Tamparak, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	200.000.000,00	
63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengecoran Jalan Desa 2 KM	(Bundar, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	

64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Wisata 1 Ha	(Bundar, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Perluasan Jaringan PLN	(Bundar, Dusun Utara)	8 Km	Ya	500.000.000,00	
66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Tarusan - Desa Panarukan	(Tarusan dan Panarukan, Dusun Utara)	3 Paket	Ya	700.000.000,00	
67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pemasangan Jaringan Listrilk PLN/PLTU dari Arah Desa Panarukan ke Desa Tarusan 15 KM	(Tarusan dan Panarukan, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rekonstruksi Jalan Dalam Desa Gunung Rantau RT.005 4 M x 700 M	(Gunung Rantau, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.600.000.000,00	
69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan Rekonstruksi Jalan Desa Gunung Rantau â€“ Marawan Lama 4 M x 2 KM	(Gunung Rantau, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	4.800.000.000,00	
70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan dan Pengerasan badan Jalan Lintas (Jalan Buta/P.Ingkeng II) Sepanjang 3,018 Km	(Tamparak Layung, Dusun Utara)	4 Km	Ya	2.500.000.000,00	
71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Gereja	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jaringan PLN 15 KM Reong	(Reong, Dusun Utara)	15 Km	Ya	1.500.000.000,00	
73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jaringan PLN 15 KM Marawan Baru	(Marawan Baru, Dusun Utara)	15 Km	Ya	1.500.000.000,00	
74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Jaringan PLN 8 KM	(Dusun Mantarem, Dusun Utara)	8 Km	Ya	1.000.000.000,00	
75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Pintu Air (Cek Dam), Pendang dan Reong	(Pendang dan Reong, Dusun Utara)	6 Unit	Ya	400.000.000,00	
76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lapangan upacara di lingkungan perkantoran 6 M X 8 M	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan aula Kantor Kelurahan 6 M X 8 M	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan jembatan cor beton dermaga Pendang 6 M X 50 M	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan drainase tertutup 1 KM	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	300.000.000,00	
80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan jalan lingkungan dalam pasar Pendang 500 M	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	800.000.000,00	
81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lanjutan cor beton jalan Merdeka Raya 500 M	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	800.000.000,00	
82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Balai Adat (Kantor Damang/DAD) 9 M X 12 M	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehab Perumahan Telek 2 (6 M X 10 M)	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	150.000.000,00	
84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehab Perumahan Telek 1 (6 M X 10 M)	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	150.000.000,00	
85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehab Rumah Dinas 2 (15 M x 12 M)	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	

86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehab Rumah Dinas I (15 M x 12 M)	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Pelita Sampai Simpang Mantarem (6 M X 2000 M)	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengerasan Jala Beringin (6 M X 2000 M)	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	3.000.000.000,00	
89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehab Rumah Jabatan Camat Menjadi Geus Hous (15 M x 12 M)	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Bangunan Baru Rumah Jabatan Camat (15 M x 12 M)	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Bronjong 1 KM Sungai Telang	(Sungai Telang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.500.000.000,00	
92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jembatan Titian Ponton Pompa PDAM Pendang 25 m x 1,5 m	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Ponton Pompa PDAM Pendang	(Pendang, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	100.000.000,00	
94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penggantian Water Meter PDAM Pendang	(Pendang, Dusun Utara)	600 Buah	Ya	100.000.000,00	
95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tempat pembuangan akhir sampah dan sarana pengangkutan	(Pendang, Dusun Utara)	2 Unit	Ya	300.000.000,00	
96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Septic Tank Individual Sungai Telang	(Sungai Telang, Dusun Utara)	58 Rumah	Ya	100.000.000,00	
97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Gedung Serba Guna / Pertemuan Bantai Bambure	(Bantai Bambure, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	800.000.000,00	
98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kantor BPD Desa Hingan	(Hingan, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	200.000.000,00	
99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perluasan Pasar Desa Rampa Mea	(Rampa Mea, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	200.000.000,00	

100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan dalam Desa Tarusan menuju Mampaing RT 009 3 KM	(Tarusan, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	850.000.000,00	
101	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Pembuatan Lahan Persawahan Untuk Masyarakat Desa 200 Ha RT. 03 RT. 01 Talekoi	(Talekoi, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
102	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Keramba	(Talekoi, Dusun Utara)	10 Unit	Ya	15.000.000,00	
103	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Mesin Cast Dan Body	(Pendang, Dusun Utara)	1 Keluarga	Ya	20.000.000,00	
104	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Alat tangkap ikan, Tarusan 2 Kel.Tani Nelayan, Pendang 1 Kel.Tani Nelayan, Bundar 1 Kel.Tani Nelayan dan Maruga 1 Kel.Tani Nelayan	(Tarusan, Pendang , Bundar dan Maruga, Dusun Utara)	5 Petani	Ya	100.000.000,00	
105	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bibit ikan dan pakan, Pendang 20.000 ekor, Bundar 10.000 ekor, Talekoi 10.000 ekor, Rampa Mea 10.000 ekor dan Tamparak Layung 10.000 ekor	(Pendang,Bundar, Talekoi, Rampa Mea dan Tamparak Layung, Dusun Utara)	60.000 Ekor	Ya	50.000.000,00	
106	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Bibit Ternak Itik, Talekoi 150 Ekor, Rampa Mea 500 Ekor, Marawan Baru 300 Ekor, Maruga 300 Ekor dan Tamparak Layung 200 Ekor	(Talekoi, Rampa Mea, Marawan Baru, Maruga dan Tamparak Layung, Dusun Utara)	1.550 Ekor	Ya	50.000.000,00	
107	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Bibit Ternak Sapi, Talekoi 10 Ekor, Bantai Bambure 10 Ekor dan Pendang 10 Ekor	(Talekoi, Bantai Bambure dan Pendang, Dusun Utara)	30 Ekor	Ya	100.000.000,00	
108	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Bibit Ayam Ras dan Pakan, Rampa Mea 250 Ekor, Pendang 250 Ekor dan Tamparak Layung 200 Ekor	(Rampa Mea, Pendang dan Tamparak Layung" , Dusun Utara)	700 Ekor	Ya	50.000.000,00	
109	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Bibit Ayam Petelur dan Pakan, Reong 1000 Ekor, Bantai Bambure 500 Ekor, Talekoi 100 Ekor, Danau Bambure 100 Ekor, Hulu Tampang 250 Ekor, Panarukan 200 Ekor dan Marawan	(Reong,Bantai Bambure, Talekoi, Danau Bambure, Hulu Tampang, Panarukan dan Marawan Baru, Dusun Utara)	2.550 Ekor	Ya	50.000.000,00	
110	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Bibit Ternak Ayam Buras, amparak Layung 200 Ekor, Marawan Lama 500 Ekor, Danau Bambure 500 Ekor dan Maruga 500 Ekor	(amparak Layung, Marawan Lama, Danau Bambure dan Maruga, Dusun Utara)	1.700 Ekor	Ya	50.000.000,00	
111	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bibit ternak babi, Maruga 30 Ekor, Bantai Bambure 80 Ekor, Talekoi 25 Ekor, Hulu Tampang 100 Ekor dan Rampa Mea 150 Ekor	(Maruga, Bantai Bambure, Talekoi, Hulu Tampang dan Rampa Mea, Dusun Utara)	385 Ekor	Ya	50.000.000,00	
112	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bibit ayam Bangkok dan pakan, Tarusan dan Maruga	(Tarusan dan Maruga, Dusun Utara)	500 Ekor	Ya	50.000.000,00	

113	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Bibit Sawit, Rampa Mea 20 Ha, Talekoi 10 Ha, Hulu Tampang 10 Ha, Bantai Bambure 10 Ha dan Rampa Mea 20 Ha	(Rampa Mea, Talekoi, Hulu Tampang, Bantai Bambure dan Rampa Mea, Dusun Utara)	5 Paket	Ya	50.000.000,00	
114	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Pembeku Latek Tarusan 5 Ha	(Tarusan, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	20.000.000,00	
115	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Alat pasca panen karet, Maruga 75 Ha dan Bundar 60 Ha	(Maruga dan Bundar, Dusun Utara)	2 Unit	Ya	50.000.000,00	
116	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bibit karet unggul, Tarusan 10 Ha, Tamparak Layung 24 Ha, Talekoi 10 Ha, Bantai Bambure 10 Ha, Rampa Mea 25 Ha dan Maruga 20 Ha	(Tarusan, Tamparak Layung, Talekoi, Bantai Bambure, Rampa Mea dan Maruga, Dusun Utara)	6 Paket	Ya	100.000.000,00	
117	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Mesin Penggilingan Padi Marawan Baru	(Marawan Baru, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	20.000.000,00	
118	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Benih Sayuran dataran rendah, Maruga, 1 Ha, Pendang , 1 Ha, Bantai Bambure, 1 Ha, Danau Bambure, 1 Ha, Bundar, 1 Ha, Marawan Baru, 1 Ha dan Rampa	(Maruga, Pendang , Bantai Bambure, Danau Bambure, Bundar, Marawan Baru dan Rampa Mea, Dusun Utara)	7 Paket	Ya	10.000.000,00	
119	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Power Threser, Tarusan 4 Unit, Gunung Rantau 2 Unit dan Majundre 4 Unit	(Tarusan, Gunung Rantau dan Majundre, Dusun Utara)	10 Unit	Ya	100.000.000,00	
120	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Gudang Alsintan, Gunung Rantau, 1 Unit, Pendang, 5 Unit, Reong, 1 Unit, Tamparak Layung, 1 Unit dan Marawan Baru, 1 Unit	(Gunung Rantau, Pendang, Reong, Tamparak Layung dan Marawan Baru, Dusun Utara)	9 Unit	Ya	500.000.000,00	
121	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Alat Mesin Pertanian Capung Metal, Reong, Marawan Lama dan Bantai Bambure	(Reong, Marawan Lama dan Bantai Bambure, Dusun Utara)	3 Unit	Ya	50.000.000,00	
122	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Pembangunan POS Penyuluh Pertanian, Marawan Lama, Gunung Rantau, Reong, Marawan Baru, Maruga, Bundar, Talekoi, Bantai Bambure, Hingan, Danau Bambure, Panarukan, Majundre, Sungai Telang, Tarusan, Hulu Tampang, Rampa Mea, Tamparak Layung,Tamparak	(Marawan Lama, Gunung Rantau, Reong, Marawan Baru, Maruga, Bundar, Talekoi, Bantai Bambure, Hingan, Danau Bambure, Panarukan, Majundre, Sungai Telang, Tarusan, Hulu Tampang, Rampa Mea, Tamparak Layung,Tamparak, Dusun	18 Unit	Ya	600.000.000,00	
123	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Hand Traktor Rotary, Tarusan dan Pendang	(Tarusan dan Pendang, Dusun Utara)	4 Unit	Ya	100.000.000,00	
124	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Pengadaan Bibit Tanaman Buah-Buahan, Pendang 400 Pohon, Tarusan 1.000 Pohon, Tamparak Layung 600 Pohon, Reong 500 Pohon dan Rampa Mea 500 Pohon	(Pendang, Tarusan, Tamparak Layung, Reong dan Rampa Mea, Dusun Utara)	5 Paket	Ya	500.000.000,00	

125	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Cetak sawah, Reong 400 Ha, Bundar 50 Ha, Talekoi 20 Ha, Marawan Lama 20 Ha, Bantai Bambure 50 Ha dan Tamparak 50 Ha	(Reong, Bundar, Talekoi, Marawan Lama, Bantai Bambure dan Tamparak, Dusun Utara)	6 Paket	Ya	3.000.000.000,00	
126	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Pembuatan Titian/Jalan Usaha Tani Kayu, Tarusan 2000 Meter dan Marawan Baru 150 Meter	(Tarusan dan Marawan Baru, Dusun Utara)	2 Paket	Ya	2.000.000.000,00	
127	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Peningkatan Jalan Usaha Tani Cor Beton, Pendang 800 Meter dan Reong 300 Meter	(Pendang dan Reong, Dusun Utara)	2 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
128	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Pembuatan Titian/Jalan Usaha Tani Cor Beton, Pendang 800 Meter, Tarusan 300 Meter, Marawan Lama 1.500 Meter, Gunung Rantau 1.000 Meter, Bantai Bambure 4.000 Meter	(Pendang, Tarusan, Marawan Lama, Gunung Rantau dan Bantai Bambure, Dusun Utara)	5 Paket	Ya	7.000.000.000,00	
129	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Peningkatan titian Beton/jalan usaha tani 1 KM	(Pendang, Dusun Utara)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
130	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	Pembangunan gedung olah raga	(Pendang, Dusun Utara)	1 Unit	Ya	1.000.000.000,00	
	JUMLAH							**128.361.000.000,00**	

DRAFT USULAN KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN GN. BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	STATUS DISETUJUI	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan Pagar Sekolah SDN Marga Jaya	(Desa Marga Jaya RT 2, Gn. Bintang Awai)	7.500 Meter kubik	Ya	900.000.000,00	
2	Dinas Pendidikan	-	-	Pembuatan Tower air bersih	(Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	90.000.000,00	
3	Dinas Pendidikan	-	-	Pagar Beton KantorKorwil Bid Pendidikan	(Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	400.000.000,00	
4	Dinas Pendidikan	-	-	Perehapan Atap dan Plapon kantor Korwil bidang pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	200.000.000,00	
5	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan rumah guru SDN	(Desa Patas II, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	150.000.000,00	
6	Dinas Pendidikan	-	-	Rehap berat gedung SDN Buyui	(Desa Patas II, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	150.000.000,00	
7	Dinas Pendidikan	-	-	Pengecoran lapangan SDN Bipak Kali	(Desa Bipak Kali RT.01, Gn. Bintang Awai)	20.000 Meter kubik	Ya	100.000.000,00	
8	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan kantor SDN Bipak Kali	(Desa Bipak Kali RT.01, Gn. Bintang Awai)	64 Meter kubik	Ya	150.000.000,00	
9	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan Pagar SDN Palu Rejo I ,SDN Palu Rejo II, MTs	(Desa Palu Rejo RT 3 dan RT 16, RT 12, Gn. Bintang Awai)	7.500 Meter kubik	Ya	900.000.000,00	
10	Dinas Pendidikan	-	-	Rehap total 2 unit bangunan SMPS Adveni Sei Pakan	(Sei Paken, Gn. Bintang Awai)	32 Meter kubik	Ya	750.000.000,00	
11	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan pagar tembuk depan TK Isa Pakat Ugang Sayu, SDN 1 UGANG SAYU, SDN 2 UGANG SAYU, SMPN 2 GBA, SMAN 3 GBA	(RT. 06 dan 03, Gn. Bintang Awai)	5 Unit	Ya	500.000.000,00	
12	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan Gedung SDN Muka Haji	(Desa Muka Haji, Gn. Bintang Awai)	189 Meter kubik	Ya	1.400.000.000,00	
13	Dinas Pendidikan	-	-	Pembangunan Pagar Beton SDN Sarimbuah	(RT. 02 Desa Sarimbuah, Gn. Bintang Awai)	50 Meter	Ya	75.000.000,00	
14	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemasangan keramik aula korwilbidang pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai	(Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	50.000.000,00	
15	Dinas Kesehatan	-	-	Pembuatan pagar Beton Puskesmas	(Tabak kanilan, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	300.000.000,00	
16	Dinas Kesehatan	-	-	Rehab Pustu Marga Jaya	(Marga Jaya, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
17	Dinas Kesehatan	-	-	Pembuatan 2 Buah wc pasien	(Tabak Kanilan, Gn. Bintang Awai)	9 Meter kubik	Ya	200.000.000,00	

18	Dinas Kesehatan	-	-	Pembangunan PUSKESMAS INDUK untuk melayani desa Ugang Sayu , Gagutur, Palu Rejo, Wayun, Marga jaya	(RT. 06, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	5.000.000.000,00	
19	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehab berat PUSTU Ngurit beserta pengadaan Alat kesehatan	(Desa Ngurit RT.005, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
20	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Berat PUSTU Desa Wungkur Baru	(RT. 02, Gn. Bintang Awai)	1 Kegiatan	Ya	250.000.000,00	
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Penyambungan Tiang Listrik Induk (PLN) ke RT. 02 s/d RT. 01.	(Marga Jaya RT.02 ke RT.01, Gn. Bintang Awai)	50 Titik	Ya	1.000.000.000,00	
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Jalan Kebun kas Desa	(Desa Ngurit RT.007, Gn. Bintang Awai)	2 Km	Ya	800.000.000,00	
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehab berat Jembatan gang Pelajar	(Tabak kanilan, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lampu Penerang jalan	(Desa Ngurit, Gn. Bintang Awai)	125 Unit	Ya	500.000.000,00	
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Tambatan perahu	(Desa Patas II, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	100.000.000,00	
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Baru Pasar Desa Patas 1 di RT. 002	(Patas I RT. 02, Gn. Bintang Awai)	450 Meter kubik	Ya	1.000.000.000,00	
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Jaringan Listrik	(Desa Palu Rejo RT.4,6,13,17, Gn. Bintang Awai)	45 Titik	Ya	500.000.000,00	
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Sumber Air Bersih	(Malungai Raya, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Lampu Penerang jalan	(Malungai Raya, Gn. Bintang Awai)	120 Titik	Ya	500.000.000,00	
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan Selokan / Parit Desa Malungai Raya	(Malungai Raya, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	2.000.000.000,00	
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan Jembatan Sei. Kacang	(Bintang Ara, Gn. Bintang Awai)	8 Meter	Ya	300.000.000,00	
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Peningkatan Badan Jalan Bintang Ara - Muara Malungai	(Bintang Ara, Gn. Bintang Awai)	15 KmÂ²	Ya	5.000.000.000,00	
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengerasan Badan Jalan Bintang Ara - Patas II/Buyui	(Bintang Ara, Gn. Bintang Awai)	5 KmÂ²	Ya	1.000.000.000,00	
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan BOX CULVERT di ruas jalan Negara ampah Muara Teweh	(RT. 07, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	500.000.000,00	
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Timbunan Labangan SDN Sire	(RT.01,RW.01, Gn. Bintang Awai)	2.500 Meter kubik	Ya	1.000.000.000,00	
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan Turab Timbun	(RT.01,RW.01, Gn. Bintang Awai)	100 Meter kubik	Ya	1.000.000.000,00	
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pemavingan Halaman GKE Imanuel Tabak Kanilan dan Pembuatan Pagar Gereja Katholik Stasi Tabak Kanilan	(RT. 04, 06, Gn. Bintang Awai)	2 Paket	Ya	400.000.000,00	

38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Penambahan Jaringan PLN	(RT. 03, 05 dan 10, Gn. Bintang Awai)	19 Titik	Ya	190.000.000,00	
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan jalan antar desa UGANG SAYU-GAGUTUR-SARIMBUAH menuju KECAMATAN	(Desa Ugang Sayu - Desa Sarimbuah, Gn. Bintang Awai)	20 KmÂ²	Ya	2.000.000.000,00	
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Program Bedah Rumah	(RT. 01, 02, 03, Gn. Bintang Awai)	20 Unit	Ya	400.000.000,00	
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembuatan jalan usaha tani santangan	(RT. 01, Gn. Bintang Awai)	3 KmÂ²	Ya	600.000.000,00	
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehap total jembatan jalan usaha tani di mea pidi	(RT. 06, Gn. Bintang Awai)	130 Meter kubik	Ya	250.000.000,00	
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehap total jalan gang dalam desa//gang uwan	(RT. 02, Gn. Bintang Awai)	344 Meter kubik	Ya	200.000.000,00	
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Rehap total jalan gang dalam desa//gang indun ngara	(RT. 01, Gn. Bintang Awai)	520 Meter kubik	Ya	350.000.000,00	
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Perbaikan dan Peningkatan Akses jalan Poros Desa	(Desa Malungai Raya Menuju Ngurit, Gn. Bintang Awai)	6 KmÂ²	Ya	3.000.000.000,00	
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pengaspalan Jalan Desa Gagutur - Sarimbuah	(Desa Gagutur RT. 01, Gn. Bintang Awai)	6 Km/Jam	Ya	1.000.000.000,00	
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Pembangunan siring bronjong pinggir sei-Ayuh Di Desa Tabak Kanilan	(RT. 07 Desa Tabak Kanilan, Gn. Bintang Awai)	100 Meter	Ya	500.000.000,00	
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Siring Bronjong di Tepi Jalan Patas I menuju Muara Singan RT.006	(Patas I RT.06, Gn. Bintang Awai)	90 Meter kubik	Ya	1.000.000.000,00	
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Siring Bronjong di tepi Sei Ayuh RT. 003 dan RT.004	(Patas I RT.03/04, Gn. Bintang Awai)	900 Meter kubik	Ya	500.000.000,00	
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemasangan Siring Beronjong	(RT. 01, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Siring Brojong Desa Muka Haji	(Desa Muka Haji, Gn. Bintang Awai)	200 Meter kubik	Ya	2.000.000.000,00	
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Cek Dam	(Desa Wayun RT.004, Gn. Bintang Awai)	630 Meter kubik	Ya	1.080.000.000,00	
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Cek Dam	(RT. 04, Gn. Bintang Awai)	630 Meter kubik	Ya	1.080.000.000,00	

54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan Baru Rumah Jabatan Camat	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai	(kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	1.000.000.000,00	
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan perpustakaan desa	(Desa Bipak Kali RT.01, Gn. Bintang Awai)	30 Meter kubik	Ya	100.000.000,00	
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehap GPU Kecamatan	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan siring,penimbunan,dan pengecoran halamanan kantor kecamatan Gunung Bintang Awai.	(Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	800.000.000,00	
59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan siring beton di Tepi Masjid Sabilal Muhlisin RT.001	(Patas I RT. 01, Gn. Bintang Awai)	90 Meter kubik	Ya	150.000.000,00	
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan pagar balai adat	(Desa Bipak Kali RT.04, Gn. Bintang Awai)	500 Meter	Ya	150.000.000,00	
61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembukaan jalan baru Ruhing Raya ke Desa Wungkur Baru	(Desa Ruhing Raya, Gn. Bintang Awai)	6.000 Meter	Ya	1.000.000.000,00	
62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Badan Badan Baru Desa Sire dan badan jalan Sire-Muka Haji - Muara Singan	(RT.01/RT.3,RW.01, Gn. Bintang Awai)	2 Kegiatan	Ya	2.000.000.000,00	
63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Poros Desa Marga Jaya	(Ds.Marga Jaya ke Ds. Dangka ke Desa gagutur, Gn. Bintang Awai)	18 Km	Ya	10.000.000.000,00	
64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyambungan Cor Jl Kayumban-Tabak Kanilan	(RT 004, Gn. Bintang Awai)	200.000 Meter kubik	Ya	14.000.000.000,00	
65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengaspalan jalan Desa	(Desa Patas II, Gn. Bintang Awai)	2 Kg	Ya	500.000.000,00	
66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Bronjong dan Pembangunan Jalan Baru Muara Singan -Luwir	(RT. 02, Gn. Bintang Awai)	2 Kegiatan	Ya	1.000.000.000,00	
67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekontruksi lanjutan jalan dan jembatan Desa Muara singan-Desa Patas I	(Desa Muara Singan, Gn. Bintang Awai)	1 Kegiatan	Ya	1.000.000.000,00	

68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Siring Poros Jln.Desa Wungkur Baru	(RT. 01, 02 dan 03, Gn. Bintang Awai)	8.000 Meter	Ya	1.000.000.000,00	
69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengaspalan Jln.Gotprit Tomang Wungkur Baru Â± 6 KM	(Desa Wungkur Baru, Gn. Bintang Awai)	6 KmÂ²	Ya	10.000.000.000,00	
70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Desa Muka Haji - SMU Tabak Kanilan	(Desa Muka Haji, Gn. Bintang Awai)	12 KmÂ²	Ya	2.000.000.000,00	
71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Muka Haji -Tabak Kanilan	(Desa Muka Haji, Gn. Bintang Awai)	35 KmÂ²	Ya	16.000.000.000,00	
72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Sarimbuah - Gagutur Dalam	(Desa Sarimbuah RT. 02, Gn. Bintang Awai)	7 KmÂ²	Ya	4.000.000.000,00	
73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Astruktur Perbaikan Jalan Gagutur - Ugang Sayu, Marga Jaya	(Desa Gagutur RT. 02, Gn. Bintang Awai)	10 KmÂ²	Ya	1.000.000.000,00	
74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Badan Jalan Baruang-Dusun Ekeng	(RT. 03 Desa Baruang, Gn. Bintang Awai)	2 KmÂ²	Ya	1.000.000.000,00	
75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Badan Jalan Baruang-W.Baru	(Desa Baruang RT-02, Gn. Bintang Awai)	4 KmÂ²	Ya	3.000.000.000,00	
76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Jembatan Sei Layung Penghubung Jalan Dalam DesaBox Culvert 20 M	(RT 003-004, Gn. Bintang Awai)	720 Meter kubik	Ya	1.500.000.000,00	
77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Jembatan Penghubung RT. 005 dan RT. 006	(Patas I RT.05/06, Gn. Bintang Awai)	120 Meter kubik	Ya	150.000.000,00	
78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Sungai Ayuh Jalan Menuju Desa Bintang Ara	(Bintang ara, Gn. Bintang Awai)	150 Meter	Ya	1.000.000.000,00	
79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan menuju BBI	(Desa Palu Rejo RT 16, Gn. Bintang Awai)	90 Meter	Ya	1.200.000.000,00	
80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cor Beton Jalan Pelajar	(Jalan Dalam Desa, Gn. Bintang Awai)	600 Meter	Ya	2.000.000.000,00	
81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan pengerasan jalan dalam desa	(Desa Bipak Kali RT.02 - RT 05, Gn. Bintang Awai)	36 Km	Ya	1.000.000.000,00	
82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Dalam Desa	(Desa Palu Rejo, Gn. Bintang Awai)	5 Km	Ya	1.400.000.000,00	
83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Desa (Aspal)	(Desa Wayun, Gn. Bintang Awai)	3 KmÂ²	Ya	6.000.000.000,00	
84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengaspalan Jalan Desa Gagutur	(Desa Gagutur RT. 01, Gn. Bintang Awai)	4 KmÂ²	Ya	1.000.000.000,00	
85	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Bagi Warga Tidak Mampu	(Kayumban RT 001-005, Gn. Bintang Awai)	24 Meter kubik	Ya	1.050.000.000,00	
86	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Bagi Warga Tidak Mampu (Bedah Rumah) di Desa Tabak Kanilan	(Desa Tabak Kanilan, Gn. Bintang Awai)	3 Unit Rumah	Ya	105.000.000,00	
87	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyambungan Listrik Ke Rt 005 dan penambahan Voltase & Travo	(Kayumban RT 001 - RT.005, Gn. Bintang Awai)	3.000 Meter	Ya	475.000.000,00	
88	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Tabak Kanilan	(Desa Tabak Kanilan, Gn. Bintang Awai)	100 Buah	Ya	1.350.000.000,00	

89	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Bantuan Pembangunan rumah Ibadah,Sarana dan prasarana ibadah untuk GKE UGANG SAYU, GKE ULU JAMAN, KATHOLIK, ISLAM DAN HINDU	(Ugang Sayu, Gn. Bintang Awai)	5 Unit	Ya	250.000.000,00	
90	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Bantuan Hibah Musalla NUR INTAN KAMIL Dusun Luwir	(RT. 08, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	100.000.000,00	
91	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Cor Timbun Halaman Masjid Ruhing Raya	(Desa Ruhing Raya, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	350.000.000,00	
92	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Cor Halaman/Penimbunan Halaman Kantor Desa, BPD dan Posko	(Desa Ruhing Raya, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	400.000.000,00	
93	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembangunan baru Gereja Katholik Santa Sisilia	(Desa Ruhing Raya, Gn. Bintang Awai)	96 Meter	Ya	200.000.000,00	
94	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembanguman Masjid Baru	(RT.02,RW.01, Gn. Bintang Awai)	225 Meter kubik	Ya	1.000.000.000,00	
95	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembuatan Tempat Ibadah	(Desa Gagutur RT. 06, Gn. Bintang Awai)	20 Meter kubik	Ya	10.000.000,00	
96	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	Pembangunan Kantor BPD	(RT. 01 Desa Baruang, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
97	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembangunan Kantor Desa Bintang Ara	(Bintang Ara, Gn. Bintang Awai)	88 Meter kubik	Ya	300.000.000,00	
98	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembangunan Kantor Desa	(RT.02,RW.01, Gn. Bintang Awai)	72 Meter kubik	Ya	500.000.000,00	
99	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembangunan Kantor dan Balai Desa	(Desa Wayun, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	990.000.000,00	
100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembangunan Kantor Desa Muka Haji	(Desa Muka Haji, Gn. Bintang Awai)	120 Meter kubik	Ya	1.200.000.000,00	
101	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembangunan Kantor dan Balai Desa Tabak Kanilan	(Desa Tabak Kanilan RT. 06, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	850.000.000,00	
102	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	Pelatihan Keterampilan/Kursus Mecanik dan operator alat berat	(Desa Marga Jaya, Gn. Bintang Awai)	25 Orang	Ya	250.000.000,00	
103	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	Pelatihan Keterampilan/Kursus Mecanik dan operator alat berat	(Desa Palu Rejo, Gn. Bintang Awai)	25 Orang	Ya	250.000.000,00	
104	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Penyambungan Saluran Irigasi Persawahan	(Kayumban RT 004, Gn. Bintang Awai)	1.500 Meter	Ya	150.000.000,00	
105	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Bibit Jagung dan Pupuk Pertanian	(Desa Ngurit, Gn. Bintang Awai)	200 Hektar	Ya	500.000.000,00	
106	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Pembangunan Tempat Parkir UPT-BPP	(Tabak Kanilan, Gn. Bintang Awai)	18 Meter kubik	Ya	50.000.000,00	

107	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Cor Jalan Menuju Rumah Dinas	(Tabak Kanilan, Gn. Bintang Awai)	110 Meter kubik	Ya	60.000.000,00	
108	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Rehap Ringan Gedung Kantor	(Tabak Kanilan, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	50.000.000,00	
109	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Pembangunan Knopi Teras UPT-BPP	(Tabak Kanilan, Gn. Bintang Awai)	60 Meter kubik	Ya	70.000.000,00	
110	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Pembangunan Gedung Saprodi	(Tabak Kanilan, Gn. Bintang Awai)	32 Meter kubik	Ya	100.000.000,00	
111	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Excapator mini dan Jonder	(Desa Ngurit, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	700.000.000,00	
112	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bantuan Bibit Jagung dan Pupuk Pertanian	(Malungai Raya, Gn. Bintang Awai)	250 Hektar	Ya	500.000.000,00	
113	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Optimalisasi Lahan Pertanian tradisional sawah tadah hujan menuju pertanian Moderen	(RT. 01 sd 05, Gn. Bintang Awai)	500 Hektar	Ya	1.000.000.000,00	
114	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Percetakan sawah lahan Eks Transmigrasi	(Desa Ruhing Raya, Gn. Bintang Awai)	200 Hektar	Ya	300.000.000,00	
115	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	Pemasangan Tower Telkomsel	(Rt. 01, Gn. Bintang Awai)	1 Kegiatan	Ya	1.000.000.000,00	
116	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	Pengembangan Pariwisata Desa	(Desa Wayun, Gn. Bintang Awai)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
117	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	Pembangunan Balai Adat Imanapa	(RT. 03, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	500.000.000,00	
118	Sekretariat Daerah	-	-	Kompoter Kantor Kedamangan dan Adat Dayak Gunung Bintang Awai	(Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	2 Paket	Ya	10.000.000,00	
119	Sekretariat Daerah	-	-	Meubelair Kantor Kedamangan dan Adat Dayak Gunung Bintang Awai	(Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	2 Paket	Ya	45.000.000,00	
120	Sekretariat Daerah	-	-	Rehap EX. Rumah Sakit Tabak Kanilan untuk Kantor Kedamangan dan Kantor Dewan Adat Dayak	(Kecamatan Gunung Bintang Awai, Gn. Bintang Awai)	1 Unit	Ya	350.000.000,00	
	JUMLAH							**144.780.000.000,00**	

DRAFT USULAN KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN JENAMAS
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	STATUS DISETUJUI	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Air (speed) 1 Buah	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Buah	Ya	50.000.000,00	
2	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan Aula Pertemuan Guru 12 x 8 M Rantau Kujang	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	175.000.000,00	
3	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyiringan Gedung Serba Guna	(Desa Tabatan, Jenamas)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
4	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penimbunan Lapangan Yayasan SMA Bina Ilmu Desa Rangga Ilung	(Desa Rangga Ilung, Jenamas)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
5	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan jalan gang menuju SMP Negeri 2 Jenamas	(Desa Rangga Ilung, Jenamas)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
6	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 2 Rantau Kujang	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
7	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Penjaga Sekolah SDN 1 Rantau Kujang	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
8	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Komputer dan Ruang Perpustakaan / UKS SDN Tampulang 8 M x 8 M	(Desa Tampulang, Jenamas)	64 M2	Ya	500.000.000,00	
9	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiringan dan Penimbunan Halaman SDN Tabatan	(Desa Tabatan, Jenamas)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
10	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Halaman Panggung SDN 1 Rantau kujang	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
11	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mobil Ambulanc Darat (Roda 4)	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Unit	Ya	750.000.000,00	
12	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bangunan Baru Rawat Inap	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
13	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembuatan Siring dan Penimbunan Halaman Puskesmas	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
14	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembuatan Gudang Barang dan Ruang Generator Puskesmas	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	

15	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Rumah Dinas Perawat dan Bidan	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	750.000.000,00	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemasangan Jaringan Lampu PLN	(Desa Tabatan, Jenamas)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lanjutan Pembangunan Lapangan Sepak Bola	(Kecamatan Jenamas, Jenamas)	1 Kegiatan	Ya	500.000.000,00	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rehab Berat Kantor Kelurahan Rantau Kujang	(Kelurahan Rantau Kujang, Jenamas)	1 Kegiatan	Ya	500.000.000,00	
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Panggung Lapangan Sepak Bola RT.06	(Desa Rantau Bahuang, Jenamas)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tempat Pembuangan sampah akhir dan Alat Penunjang (tosa 3 buah)	(Kelurahan Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehab Total Kantor Kepala Desa Tampulang 9 M x 10 M	(Desa Tampulang, Jenamas)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rehab berat Kantor Kecamatan Jenamas	(Kecamatan Jenamas, Jenamas)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Serba Guna	(Desa Tampulang, Jenamas)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Total Kantor BPD Tampulang 9 M x 10 M	(Desa Tampulang, Jenamas)	90 M2	Ya	500.000.000,00	
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Lanjutan Cor Beton Gang PNPM	(Kelurahan Rantau Kujang, Jenamas)	550 Meter	Ya	600.000.000,00	
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Tembus Antar Desa Rangga Ilung ke Desa tetangga (Mahajandau dan Murung Kelanis)	(Desa Rangga Ilung, Jenamas)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Jalan Tembus Kecamatan Jenamas ke Arah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel	(Kecamatan Jenamas-Kecamatan Paminggir, Jenamas)	7 Km	Ya	10.000.000.000,00	
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Cor Beton Rantau Kujang ke Rantau Bahuang	(Kecamatan Jenamas, Jenamas)	2 Km	Ya	1.000.000.000,00	
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehab Total Jembatan Sungai Hamsi Kerangka Beton RT. 06	(Desa Rantau Bahuang, Jenamas)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	

30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehab Jembatan Sungai Murung Kerangka Beton Penghubung Ke Kecamatan Jenamas 3 x 15	(Desa Rantau Bahuang, Jenamas)	15 Meter	Ya	500.000.000,00	
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Jalan Usaha Tani Menuju Dadahup Food estate	(Desa Tabatan, Jenamas)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Jalan Pemukiman RT 10 RW 04	(Kelurahan Rantau Kujang, Jenamas)	200 M	Ya	200.000.000,00	
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Dalam Desa Rantau Bahuang RT.10 & RT.11 Karang Paci 3 x 250 M	(Desa Rantau Bahuang, Jenamas)	250 Meter	Ya	650.000.000,00	
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan Damai I	(Kelurahan Rantau Kujang, Jenamas)	550 Meter	Ya	650.000.000,00	
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan Karya Bhakti Kelurahan Rantau Kujang	(Kelurahan Rantau Kujang, Jenamas)	15 Km	Ya	1.500.000.000,00	
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan Damai RT 10 s/d RT 16 Kelurahan Rantau Kujang	(Kelurahan Rantau Kujang, Jenamas)	800 Meter	Ya	1.000.000.000,00	
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Pembangunan Jalan Padat Karya Cor Beton RT 01 sampai dengan RT 09	(RT 01 s.d RT 09 Kelurahan Rantau Kujang Kec. Jenamas, Jenamas)	15 Km	Ya	1.000.000.000,00	
38	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penimbunan Alkah Kuburan Muslimin	(Desa Rangga Ilung, Jenamas)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
39	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mohon Bantuan Sertifikat tanah pada kantor UPT BPP jenamas	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Kegiatan	Ya	150.000.000,00	
40	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mohon Bantuan meja kursi kepala UPT BPP dan kasubag TU Kecamatan Jenamas	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	7.000.000,00	
41	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mohon Bantuan Meja Komputer 2 Buah	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	20.000.000,00	
42	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mohon Bantuan komputer PC dan Printer di UPT BPP Kecamatan Jenamas	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	12.000.000,00	
43	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mohon Rehab rumah jaga UPT BPP dan titian	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
44	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan Kantor UPTD Dermaga Rantau Kujang	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	150.000.000,00	
45	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembuatan bak sampah	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	50.000.000,00	
46	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Pelabuhan SDN Tabatan Beserta Jembatanya ukuran 30 Meter	(Desa Tabatan, Jenamas)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
47	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rehab berat ponton Dermaga Rantau Kujang	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	

48	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rehab berat titian pendaratan Dermaga Rantau Kujang	(Rantau Kujang, Jenamas)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
49	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Sarana Prasarana Lapangan Sepak Bola Desa Rangga Ilung	(Desa Rangga Ilung, Jenamas)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
50	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Speed Boat 40 PK	(Kecamatan Jenamas, Jenamas)	1 Unit	Ya	100.000.000,00	
51	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sepeda Motor Dinas	(Kecamatan Jenamas, Jenamas)	2 Unit	Ya	80.000.000,00	
52	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Alat Transportasi Pemadam Kebakaran	(Kecamatan Jenamas, Jenamas)	1 Unit	Ya	50.000.000,00	
	JUMLAH							**31.544.000.000,00**	

DRAFT USULAN KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN KARAU KUALA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	STATUS DISETUJUI	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	Rehab Kantor Korwil Pendidikan Kec. Karau Kuala	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	250.000.000,00	
2	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	Aula Pertemuan Korwil Pendidikan Kec. Karau Kuala	(Bangkuang,Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Unit	Ya	750.000.000,00	
3	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sekolah Dasar	(Desa Salat Baru RT.001, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	1.300.000.000,00	
4	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Salasar SDN 2 Talio	(Desa Talio, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	400.000.000,00	
5	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kelanjutan Bangun 1 Buah Gedung SDN Muara Arai	(Desa Muara Arai, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
6	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penimbunan Halaman SDN 2 Talio	(Desa Talio, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
7	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembuatan Rumah Dinas Guru SD Desa Tampijak	(Desa Tampijak, Karau Kuala)	4 Unit Rumah	Ya	800.000.000,00	
8	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rumah Dinas Guru SDN Desa Malitin	(Malitin RT.02, Karau Kuala)	2 Unit Rumah	Ya	800.000.000,00	
9	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Siring Beton dan Timbun Halaman Sekolah SMP Desa Bintang Kurung	(Desa Bintang Kurung, Karau Kuala)	125 Meter	Ya	400.000.000,00	
10	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Halaman SDN Desa Malitin	(Malitin RT.02, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	400.000.000,00	
11	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Panggung Halaman SMP Desa Malitin	(Malitin RT.02, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
12	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cor Cakar Ayam Selasar Sekolah/Gang SMP Negeri 4 Karau Kuala	(SMPN 4 Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
13	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pagar Sekolah SMPN 2 Karau Kuala	(SMPN 2 Karau Kuala, Karau Kuala)	100 Meter	Ya	250.000.000,00	
14	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Plafond dan Lantai Keramik SMPN 2 Karau Kuala	(SMPN 2 Karau Kuala, Karau Kuala)	3 Ruang	Ya	210.000.000,00	
15	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehab berat WC Sekolah SMPN 1 Karau Kuala	(SMPN 1 Karau Kuala, Karau Kuala)	12 Meter	Ya	50.000.000,00	
16	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Meubeler SMPN Satap 3 Karau Kuala Meja Kursi	(SMPN Satap 3 Karau Kuala, Karau Kuala)	20 Set	Ya	12.000.000,00	
17	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meja dan Kursi Siswa SMPN 2 Karau Kuala	(SMPN 2 Karau Kuala, Karau Kuala)	250 Set	Ya	200.000.000,00	
18	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan 1 Unit Lengkap TK Negeri Pembina Dharma Wanita Bangkuang	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Unit	Ya	1.000.000.000,00	
19	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung PAUD KB ANANDA	(Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	

20	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sarana/Tempat bermain PAUD KB ANANDA	(Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
21	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan PUSKESDES (Tempat Berobat,Rumah Bidan, Rumah Perawat)	(Desa Salat Baru RT. 002, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	1.200.000.000,00	
22	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Paramedis	(UPTD Puskesmas Bangkuang, Karau Kuala)	2 Unit	Ya	350.000.000,00	
23	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Total Polindes Lama Kelurahan Bangkuang dengan alih fungsi menjadi rumah Dinas Kepala Puskesmas	(Kelurahan Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	750.000.000,00	
24	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Sedang Bangunan Poskesdes Kelurahan Bangkuang	(Kelurahan Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	450.000.000,00	
25	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehab Ringan Bangunan Poskesdes Desa Teluk Betung	(UPTD Puskesmas Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
26	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bangun Titian/Jembatan Puskesmas ke Rumah Dokter	(UPTD Puskesmas Babai, Karau Kuala)	1 Unit	Ya	50.000.000,00	
27	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Dermaga Khusus UPTD Puskesmas Bangkuang	(UPTD Puskesmas Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	2.000.000.000,00	
28	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meubeler dan Alkes Poli Gigi	(UPTD Puskesmas Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
29	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perawat Kesehatan Desa Malitin	(Desa Malitin, Karau Kuala)	1 Orang / Bulan	Ya	20.000.000,00	
30	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Bidan Desa Desa Muara Arai	(Desa Muara Arai, Karau Kuala)	1 Orang / Bulan	Ya	20.000.000,00	
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bangun Baru Gedung TP.PKK Kecamatan	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	1.500.000.000,00	
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bangun Baru Ruangan Kasi Trantib, Ruangan Kasi Kesra dan Ruangan Paten	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Karau Kuala	(Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	

34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rehab Rumah Jabatan Camat Karau Kuala	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	300.000.000,00	
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lanjutan Penyiringan, Penimbunan dan Pemasangan Paping Halaman Kantor Kecamatan Karau Kuala	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengajian / Pendalaman Sungai Hantasan Rambo Desa Muara Arai	(Desa Muara Arai, Karau Kuala)	2 Km	Ya	2.000.000.000,00	
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Aktifasi PDAM Desa Talio	(Desa Talio, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	200.000.000,00	
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas PDAM Desa Babai	(Desa Babai, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangun Baru Kantor BPD	(Desa Malitin, Karau Kuala)	1 Unit	Ya	700.000.000,00	
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyiringan dan Penimbunan Halaman Kantor Kelurahan Bangkuang	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	600.000.000,00	
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Rombong Cafe TP PKK Kecamatan Karau Kuala	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	75.000.000,00	
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Siring Cor Beton dan Penimbunan Lokasi Rencana Taman Kecamatan Karau Kuala	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	1.000.000.000,00	
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	Pembangunan Irigasi untuk Badan Jalan Teluk Betung - Batampang	(Teluk Betung - Batampang, Karau Kuala)	8 Km	Ya	5.000.000.000,00	
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan antar Desa Teluk Sampudau-Muara Talang	(Desa Teluk Sampudau, Karau Kuala)	3 Km	Ya	3.000.000.000,00	
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jalan Talio-Danau Ganting	(Talio-Danau Ganting, Karau Kuala)	1 Km	Ya	1.200.000.000,00	
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cor Beton Jalan Teluk Betung - Batilap	(Teluk Betung - Batilap, Karau Kuala)	7 Km	Ya	4.200.000.000,00	
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cor Beton Jalan Teluk Betung - Babai	(Teluk Betung - Babai, Karau Kuala)	8 Km	Ya	4.500.000.000,00	
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Lanjutan Penyiringan, Pembangunan dan Cor Beton Jalan Kelurahan Bangkuang	((Bangkuang RT. 020 s/d RT.22), Karau Kuala)	1 Km	Ya	2.000.000.000,00	
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Gali Timbun Perluasan Jalan Desa Bintang Kurung	(Bintang Kurung, Karau Kuala)	2 Km	Ya	1.000.000.000,00	
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cor Beton Jalan Mupakat Desa Bintang Kurung	(Bintang Kurung, Karau Kuala)	1 Km	Ya	1.000.000.000,00	

51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan/Pembuatan Jalan Induk Desa yang Baru Desa Tampijak	(Desa Tampijak, Karau Kuala)	2 Km	Ya	2.500.000.000,00	
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Cor Beton Jalan Titian RT.01 Desa Babai	(Desa Babai, Karau Kuala)	180 Meter	Ya	1.200.000.000,00	
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Tembus Desa Salat Baru-Bangkuang	(Salat Baru-Bangkuang, Karau Kuala)	900 Meter	Ya	300.000.000,00	
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembangunan Penyiringan dan Cor Beton Jalan Kantor Pos -KUA s/d Pasar Bangkuang	(RT.22 Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	250 Meter	Ya	1.000.000.000,00	
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Pemukiman Desa Teluk Betung	(Desa Teluk Betung, Karau Kuala)	3 Km	Ya	1.500.000.000,00	
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	Pembuatan Bundaran Simpang 3 Kapolsek Karau Kuala	(Bangkuang RT.22, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
57	Dinas Perumahan, Kawasanan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Bedah Rumah Warga Desa Tampijak	(Desa Tampijak, Karau Kuala)	20 Unit Rumah	Ya	800.000.000,00	
58	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Bangunan Baru Rumah Kepala UPT-BPP	(UPT-BPP Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	450.000.000,00	
59	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Kursi dan Meja Pertemuan Kantor UPT-BPP	(UPT-BPP Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	15.000.000,00	
60	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Kendaraan Sungai (Speed Boat) untuk Kantor UPT-BPP	(UPT-BPP Bangkuang, Karau Kuala)	1 Unit	Ya	50.000.000,00	
61	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Penambahan selasar Kantor UPT-BPP	(UPT-BPP Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	100.000.000,00	
62	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	-	Rehab Plapon Kantor UPT-BPP	(UPT-BPP Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	30.000.000,00	
63	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah Percontohan UPT-BPP	(UPT-BPP, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	150.000.000,00	
64	Dinas Perhubungan	-	-	Pengadaan Sepeda Motor Dinas	(UPTD Dermaga Bangkuang, Karau Kuala)	1 Unit	Ya	30.000.000,00	
65	Dinas Perhubungan	-	-	Pembuatan Pengecoran Lahan Terminal	(UPTD Dermaga Perhubungan Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
66	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembuatan Ponton Ruang Tunggu UPTD Dermaga Bangkuang	(UPTD Dermaga Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	1.500.000.000,00	
67	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembuatan Dermaga (Beton), Kantor UPTD dan Rumah Dinas	(UPTD Dermaga Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	8.000.000.000,00	
68	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembuatan Dermaga Pasar Bangkuang (Beton)	(UPTD Dermaga Bangkuang, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	4.000.000.000,00	

69	Sekretariat Daerah	-	-	Bangun Baru Cor Beton Langgar Nurul Janah Desa Muara Arai	(Desa Muara Arai, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	2.000.000.000,00	
70	Sekretariat Daerah	-	-	Pengadaan Kelotok lengkap dengan mesin Kedamangan	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Buah	Ya	50.000.000,00	
71	Sekretariat Daerah	-	-	Pengadaan Laptop lengkap beserta printer	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	20.000.000,00	
72	Sekretariat Daerah	-	-	Pembangunan Gedung Kantor Kedamangan lengkap dengan mobiler	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	500.000.000,00	
73	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	Pembangunan Mesjid Desa	(Desa Salat Baru RT. 002, Karau Kuala)	1 Paket	Ya	1.200.000.000,00	
74	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Damang memperoleh tunjangan jabatan eselon III/b, sekretaris Eselon IV/a, Mantir Kecamatan IV/b, Mantir Desa V/a	(Bangkuang, Karau Kuala, Karau Kuala)	4 Orang / Bulan	Ya	127.200.000,00	
	JUMLAH							**72.659.200.000,00**	

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga mengusulkan usulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan usulan berjumlah 169 usulan serta pagu total berjumlah Rp740.251.295.274,00. Adapun rincian usulan tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.6
Usulan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

USULAN KEGIATAN UNTUK APBD PROVINSI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	PELAKSANA	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	STATUS DISETUJUI	JUMLAH PAGU (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan gedung baru SMA 5 Tanjung Jawa	(Desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	3 Unit	Disetujui	2,500,000,000.00	ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu dilakukan uji/studi kelayakan. Untuk Pendanaan akan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung

2	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Gedung SMA 2 Dusun Hilir	(Desa Lehai, Kecamatan Dusun Hilir, KAB. BARITO SELATAN)	1 Unit	Disetujui	1,000,000,000.00	ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu dilakukan uji/studi kelayakan. Untuk Pendanaan akan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung

3	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri 2 Dusun Utara	(Desa Tarusan, Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	2 Ruang	Disetujui	900,000,000.00	ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.

4	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Lapangan Upacara (Panggung) SMAN 1 Jenamas	(JL. PELAJAR NO. 66 RANTAU KUJANG KECAMATAN JENAMAS, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	750,000,000.00	ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan memperhatikan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.

5	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penimbunan Halaman untuk Upacara SMAS Bina Ilmu Desa Rangga Ilung	(Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	500,000,000.00	ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan memperhatikan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.

6	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penimbunan dan Cor Beton Halaman Sekolah SMA Negeri 2 Dusun Utara	(Desa Tarusan, Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	300,000,000.00	ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.

7	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Perumahan Guru SMAS Advent	(RT. 02 Desa Tamparak Layung, Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	3 Unit Rumah	Disetujui	750,000,000.00	ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan memperhatikan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.

8	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Dusun Utara	(Desa Tarusan, Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	3 Unit Rumah	Disetujui	750,000,000.00	ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.

9	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Peralatan TIK SMA Negeri 2 Dusun Utara	(Desa Tarusan, Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	250,000,000.00	ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.

10	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik SMKS Bunga Martana	(RT. 03 Desa Tamparak Layung, Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	1 Ruang	Disetujui	400,000,000.00	ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan memperhatikan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.
11	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabiitasi berat ruang kelas dan guru SMK 2 Dusun Selatan	(Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Pending	3,000,000,000.00	

12	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik Administrasi SMKS Bunga Martana (Laptop)	(RT. 03 Desa Tamparak Layung, Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	250,000,000.00	ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan memperhatikan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.

13	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Peralatan Praktik Perbengkelan SMKS Bunga Martana	(RT. 03 Desa Tamparak Layung, Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	300,000,000.00	ditindaklanjuti dengan menyesuaikan sumber dana (bila masuk kedalam menu DAK akan diusulkan melalui kegiatan DAK) dan memperhatikan kemampuan anggaran tersedia, lengkapi proposal beserta data dukung.
14	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Alat Swing Fog (Alat Fogging Portable) di Kabupaten Barito Selatan	(Kecamatan Dusun Selatan Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	12 Unit	Ditolak	138,180,240.00	Menunggu distribusi alar swing fog dari pusat. Pembagiam alat tersebut menunggu areahan pusat.

15	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan	(Kecamatan Dusun Selatan, Desa Sanggu , KAB. BARITO SELATAN)	14 Paket	Ditolak	45,310,000,000.00	kewenangan kabupaten
16	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Obat Buffer Stock (Obat Program dan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar) di Kabupaten Barito Selatan	(Kecamatan Dusun Selatan Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	170,000,000.00	obat Buffer diakomodir dari yang tersedia di provinsi. Khusus obat program droping dari pusat bentuk fisik, tidak ada non fisik (sesuai permintaan kebutuhan kota ke pusat)
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Penyusunan RPPLH	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Kegiatan	Pending	500,000,000.00	
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Penyediaan Sarana Persampahan (Peralatan Kebersihan)	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Kegiatan	Pending	3,225,000,000.00	
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	Penyusunan DDTLH	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Kegiatan	Pending	500,000,000.00	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	150 Meter	Pending	11,262,000,000.00	
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito	(Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	150 Meter	Pending	11,323,500,000.00	
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito	(KECAMATAN KARAU KUALA, KAB. BARITO SELATAN)	150 Meter	Pending	11,318,500,000.00	

23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito	(KECAMATAN DUSUN HILIR, KAB. BARITO SELATAN)	150 Meter	Pending	11,330,500,000.00	
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Turap Sungai Barito	(Kecamatan Jenamas, KAB. BARITO SELATAN)	150 Meter	Pending	11,341,000,000.00	
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Cor Beton Sambungan Jalan SMA Negeri 2 Dusun Utara Sepanjang 300 Meter	(Desa tarusan, Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	900,000,000.00	Diusulkan ke Dinas Perkimtan Provinsi Kalteng
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Peningkatan Jalan Rantau Bahuang-Paminggir HSU (Batas Kalsel)	(Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Pending	22,272,254,268.00	
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan Ruas Mangkatip-Dadahup (Kawasan Penyangga Food Estate)	(KECAMATAN DUSUN HILIR - KECAMATAN JENAMAS, KAB. BARITO SELATAN)	37 Km	Disetujui	187,000,000,000.00	
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan Bangkuang - Telang Siong	(Kecamatan Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN)	8 Km	Disetujui	39,200,000,000.00	
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan Km. 20 HPH - Tabak Kanilan	(Kecamatan Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN)	2 Km	Disetujui	7,990,000,000.00	
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan Rikut Jawu - Tabak Kanilan	(Kecamatan Dusun Selatan - Kecamatan Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN)	12 Km	Disetujui	54,000,000,000.00	
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan BA. Tidja (Ruas 005)	(Kecamatan Dusun Selatan - Kecamatan Karau Kuala, KAB. BARITO SELATAN)	2 Km	Disetujui	8,080,000,000.00	
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan Rantau Bahuang â€“ Paminggir HSU (Batas Kalsel)	(Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Pending	18,000,000,000.00	
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan Sei Tapen Desa Maruga	(DESA MARUGA KECAMATAN DUSUN UTARA, KAB. BARITO SELATAN)	50 Meter	Disetujui	11,200,000,000.00	
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan Sei Tampa Kota Buntok	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	25 Meter	Disetujui	8,345,800,000.00	
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan Surapanji (Ruas Jalan Desa Baru-Teluk Telaga-Muara Talang-Sampudau)	(Kecamatan Dusun Selatan - Kecamatan Karau Kuala, KAB. BARITO SELATAN)	70 Meter	Disetujui	18,262,500,000.00	
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan Ruas Mangkatip-Dadahup (Kawasan Penyangga Food Estate (25 M x 12 Unit))	(KECAMATAN DUSUN HILIR - KECAMATAN JENAMAS, KAB. BARITO SELATAN)	25 Meter	Disetujui	105,590,000,000.00	

37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan Sei Bangkuang Mati	(KELURAHAN BANGKUANG KECAMATAN KARAU KUALA, KAB. BARITO SELATAN)	120 Meter	Disetujui	51,050,488,000.00	
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	100 Orang	Pending	240,000,000.00	
39	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Relokasi Rumah Korban Bencana Se Kab. Barito Selatan	(Se kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	5,000,000,000.00	Dilanjutkan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria dan data dukung serta ketersediaan anggaran
40	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Peningkatan kualitas RTLH di kawasan kumuh 10-15 Ha di Kelurahan Hilir Sper	(Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	500,000,000.00	Dilanjutkan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria dan data dukung serta ketersediaan anggaran
41	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	PEMBANGUNAN RUMAH BETANG	(KABUPATEN BARITO SELATAN, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	12,326,692,766.00	Tidak sesuai kewenangan
42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penanganan PSU Dampak Bencana	(Se kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Pending	2,000,000,000.00	

43	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Gang Al- Hikmah Ruas Jalan H. Indar RT. 19.	(Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	500,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
44	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang AL- Fajar Jalan Kartini RT. 29	(Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan.,, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	500,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
45	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Gang Palapa II Jalan Kaladan RT. 14	(Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	500,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
46	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman dan Pembuatan Siring Gang Beringin I RT. 19.	(Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan.,, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	500,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Kartini Gang Bersama I Kelurahan Hilir Sper.	(Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	500,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
48	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Gang AL- Hilal RT. 19 Kelurahan Hilir Sper.	(Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan.,, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	500,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran

49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gg. Awon Kelurahan Buntok Kota Kawasan Kumuh.	(Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	500,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Mahajandau - Rangga Ilung.	(Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan., Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
51	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Pembangunan Jalan Permukiman Konsolidasi Tanah BPN Desa Sababilah.	(Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
52	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Lanjutan Penyiringan, Pembangunan dan Cor Rabat Beton Jalan Barito Raya - Jembatan Bahalang.	(Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
53	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Lanjutan Penyiringan, Pembangunan, dan Cor Beton Jalan Kelurahan Bangkuang.	(Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
54	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Karya Menuntung (Kelurahan Mengkatip- Damparan-Lehai).	(Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran

55	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Wayun (Batas Desa Palu Rejo- Desa Wayun).	(Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
56	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Jl. Th Ahim Desa Tabak Kanilan.	(Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
57	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jl. Pembangunan RT. 002 s/d RT.008 Kelurahan Pendang.	(Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
58	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Jalan Serunai Desa Tabak Kanilan.	(Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Pelita RT. 14 Sampai Dengan Jalan Padat Karya Kelurahan Pendang	(Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan.,, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
60	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Ruhing Raya RT. 04	(Desa Ruhing Raya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.,, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran

61	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Pembangunan Jalan Permukiman Baru Desa Sire.	(Desa Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
62	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Kelurahan Mangkatip (Jl.Pembangunan - Jl. Mawar).	(Kelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan.,, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
63	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Antar Desa Babai - Talio	(Desa Babai / Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
64	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Batampang RT.04 s/d RT.06.	(Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan., KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
65	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan dan Jembatan Permukiman RT. 01 s/d RT. 04 Desa Ruhing Raya.	(Desa Ruhing Raya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan., KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
66	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Palu Rejo	(Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.,, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran

67	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Pembangunan Jalan dari Jl. Pembangunan / Polsek Ke Jalan Kabupaten di Pendang.	(Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan.,, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
68	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Teluk Timbau RT.01 s/d RT. 04	(Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan., KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
69	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Jl. Tayab Karabung menuju Gg. Swarga RT.24 Buntok	(Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
70	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Pembangunan Baru Jalan Umpu Kakah Desa Sababilah.	(Desa sababilah Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan., KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman Desa Janggi - PT Mutu	(Desa Janggi, Kecamatan Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,000,000,000.00	Pagu disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran

72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pemagangan Dalam Negeri	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	5 Paket	Ditolak	300,000,000.00	Bisa Dialokasikan dari Dana APBN Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri
73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Kejuruan Operator Alat Berat	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	2 Paket	Disetujui	200,000,000.00	Sesuai dengan Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng, pagu menyesuaikan
74	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Kejuruan Menjahit	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	2 Paket	Disetujui	225,000,000.00	Sesuai dengan Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng, pagu menyesuaikan
75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Kejuruan Komputer	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	2 Paket	Disetujui	220,000,000.00	Sesuai dengan Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng, pagu menyesuaikan

76	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Kejuruan Processing	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	2 Paket	Disetujui	225,000,000.00	Sesuai dengan Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng, pagu menyesuaikan
77	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Kejuruan Teknik Las	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	115,000,000.00	Sesuai dengan Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng, pagu menyesuaikan
78	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Kejuruan Teknik Listrik	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	115,000,000.00	Sesuai dengan Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng, pagu menyesuaikan

79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Kejuruan Teknik Otomatif	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	115,000,000.00	Sesuai dengan Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng, pagu menyesuaikan
80	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Pembinaan dan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	100,000,000.00	Sesuai dengan Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng, pagu menyesuaikan
81	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Pembinaan dan Peningkatan Produktivitas bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	100,000,000.00	Sesuai dengan Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng, pagu menyesuaikan
82	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	100,000,000.00	Bukan merupakan kewenangan Provinsi

83	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pengusaha Kecil dan Menengah	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	100,000,000.00	Sesuai dengan Renstra dan Renja Disnakertrans Prov. Kalteng, pagu menyesuaikan
84	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	3 Kelompok	Pending	150,000,000.00	Usulan tidak jelas
85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga kerja Mandiri (TKM) Pemula	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	5 Kelompok	Pending	100,000,000.00	Usulan tidak jelas
86	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	5 Orang	Ditolak	50,000,000.00	Kegiatan pusat/usulan tidak jelas
87	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Teknologi Tepat Guna (TTG)	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	2 Paket	Ditolak	300,000,000.00	Kegiatan pusat/usulan tidak jelas
88	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Padat Karya Infrastruktur	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	5 Paket	Ditolak	500,000,000.00	Kegiatan pusat/usulan tidak jelas
89	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Padat Karya Produktif	(Kecamatan Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	5 Paket	Ditolak	500,000,000.00	Kegiatan pusat/usulan tidak jelas
90	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	Dapur B2SA	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Pending	100,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru

91	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemanfaatan Lahan Perkarangan Bagi KWT	(Desa Dangka, Tanjung Jawa, Teluk Timbau, Ruhing Raya, dan Rampa Mea, KAB. BARITO SELATAN)	5 Kelompok Wanita Tani (KWT)	Pending	125,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
92	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	Sosialisasi Kampung IKLIM	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Kegiatan	Pending	135,000,000.00	Usulkan kembali sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
93	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Pengadaan Alat Pemetaan, Penentuan Titik Koordinat dan Alat Dokumentasi	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Kegiatan	Ditolak	195,000,000.00	Mohon dianggarkan melalui anggaran APBD Kabupaten
94	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pembuatan Pengecoran Lahan Terminal Bangkuang (P=60m, L=25m Total 1.500 mÂ²)	(Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	500,000,000.00	Terminal Tipe B kewenangan provinsi berada pada Terminal Sanggu Buntok

95	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembangunan Tambatan Perahu Desa Patas	(Desa Patas Kecamatan Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	100,000,000.00	usulan dimaksud dapat diakomodir dengan memperhatikan skala prioritas/ketersediaan anggaran, dan untuk menyampaikan data dukung yang memenuhi readiness criteria pada saat forum PD pada tingkat provinsi.

96	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembangunan Dermaga Desa Marawan Lama	(Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	120,000,000.00	usulan dimaksud dapat diakomodir dengan memperhatikan skala prioritas/ketersediaan anggaran, dan untuk menyampaikan data dukung yang memenuhi readiness criteria pada saat forum PD pada tingkat provinsi.
97	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembuatan Dermaga (Beton), Kantor UPTD dan Rumah Dinas (P=80m, L=24m Total 1.920 mÂ²)	(Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	8,000,000,000.00	usulan dimaksud dapat diakomodir dengan memperhatikan skala prioritas/ketersediaan anggaran

98	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembangunan Kantor UPTD Dermaga Rantau Kujang	(Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	200,000,000.00	usulan dimaksud dapat diakomodir dengan memperhatikan skala prioritas/ketersediaan anggaran, dan untuk menyampaikan data dukung yang memenuhi readiness criteria pada saat forum PD pada tingkat provinsi.

99	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rehab Berat Ponton UPTD Dermaga Rantau Kujang	(Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,500,000,000.00	usulan dimaksud dapat diakomodir dengan memperhatikan skala prioritas/ketersediaan anggaran, dan untuk menyampaikan data dukung yang memenuhi readiness criteria pada saat forum PD pada tingkat provinsi.

100	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rehab Berat Titian UPTD Dermaga Rantau Kujang	(Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	200,000,000.00	usulan dimaksud dapat diakomodir dengan memperhatikan skala prioritas/ketersediaan anggaran, dan untuk menyampaikan data dukung yang memenuhi readiness criteria pada saat forum PD pada tingkat provinsi.
101	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembuatan Dermaga Pasar Bangkuang (Beton P=50m, L=30 m Total 1.500 mÂ²)	(Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	4,000,000,000.00	usulan dimaksud dapat diakomodir dengan memperhatikan skala prioritas/ketersediaan anggaran

102	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembuatan Ponton Ruang Tunggu UPTD Dermaga Bangkuang (P=30m, L=15m Total 450 mÂ²)	(Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	1,500,000,000.00	usulan dimaksud dapat diakomodir dengan memperhatikan skala prioritas/ketersediaan anggaran
103	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Bimtek Revitalisasi Koperasi Bagi Koperasi yang Tidak Aktif	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	94,200,000.00	Menyesuaikan Anggaran Tahun 2024
104	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelatihan Tata Kelola Manajemen Perkoperasian	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	95,000,000.00	Melalui Anggaran DAK Non Fisik PK2UMK Tahun 2024
105	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Nenas Madu Bagi UKM	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	33,850,000.00	Melalui Anggaran DAK Non Fisik PK2UMK Tahun 2024
106	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pelatihan Batik Tulis Motif Khas Barito Selatan	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	75,000,000.00	Melalui Anggaran DAK Non Fisik PK2UMK Tahun 2024

107	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Kelapa	(Desa Wayun Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	101,500,000.00	Melalui Anggaran DAK Non Fisik PK2UMK Tahun 2024
108	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Pemula	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	95,000,000.00	Melalui Anggaran DAK Non Fisik PK2UMK Tahun 2024
109	Dinas Pemuda dan Olah Raga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pengadaan Program Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) Kabupaten Barito Selatan	(Stadion Batuah dan Stadion Danau Sadar, KAB. BARITO SELATAN)	1 Kegiatan	Ditolak	3,225,680,000.00	Belum selaras dengan prioritas PD
110	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	Vacum Sealler, Plastik kemasan	(Desa Baru, Jelapat, Buntok Kota, Pendang, Rantau Kujanbg Bangkuang, Muara Arai, Malitin, Janggi, Lehai, Mangkatir, Kalanis, Rangga Ilung, Teluk Timbau, Hilir Sper, KAB. BARITO SELATAN)	60 Unit	Ditolak	90,000,000.00	
111	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	Bantuas Sapras Perikanan Beje (Mesin sedot lumpur dan Salambau beje)	(Batampang, Teluk Timbau, Damparan, Babai, Mengkatip, Lehai, Mahajandau, sei jaya, Rantau Bahuang, Batilap, KAB. BARITO SELATAN)	50 Paket	Ditolak	375,000,000.00	Data usulan belum lengkap
112	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	Bantuan Alat Tangkap Ikan (ATI) Tampirai	(Batampang, Batilap, Sei Jaya, Mahajandau, Pamait, Muara Arai, Dusun Danau Harapan, Dusun Parigi, dusun Bambaler, dusun Pinungku, KAB. BARITO SELATAN)	250 Paket	Pending	437,500,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
113	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	Bantuan Alat Tangkap Ikan (ATI) Rengge	(Tarusan, Bundar, Pendang, Tanjung Jawa, Batampang, Sei Jaya, Muara Arai, Bangkuang, Kalahien, dusun bambaler, dusun Pinungku, KAB. BARITO SELATAN)	250 Paket	Pending	437,500,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru

114	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Pengadaan Sarana Penyimpanan Ikan Segar Hasil Perikanan (Coolbox)	(Desa Batampang, Sungai Jaya, Dusun Bambaler, Dusun Parigi, Dusun Danau Harapan, Batilap dan Bangkuang, KAB. BARITO SELATAN)	100 Unit	Pending	200,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
115	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Pengadaan Aquarium	(UPTD BBI Palu Rejo, KAB. BARITO SELATAN)	25 Unit	Ditolak	100,000,000.00	
116	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Rehab Bak Penampungan Air (Reservoir)	(UPTD BBI Palu Rejo, KAB. BARITO SELATAN)	1 Unit	Ditolak	500,000,000.00	
117	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Happa	(UPTD BBI Palu Rejo, KAB. BARITO SELATAN)	10 Unit	Ditolak	15,000,000.00	
118	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Perlengkapan dan Instalasi Aerasi	(UPTD BBI Palu Rejo, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	25,000,000.00	Data usulan belum lengkap
119	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Peralatan Uji Kualitas Air	(UPTD BBI Palu Rejo, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	20,000,000.00	Data usulan belum lengkap
120	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Rehabilitasi Hatchery	(UPTD BBI Palu Rejo, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	150,000,000.00	Data usulan belum lengkap
121	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Rehabilitasi Kolam	(UPTD BBI Palu Rejo, KAB. BARITO SELATAN)	3 Unit	Pending	585,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
122	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Pakan Calon Induk	(UPTD BBI Palu Rejo, KAB. BARITO SELATAN)	5.000 Kg	Pending	110,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
123	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Penyediaaan Induk Ikan Mas	(UPTD BBI Palu Rejo, KAB. BARITO SELATAN)	5 Paket	Pending	15,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru

124	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Pakan Induk Ikan	(Pendang, KAB. BARITO SELATAN)	78.000 Kg	Pending	1,716,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
125	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Benih Ikan Patin	(Bundar, Rampa Mea, Tamparak Layung, Talekoi, Buntok Kota, Hilir Sper, Danau Sadar, Kalahien, Mabuan, Baru, Teluk Telaga, Jelapat, Pamait, Kalanis, Penda Asam , KAB. BARITO SELATAN)	100.000 Ekor	Pending	250,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
126	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Pendaftaran dan penandaan Kapal Nelayan Perairan Darat (Program Konversi BBM ke Gas)	(Barsel, KAB. BARITO SELATAN)	2.090 Unit	Pending	125,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
127	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pembangunan pos Pengawasan Perikanan di Kampung Nelayan Maju	(Kampung Nelayan Maju (Kalaju) Desa Batampang, Sei Jaya dan Dusun Bambaler desa Baru, KAB. BARITO SELATAN)	3 Unit	Pending	225,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
128	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengolahan Tanah Pengembangan Nenas Parigi (Buka Baru)	(Desa Pararapak Kec. Dusun Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	200 Hektar	Pending	180,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
129	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Cetak Sawah Baru	(Kecamatan Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN)	100 Hektar	Pending	1,600,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
130	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengadaan Alat Pengering Padi	(UPT Penda Asam, KAB. BARITO SELATAN)	2 Unit	Pending	80,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru

131	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengadaan Traktor Roda 4 (Empat)	(Desa Telang Andrau dan Desa Dangka, KAB. BARITO SELATAN)	3 Unit	Pending	794,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
132	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengadaan Excavator Mini	(Brigade, KAB. BARITO SELATAN)	2 Unit	Ditolak	520,000,000.00	Pengadaan Excavator bukan tupoksi dinas TPHP melainkan di Dinas PUPR
133	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengadaan Pompa Air 2 Inci	(Pararapak, Buntok kota, Tanjung Jawa, Desa Baru, Penda Asam, Lembeng, Muka Haji dan Pendang, KAB. BARITO SELATAN)	20 Unit	Pending	97,200,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
134	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengadaan Traktor Roda 2 Rotary	(Desa Pararapak, Danau Sadar, Mabuan, Buntok Kota, dan Desa Dangka, KAB. BARITO SELATAN)	6 Unit	Pending	168,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
135	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Bantuan Benih Semangka dan Saprodinya	(Desa Pamangka dan Desa Mangaris, KAB. BARITO SELATAN)	50 Hektar	Pending	50,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
136	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Bantuan Bibit Nenas dan Saprodinya	(Desa Pararapak, KAB. BARITO SELATAN)	5 Paket	Pending	100,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru

137	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Bantuan Bibit Bawang Merah dan Saprodinya	(Desa Sababilah, KAB. BARITO SELATAN)	5 Hektar	Pending	400,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
138	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pelatihan Petugas Inseminator dan Sapras IB	(Buntok Kota, KAB. BARITO SELATAN)	5 Orang	Pending	50,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
139	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Sarana Mesin Pemecah Pakan Ternak	(Desa Marga Jaya dan Desa Wayun, KAB. BARITO SELATAN)	2 Unit	Pending	20,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
140	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Ternak Itik dan Pakan	(Buntok Kota, KAB. BARITO SELATAN)	400 Ekor	Pending	40,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
141	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ayam Buras dan Pakan	(Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	200 Ekor	Pending	40,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
142	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ayam Ras dan Pakan	(Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	100 Ekor	Pending	30,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
143	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Ternak Babi	(Desa Sanggu, KAB. BARITO SELATAN)	120 Ekor	Pending	36,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru

144	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Itik Petelor/Pakan	(Buntok Kota, KAB. BARITO SELATAN)	120 Ekor	Pending	17,400,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
145	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Sapi	(Desa Baru, KAB. BARITO SELATAN)	16 Ekor	Pending	128,000,000.00	Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru
146	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bibit Sawit dan Saprodinya	(UPT BPP Dangka, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	200,000,000.00	Bisa diakomodir Kabupaten sendiri atau usulkan melalui mekanisme e proposal
147	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengadaan Traktor Roda 4 (Empat)	(UPT BPP Dangka, KAB. BARITO SELATAN)	1 Unit	Ditolak	150,000,000.00	Bisa diusulkan melalui e proposal APBN Bidang PSP
148	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Bantuan Sarana Produksi Karet	(Desa Marga Jaya, Desa Tamparak, Desa Dangka dan Desa Muara Ripung, KAB. BARITO SELATAN)	7 Paket	Pending	70,000,000.00	
149	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Bantuan Bibit Karet Unggul dan Saprodi	(Desa Tarusan Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	21.500 Batang	Pending	537,500,000.00	
150	Dinas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Bantuan Bibit Kakao dan Saprodi	(Desa Tarusan Kec. Dusun Utara, KAB. BARITO SELATAN)	25.800 Batang	Pending	774,000,000.00	

151	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	Pembangunan Los Pasar Desa Hingan di Kecamatan Dusun Utara	(Desa Hingan Kecamatan Dusun Utara Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	150 Buah	Ditolak	1,000,000,000.00	Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar) menjadi kewenangan kab/kota, bukan kewenangan provinsi.

152	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai	(Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	2,500,000,000.00	Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar) menjadi kewenangan kab/kota, bukan kewenangan provinsi.

153	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pembangunan Los Pasar Desa Madara di Kecamatan Dusun Selatan	(Desa Madara Kecamatan Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	300,000,000.00	Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar) menjadi kewenangan kab/kota, bukan kewenangan provinsi.

154	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pembangunan Los Pasar Desa Bantai Bambure di Kecamatan Dusun Utara	(Desa Bantai Bambure di Kecamatan Dusun Utara Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	900 Buah	Ditolak	1,500,000,000.00	Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar) menjadi kewenangan kab/kota, bukan kewenangan provinsi.

155	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pembangunan Los Pasar Desa Hingan di Kecamatan Dusun Utara	(Desa Hingan Kecamatan Dusun Utara Kab. Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	150 Buah	Ditolak	1,000,000,000.00	Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar) menjadi kewenangan kab/kota, bukan kewenangan provinsi.
156	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri, Nyepi, Natal dan Tahun Baru Tahun 2024)	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Ditolak	800,000,000.00	anggaran tidak tersedia.
157	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pelatihan Pembuatan Makanan Berbahan Dasar Buah, Sayur dan Lainnya	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	116,250,000.00	menyesuaikan anggaran yang tersedia.
158	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pengadaan Peralatan Mesin Pencacah/Pelumat Daging dan Pembuat Bakso untuk Pelaku Industri Kecil dan Menengah	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	200,000,000.00	menyesuaikan anggaran yang tersedia.

159	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pengadaan Peralatan Mesin Jahit Untuk Pelaku Industri Kecil dan Menengah	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	100,000,000.00	menyesuaikan anggaran yang tersedia.
160	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pengadaan Mesin Pengemas Makanan Untuk IKM	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	100,000,000.00	menyesuaikan anggaran yang tersedia.
161	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pelatihan Keterampilan Anyaman Rotan, Bambu dan Purun Bagi UKM	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	116,250,000.00	menyesuaikan anggaran yang tersedia.
162	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pelatihan Pembuatan Makanan Prozen Food Berbahan Dasar Ikan	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	116,250,000.00	menyesuaikan anggaran yang tersedia.
163	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Bimtek/Pelatihan Keterampilan Pembuatan Interior dan Exterior Mebeuler Berbahan Dasar Kombinasi Kayu dan Rotan	(Kabupaten Barito Selatan, KAB. BARITO SELATAN)	1 Paket	Disetujui	150,000,000.00	menyesuaikan anggaran yang tersedia.
164	Dinas Pemuda dan Olah Raga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelatihan Wasit Pencak Silat Kabupaten Barito Selatan	Buntok, Kabupaten Barito Selatan	1 Kegiatan	Ditolak	100,000,000.00	belum sesuai prioritas Provinsi
165	Dinas Pemuda dan Olah Raga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelatihan Wasit Bulu Tangkis di Kabupaten Barito Selatan	Buntok, Kabupaten Barito Selatan	1 Kegiatan	Ditolak	100,000,000.00	belum sesuai prioritas Provinsi
166	Dinas Pemuda dan Olah Raga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelatihan Wasit Bola Voli Kabupaten Barito Selatan	Buntok, Kabupaten Barito Selatan	1 Kegiatan	Ditolak	100,000,000.00	belum sesuai prioritas Provinsi
167	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Selatan, Kelurahan Hilir Sper	1Paket	Ditolak	337,800,000.00	Kewenangan Daerah
168	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	PELATIHAN PENGOLAHAN MAKANAN RINGAN	KABUPATEN BARITO SELATAN	3Paket	Disetujui	600,000,000.00	menyesuaikan anggaran yang tersedia.

169	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pelatihan Sadar Wisata Dan Sapta Pesona di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024	Buntok, Kabupaten Barito Selatan	1 Kegiatan	Disetujui	120,000,000.00	Usulan akan disampaikan ke bidang teknis Disbudpar sambil memperhatikan ketersediaan anggaran. Mohon terus berkoordinasi dengan bidang terkait
	JUMLAH							**740,251,295,274.00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Adapun capaian Indikator Makro Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021-2022 dan target pada Tahun 2024 bisa dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6.1
Capaian Indikator Makro Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2021-2022 dan Target Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	REALISASI		TARGET
		2021	2022	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,54	71,01	70,25
2.	Angka Kemiskinan	4,62	4,88	4,42
3.	Angka Pengangguran	4,16	3,53	3,90
4.	Pertumbuhan Ekonomi	2,13	6,28	2,70
5.	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	50,8 Juta	61,6 Juta	60,14 Juta
6.	Indeks Gini	0,29	0,31	0,266

Pemerintah kabupaten Barito Selatan juga telah menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKD merupakan indikator sasaran dari RPD.

Indikator kinerja yang dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah bisa dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

No.	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	TARGET TAHUN				Kondisi Akhir (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,30 (%)	2,50 Persen (%)	2,70 Persen (%)	2,90 Persen (%)	3,10 Persen (%)	3,10 Persen (%)
2	Indeks Gini	0.286 Angka	0.276 Angka	0.266 Angka	0.256 Angka	0.246 Angka	0,246 Angka
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,64 Poin	72,90 Poin	73,17 Poin	73,43 Poin	73,70 Poin	73,70 Poin
4	Persentase Penduduk Miskin	4,62 (%)	4,52 Persen (%)	4,42 Persen (%)	4,32 Persen (%)	4,22 Persen (%)	4,22 Persen (%)
5	Indeks Resiko Bencana	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka
6	Indeks Reformasi Birokrasi	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,22 (%)	70,30 Persen (%)	70,35 Persen (%)	70,40 Persen (%)	70,50 Persen (%)	70,50 Persen (%)
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,16 (%)	4,00 Persen (%)	3,90 Persen (%)	3,70 Persen (%)	3,50 Persen (%)	3,50 Persen (%)
9	Persentase Penegakkan Perda	80 (%)	85 (%)	90 (%)	95 (%)	100 (%)	100 (%)

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Inflasi	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen
2	PDRB Per Kapita	58,82 Juta	59,25 Juta	60,14 Juta	61,08 Juta	61,97 Juta	061,97 Juta
3	PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	82,8 Milyar Rupiah	85,8 Milyar Rupiah	87,8 Milyar Rupiah	89,8 Milyar Rupiah	90,8 Milyar Rupiah	70,8 Milyar Rupiah
4	Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	593 Milyar Rupiah	611 Milyar Rupiah	629 Milyar Rupiah	647 Milyar Rupiah	665 Milyar Rupiah	665 Milyar Rupiah
5	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi mantap	52,22 Persen	53,25 Persen	54,39 Persen	55,58 Persen	56,81 Persen	56,81 Persen
6	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	48,50 Persen	49,42 Persen	50,54 Persen	51,80 Persen	53,15 Persen	53,15 Persen
7	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	119 jumlah	110 jumlah	102 jumlah	92 jumlah	83 jumlah	83 jumlah
8	Persentase Layanan Angkutan Darat dan Sungai	47,00 Persen	50,00 Persen	55,00 Persen	60,00 Persen	65,00 Persen	65,00 Persen
9	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
10	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
11	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
12	Timbunan Sampah yang	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00

	Ditangani						
13	Ketaatan Terhadap RTRW	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen
14	Angka Kriminalitas yang Tertangani	5,13 Permiriad (persepuluhribu)	4,92 Permiriad (persepuluhribu)	4,81 Permiriad (persepuluhribu)	4,29 Permiriad (persepuluhribu)	3,69 Permiriad (persepuluhribu)	3,69 Permiriad (persepuluhribu)
15	Persentase gangguan keteriban umum yang ditangani	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen
16	Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (Persen)	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen
17	Tingkat Pengangguran	5,09 Persen	5,01 Persen	4,93 Persen	4,86 Persen	4,81 Persen	4,81 Persen
18	Persentase PMKS yang Tertangani	75,05 Persen	80,05 Persen	85,05 Persen	90,05 Persen	95,05 Persen	95,05 Persen
19	Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih	37,76 Persen	42,76 Persen	47,76 Persen	52,76 Persen	57,76 Persen	57,76 Persen
20	Rasio Rumah Layak Huni	19,00 Persen	19,01 Persen	19,02 Persen	19,03 Persen	19,04 Persen	19,04 Persen
21	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,30 Persen	0,23 Persen	0,15 Persen	0,08 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen
22	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,15 Persen	87,15 Persen	91,15 Persen	94,15 Persen	96,15 Persen	96,15 Persen
23	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	64,59 Persen	66,59 Persen	68,59 Persen	70,59 Persen	72,59 Persen	72,59 Persen
24	Cakupan Pelayanan Bencana	29,41 Persen	47,06 Persen	64,71 Persen	82,35 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
25	Persentase Penurunan Jumlah Titik Api (Hot Spot)	90,00 Persen	92,00 Persen	95,00 Persen	97,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
26	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90 Persen	92 Persen	95 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen

27	Opini BPK	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria
28	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	70,23 Indeks	71,55 Indeks	72,92 Indeks	74,35 Indeks	75,18 Indeks	75,18 Indeks
29	Nilai SAKIP	CC Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	BB Kriteria	BB Kriteria
30	Nilai LPPD	Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria
31	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,75 Persen	6,00 Persen	6,50 Persen	7,00 Persen	7,50 Persen	7,50 Persen
32	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen
33	Indeks Desa Membangun	0,6522(berkembang) Indeks	0,6722(berkembang) Indeks	0,6822(berkembang) Indeks	0,6922(berkembang) Indeks	0,7082(maju) Indeks	0,7082(maju) Indeks
34	Rasio Penduduk ber-KTP	90 Persen	92 Persen	95 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen
35	Jumlah Kajian Kelitbangan	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	2 Kajian	2 Kajian
36	Indeks SPBE	2,20 Indeks	2,50 Indeks	2,80 Indeks	3,00 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks
37	Rata-rata Lama Sekolah	8,95 Tahun	9,05	9,15 Tahun	9,25 Tahun	9,35 Tahun	9,35 Tahun
38	Harapan Lama Sekolah	12,66 Tahun	12,77 Tahun	12,88 Tahun	12,99 Tahun	13,11 Tahun	13,11 Tahun
39	Umur Harapan Hidup	67,19 Tahun	67,29 Tahun	67,39 Tahun	67,49 Tahun	67,59 Tahun	67,59 Tahun
40	Produktivitas Total Daerah	127,43 juta rupiah	129,34 juta rupiah	131,28 juta rupiah	133,24 juta rupiah	135,24 juta rupiah	135,24 juta rupiah
41	Persentase Wirausaha Muda	37,00 Persen	41,00 Persen	45,00 Persen	48,00 Persen	51,00 Persen	51,00 Persen
42	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	32,20 Indeks	33,36 Indeks	34,45 Indeks	35,58 Indeks	36,30 Indeks	36,30 Indeks
43	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,78 (%)	91,80 Persen (%)	91,82 Persen (%)	91,84 Persen (%)	91,86 Persen (%)	91,86 Persen (%)
44	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8,00 Festival	10,00 Festival	12,00 Festival	14,00 Festival	16,00 Festival	16,00 Festival

45	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	22,56 Persen	23,53 Persen	25,71 Persen	27,78 Persen	27,78 Persen	27,78 Persen

Tabel 6.4

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,3	2,50	2,70	2,9	3,1	3,10
2.	Laju Inflasi (%)	3,58	3,25	3,19	3,1	3,05	3,05
3.	PDRB per Kapita (Jutaan Rp)	42.121	47.975	51.229	54.720	58.474	58.474
4.	Indeks Gini	0,278	0,273	0,270	0,268	0,265	0,265
5.	Angka Kemiskinan (%)	5,04	4,98	4,93	4,88	4,82	4,82
6.	Indeks Pembangunan Manusia	70,54	70,94	71,34	71,74	72,14	72,14
7.	Angka Pengangguran Terbuka (%)	2,12	2,08	2,04	2,00	1,92	1,92
8.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,95	9,15	9,25	9,45	9,65	9,65
10.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,65	12,73	12,80	12,88	12,95	12,95
11.	Angka Melek Huruf	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	10,75
12.	Umur Harapan Hidup	67,19	67,20	67,22	67,24	67,26	67,26
13.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	20,72	21,06	21,41	21,75	22,10	22,10
II.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						

1.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%)	53,55	53,88	54,22	54,56	54,89	54,89
2.	Desa Swasembada (%)	19,35	24,19	30,65	35,48	40,32	40,32
3.	Rasio Ketergantungan	43,17	43,37	43,67	43,97	44,17	44,17
III.	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR**						
A.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**						
1.	**Pendidikan**						
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	69,61	73,89	78,45	83,28	88,41	88,41
1.2.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	98,32	98,32	98,52	98,72	99,00	99,00
1.3.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	89,52	92,52	94,52	96,52	98,52	98,52
1.4.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,28	0,28	0,18	0,18	0,08	0,08
1.5.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,39	0,39	0,29	0,29	0,19	0,19
1.6.	Angka Kelulusan SD/MI	90	92	95	97	100	100
1.7.	Angka Kelulusan SMP/MTs	90	92	95	97	100	100
1.8.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	92,72	93,72	94,72	95,72	96,72	96,72
1.9.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	92,57	93,57	94,57	95,57	96,57	96,57
2.	**Kesehatan**						
2.1.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	93,16	95,31	97,51	99,76	100	100
2.2.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96,57	96,77	96,98	97,19	97,40	97,40
2.3.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90	92	95	97	100	100

2.4.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	0,19	2,19	4,19	6,19	8,19	8,19
2.5.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	57,75	59,80	61,93	64,14	66,42	66,42
2.6.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	90	92	95	97	100	100
2.7.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	90	92	95	97	100	100
2.8.	Cakupan Kunjungan Bayi	90	92	95	97	100	100
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	373,96	374,96	375,96	376,96	377,96	377,96
3.2.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	2035,49	2036	2036,50	2037	2037,50	2037,50
3.3.	Rumah Tangga Bersanitasi	13,38	14,38	15,38	16,38	17,38	17,38
3.4.	Kawasan Kumuh	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
3.5.	RTH per Satuan Luas Wilayah	25,31	25,81	26,31	26,81	27,31	27,31
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
4.1.	Rumah Tangga Penguna Air Bersih	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00
4.2.	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	0,013	0,011	0,009	0,007	0,0065	0,0065
4.3.	Rumah Layak Huni	2,245	96,84	97,91	98,67	100,00	100,00
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						
5.1.	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	90	92	95	97	100	100
5.2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	75	75	75	75	75	75

	Daerah Layanan WMK						
5.3.	Angka Tunawisma	0,45	0,45	0,43	0,40	0,40	0,40
5.4	Angka Prostitusi	1,25	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15
5.5.	Persentase Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15	0,60
5.6.	Persentase Angka Kasus Perjudian	0,70	0,68	0,66	0,60	0,60	6,65
5.7.	Persentase Angka Kasus Penggunaan Narkotika dan Barang Zat Adektif	6,75	6,70	6,68	6,65	6,65	7,00
6.	**Sosial**						
6.1.	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)	69,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00
6.2.	Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	39,00	48,00	64,00	80,00	90,00	90,00
6.3.	Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	40,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
6.4.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	83,17	84,31	85,27	86,52	88,17	88,17
6.5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	90	92	95	97	100,00	100,00
6.6.	Persentase RTLH Masyarakat Miskin yang ditangani	65,75	75,75	85,75	95,75	100,00	100,00
6.7.	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.8.	Persentase Manula Potensial yang Mendapat Perlindungan	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.9.	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program	90	92	95	97	100,00	100,00

	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
B.	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR**						
1.	**Tenaga Kerja**						
1.1.	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	9,07	26,17	27,22	28,62	34,62	34,62
1.2.	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	33,33	34,91	35,19	36,33	37,79	37,79
1.3.	Persentase Perusahaan yang membuat & Mengesahkan Peraturan Perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan	28,38	31,94	35,71	39,71	39,71	39,71
1.4.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	5	5	5	4	4	4
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
2.1.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,38	54,88	55,38	55,88	56,38	56,38
2.2.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	24,14	24,50	25,00	25,45	26,00	26,00
2.3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31,30	31,50	31,70	31,90	32,10	32,10
3.	**Pangan**						
3.1.	Rasio Tingkat Konsumsi Energi	1 : 0,92	1 : 0,94	1 : 0,96	1 : 0,98	1 : 1	1 : 1
3.2.	Rasio Tingkat Konsumsi Protein	1 : 1,44	1 : 1,39	1 : 1,34	1 : 1,29	1 : 1,24	1 : 1,24
3.3.	Konsumsi Sayur dan Buah (gr/kap/hari)	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	125,00
3.4.	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kg)	12.000	17.000	22.000	27.000	32.000	32.000
3.5.	Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	66,67	77,78	77,78	88,89	88,89	88,89

4.	**Pertanahan**						
4.1.	Persentase Sertifikat Lahan Pemda yang Terbit	1,017	1,117	1,217	1,317	1,417	1,417
4.2.	Persentase Izin Lokasi yang Berjalan Sesuai Aturan	90	92	95	97	100,00	100,00
4.3.	Persentase Konflik Lahan yang Ditangani	90	92	95	97	100,00	100,00
5.	**Lingkungan Hidup**						
5.1.	Persentase Pengurangan Sampah	20,00	22,00	24,00	26,00	27,00	27,00
5.2.	Persentase Penanganan Sampah	41,28	42,44	43,62	44,84	45,13	45,13
5.3.	Indeks Kualitas Air	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
5.4	Indeks Kualitas Udara	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
5.5	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
5.6	Timbunan Sampah yang Ditangani	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
6.1.	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00
6.2.	Cakupan Penerbitan KTP	99,98	99,98	99,98	99,99	100,00	100,00
6.3.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	95,03	96,03	97,03	98,03	99,03	99,03
6.4.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
6.5.	Cakupan Penerbitan Akte Kematian	70,00	75,00	78,00	81,00	85,00	85,00
7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
7.1.	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00

7.2.	Persentase Perempuan yang Aktif di Desa	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
7.3.	Persentase Desa Berkriteria Baik	80,00	90,00	93,00	96,00	100,00	100,00
7.4.	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69,86	70,71	71,46	72,12	73,07	73,07
8.2.	Cakupan *unmet need*	15,51	14,63	13,86	13,20	12,62	12,62
8.3.	Ratio ASFR 15-19 Tahu	48,48	48,56	48,32	48,11	47,94	47,94
9,	**Perhubungan**						
9.1.	Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Baik	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
9.2.	Persentase Pengoperasioan Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	65,46	65,92	66,38	66,84	67,30	67,30
9.3.	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	4,50	4,00	3,00	2,50	2,00	2,00
10.	**Komunikasi dan Informatika**						
10.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
11.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
11.1.	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
11.2.	Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan Berupa Dana Yang Diakses dari Perbankan, Tingkat Penjualan, Kualitas SDM, Sistem Administrasi dan Keuangan, Jumlah Pelanggan yang dilayani	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00

12.	**Penanaman Modal**						
12.1.	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Investasi Daerah	24,38	25,79	26,5	28,62	28,62	28,62
13.	**Kepemudaan dan Olahraga**						
13.1.	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	60,00	60,00	60,00	60,00	75,00	75,00
13.2.	Persentase Pemuda yang Aktif Berorganisasi	2,50	2,50	2,75	2,75	3,00	3,00
13.3.	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
13.4	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,17
14.	**Statistik**						
14.1.	Persentase Ketersediaan Data Informasi Statistik Sektoral	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
15.	**Persandian**						
15.1.	Persentase Berita Sandi Daerah yang diamankan	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
16.	**Kebudayaan**						
16,1.	Persentase Benda dan Situs Cagar Budaya yang dikelola	40,00	60,00	60,00	80,00	100,00	100,00
16.2.	Persentase Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan	86,00	89,00	93,00	95,00	100,00	100,00
16.3.	Persentase Pengelolaan Situs Bersejarah	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
17.	**Perpustakaan**						
17.1.	Persentase Jenis Koleksi Perpustakaan Umum Daerah	68,17	69,67	71,17	72,67	74,17	74,17
17.2.	Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dikembangkan	17,65	19,44	21,62	23,68	25,64	25,64

18.	**Kearsipan**						
18.1.	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa, BUMN, BUMD, Perguruan tinggi yang Tertib Arsip	66,30	72,57	78,85	85,13	91,40	91,40
18.2.	Persentase OPD, Kelurahan, Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD yang Dibina/Dilatih	57,14	64,29	71,43	78,57	85,71	85,71
C.	**FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN**						
1.	**Pariwisata**						
1.1.	Destinasi Wisata yang Berkualitas (%)	7,40	24,07	42,59	66,67	100,00	100,00
1.2.	Persentase Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi / Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	41,45	45,60	50,16	55,17	60,69	60,69
1.3.	Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi	5,00	10,00	25,00	35,00	50,00	50,00
2.	**Pertanian**						
2.1.	Peningkatan Kelompok Tani (%)	2,10	2,44	2,51	2,57	2,62	2,62
2.2.	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK (Sesuai kriteria Permentan Nomor 91 Tahun 2013)	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00
3.	**Perdagangan**						
3.1.	Persentase Penurunan Pelanggaran Alat UTTP	20,00	16,00	14,00	8,00	4,00	4,00
3.2.	Persentase Penurunan Peredaraan Barang dan Jasa yang tidak sesuai Standar	10,81	8,11	7,50	5,00	2,50	2,50
3.3.	Persentase tingkat Ketersediaan Sarana dan	23,53	40,00	60,00	80,00	100,00	100,0

	Prasarana Perdagangan yang Representatif						
4.	**Perindustrian**						
4.1.	Persentase Peningkatan IKM yang Berbasis Teknologi	74,74	75,89	76,92	79,47	82,39	82,39
4.2.	Persentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM	14,12	15,46	16,07	16,15	16,56	16,56
5.	**Kelautan dan Perikanan**						
5.1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	724,77	768,26	814,36	863,22	915,01	915,01
5.2.	Persentase Nelayan yang Naik Kelas	25,50	28,87	34,43	37,60	40,00	40,00
5.3.	Persentase Pembudidaya Ikan yang Naik Kelas	40,55	44,29	48,,34	53,09	56,50	56,50
D	**PENUNJANG URUSAN**						
1.	**Perencanaan Pembangunan**						
1.1.	Persentase Program RKPD yang dijabarkan dalam APBD Tiap Tahunnya	75,00	77,00	79,00	80,00	82,00	82,00
1.2.	Persentase Keselarasan RKPD terhadap PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap Program RKP	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
1.4.	Persentase Keselarasan Renstra PD terhadap RPD	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
1.5.	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	75,00
1.6.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang lengkap, akurat dan	90,00	92,00	95,00	97,00	100	100

	Tepat Waktu						
2.	**Keuangan**						
2.1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**						
3.1.	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
3.2.	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	63,50	65,62	66,25	68,75	75,00	75,00
3.3.	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	13,33	17,14	20,00	22,20	24,44	24,44
4.	**Penelitian dan Pengembangan**						
4.1.	Persentase Penelitian yang Mendukung Perencanaan yang dilaksanakan	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
4.2.	Persentase Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dari Hasil Penelitian	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang dikembangkan	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
5.	**Pengawasan**						
5.1.	% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan yang Material	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
5.2.	% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Selesai	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00

	ditindaklanjuti						
5.3.	Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan BPK yang Selesai ditindaklanjuti	9	8	7	6	5	5
5.4.	% Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditangani	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00
5.5.	% OPD yang Maturitas SPIP Minimal Level 3	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00
6.	**Sekretariat Dewan**						
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja
6.2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda
6.3.	Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan daerah periode tahun 2024 yang disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran serta Program Prioritas Pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. RKPD Tahun 2024 ini juga merupakan kompilasi dari Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah (Renja-PD) di Kabupaten Barito Selatan yang disusun berdasarkan skala prioritas.

Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Barito Selatan.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN